FREE INDONESIA

JILID 2

SAVE NUSANTARA



Prayogi R. Saputra, S.IP., M.M., Ph.D
Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., M. H.

GLOSARIUM

A

Aplikasi (Applications)

Dalam analogi sistem komputer, aplikasi adalah perangkat lunak yang menjalankan fungsi tertentu di atas sistem operasi dan dapat dipasang, diperbarui, maupun dihapus tanpa mengubah struktur inti sistem. Dalam konteks kenegaraan, istilah ini dianalogikan sebagai pemerintah, yakni instrumen operasional sementara yang menjalankan fungsi administrasi, pelayanan publik, kebijakan, dan pengelolaan negara.

B

Bangsa

Kesatuan manusia yang terbentuk melalui pengalaman sejarah, kesadaran identitas, nilai, kebudayaan, cita-cita, dan rasa kebersamaan yang melampaui ikatan keluarga maupun kelompok sosial. Dalam kerangka buku ini, bangsa merupakan kesadaran kolektif yang menyatukan masyarakat dalam identitas dan tujuan bersama, yang kemudian menjadi salah satu landasan pembentukan negara.

BIOS (Basic Input/Output System)

Sistem dasar yang tertanam pada perangkat komputer untuk mengatur proses awal aktivasi perangkat sebelum sistem utama berjalan. Dalam analogi negara, BIOS merepresentasikan konstitusi sebagai aturan dasar yang menentukan bagaimana negara dibentuk, dijalankan, dan dibatasi.

Boot Process
Tahapan awal ketika sistem komputer dinyalakan hingga seluruh komponen inti siap beroperasi. Dalam analogi negara, *boot process* menggambarkan mekanisme legal pembentukan pemerintahan, transisi kekuasaan, dan aktivasi sistem kenegaraan sesuai konstitusi.

D

Device
Perangkat fisik yang menjadi wadah seluruh komponen sistem digital. Dalam konteks analogi negara, *device* merepresentasikan tubuh fisik negara, mencakup wilayah, rakyat, institusi, sumber daya alam, dan infrastruktur nasional.

F

Firmware
Lapisan perangkat lunak dasar yang tertanam langsung pada perangkat keras dan berfungsi sebagai penghubung awal antara *hardware* dengan sistem utama. Dalam analogi buku ini, *firmware* disepadankan dengan aturan dasar negara.

Full Root Access
Hak akses tertinggi dalam sistem komputer yang memungkinkan pengendalian penuh atas seluruh konfigurasi, izin, dan operasi sistem. Dalam analogi negara, konsep ini merepresentasikan kedaulatan penuh rakyat sebagai pemilik sah negara.

H

Hardware

Komponen fisik dari suatu sistem komputer, seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat pendukung lainnya. Dalam konteks kenegaraan, *hardware* merepresentasikan unsur fisik negara, termasuk wilayah, aparatur, lembaga, penduduk, serta sumber daya material.

K

Keluarga

Unit sosial paling dasar tempat manusia pertama kali membangun hubungan, nilai, tanggung jawab, identitas, dan kehidupan bersama. Dalam kerangka buku ini, keluarga merupakan fondasi awal pembentukan masyarakat, karena dari keluargalah manusia belajar hidup dalam keteraturan, saling menghormati, berbagi peran, dan membangun tanggung jawab bersama.

Kernel

Inti utama sistem operasi yang mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk pengelolaan sumber daya sistem. Dalam analogi negara, kernel merepresentasikan Pancasila sebagai nilai inti yang menjadi dasar operasional seluruh sistem kebangsaan.

Kernel Panic

Kondisi kegagalan fatal pada inti sistem yang menyebabkan komputer tidak dapat beroperasi secara normal. Dalam konteks negara, istilah ini menggambarkan krisis nilai atau kegagalan ideologis yang menyebabkan disorientasi dalam hukum, pemerintahan, dan kehidupan kebangsaan.

Konstitusi
Aturan dasar tertinggi yang mengatur struktur, kewenangan, hak, kewajiban, dan mekanisme kerja negara. Dalam analogi teknologi pada buku ini, konstitusi disepadankan dengan BIOS atau *firmware*.

M

Malware
Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, mengganggu, atau mengambil alih sistem secara tidak sah. Dalam analogi negara, *malware* merepresentasikan kekuatan destruktif seperti oligarki, kolonialisme modern, mafia kebijakan, atau infiltrasi kepentingan yang merusak kedaulatan nasional.

Masyarakat
Kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan sosial dan membentuk hubungan, norma, nilai, kebiasaan, serta tata kehidupan bersama. Dalam analogi buku ini, masyarakat merupakan jaringan sosial yang terbentuk dari keluarga dan individu yang saling berinteraksi sebelum berkembang menjadi kesadaran kebangsaan dan organisasi negara.

O

***Operating System* (Sistem Operasi)**

Lingkungan utama yang menjalankan fungsi-fungsi sistem dan menjadi perantara antara inti sistem dengan aplikasi pengguna. Dalam analogi kenegaraan, sistem operasi merepresentasikan peradaban bangsa, yakni sistem nilai, budaya, etika, dan cara hidup yang menerjemahkan prinsip dasar negara ke dalam kehidupan nyata.

Ownership Capture

Keadaan ketika kepemilikan formal masih berada pada pemilik sah, namun kendali nyata telah berpindah ke pihak lain. Dalam konteks negara, istilah ini menjelaskan situasi ketika rakyat secara hukum berdaulat, tetapi secara praktik kehilangan kendali atas sistem negara.

P

Pancasila

Dasar filosofis bangsa Indonesia yang dalam kerangka analogi buku ini diposisikan sebagai kernel negara, yakni inti nilai yang mengatur orientasi seluruh sistem kebangsaan.

Pemerintah

Organisasi operasional negara yang menjalankan administrasi, kebijakan, pelayanan publik, dan pengelolaan pemerintahan. Dalam analogi komputer, pemerintah disepadankan dengan aplikasi, bukan pemilik sistem.

Peradaban Nusantara
Keseluruhan sistem nilai, budaya, etika, tradisi, cara berpikir, dan praktik hidup bangsa Indonesia yang menjadi medium penerjemah nilai dasar negara ke dalam realitas sosial.

R

Rakyat
Pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokratis. Dalam analogi sistem teknologi buku ini, rakyat diposisikan sebagai *root owner*, yakni pemilik utama sistem negara.

Root Owner
Pemilik tertinggi dalam sistem komputer yang memiliki kewenangan mutlak atas seluruh sistem. Dalam analogi negara, istilah ini digunakan untuk menggambarkan posisi rakyat sebagai pemilik sah negara.

S

Sovereignty (Kedaulatan)
Kewenangan tertinggi untuk menentukan arah, aturan, dan keputusan dalam suatu sistem politik. Dalam analogi teknologi, kedaulatan setara dengan hak root access.

System Hijacking
Pengambilalihan kendali sistem oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi sah. Dalam analogi negara, istilah ini menggambarkan pembajakan negara oleh kekuatan

non-konstitusional atau kepentingan yang menyimpang dari kedaulatan rakyat.

System Integrity
Kondisi keutuhan sistem sehingga seluruh komponen bekerja sesuai desain asli. Dalam konteks negara, system integrity menggambarkan terjaganya kedaulatan, konstitusi, nilai dasar, dan independensi sistem kebangsaan.

T

Temporary Governance
Konsep yang menempatkan pemerintahan sebagai struktur operasional sementara, bukan pemilik negara. Pemerintah dapat berubah melalui mekanisme konstitusional tanpa mengubah kepemilikan negara oleh rakyat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga buku "**FREE INDONESIA, SAVE NUSANTARA - JILID 2**" ini dapat hadir ke hadapan pembaca.

Buku ini merupakan kelanjutan utuh dari pemikiran yang telah diletakkan sebelumnya dalam "**BUKU FREE INDONESIA SAVE NUSANTARA - JILID 1**". Jika pada jilid pertama kita telah membedah anatomi sistem kebangsaan di mana rakyat adalah *root owner*, Pancasila adalah kernel, konstitusi adalah *firmware*, dan pemerintah adalah application serta menyadari bagaimana root access rakyat telah dibajak oleh *malware* kekuasaan, maka pada jilid kedua ini kita akan bergerak menuju akar persoalan yang lebih mendalam dan langkah pemulihannya.

Banyak dari kita sering bertanya-tanya, mengapa kerusakan dan persoalan di negeri ini terus berulang melintasi berbagai rezim dan generasi? Jilid kedua ini hadir untuk menegaskan satu kesimpulan penting. Indonesia sesungguhnya tidak pernah kekurangan orang baik, namun kita sedang hidup di dalam "Negara Salah Desain". Berbagai masalah sistemik terjadi bukan sekadar karena kelemahan operator atau pemimpin, melainkan karena Detail Engineering Design (DED) atau konstitusi kita menghasilkan konsekuensi yang menjauh dari tujuan kedaulatan rakyat. Sistem negara kita sedang mengalami *governance collapse* yang terjadi secara perlahan. Ibarat sebuah *device* yang masih

menyala dan beroperasi, namun telah kehilangan arah kalibrasi dan sibuk mempertahankan dirinya sendiri.

Karena persoalannya berada pada tataran desain dan struktur, maka upaya tambal sulam atau sekadar mengganti pemimpin tidak akan pernah cukup. Buku ini menawarkan jalan keluar yang sistematis dengan membawa negara masuk ke dalam fase *Recovery Mode*. Ini adalah fase keberanian intelektual untuk melakukan diagnosis jujur, mulai dari *malware* scan, *access audit*, hingga sovereignty audit, guna memastikan siapa pemilik negara ini sebenarnya.

Lebih jauh, buku ini meletakkan peta jalan untuk melakukan Re-Install Sistem Negara. Melakukan reinstall bukan berarti menghancurkan negara, melainkan mengembalikan sistem agar selaras dengan kedaulatan rakyat. Melalui amandemen konstitusi sebagai perbaikan *firmware* dan penggunaan referendum sebagai hak verifikasi tertinggi pemilik sistem, kita akan mengembalikan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai *root administrator* dan rumah kedaulatan. Kemerdekaan adalah awal, namun kebebasan (*Free* Indonesia) baru terwujud ketika rakyat secara nyata mampu mengoreksi arah negaranya.

Selain menata ulang negara, buku ini juga mengajak pembaca untuk menyelamatkan fondasi peradaban (*Save* Nusantara) dengan memulihkan keluarga, pendidikan, bahasa, spiritualitas, hingga martabat ekonomi. Keseluruhan upaya ini membutuhkan hadirnya System Guardians (Para Penjaga Bangsa), seribu *root users* yang sadar, serta

kepemimpinan berparadigma Wali Raja. Semua itu demi satu tujuan akhir, melakukan *booting* ulang menuju Indonesia Baru yang mewujudkan adikuasa kebahagiaan dan kesejahteraan sejati, Gemah Ripah Loh Jinawi.

Semoga buku ini dapat menjadi pemantik kesadaran bahwa negara ini adalah sistem yang dirancang oleh manusia, dan oleh karenanya, selalu dapat dipulihkan dan diperbaiki oleh manusia. Negara harus kembali menjadi milik rakyat.

Selamat membaca, dan mari bersiap menyambut mentari terbit pagi ini di Nusantara.

Jakarta, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

GLOSARIUM ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAGIAN V – FREE INDONESIA **1**
BAB 15 - NEGARA SALAH DESAIN **2**
15.1. Ketika Kerusakan Terus Berulang 2
15.2. Negara sebagai Bangunan Besar 7
15.3. Fondasi yang Menentukan Segalanya 13
15.4. Ketika Denah Salah 19
15.5. Ketika Struktur Tidak Menopang Tujuan 24
15.6. Ketika DED Salah Sejak Awal 30
15.7. Renovasi Tidak Akan Menyelesaikan Semuanya 36
15.8. Mengapa Pemimpin Baik Pun Sering Gagal 42
15.9. Negara yang Perlu Direkayasa Ulang 49
15.10. Indonesia Tidak Kekurangan Orang Baik 55
BAB 16 - DEVICE YANG RUSAK **60**
16.1. Ketika Sistem Masih Menyala 60
16.2. Kerusakan yang Tidak Terlihat 66
16.3. Institusi yang Mulai Malfunction 72
16.4. Ketika Pengawasan Tidak Lagi Mengawasi 78
16.5. *Governance Collapse* yang Terjadi Perlahan 84

16.6. *Misalignment* antara Tujuan dan Operasi 90
16.7. Ketika Institusi Bekerja untuk Mempertahankan Diri 96
16.8. Negara yang Kehilangan Arah Kalibrasi 102
16.9. Mengapa Reformasi Sering Gagal 107
16.10. Mengganti Operator Tidak Cukup 114
BAB 17 - RECOVERY MODE 121
17.1. Ketika Sistem Tidak Lagi Normal 121
17.2. Mengapa *Recovery Mode* Diperlukan 127
17.3. *Malware* Scan: Mencari Sumber Kerusakan 133
17.4. Mengenali *Malware* yang Menyamar sebagai Fitur 139
17.5. *Access Audit*: Siapa Memegang Hak Akses Negara 144
17.6. *Root Owner* dan *Root Administrator* 150
17.7. Constitutional Review sebagai Pemeriksaan *Firmware* 156
17.8. Menguji Kembali Jalur Kedaulatan 161
17.9. Sovereignty Audit: Siapa Pemilik Negara Sebenarnya 166
17.10. Sebelum *Reboot* Dilakukan 172
BAB 18 - RE-INSTALL SISTEM NEGARA 178
18.1. Mengapa Tambal Sulam Tidak Cukup 178
18.2. Reinstall Bukan Menghancurkan Negara 183
18.3. Kembali kepada *Root Owner* 189

18.4. *Recovery Root Access* 195
18.5. MPR sebagai *Root Administrator*..... 200
18.6. Redesign Arsitektur Ketatanegaraan 205
18.7. *Constitutional Reinstall* melalui Amandemen..... 211
18.8. Referendum sebagai Verifikasi Pemilik Sistem 216
18.9. Negara sebagai Sistem yang Dapat Dipulihkan..... 222
18.10. Menuju Negara yang Selaras dengan Kedaulatan Rakyat 228
BAB 19 - FREE INDONESIA 234
19.1. Merdeka Belum Tentu Bebas..... 234
19.2. *Free* Indonesia Bukan Anti Negara..... 239
19.3. Negara Kembali Menjadi Milik Rakyat..... 245
19.4. MPR sebagai Rumah Kedaulatan..... 251
19.5. Konstitusi sebagai Instrumen, Bukan Berhala..... 256
19.6. Referendum sebagai Hak Mengoreksi Negara..... 261
19.7. Dari Demokrasi Elektoral Menuju Kedaulatan Rakyat 267
19.8. *Free* Indonesia adalah Indonesia yang Berdaulat..... 272
19.9. Manifesto Sekolah Negarawan 278
19.10. *Free* Indonesia 283

BAGIAN VI – SAVE NUSANTARA 290
BAB 20 - MENYELAMATKAN KELUARGA 291

20.1. Keluarga sebagai Fondasi Peradaban 291
20.2. Rumah adalah Sekolah Pertama 297
20.3. Orang Tua sebagai Penjaga *Operating System* Keluarga 302
20.4. Moral Tidak Diajarkan, Tetapi Dihidupkan 308
20.5. Ketika Rumah Kehilangan Arah 313
20.6. Menyelamatkan Bangsa Dimulai dari Rumah 319
20.7. *Save Nusantara* Berawal dari Keluarga 325
BAB 21 - MENYELAMATKAN PENDIDIKAN 332
21.1. Pendidikan sebagai Jalan Peradaban 332
21.2. Krisis Literasi, Krisis Berpikir 337
21.3. Pendidikan Kewarganegaraan yang Kehilangan Negara 343
21.4. Kesadaran Sejarah sebagai Identitas Bangsa 349
21.5. Sekolah Menghasilkan Pekerja atau Negarawan? 355
21.6. Guru sebagai Arsitek Peradaban 361
21.7. AI, Teknologi, dan Masa Depan Pendidikan 367
21.8. Menyelamatkan Indonesia melalui Pendidikan 374
BAB 22 - MENYELAMATKAN BAHASA DAN BUDAYA 381
22.1. Bahasa sebagai Cara Berpikir Bangsa 381
22.2. Krisis Bahasa Indonesia di Era Digital 387

22.3. Budaya sebagai *Operating System* Peradaban 393
22.4. Globalisasi, Identitas, dan Kedaulatan Budaya 399
22.5. Bahasa, Budaya, dan Soft Power Indonesia 405
22.6. Menyelamatkan Bahasa dan Budaya untuk Menyelamatkan Peradaban 411
BAB 23 - MENYELAMATKAN SPIRITUALITAS ... 418
23.1. Manusia Bukan Hanya Makhluk Ekonomi 418
23.2. Spiritualitas sebagai Fondasi Peradaban 424
23.3. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sumber Moral Bangsa 431
23.4. Agama sebagai Tata Nilai, Bukan Sekadar Identitas 437
23.5. Krisis Spiritualitas di Era Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) 443
23.6. Menyelamatkan Spiritualitas untuk Menyelamatkan Indonesia 450
BAB 24 - MENYELAMATKAN MARTABAT EKONOMI 457
24.1. Ekonomi untuk Memuliakan Manusia 457
24.2. Krisis Martabat dalam Sistem Ekonomi Modern 464
24.3. Pancasila sebagai *Kernel* Ekonomi Indonesia 471
24.4. Negara, Pasar, dan Rakyat 477

24.5. Menuju Peradaban Ekonomi Nusantara 484
24.6. Menyelamatkan Martabat Ekonomi untuk Menyelamatkan Indonesia 491

BAGIAN VII – SYSTEM GUARDIANS 499
BAB 25 - EMPAT PENJAGA BANGSA 500
25.1. Mengapa Sebuah Bangsa Membutuhkan Penjaga Sistem 500
25.2. Penjaga Intelektual 507
25.3. Penjaga Spiritualitas 513
25.4. Penjaga Budaya 520
25.5. Penjaga Patriotisme 527
25.6. Menjaga Penjaga Bangsa 534
BAB 26 - SERIBU ROOT USERS 542
26.1. Mengapa Bangsa Tidak Membutuhkan Sejuta Pemimpin 542
26.2. *Root Users*: Penguasa Moral Rakyat Sadar 549
26.3. Root User Bukan Penguasa 556
26.4. Membangun Seribu *Root Users* 563
26.5. Ketika Seribu *Root Users* Menggerakkan Nusantara 569
BAB 27 - WALI RAJA 577
27.1. Mengapa Kekuasaan Selalu Memerlukan Penjaga 577
27.2. Wali Raja: Paradigma Kepemimpinan Nusantara 584
27.3. Guardian Leadership Model 591
27.4. Jiwa Kepemimpinan Wali Raja 597

27.5. Ketika Negarawan Menjadi Wali Raja 604
27.6. Sekolah Negarawan dan Lahirnya Wali Raja 611

BAGIAN VIII – INDONESIA BARU 618
BAB 28 - BOOTING ULANG BANGSA 619
28.1. Mengapa Indonesia Perlu Di-*Boot* Ulang 619
28.2. Indonesia Baru Bukan Negara Baru 625
28.3. *Boot Sequence* Kebangkitan Bangsa 631
28.4. Momentum Sejarah Indonesia 638
28.5. Indonesia Baru 645
BAB 29 - GEMAH RIPAH LOH JINAWI 653
29.1. Gemah Ripah Loh Jinawi: Filosofi Kemakmuran Nusantara 653
29.2. Kemakmuran adalah Akibat, Bukan Tujuan 659
29.3. Negara sebagai Pengelola Amanah Kekayaan 666
29.4. Negara sebagai Arsitek Ekosistem Ekonomi 673
29.5. Kedaulatan Ekonomi dalam Era Global 680
29.6. Ekonomi Peradaban 687
29.7. Dari *Root Users* Menuju Kemakmuran Nasional 694
29.8. Gemah Ripah Loh Jinawi 701
BAB 30 - NUSANTARA ADIKUASA KEBAHAGIAAN 708

30.1. Mengapa Kebahagiaan Menjadi Tujuan Akhir Negara 708
30.2. Gemah Ripah Loh Jinawi sebagai Ekonomi Kebahagiaan 715
30.3. Mengukur Kebahagiaan Bangsa 722
30.4. Nusantara Adikuasa Kebahagiaan 729

EPILOG - Mentari Terbit Pagi Ini 737

BAGIAN V – FREE INDONESIA

BAB 15
NEGARA SALAH DESAIN

15.1. Ketika Kerusakan Terus Berulang

Salah satu pertanyaan paling penting dalam kehidupan berbangsa justru merupakan pertanyaan yang paling jarang diajukan secara mendasar. Mengapa berbagai persoalan yang sama terus muncul dari waktu ke waktu meskipun pemimpin telah berganti, partai politik telah berganti, kabinet telah berganti, bahkan generasi yang memimpin negara juga telah berganti? Mengapa korupsi tetap menjadi masalah setelah puluhan tahun reformasi? Mengapa ketimpangan hukum terus menjadi keluhan yang berulang? Mengapa birokrasi yang dianggap lamban dan berbelit tidak kunjung hilang meskipun berbagai program reformasi birokrasi terus diluncurkan? Mengapa rakyat masih sering merasa jauh dari pusat pengambilan keputusan walaupun mekanisme demokrasi telah berlangsung berkali-kali?

Pada umumnya, jawaban yang paling mudah ditemukan adalah dengan menunjuk individu tertentu. Ketika ekonomi memburuk, perhatian diarahkan kepada presiden yang sedang menjabat. Ketika hukum dianggap tidak adil, kesalahan diarahkan kepada aparat penegak hukum. Ketika kebijakan publik menimbulkan polemik, kritik tertuju kepada menteri atau anggota parlemen yang terlibat dalam proses pembentukannya. Cara berpikir seperti itu memang sangat manusiawi karena manusia lebih mudah melihat wajah dibanding melihat struktur. Kesalahan seseorang dapat dikenali

dengan cepat, sementara kesalahan sistem sering kali tersembunyi di balik berbagai lapisan yang tidak tampak secara langsung.

Namun terdapat sebuah persoalan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan pendekatan tersebut. Jika akar masalah benar-benar berada pada individu, maka pergantian individu seharusnya mampu menghilangkan masalah yang sama. Jika persoalan utama terletak pada pemimpin tertentu, maka ketika pemimpin tersebut diganti keadaan seharusnya berubah secara mendasar. Jika sumber kerusakan berada pada satu kelompok pejabat tertentu, maka ketika kelompok tersebut tidak lagi berkuasa, pola kerusakan yang sama seharusnya tidak terulang kembali. Akan tetapi realitas yang terjadi menunjukkan sesuatu yang berbeda. Nama-nama berubah, wajah-wajah berganti, koalisi pemerintahan silih berganti, tetapi sebagian besar persoalan pokok tetap hadir dalam bentuk yang relatif sama.

Fenomena tersebut sesungguhnya tidak hanya terjadi dalam dunia pemerintahan. Dalam dunia teknik dan rekayasa, keadaan yang serupa sering ditemukan ketika sebuah sistem mengandung cacat desain. Sebuah mesin yang dirancang secara keliru mungkin masih dapat beroperasi. Operator dapat berganti berkali-kali. Komponen tertentu dapat diperbarui. Perawatan dapat dilakukan secara rutin. Namun selama desain dasarnya tidak berubah, kerusakan yang sama akan terus muncul pada titik yang sama. Setiap kali masalah diperbaiki, masalah baru muncul dengan pola yang hampir identik. Pada tahap tertentu, perhatian tidak lagi diarahkan

kepada operator atau komponen yang rusak, melainkan kepada rancangan yang menjadi fondasi seluruh sistem.

Analogi yang sama dapat digunakan untuk memahami kehidupan bernegara. Sebuah negara pada hakikatnya adalah sistem yang sangat besar dan sangat kompleks. Di dalamnya terdapat rakyat, konstitusi, lembaga negara, hukum, birokrasi, aparat, mekanisme ekonomi, serta berbagai instrumen lain yang saling berhubungan. Ketika berbagai persoalan muncul secara berulang selama puluhan tahun, bahkan melintasi berbagai rezim dan generasi kepemimpinan, muncul alasan yang kuat untuk mempertimbangkan bahwa persoalannya mungkin tidak hanya berada pada para pelaku yang menjalankan sistem, melainkan juga pada desain yang mengatur bagaimana sistem tersebut bekerja.

Pemikiran inilah yang menjadi titik berangkat Sekolah Negarawan dalam membaca persoalan Indonesia. Selama ini terlalu banyak energi bangsa dihabiskan untuk memperdebatkan siapa yang harus memimpin negara. Setiap pergantian pemilu selalu disertai harapan bahwa hadirnya pemimpin baru akan menyelesaikan berbagai persoalan yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Harapan tersebut tentu tidak salah. Kepemimpinan yang baik memang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas penyelenggaraan negara. Namun terdapat pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar siapa yang memimpin, yaitu bagaimana bangunan negara itu sendiri dirancang.

Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh akar dari seluruh persoalan. Sebab sehebat apa pun seorang pemimpin, seluruh ruang geraknya tetap dibatasi oleh struktur yang menaunginya. Sebagaimana seorang pengemudi tidak dapat mengubah desain kendaraan yang dikendarainya saat sedang berada di jalan, seorang pemimpin juga tidak sepenuhnya bebas dari batasan yang diciptakan oleh desain negara. Sistem yang dirancang dengan baik akan membantu menghasilkan pemerintahan yang baik. Sebaliknya, sistem yang dirancang secara keliru akan terus memproduksi persoalan bahkan ketika dijalankan oleh orang-orang yang memiliki niat baik.

Dalam dunia arsitektur terdapat sebuah prinsip yang sangat sederhana tetapi sangat penting. Ketika retakan yang sama terus muncul pada bagian bangunan yang sama, persoalannya jarang berada pada cat dinding. Persoalannya juga jarang berada pada penghuni bangunan. Retakan yang berulang biasanya menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam pada struktur yang menopang bangunan tersebut. Semakin sering kerusakan muncul pada titik yang sama, semakin besar kemungkinan bahwa sumber persoalannya berada pada desain yang menjadi fondasi bangunan.

Indonesia menghadapi fenomena yang sangat mirip. Korupsi berulang dalam berbagai bentuk. Penyalahgunaan kekuasaan muncul dalam berbagai generasi pemerintahan. Ketimpangan hukum terus menjadi perdebatan. Hubungan antara rakyat dan negara terus mengalami jarak yang sulit dipulihkan.

Birokrasi terus menjadi objek reformasi tanpa pernah benar-benar selesai direformasi. Berbagai gejala tersebut bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Seluruhnya merupakan sinyal bahwa terdapat sesuatu yang lebih mendasar daripada sekadar kesalahan individu.

Karena itu, pembahasan dalam bagian ini tidak lagi berfokus pada siapa yang melakukan kesalahan. Fokus utama akan diarahkan kepada bangunan yang memungkinkan kesalahan tersebut terus berulang. Perhatian tidak lagi semata-mata tertuju kepada para penghuni sistem, melainkan kepada desain sistem itu sendiri. Sebab ketika kerusakan yang sama muncul berulang kali meskipun para pelakunya telah berganti, kemungkinan terbesar bukanlah karena bangsa ini kekurangan orang baik, melainkan karena bangsa ini terlalu lama hidup di dalam sebuah bangunan yang sejak awal dirancang secara keliru.

Dari titik inilah tesis utama Sekolah Negarawan mulai memperoleh bentuk yang lebih jelas. Persoalan terbesar Indonesia mungkin bukan terletak pada siapa yang memimpin, melainkan pada bagaimana negara dirancang. Persoalan terbesar Indonesia mungkin bukan krisis tokoh, melainkan krisis desain. Dan selama desain tersebut tidak pernah diperiksa secara jujur, bangsa ini akan terus sibuk mengganti penghuni bangunan tanpa pernah menyentuh gambar bangunan yang menjadi sumber utama berbagai kerusakan yang terus berulang.

15.2. Negara sebagai Bangunan Besar



Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi dalam memahami negara adalah melihat negara hanya sebagai kumpulan pejabat, lembaga, peraturan, dan aktivitas pemerintahan yang berlangsung setiap hari. Cara pandang seperti ini membuat perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada apa yang tampak di permukaan daripada pada struktur yang menopangnya. Ketika terjadi masalah, perhatian segera diarahkan kepada presiden, menteri, anggota parlemen, hakim, atau pejabat tertentu. Ketika muncul keberhasilan, pujian juga diberikan kepada individu yang sedang memegang kekuasaan. Padahal sebagaimana sebuah bangunan besar, kualitas sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berada

di dalamnya, tetapi terutama oleh bagaimana bangunan tersebut dirancang sejak awal.

Tidak ada gedung bertingkat yang dibangun tanpa gambar. Tidak ada jembatan yang mampu menahan beban berat tanpa perhitungan struktur yang matang. Tidak ada rumah yang nyaman dihuni hanya karena memiliki penghuni yang baik. Sebelum sebuah bangunan berdiri, selalu terdapat proses perancangan yang menentukan bentuk, fungsi, kekuatan, dan hubungan antar komponennya. Arsitek menyusun konsep ruang. Insinyur menghitung kekuatan fondasi dan struktur. Perencana menentukan bagaimana setiap bagian saling terhubung agar bangunan mampu menjalankan tujuan yang diharapkan. Kesalahan pada tahap perancangan sering kali tidak langsung terlihat ketika bangunan baru selesai dibangun, tetapi akan mulai menampakkan dampaknya ketika bangunan digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Negara sesungguhnya bekerja dengan prinsip yang tidak jauh berbeda. Negara bukan sekadar organisasi kekuasaan. Negara adalah sebuah konstruksi besar yang dirancang untuk mengatur hubungan antara rakyat, hukum, pemerintahan, dan berbagai institusi yang berada di dalamnya. Hubungan tersebut tidak muncul secara alami. Hubungan tersebut lahir dari sebuah desain yang menentukan siapa memegang kewenangan, siapa melakukan pengawasan, bagaimana keputusan diambil, bagaimana kekuasaan dibatasi, dan bagaimana kedaulatan dijalankan.

Karena itu, ketika Sekolah Negarawan menggunakan istilah "Negara Salah Desain", yang

dimaksud bukanlah sekadar kritik terhadap kebijakan tertentu atau kritik terhadap pemerintahan tertentu. Yang sedang dipersoalkan adalah kemungkinan bahwa terdapat kesalahan pada gambar besar yang menjadi dasar berdirinya bangunan negara itu sendiri. Sebab sebagaimana sebuah rumah yang salah denah akan terus menimbulkan ketidaknyamanan bagi siapa pun yang menghuninya, negara yang salah desain juga akan terus menghasilkan persoalan yang sama meskipun diisi oleh orang-orang yang berbeda.

Bayangkan sebuah rumah yang dibangun dengan penempatan ruang yang tidak tepat. Dapur berada terlalu jauh dari ruang makan. Kamar mandi berada di lokasi yang sulit dijangkau. Jalur sirkulasi membuat penghuni harus berputar-putar untuk mencapai ruangan tertentu. Ventilasi tidak mampu mengalirkan udara dengan baik. Pada hari pertama rumah tersebut mungkin masih terlihat indah. Tembok masih kokoh. Cat masih bersih. Seluruh ruangan tampak berfungsi. Namun setelah digunakan selama bertahun-tahun, penghuni mulai menyadari bahwa masalah yang muncul bukan berasal dari cara mereka menggunakan rumah tersebut, melainkan dari desain rumah yang memang tidak mendukung kebutuhan penghuninya.

Fenomena serupa dapat ditemukan dalam kehidupan bernegara. Sebuah negara dapat memiliki konstitusi yang tebal, lembaga yang lengkap, pemilu yang rutin, dan aparatur yang sangat besar. Namun seluruh atribut tersebut belum tentu menjamin bahwa negara mampu menjalankan tujuan pembentukannya secara efektif. Yang lebih penting adalah apakah seluruh

komponen tersebut dirancang untuk bekerja secara harmonis dalam melayani rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Dalam glosarium yang digunakan dalam buku ini, negara telah dijelaskan melalui berbagai analogi sistem. Pancasila dipahami sebagai *kernel* yang menjadi inti nilai dan arah dasar sistem. Konstitusi dipahami sebagai *firmware* yang menentukan cara kerja negara. Rakyat merupakan *root owner* sebagai pemilik sah kedaulatan. MPR diposisikan sebagai *root administrator* yang menerima mandat untuk menjaga sistem atas nama rakyat. Pemerintah berfungsi sebagai pelaksana operasional yang menjalankan berbagai fungsi negara sehari-hari. Seluruh konsep tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa negara bukan sesuatu yang muncul secara spontan, melainkan sebuah sistem yang dirancang dengan hubungan-hubungan tertentu antara setiap komponennya.

Dalam dunia arsitektur, bangunan yang baik bukanlah bangunan yang terlihat megah dari luar semata. Bangunan yang baik adalah bangunan yang seluruh komponennya bekerja sesuai fungsi masing-masing. Fondasi mampu menahan beban. Kolom mendistribusikan tekanan secara seimbang. Dinding membentuk ruang yang sesuai dengan kebutuhan. Atap melindungi seluruh bagian bangunan. Instalasi listrik, air, dan ventilasi bekerja secara terintegrasi. Ketika salah satu komponen dirancang secara keliru, dampaknya sering kali menjalar ke seluruh bagian bangunan.

Hal yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Ketika hubungan antara rakyat dan

kekuasaan dirancang secara tidak tepat, dampaknya akan memengaruhi seluruh sistem. Ketika mekanisme pengawasan lemah, penyalahgunaan kewenangan menjadi lebih mudah terjadi. Ketika distribusi kekuasaan tidak seimbang, konsentrasi kekuasaan cenderung muncul pada titik tertentu. Ketika rakyat semakin jauh dari pusat pengambilan keputusan, kebijakan yang lahir cenderung semakin jauh dari kebutuhan masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut sering kali tampak sebagai masalah yang berdiri sendiri, padahal sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yaitu desain yang mengatur bagaimana negara bekerja.

Inilah sebabnya mengapa perdebatan mengenai negara tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang sedang berkuasa. Pergantian pemimpin memang penting, tetapi pemimpin bekerja di dalam sebuah bangunan yang telah memiliki struktur tertentu. Seorang penghuni baru tidak otomatis mampu mengubah seluruh desain rumah yang ditempatinya. Demikian pula seorang presiden, menteri, atau pejabat negara tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengatasi seluruh konsekuensi yang lahir dari desain sistem yang telah ada jauh sebelum mereka menjabat.

Dalam dunia teknik terdapat sebuah prinsip yang sangat sederhana. Ketika sebuah bangunan terus mengalami kerusakan pada titik yang sama, perhatian harus diarahkan kepada desainnya. Semakin sering kerusakan muncul meskipun telah dilakukan berbagai perbaikan, semakin besar kemungkinan bahwa sumber persoalannya berada pada gambar bangunan itu sendiri. Menambal retakan mungkin dapat

menyelesaikan masalah untuk sementara waktu, tetapi retakan yang sama akan muncul kembali apabila penyebab utamanya tidak diperbaiki.

Prinsip tersebut menjadi sangat relevan ketika digunakan untuk membaca perjalanan Indonesia. Berbagai reformasi telah dilakukan. Berbagai pemimpin telah datang dan pergi. Berbagai kebijakan telah diterapkan. Namun sejumlah persoalan mendasar tetap bertahan dan terus muncul dalam bentuk yang berbeda. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat penting. Apakah bangsa ini sedang menghadapi sekadar kesalahan pengelolaan, atau sedang menghadapi persoalan yang lebih mendasar pada tingkat desain negara itu sendiri?

Pertanyaan itulah yang akan menjadi fokus utama dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Sebab sebelum membahas siapa yang harus memimpin negara, bangsa ini perlu terlebih dahulu memahami bangunan seperti apa yang sedang dipimpin. Sebelum memperdebatkan penghuni rumah, bangsa ini perlu memahami gambar rumah yang menjadi tempat seluruh kehidupan bernegara berlangsung. Karena pada akhirnya, kualitas kehidupan di dalam sebuah bangunan sangat ditentukan oleh kualitas desain yang menopangnya. Dan ketika berbagai kerusakan terus berulang selama puluhan tahun, perhatian yang jujur harus mulai diarahkan kepada kemungkinan bahwa persoalan terbesar bukan terletak pada penghuninya, melainkan pada bangunan yang sejak awal dirancang secara keliru.

15.3. Fondasi yang Menentukan Segalanya

Dalam dunia arsitektur terdapat sebuah prinsip yang tidak pernah berubah sejak manusia mulai membangun peradaban. Sebagus apa pun desain sebuah bangunan, semahal apa pun material yang digunakan, dan sehebat apa pun para pekerja yang mengerjakannya, seluruh bangunan pada akhirnya akan bergantung kepada satu hal yang paling mendasar, yaitu fondasi. Fondasi adalah bagian yang jarang terlihat oleh mata. Fondasi tidak memberikan kesan megah. Fondasi tidak menjadi objek yang dikagumi pengunjung. Bahkan sebagian besar fondasi akan terkubur di bawah tanah sepanjang usia bangunan. Namun justru bagian yang tidak terlihat itulah yang menentukan apakah sebuah bangunan akan berdiri kokoh atau perlahan mengalami keretakan.

Ketika sebuah bangunan mengalami masalah struktural, perhatian masyarakat sering kali tertuju kepada bagian yang tampak di permukaan. Dinding yang retak menjadi sorotan. Atap yang bocor dianggap sebagai sumber persoalan. Kolom yang miring memunculkan kekhawatiran. Padahal dalam banyak kasus, kerusakan yang terlihat pada bagian atas hanyalah gejala dari masalah yang terjadi jauh di bawahnya. Retakan pada dinding sering kali bukan disebabkan oleh kualitas cat yang buruk. Kemiringan kolom sering kali bukan disebabkan oleh kesalahan pemasangan jendela. Sumber persoalannya justru berada pada fondasi yang tidak mampu menjalankan fungsi penopangnya dengan baik.

Prinsip tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana sebuah negara bekerja. Negara tidak hanya terdiri atas lembaga-lembaga yang tampak di permukaan. Negara tidak hanya terdiri atas presiden, parlemen, pengadilan, kementerian, atau aparat pemerintahan. Sebelum seluruh komponen tersebut bekerja, terdapat lapisan yang jauh lebih mendasar yang menentukan arah dan karakter negara. Lapisan itulah yang dapat dipahami sebagai fondasi negara.

Dalam kerangka berpikir Sekolah Negarawan, fondasi negara tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar yang menjadi alasan mengapa negara itu dibentuk. Sebuah negara tidak lahir hanya untuk memiliki pemerintahan. Negara juga tidak lahir sekadar untuk menciptakan struktur kekuasaan. Negara dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting oleh seluruh bangsa. Tujuan tersebut kemudian diwujudkan dalam seperangkat nilai yang menjadi pijakan bagi seluruh penyelenggaraan negara.

Bagi Indonesia, fondasi tersebut telah dirumuskan secara sangat jelas oleh para pendiri bangsa. Pancasila ditempatkan sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 merumuskan tujuan pembentukan negara secara tegas. Di dalamnya terdapat cita-cita mengenai kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Seluruh nilai tersebut seharusnya berfungsi seperti fondasi yang menopang seluruh bangunan kenegaraan.

Dalam glosarium buku ini, Pancasila telah dianalogikan sebagai *kernel* negara. Sebagaimana *kernel*

dalam sebuah sistem operasi menjadi inti yang menentukan arah kerja seluruh sistem, Pancasila menjadi sumber nilai yang seharusnya mengarahkan seluruh aktivitas negara. Konstitusi kemudian berfungsi sebagai *firmware* yang menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam aturan dasar penyelenggaraan negara. Dengan demikian, hubungan antara Pancasila dan konstitusi dapat dipahami seperti hubungan antara fondasi dan struktur bangunan. Fondasi menentukan tujuan dan arah, sedangkan struktur menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam bentuk yang operasional.

Masalah mulai muncul ketika hubungan antara fondasi dan struktur tidak lagi berjalan secara selaras. Dalam dunia konstruksi, fondasi yang kuat dapat kehilangan manfaatnya apabila struktur yang dibangun di atasnya tidak mengikuti karakter fondasi tersebut. Sebaliknya, struktur yang dirancang dengan baik juga tidak akan bertahan lama apabila berdiri di atas fondasi yang rapuh. Keduanya harus saling mendukung dan saling menguatkan. Ketika salah satu mengalami gangguan, seluruh bangunan akan merasakan dampaknya.

Fenomena yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Sebuah bangsa dapat memiliki nilai-nilai yang sangat luhur sebagai fondasi. Sebuah bangsa dapat memiliki cita-cita yang sangat mulia dalam konstitusinya. Namun apabila desain kelembagaan yang dibangun di atas fondasi tersebut tidak selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, maka berbagai persoalan akan mulai muncul. Negara tetap berdiri. Pemerintahan tetap berjalan. Pemilu tetap

dilaksanakan. Hukum tetap diberlakukan. Akan tetapi hasil yang dihasilkan sering kali berbeda dari cita-cita yang diletakkan pada fondasinya.

Di sinilah pentingnya membedakan antara fondasi yang benar dan struktur yang benar. Banyak perdebatan mengenai negara sering kali mencampurkan kedua hal tersebut menjadi satu. Ketika muncul berbagai persoalan dalam praktik ketatanegaraan, sebagian orang langsung menyalahkan Pancasila. Sebagian lainnya menyalahkan konstitusi. Sebagian lagi menyalahkan pelaksana negara. Padahal ketiga lapisan tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan perlu dianalisis secara terpisah.

Sebagai fondasi, Pancasila memuat nilai-nilai yang sangat jelas mengenai hubungan antara negara dan rakyat. Sila kedua menegaskan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat menegaskan prinsip kerakyatan dan permusyawaratan. Sila kelima menegaskan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia sejak awal dirancang untuk menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh penyelenggaraan kekuasaan.

Pertanyaannya kemudian bukan apakah fondasi tersebut benar atau salah. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah struktur yang dibangun di atas fondasi tersebut benar-benar menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apakah hubungan antara rakyat dan negara telah dirancang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat? Apakah distribusi kekuasaan benar-benar menjamin bahwa kekuasaan

tetap berada dalam kendali rakyat? Apakah desain kelembagaan yang ada mampu menghasilkan keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat penting karena dalam banyak kasus kerusakan bangunan tidak selalu berasal dari fondasinya. Terkadang fondasi telah dirancang dengan baik, tetapi struktur yang dibangun di atasnya mengalami penyimpangan. Dalam kondisi seperti itu, yang perlu diperbaiki bukan fondasinya, melainkan cara bangunan tersebut didirikan di atas fondasi tersebut.

Analogi ini membantu menjelaskan mengapa berbagai persoalan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya tidak dapat serta-merta dijadikan alasan untuk menyalahkan nilai-nilai dasar bangsa. Korupsi bukanlah konsekuensi dari Pancasila. Ketimpangan hukum bukanlah tujuan yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Jarak antara rakyat dan negara bukanlah cita-cita para pendiri bangsa. Persoalan-persoalan tersebut lebih tepat dipahami sebagai gejala bahwa terdapat ketidaksesuaian antara fondasi yang menjadi dasar negara dan struktur yang dibangun untuk menjalankan negara tersebut.

Sebagaimana seorang insinyur akan memeriksa hubungan antara fondasi dan bangunan ketika menemukan keretakan yang berulang, bangsa ini juga perlu memeriksa hubungan antara nilai dasar negara dan desain ketatanegaraan yang berkembang setelahnya. Pemeriksaan tersebut bukan untuk meruntuhkan bangunan, melainkan untuk memahami

bagian mana yang perlu diperbaiki agar bangunan dapat kembali bekerja sesuai tujuan awal pembentukannya.

Karena itu, pembahasan mengenai negara salah desain tidak boleh dipahami sebagai upaya menolak fondasi bangsa. Sebaliknya, pembahasan ini justru berangkat dari keyakinan bahwa fondasi yang benar harus didukung oleh struktur yang benar pula. Pancasila tidak akan mampu mewujudkan keadilan sosial apabila struktur negara yang dibangun tidak mengarah kepada keadilan sosial. Kedaulatan rakyat tidak akan menjadi kenyataan apabila desain kekuasaan tidak benar-benar menempatkan rakyat sebagai pemegang kendali tertinggi. Persatuan tidak akan tumbuh secara sehat apabila struktur yang ada justru menciptakan jarak antara negara dan rakyat.

Pada akhirnya, kualitas sebuah bangunan selalu ditentukan oleh hubungan yang harmonis antara fondasi dan struktur. Fondasi memberikan arah. Struktur menerjemahkan arah tersebut ke dalam bentuk yang nyata. Ketika keduanya bekerja secara selaras, bangunan dapat berdiri kokoh dan berfungsi sesuai tujuan pembentukannya. Namun ketika terjadi ketidaksesuaian antara fondasi dan struktur, berbagai kerusakan akan mulai muncul meskipun dari luar bangunan masih tampak berdiri dengan baik. Dan sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya, persoalan tersebut sering kali berawal dari sesuatu yang tampak sederhana tetapi memiliki dampak yang sangat besar, yaitu kesalahan pada denah yang menentukan

hubungan antar bagian dalam keseluruhan bangunan negara.

15.4. Ketika Denah Salah

Dalam dunia arsitektur, fondasi yang kuat belum tentu menghasilkan bangunan yang nyaman digunakan. Sebuah bangunan dapat berdiri kokoh selama puluhan tahun, tetapi tetap menimbulkan berbagai persoalan bagi para penghuninya apabila denah yang digunakan sejak awal dirancang secara keliru. Denah menentukan hubungan antar ruang. Denah menentukan jalur pergerakan penghuni. Denah menentukan siapa terhubung dengan siapa, siapa mengawasi siapa, dan bagaimana seluruh bagian bangunan bekerja sebagai satu kesatuan. Kesalahan pada denah sering kali tidak menyebabkan bangunan runtuh, tetapi menyebabkan bangunan tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal pembentukannya.

Seseorang yang masuk ke sebuah rumah dengan denah yang buruk akan segera merasakan dampaknya. Untuk mencapai ruang tamu harus melewati kamar tidur. Untuk menuju dapur harus memutar terlalu jauh. Ruang yang seharusnya menjadi pusat aktivitas justru berada di lokasi yang terisolasi. Ruang yang seharusnya saling terhubung malah terpisah oleh berbagai sekat yang tidak perlu. Akibatnya, aktivitas sehari-hari menjadi tidak efisien. Penghuni harus bekerja lebih keras hanya untuk melakukan hal-hal yang seharusnya sederhana.

Masalah tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti penghuni rumah. Penghuni yang

lebih rajin mungkin mampu beradaptasi. Penghuni yang lebih sabar mungkin mampu bertahan lebih lama. Akan tetapi selama denahnya tidak berubah, seluruh penghuni akan menghadapi kesulitan yang kurang lebih sama. Persoalannya bukan terletak pada siapa yang menghuni rumah, melainkan pada cara rumah tersebut dirancang.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Setelah fondasi negara ditetapkan melalui Pancasila dan tujuan negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, muncul pertanyaan yang jauh lebih operasional. Bagaimana hubungan antara rakyat dan negara dirancang? Bagaimana hubungan antar lembaga negara diatur? Siapa yang menjadi pusat kendali sistem? Siapa yang mengawasi penggunaan kekuasaan? Bagaimana kedaulatan rakyat diterjemahkan ke dalam mekanisme ketatanegaraan yang nyata?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada dasarnya merupakan persoalan denah negara.

Jika fondasi menjelaskan mengapa bangunan didirikan, maka denah menjelaskan bagaimana bangunan digunakan. Jika fondasi berbicara mengenai tujuan, maka denah berbicara mengenai hubungan antar bagian yang harus bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks negara, denah menentukan hubungan antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan, MPR sebagai mandataris rakyat, pemerintah sebagai pelaksana administrasi negara, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, serta berbagai institusi lain yang menjalankan fungsi kenegaraan.

Dalam glosarium yang telah digunakan sepanjang buku ini, rakyat diposisikan sebagai *root owner*, yaitu pemilik sah negara. MPR diposisikan sebagai *root administrator*, yaitu mandataris yang menerima kewenangan dari rakyat untuk menjaga sistem negara tetap berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Pemerintah menjalankan fungsi operasional sehari-hari sebagai pelaksana administrasi negara. Hubungan tersebut sebenarnya membentuk sebuah alur yang sangat logis. Pemilik memberikan mandat kepada administrator, administrator memastikan sistem bekerja sesuai kehendak pemilik, dan operator menjalankan fungsi operasional berdasarkan mandat yang diterima.

Masalah muncul ketika hubungan-hubungan tersebut tidak lagi dirancang secara jelas atau mengalami perubahan yang membuat alur kedaulatan menjadi kabur. Dalam sebuah bangunan, kesalahan denah sering kali menyebabkan penghuni kehilangan orientasi. Orang yang masuk tidak lagi memahami ruang mana yang menjadi pusat bangunan. Jalur yang seharusnya lurus berubah menjadi berputar-putar. Ruangan yang seharusnya memiliki fungsi utama justru kehilangan perannya. Akibatnya, seluruh aktivitas di dalam bangunan menjadi tidak efisien.

Hal yang serupa dapat terjadi dalam negara. Ketika hubungan antara rakyat dan lembaga negara tidak lagi mudah dipahami, muncul kebingungan mengenai di mana sesungguhnya pusat kedaulatan berada. Ketika rakyat secara konstitusional disebut sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi dalam praktik tidak memiliki mekanisme yang memadai

untuk mengendalikan arah negara, muncul jarak antara teori dan kenyataan. Ketika lembaga yang seharusnya bertindak sebagai mandataris rakyat kehilangan sebagian fungsi strategisnya, alur hubungan antara pemilik dan pengelola sistem menjadi semakin tidak jelas.

Dalam keadaan seperti itu, berbagai persoalan mulai bermunculan. Pemerintah yang seharusnya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan perlahan memperoleh posisi yang semakin dominan. Partai politik yang seharusnya menjadi sarana partisipasi rakyat perlahan berkembang menjadi gerbang utama yang menentukan akses terhadap kekuasaan. Rakyat tetap disebut sebagai pemilik kedaulatan, tetapi jalur untuk menggunakan kedaulatan tersebut menjadi semakin panjang dan semakin tidak langsung. Akibatnya, hubungan antara pemilik negara dan pengelola negara tidak lagi berlangsung secara sederhana sebagaimana yang dibayangkan dalam prinsip kedaulatan rakyat.

Analogi denah membantu menjelaskan mengapa persoalan ini sangat penting. Bayangkan sebuah rumah yang dirancang tanpa memperhatikan hubungan antar ruang. Penghuni tetap dapat tinggal di dalamnya. Aktivitas tetap dapat berlangsung. Namun semakin lama rumah digunakan, semakin banyak energi yang terbuang hanya untuk mengatasi ketidakefisienan yang sebenarnya berasal dari desain. Jalur yang terlalu panjang membuat aktivitas menjadi lambat. Hubungan ruang yang tidak tepat menciptakan konflik fungsi.

Ruangan yang seharusnya menjadi pusat justru kehilangan perannya.

Keadaan tersebut sangat mirip dengan berbagai persoalan ketatanegaraan yang sering muncul dalam praktik. Energi bangsa sering kali habis untuk menyelesaikan konflik kewenangan, memperbaiki hubungan antar lembaga, menafsirkan ulang batas-batas kekuasaan, atau mengatasi berbagai persoalan yang sesungguhnya berakar pada desain hubungan antar komponen negara. Yang tampak di permukaan adalah konflik kekuasaan atau konflik kelembagaan. Namun pada tingkat yang lebih dalam, persoalannya sering kali berasal dari denah yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar kedaulatan rakyat.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, persoalan ini menjadi sangat penting karena negara bukan sekadar kumpulan lembaga yang berdiri sendiri-sendiri. Negara adalah sebuah sistem yang seharusnya memiliki alur yang jelas dari rakyat sebagai pemilik menuju seluruh perangkat penyelenggara negara. Ketika alur tersebut terganggu, kedaulatan rakyat berisiko berubah menjadi konsep normatif yang indah di atas kertas tetapi sulit ditemukan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari.

Inilah alasan mengapa pembahasan mengenai desain negara tidak dapat berhenti pada persoalan fondasi. Fondasi memang menentukan arah, tetapi denah menentukan bagaimana arah tersebut diwujudkan dalam kehidupan nyata. Bangunan yang memiliki fondasi kuat tetap dapat menghasilkan berbagai masalah apabila denahnya salah. Demikian

pula negara yang memiliki cita-cita luhur tetap dapat mengalami berbagai penyimpangan apabila hubungan antar lembaga, distribusi kewenangan, dan jalur kedaulatannya tidak dirancang secara tepat.

Pada akhirnya, kualitas sebuah bangunan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fondasinya, tetapi juga oleh ketepatan denah yang menghubungkan seluruh ruang di dalamnya. Ketika denah salah, berbagai fungsi kehilangan keseimbangan. Ketika hubungan antar ruang tidak dirancang secara tepat, bangunan tetap berdiri tetapi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan ketika kondisi tersebut terjadi dalam kehidupan bernegara, berbagai persoalan yang tampak sebagai konflik pemerintahan sesungguhnya hanyalah gejala dari sesuatu yang lebih mendasar, yaitu kesalahan dalam merancang hubungan struktural antar komponen negara sejak awal. Dari sinilah pembahasan berikutnya akan bergerak menuju persoalan yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana struktur negara menopang atau justru membebani tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa itu sendiri.

15.5. Ketika Struktur Tidak Menopang Tujuan

Setelah fondasi ditetapkan dan denah dirancang, tahap berikutnya dalam pembangunan sebuah bangunan adalah membentuk struktur yang mampu menopang seluruh beban yang akan bekerja di atasnya. Dalam dunia arsitektur dan teknik sipil, struktur merupakan elemen yang menentukan apakah sebuah bangunan benar-benar mampu menjalankan fungsi yang diharapkan. Fondasi dapat dirancang dengan

sangat baik, denah dapat dibuat dengan sangat ideal, tetapi apabila struktur yang menghubungkan seluruh bagian bangunan tidak mampu mendistribusikan beban secara benar, berbagai persoalan akan muncul seiring berjalannya waktu.

Sebuah gedung bertingkat tidak berdiri karena keindahan gambarnya. Gedung berdiri karena terdapat sistem struktur yang mengatur bagaimana beban dialirkan dari atap menuju balok, dari balok menuju kolom, dan dari kolom menuju fondasi. Setiap elemen memiliki fungsi yang jelas. Setiap elemen menerima beban sesuai kapasitasnya. Ketika distribusi tersebut dirancang secara tepat, bangunan dapat berdiri kokoh selama puluhan bahkan ratusan tahun. Namun ketika distribusi beban dirancang secara keliru, sebagian struktur akan menerima tekanan yang terlalu besar sementara bagian lain tidak menjalankan fungsi yang semestinya. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan tersebut akan menghasilkan retakan, deformasi, dan berbagai bentuk kerusakan yang semakin sulit diperbaiki.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Negara bukan hanya memerlukan tujuan yang benar dan hubungan kelembagaan yang jelas. Negara juga memerlukan struktur yang mampu mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan pengawasan secara seimbang. Struktur inilah yang menentukan bagaimana kekuasaan bergerak di dalam sistem negara. Struktur menentukan siapa menerima mandat, siapa menjalankan mandat, siapa melakukan

pengawasan, dan kepada siapa pertanggungjawaban diberikan.

Dalam teori kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi pemikiran Sekolah Negarawan, distribusi tersebut seharusnya dimulai dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Rakyat merupakan *root owner* yang menjadi sumber legitimasi seluruh sistem negara. Dari rakyat, mandat diberikan kepada MPR sebagai *root administrator* yang bertugas menjaga arah negara sesuai kehendak pemilik kedaulatan. Selanjutnya berbagai fungsi operasional dijalankan oleh lembaga-lembaga negara sesuai tugas masing-masing. Dalam konstruksi seperti ini, seluruh struktur memiliki hubungan yang logis dan mudah dipahami karena setiap kewenangan dapat ditelusuri kembali kepada sumber legitimasi yang sama, yaitu rakyat.

Masalah muncul ketika struktur negara tidak lagi dirancang untuk menopang tujuan tersebut. Dalam bangunan fisik, kesalahan distribusi beban menyebabkan sebagian kolom menerima tekanan yang terlalu besar. Dalam negara, kesalahan distribusi kewenangan menyebabkan sebagian lembaga memperoleh kekuasaan yang terlalu dominan sementara lembaga lain kehilangan fungsi pengimbangnya. Akibatnya, keseimbangan yang seharusnya menjadi karakter utama sebuah sistem mulai terganggu.

Fenomena seperti ini dapat ditemukan dalam berbagai organisasi besar. Ketika seluruh keputusan terpusat pada satu titik, organisasi memang dapat bergerak dengan cepat untuk sementara waktu. Namun

semakin banyak beban yang terkumpul pada satu pusat kendali, semakin besar risiko munculnya kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, dan ketergantungan terhadap individu tertentu. Sebaliknya, apabila kewenangan tersebar tanpa struktur yang jelas, organisasi kehilangan kemampuan untuk bergerak secara terarah. Kedua kondisi tersebut sama-sama menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar terletak pada siapa yang memegang kewenangan, melainkan pada bagaimana kewenangan tersebut didistribusikan.

Dalam konteks negara, struktur kekuasaan tidak boleh hanya dinilai dari siapa yang tampak paling berkuasa. Yang jauh lebih penting adalah apakah distribusi kekuasaan tersebut mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Jika tujuan negara adalah mewujudkan kedaulatan rakyat, maka struktur harus memastikan bahwa seluruh kekuasaan tetap berada dalam kendali rakyat. Jika tujuan negara adalah menciptakan keadilan, maka struktur harus memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang berkembang tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Jika tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum, maka struktur harus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Di sinilah sering kali muncul persoalan yang tidak disadari. Banyak sistem ketatanegaraan terlihat baik ketika dibaca secara normatif, tetapi menghasilkan konsekuensi yang berbeda ketika dijalankan dalam praktik. Pada gambar perencanaannya, seluruh

lembaga tampak memiliki fungsi yang jelas. Seluruh mekanisme tampak bekerja secara seimbang. Namun ketika sistem mulai beroperasi, sebagian struktur ternyata lebih dominan daripada yang dibayangkan, sementara sebagian lainnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengimbang. Akibatnya, arah negara perlahan bergeser dari tujuan awal yang ingin dicapai.

Dalam analogi bangunan, keadaan tersebut menyerupai gedung yang memiliki fondasi kuat dan denah yang baik, tetapi menggunakan sistem struktur yang salah. Pada awalnya bangunan tetap berdiri. Penghuni mungkin tidak merasakan persoalan yang berarti. Namun seiring bertambahnya beban, berbagai kelemahan mulai terlihat. Retakan muncul pada titik-titik tertentu. Sebagian kolom mengalami tekanan berlebihan. Sebagian elemen struktur bekerja di luar kapasitas yang direncanakan. Yang terlihat sebagai kerusakan lokal sesungguhnya merupakan gejala dari persoalan distribusi beban yang terjadi pada tingkat struktur.

Demikian pula dengan negara. Konflik antar lembaga, konsentrasi kekuasaan, lemahnya pengawasan, dominasi kelompok tertentu terhadap proses pemerintahan, serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya sering kali merupakan gejala dari struktur yang tidak lagi menopang tujuan awal negara secara seimbang. Persoalan tersebut tidak selalu muncul karena niat buruk para pelaku. Dalam banyak kasus, struktur yang salah justru mendorong

munculnya perilaku yang sama berulang kali meskipun dijalankan oleh orang-orang yang berbeda.

Inilah alasan mengapa Sekolah Negarawan memandang bahwa persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti pemimpin atau memperbaiki kebijakan tertentu. Selama struktur yang menopang negara tidak diperiksa secara kritis, berbagai persoalan akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda. Sebuah bangunan yang mengalami masalah struktural tidak dapat diperbaiki hanya dengan mengecat ulang dindingnya. Retakan mungkin tertutup untuk sementara waktu, tetapi sumber persoalannya tetap ada. Cepat atau lambat, kerusakan yang sama akan kembali muncul.

Pembahasan mengenai struktur juga membantu menjelaskan mengapa berbagai cita-cita luhur yang terkandung dalam Pancasila sering kali sulit diwujudkan secara konsisten. Persoalannya tidak selalu berada pada nilai-nilai yang dianut bangsa ini. Persoalannya juga tidak selalu berada pada niat para penyelenggara negara. Dalam banyak kasus, persoalannya terletak pada struktur yang tidak sepenuhnya dirancang untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik ketatanegaraan yang nyata. Akibatnya, tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme yang digunakan untuk mencapainya berjalan dalam arah yang tidak selalu sejalan.

Karena itu, memahami struktur negara menjadi sangat penting dalam upaya membaca persoalan Indonesia secara lebih mendalam. Fondasi menjelaskan mengapa negara dibentuk. Denah menjelaskan

bagaimana hubungan antar komponen dirancang. Struktur menjelaskan bagaimana seluruh beban kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab didistribusikan agar tujuan negara dapat tercapai. Ketika salah satu bagian tersebut mengalami kesalahan, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh sistem.

Pada akhirnya, sebuah bangunan hanya dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila struktur yang menopangnya benar-benar selaras dengan tujuan pembangunannya. Hal yang sama berlaku bagi negara. Jika tujuan negara adalah mewujudkan kedaulatan rakyat, maka struktur negara harus menopang kedaulatan rakyat. Jika tujuan negara adalah menciptakan keadilan sosial, maka struktur negara harus dirancang untuk menghasilkan keadilan sosial. Ketika struktur justru bergerak menjauh dari tujuan tersebut, negara akan terus mengalami berbagai persoalan yang tampak berbeda di permukaan, padahal sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yaitu struktur yang tidak lagi menopang tujuan pembentukannya secara utuh.

15.6. Ketika DED Salah Sejak Awal

Dalam dunia konstruksi, terdapat satu tahapan yang sangat menentukan apakah sebuah bangunan akan benar-benar mampu diwujudkan sesuai tujuan perancangannya, yaitu penyusunan *Detail Engineering Design* atau DED. Pada tahap inilah seluruh konsep yang sebelumnya masih berupa gagasan umum diterjemahkan menjadi gambar kerja yang rinci. Jika fondasi menjelaskan apa yang ingin dicapai dan denah

menjelaskan bagaimana ruang-ruang saling terhubung, maka DED menjelaskan secara detail bagaimana setiap bagian harus dibangun, berapa ukurannya, bagaimana sambungannya, material apa yang digunakan, serta bagaimana seluruh komponen bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh.

Kesalahan pada tahap DED sering kali tidak terlihat oleh masyarakat umum. Sebuah bangunan dapat memiliki konsep yang sangat baik. Denahnya dapat terlihat ideal. Tujuannya dapat sangat mulia. Namun apabila gambar kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan mengandung kesalahan, maka seluruh proses pembangunan akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda dari tujuan awal yang diinginkan. Semakin besar bangunan yang dibangun, semakin besar pula dampak dari kesalahan tersebut.

Seorang insinyur memahami bahwa kesalahan kecil dalam gambar kerja dapat menghasilkan masalah yang sangat besar ketika bangunan selesai dibangun. Perbedaan beberapa sentimeter pada posisi kolom mungkin terlihat sepele di atas kertas, tetapi dapat menyebabkan distribusi beban berubah secara signifikan. Kesalahan dalam menentukan spesifikasi sambungan mungkin tampak tidak penting pada tahap perencanaan, tetapi dapat menjadi sumber kegagalan struktur ketika bangunan mulai menerima beban penuh. Karena itulah para perancang sangat berhati-hati pada tahap DED. Kesalahan yang dibiarkan pada tahap desain akan berkembang menjadi biaya yang jauh lebih besar pada tahap pelaksanaan.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara.

Jika Pancasila dipahami sebagai fondasi nilai bangsa, dan jika desain hubungan antar lembaga negara dapat dianalogikan sebagai denah bangunan, maka pasal-pasal konstitusi berfungsi seperti *Detail Engineering Design* yang menentukan bagaimana negara benar-benar dijalankan. Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum. Konstitusi adalah gambar kerja negara. Konstitusi menjelaskan bagaimana kedaulatan diterjemahkan ke dalam kelembagaan. Konstitusi menentukan siapa memperoleh kewenangan, bagaimana kewenangan digunakan, bagaimana kewenangan dibatasi, dan kepada siapa pertanggungjawaban diberikan.

Dalam glosarium buku ini, konstitusi telah dianalogikan sebagai *firmware* negara. Sebagaimana *firmware* menentukan bagaimana perangkat bekerja pada tingkat dasar, konstitusi menentukan bagaimana seluruh sistem kenegaraan beroperasi. Pemerintah dapat berganti. Partai politik dapat berubah. Kebijakan dapat diperbarui. Namun selama *firmware* yang menjadi dasar sistem tetap sama, pola kerja utama negara cenderung akan mengikuti desain yang telah ditanamkan sejak awal.

Di sinilah muncul persoalan yang menjadi inti pembahasan Sekolah Negarawan. Tidak semua masalah negara berasal dari pelaksanaan. Tidak semua masalah lahir dari perilaku individu. Sebagian masalah justru muncul karena desain dasar yang tertanam dalam

konstitusi menghasilkan konsekuensi tertentu yang terus berulang dari waktu ke waktu.

Sebagaimana sebuah bangunan yang dibangun berdasarkan gambar kerja yang keliru akan terus menghasilkan masalah meskipun dikerjakan oleh kontraktor terbaik, negara yang dibangun di atas desain konstitusional yang bermasalah juga akan terus menghasilkan persoalan meskipun dijalankan oleh orang-orang yang memiliki niat baik.

Pemahaman ini sangat penting karena selama bertahun-tahun perhatian bangsa lebih banyak tertuju kepada pelaksanaan daripada desain. Ketika muncul korupsi, perhatian diarahkan kepada pelaku korupsi. Ketika muncul penyalahgunaan kewenangan, perhatian diarahkan kepada pejabat yang menyalahgunakan kewenangan tersebut. Ketika muncul kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, perhatian diarahkan kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Semua langkah tersebut memang penting karena setiap pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Namun terdapat pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa pola yang sama terus muncul dalam berbagai generasi pemerintahan yang berbeda?

Pertanyaan tersebut mengarahkan perhatian kepada kemungkinan bahwa terdapat bagian dari desain negara yang secara tidak langsung menciptakan insentif bagi lahirnya persoalan-persoalan tersebut.

Dalam dunia rekayasa sistem, perancang yang baik tidak hanya bertanya apakah sistem dapat berjalan, tetapi juga bertanya perilaku apa yang akan dihasilkan oleh desain tersebut. Sebuah sistem yang dirancang

secara keliru mungkin tetap berfungsi secara teknis, tetapi secara konsisten mendorong pengguna mengambil keputusan yang salah. Dalam kondisi seperti itu, kesalahan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pengguna karena desain sistem turut berkontribusi terhadap munculnya perilaku tersebut.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Sebuah konstitusi mungkin tetap mampu menjalankan pemerintahan. Pemilu tetap dapat diselenggarakan. Lembaga negara tetap dapat bekerja. Hukum tetap dapat ditegakkan. Namun apabila desain hubungan antar kekuasaan tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka sistem akan menghasilkan konsekuensi yang secara perlahan menjauh dari tujuan awal pembentukannya.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, salah satu contoh paling penting adalah hubungan antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan mekanisme operasional negara. Pada tingkat filosofis, kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun pada tingkat desain konstitusional, perlu ditanyakan kembali apakah seluruh jalur kewenangan benar-benar mengalir dari rakyat dan kembali kepada rakyat secara utuh. Jika terdapat titik-titik di mana alur tersebut terputus atau berubah arah, maka secara perlahan pusat gravitasi kekuasaan dapat bergeser dari pemilik kedaulatan kepada pihak-pihak lain yang memperoleh kendali lebih besar terhadap sistem.

Fenomena semacam ini sangat mirip dengan kesalahan DED dalam sebuah bangunan. Dari luar

bangunan tetap terlihat sesuai gambar. Fondasi tetap berada pada tempatnya. Denah tetap terlihat benar. Akan tetapi terdapat detail-detail tertentu yang menyebabkan fungsi bangunan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penghuni baru menyadari persoalan tersebut setelah bangunan digunakan dalam waktu yang lama. Pada saat itu, biaya perbaikannya jauh lebih besar dibanding biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki gambar kerja sejak awal.

Inilah sebabnya mengapa bangsa yang ingin memperbaiki negaranya harus berani memeriksa desain konstitusional secara jujur. Pemeriksaan tersebut bukan berarti menolak negara. Pemeriksaan tersebut juga bukan berarti menolak nilai-nilai dasar bangsa. Sebaliknya, pemeriksaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa desain yang digunakan benar-benar mampu mewujudkan tujuan yang telah diletakkan pada fondasinya.

Pancasila menghendaki keadilan sosial.

Pancasila menghendaki kerakyatan.

Pancasila menghendaki kedaulatan rakyat.

Pertanyaannya bukan lagi apakah cita-cita tersebut benar. Pertanyaannya adalah apakah gambar kerja negara telah dirancang sedemikian rupa sehingga cita-cita tersebut benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan.

Karena itu, pembahasan mengenai negara salah desain tidak dapat berhenti pada kritik terhadap pelaksanaan. Fokus yang lebih penting adalah meninjau apakah DED ketatanegaraan yang digunakan selama ini

benar-benar selaras dengan tujuan bangsa. Sebab sebagaimana dalam dunia konstruksi, kesalahan yang tertanam dalam gambar kerja akan terus diwariskan ke dalam bangunan yang dibangun di atasnya. Selama gambar tersebut tidak diperbaiki, kerusakan yang sama akan terus muncul meskipun dinding dicat ulang, penghuni berganti, atau bagian-bagian tertentu direnovasi berkali-kali.

Pada akhirnya, kualitas sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemuliaan cita-citanya, tetapi juga oleh ketepatan desain yang menerjemahkan cita-cita tersebut ke dalam struktur yang nyata. Sebab fondasi yang baik membutuhkan denah yang benar, denah yang benar membutuhkan struktur yang tepat, dan seluruhnya membutuhkan gambar kerja yang mampu memastikan bahwa setiap bagian negara benar-benar dibangun sesuai tujuan yang ingin dicapai. Ketika gambar kerja itulah yang bermasalah, maka berbagai kerusakan yang muncul bukan lagi sekadar kesalahan pelaksanaan, melainkan konsekuensi logis dari desain yang sejak awal tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan pembentukannya.

15.7. Renovasi Tidak Akan Menyelesaikan Semuanya

Ketika sebuah bangunan mulai menunjukkan berbagai kerusakan, reaksi pertama yang biasanya dilakukan adalah melakukan renovasi. Dinding yang retak diperbaiki. Cat yang mengelupas diganti. Atap yang bocor ditambal. Instalasi listrik yang bermasalah diperbarui. Dari luar, bangunan tampak kembali segar dan lebih baik dibanding sebelumnya. Penghuni merasa

nyaman karena melihat adanya perubahan yang nyata. Namun dalam dunia konstruksi, para insinyur memahami bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui renovasi. Terdapat jenis kerusakan tertentu yang tidak berada pada permukaan bangunan, melainkan berada pada struktur yang menopang bangunan tersebut. Dalam kondisi seperti itu, renovasi hanya menyembunyikan gejala tanpa menyentuh penyebab utamanya.

Sebuah gedung yang mengalami penurunan fondasi, misalnya, dapat terus dicat ulang berkali-kali. Retakan yang muncul dapat ditutup menggunakan berbagai material terbaik. Interior dapat diperbarui dengan desain yang lebih modern. Fasad dapat dibuat lebih menarik. Akan tetapi selama sumber persoalannya tetap berada di bawah permukaan, kerusakan yang sama akan terus muncul kembali. Semakin sering renovasi dilakukan tanpa menyentuh akar masalahnya, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan bangunan tersebut agar tetap terlihat normal.

Fenomena seperti ini sangat relevan untuk memahami perjalanan kehidupan bernegara. Dalam sejarah modern Indonesia, berbagai bentuk perbaikan telah dilakukan secara berulang. Undang-undang diperbarui. Struktur organisasi direvisi. Program reformasi diluncurkan. Lembaga baru dibentuk. Mekanisme pengawasan diperkuat. Pemilu dilaksanakan secara berkala. Pergantian kepemimpinan terjadi berkali-kali. Dari sudut pandang tertentu, seluruh langkah tersebut dapat dipahami sebagai

bentuk renovasi terhadap bangunan negara. Tujuannya baik, yaitu memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan negara.

Namun terdapat pertanyaan yang sangat penting. Mengapa berbagai persoalan mendasar tetap muncul meskipun renovasi dilakukan berulang kali? Mengapa ketimpangan hukum tetap menjadi keluhan yang terus terdengar? Mengapa korupsi terus muncul dalam berbagai bentuk yang berbeda? Mengapa hubungan antara rakyat dan negara tetap menyisakan jarak yang sulit dijembatani? Mengapa pergantian pemerintahan sering kali hanya menghasilkan perubahan aktor tanpa menghasilkan perubahan pola yang benar-benar mendasar?

Pertanyaan tersebut membawa perhatian kepada perbedaan antara renovasi dan rekayasa ulang. Renovasi berfokus pada bagian-bagian yang tampak. Rekayasa ulang berfokus pada struktur yang menopang keseluruhan sistem. Renovasi memperbaiki gejala. Rekayasa ulang memeriksa penyebab. Renovasi berusaha membuat bangunan tetap dapat digunakan. Rekayasa ulang berusaha memastikan bahwa bangunan benar-benar mampu menjalankan fungsi yang diharapkan.

Dalam konteks negara, banyak perubahan yang dilakukan selama ini sesungguhnya berada pada level renovasi. Pergantian presiden adalah renovasi kepemimpinan. Pergantian menteri adalah renovasi manajemen. Revisi undang-undang tertentu adalah renovasi regulasi. Restrukturisasi organisasi adalah renovasi kelembagaan. Seluruh langkah tersebut tentu

memiliki manfaat dan tidak boleh dianggap tidak penting. Sebuah bangunan tetap membutuhkan perawatan agar dapat berfungsi dengan baik. Namun persoalan muncul ketika renovasi diperlakukan sebagai solusi tunggal terhadap masalah yang sesungguhnya bersifat struktural.

Bayangkan sebuah rumah yang sejak awal dibangun dengan denah yang tidak efisien. Penghuni mungkin mengganti warna dinding setiap beberapa tahun. Perabotan dapat diperbarui. Jendela dapat diganti dengan model yang lebih modern. Bahkan seluruh interior dapat direnovasi secara menyeluruh. Namun selama posisi ruang-ruang utama tidak berubah, pengalaman dasar penghuni terhadap rumah tersebut tetap akan menghadapi persoalan yang sama. Jalur sirkulasi tetap tidak efisien. Hubungan antar ruang tetap bermasalah. Fungsi bangunan tetap tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan penghuninya.

Hal yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Sebuah bangsa dapat mengganti pemimpin berkali-kali tanpa pernah menyentuh desain yang mengatur hubungan antara rakyat dan kekuasaan. Sebuah negara dapat terus merevisi kebijakan tanpa pernah memeriksa apakah struktur kewenangan yang melahirkan kebijakan tersebut telah dirancang secara tepat. Sebuah pemerintahan dapat membentuk lembaga baru tanpa pernah mengevaluasi apakah distribusi kekuasaan yang menjadi dasar seluruh sistem telah benar-benar mendukung tujuan negara.

Di sinilah sering kali muncul ilusi perubahan. Karena masyarakat melihat banyak aktivitas perbaikan,

muncul kesan bahwa akar persoalan sedang ditangani. Padahal yang berubah hanyalah lapisan luar dari bangunan. Struktur yang menjadi sumber berbagai persoalan tetap berada pada tempatnya. Akibatnya, setelah beberapa waktu berlalu, gejala yang sama muncul kembali dengan bentuk yang berbeda. Nama program berubah. Nama lembaga berubah. Nama pejabat berubah. Namun pola persoalannya tetap memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan masa-masa sebelumnya.

Dalam glosarium yang digunakan dalam buku ini, keadaan tersebut dapat dianalogikan dengan sebuah sistem yang mengalami gangguan pada tingkat *firmware* tetapi terus diperbaiki melalui pembaruan aplikasi. Aplikasi memang dapat diperbarui berkali-kali. Antarmuka pengguna dapat dibuat lebih menarik. Fitur baru dapat ditambahkan. Akan tetapi apabila masalah utama berada pada lapisan yang lebih mendasar, perbaikan pada tingkat aplikasi hanya akan menghasilkan perubahan yang bersifat sementara. Cepat atau lambat, keterbatasan yang berasal dari desain dasar sistem akan kembali memengaruhi seluruh operasional yang berjalan di atasnya.

Pemahaman ini sangat penting karena salah satu kecenderungan terbesar dalam pemerintahan modern adalah keyakinan bahwa pergantian orang otomatis berarti perubahan sistem. Kenyataannya tidak selalu demikian. Orang bekerja di dalam struktur yang sudah ada. Setiap pemimpin memasuki bangunan yang telah dirancang sebelumnya. Setiap pejabat menjalankan fungsi yang telah ditentukan oleh desain kelembagaan

yang diwarisinya. Tentu terdapat ruang untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Namun ruang tersebut tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh desain dasar sistem.

Karena itu, ketika Sekolah Negarawan berbicara mengenai negara salah desain, fokus utamanya bukanlah mencari siapa yang harus disalahkan. Fokus utamanya adalah memahami mengapa berbagai persoalan terus berulang meskipun telah dilakukan begitu banyak renovasi. Sebab apabila masalah utamanya berada pada desain, maka solusi yang hanya berfokus pada perbaikan permukaan tidak akan pernah benar-benar menyelesaikan persoalan. Yang terjadi hanyalah siklus perbaikan tanpa akhir, di mana gejala ditangani berulang kali sementara sumber gejalanya tetap tidak tersentuh.

Bukan berarti renovasi tidak diperlukan. Sebuah bangunan yang rusak tetap membutuhkan perawatan. Pemerintahan tetap membutuhkan perbaikan kebijakan. Institusi tetap membutuhkan reformasi. Aparatur tetap membutuhkan peningkatan kualitas. Namun seluruh langkah tersebut harus disertai keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah desain yang menopang seluruh sistem masih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Apakah struktur yang ada benar-benar mendukung kedaulatan rakyat? Apakah hubungan antar lembaga telah dirancang secara tepat? Apakah jalur pertanggungjawaban kekuasaan masih selaras dengan prinsip bahwa rakyat adalah pemilik negara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui renovasi. Pertanyaan tersebut menuntut keberanian untuk melihat bangunan secara keseluruhan. Sebab dalam banyak kasus, bangunan yang terus mengalami kerusakan bukanlah bangunan yang kekurangan tukang, kekurangan cat, atau kekurangan penghuni yang baik. Bangunan tersebut mengalami masalah karena gambar yang menjadi dasar pembangunannya tidak sepenuhnya sesuai dengan fungsi yang ingin dicapai.

Pada akhirnya, renovasi memang dapat membuat bangunan terlihat lebih baik. Renovasi dapat memperpanjang usia bangunan dan mengurangi sebagian masalah yang muncul. Namun terdapat titik tertentu ketika sebuah bangsa harus jujur kepada dirinya sendiri. Jika kerusakan yang sama terus berulang selama puluhan tahun, jika berbagai reformasi hanya menghasilkan perbaikan sementara, dan jika pergantian pemimpin tidak mampu mengubah pola persoalan yang mendasar, maka perhatian tidak boleh lagi berhenti pada renovasi. Perhatian harus mulai diarahkan kepada desain yang menjadi sumber seluruh bangunan. Sebab tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan memperbaiki bagian yang terlihat. Sebagian masalah hanya dapat diselesaikan dengan keberanian untuk memeriksa kembali gambar yang digunakan sejak awal pembangunan negara tersebut.

15.8. Mengapa Pemimpin Baik Pun Sering Gagal

Salah satu keyakinan yang paling kuat dalam kehidupan pemerintahan adalah anggapan bahwa

seluruh persoalan bangsa dapat diselesaikan apabila ditemukan pemimpin yang baik. Setiap kali muncul kekecewaan terhadap keadaan negara, harapan masyarakat hampir selalu diarahkan kepada hadirnya sosok baru yang dianggap lebih jujur, lebih berani, lebih cerdas, atau lebih dekat dengan rakyat. Pergantian pemimpin kemudian dipandang sebagai titik awal perubahan. Pemilu menjadi arena pencarian figur yang dipercaya mampu membawa bangsa keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi.

Harapan semacam itu bukan sesuatu yang keliru. Kepemimpinan memang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah perjalanan sebuah negara. Sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak perubahan penting lahir karena keberanian, kecerdasan, dan integritas para pemimpinnya. Namun terdapat satu persoalan yang sering kali luput dari perhatian. Seorang pemimpin, sebaik apa pun kualitas pribadinya, tetap bekerja di dalam sebuah sistem yang telah ada sebelum pemimpin tersebut hadir. Setiap keputusan harus bergerak di dalam batas-batas yang ditentukan oleh struktur. Setiap kebijakan harus melewati jalur yang dibentuk oleh desain negara. Setiap perubahan harus berhadapan dengan berbagai konsekuensi yang telah tertanam dalam sistem sejak lama.

Dalam dunia teknik, terdapat sebuah kenyataan yang sangat sederhana. Kemampuan seorang operator tidak selalu cukup untuk mengatasi kelemahan desain sebuah mesin. Seorang pengemudi yang sangat terampil dapat mengendalikan kendaraan dengan lebih baik dibanding pengemudi biasa, tetapi keterampilan

tersebut tidak akan mengubah kualitas dasar kendaraan yang dikendarainya. Jika sistem pengereman dirancang secara buruk, risiko kecelakaan tetap ada. Jika distribusi beban kendaraan tidak seimbang, pengendalian tetap menjadi sulit. Jika rangka kendaraan memiliki kelemahan struktural, kemampuan pengemudi hanya mampu mengurangi dampak masalah, bukan menghilangkan sumber masalahnya.

Analogi tersebut sangat membantu untuk memahami hubungan antara pemimpin dan sistem negara. Dalam banyak kasus, masyarakat menaruh harapan yang sangat besar kepada individu tertentu tanpa terlebih dahulu mempertanyakan kendaraan apa yang sedang dikemudikan oleh individu tersebut. Ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan, kekecewaan kemudian diarahkan sepenuhnya kepada pemimpin yang sedang berkuasa. Padahal sebagian persoalan mungkin berasal dari struktur yang membatasi ruang gerak pemimpin itu sendiri.

Bayangkan seseorang yang ditugaskan mengemudikan kendaraan yang sistem kemudinya tidak presisi, remnya tidak seimbang, dan mesinnya sering mengalami gangguan. Pengemudi yang buruk tentu akan memperburuk keadaan. Namun pengemudi yang sangat baik pun tetap akan menghadapi berbagai kesulitan yang tidak berasal dari dirinya. Bahkan dalam kondisi tertentu, kemampuan terbaik seorang pengemudi hanya cukup untuk mencegah kendaraan mengalami kerusakan yang lebih besar. Kendaraan tetap bergerak, tetapi tidak pernah mampu mencapai performa yang seharusnya.

Hal yang serupa sering terjadi dalam kehidupan bernegara. Ketika seorang pemimpin memasuki sistem yang telah memiliki berbagai persoalan struktural, sebagian besar energi justru terserap untuk mengelola konsekuensi dari desain yang ada. Waktu yang seharusnya digunakan untuk membangun masa depan bangsa sering kali habis untuk mengatasi berbagai persoalan yang terus muncul dari struktur yang sama. Akibatnya, kemampuan kepemimpinan yang besar tidak selalu menghasilkan perubahan yang sebanding dengan harapan masyarakat.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, fenomena ini menjadi salah satu petunjuk penting bahwa persoalan bangsa tidak dapat dipahami hanya melalui kualitas individu. Jika berbagai masalah yang sama terus muncul dalam pemerintahan yang berbeda, dengan karakter pemimpin yang berbeda, latar belakang pemerintahan yang berbeda, bahkan generasi yang berbeda, maka terdapat kemungkinan bahwa sumber persoalannya berada pada sesuatu yang lebih mendasar daripada sekadar kualitas pemimpin.

Sejarah Indonesia memberikan banyak contoh mengenai hal tersebut. Setiap periode melahirkan figur yang dipercaya mampu menjadi jawaban atas berbagai persoalan bangsa. Setiap pergantian kepemimpinan disertai harapan baru. Sebagian pemimpin dikenal karena ketegasannya. Sebagian lainnya dikenal karena pendekatan yang lebih dialogis. Sebagian memperoleh dukungan karena kemampuan manajerialnya. Sebagian lagi memperoleh kepercayaan karena kedekatannya dengan rakyat. Namun terlepas dari berbagai

perbedaan tersebut, sejumlah persoalan mendasar tetap bertahan dan terus muncul dalam bentuk yang berbeda.

Keadaan tersebut mengingatkan pada sebuah bangunan yang memiliki masalah struktural. Ketika satu penghuni keluar dan digantikan oleh penghuni baru, suasana rumah mungkin berubah. Cara mengelola rumah mungkin berubah. Tata letak furnitur mungkin berubah. Namun apabila sumber persoalannya berada pada struktur bangunan, penghuni baru pada akhirnya akan menghadapi kesulitan yang sama. Atap yang bocor tetap bocor. Jalur sirkulasi yang tidak efisien tetap tidak efisien. Distribusi ruang yang salah tetap menghasilkan ketidaknyamanan yang sama. Perbedaan penghuni hanya mengubah cara menghadapi masalah, bukan menghilangkan masalah itu sendiri.

Dalam glosarium buku ini, negara dipahami sebagai sebuah sistem yang bekerja berdasarkan desain tertentu. Pancasila berfungsi sebagai *kernel* yang memuat nilai-nilai dasar bangsa. Konstitusi berfungsi sebagai *firmware* yang menentukan cara kerja negara. Lembaga-lembaga negara merupakan komponen yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai rancangan sistem. Dalam konstruksi seperti ini, seorang pemimpin dapat dipahami sebagai bagian dari sistem, bukan sebagai sistem itu sendiri. Pemimpin memiliki ruang untuk memengaruhi arah perjalanan negara, tetapi tetap bekerja dalam koridor yang dibentuk oleh desain yang lebih besar.

Kesadaran ini penting karena sering kali masyarakat terjebak pada siklus harapan dan kekecewaan yang berulang. Ketika muncul pemimpin

baru, harapan meningkat sangat tinggi. Ketika berbagai persoalan ternyata tidak segera terselesaikan, kekecewaan muncul dengan intensitas yang sama besarnya. Siklus tersebut terus berulang karena perhatian lebih banyak tertuju pada figur daripada pada struktur. Bangsa terus mencari orang yang tepat untuk ditempatkan di dalam bangunan yang sama tanpa pernah secara serius mempertanyakan apakah bangunan tersebut memang dirancang untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan.

Bukan berarti kualitas pemimpin tidak penting. Justru sebaliknya, kualitas pemimpin tetap memiliki peran yang sangat besar. Pemimpin yang baik dapat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem yang buruk. Pemimpin yang berintegritas dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan yang lebih besar. Pemimpin yang cakap dapat menjaga stabilitas di tengah berbagai keterbatasan yang ada. Namun kemampuan tersebut memiliki batas. Sebagaimana seorang dokter yang sangat kompeten tetap memerlukan peralatan yang memadai untuk melakukan operasi, pemimpin yang baik juga memerlukan sistem yang mendukung untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Di sinilah letak persoalan yang sering kali tidak disadari. Bangsa ini terlalu sering memperdebatkan siapa yang harus memimpin, tetapi terlalu jarang membahas desain sistem yang akan dipimpin. Padahal pertanyaan kedua sama pentingnya dengan pertanyaan pertama. Sebab kualitas hasil yang dihasilkan oleh

sebuah sistem tidak hanya ditentukan oleh operatornya, tetapi juga ditentukan oleh rancangan sistem itu sendiri.

Dalam dunia rekayasa, terdapat prinsip bahwa sistem yang baik harus mampu menghasilkan keluaran yang baik meskipun dijalankan oleh manusia biasa. Sebaliknya, sistem yang buruk sering kali membutuhkan individu-individu luar biasa hanya untuk menjaga agar sistem tersebut tetap berfungsi. Jika sebuah negara terus bergantung pada kehadiran tokoh-tokoh luar biasa untuk mengatasi persoalan yang sama dari generasi ke generasi, maka terdapat alasan yang kuat untuk mempertanyakan desain sistem yang mendasarinya.

Karena itu, salah satu tanda paling jelas bahwa sebuah negara menghadapi persoalan struktural adalah ketika pemimpin yang baik pun kesulitan menghasilkan perubahan yang mendasar. Kesulitan tersebut bukan selalu disebabkan oleh kurangnya kemampuan atau kurangnya niat baik. Dalam banyak kasus, kesulitan tersebut lahir karena struktur yang ada tidak sepenuhnya menopang tujuan yang ingin dicapai. Sistem yang salah desain akan terus menghasilkan hambatan, bahkan bagi mereka yang memiliki kapasitas terbaik untuk memimpin.

Pada akhirnya, masa depan sebuah bangsa tidak boleh bergantung semata-mata pada keberuntungan menemukan pemimpin yang baik. Bangsa yang sehat membutuhkan sistem yang sehat. Bangsa yang kuat membutuhkan desain yang mampu menopang tujuan-tujuannya secara konsisten. Sebab pemimpin datang dan pergi, tetapi struktur tetap bertahan jauh lebih lama.

Dan ketika sebuah negara terus membutuhkan tokoh luar biasa hanya untuk mengatasi persoalan yang sama berulang kali, mungkin persoalan terbesar bukan terletak pada kurangnya pemimpin yang baik, melainkan pada desain bangunan yang membuat bahkan pemimpin terbaik sekalipun harus berjuang melawan struktur yang tidak sepenuhnya mendukung tujuan yang hendak diwujudkan.

15.9. Negara yang Perlu Direkayasa Ulang

Ketika sebuah bangunan mengalami kerusakan pada bagian tertentu, renovasi sering kali menjadi pilihan yang paling rasional. Atap yang bocor dapat diperbaiki. Dinding yang retak dapat diperkuat. Instalasi yang sudah usang dapat diganti dengan yang baru. Namun dalam dunia arsitektur dan teknik sipil terdapat kondisi tertentu di mana renovasi tidak lagi cukup. Kerusakan yang terjadi bukan berada pada komponen-komponen yang tampak di permukaan, melainkan tertanam pada desain yang menjadi dasar berdirinya bangunan. Dalam keadaan seperti itu, perbaikan parsial hanya akan menunda munculnya masalah yang sama. Bangunan mungkin terlihat lebih baik untuk sementara waktu, tetapi akar persoalannya tetap berada di tempat yang sama.

Para insinyur mengenal situasi tersebut sebagai kondisi yang membutuhkan rekayasa ulang atau *redesign*. Keputusan untuk melakukan rekayasa ulang bukanlah keputusan yang ringan. Tidak ada arsitek yang dengan mudah menyatakan bahwa sebuah bangunan harus ditinjau kembali desainnya. Tidak ada

insinyur yang ingin membongkar struktur yang telah berdiri bertahun-tahun tanpa alasan yang kuat. Rekayasa ulang hanya dilakukan ketika analisis menunjukkan bahwa sumber persoalan berada pada rancangan yang menjadi dasar keseluruhan sistem. Ketika berbagai kerusakan terus muncul pada titik yang sama, ketika biaya perbaikan semakin besar dibanding manfaat yang diperoleh, dan ketika bangunan tidak lagi mampu menjalankan fungsi yang menjadi tujuan pembentukannya, maka perhatian harus diarahkan kepada desain itu sendiri.

Perspektif inilah yang menjadi dasar pemikiran Sekolah Negarawan dalam melihat persoalan Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, bangsa ini telah melakukan berbagai bentuk perbaikan. Reformasi pemerintahan dilakukan. Undang-undang diperbarui. Struktur kelembagaan diubah. Mekanisme pemilihan diperbaiki. Lembaga baru dibentuk. Berbagai program pembangunan dijalankan dalam skala yang semakin besar. Seluruh upaya tersebut menunjukkan bahwa bangsa ini tidak pernah berhenti mencari solusi. Akan tetapi pada saat yang sama, berbagai persoalan mendasar tetap muncul secara berulang. Hubungan antara rakyat dan negara masih menyisakan jarak yang lebar. Kedaulatan rakyat sering kali lebih kuat sebagai konsep normatif dibanding sebagai kenyataan yang dapat dirasakan secara langsung. Konsentrasi kekuasaan terus menjadi kekhawatiran. Pengaruh oligarki tetap menjadi perdebatan. Ketimpangan ekonomi dan ketimpangan akses terhadap proses

pemerintahan terus menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas.

Keadaan tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah bangsa ini sedang menghadapi kegagalan pelaksanaan, atau sedang menghadapi keterbatasan desain? Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menafikan pentingnya pelaksanaan. Pelaksanaan yang buruk tentu dapat merusak sistem yang baik. Namun sejarah menunjukkan bahwa persoalan yang terus berulang biasanya mengandung petunjuk mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Ketika pola yang sama muncul dalam berbagai periode pemerintahan, dalam berbagai konfigurasi kekuasaan, dan di bawah kepemimpinan yang berbeda-beda, terdapat alasan yang kuat untuk memeriksa apakah struktur dasar yang digunakan memang sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam glosarium buku ini, negara telah dipahami sebagai sebuah sistem yang memiliki lapisan-lapisan tertentu. Pancasila merupakan *kernel* yang memuat nilai-nilai dasar bangsa. Konstitusi merupakan *firmware* yang menentukan cara kerja negara. Rakyat adalah *root owner* yang menjadi pemilik kedaulatan. MPR merupakan *root administrator* yang menerima mandat untuk menjaga sistem atas nama rakyat. Pemerintah menjalankan fungsi operasional melalui berbagai lembaga negara yang bekerja di bawah kerangka konstitusi. Jika keseluruhan analogi tersebut diterima, maka persoalan negara tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pengguna atau operator. Persoalan

negara juga harus dilihat sebagai persoalan desain sistem yang mengatur hubungan antar seluruh komponen tersebut.

Dalam dunia teknologi, terdapat kondisi ketika sebuah sistem tidak cukup diperbaiki melalui pembaruan aplikasi. Permasalahan yang muncul justru berasal dari lapisan yang lebih dalam, yaitu *firmware* yang mengendalikan cara kerja perangkat. Pada kondisi seperti itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar pembaruan fitur, melainkan perubahan pada desain yang mengatur seluruh sistem. Tanpa perubahan tersebut, berbagai perbaikan yang dilakukan hanya akan bekerja dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh desain lama.

Analogi tersebut membantu menjelaskan mengapa Sekolah Negarawan menempatkan rekayasa ulang negara sebagai sebuah kebutuhan intelektual, bukan sekadar pilihan kekuasaan. Rekayasa ulang tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan negara. Rekayasa ulang juga tidak dimaksudkan untuk menolak fondasi bangsa. Sebaliknya, rekayasa ulang bertujuan memastikan bahwa struktur yang dibangun benar-benar selaras dengan fondasi yang telah disepakati. Jika Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka desain negara harus memastikan bahwa kedaulatan tersebut dapat bekerja secara nyata. Jika tujuan negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka struktur yang dibangun harus mampu mengarahkan seluruh energi negara menuju tujuan tersebut.

Di sinilah perbedaan mendasar antara reformasi dan rekayasa ulang mulai terlihat. Reformasi biasanya berfokus pada perbaikan bagian-bagian tertentu dari sistem yang sudah ada. Rekayasa ulang berfokus pada hubungan antar bagian tersebut. Reformasi memperbaiki cara sistem bekerja. Rekayasa ulang mempertanyakan apakah cara kerja tersebut memang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Reformasi berusaha meningkatkan kinerja bangunan yang ada. Rekayasa ulang berusaha memastikan bahwa bangunan tersebut memang dirancang untuk fungsi yang benar sejak awal.

Dalam konteks ketatanegaraan, rekayasa ulang berarti keberanian untuk meninjau kembali hubungan antara rakyat dan negara. Rekayasa ulang berarti keberanian untuk meninjau kembali alur kedaulatan. Rekayasa ulang berarti keberanian untuk mempertanyakan apakah distribusi kewenangan yang ada benar-benar mencerminkan prinsip bahwa rakyat adalah pemilik negara. Rekayasa ulang juga berarti keberanian untuk memeriksa apakah seluruh lembaga negara bekerja dalam desain yang saling menopang atau justru saling bertabrakan.

Tentu saja, rekayasa ulang tidak boleh dilakukan secara serampangan. Sebuah bangunan yang akan direkayasa ulang harus terlebih dahulu dipahami secara menyeluruh. Fondasinya harus diperiksa. Strukturnya harus dianalisis. Hubungan antar komponennya harus dipetakan dengan cermat. Kesalahan terbesar dalam proses rekayasa ulang adalah mengganti desain lama tanpa memahami mengapa desain tersebut

menghasilkan persoalan. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan bukan membangun sesuatu yang baru, melainkan memahami secara jujur apa yang sedang terjadi pada bangunan yang ada saat ini.

Pada titik inilah pembahasan mengenai negara salah desain mulai bergerak dari diagnosis menuju solusi. Jika bab-bab sebelumnya berusaha menunjukkan berbagai gejala kerusakan yang muncul dalam sistem negara, maka pembahasan saat ini mulai mengarah pada kebutuhan untuk membangun kembali hubungan yang lebih sehat antara fondasi, struktur, dan tujuan negara. Sebab sebuah bangsa tidak dapat terus-menerus hidup dalam siklus perbaikan yang tidak pernah menyentuh akar persoalan. Cepat atau lambat, bangsa tersebut harus menentukan apakah akan terus menambal keretakan yang sama atau mulai memeriksa gambar yang menjadi sumber seluruh bangunan.

Pada akhirnya, rekayasa ulang bukanlah tindakan menghancurkan. Rekayasa ulang adalah tindakan memperbaiki arah. Sebagaimana seorang arsitek tidak merancang ulang bangunan karena membenci bangunan tersebut, sebuah bangsa tidak meninjau kembali desain negaranya karena membenci negaranya. Rekayasa ulang dilakukan justru karena terdapat keinginan agar bangunan dapat menjalankan fungsi yang seharusnya. Rekayasa ulang dilakukan karena terdapat keyakinan bahwa tujuan yang luhur membutuhkan struktur yang tepat untuk mewujudkannya. Dan ketika berbagai persoalan terus menunjukkan bahwa struktur yang ada belum sepenuhnya mampu menopang tujuan tersebut,

keberanian untuk melakukan rekayasa ulang bukanlah ancaman bagi negara, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap masa depan bangsa itu sendiri.

15.10. Indonesia Tidak Kekurangan Orang Baik

Setelah menelusuri berbagai pembahasan mengenai fondasi, denah, struktur, hingga gambar kerja negara, muncul sebuah kesimpulan yang mungkin terasa sederhana tetapi memiliki implikasi yang sangat besar. Selama ini banyak orang menganggap bahwa persoalan utama Indonesia adalah kekurangan pemimpin yang baik. Setiap kali muncul masalah, perhatian publik hampir selalu diarahkan kepada individu yang sedang memegang kekuasaan. Ketika korupsi terungkap, masyarakat mencari pemimpin yang lebih jujur. Ketika hukum dianggap tidak adil, masyarakat berharap hadir aparat yang lebih berintegritas. Ketika kebijakan negara dianggap menjauh dari kepentingan rakyat, harapan kembali diarahkan kepada sosok baru yang diyakini mampu membawa perubahan. Seolah-olah seluruh masa depan bangsa bergantung pada kemampuan menemukan orang yang tepat untuk ditempatkan di puncak kekuasaan.

Cara pandang seperti itu dapat dipahami karena manusia memang lebih mudah melihat orang daripada melihat sistem. Wajah memiliki nama, jabatan memiliki pemegangnya, sementara struktur bekerja dalam ruang yang tidak selalu terlihat. Ketika sebuah bangunan mengalami keretakan, perhatian pertama biasanya tertuju kepada penghuni yang sedang berada di

dalamnya. Ketika sebuah organisasi mengalami masalah, perhatian langsung diarahkan kepada pemimpinnya. Namun dalam dunia arsitektur maupun rekayasa sistem, para perancang memahami bahwa tidak semua masalah berasal dari orang yang menggunakan bangunan atau menjalankan sistem tersebut. Dalam banyak kasus, persoalan justru berasal dari desain yang mengatur bagaimana seluruh komponen bekerja.

Jika ditelusuri secara jujur, Indonesia sesungguhnya tidak pernah kekurangan orang baik. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini, bangsa ini terus melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki keberanian, integritas, kecerdasan, dan semangat pengabdian yang tinggi. Setiap generasi menghadirkan pemimpin yang datang dengan harapan besar. Setiap periode melahirkan birokrat yang bekerja dengan sungguh-sungguh, akademisi yang mencurahkan pemikiran terbaiknya, aktivis yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, aparat yang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta warga negara yang tetap menjaga optimisme di tengah berbagai keterbatasan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa sumber daya manusia bukanlah persoalan utama yang dihadapi bangsa ini.

Justru di sinilah pertanyaan yang lebih mendasar mulai muncul. Jika orang-orang baik terus hadir dalam berbagai generasi, mengapa sejumlah persoalan yang sama tetap berulang? Mengapa korupsi tidak pernah benar-benar hilang? Mengapa ketimpangan hukum terus menjadi keluhan yang diwariskan dari satu

periode ke periode berikutnya? Mengapa hubungan antara rakyat dan negara masih sering terasa berjarak? Mengapa berbagai reformasi yang dilakukan selama puluhan tahun hanya menghasilkan perbaikan yang bersifat parsial tanpa menyentuh akar persoalan secara menyeluruh?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarahkan perhatian kepada sesuatu yang selama ini sering luput dari pembahasan, yaitu desain negara itu sendiri. Sebagaimana sebuah kendaraan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengemudinya, negara juga tidak hanya ditentukan oleh kualitas para pemimpinnya. Pengemudi terbaik sekalipun akan menghadapi kesulitan ketika harus mengendalikan kendaraan yang sistem kemudinya tidak presisi, distribusi bebannya tidak seimbang, dan rancangan dasarnya mengandung kelemahan struktural. Kemampuan pengemudi mungkin mampu mengurangi dampak kerusakan, tetapi tidak dapat menghilangkan sumber kerusakan yang tertanam pada desain kendaraan tersebut.

Analogi yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Seorang pemimpin yang jujur dapat memperlambat laju kerusakan sistem. Seorang pemimpin yang cerdas dapat menemukan berbagai cara untuk mengatasi hambatan yang ada. Seorang pemimpin yang berintegritas dapat menjaga agar penyimpangan tidak berkembang lebih jauh. Namun seluruh kemampuan tersebut tetap bekerja dalam batas-batas yang ditentukan oleh desain negara yang diwarisinya. Ketika struktur yang menopang negara tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan yang ingin

dicapai, sebagian besar energi para pemimpin justru habis untuk mengelola konsekuensi dari desain tersebut.

Akibatnya, bangsa ini sering kali terjebak dalam siklus yang sama. Harapan diletakkan pada figur baru. Ekspektasi publik meningkat. Perubahan tertentu memang terjadi dan sebagian persoalan berhasil diperbaiki. Namun setelah beberapa waktu berlalu, berbagai masalah yang selama ini dianggap telah selesai kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Masyarakat kemudian kembali mencari tokoh baru yang diharapkan mampu menjadi solusi. Siklus tersebut berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa pernah menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bangunan yang sedang dihuni bersama.

Padahal dalam dunia rekayasa terdapat prinsip yang sangat sederhana. Sistem yang baik tidak boleh bergantung pada kehadiran manusia luar biasa agar dapat berfungsi dengan baik. Sistem yang baik justru harus mampu menghasilkan keluaran yang baik meskipun dijalankan oleh manusia biasa. Sebaliknya, apabila sebuah sistem hanya dapat berjalan ketika dipimpin oleh tokoh-tokoh yang luar biasa, maka terdapat kemungkinan bahwa persoalan sesungguhnya berada pada desain sistem tersebut. Sistem yang sehat menciptakan ruang bagi manusia untuk berkembang. Sistem yang salah desain justru memaksa manusia terbaik sekalipun menghabiskan energinya untuk melawan berbagai keterbatasan yang diciptakan oleh struktur itu sendiri.

Kesadaran inilah yang menjadi inti dari seluruh pembahasan dalam bab ini. Negara Salah Desain bukanlah tuduhan bahwa bangsa ini gagal melahirkan pemimpin yang berkualitas. Negara Salah Desain juga bukan pernyataan bahwa Indonesia kekurangan orang-orang yang memiliki integritas. Sebaliknya, gagasan ini berangkat dari keyakinan bahwa potensi bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada hasil yang selama ini mampu dicapai. Jika berbagai generasi terus melahirkan orang-orang baik tetapi persoalan yang sama tetap berulang, maka perhatian tidak boleh berhenti pada kualitas manusianya. Perhatian harus mulai diarahkan kepada struktur yang mengelilingi manusia tersebut.

Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan orang baik. Indonesia tidak kekurangan pemimpin yang memiliki niat tulus untuk mengabdi. Indonesia tidak kekurangan warga negara yang mencintai bangsanya. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah seluruh energi, kecerdasan, dan pengabdian tersebut bekerja di dalam desain yang benar. Sebab sehebat apa pun penghuni sebuah bangunan, hasil yang dapat dicapai akan selalu dibatasi oleh kualitas bangunan yang ditempatinya. Dan selama bangsa ini terus berfokus mengganti penghuni tanpa pernah berani memeriksa gambar bangunannya, berbagai persoalan yang sama akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda. Dari sinilah pembahasan tentang Negara Salah Desain berakhir, dan dari sinilah pula pembahasan mengenai bagaimana merancang ulang Indonesia harus dimulai.

BAB 16
DEVICE YANG RUSAK

16.1. Ketika Sistem Masih Menyala



Salah satu kesalahan terbesar dalam memahami kerusakan sebuah sistem adalah menganggap bahwa sistem yang masih berfungsi berarti sistem tersebut masih sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang baru menyadari adanya masalah ketika sebuah perangkat benar-benar berhenti bekerja. Ketika layar tidak lagi menyala, ketika mesin tidak lagi bergerak, atau ketika seluruh fungsi berhenti secara total, kerusakan menjadi sangat mudah dikenali. Namun para insinyur memahami bahwa sebagian besar kerusakan tidak muncul dalam bentuk kegagalan total. Justru kerusakan yang paling berbahaya sering kali terjadi

ketika sistem masih tampak berjalan normal, sementara kualitas kerjanya terus mengalami penurunan secara perlahan.

Sebuah komputer yang mengalami gangguan pada perangkat keras masih dapat dinyalakan. Sistem operasi masih dapat dimuat. Aplikasi masih dapat dibuka. Dari luar, tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa perangkat tersebut sedang mengalami masalah serius. Akan tetapi pengguna mulai merasakan gejala-gejala yang semakin mengganggu. Proses yang dahulu berlangsung dalam hitungan detik kini membutuhkan waktu lebih lama. Sistem menjadi lambat ketika menerima beban kerja yang lebih besar. Kesalahan-kesalahan kecil mulai muncul secara berulang. Fungsi yang seharusnya berjalan sederhana mulai memerlukan energi yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Perangkat masih hidup, tetapi tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya.

Analogi tersebut sangat relevan untuk memahami kondisi sebuah negara. Banyak orang menganggap bahwa selama negara masih memiliki pemerintahan, selama pemilu masih diselenggarakan, selama lembaga-lembaga negara masih beroperasi, dan selama aktivitas kenegaraan masih berlangsung, maka negara tersebut berada dalam kondisi yang baik. Padahal keberadaan institusi secara formal tidak selalu mencerminkan kesehatan sistem secara keseluruhan. Sebagaimana sebuah perangkat dapat tetap menyala meskipun mengalami kerusakan internal, negara juga dapat terus berjalan meskipun berbagai komponen yang menopangnya mulai mengalami gangguan yang serius.

Inilah yang sering kali membuat persoalan struktural sulit dikenali. Kerusakan yang terjadi tidak muncul dalam bentuk keruntuhan yang dramatis. Gedung-gedung pemerintahan tetap berdiri. Aparatur negara tetap bekerja. Sidang-sidang tetap berlangsung. Anggaran tetap disusun. Pemilu tetap dilaksanakan. Seluruh simbol kenegaraan tetap hadir sebagaimana biasanya. Dari luar, sistem tampak normal. Namun ketika diperhatikan lebih dalam, berbagai gejala mulai terlihat. Proses pengambilan keputusan menjadi semakin jauh dari rakyat. Energi negara semakin banyak terserap untuk mengelola persoalan yang berulang. Kepercayaan publik perlahan menurun. Biaya pemerintahan meningkat. Birokrasi menjadi semakin kompleks. Hukum tetap ditegakkan, tetapi rasa keadilan tidak selalu tumbuh sebanding dengan banyaknya aturan yang dibuat.

Keadaan seperti ini memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan perangkat yang masih menyala tetapi mulai kehilangan performanya. Pengguna masih dapat menjalankan berbagai fungsi dasar, tetapi kualitas pengalaman yang dihasilkan terus menurun. Setiap persoalan mungkin masih dapat diselesaikan secara individual. Setiap gangguan mungkin masih dapat ditangani secara sementara. Namun jumlah gangguan yang muncul semakin banyak dan semakin sering. Pada titik tertentu, sebagian besar energi sistem tidak lagi digunakan untuk mencapai tujuan utamanya, melainkan digunakan untuk mempertahankan agar sistem tetap dapat berfungsi.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa negara tidak berbeda dengan sebuah sistem besar yang dibangun di atas fondasi, struktur, dan desain tertentu. Pancasila berfungsi sebagai *kernel* yang menjadi sumber nilai dan arah dasar sistem. Konstitusi berfungsi sebagai *firmware* yang mengatur cara kerja negara. Rakyat merupakan *root owner* sebagai pemilik kedaulatan. MPR diposisikan sebagai *root administrator* yang menerima mandat untuk menjaga sistem atas nama rakyat. Pemerintah dan berbagai lembaga negara menjalankan fungsi operasional yang diperlukan untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika seluruh komponen tersebut bekerja secara selaras, negara mampu menjalankan tujuan pembentukannya secara efektif. Namun ketika terjadi gangguan pada hubungan antar komponen, kualitas kinerja sistem mulai mengalami penurunan meskipun seluruh perangkat masih tampak berfungsi.

Persoalan terbesar dalam situasi seperti ini adalah munculnya ilusi normalitas. Karena negara masih berdiri dan seluruh institusi masih bekerja, banyak orang beranggapan bahwa tidak terdapat masalah yang mendasar. Setiap persoalan diperlakukan sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Ketika muncul ketimpangan hukum, penyebabnya dianggap berada pada pelaksana hukum. Ketika muncul persoalan birokrasi, penyebabnya dianggap berada pada aparatur tertentu. Ketika muncul kebijakan yang tidak efektif, kesalahan diarahkan kepada pemerintah yang sedang menjabat. Semua penjelasan tersebut mungkin benar pada tingkat tertentu, tetapi sering kali gagal melihat

gambaran yang lebih besar. Berbagai gejala yang muncul secara bersamaan dapat menjadi tanda bahwa persoalannya tidak lagi berada pada komponen yang terpisah-pisah, melainkan pada sistem yang menghubungkan seluruh komponen tersebut.

Dalam dunia rekayasa, salah satu indikator penting dari perangkat yang mulai mengalami kerusakan adalah meningkatnya kebutuhan sumber daya untuk menghasilkan keluaran yang sama. Tugas yang dahulu dapat diselesaikan dengan mudah mulai membutuhkan energi yang lebih besar. Sistem menjadi semakin berat untuk dijalankan. Efisiensi menurun tanpa disadari. Fenomena yang serupa dapat ditemukan dalam kehidupan bernegara. Program yang sederhana memerlukan proses yang panjang. Pengambilan keputusan menjadi semakin rumit. Penyelesaian masalah membutuhkan biaya pemerintahan yang semakin besar. Koordinasi antar lembaga menjadi semakin sulit. Negara tetap bergerak, tetapi untuk menghasilkan keluaran yang sama dibutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya.

Keadaan tersebut tidak selalu menunjukkan adanya niat buruk dari para pelaku yang berada di dalam sistem. Sebagaimana perangkat yang mengalami penurunan performa tidak selalu disebabkan oleh kesalahan pengguna, penurunan kualitas penyelenggaraan negara juga tidak selalu disebabkan oleh buruknya kualitas individu yang menjalankannya. Dalam banyak kasus, persoalannya justru berada pada akumulasi gangguan yang telah berkembang dalam

waktu yang lama. Setiap gangguan mungkin terlihat kecil ketika muncul untuk pertama kalinya. Namun ketika gangguan-gangguan tersebut saling bertumpuk dan saling memengaruhi, dampaknya mulai dirasakan oleh seluruh sistem.

Inilah alasan mengapa pembahasan mengenai negara salah desain tidak berhenti pada persoalan desain semata. Sebuah desain yang keliru pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi operasional yang nyata. Ketika desain tersebut dijalankan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, berbagai kelemahan yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Sistem tetap berjalan karena negara memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat besar. Masyarakat tetap bertahan. Aparatur tetap bekerja. Institusi tetap menjalankan fungsi formalnya. Namun kemampuan sistem untuk mencapai tujuan pembentukannya perlahan mengalami penurunan.

Pada titik inilah bangsa perlu membedakan antara sistem yang hidup dan sistem yang sehat. Sistem yang hidup masih mampu bergerak. Sistem yang hidup masih mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar. Akan tetapi sistem yang sehat bukan hanya mampu bergerak, melainkan mampu bergerak menuju tujuan yang benar dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Sebuah negara dapat tetap hidup selama puluhan tahun meskipun mengalami berbagai gangguan struktural. Namun tanpa upaya memahami dan memperbaiki sumber gangguan tersebut, kualitas kehidupan berbangsa akan terus dibatasi oleh kemampuan sistem yang semakin menurun.

Karena itu, persoalan yang dibahas dalam bab ini bukanlah persoalan mengenai negara yang runtuh. Persoalan yang dibahas adalah sesuatu yang jauh lebih halus sekaligus lebih berbahaya, yaitu kondisi ketika negara masih tampak berjalan normal, tetapi berbagai komponen yang menopangnya mulai kehilangan kemampuan untuk bekerja sebagaimana tujuan pembentukannya. Sebagaimana seorang insinyur tidak hanya bertanya apakah perangkat masih menyala, bangsa ini juga perlu mulai bertanya apakah sistem negara masih bekerja sesuai dengan tujuan yang diletakkan pada fondasinya sejak awal. Sebab sering kali kerusakan yang paling serius bukan terjadi ketika sistem berhenti bekerja, melainkan ketika sistem terus berjalan sambil perlahan kehilangan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan para pemiliknya.

16.2. Kerusakan yang Tidak Terlihat

Salah satu karakteristik paling berbahaya dari sebuah kerusakan sistem adalah kenyataan bahwa kerusakan tersebut sering kali tidak langsung terlihat. Dalam dunia teknologi, masyarakat umumnya baru menyadari adanya masalah ketika perangkat benar-benar gagal berfungsi. Ketika komputer tidak dapat dinyalakan, ketika layar berubah gelap, atau ketika sistem berhenti merespons seluruh perintah pengguna, keberadaan kerusakan menjadi sangat jelas. Namun para insinyur mengetahui bahwa sebagian besar kegagalan sistem tidak dimulai dari peristiwa yang dramatis. Kerusakan biasanya berkembang secara perlahan, tersembunyi di balik fungsi-fungsi yang

masih tampak berjalan normal. Perangkat tetap dapat digunakan, aplikasi masih dapat dibuka, dan pengguna masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi pada saat yang sama, kualitas kerja sistem terus mengalami penurunan tanpa disadari.

Fenomena tersebut dapat ditemukan pada hampir semua perangkat yang mengalami masalah pada tingkat perangkat keras. Sebuah komputer yang memiliki kerusakan pada motherboard, misalnya, masih mampu menjalankan berbagai fungsi dasar. Pengguna tetap dapat menyalakan perangkat, membuka dokumen, mengakses internet, bahkan menjalankan aplikasi yang biasa digunakan. Namun di balik tampilan yang tampak normal tersebut, berbagai gangguan kecil mulai bermunculan. Waktu respons menjadi lebih lambat. Kesalahan sistem terjadi lebih sering. Proses yang dahulu berlangsung dengan lancar mulai menunjukkan hambatan. Pada tahap awal, gangguan tersebut sering dianggap sebagai masalah kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi ketika dibiarkan berlangsung dalam waktu yang lama, seluruh sistem mulai kehilangan stabilitas dan kemampuan untuk bekerja secara optimal.

Keadaan yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Sebuah negara tidak selalu menunjukkan gejala kerusakan melalui keruntuhan yang mendadak. Dalam banyak kasus, negara justru tetap terlihat normal dari luar. Pemerintahan tetap berjalan. Anggaran tetap disusun. Pemilu tetap dilaksanakan. Pengadilan tetap bersidang. Aparatur tetap bekerja. Berbagai indikator formal yang biasa

digunakan untuk menilai keberadaan negara masih tampak berfungsi sebagaimana mestinya. Namun ketika diperhatikan secara lebih mendalam, mulai terlihat berbagai gejala yang menunjukkan bahwa sistem tidak lagi bekerja seefektif yang seharusnya.

Masyarakat mulai merasakan bahwa proses yang seharusnya sederhana menjadi semakin rumit. Kebijakan yang seharusnya menyelesaikan masalah justru sering melahirkan persoalan baru. Hubungan antara rakyat dan negara terasa semakin jauh meskipun teknologi komunikasi berkembang semakin pesat. Kepercayaan terhadap institusi publik mengalami penurunan secara perlahan. Hukum tetap ditegakkan, tetapi rasa keadilan tidak selalu tumbuh seiring dengan banyaknya aturan yang diterbitkan. Pemerintah tetap bekerja, tetapi sebagian masyarakat merasa semakin sulit melihat hubungan langsung antara aktivitas pemerintahan dan peningkatan kualitas hidup sehari-hari.

Persoalan-persoalan tersebut sering kali dianggap sebagai masalah yang berdiri sendiri. Sebagian orang melihatnya sebagai kegagalan kebijakan. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai akibat dari kualitas kepemimpinan yang kurang memadai. Sebagian lagi menghubungkannya dengan kondisi ekonomi global atau perubahan sosial yang sedang berlangsung. Seluruh faktor tersebut memang dapat memberikan pengaruh tertentu. Akan tetapi ketika gejala yang serupa terus muncul dalam berbagai periode pemerintahan yang berbeda, dalam situasi pemerintahan yang berbeda, dan bahkan dalam

generasi yang berbeda, terdapat alasan yang kuat untuk mempertimbangkan bahwa persoalannya mungkin berada pada tingkat yang lebih dalam daripada sekadar pelaksanaan sehari-hari.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, negara dipahami sebagai sebuah sistem yang dibangun di atas beberapa lapisan yang saling terhubung. Pancasila berfungsi sebagai *kernel* yang memuat nilai-nilai dasar dan tujuan fundamental bangsa. Konstitusi berfungsi sebagai *firmware* yang menentukan cara kerja sistem negara. Rakyat merupakan *root owner* yang menjadi sumber legitimasi tertinggi. MPR menjalankan fungsi *root administrator* sebagai mandataris rakyat yang bertugas menjaga arah sistem. Pemerintah dan berbagai lembaga negara menjalankan fungsi operasional yang memungkinkan seluruh sistem bergerak. Ketika salah satu lapisan mengalami gangguan, dampaknya tidak selalu langsung terlihat pada lapisan yang lain. Sama seperti sebuah perangkat yang mengalami kerusakan internal tetapi masih mampu menampilkan layar yang normal, negara juga dapat mengalami penurunan kualitas sistemik tanpa menunjukkan tanda-tanda keruntuhan yang mudah dikenali.

Justru karena sifatnya yang tersembunyi, kerusakan semacam ini sering kali lebih berbahaya daripada kerusakan yang terlihat jelas. Ketika sebuah bangunan mengalami retakan besar pada dinding utamanya, semua orang segera menyadari adanya masalah. Perhatian langsung tertuju kepada sumber kerusakan dan langkah-langkah perbaikan dapat segera

dilakukan. Sebaliknya, ketika kerusakan berkembang secara perlahan di dalam struktur yang tidak terlihat, penghuni bangunan cenderung menganggap semuanya masih baik-baik saja. Retakan kecil dianggap wajar. Penurunan kualitas dianggap sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Berbagai gejala yang muncul diterima sebagai bagian dari keadaan normal. Padahal di bawah permukaan, struktur yang menopang seluruh bangunan sedang mengalami tekanan yang semakin besar.

Fenomena inilah yang sering menjelaskan mengapa banyak bangsa terlambat menyadari adanya persoalan struktural dalam sistem negaranya. Karena negara masih berdiri, muncul keyakinan bahwa sistem masih bekerja dengan baik. Karena institusi masih beroperasi, muncul anggapan bahwa tidak ada masalah yang mendasar. Karena aktivitas kekuasaan masih berlangsung, muncul kesan bahwa demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Namun ukuran kesehatan sebuah sistem tidak dapat ditentukan hanya dari kemampuannya untuk tetap beroperasi. Ukuran yang jauh lebih penting adalah kemampuan sistem tersebut untuk mencapai tujuan yang menjadi alasan pembentukannya.

Jika tujuan negara adalah mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pertanyaannya bukan sekadar apakah pemilu masih berlangsung, melainkan apakah rakyat benar-benar memiliki kendali terhadap arah negara. Jika tujuan negara adalah menciptakan keadilan sosial, maka pertanyaannya bukan sekadar apakah lembaga hukum masih berfungsi, melainkan apakah

keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, maka ukuran keberhasilannya tidak cukup dilihat dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari sejauh mana tujuan tersebut benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata.

Ketika jarak antara tujuan dan hasil semakin besar, ketika berbagai institusi masih bekerja tetapi tidak lagi menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, dan ketika masyarakat semakin sering merasakan bahwa sistem tidak bekerja sebagaimana yang seharusnya, maka gejala-gejala tersebut perlu dibaca sebagai sinyal adanya kerusakan yang lebih mendasar. Kerusakan tersebut mungkin tidak terlihat secara langsung. Kerusakan tersebut mungkin tidak menimbulkan kegagalan total. Namun sebagaimana perangkat yang perlahan kehilangan performanya akibat gangguan pada komponen internal, negara juga dapat mengalami penurunan kualitas secara bertahap akibat persoalan yang berkembang pada tingkat struktur dan desain sistemnya.

Karena itu, memahami kerusakan yang tidak terlihat merupakan langkah penting sebelum berbicara mengenai solusi. Sebuah bangsa tidak dapat memperbaiki apa yang tidak dipahaminya. Sebuah sistem tidak dapat dipulihkan apabila gejala-gejala awalnya terus diabaikan. Dan sebagaimana seorang insinyur yang berpengalaman mampu mengenali tanda-tanda kerusakan jauh sebelum perangkat benar-benar gagal berfungsi, bangsa yang ingin menjaga masa

depannya juga harus mampu membaca berbagai gejala yang muncul sebelum kerusakan tersebut berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar. Sebab dalam banyak kasus, keruntuhan bukanlah awal dari sebuah krisis, melainkan akhir dari kerusakan yang telah berlangsung lama tanpa pernah benar-benar disadari.

16.3. Institusi yang Mulai Malfunction

Salah satu tanda paling jelas bahwa sebuah sistem sedang mengalami kerusakan bukanlah ketika sistem tersebut berhenti bekerja, melainkan ketika komponen-komponen di dalamnya masih berfungsi secara formal tetapi tidak lagi menjalankan tujuan yang menjadi alasan pembentukannya. Dalam dunia teknologi, keadaan seperti ini dikenal sebagai *malfunction*. Sebuah perangkat masih menyala, perintah masih dapat dijalankan, dan berbagai indikator masih menunjukkan bahwa sistem sedang bekerja. Namun hasil yang dihasilkan tidak lagi sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Sensor masih aktif tetapi tidak lagi membaca kondisi secara akurat. Pendingin masih berputar tetapi tidak lagi mampu menjaga suhu perangkat. Modul keamanan masih berjalan tetapi tidak lagi mampu mendeteksi ancaman secara efektif. Dari luar, seluruh komponen tampak hidup. Persoalannya bukan terletak pada keberadaan komponen tersebut, melainkan pada menurunnya kemampuan komponen untuk menjalankan tujuan dasarnya.

Fenomena yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Sebuah institusi dapat tetap berdiri selama puluhan tahun, memiliki gedung yang

megah, anggaran yang besar, struktur organisasi yang lengkap, dan kewenangan yang diatur secara rinci dalam berbagai peraturan. Namun keberadaan sebuah institusi tidak otomatis menunjukkan bahwa fungsi yang seharusnya dijalankan masih bekerja sebagaimana mestinya. Sebuah lembaga dapat tetap hidup secara administratif tetapi mengalami kemunduran secara fungsional. Dalam keadaan seperti itu, masalah terbesar bukanlah ketiadaan institusi, melainkan terjadinya pergeseran antara tujuan pembentukan institusi dengan perilaku yang dihasilkan dalam praktik sehari-hari.

Dalam setiap negara, institusi dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu yang berkaitan dengan tujuan negara. Lembaga legislatif dibentuk untuk menyalurkan dan mengawasi aspirasi rakyat dalam pembentukan kebijakan. Lembaga eksekutif dibentuk untuk menjalankan administrasi negara dan melaksanakan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat. Lembaga yudikatif dibentuk untuk menjaga keadilan dan memastikan hukum berjalan secara benar. Berbagai lembaga pendukung lainnya dibentuk untuk memperkuat kemampuan negara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Dengan kata lain, institusi pada dasarnya merupakan alat yang digunakan negara untuk mewujudkan kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Masalah mulai muncul ketika institusi perlahan bergerak menjauh dari tujuan pembentukannya. Pergeseran tersebut biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada satu hari tertentu ketika sebuah institusi

bangun di pagi hari lalu memutuskan untuk meninggalkan seluruh fungsi dasarnya. Proses tersebut berlangsung perlahan, bertahap, dan sering kali tidak disadari oleh mereka yang berada di dalamnya. Sedikit demi sedikit orientasi mulai berubah. Energi yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat mulai terserap untuk mempertahankan kepentingan organisasi itu sendiri. Keputusan yang seharusnya didasarkan pada tujuan pembentukan institusi mulai dipengaruhi oleh kepentingan internal yang berkembang di dalam struktur tersebut. Dalam jangka panjang, institusi masih menjalankan aktivitas yang sama, tetapi arah pergerakannya tidak lagi sepenuhnya selaras dengan tujuan awalnya.

Dalam teori organisasi modern, kondisi tersebut sering disebut sebagai *goal displacement*, yaitu keadaan ketika organisasi mulai lebih fokus mempertahankan dirinya sendiri dibanding menjalankan tujuan yang menjadi alasan keberadaannya. Fenomena tersebut dapat ditemukan di berbagai negara dan dalam berbagai jenis organisasi. Sebuah lembaga yang dibentuk untuk melayani masyarakat perlahan lebih sibuk melayani kebutuhan administratifnya sendiri. Sebuah organisasi yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah tertentu perlahan lebih fokus menjaga keberlangsungan organisasinya dibanding menyelesaikan masalah yang menjadi alasan pembentukannya. Semakin lama kondisi tersebut berlangsung, semakin besar jarak antara tujuan formal dan perilaku aktual yang dihasilkan oleh institusi tersebut.

Dalam analogi sistem yang digunakan dalam buku ini, institusi dapat dipahami sebagai berbagai modul yang bekerja di atas *firmware* negara. Pancasila sebagai *kernel* memberikan arah nilai. Konstitusi sebagai *firmware* menentukan hubungan dan fungsi dasar. Rakyat tetap menjadi *root owner* sebagai pemilik kedaulatan. MPR berfungsi sebagai *root administrator* yang menerima mandat rakyat untuk menjaga arah sistem. Institusi-institusi negara kemudian bekerja sebagai komponen operasional yang menerjemahkan tujuan negara ke dalam tindakan nyata. Dalam kondisi ideal, seluruh komponen tersebut bergerak secara harmonis. Namun ketika salah satu komponen mulai mengalami *malfunction*, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh komponen tersebut, tetapi juga menjalar ke seluruh sistem.

Bayangkan sebuah perangkat yang memiliki sensor suhu yang mulai mengalami gangguan. Sensor masih aktif dan tetap mengirimkan data. Namun data yang dikirimkan tidak lagi sepenuhnya akurat. Sistem pendingin kemudian mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah. Akibatnya suhu perangkat meningkat tanpa terdeteksi secara benar. Komponen lain mulai mengalami tekanan yang lebih besar. Kinerja keseluruhan sistem menurun meskipun sumber persoalannya hanya berasal dari satu bagian kecil. Semakin lama gangguan tersebut dibiarkan, semakin besar dampaknya terhadap seluruh perangkat.

Demikian pula ketika institusi negara mulai kehilangan orientasi terhadap tujuan pembentukannya. Dampaknya tidak berhenti pada institusi tersebut saja.

Ketika lembaga pengawasan tidak lagi mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, kualitas pengelolaan negara ikut terpengaruh. Ketika lembaga yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat lebih banyak terjebak dalam kepentingan internal atau kepentingan kelompok tertentu, hubungan antara rakyat dan negara menjadi semakin jauh. Ketika institusi hukum tidak lagi menghasilkan rasa keadilan yang sejalan dengan harapan masyarakat, kepercayaan terhadap sistem hukum mulai mengalami erosi. Setiap gangguan yang terjadi pada satu institusi pada akhirnya akan memengaruhi kesehatan sistem secara keseluruhan.

Yang membuat persoalan ini semakin rumit adalah kenyataan bahwa sebagian besar gejalanya tampak seperti masalah individu. Publik melihat pejabat tertentu, keputusan tertentu, atau kasus tertentu. Perhatian kemudian tertuju kepada aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Padahal di balik berbagai peristiwa yang tampak terpisah itu sering kali terdapat pola yang lebih besar. Ketika perilaku yang sama terus muncul dalam generasi kepemimpinan yang berbeda, ketika persoalan yang serupa terus berulang di bawah orang-orang yang berbeda, dan ketika berbagai institusi menunjukkan kecenderungan yang sama meskipun telah mengalami pergantian personel berkali-kali, maka perhatian perlu diarahkan kepada kemungkinan bahwa yang sedang terjadi bukan lagi kesalahan individual semata, melainkan gejala *malfunction* pada tingkat institusional.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, gejala semacam ini tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan moral. Integritas tetap penting. Kompetensi tetap penting. Kepemimpinan tetap penting. Namun kualitas individu tidak selalu cukup untuk mengatasi persoalan yang telah tertanam pada tingkat institusi. Sebagaimana teknisi terbaik tidak dapat memperbaiki perangkat yang rusak hanya dengan mengganti pengguna, perbaikan institusional juga tidak selalu dapat dicapai hanya dengan mengganti pejabat yang berada di dalamnya. Selama pola kerja yang menghasilkan gangguan tersebut tetap berada dalam sistem, gejala yang sama berpotensi terus muncul dalam bentuk yang berbeda.

Karena itu, ketika membahas kerusakan negara, perhatian tidak boleh hanya diarahkan kepada siapa yang sedang menjalankan institusi. Perhatian juga harus diarahkan kepada apakah institusi tersebut masih bekerja sesuai tujuan pembentukannya. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar apakah lembaga tersebut masih ada, melainkan apakah fungsi yang menjadi alasan keberadaannya masih berjalan secara efektif. Sebab sebuah institusi dapat tetap hidup secara administratif, tetap aktif secara organisasi, dan tetap memiliki kewenangan yang besar, tetapi pada saat yang sama perlahan kehilangan kemampuan untuk melayani tujuan yang menjadi dasar keberadaannya.

Pada akhirnya, kerusakan sebuah negara sering kali tidak dimulai dari runtuhnya institusi, melainkan dari menurunnya fungsi institusi. Negara tetap berdiri. Gedung tetap digunakan. Jabatan tetap diisi. Kegiatan

tetap berlangsung. Namun sedikit demi sedikit hubungan antara tujuan dan pelaksanaan mulai terputus. Ketika kondisi tersebut terjadi secara luas dan berlangsung dalam waktu yang lama, negara tidak sedang menghadapi ketiadaan institusi, melainkan menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu institusi yang masih hidup tetapi tidak lagi bekerja sepenuhnya untuk tujuan yang menjadi alasan pembentukannya. Dari sinilah gejala kerusakan sistemik mulai berkembang dan perlahan menjalar ke seluruh bagian negara.

16.4. Ketika Pengawasan Tidak Lagi Mengawasi

Dalam setiap sistem yang dirancang dengan baik, pengawasan bukanlah pelengkap, melainkan bagian yang menentukan keberlangsungan sistem itu sendiri. Sehebat apa pun sebuah mesin dirancang, selalu terdapat mekanisme yang bertugas memantau kinerjanya. Sensor mengukur suhu. Indikator memantau tekanan. Sistem diagnostik mendeteksi kesalahan yang muncul selama operasional berlangsung. Seluruh perangkat tersebut bekerja bukan untuk menghambat fungsi utama sistem, melainkan untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa mekanisme pengawasan yang sehat, sebuah sistem dapat terus beroperasi sambil perlahan bergerak menuju kerusakan yang semakin besar tanpa pernah menyadari bahwa penyimpangan sedang terjadi.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Negara tidak hanya membutuhkan lembaga

yang menjalankan kekuasaan. Negara juga membutuhkan lembaga yang mengawasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan, dalam bentuk apa pun, selalu memiliki kecenderungan untuk berkembang melampaui batas yang seharusnya apabila tidak dikendalikan oleh mekanisme pengawasan yang efektif. Karena itulah dalam berbagai teori ketatanegaraan modern dikenal konsep checks and balances, yaitu mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu kekuatan yang berkembang tanpa kendali.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, kebutuhan akan pengawasan sesungguhnya berakar pada prinsip yang lebih mendasar, yaitu kedaulatan rakyat. Karena rakyat merupakan *root owner* atau pemilik sah negara, seluruh penyelenggara negara pada hakikatnya menjalankan amanah yang berasal dari rakyat. MPR sebagai *root administrator* menerima mandat untuk menjaga agar sistem tetap berjalan sesuai dengan tujuan negara dan kehendak pemilik kedaulatan. Lembaga-lembaga negara lainnya menjalankan fungsi masing-masing berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Dalam konstruksi seperti ini, pengawasan bukan sekadar hubungan antar lembaga, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh sistem tetap bergerak sesuai mandat yang berasal dari rakyat.

Masalah mulai muncul ketika pengawasan kehilangan orientasinya. Dalam dunia teknologi, terdapat kondisi di mana sensor masih aktif tetapi tidak lagi mampu membaca kondisi sebenarnya. Sistem diagnostik masih berjalan tetapi tidak lagi mendeteksi

kesalahan yang terjadi. Alarm masih terpasang tetapi tidak lagi berbunyi ketika muncul gangguan. Dari luar seluruh perangkat pengawasan tampak berfungsi, tetapi kemampuan utamanya untuk mendeteksi penyimpangan perlahan menghilang. Keadaan seperti ini jauh lebih berbahaya dibanding tidak adanya sensor sama sekali, karena sistem menciptakan ilusi bahwa pengawasan masih berjalan padahal fungsi pengawasan sesungguhnya telah mengalami gangguan.

Fenomena yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Lembaga pengawas tetap ada. Mekanisme pengawasan tetap diatur dalam berbagai peraturan. Proses pemeriksaan tetap dilaksanakan. Sidang pengawasan tetap berlangsung. Laporan tetap dibuat. Audit tetap dilakukan. Akan tetapi keberadaan mekanisme tersebut tidak otomatis menjamin bahwa fungsi pengawasan berjalan secara efektif. Dalam banyak kasus, persoalan justru muncul ketika pengawasan berubah menjadi aktivitas administratif yang kehilangan hubungan dengan tujuan dasarnya. Proses tetap berlangsung, tetapi kemampuan untuk mengoreksi penyimpangan semakin menurun.

Keadaan tersebut biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Pengawasan yang melemah sering kali berkembang secara perlahan melalui berbagai bentuk ketergantungan yang tidak disadari. Lembaga yang seharusnya mengawasi mulai memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan pihak yang diawasi. Mekanisme evaluasi lebih berfokus pada prosedur daripada substansi. Keberhasilan diukur berdasarkan terpenuhinya formalitas administratif, bukan

berdasarkan tercapainya tujuan pengawasan itu sendiri. Dalam jangka panjang, hubungan yang seharusnya bersifat korektif berubah menjadi hubungan yang lebih menyerupai koordinasi internal dalam satu sistem yang sama.

Dalam teori organisasi, kondisi semacam ini sering disebut sebagai regulatory capture atau bentuk-bentuk penangkapan fungsi pengawasan oleh kepentingan yang seharusnya diawasi. Meskipun istilah tersebut umumnya digunakan dalam konteks regulasi, prinsip dasarnya dapat ditemukan pada hampir semua sistem yang mengalami penurunan kualitas pengawasan. Ketika pengawas mulai lebih memahami kepentingan pihak yang diawasi daripada kepentingan publik yang harus dilindungi, arah pengawasan perlahan bergeser. Ketika hubungan personal, kepentingan kelembagaan, atau ketergantungan struktural berkembang terlalu kuat, kemampuan untuk melakukan koreksi secara objektif ikut melemah.

Dalam analogi perangkat digital, kondisi tersebut menyerupai sistem keamanan yang mulai menganggap ancaman sebagai aktivitas normal. Program keamanan masih berjalan setiap hari. Laporan keamanan masih dibuat. Indikator masih menunjukkan status aktif. Namun ancaman yang seharusnya terdeteksi justru dibiarkan masuk karena sistem tidak lagi mampu membedakan antara aktivitas yang normal dan aktivitas yang berbahaya. Akibatnya, gangguan terus berkembang di dalam sistem tanpa memperoleh respons yang memadai.

Ketika keadaan seperti itu terjadi dalam negara, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lembaga pengawas. Dampaknya menjalar ke seluruh sistem. Penyimpangan yang seharusnya dapat dihentikan sejak awal berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kesalahan yang seharusnya segera dikoreksi berubah menjadi kebiasaan yang dianggap normal. Pelanggaran yang seharusnya menjadi pengecualian perlahan diterima sebagai bagian dari praktik yang wajar. Semakin lama kondisi tersebut berlangsung, semakin sulit membedakan antara sistem yang sehat dan sistem yang telah beradaptasi dengan berbagai bentuk penyimpangan.

Salah satu gejala yang paling sering muncul adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi. Kepercayaan pada dasarnya lahir dari keyakinan bahwa sistem memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri ketika terjadi kesalahan. Masyarakat dapat menerima bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Kesalahan akan selalu terjadi. Penyalahgunaan kewenangan mungkin muncul. Kebijakan yang keliru mungkin dibuat. Namun kepercayaan tetap terjaga selama terdapat keyakinan bahwa mekanisme pengawasan mampu mendeteksi, mengoreksi, dan mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Ketika keyakinan tersebut mulai melemah, kepercayaan publik ikut mengalami erosi.

Dalam konteks negara, hilangnya kepercayaan terhadap mekanisme pengawasan memiliki dampak yang sangat luas. Masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas lembaga yang ada. Setiap keputusan

dipandang dengan kecurigaan yang lebih besar. Setiap penyimpangan dianggap sebagai bukti bahwa sistem tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sendiri. Pada tahap tertentu, persoalan tidak lagi berada pada satu kasus atau satu lembaga tertentu, melainkan pada menurunnya keyakinan bahwa negara masih memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya tetap berada pada jalur yang benar.

Inilah sebabnya pengawasan memiliki posisi yang sangat penting dalam kesehatan sebuah negara. Pengawasan bukan sekadar prosedur administratif. Pengawasan bukan sekadar kewajiban formal yang harus dipenuhi oleh lembaga tertentu. Pengawasan adalah mekanisme koreksi yang memungkinkan negara tetap bergerak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sebagaimana sensor yang sehat menjaga sebuah perangkat dari kerusakan yang lebih besar, mekanisme pengawasan yang sehat menjaga negara dari penyimpangan yang dapat berkembang menjadi masalah sistemik.

Pada akhirnya, kerusakan sebuah negara sering kali tidak dimulai ketika kekuasaan menjadi terlalu besar. Kerusakan sering kali dimulai ketika mekanisme yang seharusnya mengawasi kekuasaan perlahan kehilangan kemampuannya untuk menjalankan fungsi tersebut. Negara masih terlihat berjalan normal. Lembaga pengawas masih ada. Proses pengawasan masih berlangsung. Namun ketika pengawasan tidak lagi benar-benar mengawasi, sistem kehilangan salah satu kemampuan terpentingnya, yaitu kemampuan untuk mengenali kesalahan sebelum kesalahan tersebut

berkembang menjadi krisis yang jauh lebih besar. Dan ketika kemampuan itu hilang, kerusakan yang sebelumnya kecil dapat tumbuh secara perlahan hingga akhirnya memengaruhi keseluruhan bangunan negara.

16.5. *Governance Collapse* yang Terjadi Perlahan

Ketika mendengar istilah *governance collapse* atau keruntuhan tata kelola, banyak orang membayangkan sebuah peristiwa yang berlangsung secara tiba-tiba. Bayangan yang muncul biasanya berupa negara yang jatuh ke dalam kekacauan, pemerintahan yang berhenti berfungsi, konflik terbuka yang meluas, atau runtuhnya seluruh institusi dalam waktu singkat. Gambaran tersebut memang dapat terjadi dalam beberapa kasus ekstrem, tetapi dalam kenyataannya sebagian besar keruntuhan tata kelola tidak berlangsung seperti ledakan yang terjadi dalam satu malam. Keruntuhan yang paling sering terjadi justru berkembang secara perlahan, bertahap, dan hampir tidak terasa pada tahap-tahap awalnya. Sistem tetap berjalan, lembaga tetap bekerja, dan berbagai aktivitas kenegaraan tetap berlangsung. Namun pada saat yang sama kemampuan negara untuk mencapai tujuan pembentukannya terus mengalami penurunan.

Dalam dunia teknologi terdapat fenomena yang sangat mirip. Sebuah hard disk yang mulai mengalami *bad sector* tidak langsung berhenti berfungsi. Komputer masih dapat dinyalakan. Data masih dapat diakses. Aplikasi masih dapat dijalankan. Pengguna bahkan mungkin tidak menyadari adanya masalah selama beberapa waktu. Akan tetapi sedikit demi sedikit

performa mulai menurun. Proses pembacaan data menjadi lebih lambat. Beberapa file mulai sulit diakses. Kesalahan kecil muncul semakin sering. Seiring bertambahnya jumlah sektor yang rusak, kemampuan perangkat untuk menjalankan fungsi dasarnya semakin berkurang. Pada titik tertentu, pengguna baru menyadari bahwa persoalan yang dihadapi bukan lagi gangguan kecil yang berdiri sendiri, melainkan kerusakan sistemik yang telah berkembang dalam waktu yang lama.

Fenomena tersebut memberikan gambaran yang sangat tepat mengenai bagaimana keruntuhan tata kelola berkembang dalam sebuah negara. Tata kelola yang baik pada dasarnya adalah kemampuan seluruh institusi negara untuk bekerja secara terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Tata kelola yang sehat memastikan bahwa kebijakan dapat dirumuskan secara efektif, sumber daya negara dapat dikelola secara bertanggung jawab, hukum dapat ditegakkan secara adil, dan kepentingan rakyat dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam penyelenggaraan negara. Selama kemampuan tersebut tetap terjaga, negara dapat menghadapi berbagai tantangan tanpa kehilangan arah.

Masalah muncul ketika kemampuan tersebut mulai mengalami erosi secara bertahap. Pada awalnya gejalanya tampak kecil dan terpisah-pisah. Sebuah kebijakan tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Sebuah program pembangunan berjalan di bawah target. Koordinasi antar lembaga mengalami hambatan. Proses birokrasi menjadi semakin panjang. Pengawasan

menjadi kurang efektif. Setiap persoalan terlihat sebagai masalah teknis yang dapat diselesaikan secara individual. Namun ketika gejala yang sama terus muncul di berbagai sektor dan dalam jangka waktu yang panjang, persoalan tersebut mulai menunjukkan pola yang lebih besar. Yang sedang terjadi bukan lagi kegagalan satu kebijakan atau satu institusi, melainkan menurunnya kapasitas sistem secara keseluruhan.

Dalam glosarium yang digunakan dalam buku ini, negara dipahami sebagai sebuah sistem yang dibangun di atas hubungan antara *kernel*, *firmware*, dan berbagai komponen operasional yang bekerja di atasnya. Pancasila sebagai *kernel* menyediakan arah nilai dan tujuan dasar. Konstitusi sebagai *firmware* menentukan cara kerja sistem negara. Rakyat tetap menjadi *root owner* yang memegang kedaulatan tertinggi. MPR sebagai *root administrator* bertugas menjaga agar sistem tetap bergerak sesuai dengan mandat rakyat. Pemerintah dan berbagai institusi negara menjalankan fungsi operasional sehari-hari. Ketika hubungan antar lapisan tersebut berjalan secara harmonis, negara memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesalahan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun ketika hubungan tersebut mulai terganggu, kemampuan koreksi sistem perlahan mengalami penurunan.

Salah satu ciri utama dari *governance collapse* yang berkembang secara perlahan adalah semakin besarnya energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil yang sama. Program yang dahulu dapat dijalankan dengan sederhana memerlukan koordinasi yang semakin rumit.

Keputusan yang dahulu dapat diambil dengan cepat memerlukan proses yang semakin panjang. Penyelesaian masalah yang dahulu dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia mulai membutuhkan intervensi luar biasa. Negara tetap bekerja, tetapi efisiensi sistem terus menurun. Dalam dunia teknik, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya sistem mulai digunakan untuk mempertahankan operasional dasar, bukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Kerusakan semacam ini sering kali tidak disadari karena negara masih terlihat berfungsi dari luar. Pemilu tetap dilaksanakan. Anggaran tetap disusun. Laporan tetap diterbitkan. Struktur kelembagaan tetap dipertahankan. Namun keberadaan prosedur tidak selalu berarti keberadaan kapasitas. Sebuah perangkat yang rusak masih dapat menampilkan antarmuka yang sama seperti ketika perangkat tersebut dalam kondisi sehat. Perbedaannya terletak pada kemampuan sistem untuk menjalankan fungsi yang berada di balik tampilan tersebut. Demikian pula sebuah negara dapat mempertahankan seluruh atribut formalnya sambil perlahan kehilangan kemampuan substantif untuk mencapai tujuan yang menjadi alasan keberadaannya.

Keadaan ini menjadi semakin berbahaya ketika berbagai bentuk ketidakefisienan mulai dianggap sebagai sesuatu yang normal. Proses yang berbelit dianggap sebagai bagian alami dari birokrasi. Keterlambatan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ketidaksinkronan antar lembaga diterima sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Ketika gejala-

gejala tersebut berlangsung terlalu lama, masyarakat dan bahkan penyelenggara negara mulai menyesuaikan diri terhadap kondisi yang sesungguhnya menunjukkan adanya gangguan sistemik. Pada tahap tersebut, kerusakan tidak hanya terjadi pada mekanisme operasional, tetapi juga pada cara sistem memahami dirinya sendiri.

Dalam banyak kasus, *governance collapse* tidak berarti negara kehilangan seluruh kemampuannya sekaligus. Sebaliknya, negara masih mampu menjalankan sebagian besar fungsi dasarnya. Persoalannya terletak pada menurunnya kemampuan negara untuk belajar, beradaptasi, dan melakukan koreksi terhadap kesalahan yang muncul. Sistem yang sehat selalu memiliki kapasitas untuk mengenali penyimpangan dan memperbaikinya sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Ketika kapasitas tersebut mulai hilang, kesalahan kecil dapat bertahan lebih lama, berkembang lebih luas, dan akhirnya memengaruhi bagian-bagian lain dari sistem.

Inilah sebabnya keruntuhan tata kelola yang berlangsung perlahan sering kali lebih sulit dikenali dibanding keruntuhan yang terjadi secara mendadak. Kerusakan tidak datang dalam bentuk guncangan besar yang memaksa semua orang memperhatikannya. Kerusakan berkembang melalui akumulasi gangguan-gangguan kecil yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian mendasar. Setiap gangguan mungkin terlihat tidak terlalu serius ketika berdiri sendiri. Namun ketika seluruh gangguan tersebut saling bertumpuk selama

bertahun-tahun, kapasitas negara untuk menjalankan fungsinya mulai tergerus secara perlahan.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, gejala seperti ini tidak boleh dipahami hanya sebagai persoalan administratif atau teknis. Gejala tersebut perlu dibaca sebagai sinyal bahwa terdapat hubungan yang mulai terganggu antara tujuan negara, desain negara, dan operasional negara. Ketika rakyat sebagai *root owner* semakin sulit melihat keterhubungan antara kedaulatan yang dimilikinya dengan arah kebijakan negara, ketika institusi semakin sibuk mengelola dirinya sendiri dibanding melayani tujuan pembentukannya, dan ketika mekanisme pengawasan semakin kehilangan daya koreksinya, maka seluruh sistem mulai bergerak menuju kondisi yang semakin rentan terhadap kerusakan yang lebih besar.

Karena itu, *governance collapse* bukanlah peristiwa yang harus ditunggu hingga negara benar-benar runtuh. *Governance collapse* adalah proses yang harus dikenali sejak gejala-gejala awalnya mulai muncul. Sebagaimana seorang insinyur yang berpengalaman mampu membaca tanda-tanda kerusakan pada perangkat jauh sebelum perangkat tersebut berhenti bekerja, sebuah bangsa juga harus mampu membaca tanda-tanda menurunnya kualitas tata kelola sebelum kerusakan tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Sebab dalam banyak kasus, keruntuhan bukanlah penyebab utama dari kegagalan sebuah sistem. Keruntuhan hanyalah titik akhir dari proses panjang ketika berbagai gangguan kecil terus dibiarkan

berkembang tanpa pernah menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

16.6. *Misalignment* antara Tujuan dan Operasi

Salah satu bentuk kerusakan sistem yang paling sulit dikenali adalah kondisi ketika seluruh komponen masih bekerja, tetapi arah kerja yang dihasilkan tidak lagi selaras dengan tujuan yang seharusnya dicapai. Dalam dunia teknologi, keadaan ini sering disebut sebagai *misalignment*, yaitu ketidaksesuaian antara tujuan yang ditetapkan pada tingkat desain dengan perilaku yang muncul pada tingkat operasional. Sebuah sistem dapat berjalan tanpa gangguan teknis yang berarti, seluruh modul dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan seluruh prosedur dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Namun apabila hasil yang dihasilkan semakin menjauh dari tujuan awal sistem, maka sesungguhnya sedang terjadi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar kesalahan pelaksanaan.

Untuk memahami kondisi tersebut, bayangkan sebuah sistem navigasi yang dirancang untuk membawa kendaraan menuju satu tujuan tertentu. Mesin bekerja dengan baik, roda berputar dengan normal, bahan bakar tersedia, dan seluruh perangkat elektronik berfungsi sebagaimana mestinya. Kendaraan terus bergerak dan bahkan mampu menempuh jarak yang sangat jauh. Namun karena terdapat kesalahan pada kalibrasi arah, setiap kilometer yang ditempuh justru membawa kendaraan semakin jauh dari tujuan yang seharusnya dicapai. Dari sudut pandang operasional, seluruh sistem tampak berhasil

menjalankan tugasnya. Akan tetapi dari sudut pandang tujuan, seluruh perjalanan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk kegagalan.

Fenomena yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Negara dapat memiliki institusi yang lengkap, aparatur yang bekerja setiap hari, proses pemerintahan yang berlangsung secara rutin, dan berbagai program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan. Aktivitas negara terus bergerak tanpa henti. Anggaran terus dibelanjakan. Regulasi terus diterbitkan. Rapat terus dilaksanakan. Pemilu terus diselenggarakan. Berbagai indikator aktivitas menunjukkan bahwa sistem sedang bekerja. Namun pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah apakah negara sedang bekerja, melainkan apakah seluruh aktivitas tersebut benar-benar membawa bangsa semakin dekat kepada tujuan yang menjadi alasan pembentukan negara itu sendiri.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara Indonesia telah dirumuskan dengan sangat jelas. Negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada saat yang sama, Pancasila sebagai dasar negara memberikan arah moral dan filosofis yang harus menjadi landasan seluruh penyelenggaraan negara. Dengan demikian, bangsa Indonesia sesungguhnya tidak pernah kekurangan

tujuan. Tujuan tersebut telah dirumuskan secara tegas sejak negara ini didirikan.

Persoalan muncul ketika operasional negara mulai bergerak dalam arah yang tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan tersebut. Ketidaksesuaian tersebut biasanya tidak muncul dalam bentuk penolakan terbuka terhadap tujuan negara. Tidak ada institusi yang secara resmi menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat tidak lagi penting. Tidak ada lembaga negara yang secara eksplisit menyatakan bahwa keadilan sosial harus diabaikan. Justru karena itulah *misalignment* menjadi sangat sulit dikenali. Secara normatif, seluruh pihak tetap mengakui tujuan yang sama. Namun pada tingkat operasional, keputusan-keputusan yang diambil perlahan menghasilkan arah yang berbeda.

Dalam dunia organisasi, gejala seperti ini sering terjadi ketika ukuran keberhasilan berubah tanpa disadari. Pada awalnya sebuah organisasi dibentuk untuk melayani tujuan tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, perhatian mulai bergeser kepada target-target operasional yang lebih mudah diukur. Keberhasilan tidak lagi dinilai dari tercapainya tujuan utama, melainkan dari terpenuhinya indikator-indikator administratif. Akibatnya, organisasi tetap terlihat produktif meskipun secara perlahan bergerak menjauh dari alasan keberadaannya.

Hal yang sama dapat terjadi dalam negara. Kesejahteraan rakyat dapat berubah menjadi sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Keadilan dapat berubah menjadi sekadar kepatuhan prosedural. Partisipasi rakyat dapat berubah menjadi sekadar pelaksanaan

mekanisme formal. Kedaulatan rakyat dapat berubah menjadi slogan yang diulang dalam pidato-pidato resmi tanpa benar-benar menjadi prinsip yang mengarahkan desain dan operasional negara. Pada tahap tertentu, sistem masih menghasilkan berbagai keluaran, tetapi keluaran tersebut tidak lagi sepenuhnya mencerminkan tujuan yang terkandung dalam fondasi negara.

Dalam glosarium buku ini, Pancasila dipahami sebagai *kernel* yang menjadi sumber nilai dan arah dasar sistem. Konstitusi berfungsi sebagai *firmware* yang menerjemahkan nilai tersebut ke dalam desain negara. Rakyat merupakan *root owner* yang menjadi pemilik sah kedaulatan. MPR bertindak sebagai *root administrator* yang menerima mandat untuk menjaga agar sistem tetap berjalan sesuai kehendak rakyat. Jika hubungan antar lapisan tersebut bekerja secara benar, seluruh aktivitas negara seharusnya bergerak menuju tujuan yang sama. Namun ketika terjadi gangguan pada hubungan antara desain dan operasional, negara berisiko mengalami kondisi di mana aktivitas semakin meningkat tetapi pencapaian tujuan justru semakin menjauh.

Fenomena ini dapat dianalogikan dengan perangkat yang mengalami kesalahan konfigurasi pada tingkat sistem. Prosesor bekerja keras sepanjang waktu. Memori digunakan secara maksimal. Berbagai aplikasi berjalan secara bersamaan. Dari luar tampak seolah perangkat sedang bekerja sangat produktif. Akan tetapi sebagian besar sumber daya yang digunakan tidak menghasilkan manfaat yang seharusnya. Energi habis untuk aktivitas yang tidak mendukung tujuan utama

sistem. Pengguna melihat banyak aktivitas, tetapi tidak memperoleh hasil yang diharapkan.

Dalam konteks negara, kondisi semacam ini sering terlihat ketika masyarakat menyaksikan banyaknya program, banyaknya regulasi, banyaknya proyek, dan banyaknya aktivitas pemerintahan, tetapi pada saat yang sama masih merasakan kesulitan untuk melihat hubungan langsung antara seluruh aktivitas tersebut dengan peningkatan kualitas kehidupan sehari-hari. Negara tampak sangat sibuk, tetapi hasil yang dirasakan tidak selalu sebanding dengan besarnya energi yang dikeluarkan. Semakin banyak aktivitas yang berlangsung, semakin penting untuk bertanya apakah aktivitas tersebut benar-benar bergerak menuju tujuan yang sama.

Yang membuat *misalignment* semakin berbahaya adalah kemampuannya menciptakan ilusi keberhasilan. Karena seluruh sistem masih bekerja, muncul kesan bahwa tidak terdapat persoalan yang mendasar. Karena berbagai indikator operasional menunjukkan aktivitas yang tinggi, muncul keyakinan bahwa negara sedang bergerak ke arah yang benar. Padahal ukuran kesehatan sebuah sistem tidak ditentukan oleh seberapa sibuk sistem tersebut bekerja. Ukuran yang lebih penting adalah apakah seluruh aktivitas tersebut menghasilkan keluaran yang selaras dengan tujuan yang menjadi alasan keberadaan sistem itu sendiri.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, persoalan inilah yang perlu diperhatikan secara serius ketika membahas kondisi negara yang mengalami kerusakan pada tingkat sistemik. Kerusakan tidak selalu muncul

dalam bentuk kegagalan total. Kerusakan juga tidak selalu ditandai oleh berhentinya operasional negara. Dalam banyak kasus, kerusakan justru muncul ketika negara tetap bergerak, tetapi arah geraknya perlahan menjauh dari fondasi yang seharusnya menjadi pedoman. Kedaulatan rakyat tetap diakui, tetapi rakyat semakin jauh dari pusat pengambilan keputusan. Keadilan sosial tetap dicita-citakan, tetapi hasil pembangunan semakin sulit dirasakan secara merata. Kesejahteraan umum tetap menjadi tujuan, tetapi sebagian besar energi negara terserap untuk mempertahankan mekanisme yang ada daripada memperkuat hubungan antara negara dan rakyat.

Pada akhirnya, kesehatan sebuah negara tidak dapat diukur hanya dari keberlangsungan operasionalnya. Negara yang sehat adalah negara yang mampu menjaga keselarasan antara tujuan dan pelaksanaan, antara fondasi dan operasional, antara desain dan hasil yang dihasilkan. Ketika keselarasan tersebut mulai hilang, negara berisiko memasuki kondisi di mana seluruh sistem terus bergerak tetapi semakin menjauh dari tujuan yang menjadi alasan pembentukannya. Dan sebagaimana kendaraan yang terus melaju ke arah yang salah tidak akan pernah mencapai tujuan meskipun bergerak tanpa henti, negara yang kehilangan keselarasan antara tujuan dan operasional juga akan kesulitan mewujudkan cita-cita yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa pada fondasi terdalam kehidupan bernegara.

16.7. Ketika Institusi Bekerja untuk Mempertahankan Diri

Setiap institusi pada awalnya dibentuk untuk melayani tujuan tertentu. Tidak ada lembaga negara yang lahir tanpa alasan. Ada yang dibentuk untuk menjaga keadilan, ada yang dibentuk untuk mengelola pemerintahan, ada yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, dan ada pula yang dibentuk untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan negara. Dalam desain yang sehat, seluruh institusi merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan negara. Institusi tidak pernah menjadi tujuan akhir. Sebagaimana mesin dibangun untuk membantu manusia mencapai suatu pekerjaan, lembaga negara dibentuk untuk membantu rakyat mewujudkan cita-cita yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan konstitusi.

Namun dalam perjalanan waktu sering muncul sebuah gejala yang dikenal luas dalam teori organisasi, yaitu ketika organisasi mulai lebih sibuk mempertahankan keberadaannya dibanding menjalankan tujuan yang menjadi alasan pembentukannya. Pada tahap awal gejala tersebut hampir tidak terlihat. Setiap keputusan masih dapat dijelaskan secara rasional. Setiap kebijakan masih tampak masuk akal. Akan tetapi sedikit demi sedikit orientasi mulai bergeser. Pertanyaan yang semula berbunyi, "Apa yang terbaik bagi rakyat?" perlahan berubah menjadi, "Apa yang terbaik bagi lembaga ini?" Pertimbangan yang semula berpusat pada kepentingan negara secara keseluruhan mulai bergeser menuju

kepentingan mempertahankan posisi, kewenangan, anggaran, pengaruh, dan keberlangsungan institusi itu sendiri.

Fenomena semacam ini bukanlah sesuatu yang unik dalam dunia pemerintahan. Dalam dunia korporasi, organisasi sosial, bahkan dalam komunitas kecil sekalipun, kecenderungan untuk mempertahankan diri merupakan sesuatu yang alamiah. Sebuah organisasi yang telah lama berdiri akan membangun budaya, struktur, kepentingan, dan pola pikir yang bertujuan menjaga keberlangsungan organisasi tersebut. Pada batas tertentu hal tersebut diperlukan karena tidak ada organisasi yang dapat bekerja secara efektif apabila terus-menerus berada dalam ancaman pembubaran. Namun persoalan mulai muncul ketika naluri mempertahankan diri berkembang melampaui tujuan awal organisasi. Pada saat itu organisasi tidak lagi menggunakan keberadaannya untuk mencapai tujuan, melainkan menggunakan tujuan sebagai alasan untuk mempertahankan keberadaannya.

Dalam analogi perangkat digital, kondisi tersebut dapat disamakan dengan aplikasi latar belakang (*background process*) yang terus berjalan meskipun fungsi utamanya sudah tidak relevan dengan kebutuhan pengguna. Pada awalnya aplikasi tersebut memang dibutuhkan. Aplikasi tersebut membantu sistem menjalankan fungsi tertentu. Namun seiring waktu, aplikasi terus mengonsumsi memori, prosesor, dan berbagai sumber daya lainnya tanpa memberikan manfaat yang sebanding. Bahkan dalam beberapa

kasus, aplikasi tersebut mulai menghambat kinerja aplikasi lain yang justru lebih penting bagi pengguna. Sistem masih berjalan, tetapi semakin banyak sumber daya yang digunakan untuk mempertahankan proses internal daripada melayani kebutuhan pemilik perangkat.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, rakyat ditempatkan sebagai *root owner*, yaitu pemilik sah negara. Seluruh institusi negara pada hakikatnya merupakan instrumen yang dibentuk untuk menjalankan kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. MPR sebagai *root administrator* menerima mandat untuk menjaga agar seluruh sistem tetap bergerak sesuai arah yang ditentukan oleh pemiliknya. Pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan berbagai institusi lainnya menjalankan fungsi operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam desain seperti ini, orientasi seluruh institusi seharusnya selalu kembali kepada rakyat sebagai sumber legitimasi dan tujuan keberadaan negara.

Masalah muncul ketika hubungan tersebut mulai terbalik. Institusi yang semula dibentuk untuk melayani rakyat perlahan mulai menempatkan rakyat sebagai objek yang harus menyesuaikan diri terhadap kebutuhan institusi. Prosedur dibuat bukan terutama untuk memudahkan pelayanan, melainkan untuk menjaga kenyamanan birokrasi. Kebijakan dirancang bukan terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat, melainkan untuk mempertahankan stabilitas internal organisasi. Ukuran keberhasilan tidak

lagi ditentukan oleh manfaat yang dirasakan rakyat, tetapi oleh terpenuhinya target-target administratif yang ditetapkan oleh institusi itu sendiri.

Pergeseran seperti ini jarang terjadi secara sadar. Tidak ada lembaga yang secara terbuka menyatakan bahwa kepentingan organisasinya lebih penting daripada kepentingan rakyat. Justru karena itulah gejala tersebut berkembang secara perlahan dan sulit dikenali. Setiap keputusan yang diambil tampak masuk akal jika dilihat secara terpisah. Setiap prosedur memiliki alasan administratif. Setiap aturan memiliki dasar formal. Namun ketika seluruh keputusan tersebut dikumpulkan dan dilihat sebagai satu kesatuan, mulai terlihat bahwa pusat gravitasi sistem telah bergeser. Energi institusi lebih banyak digunakan untuk mengelola dirinya sendiri daripada untuk melayani tujuan yang menjadi alasan keberadaannya.

Dalam teori sistem, kondisi seperti ini dikenal sebagai kecenderungan sistem untuk melakukan *self-preservation*. Sistem berusaha mempertahankan bentuknya meskipun bentuk tersebut tidak lagi sepenuhnya mendukung tujuan awal yang ingin dicapai. Pada tingkat tertentu, kemampuan mempertahankan diri memang diperlukan untuk menjaga stabilitas. Akan tetapi ketika kemampuan tersebut berkembang tanpa pengendalian, sistem mulai menolak perubahan yang sebenarnya dibutuhkan. Kritik dipandang sebagai ancaman. Evaluasi dianggap sebagai gangguan. Reformasi dilihat sebagai risiko terhadap kenyamanan yang telah terbentuk selama

bertahun-tahun. Akibatnya, kemampuan sistem untuk beradaptasi semakin menurun.

Fenomena tersebut dapat diamati dalam banyak organisasi besar. Semakin besar sebuah institusi, semakin besar pula kemungkinan munculnya kepentingan internal yang berbeda dari tujuan awal pembentukannya. Struktur yang kompleks menciptakan banyak lapisan kepentingan. Jabatan harus dipertahankan. Anggaran harus dijaga. Kewenangan harus dilindungi. Dalam kondisi tertentu, seluruh energi organisasi dapat terserap untuk mengelola berbagai kepentingan internal tersebut. Organisasi tetap sibuk, tetapi kesibukan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan manfaat yang diterima oleh pihak yang seharusnya dilayani.

Dalam konteks negara, gejala ini menjadi sangat penting karena negara bukan milik institusi. Negara bukan milik pejabat. Negara bukan milik partai politik. Negara bukan milik birokrasi. Negara adalah milik rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Ketika institusi mulai lebih fokus mempertahankan dirinya sendiri daripada melayani rakyat, hubungan antara pemilik dan pengelola sistem mulai mengalami gangguan. Kedaulatan yang secara teoritis berada di tangan rakyat perlahan menjadi semakin sulit diterjemahkan ke dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari.

Keadaan tersebut tidak selalu menghasilkan krisis yang langsung terlihat. Negara tetap berjalan. Program tetap dilaksanakan. Anggaran tetap digunakan. Aktivitas pemerintahan tetap berlangsung sebagaimana biasa. Namun sedikit demi sedikit muncul jarak antara

apa yang dibutuhkan rakyat dan apa yang menjadi prioritas institusi. Semakin besar jarak tersebut, semakin sulit negara mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam fondasinya. Sistem masih bergerak, tetapi sebagian besar energinya digunakan untuk menjaga keberlangsungan sistem itu sendiri.

Di sinilah pentingnya pengingat bahwa institusi hanyalah alat. Dalam analogi perangkat digital, pengguna membeli perangkat bukan untuk melayani aplikasi, melainkan agar aplikasi melayani kebutuhan pengguna. Demikian pula rakyat membentuk negara bukan untuk melayani institusi, melainkan agar institusi melayani kepentingan rakyat. Ketika hubungan tersebut terbalik, seluruh logika penyelenggaraan negara mulai kehilangan arah. Yang seharusnya menjadi sarana berubah menjadi tujuan. Yang seharusnya menjadi pelayan perlahan menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian.

Pada akhirnya, salah satu tanda bahwa sebuah negara mulai mengalami kerusakan sistemik adalah ketika institusi-institusi di dalamnya lebih sibuk menjaga keberlangsungan dirinya sendiri daripada memastikan tercapainya tujuan negara. Kerusakan semacam ini tidak menimbulkan suara keras. Tidak menghasilkan keruntuhan yang mendadak. Tidak memunculkan gejala yang mudah dikenali oleh masyarakat luas. Namun sebagaimana aplikasi latar belakang yang terus mengonsumsi sumber daya hingga memperlambat seluruh perangkat, kecenderungan institusi untuk mempertahankan dirinya sendiri dapat perlahan mengurangi kemampuan negara untuk

melayani rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Ketika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, negara tidak lagi bergerak terutama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan konstitusi, melainkan bergerak untuk memastikan bahwa struktur yang ada tetap bertahan, meskipun semakin jauh dari alasan mengapa struktur tersebut dibentuk sejak awal.

16.8. Negara yang Kehilangan Arah Kalibrasi

Dalam dunia teknologi dan rekayasa sistem, terdapat satu proses yang sangat penting tetapi sering tidak diperhatikan oleh pengguna biasa, yaitu kalibrasi. Sebuah alat ukur dapat memiliki sensor yang canggih, perangkat keras yang berkualitas tinggi, dan perangkat lunak yang dirancang dengan baik. Namun tanpa kalibrasi yang benar, seluruh kemampuan tersebut dapat menghasilkan data yang keliru. Kompas yang kehilangan kalibrasi tetap menunjukkan arah, tetapi arah yang ditunjukkan tidak lagi sesuai dengan posisi sebenarnya. Sistem navigasi yang kehilangan titik referensi tetap mampu menghitung rute, tetapi rute yang dihasilkan justru membawa pengguna semakin jauh dari tujuan yang ingin dicapai. Perangkat masih bekerja, layar masih menampilkan informasi, dan seluruh fungsi teknis tetap berjalan, tetapi orientasi sistem telah bergeser dari acuan yang seharusnya menjadi pedoman utamanya.

Fenomena yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Sebuah negara tidak hanya membutuhkan institusi yang bekerja, hukum yang berlaku, dan pemerintahan yang berjalan. Sebuah

negara juga membutuhkan titik referensi yang terus-menerus digunakan untuk mengukur apakah seluruh aktivitas yang dilakukan masih bergerak menuju tujuan yang benar. Tanpa titik referensi tersebut, negara dapat terus bergerak, menghasilkan berbagai kebijakan, membangun berbagai program, dan menggerakkan seluruh perangkat pemerintahannya, tetapi tidak lagi memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa seluruh pergerakan tersebut benar-benar mengarah kepada cita-cita yang menjadi alasan pembentukannya.

Dalam konteks Indonesia, titik referensi tersebut sesungguhnya telah dirumuskan secara jelas sejak awal kemerdekaan. Pancasila menjadi dasar filosofis yang memuat arah moral dan nilai-nilai fundamental bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 merumuskan tujuan negara secara tegas, mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia hingga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua hal tersebut seharusnya berfungsi sebagai koordinat utama yang digunakan untuk mengukur seluruh aktivitas penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan, setiap institusi, setiap perubahan hukum, dan setiap penggunaan kekuasaan seharusnya dapat diuji kembali kepada titik referensi tersebut.

Dalam glosarium yang digunakan dalam buku ini, Pancasila dipahami sebagai *kernel* negara, yaitu inti nilai yang menjadi sumber arah seluruh sistem. Konstitusi berfungsi sebagai *firmware* yang menerjemahkan nilai tersebut ke dalam desain operasional negara. Rakyat merupakan *root owner* yang menjadi pemilik sah

kedaulatan, sementara MPR sebagai *root administrator* menerima mandat untuk menjaga agar sistem tetap bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemiliknya. Seluruh struktur negara seharusnya bergerak dalam hubungan yang saling terhubung dan saling menguatkan. Ketika hubungan tersebut berjalan dengan baik, negara memiliki kemampuan untuk melakukan kalibrasi secara berkelanjutan. Setiap penyimpangan dapat dikenali. Setiap kesalahan arah dapat diperbaiki. Setiap kebijakan dapat dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan negara.

Persoalan mulai muncul ketika kemampuan melakukan kalibrasi tersebut perlahan melemah. Pada tahap awal, gejalanya hampir tidak terlihat. Negara tetap menggunakan istilah yang sama. Pancasila tetap disebut sebagai dasar negara. Kedaulatan rakyat tetap diakui dalam berbagai dokumen resmi. Keadilan sosial tetap menjadi bagian dari berbagai pidato kenegaraan. Namun di balik penggunaan istilah yang tetap sama, hubungan antara tujuan dan praktik mulai mengalami pergeseran. Nilai-nilai yang dahulu berfungsi sebagai pedoman operasional perlahan berubah menjadi simbol yang lebih sering diucapkan daripada digunakan sebagai alat ukur dalam pengambilan keputusan.

Keadaan ini menyerupai sistem navigasi yang masih menyimpan peta asli tetapi tidak lagi menggunakan peta tersebut sebagai referensi utama. Sistem tetap bergerak berdasarkan data yang diterimanya setiap hari, tetapi kehilangan kemampuan untuk membandingkan pergerakannya dengan tujuan akhir yang seharusnya dicapai. Akibatnya, setiap

penyimpangan kecil yang terjadi tidak pernah benar-benar dikoreksi. Penyimpangan tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya menghasilkan jarak yang sangat besar antara posisi aktual dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam kehidupan bernegara, kehilangan arah kalibrasi sering kali terlihat ketika keberhasilan mulai diukur dengan indikator yang berbeda dari tujuan negara itu sendiri. Kesejahteraan rakyat digantikan oleh sekadar pertumbuhan angka statistik. Keadilan digantikan oleh kepatuhan terhadap prosedur administratif. Kedaulatan rakyat digantikan oleh keberhasilan menjalankan mekanisme formal tanpa memastikan bahwa rakyat benar-benar memiliki kendali terhadap arah negara. Pada tahap tertentu, negara masih mampu menunjukkan berbagai capaian operasional, tetapi semakin sulit menjelaskan bagaimana capaian tersebut berhubungan langsung dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam fondasi negara.

Fenomena tersebut semakin berbahaya karena tidak menimbulkan gejala yang dramatis. Negara tidak runtuh. Pemerintahan tidak berhenti bekerja. Institusi tetap menjalankan fungsi administratifnya. Justru karena seluruh sistem masih tampak normal, hilangnya arah kalibrasi sering kali berlangsung tanpa disadari. Masyarakat melihat banyak aktivitas dan menganggap bahwa sistem sedang bergerak maju. Padahal yang perlu dipertanyakan bukan sekadar apakah sistem bergerak, melainkan ke mana sistem tersebut bergerak.

Dalam dunia penerbangan terdapat kenyataan yang sangat menarik. Kesalahan arah beberapa derajat saja pada awal perjalanan dapat membuat pesawat tiba ratusan kilometer dari tujuan yang seharusnya. Penyimpangan tersebut tidak terasa pada menit-menit pertama. Pilot mungkin tetap melihat pesawat bergerak dengan normal. Penumpang tidak merasakan adanya masalah. Mesin bekerja dengan baik. Namun semakin jauh perjalanan berlangsung, semakin besar jarak yang tercipta antara jalur aktual dan jalur yang seharusnya ditempuh. Karena itulah sistem navigasi penerbangan selalu melakukan koreksi secara terus-menerus. Bukan karena pesawat tidak mampu terbang, melainkan karena kemampuan terbang tidak berarti apa-apa apabila arah penerbangannya salah.

Negara juga menghadapi persoalan yang sama. Kemampuan menjalankan pemerintahan tidak otomatis berarti kemampuan mencapai tujuan negara. Banyaknya kebijakan tidak otomatis berarti meningkatnya kesejahteraan rakyat. Banyaknya regulasi tidak otomatis berarti bertambahnya keadilan. Banyaknya aktivitas penguasa tidak otomatis berarti menguatnya kedaulatan rakyat. Seluruh aktivitas tersebut hanya memiliki makna apabila tetap terhubung dengan arah yang menjadi tujuan pembentukan negara.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, salah satu gejala paling penting dari negara yang mengalami kerusakan sistemik adalah hilangnya kemampuan untuk terus-menerus mengkalibrasi diri terhadap tujuan dasarnya. Institusi lebih banyak mengukur keberhasilan berdasarkan indikator internal dibanding

berdasarkan manfaat yang diterima rakyat. Proses pemerintahan lebih banyak berputar pada dinamika kekuasaan dibanding pada upaya memperkuat kedaulatan rakyat. Energi negara semakin banyak terserap untuk menjaga operasional sistem dibanding memastikan bahwa sistem tersebut masih bergerak menuju tujuan yang benar.

Pada akhirnya, kesehatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bergeraknya, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga arah. Sebuah sistem yang kehilangan arah kalibrasi dapat tetap aktif selama bertahun-tahun. Seluruh komponennya dapat terus bekerja. Berbagai aktivitas dapat terus berlangsung. Namun tanpa kemampuan untuk terus kembali kepada titik referensi yang benar, negara berisiko bergerak semakin jauh dari cita-cita yang menjadi alasan keberadaannya. Sebagaimana kompas yang kehilangan utara tidak dapat membimbing pelaut menuju tujuan meskipun jarumnya masih bergerak, negara yang kehilangan arah kalibrasi juga akan kesulitan mewujudkan tujuan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam fondasi terdalam kehidupan bernegara. Dari sinilah kebutuhan untuk kembali kepada sumber arah menjadi semakin penting, karena sistem yang sehat bukan hanya sistem yang mampu bergerak, melainkan sistem yang selalu mampu mengingat ke mana seharusnya bergerak.

16.9. Mengapa Reformasi Sering Gagal

Setiap kali sebuah bangsa menyadari adanya persoalan dalam sistem kenegaraannya, reformasi

hampir selalu menjadi jawaban yang pertama kali muncul. Reformasi terdengar logis, masuk akal, dan bahkan sering kali menjadi pilihan yang paling realistis. Ketika sebuah institusi tidak bekerja dengan baik, dilakukan perbaikan kelembagaan. Ketika aturan dianggap tidak lagi relevan, dilakukan revisi regulasi. Ketika birokrasi dinilai lamban, dilakukan penyederhanaan prosedur. Ketika kualitas pelayanan menurun, dilakukan modernisasi sistem. Dalam banyak situasi, langkah-langkah tersebut memang diperlukan dan dapat menghasilkan perbaikan yang nyata. Namun sejarah berbagai bangsa menunjukkan sebuah kenyataan yang menarik. Tidak sedikit reformasi yang berhasil memperbaiki gejala, tetapi gagal menyentuh akar persoalan. Sistem menjadi tampak lebih baik untuk sementara waktu, tetapi beberapa tahun kemudian masalah yang sama muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi dalam dunia pemerintahan. Dalam dunia teknologi dan rekayasa sistem, situasi yang serupa sering ditemukan ketika sebuah perangkat mengalami kerusakan pada tingkat yang lebih mendasar daripada yang diperkirakan. Sebuah komputer yang mulai melambat dapat diperbaiki dengan memperbarui aplikasi, membersihkan berkas yang tidak diperlukan, atau menambah kapasitas memori. Langkah-langkah tersebut sering menghasilkan peningkatan performa yang cukup signifikan. Akan tetapi apabila sumber masalah sebenarnya berada pada kerusakan motherboard, gangguan pada jalur data utama, atau

kesalahan desain perangkat keras, seluruh perbaikan tersebut hanya menghasilkan efek sementara. Sistem tampak membaik, tetapi tidak pernah benar-benar pulih. Setelah beberapa waktu, gejala yang sama kembali muncul karena penyebab utamanya tidak pernah disentuh.

Analogi tersebut membantu menjelaskan mengapa banyak reformasi negara menghasilkan perubahan yang terbatas. Sebagian besar reformasi berfokus pada apa yang terlihat di permukaan. Struktur organisasi diperbaiki. Prosedur diperbarui. Teknologi diperkenalkan. Personel diganti. Mekanisme kerja disempurnakan. Seluruh langkah tersebut penting dan sering kali memang diperlukan. Namun reformasi yang hanya bergerak pada tingkat operasional sering menghadapi batas tertentu ketika persoalan yang dihadapi sesungguhnya berasal dari desain sistem yang lebih mendasar. Dalam keadaan seperti itu, reformasi tidak berbeda dengan memperbarui aplikasi pada perangkat yang mengalami kerusakan pada tingkat perangkat keras.

Sejarah Indonesia memberikan banyak contoh mengenai fenomena ini. Berbagai gelombang reformasi telah dilakukan dalam bidang politik, hukum, birokrasi, ekonomi, dan administrasi pemerintahan. Sebagian menghasilkan kemajuan yang patut diapresiasi. Ruang kebebasan publik menjadi lebih terbuka. Mekanisme demokrasi berkembang lebih luas. Berbagai institusi baru dibentuk untuk memperkuat tata kelola negara. Sistem pelayanan publik mengalami modernisasi. Teknologi informasi mulai digunakan dalam berbagai

sektor pemerintahan. Akan tetapi di balik berbagai perubahan tersebut, sejumlah persoalan mendasar tetap bertahan. Jarak antara rakyat dan pusat pengambilan keputusan masih menjadi perdebatan. Pengaruh kekuatan ekonomi terhadap proses pemerintahan terus menjadi kekhawatiran. Ketimpangan akses terhadap keadilan masih sering dipersoalkan. Kepercayaan terhadap institusi publik terus mengalami pasang surut.

Keadaan tersebut tidak berarti bahwa reformasi gagal sepenuhnya. Kesimpulan semacam itu justru terlalu sederhana. Reformasi telah menghasilkan banyak perubahan yang penting. Persoalannya terletak pada asumsi bahwa seluruh masalah dapat diselesaikan melalui reformasi operasional. Dalam banyak kasus, reformasi bekerja seperti proses pemeliharaan rutin terhadap sebuah perangkat. Pemeliharaan tersebut dapat memperpanjang usia sistem, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi gangguan yang muncul dalam jangka pendek. Namun ketika sumber masalah berada pada lapisan yang lebih dalam, reformasi mulai menghadapi keterbatasannya sendiri.

Dalam glosarium yang digunakan dalam buku ini, negara dipahami sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa lapisan yang saling terhubung. Pancasila berfungsi sebagai *kernel* yang menjadi sumber nilai dan arah dasar negara. Konstitusi berfungsi sebagai *firmware* yang menentukan cara kerja sistem. Rakyat merupakan *root owner* yang memegang kedaulatan tertinggi. MPR sebagai *root administrator* menerima mandat untuk menjaga agar sistem tetap bergerak sesuai dengan kehendak rakyat. Pemerintah dan berbagai institusi

negara menjalankan fungsi operasional yang bekerja di atas lapisan-lapisan tersebut. Jika analogi ini digunakan secara konsisten, maka reformasi yang hanya menyentuh prosedur atau organisasi dapat dianalogikan sebagai pembaruan pada tingkat aplikasi. Pembaruan tersebut dapat meningkatkan kinerja tertentu, tetapi tidak serta-merta mengubah desain dasar yang mengatur bagaimana seluruh sistem bekerja.

Di sinilah letak persoalan yang sering kali tidak disadari. Ketika sebuah bangsa mengalami masalah yang berasal dari desain hubungan antar kekuasaan, dari distribusi kewenangan yang tidak seimbang, atau dari struktur yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, reformasi operasional akan selalu menghasilkan perbaikan yang terbatas. Sistem mungkin menjadi lebih efisien. Pelayanan mungkin menjadi lebih cepat. Administrasi mungkin menjadi lebih modern. Akan tetapi arah dasar yang dihasilkan oleh sistem tetap ditentukan oleh desain yang sama. Akibatnya, berbagai gejala yang tampak berbeda di permukaan terus muncul dari sumber yang sesungguhnya tidak pernah berubah.

Fenomena ini mirip dengan seseorang yang terus memperbaiki interior rumah tanpa pernah memeriksa struktur bangunannya. Dinding dicat ulang. Furnitur diganti. Tata ruang diperbarui. Instalasi listrik diperbaiki. Dari luar rumah terlihat semakin baik dari tahun ke tahun. Namun apabila sumber persoalannya berada pada fondasi yang mengalami penurunan atau struktur yang tidak mampu menopang beban bangunan secara benar, seluruh renovasi tersebut pada akhirnya

akan menghadapi batas efektivitasnya. Retakan akan muncul kembali. Ketidakseimbangan akan kembali terasa. Persoalan yang sama akan terus berulang karena penyebab utamanya tetap berada di tempat yang sama.

Dalam kehidupan bernegara, gejala tersebut sering terlihat ketika reformasi menghasilkan perubahan yang besar pada tingkat prosedur tetapi tidak menghasilkan perubahan yang sebanding pada tingkat hubungan antara rakyat dan negara. Masyarakat menyaksikan berbagai pembaruan, tetapi tetap merasakan bahwa pusat kekuasaan bergerak jauh dari kendali rakyat. Berbagai mekanisme baru diperkenalkan, tetapi rasa keadilan tidak selalu berkembang dengan kecepatan yang sama. Institusi terus diperkuat, tetapi kepercayaan publik tidak selalu meningkat secara proporsional. Ketika keadaan seperti ini terjadi berulang kali, muncul pertanyaan yang semakin sulit untuk dihindari. Mungkin persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar persoalan pelaksanaan, melainkan persoalan desain yang membentuk seluruh pelaksanaan tersebut.

Perspektif inilah yang membedakan reformasi dengan rekayasa ulang yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Reformasi berusaha memperbaiki cara sistem bekerja. Rekayasa ulang berusaha memeriksa apakah sistem tersebut sejak awal dirancang untuk menghasilkan tujuan yang benar. Reformasi berfokus pada kinerja. Rekayasa ulang berfokus pada desain. Reformasi memperbaiki bangunan yang ada. Rekayasa ulang mempertanyakan apakah gambar bangunan tersebut memang sesuai dengan fungsi yang ingin dicapai.

Bukan berarti reformasi harus ditinggalkan. Sebaliknya, reformasi tetap merupakan bagian penting dari proses perbaikan negara. Tidak ada sistem yang dapat bertahan tanpa kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Namun reformasi perlu ditempatkan pada posisi yang tepat. Reformasi adalah alat untuk meningkatkan kualitas operasional. Reformasi bukan jawaban otomatis terhadap setiap persoalan yang bersifat struktural. Ketika penyakit berada pada tingkat sistemik, terapi yang hanya menyentuh gejala tidak akan pernah menghasilkan pemulihan yang utuh.

Pada akhirnya, kegagalan banyak reformasi bukan terjadi karena kurangnya niat baik, kurangnya sumber daya, atau kurangnya komitmen dari mereka yang menjalankannya. Kegagalan tersebut sering kali muncul karena reformasi diminta menyelesaikan persoalan yang sebenarnya berada di luar jangkauannya. Sebagaimana pembaruan aplikasi tidak dapat memperbaiki kerusakan perangkat keras, reformasi operasional juga tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang berakar pada desain negara itu sendiri. Selama sumber persoalan berada pada struktur yang lebih dalam, reformasi akan terus menghasilkan perbaikan yang penting tetapi terbatas. Dan selama bangsa ini belum berani memeriksa desain yang menjadi fondasi seluruh sistem, berbagai reformasi akan terus berjalan dalam siklus yang sama serta memperbaiki banyak hal, tetapi belum mampu menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

16.10. Mengganti Operator Tidak Cukup

Setelah memahami bagaimana sebuah negara dapat mengalami *malfunction*, bagaimana fungsi pengawasan dapat melemah, bagaimana institusi perlahan lebih sibuk mempertahankan dirinya sendiri, serta bagaimana arah operasional dapat menjauh dari tujuan yang telah ditetapkan dalam fondasi negara, muncul satu pertanyaan yang hampir selalu mengemuka dalam setiap perdebatan kekuasaan. Jika sistem mengalami begitu banyak persoalan, apakah solusi utamanya cukup dengan mengganti orang-orang yang menjalankan sistem tersebut? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh salah satu asumsi paling mendasar dalam cara masyarakat memahami perubahan kekuasaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menghubungkan kualitas sebuah sistem dengan kualitas orang yang mengoperasikannya. Ketika pelayanan publik memburuk, perhatian langsung tertuju kepada pejabat yang bertanggung jawab. Ketika kebijakan dianggap gagal, kritik diarahkan kepada pemimpin yang sedang menjabat. Ketika muncul berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tuntutan pergantian aktor pemerintahan segera menguat. Cara berpikir tersebut tidak sepenuhnya salah karena manusia memang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil yang dihasilkan oleh sebuah sistem. Namun persoalan mulai muncul ketika pergantian manusia dianggap sebagai solusi tunggal bagi masalah yang sesungguhnya berasal dari desain sistem itu sendiri.

Dalam dunia teknologi terdapat perbedaan yang sangat jelas antara operator dan perangkat. Ketika sebuah perangkat mengalami gangguan, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah memeriksa apakah kesalahan berasal dari pengguna. Mungkin terdapat prosedur yang dijalankan secara keliru. Mungkin terdapat konfigurasi yang tidak tepat. Mungkin terdapat kesalahan dalam cara pengoperasian. Namun apabila setelah operator berganti berkali-kali gangguan yang sama tetap muncul, perhatian akan mulai diarahkan kepada perangkat yang digunakan. Pada titik tertentu, teknisi akan menyimpulkan bahwa persoalannya tidak lagi berada pada siapa yang mengoperasikan sistem, melainkan pada sistem yang dioperasikan.

Fenomena tersebut sangat relevan untuk memahami perjalanan kenegaraan sebuah bangsa. Dalam berbagai periode sejarah, Indonesia telah mengalami pergantian pemimpin, pergantian kabinet, pergantian anggota legislatif, pergantian pejabat birokrasi, bahkan pergantian generasi kekuasaan. Setiap pergantian selalu disertai harapan bahwa berbagai persoalan yang selama ini menghambat kemajuan bangsa akan segera terselesaikan. Harapan tersebut wajar karena setiap pergantian membawa kemungkinan munculnya pendekatan baru, semangat baru, dan kebijakan baru. Namun ketika berbagai persoalan mendasar tetap muncul dalam bentuk yang berbeda dari satu periode ke periode berikutnya, bangsa ini perlu mulai bertanya apakah sumber persoalannya benar-benar berada pada individu yang menjalankan

sistem atau justru pada sistem yang dijalankan oleh individu tersebut.

Bayangkan sebuah kendaraan yang memiliki masalah pada sistem kemudinya. Pengemudi pertama mengalami kesulitan mengendalikan kendaraan. Pengemudi kedua mengalami masalah yang sama. Pengemudi ketiga yang lebih berpengalaman mampu mengurangi dampak gangguan tersebut, tetapi tetap tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya. Jika pola yang sama terus berulang, sangat tidak masuk akal apabila seluruh kesalahan terus dibebankan kepada pengemudi. Pada titik tertentu, perhatian harus diarahkan kepada kendaraan itu sendiri. Semakin banyak pengemudi yang mengalami kesulitan yang serupa, semakin besar kemungkinan bahwa sumber masalahnya berada pada desain atau kondisi kendaraan tersebut.

Dalam konteks negara, pergantian operator dapat diibaratkan sebagai pergantian pengemudi. Presiden berganti. Menteri berganti. Anggota parlemen berganti. Kepala daerah berganti. Bahkan orientasi kekuasaan pemerintahan dapat berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Namun seluruh pergantian tersebut tetap berlangsung di dalam struktur yang sama. Mereka bekerja menggunakan desain kelembagaan yang sama, bergerak dalam kerangka konstitusional yang sama, dan menghadapi berbagai keterbatasan yang dihasilkan oleh sistem yang sama. Karena itu, pergantian operator memang dapat menghasilkan perubahan tertentu, tetapi tidak selalu mampu mengubah pola hasil yang dihasilkan oleh sistem secara keseluruhan.

Dalam glosarium buku ini, negara dipahami sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa lapisan. Pancasila sebagai *kernel* menyediakan arah nilai dan tujuan dasar. Konstitusi sebagai *firmware* mengatur hubungan antar komponen negara. Rakyat merupakan *root owner* yang menjadi sumber kedaulatan. MPR sebagai *root administrator* menerima mandat untuk menjaga agar seluruh sistem tetap bergerak sesuai dengan kehendak rakyat. Pemerintah dan berbagai lembaga negara menjalankan fungsi operasional yang berada di atas lapisan tersebut. Ketika persoalan muncul pada tingkat operasional, pergantian operator mungkin menjadi bagian dari solusi. Namun ketika persoalan berasal dari hubungan antar lapisan sistem, dari distribusi kewenangan yang tidak seimbang, atau dari desain yang menghasilkan penyimpangan secara berulang, maka pergantian operator hanya menyentuh gejala yang tampak di permukaan.

Inilah sebabnya banyak bangsa mengalami siklus harapan dan kekecewaan yang terus berulang. Setiap pergantian pemimpin melahirkan optimisme baru. Sebagian persoalan memang berhasil diperbaiki. Sebagian hambatan dapat dikurangi. Namun setelah beberapa waktu berlalu, muncul kembali berbagai persoalan yang memiliki pola yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Masyarakat kemudian kembali mencari tokoh baru yang dianggap mampu membawa perubahan. Siklus tersebut terus berulang tanpa pernah benar-benar menyentuh pertanyaan mengenai kualitas desain sistem yang diwariskan kepada setiap pemimpin yang datang dan pergi.

Perspektif ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan tetap memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah perjalanan sebuah negara. Pemimpin yang baik dapat mempercepat kemajuan. Pemimpin yang buruk dapat memperburuk keadaan. Akan tetapi kualitas kepemimpinan tidak boleh digunakan untuk mengabaikan kualitas sistem. Sebuah sistem yang sehat harus mampu menghasilkan tata kelola yang baik secara konsisten, bukan hanya ketika dijalankan oleh individu-individu luar biasa. Sebaliknya, apabila sebuah sistem terus membutuhkan figur yang luar biasa hanya untuk mempertahankan fungsi dasarnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk mempertanyakan kualitas desain sistem tersebut.

Dalam dunia rekayasa, sistem yang baik dirancang agar tidak terlalu bergantung pada individu tertentu. Sistem dibangun untuk menciptakan stabilitas, konsistensi, dan keberlanjutan. Ketika operator berganti, sistem tetap mampu menjalankan tujuan dasarnya karena arah dan mekanismenya telah dirancang secara benar. Sebaliknya, sistem yang terlalu bergantung pada kualitas individu menunjukkan bahwa struktur yang menopangnya belum cukup kuat untuk menjalankan fungsinya secara mandiri. Setiap pergantian operator menjadi pertaruhan besar karena keberhasilan sistem lebih ditentukan oleh kualitas orang daripada kualitas desain.

Dari sudut pandang inilah pembahasan mengenai *Device yang Rusak* mencapai kesimpulan yang paling penting. Kerusakan yang telah dibahas sejak awal bab

bukan terutama mengenai siapa yang sedang memegang kendali, melainkan mengenai kondisi perangkat yang sedang dikendalikan. Institusi yang mengalami *malfunction*, pengawasan yang kehilangan efektivitas, tata kelola yang perlahan mengalami penurunan kualitas, serta hilangnya keselarasan antara tujuan dan operasional merupakan gejala yang menunjukkan adanya persoalan pada tingkat sistem. Selama persoalan tersebut tidak dikenali secara jujur, bangsa ini akan terus berisiko mengulangi pola yang sama, yaitu berharap bahwa pergantian operator mampu menyelesaikan masalah yang sebenarnya berasal dari perangkat itu sendiri.

Pada akhirnya, mengganti operator memang dapat menjadi bagian dari proses perbaikan, tetapi tidak pernah cukup untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat struktural. Pergantian pemimpin dapat memperbaiki cara sistem dijalankan. Pergantian pejabat dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan. Pergantian generasi dapat menghadirkan gagasan-gagasan baru. Namun ketika perangkat yang digunakan tetap mengandung kerusakan yang sama, berbagai perbaikan tersebut akan selalu menghadapi batas tertentu. Karena itu, setelah memahami gejala-gejala kerusakan yang muncul dalam negara, perhatian tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang harus memimpin. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah sistem yang akan dipimpin telah dirancang untuk benar-benar mewujudkan tujuan negara. Sebab selama perangkat yang rusak tidak pernah diperbaiki, pergantian operator hanya akan menghasilkan variasi

hasil yang berbeda-beda dari sumber persoalan yang tetap sama. Dan dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju pertanyaan yang lebih mendasar yaitu bagaimana merancang kembali sistem agar negara dapat bekerja sebagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

BAB 17
RECOVERY MODE

17.1. Ketika Sistem Tidak Lagi Normal

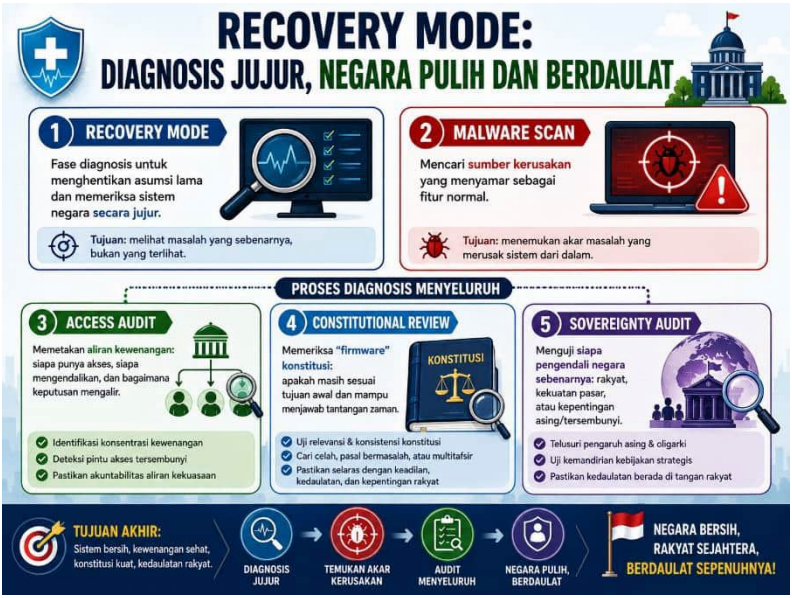

Pada titik ini, pembahasan mengenai negara tidak lagi berada pada tahap mengenali gejala. Bab-bab sebelumnya telah menunjukkan bagaimana sebuah negara dapat mengalami kerusakan secara perlahan tanpa harus runtuh secara fisik. Institusi masih berdiri, pemerintahan masih berjalan, hukum masih diproduksi, dan berbagai aktivitas kenegaraan tetap berlangsung sebagaimana biasanya. Namun di balik seluruh aktivitas tersebut muncul berbagai tanda yang menunjukkan bahwa sistem tidak lagi bekerja dalam kondisi yang sepenuhnya sehat. Hubungan antara tujuan dan hasil mulai melemah. Kedaulatan rakyat

semakin sulit terlihat dalam praktik penyelenggaraan negara. Institusi yang dibentuk untuk melayani kepentingan publik perlahan lebih sibuk mengelola dirinya sendiri. Pengawasan kehilangan ketajamannya. Tata kelola mengalami penurunan kualitas secara bertahap. Keseluruhan gejala tersebut mengarah pada satu kesimpulan penting mengenai sistem masih hidup, tetapi tidak lagi berada dalam kondisi normal.

Dalam dunia teknologi, keadaan seperti ini merupakan salah satu kondisi yang paling sulit ditangani. Ketika sebuah perangkat benar-benar mati, sumber masalah relatif lebih mudah dikenali. Ketika layar tidak menyala, ketika sistem operasi gagal dimuat, atau ketika perangkat tidak merespons sama sekali, perhatian langsung tertuju pada kemungkinan kerusakan yang serius. Namun ketika perangkat masih dapat digunakan meskipun terus menunjukkan berbagai gangguan, situasinya menjadi jauh lebih rumit. Pengguna sering kali terbiasa dengan penurunan performa yang terjadi sedikit demi sedikit. Sistem yang semakin lambat dianggap sebagai hal yang biasa. Kesalahan yang muncul berulang kali diterima sebagai bagian dari penggunaan sehari-hari. Berbagai gangguan yang sebenarnya menunjukkan adanya masalah mendasar perlahan dianggap sebagai kondisi normal.

Fenomena yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Sebuah bangsa dapat hidup sangat lama di dalam sistem yang mengalami berbagai penyimpangan tanpa menyadari bahwa penyimpangan tersebut bukanlah keadaan yang seharusnya. Ketika birokrasi menjadi lamban, masyarakat belajar

menyesuaikan diri. Ketika proses pemerintahan semakin mahal, keadaan tersebut diterima sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan. Ketika hukum tampak berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, banyak orang menganggapnya sebagai kenyataan yang memang sudah sewajarnya terjadi. Ketika rakyat merasa semakin jauh dari pusat pengambilan keputusan, keadaan tersebut perlahan dianggap sebagai karakter alami dari kehidupan bernegara. Semakin lama sebuah penyimpangan berlangsung, semakin besar kemungkinan penyimpangan tersebut diterima sebagai sesuatu yang normal.

Padahal salah satu tanda terpenting dari sistem yang mengalami kerusakan adalah hilangnya kemampuan membedakan antara kondisi normal dan kondisi yang telah menyimpang. Dalam dunia medis, seorang pasien yang hidup bertahun-tahun dengan penyakit tertentu kadang tidak lagi menyadari gejala yang dialaminya karena tubuh telah beradaptasi terhadap keadaan tersebut. Dalam dunia teknologi, pengguna yang setiap hari bekerja dengan perangkat yang lambat sering kali tidak menyadari seberapa besar penurunan performa yang telah terjadi sampai perangkat tersebut dibandingkan dengan sistem yang benar-benar sehat. Dalam kehidupan bernegara, fenomena yang sama dapat muncul ketika masyarakat dan institusi sama-sama beradaptasi terhadap berbagai bentuk penyimpangan hingga kehilangan kemampuan untuk mengenali bahwa sistem sedang bergerak menjauh dari tujuan awalnya.

Di sinilah pentingnya memahami konsep *recovery mode*. Dalam sistem komputer, *recovery mode* bukanlah kondisi operasional normal. *Recovery mode* adalah keadaan khusus yang digunakan ketika terdapat dugaan bahwa sistem utama tidak lagi mampu melakukan diagnosis terhadap dirinya sendiri secara akurat. Pada kondisi tersebut, sistem tidak langsung dipaksa bekerja seperti biasa. Prioritas utama bukan menjalankan aplikasi, melainkan memahami sumber gangguan yang sedang terjadi. Berbagai fungsi yang tidak diperlukan untuk proses diagnosis dinonaktifkan. Fokus diarahkan kepada pemeriksaan sistem secara menyeluruh agar penyebab kerusakan dapat dikenali dengan jelas.

Analogi tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi negara yang mengalami berbagai gejala kerusakan sistemik. Ketika persoalan telah berkembang pada tingkat desain, tata kelola, distribusi kewenangan, dan hubungan antara rakyat dengan negara, solusi tidak dapat dimulai dengan asumsi bahwa seluruh sistem masih berada dalam kondisi normal. Sebelum berbicara mengenai perubahan, perbaikan, atau rekonstruksi, bangsa perlu terlebih dahulu memahami kondisi sebenarnya dari sistem yang sedang dijalankan. Sebuah bangsa tidak dapat memperbaiki sesuatu yang belum dipahami. Sebuah negara tidak dapat dipulihkan apabila sumber kerusakannya masih tersembunyi di balik berbagai lapisan aktivitas yang terus berlangsung setiap hari.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, rakyat merupakan *root owner* atau pemilik sah

negara. Pancasila merupakan *kernel* yang memuat nilai dan tujuan dasar bangsa. Konstitusi berfungsi sebagai *firmware* yang mengatur cara kerja negara. MPR bertindak sebagai *root administrator* yang menerima mandat dari rakyat untuk menjaga agar sistem tetap bergerak sesuai dengan kehendak pemilik kedaulatan. Ketika seluruh hubungan tersebut bekerja secara sehat, negara memiliki kemampuan untuk melakukan koreksi terhadap berbagai kesalahan yang muncul. Namun ketika berbagai gejala kerusakan berkembang secara luas dan berlangsung dalam waktu yang lama, kemampuan koreksi tersebut ikut mengalami penurunan. Sistem tetap bergerak, tetapi semakin sulit memastikan apakah pergerakan tersebut masih selaras dengan tujuan yang diletakkan dalam fondasi negara.

Keadaan seperti inilah yang menuntut sebuah bangsa untuk memasuki fase *recovery mode*. Fase ini bukan fase penghancuran. Fase ini juga bukan fase pemberontakan terhadap sistem. *Recovery mode* adalah fase kejujuran intelektual. Sebuah bangsa mulai berani bertanya apakah berbagai masalah yang selama ini dianggap terpisah sesungguhnya berasal dari sumber yang sama. Sebuah bangsa mulai berani memeriksa apakah jalur kedaulatan yang tertulis dalam konstitusi masih bekerja sebagaimana mestinya. Sebuah bangsa mulai berani menguji apakah institusi yang ada masih menjalankan fungsi yang menjadi alasan pembentukannya. Sebuah bangsa mulai berani membedakan antara simbol dan substansi, antara prosedur dan tujuan, antara aktivitas dan hasil.

Langkah tersebut sering kali tidak nyaman karena memaksa seluruh pihak keluar dari zona kebiasaan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Lebih mudah menganggap bahwa seluruh persoalan hanya disebabkan oleh individu tertentu. Lebih mudah menyalahkan satu kelompok penguasa, satu pemerintahan, atau satu generasi pemimpin. Namun pendekatan semacam itu sering kali gagal menjelaskan mengapa berbagai persoalan yang sama terus muncul dalam bentuk yang berbeda dari waktu ke waktu. Ketika gejala yang sama bertahan melewati pergantian pemimpin, pergantian partai, dan pergantian generasi, perhatian harus mulai diarahkan kepada sistem yang menjadi tempat seluruh aktor tersebut bekerja.

Karena itu, memasuki *recovery mode* berarti menghentikan kebiasaan melihat persoalan secara parsial dan mulai melihat negara sebagai sebuah sistem yang utuh. Gejala tidak lagi diperlakukan sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Setiap penyimpangan dilihat dalam hubungannya dengan desain yang lebih besar. Setiap kelemahan dianalisis dalam kaitannya dengan struktur yang menopang sistem tersebut. Setiap kegagalan dievaluasi bukan hanya dari sisi pelaksanaannya, tetapi juga dari sisi rancangan yang menghasilkan pelaksanaan tersebut.

Pada akhirnya, tidak ada sistem yang dapat dipulihkan tanpa terlebih dahulu mengakui bahwa sistem tersebut sedang mengalami gangguan. Kesadaran itulah yang menjadi pintu masuk menuju seluruh pembahasan dalam bab ini. Sebelum melakukan *malware scan*, sebelum melakukan *access*

audit, sebelum melakukan *constitutional review*, dan sebelum melakukan *sovereignty audit*, bangsa ini harus terlebih dahulu berani mengakui satu kenyataan sederhana yaitu negara mungkin masih berjalan, tetapi berjalan bukan berarti sehat. Sistem mungkin masih hidup, tetapi hidup bukan berarti normal. Dan ketika sebuah sistem tidak lagi berada dalam kondisi normal, langkah pertama yang paling bertanggung jawab bukan memaksanya terus bekerja seperti biasa, melainkan membawanya masuk ke *recovery mode* agar sumber kerusakan dapat dikenali sebelum kerusakan tersebut berkembang semakin jauh.

17.2. Mengapa *Recovery Mode* Diperlukan

Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi ketika menghadapi sistem yang bermasalah adalah keinginan untuk segera memperbaikinya tanpa terlebih dahulu memahami sumber kerusakannya. Naluri manusia cenderung mengarahkan perhatian kepada gejala yang tampak di permukaan. Ketika sebuah perangkat menjadi lambat, pengguna segera menghapus beberapa berkas. Ketika aplikasi mengalami gangguan, pengguna segera melakukan pembaruan. Ketika sistem menunjukkan pesan kesalahan, pengguna berusaha mencari cara tercepat untuk menghilangkan notifikasi tersebut. Dalam banyak kasus, tindakan semacam itu memang dapat memberikan perbaikan sementara. Namun apabila sumber masalah berada pada lapisan yang lebih dalam, upaya-upaya tersebut hanya mengurangi gejala tanpa menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

Dalam dunia teknologi, kondisi semacam ini menjadi alasan mengapa *recovery mode* diciptakan. Para perancang sistem memahami bahwa ada saat ketika sistem tidak boleh langsung dipaksa kembali bekerja secara normal. Ada kondisi tertentu di mana prioritas utama bukan menjalankan aplikasi, melainkan memeriksa kondisi perangkat secara menyeluruh. Ketika terdapat indikasi kerusakan pada sistem operasi, gangguan pada konfigurasi inti, atau kemungkinan adanya perangkat lunak berbahaya yang memengaruhi kinerja sistem, komputer biasanya dijalankan dalam mode khusus yang membatasi berbagai aktivitas normal. Tujuannya bukan untuk memperlambat sistem, melainkan untuk menciptakan ruang yang memungkinkan diagnosis dilakukan secara akurat. Tanpa langkah tersebut, berbagai pemeriksaan akan terganggu oleh aktivitas sistem yang sedang berjalan dan sumber kerusakan menjadi semakin sulit ditemukan.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Ketika sebuah bangsa menghadapi berbagai gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada tingkat sistemik, solusi tidak selalu dapat ditemukan melalui aktivitas kekuasaan yang berjalan seperti biasa. Justru pada kondisi tertentu, bangsa perlu mengambil jarak sejenak dari hiruk-pikuk operasional sehari-hari untuk memahami persoalan secara lebih mendasar. Bukan berarti negara harus berhenti bekerja. Bukan berarti pemerintahan harus dihentikan. Yang diperlukan adalah perubahan cara pandang. Perhatian yang selama ini terserap oleh gejala-gejala di

permukaan perlu diarahkan kepada struktur yang berada di bawah permukaan.

Kesulitan terbesar dalam proses tersebut terletak pada kenyataan bahwa gejala sering kali terlihat lebih nyata dibanding penyebabnya. Masyarakat melihat korupsi, tetapi tidak selalu melihat desain yang memungkinkan korupsi berkembang. Masyarakat melihat ketimpangan hukum, tetapi tidak selalu melihat struktur yang menghasilkan ketimpangan tersebut. Masyarakat melihat konflik pemerintahan, tetapi tidak selalu melihat hubungan kekuasaan yang menciptakan konflik tersebut. Akibatnya, energi bangsa lebih banyak digunakan untuk merespons akibat daripada memahami penyebab. Setiap kali muncul masalah, solusi yang ditawarkan sering kali hanya bergerak di sekitar gejala yang sedang terlihat.

Keadaan tersebut dapat diibaratkan seperti seorang teknisi yang terus mengganti komponen yang rusak tanpa pernah memeriksa sumber kerusakan yang menyebabkan komponen tersebut berulang kali mengalami kegagalan. Komponen baru mungkin bekerja untuk sementara waktu. Performa sistem mungkin meningkat sesaat. Namun ketika penyebab utamanya tidak pernah diperbaiki, kerusakan yang sama akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda. Semakin lama keadaan itu berlangsung, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan sistem, sementara kualitas hasil yang diperoleh terus mengalami penurunan.

Dalam konteks negara, pola yang sama sering terlihat ketika pergantian kebijakan, pergantian pejabat,

bahkan pergantian pemerintahan tidak menghasilkan perubahan yang mendasar terhadap berbagai persoalan yang terus berulang. Setiap periode melahirkan solusi baru. Setiap generasi menghadirkan pendekatan yang berbeda. Namun berbagai persoalan yang menyangkut hubungan antara negara dan rakyat tetap bertahan. Kesenjangan antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik penyelenggaraan negara tetap menjadi perdebatan. Pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah negara terus muncul. Ketidakpercayaan terhadap institusi publik datang dan pergi dalam siklus yang berulang. Semua itu menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi mungkin tidak berada pada tingkat operasional semata.

Di sinilah *recovery mode* menjadi penting. *Recovery mode* pada hakikatnya adalah proses menggeser fokus dari aktivitas menuju diagnosis. Bangsa mulai bertanya bukan hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa hal tersebut terus terjadi. Perhatian tidak lagi hanya tertuju kepada siapa yang sedang berkuasa, melainkan kepada desain yang mengatur bagaimana kekuasaan bekerja. Perdebatan tidak lagi hanya berpusat pada kebijakan tertentu, tetapi juga pada struktur yang menghasilkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, *recovery mode* adalah fase ketika sebuah bangsa mulai memeriksa sistemnya sendiri secara lebih jujur dan lebih mendalam.

Dalam glosarium yang digunakan dalam buku ini, negara dipahami sebagai sebuah sistem yang memiliki lapisan-lapisan yang saling berhubungan. Pancasila sebagai *kernel* menjadi sumber nilai dan arah dasar.

Konstitusi sebagai *firmware* menentukan arsitektur dan cara kerja sistem. Rakyat sebagai *root owner* merupakan pemilik sah kedaulatan. MPR sebagai *root administrator* menerima mandat untuk menjaga agar sistem tetap berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Pemerintah dan berbagai institusi negara menjalankan fungsi operasional yang memungkinkan seluruh sistem bekerja. Ketika muncul gejala bahwa hubungan antar lapisan tersebut tidak lagi berjalan secara harmonis, pemeriksaan tidak cukup dilakukan pada satu bagian saja. Seluruh hubungan dalam sistem perlu ditinjau kembali secara menyeluruh.

Kebutuhan akan *recovery mode* juga muncul karena tidak semua kerusakan dapat dikenali ketika sistem berjalan dalam kondisi normal. Dalam dunia komputer, beberapa jenis *malware* justru menyembunyikan dirinya dengan memanfaatkan proses yang sedang aktif. Selama sistem berjalan seperti biasa, perangkat lunak tersebut dapat terus beroperasi tanpa terdeteksi. Karena itulah pemeriksaan sering dilakukan dalam lingkungan yang lebih terbatas agar berbagai aktivitas yang tidak perlu dapat dihentikan sementara dan sumber gangguan menjadi lebih mudah terlihat. Analogi tersebut sangat relevan dalam kehidupan bernegara. Banyak bentuk penyimpangan justru tersembunyi di balik kebiasaan yang telah dianggap normal. Banyak bentuk ketidakseimbangan kekuasaan tersembunyi di balik prosedur yang terlihat sah. Banyak bentuk pengaruh yang bekerja di luar kepentingan rakyat tersamarkan oleh aktivitas yang berlangsung setiap hari.

Tanpa *recovery mode*, bangsa berisiko terus bergerak di dalam lingkaran yang sama. Setiap gejala direspons dengan solusi jangka pendek. Setiap krisis dihadapi sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Setiap pergantian pemimpin dianggap sebagai awal baru, sementara struktur yang melahirkan persoalan tetap tidak tersentuh. Dalam jangka panjang, keadaan tersebut dapat menciptakan ilusi perbaikan tanpa pernah menghasilkan pemulihan yang sesungguhnya. Sistem terlihat aktif, tetapi kualitasnya terus menurun. Aktivitas semakin banyak, tetapi arah semakin kabur. Energi terus dikeluarkan, tetapi hasil yang dicapai tidak sebanding dengan sumber daya yang digunakan.

Karena itu, *recovery mode* bukanlah tanda kelemahan sebuah bangsa. Justru sebaliknya, *recovery mode* merupakan tanda kedewasaan intelektual dan pemerintahan. Hanya sistem yang cukup matang yang berani menghentikan sejenak asumsi-asumsi lamanya untuk memeriksa dirinya sendiri secara jujur. Hanya bangsa yang serius ingin memperbaiki masa depannya yang bersedia melihat kemungkinan bahwa sebagian persoalan yang dihadapi berasal dari desain yang selama ini dianggap normal. Dan hanya melalui keberanian untuk memasuki fase diagnosis inilah proses pemulihan yang sesungguhnya dapat dimulai.

Pada akhirnya, tidak ada dokter yang dapat memberikan terapi yang tepat tanpa diagnosis yang benar. Tidak ada insinyur yang dapat memperbaiki perangkat tanpa memahami sumber kerusakannya. Demikian pula tidak ada bangsa yang dapat memperbaiki negaranya tanpa terlebih dahulu

memahami kondisi sebenarnya dari sistem yang sedang dijalankan. Itulah sebabnya *recovery mode* diperlukan. Bukan untuk menghentikan negara, melainkan untuk memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan berikutnya dibangun di atas pemahaman yang benar mengenai sumber persoalan yang sesungguhnya. Sebab pemulihan yang berkelanjutan selalu dimulai dari diagnosis yang jujur, dan diagnosis yang jujur hanya mungkin dilakukan ketika sebuah bangsa bersedia masuk ke dalam *recovery mode*.

17.3. *Malware* Scan: Mencari Sumber Kerusakan

Setelah sebuah sistem memasuki *recovery mode*, langkah berikutnya bukan langsung melakukan perbaikan, melainkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kemungkinan adanya sumber kerusakan yang selama ini bekerja di dalam sistem. Dalam dunia teknologi, proses tersebut dikenal sebagai *malware scan*. Tujuannya bukan sekadar menemukan program berbahaya yang terlihat jelas, tetapi juga mengidentifikasi berbagai proses tersembunyi yang memengaruhi cara kerja sistem tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sebuah perangkat dapat tampak berjalan normal di permukaan, namun pada saat yang sama terdapat proses-proses yang diam-diam mengubah konfigurasi, mengendalikan akses, mengalihkan sumber daya, atau memanipulasi perilaku sistem untuk kepentingan tertentu. Karena itu, *malware scan* tidak berfokus pada gejala yang tampak, melainkan pada sumber gangguan yang bekerja di balik gejala tersebut.

Analogi ini memiliki makna yang sangat penting ketika digunakan untuk memahami kondisi sebuah negara. Selama ini, banyak pembahasan kekuasaan berhenti pada gejala. Korupsi dianggap sebagai masalah individu. Ketimpangan ekonomi dianggap sebagai persoalan kebijakan. Konflik pemerintahan dianggap sebagai akibat perbedaan kepentingan antarkelompok. Rendahnya kepercayaan publik dianggap sebagai masalah komunikasi pemerintah. Semua penjelasan tersebut mungkin mengandung sebagian kebenaran, tetapi sering kali gagal menjawab pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa berbagai gejala yang serupa terus muncul dalam bentuk yang berbeda? Mengapa setelah satu persoalan diselesaikan, persoalan lain dengan pola yang hampir sama kembali muncul? Mengapa berbagai pergantian pemimpin, partai, dan pemerintahan tidak selalu menghasilkan perubahan yang sebanding dengan harapan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarahkan perhatian kepada kemungkinan bahwa terdapat sumber kerusakan yang bekerja pada tingkat sistemik. Sebagaimana sebuah perangkat yang terinfeksi tidak hanya mengalami satu gejala tunggal, negara yang mengalami gangguan sistemik juga akan menunjukkan berbagai gejala yang tampaknya tidak saling berhubungan tetapi sesungguhnya berasal dari akar yang sama. Karena itu, *malware scan* dalam konteks negara bukanlah upaya mencari musuh, bukan pula upaya mencari kambing hitam. *Malware scan* adalah proses intelektual untuk mengenali pola-pola yang

secara konsisten menggeser negara menjauh dari tujuan yang telah ditetapkan dalam fondasinya.

Dalam glosarium yang digunakan dalam buku ini, rakyat merupakan *root owner* atau pemilik sah negara. Pancasila merupakan *kernel* yang memuat nilai dasar dan arah moral bangsa. Konstitusi berfungsi sebagai *firmware* yang mengatur bagaimana sistem negara bekerja. MPR bertindak sebagai *root administrator* yang menerima mandat untuk menjaga agar sistem tetap berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Jika hubungan tersebut berjalan secara sehat, maka seluruh aktivitas negara seharusnya bergerak menuju perlindungan rakyat, keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan penguatan kedaulatan. Ketika hasil yang muncul secara berulang justru menjauh dari tujuan tersebut, terdapat alasan yang kuat untuk memeriksa apakah ada proses-proses tertentu yang mengganggu hubungan antara pemilik negara dan sistem negara.

Salah satu karakteristik utama *malware* adalah kemampuannya menyembunyikan diri di balik fungsi yang tampak normal. Dalam banyak kasus, pengguna tidak menyadari keberadaannya karena perangkat masih dapat digunakan sebagaimana biasa. Bahkan tidak jarang *malware* menyamar sebagai bagian dari sistem yang sah. Fenomena yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Tidak semua gangguan muncul dalam bentuk yang terang-terangan melanggar hukum atau secara terbuka menentang konstitusi. Sebagian gangguan justru bekerja melalui mekanisme yang secara formal terlihat sah. Proses kekuasaan berjalan. Pemilu dilaksanakan. Kebijakan diterbitkan.

Anggaran dibahas. Seluruh prosedur tampak normal. Namun hasil akhirnya secara perlahan menggeser pusat gravitasi negara menjauh dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Di sinilah pentingnya membedakan antara legalitas dan kesehatan sistem. Tidak semua yang legal otomatis sehat bagi negara. Dalam dunia teknologi, sebuah program dapat memiliki izin akses yang sah tetapi tetap membahayakan sistem apabila menggunakan akses tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemilik perangkat. Demikian pula dalam negara, sebuah mekanisme dapat berjalan sesuai prosedur tetapi tetap menghasilkan dampak yang bertentangan dengan tujuan negara apabila desain atau praktik yang berkembang di dalamnya telah bergeser dari arah yang seharusnya.

Salah satu hal yang perlu diperiksa dalam *malware scan* adalah munculnya kelompok-kelompok kepentingan yang secara bertahap memperoleh pengaruh jauh lebih besar dibanding rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Dalam negara yang sehat, seluruh institusi seharusnya bekerja untuk menerjemahkan kepentingan rakyat ke dalam kebijakan publik. Namun ketika berbagai keputusan strategis semakin banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, pemerintahan, atau informasi, maka jalur kedaulatan mulai mengalami gangguan. Gangguan tersebut tidak selalu terlihat secara langsung karena seluruh proses formal masih berjalan. Akan tetapi hasil yang dihasilkan semakin

menunjukkan bahwa akses terhadap negara tidak lagi tersebar secara seimbang.

Pemeriksaan berikutnya berkaitan dengan pola-pola yang membuat negara semakin sulit melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Dalam sistem yang sehat, kesalahan dapat dikenali dan diperbaiki. Pengawasan mampu bekerja. Kritik dapat didengar. Evaluasi dapat menghasilkan perubahan. Namun ketika berbagai mekanisme koreksi mulai kehilangan efektivitasnya, sistem menjadi semakin rentan terhadap akumulasi penyimpangan. Dalam dunia teknologi, keadaan tersebut menyerupai perangkat yang sistem keamanannya telah dimanipulasi sehingga tidak lagi mampu mendeteksi ancaman yang sedang bekerja di dalamnya. Gangguan terus berkembang bukan karena tidak ada gejala, melainkan karena sistem kehilangan kemampuan untuk mengenali gejala tersebut sebagai ancaman.

Aspek lain yang perlu diperiksa adalah berbagai bentuk ketergantungan yang menyebabkan negara semakin sulit bertindak berdasarkan kepentingan rakyat sendiri. Ketergantungan ekonomi, ketergantungan kekuasaan, ketergantungan informasi, maupun ketergantungan kelembagaan dapat berkembang secara perlahan hingga memengaruhi kemampuan negara dalam menjalankan fungsi dasarnya. Sama seperti perangkat yang diam-diam dikendalikan oleh sistem eksternal tanpa sepengetahuan pengguna, negara juga dapat mengalami penurunan kualitas kedaulatan ketika keputusan-keputusan penting semakin ditentukan oleh

faktor-faktor yang berada di luar kendali rakyat sebagai pemilik negara.

Yang perlu dipahami, *malware scan* bukan proses yang bertujuan menciptakan rasa curiga terhadap segala sesuatu. Tujuannya justru sebaliknya, yaitu memisahkan antara gejala dan penyebab secara objektif. Bangsa tidak dapat memperbaiki apa yang tidak dipahaminya. Bangsa juga tidak dapat memulihkan negara apabila seluruh energi habis untuk memperdebatkan gejala tanpa pernah menyentuh akar persoalannya. Karena itu, proses ini membutuhkan keberanian untuk melihat pola yang lebih besar daripada sekadar peristiwa-peristiwa individual. Fokusnya bukan pada siapa yang salah, melainkan pada mekanisme apa yang secara konsisten menghasilkan penyimpangan.

Pada akhirnya, *malware scan* merupakan upaya mengembalikan kemampuan negara untuk melihat dirinya sendiri secara jernih. Sebelum melakukan perubahan konstitusional, sebelum melakukan audit kedaulatan, dan sebelum merancang ulang sistem negara, bangsa perlu terlebih dahulu memahami sumber-sumber gangguan yang selama ini bekerja di dalam sistem. Sebab tidak ada pemulihan yang dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila sumber kerusakan tetap dibiarkan bekerja di tempat yang sama. Dan sebagaimana seorang teknisi tidak akan memulai perbaikan sebelum mengetahui program apa yang mengganggu perangkat, sebuah bangsa juga tidak boleh memulai proses pemulihan tanpa terlebih dahulu melakukan *malware scan* terhadap seluruh pola yang

selama ini menjauhkan negara dari rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

17.4. Mengenali *Malware* yang Menyamar sebagai Fitur

Salah satu karakteristik paling berbahaya dari sebuah *malware* bukan terletak pada kemampuannya merusak sistem secara langsung, melainkan pada kemampuannya menyamar sebagai bagian yang sah dari sistem tersebut. Dalam dunia teknologi, ancaman yang paling mudah diatasi biasanya adalah ancaman yang terlihat jelas. Ketika sebuah program secara terbuka mengganggu kinerja perangkat, pengguna segera menyadari adanya masalah. Ketika sistem menampilkan peringatan keamanan, langkah-langkah penanganan dapat segera dilakukan. Namun keadaan menjadi jauh lebih rumit ketika program berbahaya berhasil menyamarkan dirinya sebagai fitur yang dianggap normal. Pengguna tidak lagi melihatnya sebagai ancaman. Sistem tidak lagi memperlakukannya sebagai gangguan. Bahkan dalam banyak kasus, keberadaannya justru dianggap sebagai bagian yang wajar dari cara kerja perangkat tersebut.

Fenomena yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Tidak semua penyimpangan hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Tidak semua gangguan terhadap kedaulatan rakyat muncul sebagai tindakan yang secara terbuka menentang konstitusi. Sebagian penyimpangan berkembang secara perlahan hingga akhirnya diterima sebagai bagian normal dari kehidupan pemerintahan. Ketika sebuah praktik

berlangsung cukup lama, masyarakat mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan antara apa yang normal dan apa yang sesungguhnya merupakan bentuk penyimpangan yang telah dilembagakan. Pada titik itulah sebuah *malware* pemerintahan dan ketatanegaraan mencapai bentuk yang paling efektif, yaitu ketika keberadaannya tidak lagi dipertanyakan.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa rakyat merupakan *root owner* atau pemilik sah negara. Pancasila berfungsi sebagai *kernel* yang menjadi sumber nilai dasar bangsa. Konstitusi bertindak sebagai *firmware* yang mengatur bagaimana negara bekerja. MPR sebagai *root administrator* menerima mandat untuk menjaga agar seluruh sistem tetap bergerak sesuai kehendak rakyat. Jika hubungan tersebut menjadi acuan utama, maka ukuran kesehatan sebuah negara seharusnya sangat sederhana. Segala sesuatu yang memperkuat kedaulatan rakyat, memperkuat hubungan antara negara dan rakyat, serta mendekatkan penyelenggaraan negara kepada tujuan konstitusional dapat dianggap sebagai bagian dari sistem yang sehat. Sebaliknya, segala sesuatu yang secara perlahan mengurangi kendali rakyat terhadap negaranya perlu diperiksa secara kritis, meskipun tampak normal di permukaan.

Salah satu contoh yang sering muncul adalah ketika biaya pemerintahan berkembang menjadi sangat tinggi hingga hanya kelompok tertentu yang memiliki sumber daya besar yang mampu berkompetisi secara efektif. Pada awalnya keadaan tersebut mungkin dipandang sebagai konsekuensi biasa dari demokrasi

modern. Kampanye membutuhkan biaya. Organisasi membutuhkan sumber daya. Aktivitas pemerintahan memerlukan dukungan finansial. Seluruh penjelasan tersebut memang memiliki dasar yang masuk akal. Namun ketika biaya yang dibutuhkan semakin besar dan akses terhadap kekuasaan semakin bergantung pada kemampuan finansial, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah sistem tersebut masih bekerja terutama untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan, atau mulai bergerak mengikuti kepentingan pihak-pihak yang memiliki kemampuan membiayai proses tersebut?

Keadaan semacam ini menyerupai sebuah aplikasi yang pada awalnya dibuat untuk membantu pengguna, tetapi perlahan mulai mengumpulkan akses yang semakin luas terhadap perangkat. Pada tahap awal, tambahan akses tersebut tampak tidak berbahaya. Namun ketika akses yang diberikan semakin besar dan semakin sedikit diawasi, aplikasi tersebut mulai memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan. Pengguna masih merasa mengendalikan perangkatnya, padahal sebagian keputusan penting telah dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya.

Contoh lain dapat ditemukan pada praktik-praktik kekuasaan yang secara formal sah tetapi secara substansial semakin menjauh dari semangat kedaulatan rakyat. Ketika jabatan publik mulai dipandang sebagai investasi pemerintahan yang harus menghasilkan pengembalian tertentu, orientasi pelayanan publik perlahan berubah. Ketika kekuasaan lebih sering diperlakukan sebagai sumber manfaat bagi kelompok

tertentu daripada sebagai amanah untuk melayani rakyat, negara mulai bergerak menjauh dari tujuan dasarnya. Yang menarik, seluruh proses tersebut dapat berlangsung tanpa melanggar prosedur secara terbuka. Pemilu tetap berjalan. Lembaga tetap bekerja. Regulasi tetap diterbitkan. Namun substansi yang berada di balik prosedur tersebut mengalami perubahan arah secara perlahan.

Dalam dunia keamanan siber, keadaan yang paling sulit dideteksi adalah ketika sebuah *malware* tidak merusak sistem secara langsung, melainkan memengaruhi perilaku sistem sedikit demi sedikit. Pengguna tetap dapat bekerja seperti biasa. Perangkat tetap berfungsi. Tidak ada alarm yang berbunyi. Namun secara perlahan keputusan-keputusan yang diambil sistem mulai bergerak menuju arah yang menguntungkan pihak tertentu. Persis pada titik itulah ancaman menjadi sangat efektif, karena kerusakan tidak lagi datang dalam bentuk gangguan yang terlihat, melainkan dalam bentuk perubahan perilaku yang diterima sebagai kewajaran.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan ketika masyarakat mulai menerima berbagai bentuk ketimpangan sebagai sesuatu yang tidak mungkin diubah. Ketika akses terhadap kekuasaan dianggap secara alami hanya milik kelompok tertentu. Ketika pengaruh ekonomi terhadap kebijakan dipandang sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Ketika partisipasi rakyat direduksi hanya menjadi kegiatan memilih dalam periode tertentu tanpa keterlibatan yang lebih bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

Semua keadaan tersebut mungkin tidak menimbulkan krisis yang langsung terlihat. Namun apabila dibiarkan berlangsung dalam waktu yang lama, hubungan antara rakyat sebagai *root owner* dan negara sebagai instrumen kedaulatan mulai mengalami pelemahan.

Yang membuat kondisi ini semakin berbahaya adalah kemampuannya menciptakan ilusi normalitas. Semakin lama sebuah praktik berlangsung, semakin sulit praktik tersebut dipertanyakan. Generasi baru tumbuh dengan menganggap keadaan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Perdebatan publik tidak lagi mempertanyakan apakah praktik tersebut sesuai dengan tujuan negara, melainkan hanya memperdebatkan bagaimana praktik tersebut dijalankan. Fokus bergeser dari substansi menuju prosedur. Dari tujuan menuju mekanisme. Dari kedaulatan rakyat menuju pengelolaan sistem yang telah diterima apa adanya.

Karena itulah proses *recovery mode* tidak cukup hanya mencari gangguan yang terlihat jelas. Proses tersebut juga harus mampu mengenali berbagai bentuk penyimpangan yang telah begitu lama hidup di dalam sistem hingga dianggap sebagai bagian dari fitur normal negara. Sebuah bangsa tidak dapat memulihkan dirinya apabila masih menganggap sumber kerusakan sebagai bagian yang sah dari sistem. Sebuah negara tidak dapat kembali kepada tujuan konstitusionalnya apabila kehilangan kemampuan membedakan antara instrumen yang melayani rakyat dan instrumen yang secara perlahan menjauhkan rakyat dari pusat kedaulatan.

Pada akhirnya, salah satu tugas terpenting dalam proses pemulihan negara adalah keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap normal. Bukan untuk menolak seluruh tradisi pemerintahan yang telah berkembang, bukan pula untuk mencari kesalahan pada setiap praktik yang ada, melainkan untuk menguji kembali apakah praktik-praktik tersebut masih selaras dengan posisi rakyat sebagai pemilik sah negara. Sebab sejarah menunjukkan bahwa banyak sistem tidak runtuh karena diserang dari luar, melainkan karena terlalu lama menerima penyimpangan internal sebagai bagian dari kewajaran. Dan ketika sebuah *malware* telah berhasil menyamar sebagai fitur, langkah pertama menuju pemulihan adalah keberanian untuk mengenalinya kembali sebagai sumber gangguan yang harus diperiksa secara jujur dan objektif.

17.5. *Access Audit*: Siapa Memegang Hak Akses Negara

Setelah proses *malware scan* dilakukan dan berbagai kemungkinan sumber gangguan mulai diidentifikasi, langkah berikutnya dalam *recovery mode* adalah melakukan *access audit*. Dalam dunia teknologi, *access audit* merupakan proses pemeriksaan terhadap siapa yang memiliki hak akses terhadap sebuah sistem, sejauh mana akses tersebut dapat digunakan, dan apakah akses yang dimiliki masih sesuai dengan tujuan awal sistem dibangun. Langkah ini sangat penting karena tidak semua kerusakan berasal dari program berbahaya yang masuk dari luar. Dalam banyak kasus,

gangguan justru muncul karena hak akses yang berlebihan diberikan kepada pihak yang tidak semestinya, atau karena hak akses yang seharusnya berada di tangan pemilik sistem perlahan berpindah kepada pihak lain tanpa disadari.

Sebuah perangkat yang aman tidak hanya ditentukan oleh kualitas perangkat lunaknya. Keamanan juga ditentukan oleh kejelasan mengenai siapa yang memiliki hak untuk membaca data, mengubah konfigurasi, memasang program baru, atau mengendalikan fungsi-fungsi penting sistem. Ketika hak akses tersebut tidak lagi terkelola dengan baik, pemilik perangkat dapat kehilangan kendali atas sistem yang secara formal masih menjadi miliknya. Perangkat tetap berada di atas meja yang sama, masih menggunakan nama pengguna yang sama, dan masih terlihat seperti milik pemiliknya. Namun keputusan-keputusan penting yang menentukan perilaku sistem mulai berada di tangan pihak lain yang memiliki akses lebih besar.

Fenomena tersebut memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan persoalan kedaulatan dalam kehidupan bernegara. Dalam teori ketatanegaraan Indonesia, persoalan kepemilikan negara sebenarnya telah dijawab dengan sangat jelas. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat adalah pemilik sah negara. Dalam glosarium buku ini, rakyat diposisikan sebagai *root owner*, yaitu pihak yang memiliki hak tertinggi atas sistem negara. Seluruh legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat. Seluruh institusi negara memperoleh kewenangannya karena

adanya mandat yang berasal dari rakyat. Negara tidak dibentuk untuk menguasai rakyat, melainkan untuk menjalankan kehendak rakyat dalam bentuk yang terorganisasi dan berkelanjutan.

Namun sebagaimana dalam sistem digital, pernyataan mengenai siapa pemilik sistem tidak selalu identik dengan kenyataan mengenai siapa yang mengendalikan sistem. Seorang pengguna dapat tercatat sebagai pemilik perangkat, tetapi tidak lagi memiliki akses terhadap fungsi-fungsi penting di dalamnya. Hal yang sama dapat terjadi dalam negara. Rakyat dapat diakui sebagai pemegang kedaulatan secara konstitusional, tetapi tetap perlu diajukan pertanyaan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana rakyat benar-benar memiliki akses terhadap proses yang menentukan arah negara? Sejauh mana rakyat dapat memengaruhi keputusan-keputusan strategis yang memengaruhi kehidupan bersama? Sejauh mana jalur kedaulatan yang dimiliki rakyat benar-benar bekerja sebagaimana yang dirancang dalam fondasi negara?

Pertanyaan tersebut menjadi inti dari *access audit*. Fokusnya bukan mencari siapa yang salah, melainkan memetakan aliran kewenangan dalam sistem negara. Dalam sebuah sistem yang sehat, jalur akses harus jelas. Pemilik memiliki hak tertinggi. Administrator menjalankan mandat pemilik. Operator menjalankan fungsi operasional sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan. Setiap tingkatan memiliki tanggung jawab dan batas yang dapat diawasi. Ketika hubungan tersebut bekerja dengan baik, sistem dapat berjalan

secara tertib karena seluruh pihak memahami sumber legitimasi yang menjadi dasar kewenangannya.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, hubungan tersebut diterjemahkan melalui konsep rakyat sebagai *root owner* dan MPR sebagai *root administrator*. Rakyat adalah sumber kedaulatan. MPR menerima mandat untuk menjalankan fungsi pengelolaan tertinggi atas nama rakyat. Pemerintah menjalankan fungsi operasional negara. Lembaga-lembaga negara lainnya menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Dalam desain yang ideal, seluruh jalur kewenangan bergerak dari rakyat menuju institusi negara, bukan sebaliknya. Negara memperoleh legitimasi dari rakyat, bukan rakyat yang memperoleh legitimasi dari negara.

Masalah mulai muncul ketika jalur akses tersebut menjadi kabur. Dalam dunia teknologi, salah satu tanda adanya masalah adalah ketika pengguna tidak lagi mengetahui siapa yang memiliki akses terhadap sistemnya. Program tertentu memiliki hak yang tidak jelas asal-usulnya. Beberapa proses berjalan tanpa dapat diaudit. Konfigurasi berubah tanpa persetujuan pemilik. Pada tahap tertentu, pemilik sistem masih merasa memiliki perangkat tersebut, tetapi kehilangan kemampuan untuk memahami bagaimana perangkat tersebut sesungguhnya bekerja. Keadaan serupa dapat terjadi dalam negara ketika hubungan antara rakyat dan kekuasaan menjadi semakin tidak transparan.

Kondisi tersebut tidak selalu muncul melalui tindakan yang melanggar hukum secara terbuka. Dalam banyak kasus, perubahan berlangsung secara perlahan

melalui akumulasi berbagai mekanisme yang tampak normal. Pusat-pusat pengaruh berkembang di luar jalur kedaulatan formal. Keputusan-keputusan strategis semakin sulit ditelusuri hubungan langsungnya dengan kehendak rakyat. Kelompok-kelompok tertentu memperoleh kemampuan yang jauh lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan dibanding masyarakat luas. Pada saat yang sama, rakyat tetap diberi keyakinan bahwa seluruh proses berlangsung atas nama demokrasi dan kedaulatan rakyat. Inilah sebabnya *access audit* menjadi sangat penting, karena persoalan yang diperiksa bukan hanya siapa yang secara formal memiliki kewenangan, tetapi siapa yang secara nyata memiliki kemampuan untuk memengaruhi sistem.

Dalam konteks ini, audit tidak boleh berhenti pada struktur kelembagaan. Audit juga harus melihat bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik. Siapa yang mampu menentukan agenda nasional? Siapa yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan? Siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya strategis negara? Siapa yang dapat mengubah arah keputusan publik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan kecurigaan terhadap pihak tertentu, melainkan untuk memahami apakah jalur kedaulatan masih bergerak dari rakyat ke negara atau justru mulai bergerak melalui jalur-jalur lain yang tidak pernah dirancang dalam fondasi negara.

Dalam glosarium buku ini, Pancasila sebagai *kernel* memberikan arah bahwa negara harus bekerja untuk kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan bersama. Konstitusi sebagai *firmware*

seharusnya menerjemahkan nilai tersebut ke dalam struktur yang memungkinkan rakyat tetap menjadi pemegang kendali tertinggi. Apabila hasil audit menunjukkan bahwa berbagai keputusan penting semakin jauh dari kendali rakyat, maka persoalannya bukan lagi sekadar persoalan kebijakan. Persoalannya telah bergerak menuju pertanyaan yang lebih mendasar mengenai apakah distribusi akses dalam negara masih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Karena itu, *access audit* bukanlah proses administratif. *Access audit* adalah proses untuk menguji kembali hubungan antara pemilik negara dan pengelola negara. Audit ini berusaha menjawab apakah rakyat masih benar-benar berfungsi sebagai *root owner* atau hanya menjadi simbol legitimasi yang digunakan secara berkala tanpa memiliki akses yang memadai terhadap arah sistem. Audit ini juga berusaha memeriksa apakah MPR sebagai *root administrator* masih menjalankan fungsi menjaga kedaulatan rakyat atau telah kehilangan sebagian kemampuan untuk menghubungkan kehendak rakyat dengan operasional negara.

Pada akhirnya, kesehatan sebuah sistem tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pemilik yang sah. Kesehatan sistem juga ditentukan oleh apakah pemilik tersebut benar-benar memiliki kendali terhadap sistem yang dimilikinya. Dalam negara, pertanyaan yang sama perlu diajukan secara jujur. Bukan sekadar apakah rakyat disebut sebagai pemegang kedaulatan, melainkan apakah kedaulatan tersebut benar-benar memiliki jalur akses yang nyata ke dalam penyelenggaraan negara. Sebab tidak ada pemulihan

yang dapat dilakukan secara utuh tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa hak akses tertinggi tetap berada di tangan pihak yang memang menjadi pemilik sah negara, yaitu rakyat itu sendiri.

17.6. *Root Owner* dan *Root Administrator*

Setelah melakukan *access audit*, pertanyaan yang paling mendasar bukan lagi siapa yang menggunakan kekuasaan, melainkan siapa yang sesungguhnya memiliki hak tertinggi atas sistem negara dan siapa yang bertanggung jawab menjaga sistem tersebut atas nama pemiliknya. Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi justru menjadi titik yang paling sering menimbulkan kebingungan dalam praktik ketatanegaraan. Banyak bangsa mengalami persoalan bukan karena tidak memiliki institusi yang lengkap, melainkan karena kehilangan kejelasan mengenai hubungan antara pemilik kedaulatan dan pengelola kedaulatan. Ketika hubungan tersebut kabur, negara dapat terus berjalan secara administratif tetapi perlahan kehilangan arah konstitusional yang seharusnya menjadi dasar seluruh penyelenggaraan kekuasaan.

Dalam dunia teknologi, setiap sistem memiliki pemilik dan pengelola. Pemilik adalah pihak yang memiliki hak tertinggi atas sistem tersebut. Pengelola adalah pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan, menjaga, dan mengatur sistem atas nama pemilik. Kedua posisi tersebut memiliki hubungan yang sangat erat tetapi tidak pernah identik. Pemilik tidak harus mengoperasikan sistem setiap hari. Sebaliknya, pengelola tidak otomatis menjadi pemilik hanya karena

menjalankan fungsi operasional. Kejelasan mengenai perbedaan tersebut menjadi syarat utama agar sistem dapat bekerja secara sehat. Ketika pengelola mulai diperlakukan sebagai pemilik, atau ketika pemilik kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pengelola, berbagai bentuk penyimpangan mulai muncul secara perlahan.

Dalam glosarium buku ini, konsep tersebut diterjemahkan melalui istilah *root owner* dan *root administrator*. Rakyat merupakan *root owner*, yaitu pemilik sah negara yang menjadi sumber seluruh kedaulatan. Posisi tersebut bukan sekadar simbol kekuasaan atau ungkapan normatif yang dicantumkan dalam konstitusi. Posisi tersebut merupakan fondasi seluruh bangunan negara. Negara ada karena rakyat ada. Kekuasaan memperoleh legitimasi karena rakyat memberikannya. Seluruh institusi negara memperoleh kewenangan karena rakyat menyetujuinya melalui mekanisme yang ditetapkan dalam konstitusi. Dengan kata lain, rakyat bukan objek yang berada di bawah negara, melainkan subjek utama yang melahirkan negara itu sendiri.

Apabila rakyat merupakan *root owner*, maka muncul pertanyaan berikutnya. Siapa yang bertugas menjaga sistem atas nama rakyat? Dalam analogi sistem digital, pemilik perangkat tidak selalu mengelola sendiri seluruh konfigurasi yang ada di dalam sistem. Karena itulah diperlukan *root administrator*, yaitu pihak yang menerima mandat untuk mengelola sistem sesuai kepentingan pemiliknya. Dalam perspektif Sekolah Negarawan, posisi tersebut berada pada MPR sebagai

mandataris rakyat. MPR bukan pemilik negara. MPR juga bukan penguasa yang berdiri di atas rakyat. MPR adalah pengelola mandat kedaulatan rakyat pada tingkat tertinggi yang bertugas memastikan bahwa seluruh sistem negara tetap bekerja sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Pemahaman ini sangat penting karena selama bertahun-tahun banyak perdebatan ketatanegaraan terjebak pada pembahasan mengenai siapa yang memegang kekuasaan operasional. Perhatian lebih banyak tertuju kepada pemerintah, presiden, partai politik, kabinet, atau berbagai lembaga negara lainnya. Padahal seluruh lembaga tersebut sesungguhnya berada pada lapisan operasional yang bekerja di bawah sistem yang lebih besar. Sebelum membahas siapa yang menjalankan negara, bangsa perlu terlebih dahulu memahami siapa yang memiliki negara dan siapa yang menerima mandat untuk menjaga negara tersebut atas nama pemiliknya.

Dalam sebuah sistem yang sehat, hubungan antara *root owner* dan *root administrator* harus selalu terjaga dengan jelas. Pemilik memberikan mandat. Administrator menjalankan mandat tersebut. Administrator tidak menciptakan sumber legitimasi bagi dirinya sendiri, melainkan memperoleh legitimasi dari pemilik sistem. Karena itu, seluruh tindakan administrator harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik. Dalam konteks negara, prinsip tersebut berarti bahwa seluruh struktur kekuasaan pada akhirnya harus tetap terhubung kepada rakyat sebagai sumber kedaulatan. Setiap kewenangan yang

dijalankan oleh negara harus dapat ditelusuri kembali kepada mandat rakyat. Setiap penggunaan kekuasaan harus tetap berada dalam koridor yang ditentukan oleh pemilik kedaulatan.

Masalah mulai muncul ketika hubungan tersebut mengalami distorsi. Dalam dunia teknologi, salah satu bentuk gangguan yang paling berbahaya terjadi ketika administrator mulai bertindak seolah-olah menjadi pemilik sistem. Pada tahap awal, perubahan tersebut mungkin tidak terlihat. Sistem masih berjalan. Fungsi-fungsi utama masih bekerja. Namun perlahan keputusan-keputusan penting mulai diambil berdasarkan kepentingan administrator, bukan kepentingan pemilik. Hak akses yang semula diberikan untuk menjaga sistem digunakan untuk memperluas kendali atas sistem. Pemilik masih tercatat sebagai pemilik, tetapi kemampuan untuk mengarahkan sistem semakin berkurang.

Fenomena serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Ketika institusi yang menerima mandat mulai memandang mandat tersebut sebagai sumber kepemilikan, hubungan antara rakyat dan negara mulai mengalami perubahan mendasar. Kedaulatan yang seharusnya mengalir dari rakyat berubah menjadi kewenangan yang seolah-olah berasal dari institusi itu sendiri. Dalam keadaan seperti itu, rakyat tetap disebut sebagai pemegang kedaulatan dalam berbagai dokumen resmi, tetapi jalur yang menghubungkan rakyat dengan penyelenggaraan negara menjadi semakin lemah. Negara masih berbicara atas nama rakyat, tetapi rakyat semakin sulit memastikan bahwa

negara benar-benar bergerak sesuai dengan kehendaknya.

Karena itulah *recovery mode* menuntut dilakukannya pemeriksaan terhadap hubungan antara *root owner* dan *root administrator*. Pemeriksaan tersebut bukan dilakukan untuk memperdebatkan individu atau jabatan tertentu. Fokusnya adalah memastikan bahwa desain negara masih mempertahankan prinsip dasar bahwa rakyat merupakan sumber kedaulatan tertinggi. Audit tersebut juga bertujuan memastikan bahwa MPR sebagai *root administrator* masih memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi menjaga kedaulatan rakyat, bukan sekadar menjadi bagian dari mekanisme administratif yang kehilangan hubungan substantif dengan pemilik negara.

Dalam perspektif ini, posisi MPR memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi prosedural tertentu. MPR merupakan simpul utama yang menghubungkan rakyat sebagai pemilik negara dengan keseluruhan struktur negara. Sebagaimana *root administrator* dalam sebuah sistem digital bertugas menjaga agar seluruh konfigurasi sistem tetap sesuai dengan kehendak pemilik perangkat, MPR seharusnya menjadi penjaga arah kedaulatan agar negara tidak bergerak menjauh dari rakyat. Ketika fungsi tersebut berjalan dengan baik, seluruh institusi negara memperoleh orientasi yang jelas. Ketika fungsi tersebut melemah, hubungan antara rakyat dan negara menjadi semakin kabur.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa banyak kerusakan sistemik terjadi karena

hilangnya arah kalibrasi dan melemahnya mekanisme pengawasan. Salah satu penyebab utama dari gejala tersebut adalah ketika jalur antara pemilik dan administrator tidak lagi bekerja secara optimal. Sistem masih berjalan, tetapi kehilangan referensi utama yang seharusnya menjadi sumber arah seluruh aktivitas negara. Akibatnya, berbagai institusi mulai bergerak berdasarkan kepentingan internal masing-masing. Pemerintah fokus pada operasional pemerintahan. Lembaga lain fokus pada fungsi sektoralnya. Namun tidak ada lagi mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tersebut tetap terhubung kepada rakyat sebagai pemilik sah negara.

Pada akhirnya, pembahasan mengenai *root owner* dan *root administrator* bukan sekadar persoalan istilah. Pembahasan ini menyentuh inti dari seluruh gagasan mengenai kedaulatan rakyat. Negara yang sehat bukanlah negara yang memiliki banyak lembaga atau banyak aturan. Negara yang sehat adalah negara yang mampu menjaga hubungan antara pemilik kedaulatan dan pengelola kedaulatan secara jelas, konsisten, dan dapat diaudit. Selama rakyat tetap berfungsi sebagai *root owner* dan MPR tetap menjalankan peran sebagai *root administrator* yang setia kepada mandat rakyat, jalur kedaulatan akan tetap terjaga. Dari hubungan itulah seluruh legitimasi negara memperoleh maknanya, dan dari hubungan itulah proses pemulihan negara harus dimulai sebelum melangkah kepada pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap konstitusi dan kedaulatan itu sendiri.

17.7. Constitutional Review sebagai Pemeriksaan *Firmware*

Setelah hubungan antara *root owner* dan *root administrator* diperiksa, langkah berikutnya dalam *recovery mode* adalah melakukan *constitutional review*. Dalam banyak perdebatan kekuasaan, istilah ini sering dipahami sebatas pengujian norma hukum terhadap norma hukum lainnya. Padahal dalam konteks pemulihan sistem negara, makna *constitutional review* jauh lebih mendasar. Yang diperiksa bukan hanya pasal demi pasal, melainkan keseluruhan desain yang mengatur bagaimana negara bekerja. Fokusnya bukan sekadar apakah suatu ketentuan sah secara hukum, melainkan apakah keseluruhan arsitektur negara masih selaras dengan tujuan yang menjadi alasan negara tersebut dibentuk.

Dalam dunia teknologi, pemeriksaan semacam ini dapat dianalogikan sebagai pemeriksaan terhadap *firmware*. Ketika sebuah perangkat mengalami gangguan yang berulang, teknisi tidak hanya memeriksa aplikasi yang berjalan di atas sistem. Perhatian juga diarahkan kepada lapisan yang lebih mendasar, yaitu *firmware* yang mengatur hubungan antara perangkat keras, sistem operasi, dan seluruh komponen yang bekerja di dalamnya. Selama *firmware* bekerja dengan benar, berbagai komponen dapat berinteraksi secara harmonis. Namun ketika terdapat kesalahan pada lapisan tersebut, gangguan yang muncul tidak lagi bersifat lokal. Kerusakan dapat

menjalar ke seluruh sistem karena sumber persoalannya berada pada fondasi yang mengatur cara kerja sistem itu sendiri.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, konstitusi dipahami sebagai *firmware* negara. Pancasila merupakan *kernel* yang memuat nilai dasar dan arah moral bangsa. Konstitusi kemudian menerjemahkan nilai tersebut menjadi struktur, prosedur, distribusi kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara. Dengan kata lain, konstitusi bukan sekadar dokumen hukum. Konstitusi adalah rancangan operasional yang menentukan bagaimana kedaulatan rakyat diterjemahkan menjadi mekanisme penyelenggaraan negara. Karena itu, ketika muncul berbagai gejala kerusakan sistemik, perhatian tidak boleh berhenti pada perilaku para pelaku negara. Perhatian juga harus diarahkan kepada *firmware* yang menjadi dasar perilaku seluruh sistem tersebut.

Di sinilah sering muncul kesalahpahaman yang sangat mendasar. Banyak masyarakat memandang konstitusi sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh, seolah-olah konstitusi merupakan tujuan akhir yang harus dipertahankan apa pun keadaannya. Padahal dalam logika sistem, *firmware* selalu memiliki satu fungsi utama, yaitu melayani tujuan yang ditetapkan oleh pemilik sistem. Sebuah *firmware* tidak pernah menjadi tujuan itu sendiri. Nilai tertinggi tetap berada pada pemilik dan tujuan sistem. Dalam konteks Indonesia, nilai tertinggi berada pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pada Pancasila sebagai sumber nilai dasar negara. Konstitusi memperoleh

maknanya karena berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Karena itu, *constitutional review* bukan tindakan yang bertujuan melemahkan konstitusi. Justru sebaliknya, *constitutional review* merupakan bentuk penghormatan terhadap fungsi konstitusi sebagai instrumen negara. Sebuah bangsa yang sehat harus memiliki keberanian untuk bertanya apakah konstitusi yang dimilikinya masih mampu menerjemahkan nilai-nilai dasar bangsa ke dalam desain negara yang efektif. Pertanyaan tersebut bukan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap tujuan yang hendak dicapai melalui konstitusi tersebut.

Bayangkan sebuah bangunan besar yang dibangun berdasarkan gambar kerja tertentu. Selama puluhan tahun bangunan tersebut digunakan oleh banyak generasi. Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah mulai muncul. Sebagian ruang tidak lagi berfungsi sesuai kebutuhan. Jalur sirkulasi menciptakan kemacetan. Struktur tertentu menghasilkan ketidakseimbangan beban. Dalam keadaan seperti itu, seorang arsitek tidak cukup hanya memperbaiki cat dinding atau mengganti furnitur. Pada titik tertentu, gambar kerja asli perlu diperiksa kembali. Bukan karena bangunan tersebut harus dihancurkan, tetapi karena perlu dipastikan bahwa rancangan yang digunakan masih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Logika yang sama berlaku terhadap konstitusi. Ketika berbagai gejala yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya terus muncul secara berulang, bangsa

perlu bertanya apakah terdapat aspek-aspek dalam desain ketatanegaraan yang secara tidak sengaja menghasilkan konsekuensi yang berbeda dari tujuan awalnya. Ketika jalur kedaulatan rakyat menjadi semakin tidak jelas, ketika distribusi kewenangan menciptakan berbagai bentuk ketidakseimbangan, ketika mekanisme pengawasan kehilangan efektivitasnya, dan ketika hubungan antara negara dan rakyat semakin menjauh, pemeriksaan terhadap desain konstitusional menjadi langkah yang wajar dan bahkan diperlukan.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, pertanyaan utama dalam *constitutional review* bukanlah apakah suatu pasal disukai atau tidak disukai. Pertanyaan utamanya adalah apakah desain yang dibangun oleh konstitusi masih menempatkan rakyat sebagai *root owner* secara nyata. Apakah jalur kedaulatan masih dapat ditelusuri secara jelas dari rakyat menuju penyelenggaraan negara. Apakah MPR sebagai *root administrator* masih memiliki posisi yang memadai untuk menjaga mandat rakyat. Apakah distribusi kekuasaan yang ada benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk melayani rakyat, atau justru menciptakan jarak yang semakin besar antara rakyat dan negara.

Pemeriksaan semacam ini membutuhkan keberanian intelektual karena hasilnya mungkin tidak selalu nyaman. Sebagian temuan dapat menunjukkan bahwa beberapa persoalan yang selama ini dianggap berasal dari individu ternyata berakar pada desain yang lebih mendasar. Sebagian persoalan yang selama ini

dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan mungkin ternyata berkaitan dengan struktur yang mengarahkan pelaksanaan tersebut. Kesimpulan semacam itu tidak boleh ditanggapi dengan rasa takut, karena tujuan dari *constitutional review* bukan mencari kesalahan masa lalu. Tujuannya adalah memahami hubungan sebab-akibat yang membentuk kondisi negara saat ini.

Dalam dunia teknologi, tidak ada teknisi yang merasa tersinggung ketika sebuah *firmware* diperiksa. Pemeriksaan dilakukan justru untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja lebih baik. Demikian pula dalam kehidupan bernegara. Konstitusi yang sehat bukan konstitusi yang kebal dari evaluasi. Konstitusi yang sehat adalah konstitusi yang mampu diperiksa, dipahami, dan bila diperlukan disempurnakan demi memastikan bahwa tujuan negara tetap dapat dicapai secara efektif. Yang harus dijaga bukan semata-mata bentuk teksnya, melainkan fungsi konstitusi sebagai instrumen yang menghubungkan nilai dasar bangsa dengan operasional negara.

Pada akhirnya, *constitutional review* merupakan salah satu tahap terpenting dalam *recovery mode* karena menyentuh lapisan yang berada di bawah berbagai gejala yang tampak di permukaan. Setelah *malware scan* mengidentifikasi sumber-sumber gangguan dan *access audit* memeriksa distribusi hak akses dalam negara, pemeriksaan terhadap *firmware* menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Sebab apabila akar persoalan berada pada desain yang mengatur cara kerja sistem, maka pemulihan tidak akan pernah lengkap tanpa memahami desain tersebut secara jujur dan

menyeluruh. Dan hanya melalui keberanian untuk memeriksa konstitusi sebagai *firmware* negara, sebuah bangsa dapat memastikan bahwa jalur menuju kedaulatan rakyat tetap terbuka dan tetap terjaga sesuai dengan cita-cita yang diletakkan dalam fondasi terdalam kehidupan bernegara.

17.8. Menguji Kembali Jalur Kedaulatan

Setelah melakukan *constitutional review*, langkah berikutnya dalam *recovery mode* adalah menguji kembali jalur kedaulatan yang menghubungkan rakyat dengan negara. Tahap ini menjadi sangat penting karena inti dari seluruh persoalan yang dibahas dalam buku ini pada akhirnya selalu kembali kepada satu pertanyaan mendasar apakah kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi, ataukah hanya berhenti sebagai pernyataan normatif yang kehilangan mekanisme operasionalnya? Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan membaca pasal-pasal konstitusi. Jawabannya harus dicari dengan menelusuri bagaimana kedaulatan bergerak di dalam sistem negara, bagaimana mandat diberikan, bagaimana kewenangan dijalankan, dan bagaimana keputusan-keputusan strategis akhirnya diambil.

Dalam dunia teknologi, kepemilikan sebuah sistem tidak cukup dibuktikan dengan adanya nama pemilik yang tercantum pada layar. Yang lebih penting adalah apakah pemilik tersebut benar-benar memiliki jalur kendali terhadap sistem yang dimilikinya. Sebuah perangkat dapat menampilkan identitas pemilik yang

benar, tetapi apabila seluruh konfigurasi penting dikendalikan oleh pihak lain, maka kepemilikan tersebut hanya bersifat simbolis. Hakikat kepemilikan selalu berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan arah, mengatur fungsi, dan melakukan koreksi terhadap sistem yang dimiliki. Karena itu, ketika melakukan audit terhadap sebuah sistem, teknisi tidak hanya memeriksa siapa pemiliknya, tetapi juga memeriksa bagaimana jalur kendali bekerja dari pemilik menuju sistem.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, rakyat merupakan *root owner* yang menjadi sumber kedaulatan tertinggi. Posisi tersebut bukan hadiah dari negara, bukan pemberian pemerintah, dan bukan pula hasil kebijakan lembaga tertentu. Kedaulatan rakyat merupakan fondasi yang melahirkan negara itu sendiri. Karena rakyat adalah pemilik negara, maka seluruh kewenangan negara pada dasarnya harus dapat ditelusuri kembali kepada rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi. Di sinilah pentingnya menguji jalur kedaulatan. Bukan sekadar memastikan bahwa rakyat disebut sebagai pemegang kedaulatan, tetapi memastikan bahwa terdapat mekanisme nyata yang memungkinkan kedaulatan tersebut bekerja dalam kehidupan bernegara.

Dalam desain yang ideal, jalur tersebut harus sederhana dan mudah dipahami. Rakyat sebagai *root owner* memberikan mandat. MPR sebagai *root administrator* menerima mandat tersebut dan bertugas menjaga arah sistem negara sesuai kehendak rakyat.

Pemerintah menjalankan fungsi operasional berdasarkan mandat yang berasal dari sistem konstitusional tersebut. Lembaga-lembaga negara lainnya bekerja sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh konstitusi. Seluruh hubungan itu membentuk satu rantai legitimasi yang jelas, mulai dari rakyat hingga seluruh aktivitas penyelenggaraan negara. Semakin jelas rantai tersebut, semakin kuat pula posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sesungguhnya.

Masalah muncul ketika jalur tersebut menjadi semakin panjang, semakin rumit, atau bahkan semakin sulit ditelusuri. Dalam sistem digital, setiap tambahan lapisan antara pemilik dan sistem akan mengurangi kejelasan kendali. Semakin banyak perantara yang tidak dapat diaudit, semakin sulit memastikan bahwa kehendak pemilik benar-benar diterjemahkan secara akurat ke dalam tindakan sistem. Hal yang sama dapat terjadi dalam negara. Ketika semakin banyak mekanisme yang memisahkan rakyat dari proses pengambilan keputusan, hubungan antara pemilik kedaulatan dan penggunaan kedaulatan menjadi semakin lemah. Secara formal rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan, tetapi secara praktis pengaruh rakyat terhadap arah negara semakin sulit dirasakan.

Keadaan semacam ini sering kali tidak terlihat karena seluruh prosedur tetap berjalan. Pemilu tetap dilaksanakan. Perwakilan tetap dipilih. Pemerintahan tetap dibentuk. Berbagai proses demokratis tetap berlangsung sesuai jadwal. Namun *recovery mode* mengajarkan bahwa keberadaan prosedur tidak selalu identik dengan keberadaan fungsi. Sebuah sistem dapat

menjalankan seluruh prosedurnya dengan sempurna tetapi tetap gagal mencapai tujuan yang menjadi alasan keberadaannya. Karena itu, pengujian jalur kedaulatan tidak berhenti pada pertanyaan apakah mekanisme formal tersedia. Pengujian harus bergerak lebih jauh kepada pertanyaan apakah mekanisme tersebut benar-benar memungkinkan kehendak rakyat mengalir menuju kebijakan negara secara efektif.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, salah satu ukuran penting dari kesehatan sebuah negara adalah seberapa pendek jarak antara rakyat dan keputusan strategis negara. Bukan berarti seluruh keputusan harus diambil secara langsung oleh rakyat, karena negara modern memang membutuhkan berbagai institusi dan mekanisme perwakilan. Namun semakin banyak lapisan yang memutus hubungan antara rakyat dan negara, semakin besar pula risiko terjadinya distorsi kedaulatan. Pada titik tertentu, keputusan-keputusan yang diambil atas nama rakyat dapat kehilangan hubungan substantif dengan kebutuhan dan kehendak rakyat itu sendiri.

Fenomena tersebut dapat dianalogikan dengan sebuah jaringan komputer yang mengalami terlalu banyak *relay*. Pesan yang dikirim dari titik asal harus melewati banyak simpul sebelum mencapai tujuan. Setiap simpul memiliki kemungkinan menimbulkan keterlambatan, gangguan, atau perubahan informasi. Semakin panjang jalurnya, semakin besar kemungkinan pesan yang diterima berbeda dari pesan yang dikirimkan. Dalam konteks negara, kehendak rakyat juga dapat mengalami distorsi ketika jalur yang

menghubungkan rakyat dengan penyelenggaraan negara terlalu panjang, terlalu kompleks, atau terlalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak berasal dari rakyat.

Karena itu, menguji jalur kedaulatan berarti memeriksa apakah rakyat masih memiliki kemampuan untuk mengoreksi arah negara ketika terjadi penyimpangan. Pemilik yang sesungguhnya selalu memiliki hak untuk melakukan koreksi terhadap sistem yang dimilikinya. Jika rakyat adalah *root owner*, maka harus tersedia mekanisme yang memungkinkan rakyat mengembalikan negara kepada tujuan konstitusional ketika sistem mulai bergerak menjauh dari arah tersebut. Apabila mekanisme koreksi semakin lemah, semakin sulit digunakan, atau semakin bergantung pada kepentingan pihak lain, maka jalur kedaulatan perlu diperiksa kembali secara serius.

Pengujian ini juga harus menjawab pertanyaan yang lebih mendalam mengenai posisi MPR sebagai *root administrator*. Dalam desain yang dibangun oleh Sekolah Negarawan, MPR bukan sekadar salah satu lembaga negara di antara lembaga-lembaga lainnya. MPR merupakan simpul yang menghubungkan rakyat dengan keseluruhan sistem negara. Karena itu, kesehatan jalur kedaulatan sangat bergantung pada kemampuan MPR menjalankan fungsi tersebut. Semakin kuat hubungan antara rakyat dan MPR sebagai mandataris rakyat, semakin kuat pula jalur yang menghubungkan pemilik negara dengan operasional negara. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut melemah, maka seluruh sistem berisiko kehilangan

referensi utama yang seharusnya menjadi sumber legitimasi dan arah.

Pada akhirnya, menguji kembali jalur kedaulatan bukanlah upaya mencari kesalahan dalam sejarah ketatanegaraan. Tujuannya adalah memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat benar-benar hidup dalam struktur negara, bukan hanya hidup dalam teks konstitusi. Sebuah negara dapat memiliki pasal-pasal yang sangat indah mengenai kedaulatan rakyat, tetapi tetap kehilangan substansinya apabila jalur yang menghubungkan rakyat dengan negara tidak bekerja secara efektif. Karena itu, setelah *constitutional review* dilakukan, bangsa perlu melangkah lebih jauh dengan memeriksa bagaimana kedaulatan bergerak di dalam sistem yang ada. Sebab pemulihan negara tidak akan pernah lengkap selama rakyat hanya diakui sebagai pemilik negara secara simbolis, tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai *root owner* yang mampu mengarahkan, mengawasi, dan mengoreksi sistem negara yang sesungguhnya dibangun atas nama dan untuk kepentingannya.

17.9. Sovereignty Audit: Siapa Pemilik Negara Sebenarnya

Setelah melakukan *malware scan*, *access audit*, *constitutional review*, dan pengujian terhadap jalur kedaulatan, proses *recovery mode* mencapai salah satu tahap yang paling mendasar sekaligus paling sensitif, yaitu *sovereignty audit*. Jika tahap-tahap sebelumnya berfokus pada gejala, akses, desain, dan mekanisme, maka tahap ini langsung menyentuh inti persoalan yang

menjadi fondasi seluruh kehidupan bernegara mengenai siapa sesungguhnya pemilik negara. Pertanyaan ini tampak sederhana karena hampir setiap warga negara dapat menjawabnya dengan cepat. Konstitusi menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara teoritis, jawaban tersebut memang benar. Namun *recovery mode* tidak berhenti pada jawaban normatif. *Recovery mode* mengharuskan sebuah bangsa memeriksa apakah jawaban normatif tersebut benar-benar tercermin dalam realitas operasional negara.

Dalam dunia teknologi, audit kepemilikan merupakan langkah yang sangat penting ketika sebuah sistem diduga mengalami gangguan serius. Sebuah perangkat mungkin masih terdaftar atas nama pemilik yang sah. Dokumen kepemilikan mungkin masih lengkap. Seluruh identitas pengguna mungkin masih menunjukkan nama yang sama. Namun ketika berbagai konfigurasi penting tidak lagi dapat dikendalikan oleh pemiliknya, ketika akses strategis berada di tangan pihak lain, atau ketika keputusan-keputusan utama ditentukan oleh pihak yang tidak memperoleh mandat dari pemilik, maka muncul pertanyaan yang tidak dapat dihindari yaitu apakah kepemilikan tersebut masih bersifat nyata atau hanya bersifat administratif.

Pertanyaan yang sama perlu diajukan terhadap negara. Apakah rakyat benar-benar menjadi pemilik negara dalam arti yang substantif, ataukah posisi tersebut perlahan berubah menjadi simbol legitimasi yang hanya digunakan untuk membenarkan berbagai proses pemerintahan yang sesungguhnya ditentukan

oleh kekuatan lain? Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap pihak tertentu. Pertanyaan ini adalah bagian dari proses diagnosis yang diperlukan agar bangsa dapat memahami kondisi sebenarnya dari sistem yang sedang dijalankan. Sebagaimana seorang dokter tidak dapat menyembuhkan penyakit tanpa memahami kondisi pasien secara objektif, sebuah bangsa juga tidak dapat memperbaiki negaranya tanpa memahami siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah negara tersebut.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, rakyat ditempatkan sebagai *root owner*, yaitu pemilik sah negara. Posisi tersebut menjadi titik awal seluruh desain ketatanegaraan. Pancasila sebagai *kernel* memuat nilai-nilai yang lahir dari kehidupan bangsa. Konstitusi sebagai *firmware* dibentuk untuk menerjemahkan nilai tersebut ke dalam struktur negara. MPR sebagai *root administrator* menerima mandat untuk menjaga agar sistem tetap bekerja sesuai dengan kehendak rakyat. Jika keseluruhan desain tersebut berjalan dengan benar, maka seluruh keputusan strategis negara seharusnya pada akhirnya selalu dapat ditelusuri kembali kepada rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi.

Namun *sovereignty audit* mengharuskan bangsa melihat lebih jauh daripada sekadar desain formal. Dalam praktik kehidupan bernegara sering muncul berbagai pusat pengaruh yang tidak selalu berada dalam struktur resmi negara. Pengaruh ekonomi dapat membentuk arah kebijakan. Pengaruh kekuasaan dapat menentukan agenda publik. Pengaruh informasi dapat membentuk persepsi masyarakat. Pengaruh

kelembagaan dapat menciptakan ketergantungan yang memengaruhi kemampuan negara mengambil keputusan secara mandiri. Tidak semua pengaruh tersebut otomatis bermasalah. Dalam negara modern, interaksi antara berbagai kelompok kepentingan memang tidak dapat dihindari. Persoalannya muncul ketika pengaruh-pengaruh tersebut berkembang sedemikian besar hingga melampaui pengaruh rakyat sebagai pemilik sah negara.

Dalam dunia sistem digital, keadaan seperti itu dapat dianalogikan sebagai perangkat yang secara formal masih dimiliki oleh pengguna tetapi sebagian besar pengaturannya ditentukan oleh layanan eksternal yang tidak berada di bawah kendali pengguna. Pengguna masih dapat menyalakan perangkat, menjalankan aplikasi, dan menggunakan berbagai fungsi yang tersedia. Namun keputusan-keputusan penting mengenai data, akses, dan perilaku sistem semakin banyak ditentukan oleh pihak lain. Kepemilikan masih ada secara administratif, tetapi kemampuan untuk mengendalikan sistem telah berkurang secara signifikan.

Demikian pula dalam negara, sebuah bangsa perlu bertanya dengan jujur apakah keputusan-keputusan strategis benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat atau lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berada di luar jalur kedaulatan rakyat. Apakah arah pembangunan terutama ditentukan oleh kebutuhan masyarakat luas atau oleh kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan. Apakah kebijakan negara lebih

mencerminkan aspirasi rakyat atau lebih mencerminkan keseimbangan kekuatan di antara berbagai aktor yang beroperasi di sekitar negara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bertujuan menciptakan kecurigaan, tetapi bertujuan mengukur kesehatan hubungan antara pemilik negara dan penggunaan kekuasaan negara.

Salah satu tantangan terbesar dalam *sovereignty audit* adalah kenyataan bahwa perpindahan kendali sering kali tidak terjadi secara terbuka. Tidak ada satu hari tertentu ketika rakyat secara resmi kehilangan kedaulatannya. Tidak ada upacara yang menandai berpindahnya kendali negara dari rakyat kepada pihak lain. Proses tersebut biasanya berlangsung secara perlahan melalui akumulasi berbagai perubahan kecil yang tampak tidak berbahaya. Sedikit demi sedikit akses rakyat terhadap proses pengambilan keputusan berkurang. Sedikit demi sedikit pengaruh kelompok tertentu bertambah besar. Sedikit demi sedikit berbagai keputusan penting menjadi semakin sulit ditelusuri hubungannya dengan kehendak rakyat. Pada akhirnya, yang berubah bukan teks konstitusi, melainkan realitas operasional yang berjalan di bawah teks tersebut.

Karena itulah *sovereignty audit* tidak cukup dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan. Audit ini harus melihat bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja. Siapa yang mampu menentukan prioritas nasional. Siapa yang memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan jangka panjang. Siapa yang mampu mengubah keputusan strategis. Siapa yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi negara tanpa harus memperoleh mandat langsung dari

rakyat. Semakin besar kesenjangan antara pemilik formal dan pengendali aktual, semakin besar pula risiko bahwa kedaulatan rakyat telah mengalami erosi tanpa disadari.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, ukuran utama dari audit ini sangat sederhana. Apakah rakyat masih menjadi titik akhir dari seluruh penggunaan kekuasaan negara. Jika sebuah kebijakan dibuat, apakah manfaat utamanya kembali kepada rakyat. Jika sebuah keputusan strategis diambil, apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jika kekuasaan digunakan, apakah penggunaan tersebut tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh pemilik kedaulatan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu memisahkan antara negara yang bekerja untuk rakyat dan negara yang perlahan mulai bekerja untuk kepentingan lain yang berada di luar rakyat.

Tahap ini juga menjadi momen penting untuk menguji kembali fungsi MPR sebagai *root administrator*. Sebagai mandataris rakyat, MPR seharusnya menjadi penjaga utama jalur kedaulatan. MPR tidak dibentuk untuk menggantikan rakyat sebagai pemilik negara, tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang mengambil alih posisi rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi. Dalam kerangka ini, kekuatan MPR tidak diukur dari besarnya kewenangan administratif yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya menjaga agar jalur antara rakyat dan negara tetap terbuka, jelas, dan dapat diaudit.

Pada akhirnya, *sovereignty audit* membawa seluruh pembahasan dalam bab ini kembali kepada pertanyaan

yang paling mendasar. Negara ini milik siapa? Jika jawabannya adalah rakyat, maka seluruh struktur, kebijakan, institusi, dan penggunaan kekuasaan harus dapat ditelusuri kembali kepada rakyat sebagai *root owner*. Jika dalam praktik ditemukan bahwa pengaruh terbesar justru berada di luar jalur tersebut, maka pemulihan negara belum selesai. Sebab tidak ada sistem yang dapat disebut sehat ketika pemiliknya kehilangan kendali atas sistem yang dimilikinya. Dan tidak ada kedaulatan yang dapat disebut nyata apabila rakyat hanya diakui sebagai pemilik negara dalam teks konstitusi, tetapi tidak sepenuhnya hadir sebagai pemilik dalam operasional negara sehari-hari. Dari sinilah proses *recovery mode* mendekati tujuannya, yaitu memastikan bahwa negara kembali terhubung dengan pemilik sahnya sebelum langkah-langkah pemulihan berikutnya dilakukan.

17.10. Sebelum *Reboot* Dilakukan

Sebuah sistem yang sedang berada dalam *recovery mode* tidak akan berada dalam kondisi tersebut selamanya. Tujuan dari *recovery mode* bukan menjadikan diagnosis sebagai keadaan permanen, melainkan memastikan bahwa setiap langkah perbaikan yang akan dilakukan benar-benar didasarkan pada pemahaman yang benar mengenai sumber persoalan. Setelah *malware scan* dilakukan, setelah jalur akses diaudit, setelah hubungan antara *root owner* dan *root administrator* diperiksa, setelah *constitutional review* dijalankan, dan setelah *sovereignty audit* selesai dilakukan, sebuah bangsa akan sampai pada satu titik

yang sangat menentukan. Titik tersebut adalah saat ketika seluruh temuan harus diterjemahkan menjadi keputusan mengenai masa depan sistem negara.

Dalam dunia teknologi, tidak semua perangkat yang masuk ke *recovery mode* membutuhkan tindakan yang sama. Ada sistem yang cukup diperbaiki melalui pembaruan konfigurasi. Ada sistem yang memerlukan penggantian beberapa komponen. Ada pula sistem yang harus melakukan *reboot* terhadap keseluruhan cara kerjanya karena kerusakan yang ditemukan tidak lagi berada pada tingkat operasional. Keputusan mengenai langkah yang harus diambil selalu bergantung pada hasil diagnosis. Semakin mendalam kerusakan yang ditemukan, semakin besar kemungkinan bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan hanya dengan tambalan-tambalan kecil pada bagian permukaan.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Selama proses *recovery mode* berlangsung, berbagai gejala yang sebelumnya tampak terpisah mulai memperlihatkan hubungan satu sama lain. Persoalan kedaulatan ternyata berkaitan dengan desain konstitusional. Persoalan distribusi kekuasaan ternyata berkaitan dengan jalur akses terhadap negara. Persoalan tata kelola ternyata berkaitan dengan hubungan antara institusi dan rakyat sebagai pemilik negara. Berbagai masalah yang selama ini diperdebatkan secara sektoral perlahan menunjukkan bahwa semuanya berada di dalam satu sistem yang sama. Kesadaran inilah yang menjadi hasil paling penting dari *recovery mode*, karena tanpa pemahaman mengenai keterhubungan tersebut,

setiap solusi akan cenderung kembali terjebak pada penanganan gejala.

Pada tahap ini, bangsa mulai memahami bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan mengganti aktor. Tidak semua persoalan dapat diperbaiki dengan menerbitkan regulasi baru. Tidak semua penyimpangan dapat diatasi dengan memperkuat pengawasan semata. Berbagai langkah tersebut tetap memiliki nilai dan manfaatnya masing-masing, tetapi hasil audit menunjukkan bahwa sebagian persoalan berakar pada lapisan yang lebih dalam. Persoalan tersebut berkaitan dengan bagaimana sistem dirancang, bagaimana kewenangan didistribusikan, bagaimana kedaulatan diterjemahkan ke dalam struktur negara, dan bagaimana hubungan antara rakyat dengan negara dibangun. Dengan kata lain, perhatian mulai bergerak dari pelaku menuju desain, dari operasional menuju arsitektur, dan dari gejala menuju fondasi.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, Pancasila merupakan *kernel* yang menjadi sumber nilai dasar negara. Rakyat adalah *root owner* yang menjadi pemilik sah kedaulatan. Konstitusi berfungsi sebagai *firmware* yang mengatur bagaimana nilai tersebut diterjemahkan ke dalam struktur negara. MPR bertindak sebagai *root administrator* yang menerima mandat untuk menjaga agar seluruh sistem tetap bergerak sesuai kehendak rakyat. Selama *recovery mode* berlangsung, seluruh lapisan tersebut telah diperiksa satu per satu. Yang diperiksa bukan sekadar apakah lapisan tersebut ada, melainkan apakah lapisan tersebut masih menjalankan fungsi yang menjadi alasan

keberadaannya. Hasil dari pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah sistem cukup diperbaiki atau perlu dirancang ulang pada bagian-bagian tertentu.

Yang perlu dipahami, *reboot* dalam konteks negara tidak identik dengan kekacauan, revolusi, atau penghancuran seluruh sistem yang telah ada. Dalam dunia teknologi, *reboot* justru dilakukan untuk mengembalikan sistem kepada kondisi kerja yang lebih stabil. Proses tersebut dilakukan setelah sistem dipastikan memahami sumber gangguannya dan mengetahui perubahan apa yang perlu dilakukan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Karena itu, pembahasan mengenai *reboot* harus dipahami sebagai upaya mengembalikan negara kepada tujuan dasarnya, bukan sebagai upaya menghapus seluruh pengalaman sejarah yang telah dilalui bangsa.

Di sinilah letak perbedaan antara perbaikan yang bersifat kosmetik dan perbaikan yang bersifat struktural. Perbaikan kosmetik berusaha membuat sistem terlihat lebih baik tanpa mengubah hubungan-hubungan yang melahirkan persoalan. Perbaikan struktural berusaha memastikan bahwa sumber persoalan tidak terus-menerus memproduksi gejala yang sama di masa depan. Sebuah bangsa yang serius ingin memulihkan negaranya tidak cukup hanya bertanya bagaimana mengurangi dampak dari masalah yang ada. Bangsa tersebut harus berani bertanya mengapa masalah tersebut terus muncul dan apa yang harus diubah agar masalah yang sama tidak kembali terulang.

Pada titik ini pula, rakyat sebagai *root owner* memperoleh kembali posisi sentral dalam pembahasan. Selama proses diagnosis berlangsung, berbagai institusi, mekanisme, dan struktur telah diperiksa secara kritis. Namun seluruh pemeriksaan tersebut pada akhirnya selalu kembali kepada satu pertanyaan utama apakah sistem yang ada benar-benar bekerja untuk rakyat sebagai pemilik negara. Jika jawaban terhadap pertanyaan tersebut masih belum memuaskan, maka proses pemulihan belum dapat dianggap selesai. Sebab tujuan akhir dari seluruh perbaikan bukan sekadar menciptakan negara yang lebih efisien, melainkan menciptakan negara yang kembali terhubung dengan sumber kedaulatannya.

MPR sebagai *root administrator* juga memperoleh makna yang semakin jelas pada tahap ini. Setelah jalur kedaulatan diperiksa dan audit kepemilikan negara dilakukan, fungsi MPR tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai bagian dari prosedur ketatanegaraan. MPR merupakan simpul yang menghubungkan rakyat dengan keseluruhan sistem negara. Karena itu, setiap langkah menuju pemulihan yang lebih mendalam harus memastikan bahwa hubungan tersebut tetap menjadi fondasi utama dalam desain negara. Tanpa hubungan yang kuat antara *root owner* dan *root administrator*, setiap perubahan berisiko kembali menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara.

Dengan demikian, akhir dari *recovery mode* bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan akhir dari fase diagnosis. Bangsa telah memeriksa gejala-gejala yang muncul. Bangsa telah mengidentifikasi berbagai

sumber gangguan. Bangsa telah mengaudit distribusi akses dan menguji kembali jalur kedaulatan. Bangsa telah memeriksa *firmware* konstitusional yang mengatur cara kerja negara. Seluruh proses tersebut menghasilkan satu kesadaran yang semakin kuat, yaitu bahwa persoalan negara tidak semata-mata berada pada siapa yang sedang menjalankan sistem, tetapi juga pada bagaimana sistem itu sendiri dirancang untuk bekerja.

Karena itu, sebelum *reboot* dilakukan, satu hal harus dipastikan terlebih dahulu. Arah yang akan dituju harus lebih jelas daripada sekadar keinginan untuk berubah. Sebuah sistem tidak boleh dihidupkan kembali tanpa mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Sebuah bangsa tidak boleh melakukan perubahan hanya karena merasa tidak puas terhadap keadaan yang ada. Perubahan harus diarahkan oleh pemahaman yang matang mengenai tujuan negara, posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan, fungsi konstitusi sebagai *firmware*, dan peran MPR sebagai *root administrator*. Dari titik inilah perjalanan buku memasuki fase berikutnya. Jika *recovery mode* bertujuan memahami apa yang salah dengan sistem yang ada, maka pembahasan selanjutnya akan bergerak menuju pertanyaan yang jauh lebih penting yaitu bagaimana negara seharusnya dirancang agar benar-benar bekerja untuk rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

BAB 18
RE-INSTALL SISTEM NEGARA

18.1. Mengapa Tambal Sulam Tidak Cukup

Setelah melalui proses *recovery mode*, satu kesimpulan penting mulai terlihat dengan semakin jelas. Banyak persoalan yang muncul dalam kehidupan bernegara ternyata tidak berdiri sendiri. Berbagai gejala yang selama ini dianggap terpisah sesungguhnya saling terhubung melalui struktur yang sama. Ketimpangan hukum, lemahnya pengawasan, mahalnya biaya pemerintahan, menjauhnya rakyat dari pusat pengambilan keputusan, serta berulangnya berbagai krisis kepercayaan terhadap institusi negara bukanlah rangkaian peristiwa yang muncul secara kebetulan. Di balik seluruh gejala tersebut terdapat pola yang menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berada pada pelaksana sistem, tetapi juga pada sistem yang dijalankan. Kesadaran inilah yang menjadi titik awal untuk memahami mengapa solusi berupa tambal sulam sering kali tidak cukup menyelesaikan masalah yang dihadapi negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung memilih solusi yang paling cepat terlihat hasilnya. Ketika dinding rumah mengalami retak, retakan tersebut ditutup dengan lapisan baru. Ketika atap mulai bocor, bagian yang bocor diperbaiki tanpa memeriksa kondisi keseluruhan struktur bangunan. Ketika muncul masalah pada satu ruangan, perhatian diarahkan kepada ruangan tersebut tanpa memeriksa fondasi yang menopang seluruh bangunan. Pendekatan semacam ini

tidak selalu salah. Dalam banyak situasi, perbaikan parsial memang cukup untuk menyelesaikan persoalan. Namun keadaan menjadi berbeda ketika kerusakan berasal dari struktur yang menopang keseluruhan bangunan. Dalam kondisi seperti itu, memperbaiki bagian permukaan hanya akan menunda munculnya kembali masalah yang sama.

Fenomena tersebut dapat ditemukan dengan sangat jelas dalam dunia teknologi. Sebuah perangkat yang mengalami gangguan ringan mungkin cukup diperbaiki melalui pembaruan aplikasi. Sebagian masalah dapat diselesaikan dengan membersihkan data yang tidak diperlukan. Sebagian lainnya dapat diatasi dengan mengganti komponen tertentu yang mengalami kerusakan. Akan tetapi ketika sumber masalah berada pada arsitektur sistem, pada konfigurasi inti, atau pada *firmware* yang mengatur cara kerja keseluruhan perangkat, berbagai perbaikan parsial hanya menghasilkan perubahan sementara. Sistem mungkin terlihat lebih baik untuk beberapa waktu, tetapi gejala yang sama perlahan akan muncul kembali karena akar persoalannya tetap berada di tempat yang sama.

Perspektif inilah yang perlu digunakan ketika melihat perjalanan panjang berbagai upaya reformasi dalam kehidupan bernegara. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai perubahan telah dilakukan dalam banyak sektor. Struktur pemerintahan diperbarui. Regulasi diperbaiki. Lembaga-lembaga baru dibentuk. Mekanisme pengawasan diperkuat. Teknologi diperkenalkan ke dalam birokrasi. Sistem pelayanan publik dimodernisasi. Berbagai langkah tersebut

menghasilkan banyak kemajuan yang layak diapresiasi. Namun di saat yang sama, sejumlah persoalan mendasar tetap bertahan. Kesenjangan antara rakyat dan pusat kekuasaan masih menjadi perdebatan. Kepercayaan terhadap institusi negara terus mengalami pasang surut. Pengaruh kekuatan ekonomi terhadap pemerintahan tetap menjadi perhatian. Berbagai bentuk ketimpangan dalam akses terhadap keadilan masih sering dipersoalkan.

Keadaan tersebut tidak berarti bahwa seluruh reformasi yang telah dilakukan gagal. Kesimpulan semacam itu justru terlalu sederhana dan tidak adil terhadap berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh banyak pihak. Persoalannya terletak pada kenyataan bahwa sebagian besar reformasi berfokus pada bagaimana sistem bekerja, sementara pertanyaan mengenai apakah desain sistem itu sendiri sudah tepat sering kali tidak memperoleh perhatian yang sama. Perbaikan dilakukan pada tingkat operasional, sedangkan persoalan yang muncul mungkin berasal dari lapisan yang lebih mendasar. Akibatnya, berbagai perubahan mampu memperbaiki gejala tetapi belum sepenuhnya mengubah pola yang terus memproduksi gejala tersebut.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, Pancasila dipahami sebagai *kernel* yang menjadi sumber nilai dasar negara. Konstitusi berfungsi sebagai *firmware* yang mengatur cara kerja negara. Rakyat merupakan *root owner* yang menjadi pemilik sah kedaulatan. MPR bertindak sebagai *root administrator* yang menerima mandat untuk menjaga agar seluruh

sistem tetap bekerja sesuai kehendak rakyat. Ketika berbagai gejala kerusakan terus muncul secara berulang, perhatian tidak dapat berhenti pada lapisan operasional semata. Perhatian harus bergerak menuju hubungan antara lapisan-lapisan tersebut. Apakah *firmware* yang digunakan masih mampu menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam *kernel* secara tepat? Apakah jalur yang menghubungkan *root owner* dengan penyelenggaraan negara masih bekerja sebagaimana mestinya? Apakah distribusi kewenangan yang ada benar-benar mendukung prinsip kedaulatan rakyat atau justru menciptakan jarak yang semakin besar antara rakyat dan negara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena sejarah menunjukkan bahwa tidak semua sistem dapat dipulihkan melalui perbaikan bertahap. Ada kondisi tertentu di mana sistem perlu diperiksa kembali pada tingkat desain. Dalam dunia arsitektur, seorang insinyur yang menemukan masalah pada fondasi bangunan tidak akan menyarankan pemilik bangunan untuk terus mengecat dinding yang retak. Dalam dunia teknologi, seorang teknisi yang menemukan kesalahan pada *firmware* tidak akan menghabiskan seluruh energinya untuk memperbarui aplikasi. Diagnosis yang benar selalu mengarahkan perhatian kepada sumber persoalan yang sebenarnya. Dan ketika sumber persoalan berada pada desain, solusi yang dibutuhkan juga harus menyentuh desain tersebut.

Di sinilah gagasan mengenai *reinstall sistem negara* mulai memperoleh relevansinya. Istilah *reinstall* sering kali menimbulkan kesalahpahaman karena dianggap

identik dengan penghancuran sistem yang ada. Padahal dalam dunia teknologi, *reinstall* justru dilakukan untuk mengembalikan sistem kepada kondisi yang lebih sehat dan lebih stabil. Tujuannya bukan menghancurkan perangkat. Tujuannya bukan menghapus identitas pengguna. Tujuannya adalah memperbaiki cara kerja sistem agar kembali mampu menjalankan fungsi yang menjadi alasan keberadaannya. Dengan logika yang sama, pembahasan mengenai *reinstall sistem negara* bukanlah pembahasan mengenai pembubaran negara, melainkan pembahasan mengenai bagaimana negara dapat kembali bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa.

Kesadaran ini penting karena banyak bangsa terjebak dalam dua kutub yang sama-sama bermasalah. Di satu sisi terdapat kelompok yang percaya bahwa seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Di sisi lain terdapat kelompok yang menganggap bahwa seluruh sistem harus dihancurkan dan diganti dari awal. Kedua pendekatan tersebut sering gagal memahami bahwa terdapat pilihan ketiga yang lebih rasional, yaitu memeriksa desain secara jujur, mempertahankan bagian yang masih sehat, memperbaiki bagian yang bermasalah, dan mengembalikan keseluruhan sistem kepada tujuan yang menjadi alasan pembentukannya.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, tujuan tersebut sangat jelas. Negara harus bekerja untuk rakyat karena rakyat adalah pemilik sah kedaulatan. Seluruh institusi negara harus berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan perlindungan, keadilan,

kesejahteraan, dan kemajuan bangsa. Ketika berbagai audit yang telah dilakukan dalam *recovery mode* menunjukkan adanya jarak antara tujuan tersebut dan cara kerja sistem yang ada, maka perbaikan tidak boleh berhenti pada tingkat permukaan. Keberanian untuk melihat kemungkinan adanya persoalan pada tingkat desain menjadi syarat penting bagi lahirnya pemulihan yang sesungguhnya.

Karena itu, bab ini dimulai dengan satu kesimpulan yang sederhana namun mendasar. Jika kerusakan berada pada lapisan operasional, tambal sulam mungkin cukup. Jika kerusakan berada pada perilaku individu, pergantian aktor mungkin cukup. Namun jika kerusakan berada pada cara sistem dirancang, maka perbaikan harus bergerak menuju desain itu sendiri. Dan ketika sebuah bangsa sampai pada kesimpulan tersebut, pembahasan tidak lagi berkisar pada bagaimana memperbaiki gejala yang ada, melainkan bagaimana merancang kembali sistem negara agar benar-benar selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi utama keberadaan negara itu sendiri.

18.2. Reinstall Bukan Menghancurkan Negara

Salah satu hambatan terbesar dalam setiap pembahasan mengenai perubahan mendasar dalam sistem negara adalah munculnya kekhawatiran bahwa perubahan tersebut identik dengan penghancuran negara itu sendiri. Ketika gagasan mengenai amandemen konstitusi, redesain ketatanegaraan, atau penataan ulang distribusi kekuasaan mulai dibicarakan,

tidak sedikit pihak yang langsung membayangkan kekacauan pemerintahan, instabilitas nasional, atau bahkan ancaman terhadap keberlangsungan negara. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami karena sejarah dunia memang mencatat banyak perubahan yang berlangsung melalui konflik, revolusi, dan pertarungan kekuasaan yang merusak. Namun menyamakan seluruh proses perubahan sistem dengan penghancuran negara merupakan kesalahan cara berpikir yang dapat menghalangi bangsa menemukan solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapinya.

Dalam dunia teknologi terdapat perbedaan yang sangat jelas antara menghancurkan perangkat dan melakukan *reinstall* terhadap sistem yang ada di dalam perangkat tersebut. Ketika sebuah komputer mengalami gangguan yang berasal dari sistem operasi atau konfigurasi inti, seorang teknisi tidak serta-merta membuang perangkat tersebut ke tempat sampah. Perangkat keras tetap digunakan. Data penting tetap diselamatkan. Identitas pengguna tetap dipertahankan. Yang diperbaiki adalah sistem yang mengatur bagaimana perangkat tersebut bekerja. Tujuan dari *reinstall* bukan menghancurkan perangkat, melainkan mengembalikan kemampuan perangkat untuk menjalankan fungsi yang seharusnya dapat dijalankan sejak awal.

Analogi tersebut sangat penting untuk memahami pembahasan dalam bab ini. Ketika Sekolah Negarawan berbicara mengenai *reinstall sistem negara*, yang dimaksud bukanlah mengganti Indonesia dengan negara lain, bukan pula membangun negara baru di atas

puing-puing negara lama. Yang menjadi objek pembahasan adalah desain sistem yang mengatur bagaimana negara bekerja. Indonesia tetap Indonesia. Rakyat Indonesia tetap menjadi pemilik negara. Wilayah negara tetap sama. Pancasila tetap menjadi dasar negara. Tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 tetap menjadi arah perjalanan bangsa. Yang dipertanyakan adalah apakah sistem yang digunakan saat ini benar-benar merupakan cara terbaik untuk menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam praktik penyelenggaraan negara.

Kesalahan berpikir yang sering muncul adalah menganggap bahwa setiap kritik terhadap desain negara merupakan kritik terhadap negara itu sendiri. Cara berpikir seperti ini mirip dengan seseorang yang menganggap bahwa memperbaiki denah rumah berarti membenci rumah tersebut. Padahal justru sebaliknya. Keinginan memperbaiki denah lahir karena adanya keinginan agar rumah dapat berfungsi lebih baik bagi penghuninya. Ketika seorang arsitek menemukan bahwa jalur evakuasi tidak aman, tata ruang tidak efisien, atau distribusi beban bangunan tidak ideal, rekomendasi perbaikan tidak berarti kebencian terhadap bangunan tersebut. Rekomendasi tersebut lahir dari kepedulian terhadap keselamatan dan keberlangsungan bangunan dalam jangka panjang.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Kritik terhadap desain ketatanegaraan tidak identik dengan penolakan terhadap negara. Justru dalam banyak kasus, kritik semacam itu lahir dari

keinginan untuk memastikan bahwa negara dapat bekerja lebih baik dalam melayani rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Sebuah bangsa yang matang secara pemerintahan tidak takut mengevaluasi sistem yang digunakannya. Sebaliknya, bangsa yang matang memahami bahwa setiap sistem merupakan hasil karya manusia yang selalu dapat diperbaiki apabila ditemukan kelemahan dalam praktiknya.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, Pancasila dipahami sebagai *kernel*, yaitu sumber nilai yang menjadi identitas dasar bangsa. Nilai-nilai tersebut tidak berubah hanya karena desain ketatanegaraan dievaluasi. Persatuan Indonesia tetap menjadi tujuan. Keadilan sosial tetap menjadi tujuan. Musyawarah tetap menjadi tujuan. Kemanusiaan yang adil dan beradab tetap menjadi tujuan. Ketuhanan Yang Maha Esa tetap menjadi landasan moral bangsa. Dengan kata lain, *kernel* tetap dipertahankan. Yang sedang diperiksa adalah *firmware* yang bertugas menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam struktur operasional negara.

Dalam dunia teknologi, memperbarui atau bahkan memasang ulang *firmware* tidak mengubah identitas perangkat. Sebuah telepon pintar tetap menjadi telepon pintar yang sama setelah sistemnya diperbaiki. Sebuah komputer tetap menjadi komputer yang sama setelah sistem operasinya diperbarui. Pengguna yang sama tetap menjadi pemiliknya. Yang berubah hanyalah cara perangkat tersebut bekerja agar lebih sesuai dengan tujuan penggunaan yang diinginkan. Demikian pula dalam kehidupan bernegara. Ketika bangsa melakukan

evaluasi terhadap konstitusi, distribusi kewenangan, atau struktur ketatanegaraan, yang sedang diperiksa adalah mekanisme kerja negara, bukan identitas bangsa.

Perspektif ini menjadi semakin penting karena sejarah Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini telah beberapa kali melakukan perubahan konstitusional tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Indonesia tetap berdiri sebagai negara yang sama meskipun mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan, struktur kelembagaan, maupun mekanismenya. Yang berubah adalah cara negara menjalankan dirinya, bukan keberadaan bangsa Indonesia itu sendiri. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kemampuan melakukan perubahan merupakan bagian dari proses hidup sebuah bangsa, bukan ancaman terhadap eksistensinya.

Dalam konteks *recovery mode* yang telah dibahas pada bab sebelumnya, hasil audit menunjukkan bahwa sejumlah persoalan tidak lagi dapat dijelaskan hanya melalui kesalahan individu atau kelemahan operasional. Sebagian persoalan tampak berkaitan dengan desain hubungan antara rakyat dan negara, dengan distribusi kekuasaan, dan dengan jalur yang menghubungkan kedaulatan rakyat dengan pengambilan keputusan negara. Jika diagnosis menunjukkan bahwa sumber persoalan berada pada lapisan tersebut, maka logika yang sehat mengharuskan perhatian diarahkan kepada desain yang melahirkan persoalan tersebut. Menolak memeriksa desain hanya karena takut dianggap mengubah negara sama saja dengan menolak memperbaiki fondasi rumah karena khawatir rumah tersebut akan kehilangan identitasnya.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, tujuan dari *reinstall sistem negara* sangat sederhana. Tujuannya adalah mengembalikan keselarasan antara rakyat sebagai *root owner*, MPR sebagai *root administrator*, konstitusi sebagai *firmware*, dan Pancasila sebagai *kernel* negara. Selama hubungan tersebut berjalan harmonis, negara memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut mengalami distorsi, maka berbagai gejala kerusakan akan terus muncul meskipun berbagai perbaikan parsial dilakukan secara berulang.

Karena itu, pembahasan mengenai *reinstall sistem negara* harus dipahami sebagai pembahasan mengenai pemulihan, bukan penghancuran. Pemulihan selalu berangkat dari keyakinan bahwa sesuatu yang berharga perlu diselamatkan. Yang ingin diselamatkan dalam konteks ini bukan sekadar institusi atau prosedur, melainkan cita-cita besar yang menjadi alasan berdirinya negara Indonesia. Justru karena cita-cita tersebut dianggap penting, maka bangsa perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan benar-benar mampu mewujudkannya.

Pada akhirnya, *reinstall* bukan tindakan untuk meninggalkan Indonesia. *Reinstall* adalah upaya mengembalikan Indonesia kepada tujuan yang sejak awal ingin dicapai. Bukan mengganti pemilik negara, melainkan memastikan bahwa rakyat tetap menjadi *root owner*. Bukan mengganti identitas bangsa, melainkan memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi *kernel* yang hidup dalam operasional negara. Bukan

menghancurkan sistem, melainkan memperbaiki cara sistem bekerja agar negara kembali menjadi instrumen yang efektif bagi rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Dari pemahaman inilah pembahasan mengenai langkah-langkah pemulihan berikutnya harus dimulai.

18.3. Kembali kepada *Root Owner*



Seluruh pembahasan mengenai *reinstall sistem negara* pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan yang sangat mendasar kepada siapa negara ini sesungguhnya dimiliki. Pertanyaan tersebut tampak sederhana karena jawabannya telah lama dikenal oleh setiap warga negara. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kalimat itu tertulis dalam konstitusi, diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan, dan diulang dalam berbagai pidato kenegaraan. Namun

pengalaman sejarah menunjukkan bahwa mengetahui sebuah prinsip tidak selalu berarti berhasil menerapkannya. Banyak bangsa mengakui kedaulatan rakyat sebagai dasar negara, tetapi dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan justru memperlihatkan jarak yang semakin besar antara rakyat sebagai pemilik negara dan negara sebagai instrumen yang seharusnya bekerja untuk rakyat. Karena itulah setiap proses pemulihan sistem negara harus dimulai dengan mengembalikan perhatian kepada pemilik sah negara, yaitu rakyat itu sendiri.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, rakyat ditempatkan sebagai *root owner*. Istilah tersebut dipilih bukan sekadar sebagai metafora teknis, melainkan untuk menjelaskan posisi rakyat dalam struktur negara secara lebih jelas. Dalam sebuah sistem digital, *root owner* adalah pemilik tertinggi yang menjadi sumber seluruh legitimasi penggunaan sistem. Administrator memperoleh kewenangan karena pemilik memberikannya. Operator memperoleh hak akses karena pemilik mengizinkannya. Program-program yang berjalan di dalam sistem hanya dapat beroperasi karena berada dalam lingkungan yang dimiliki oleh pemilik sistem. Dengan kata lain, seluruh aktivitas pada akhirnya memperoleh legitimasi dari keberadaan *root owner*. Tanpa pemilik, seluruh struktur pengelolaan kehilangan dasar keberadaannya.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Negara tidak melahirkan rakyat. Justru rakyatlah yang melahirkan negara. Negara tidak menciptakan kedaulatan rakyat. Sebaliknya, kedaulatan

rakyatlah yang melahirkan kewenangan negara. Oleh karena itu, seluruh institusi negara pada dasarnya merupakan instrumen yang dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat sebagai pemilik sah negara. Pemerintah, parlemen, lembaga peradilan, birokrasi, aparat keamanan, dan seluruh organ negara lainnya memperoleh legitimasi karena adanya rakyat yang memberikan mandat kepada mereka. Ketika prinsip ini dipahami secara utuh, cara pandang terhadap negara mengalami perubahan yang sangat mendasar. Negara tidak lagi dipandang sebagai entitas yang berdiri di atas rakyat, melainkan sebagai instrumen yang dibentuk oleh rakyat untuk mencapai tujuan bersama.

Namun seiring perjalanan waktu, hubungan tersebut sering mengalami distorsi. Sebagaimana telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, salah satu gejala yang paling sering muncul dalam sistem yang mengalami penyimpangan adalah semakin kaburnya posisi pemilik sistem. Perhatian publik lebih banyak diarahkan kepada siapa yang sedang memegang kekuasaan daripada kepada siapa yang memiliki kekuasaan tersebut. Diskusi kekuasaan lebih banyak membahas pergantian pengelola daripada kedudukan pemilik. Akibatnya, negara perlahan dipersepsikan sebagai sesuatu yang terpisah dari rakyat. Dalam keadaan seperti itu, rakyat tidak lagi melihat dirinya sebagai pemilik negara, melainkan sebagai pihak yang sekadar menerima dampak dari berbagai keputusan yang dibuat oleh negara.

Padahal perbedaan antara pemilik dan penerima dampak memiliki konsekuensi yang sangat besar.

Seorang pemilik memiliki hak untuk menentukan arah. Seorang pemilik memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Seorang pemilik memiliki hak untuk memperbaiki sistem yang dimilikinya ketika sistem tersebut tidak lagi bekerja sesuai tujuan. Sebaliknya, pihak yang hanya menjadi penerima dampak cenderung berada dalam posisi pasif. Pilihan yang tersedia hanya menerima, menyesuaikan diri, atau mengeluh terhadap keadaan yang terjadi. Ketika rakyat kehilangan kesadaran sebagai pemilik negara, hubungan antara negara dan rakyat berubah secara fundamental. Negara tetap berjalan, tetapi sumber legitimasi yang seharusnya menjadi fondasinya mulai kehilangan makna substantif.

Karena itu, proses *reinstall sistem negara* tidak dapat dimulai dari lembaga, prosedur, atau jabatan. Proses tersebut harus dimulai dari pemulihan kesadaran mengenai siapa pemilik negara. Sebelum berbicara mengenai amandemen konstitusi, distribusi kekuasaan, referendum, atau desain kelembagaan, bangsa perlu terlebih dahulu menegaskan kembali bahwa pusat dari seluruh sistem negara adalah rakyat. Bukan partai politik. Bukan pemerintah. Bukan parlemen. Bukan birokrasi. Bukan pula kelompok ekonomi tertentu. Seluruh institusi tersebut memiliki fungsi yang penting, tetapi tidak satu pun berada pada posisi pemilik negara. Posisi tersebut hanya dimiliki oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, pemulihan posisi rakyat sebagai *root owner* bukan sekadar persoalan simbolik. Pemulihan tersebut harus tercermin

dalam desain negara. Sebuah sistem yang mengakui rakyat sebagai pemilik negara harus menyediakan jalur yang jelas agar kehendak rakyat dapat memengaruhi arah negara. Sebuah sistem yang mengakui rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus memiliki mekanisme yang memungkinkan rakyat mengoreksi negara ketika terjadi penyimpangan. Sebuah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemilik harus memastikan bahwa seluruh penggunaan kekuasaan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Di sinilah hubungan antara rakyat dan MPR sebagai *root administrator* menjadi sangat penting. Dalam desain yang dibangun dalam buku ini, MPR tidak dipahami sebagai lembaga yang berdiri di atas rakyat. MPR adalah penerima mandat rakyat. Fungsi utama MPR adalah menjaga agar jalur antara *root owner* dan keseluruhan sistem negara tetap terhubung. Sebagaimana administrator dalam sebuah sistem digital bertugas mengelola sistem sesuai kepentingan pemiliknya, MPR bertugas memastikan bahwa negara tetap bergerak sesuai dengan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, kekuatan MPR tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan berasal dari mandat yang diberikan oleh rakyat sebagai pemilik negara.

Kembali kepada *root owner* juga berarti mengubah cara memandang berbagai persoalan nasional. Ketika rakyat dipahami sebagai pemilik negara, maka keberhasilan negara bukanlah keberhasilan pemerintah semata, melainkan keberhasilan seluruh pemilik negara. Sebaliknya, ketika negara mengalami

penyimpangan, persoalan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada para pengelola negara. Pemilik juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang dimilikinya tetap berjalan sesuai tujuan. Kesadaran ini menciptakan hubungan yang lebih dewasa antara rakyat dan negara. Rakyat tidak lagi hanya menjadi penonton yang mengamati jalannya negara dari kejauhan, melainkan menjadi pemilik yang aktif menjaga arah sistem yang menjadi miliknya.

Dalam dunia teknologi, tidak ada proses pemulihan sistem yang berhasil tanpa mengembalikan kendali kepada pemilik yang sah. Selama akses tertinggi masih berada di tangan pihak lain, setiap perbaikan hanya akan bersifat sementara. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Selama rakyat belum kembali menempati posisi sebagai pusat dari seluruh desain negara, berbagai perubahan yang dilakukan berisiko hanya menjadi penyesuaian teknis yang tidak menyentuh akar persoalan. Pemulihan yang sesungguhnya harus dimulai dengan mengembalikan negara kepada pemiliknya.

Pada akhirnya, *reinstall sistem negara* bukan pertama-tama tentang perubahan konstitusi, perubahan lembaga, atau perubahan prosedur. Langkah pertama yang paling mendasar adalah mengembalikan kesadaran bahwa negara ini dimiliki oleh rakyat. Dari kesadaran tersebut lahir seluruh konsekuensi lainnya. Jalur kedaulatan harus diperjelas. Distribusi kekuasaan harus diselaraskan. Struktur negara harus dirancang agar melayani pemiliknya. Ketika rakyat kembali

ditempatkan sebagai *root owner*, negara tidak lagi dipahami sebagai kekuatan yang berdiri di hadapan rakyat, melainkan sebagai instrumen yang bekerja atas nama, untuk kepentingan, dan di bawah kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah negara. Dari titik inilah proses pemulihan yang lebih mendalam dapat benar-benar dimulai.

18.4. *Recovery Root Access*

Dalam setiap proses *reinstall sistem*, terdapat satu langkah yang tidak dapat dilewati, yaitu memulihkan kembali akses tertinggi kepada pemilik yang sah. Sebaik apa pun perbaikan yang dilakukan, secanggih apa pun sistem yang dibangun, seluruh upaya tersebut akan kehilangan makna apabila hak kendali tertinggi tetap tidak berada di tangan pemiliknya. Dalam dunia teknologi, kondisi semacam ini sering ditemukan pada perangkat yang telah mengalami gangguan serius. Sistem masih dapat dijalankan, berbagai fungsi masih bekerja, tetapi pemilik tidak lagi memiliki akses penuh terhadap konfigurasi inti. Sebagian pengaturan penting tidak dapat diubah. Sejumlah keputusan sistem tidak dapat dikendalikan. Hak akses tertinggi berada di tempat lain. Dalam situasi seperti itu, langkah pertama sebelum melakukan pemulihan adalah mengembalikan kembali *root access* kepada pemilik yang sah.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Seluruh pembahasan mengenai kedaulatan rakyat pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pengakuan formal bahwa rakyat adalah pemilik negara. Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah rakyat

memiliki akses nyata untuk menggunakan kedaulatan tersebut. Kepemilikan tanpa akses pada hakikatnya adalah kepemilikan yang tidak sempurna. Seorang pemilik rumah yang tidak memiliki kunci rumahnya sendiri sulit disebut memiliki kendali atas rumah tersebut. Seorang pemilik perusahaan yang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah perusahaan akan kehilangan fungsi kepemilikannya. Demikian pula rakyat. Jika rakyat diakui sebagai pemegang kedaulatan tetapi tidak memiliki jalur yang memadai untuk menggunakan kedaulatan tersebut, maka posisi rakyat sebagai pemilik negara menjadi lebih bersifat simbolis daripada substantif.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, rakyat ditempatkan sebagai *root owner*. Posisi tersebut menegaskan bahwa seluruh legitimasi negara berasal dari rakyat. Namun kepemilikan tidak hanya membutuhkan legitimasi. Kepemilikan juga membutuhkan akses. Karena itulah pembahasan mengenai *recovery root access* menjadi sangat penting. Tujuan utamanya bukan sekadar mengingatkan bahwa rakyat adalah pemilik negara, melainkan memastikan bahwa rakyat memiliki instrumen yang memungkinkan kedaulatan tersebut benar-benar bekerja dalam praktik ketatanegaraan.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam negara modern adalah semakin lebarnya jarak antara rakyat dan keputusan-keputusan fundamental yang menentukan arah negara. Dalam banyak situasi, rakyat hanya terlibat pada tahap awal melalui proses pemilihan umum. Setelah itu, berbagai keputusan

strategis bergerak melalui lapisan-lapisan kelembagaan yang semakin jauh dari jangkauan rakyat. Sebagian mekanisme tersebut memang diperlukan karena negara modern tidak mungkin dikelola melalui partisipasi langsung terhadap seluruh keputusan operasional. Namun persoalannya muncul ketika hampir seluruh keputusan penting berpindah ke ruang yang tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan pemilik kedaulatan. Pada titik tersebut, rakyat masih disebut sebagai pemegang kedaulatan, tetapi jalur untuk menggunakan kedaulatan tersebut menjadi semakin sempit.

Dalam dunia teknologi, kondisi seperti ini menyerupai sebuah sistem yang masih mencatat seseorang sebagai pemilik utama, tetapi sebagian besar fungsi administrasi telah dikunci oleh akun lain. Pemilik tetap ada, tetapi tidak dapat melakukan perubahan mendasar terhadap sistem. Pemilik masih dapat menggunakan perangkat, tetapi tidak dapat menentukan arah perkembangannya. Keadaan semacam itu akan dianggap sebagai masalah serius karena bertentangan dengan prinsip dasar kepemilikan. Pemilik yang sesungguhnya harus memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang bersifat fundamental terhadap sistem yang dimilikinya.

Dalam konteks negara, keputusan fundamental tersebut berkaitan dengan hal-hal yang menentukan arah jangka panjang kehidupan bangsa. Perubahan konstitusi, perubahan desain ketatanegaraan, pengalihan sebagian kedaulatan kepada organisasi

supranasional, pemekaran atau penyatuan wilayah tertentu, serta berbagai keputusan lain yang menyentuh fondasi negara merupakan contoh keputusan yang secara langsung berkaitan dengan kepemilikan negara. Dalam perspektif Sekolah Negarawan, keputusan-keputusan semacam ini tidak cukup hanya diputuskan oleh pengelola sistem. Pemilik negara harus memiliki ruang untuk memberikan persetujuan atau penolakannya secara langsung.

Di sinilah gagasan mengenai referendum memperoleh relevansinya. Referendum bukan dipandang sebagai instrumen pemerintahan yang digunakan setiap saat, melainkan sebagai mekanisme pemulihan *root access* ketika negara menghadapi keputusan yang menyangkut fondasi kedaulatan rakyat. Dalam analogi sistem digital, referendum dapat dipahami sebagai proses verifikasi langsung kepada pemilik sebelum perubahan besar dilakukan terhadap konfigurasi inti sistem. Administrator dapat mengusulkan perubahan. Ahli dapat memberikan rekomendasi. Lembaga negara dapat menyusun rancangan. Namun keputusan final terhadap perubahan yang menyangkut hakikat sistem tetap memerlukan persetujuan dari pemiliknya.

Pendekatan ini bukan lahir dari ketidakpercayaan terhadap lembaga negara. Justru sebaliknya. Pendekatan ini lahir dari penghormatan terhadap prinsip bahwa legitimasi tertinggi berasal dari rakyat. Dalam sebuah sistem yang sehat, administrator tidak takut meminta persetujuan kepada pemilik. Administrator yang baik memahami bahwa mandat

yang dimiliki berasal dari pemilik sistem. Karena itu, ketika perubahan yang akan dilakukan menyentuh fondasi sistem, keterlibatan pemilik bukanlah ancaman, melainkan bagian dari proses yang sehat.

Konsep *recovery root access* juga memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar referendum. Pemulihan akses tertinggi berarti memastikan bahwa seluruh desain negara memungkinkan rakyat mengoreksi arah negara ketika terjadi penyimpangan. Pemilik yang sesungguhnya selalu memiliki mekanisme untuk mengembalikan sistem kepada tujuan awalnya. Jika negara bergerak menjauh dari kepentingan rakyat, harus tersedia jalur yang memungkinkan rakyat memulihkan arah tersebut. Jika institusi negara kehilangan hubungan dengan sumber kedaulatannya, harus tersedia mekanisme yang dapat menghubungkan kembali keduanya. Jika desain ketatanegaraan menghasilkan distorsi terhadap prinsip kedaulatan rakyat, rakyat harus memiliki kemampuan untuk memperbaiki desain tersebut melalui mekanisme yang konstitusional dan tertib.

Dalam kerangka inilah posisi MPR sebagai *root administrator* memperoleh makna yang semakin jelas. MPR tidak mengambil alih hak rakyat sebagai pemilik negara. Sebaliknya, MPR bertugas menjaga agar hak tersebut tidak pernah hilang. MPR menjadi jembatan yang menghubungkan kehendak rakyat dengan keseluruhan sistem negara. Ketika jalur tersebut terjaga, rakyat tidak perlu hadir dalam setiap keputusan operasional. Namun ketika menyangkut keputusan yang menentukan arah dasar negara, hubungan antara

root owner dan *root administrator* harus kembali bekerja secara langsung dan nyata.

Pada akhirnya, *recovery root access* bukan sekadar persoalan teknis ketatanegaraan. Pembahasan ini menyentuh inti dari gagasan kedaulatan rakyat itu sendiri. Kedaulatan bukan hanya tentang siapa yang disebut sebagai pemilik negara. Kedaulatan juga tentang kemampuan pemilik untuk menggunakan hak kepemilikannya. Selama rakyat hanya diakui sebagai pemegang kedaulatan dalam teks konstitusi tetapi tidak memiliki jalur yang memadai untuk menggunakan kedaulatan tersebut, pemulihan negara belum selesai. Karena itu, langkah penting dalam *reinstall sistem negara* adalah memastikan bahwa akses tertinggi kembali berada di tangan rakyat sebagai *root owner*. Ketika akses tersebut pulih, negara tidak hanya mengakui rakyat sebagai pemilik secara formal, tetapi juga menempatkan rakyat sebagai sumber keputusan tertinggi dalam setiap persoalan yang menyangkut masa depan dan kedaulatan bangsa.

18.5. MPR sebagai *Root Administrator*

Setelah rakyat kembali ditegaskan sebagai *root owner* dan jalur *root access* dipulihkan, pertanyaan berikutnya yang harus dijawab dalam proses *reinstall sistem negara* adalah siapa yang bertanggung jawab menjaga sistem tersebut atas nama pemiliknya. Dalam setiap sistem yang kompleks, kepemilikan dan pengelolaan tidak selalu berada pada pihak yang sama. Pemilik memiliki hak tertinggi, tetapi tidak selalu menjalankan seluruh fungsi operasional sehari-hari.

Karena itu diperlukan mekanisme yang memungkinkan sistem tetap berjalan tanpa menghilangkan kedudukan pemilik sebagai sumber legitimasi tertinggi. Dalam glosarium yang digunakan dalam buku ini, fungsi tersebut dijalankan oleh *root administrator*. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, posisi itu ditempatkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai mandataris rakyat.

Pemahaman ini menjadi sangat penting karena selama bertahun-tahun perdebatan mengenai ketatanegaraan sering kali terfokus pada siapa yang memegang kekuasaan operasional, sementara pembahasan mengenai siapa yang menjaga kedaulatan rakyat sebagai pemilik negara justru menjadi semakin kabur. Presiden diperdebatkan. Pemerintah diperdebatkan. Partai politik diperdebatkan. Lembaga negara diperdebatkan. Namun pertanyaan mengenai siapa yang bertugas menjaga agar seluruh sistem tetap setia kepada pemiliknya sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai. Padahal dalam setiap sistem yang sehat, fungsi penjagaan terhadap hak pemilik merupakan salah satu fungsi yang paling penting.

Dalam dunia teknologi, *root administrator* bukan pemilik sistem. Posisi tersebut juga bukan pengguna biasa. *Root administrator* adalah pihak yang memperoleh mandat untuk mengelola konfigurasi inti sistem sesuai dengan kepentingan pemiliknya. Hak akses yang dimiliki jauh lebih besar dibanding operator biasa karena tugas yang dijalankan juga jauh lebih besar. Namun seluruh kewenangan tersebut tidak berasal dari dirinya sendiri. Seluruh kewenangan tersebut berasal

dari pemilik sistem yang memberikan mandat untuk menjaga agar sistem tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, administrator yang baik selalu bekerja berdasarkan kepentingan pemilik, bukan berdasarkan kepentingannya sendiri.

Prinsip yang sama menjadi dasar pemikiran mengenai kedudukan MPR dalam desain ketatanegaraan yang dibangun oleh Sekolah Negarawan. MPR tidak diposisikan sebagai pemilik negara. Pemilik negara tetap rakyat sebagai *root owner*. MPR juga tidak diposisikan sebagai penguasa tertinggi yang berada di atas seluruh lembaga negara. MPR diposisikan sebagai mandataris rakyat yang menerima mandat untuk menjaga hubungan antara rakyat dan negara agar tidak pernah terputus. Dengan kata lain, fungsi utama MPR bukan menjalankan pemerintahan sehari-hari, melainkan memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan negara tetap bergerak dalam koridor kedaulatan rakyat.

Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami. Dalam praktik ketatanegaraan modern sering muncul kecenderungan untuk menyamakan kekuasaan dengan kedaulatan. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan menjalankan fungsi tertentu dalam negara. Kedaulatan berkaitan dengan sumber legitimasi yang menjadi dasar seluruh penggunaan kekuasaan tersebut. Pemerintah memiliki kekuasaan menjalankan pemerintahan. Parlemen memiliki kekuasaan legislasi. Lembaga peradilan memiliki kekuasaan mengadili. Namun sumber legitimasi dari seluruh kekuasaan tersebut tetap berada

pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Karena itulah diperlukan sebuah institusi yang secara khusus bertugas menjaga agar jalur antara sumber legitimasi dan penggunaan kekuasaan tidak pernah terputus.

Dalam perspektif ini, MPR berfungsi sebagai simpul utama dalam arsitektur negara. Sebagaimana *root administrator* dalam sebuah sistem digital menjaga agar konfigurasi inti tetap sesuai dengan kehendak pemilik sistem, MPR menjaga agar struktur negara tetap selaras dengan kedaulatan rakyat. Ketika muncul kebutuhan untuk meninjau ulang desain konstitusional, MPR menjadi forum yang menghubungkan kehendak rakyat dengan perubahan yang akan dilakukan. Ketika terjadi penyimpangan yang mengancam prinsip kedaulatan rakyat, MPR menjadi institusi yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan koreksi. Ketika negara menghadapi keputusan-keputusan yang menyangkut fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, MPR menjadi penjaga agar seluruh proses tetap bergerak dalam kerangka mandat rakyat.

Posisi tersebut berbeda secara mendasar dengan fungsi pemerintah. Pemerintah menjalankan operasional negara. Pemerintah membuat kebijakan, mengelola birokrasi, menyusun program pembangunan, dan menjalankan fungsi eksekutif lainnya. Karena fokus pemerintah berada pada operasional, pemerintah tidak dapat sekaligus menjadi penjaga utama kedaulatan rakyat. Dalam dunia teknologi, operator yang menjalankan sistem sehari-hari tidak dapat sekaligus menjadi pihak yang mengawasi seluruh konfigurasi sistem tanpa mekanisme

pengendalian yang memadai. Pemisahan fungsi inilah yang menciptakan keseimbangan dan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Hal yang sama juga berlaku terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Setiap lembaga memiliki fungsi tertentu yang penting bagi keberlangsungan negara. Namun tidak semua lembaga dirancang untuk menjaga hubungan antara rakyat dan sistem negara secara keseluruhan. Karena itulah konsep *root administrator* menjadi penting. Sebuah sistem membutuhkan pihak yang secara khusus bertugas menjaga integritas hubungan antara pemilik dan sistem yang dimilikinya. Dalam desain Sekolah Negarawan, fungsi tersebut tidak diberikan kepada pemerintah, tidak diberikan kepada partai politik, dan tidak diberikan kepada kelompok kepentingan tertentu, melainkan kepada MPR sebagai mandataris rakyat.

Konsep ini juga membantu menjelaskan mengapa kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti pada mekanisme pemilihan umum semata. Pemilihan umum merupakan salah satu cara rakyat memberikan mandat. Namun setelah mandat diberikan, harus ada institusi yang memastikan bahwa mandat tersebut tetap menjadi dasar penyelenggaraan negara. Tanpa mekanisme penjagaan semacam itu, hubungan antara rakyat dan negara berisiko melemah seiring berjalannya waktu. Kedaulatan rakyat tetap diakui secara formal, tetapi kehilangan instrumen yang menjaga keberlangsungannya secara substantif.

Dalam kerangka *reinstall sistem negara*, penguatan posisi MPR sebagai *root administrator* bukan

dimaksudkan untuk menghidupkan kembali konsep supremasi lembaga tertentu atas lembaga lainnya. Tujuannya adalah menciptakan kejelasan mengenai arsitektur kedaulatan. Rakyat sebagai *root owner* berada pada posisi tertinggi sebagai sumber legitimasi. MPR menerima mandat untuk menjaga sistem atas nama rakyat. Pemerintah menjalankan fungsi operasional negara. Lembaga-lembaga lainnya menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan desain yang jelas, setiap institusi memahami batas dan sumber kewenangannya sehingga keseluruhan sistem dapat bekerja secara lebih harmonis.

Pada akhirnya, pembahasan mengenai MPR sebagai *root administrator* bukan sekadar pembahasan kelembagaan. Pembahasan ini menyentuh inti dari bagaimana sebuah negara menjaga hubungan antara pemilik dan pengelola. Negara yang sehat bukan hanya negara yang memiliki pemerintahan yang efektif, tetapi juga negara yang memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh kekuasaan tetap berasal dari dan kembali kepada rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Dalam perspektif itulah MPR memperoleh peran strategis sebagai penjaga jalur kedaulatan rakyat. Bukan sebagai pemilik negara, bukan sebagai penguasa tertinggi, melainkan sebagai mandataris yang memastikan bahwa negara tidak pernah terlepas dari pemilik sahnya, yaitu rakyat Indonesia.

18.6. Redesign Arsitektur Ketatanegaraan

Setelah rakyat kembali ditegaskan sebagai *root owner*, setelah *root access* dipulihkan, dan setelah posisi MPR sebagai *root administrator* ditempatkan kembali

pada fungsi yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, langkah berikutnya dalam proses *reinstall sistem negara* adalah melakukan *redesign* terhadap arsitektur ketatanegaraan. Pada titik ini, pembahasan tidak lagi berfokus pada gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan bernegara, melainkan bergerak menuju pertanyaan yang lebih mendasar yaitu bagaimana sistem negara seharusnya dirancang agar mampu menerjemahkan kedaulatan rakyat ke dalam praktik penyelenggaraan negara secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam dunia arsitektur, sebuah bangunan tidak pernah dinilai hanya dari keindahan bagian luarnya. Bangunan yang baik adalah bangunan yang memiliki hubungan yang selaras antara tujuan, fungsi, struktur, dan aliran aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Sebuah rumah sakit dirancang berbeda dengan sekolah. Sebuah bandara dirancang berbeda dengan gedung perkantoran. Perbedaan tersebut bukan muncul karena selera arsitek, melainkan karena setiap bangunan memiliki tujuan yang berbeda. Kesalahan paling mendasar dalam perancangan bangunan terjadi ketika fungsi yang ingin dicapai tidak sesuai dengan struktur yang dibangun. Dalam kondisi seperti itu, masalah akan terus muncul meskipun penghuni bangunan berganti berkali-kali.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Negara pada dasarnya adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks Indonesia, tujuan tersebut telah dirumuskan secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut kemudian memperoleh landasan nilai melalui Pancasila sebagai *kernel* negara. Karena itu, desain ketatanegaraan yang baik seharusnya dibangun untuk memastikan bahwa seluruh energi negara bergerak menuju tujuan tersebut.

Namun sebagaimana telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, persoalan sering muncul ketika struktur negara berkembang dengan cara yang tidak selalu selaras dengan prinsip dasar yang ingin diwujudkan. Sebagian hubungan kelembagaan menjadi terlalu kompleks. Sebagian jalur kedaulatan menjadi terlalu panjang. Sebagian distribusi kewenangan menciptakan jarak yang semakin besar antara rakyat dan pusat pengambilan keputusan. Dalam kondisi seperti itu, negara tetap berjalan, tetapi arah pergerakannya menjadi semakin sulit dikendalikan oleh rakyat sebagai pemilik sah negara. Inilah alasan mengapa *redesign arsitektur ketatanegaraan* menjadi bagian penting dari proses pemulihan.

Dalam glosarium yang digunakan dalam buku ini, konstitusi dipahami sebagai *firmware* yang mengatur cara kerja negara. Sebagaimana *firmware* menentukan bagaimana seluruh komponen perangkat bekerja secara terintegrasi, konstitusi menentukan bagaimana rakyat, MPR, pemerintah, lembaga legislatif, lembaga

yudikatif, serta seluruh organ negara lainnya saling berhubungan. Ketika hasil yang dihasilkan oleh sistem tidak lagi sejalan dengan tujuan yang diharapkan, perhatian tidak boleh hanya diarahkan kepada individu yang mengisi jabatan tertentu. Perhatian juga harus diarahkan kepada rancangan hubungan yang menghubungkan seluruh komponen tersebut.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, salah satu prinsip utama dalam *redesign* adalah memperjelas kembali jalur kedaulatan. Sebuah sistem yang sehat harus memiliki alur legitimasi yang sederhana, logis, dan mudah diaudit. Rakyat sebagai *root owner* menjadi sumber seluruh kedaulatan. MPR sebagai *root administrator* menerima mandat untuk menjaga sistem atas nama rakyat. Pemerintah menjalankan fungsi operasional negara berdasarkan mandat yang berasal dari jalur tersebut. Lembaga-lembaga lainnya menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, peradilan, dan fungsi-fungsi konstitusional lainnya sesuai dengan batas kewenangan yang ditentukan. Dengan desain seperti ini, setiap penggunaan kekuasaan dapat ditelusuri kembali kepada sumber legitimasi yang sama, yaitu rakyat.

Redesign juga menuntut adanya pemisahan yang lebih tegas antara kepemilikan negara dan pengelolaan negara. Selama ini, salah satu sumber kebingungan dalam kehidupan bernegara adalah kecenderungan menyamakan pemerintah dengan negara. Ketika pemerintah dipandang sebagai negara, kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai kritik terhadap negara. Ketika pemerintah diposisikan sebagai representasi

tunggal negara, rakyat secara perlahan bergeser dari posisi pemilik menjadi sekadar pihak yang diperintah. Padahal dalam desain yang sehat, pemerintah hanyalah operator yang menjalankan fungsi tertentu di dalam sistem negara. Negara tetap milik rakyat. Kedaulatan tetap berada pada rakyat. Pemerintah memperoleh kewenangan karena adanya mandat yang berasal dari rakyat melalui sistem ketatanegaraan yang telah disepakati.

Selain memperjelas jalur kedaulatan, *redesign arsitektur ketatanegaraan* juga bertujuan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara efektivitas pemerintahan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Sebuah sistem yang terlalu lemah akan kesulitan menjalankan fungsi negara. Sebaliknya, sistem yang terlalu terkonsentrasi berisiko menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu, arsitektur negara harus dirancang sedemikian rupa sehingga kekuasaan cukup kuat untuk bekerja, tetapi tetap memiliki mekanisme yang memungkinkan koreksi dilakukan ketika terjadi penyimpangan. Dalam dunia teknologi, prinsip ini mirip dengan desain sistem yang memungkinkan administrator menjalankan fungsi pengelolaan secara efektif tanpa menghilangkan kemampuan pemilik untuk melakukan audit dan koreksi.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam *redesign* adalah menciptakan hubungan yang lebih jelas antara tujuan negara dan struktur negara. Terlalu sering perdebatan ketatanegaraan terjebak pada pembahasan mengenai lembaga, jabatan, dan kewenangan tanpa terlebih dahulu bertanya apakah seluruh struktur

tersebut benar-benar membantu pencapaian tujuan negara. Padahal sebuah struktur hanya memiliki nilai sejauh mampu mendukung tujuan yang hendak dicapai. Jika sebuah mekanisme menciptakan hambatan terhadap kedaulatan rakyat, maka mekanisme tersebut layak dievaluasi. Jika sebuah hubungan kelembagaan menghasilkan ketidakseimbangan yang terus-menerus, maka hubungan tersebut layak diperbaiki. Fokus utama harus selalu kembali kepada tujuan, bukan kepada keberlangsungan struktur itu sendiri.

Dalam konteks inilah *redesign* tidak boleh dipahami sebagai kegiatan teknis yang hanya dilakukan oleh para ahli hukum tata negara. *Redesign* adalah proses pemerintahan dan konstitusional yang melibatkan seluruh bangsa dalam menentukan bagaimana negara seharusnya bekerja. Karena yang sedang dirancang bukan sekadar hubungan antar lembaga, melainkan hubungan antara rakyat sebagai pemilik negara dengan negara sebagai instrumen kedaulatan rakyat. Setiap keputusan mengenai desain ketatanegaraan pada akhirnya akan menentukan bagaimana generasi mendatang mengalami kehidupan bernegara.

Pada akhirnya, *redesign arsitektur ketatanegaraan* merupakan konsekuensi logis dari seluruh proses *recovery mode* yang telah dilakukan. Setelah sumber gangguan diidentifikasi, setelah jalur akses diaudit, setelah kedaulatan diperiksa, dan setelah posisi rakyat sebagai *root owner* dipulihkan, bangsa tidak dapat berhenti pada tahap diagnosis. Diagnosis harus diterjemahkan menjadi rancangan yang lebih baik.

Sebab tujuan dari *reinstall sistem negara* bukan sekadar memahami apa yang salah, melainkan membangun sistem yang lebih selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan arsitektur yang dirancang secara tepat, negara tidak lagi menjadi struktur yang bergerak menjauh dari pemiliknya, melainkan menjadi instrumen yang bekerja secara konsisten untuk mewujudkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

18.7. *Constitutional Reinstall* melalui Amandemen

Ketika sebuah sistem telah melalui proses diagnosis yang menyeluruh, ketika sumber gangguan telah diidentifikasi, ketika jalur akses telah diaudit, dan ketika hubungan antara pemilik sistem dengan pengelola sistem telah diperjelas, maka muncul pertanyaan yang tidak dapat dihindari yaitu bagaimana perubahan tersebut diwujudkan dalam struktur yang nyata. Dalam konteks negara, pertanyaan ini membawa pembahasan kepada salah satu instrumen paling penting dalam kehidupan ketatanegaraan, yaitu amandemen konstitusi. Namun sebelum membahas amandemen lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa amandemen bukan tujuan akhir. Amandemen hanyalah sarana untuk memastikan bahwa desain negara tetap selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa.

Dalam berbagai diskusi pemerintahan, amandemen sering diperlakukan seolah-olah merupakan sesuatu yang berbahaya. Sebagian orang memandang perubahan konstitusi sebagai ancaman

terhadap stabilitas negara. Sebagian lainnya menganggap konstitusi sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh karena dianggap telah selesai dan sempurna. Cara pandang seperti ini dapat dipahami dari sudut keinginan menjaga stabilitas, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan ketika berubah menjadi keyakinan bahwa konstitusi tidak boleh dievaluasi sama sekali. Padahal sejarah hampir seluruh bangsa modern menunjukkan bahwa konstitusi selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman dan pengalaman yang diperoleh dari praktik penyelenggaraan negara.

Dalam glosarium yang digunakan dalam buku ini, konstitusi dipahami sebagai *firmware* negara. Analogi ini sangat penting karena membantu membedakan antara nilai dasar negara dan instrumen yang digunakan untuk menjalankan nilai tersebut. Pancasila merupakan *kernel* yang menjadi sumber nilai dasar bangsa. Nilai tersebut menjadi fondasi yang memberikan arah bagi seluruh kehidupan bernegara. Konstitusi bertugas menerjemahkan nilai tersebut ke dalam desain operasional yang memungkinkan negara bekerja secara nyata. Dengan kata lain, *kernel* menjawab pertanyaan mengenai tujuan, sedangkan *firmware* menjawab pertanyaan mengenai cara mencapai tujuan tersebut.

Dalam dunia teknologi, tidak ada perangkat yang mampu bertahan lama tanpa kemungkinan pembaruan terhadap *firmware*. Ketika ditemukan kelemahan, kesalahan konfigurasi, celah keamanan, atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan baru, pembaruan dilakukan agar perangkat dapat bekerja lebih baik.

Pembaruan tersebut tidak dianggap sebagai ancaman terhadap perangkat. Justru sebaliknya, pembaruan dilakukan untuk menjaga agar perangkat tetap relevan dengan tujuan penggunaannya. Tidak ada pengguna yang menganggap pembaruan *firmware* sebagai tindakan menghancurkan perangkat. Yang terjadi justru penguatan terhadap kemampuan perangkat menjalankan fungsi yang diharapkan.

Prinsip yang sama seharusnya berlaku dalam kehidupan bernegara. Amandemen konstitusi bukan tindakan yang otomatis mengancam negara. Amandemen juga bukan bentuk pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa. Amandemen adalah mekanisme yang memungkinkan sebuah bangsa memperbaiki desain ketatanegaraannya ketika pengalaman menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dan struktur yang digunakan untuk mencapainya. Dengan demikian, ukuran keberhasilan sebuah konstitusi bukan terletak pada seberapa jarang diubah, melainkan pada seberapa efektif konstitusi tersebut menjaga agar negara tetap bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh rakyat.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, kebutuhan terhadap *constitutional reinstall* muncul ketika berbagai hasil audit menunjukkan bahwa sebagian persoalan tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui perubahan kebijakan atau pergantian pejabat. Jika sumber persoalan berada pada distribusi kewenangan, hubungan antar lembaga negara, jalur kedaulatan rakyat, atau struktur yang menghubungkan rakyat

dengan penyelenggaraan negara, maka perubahan harus menyentuh lapisan yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Karena konstitusi berfungsi sebagai *firmware* negara, maka perubahan pada lapisan tersebut hanya dapat dilakukan melalui mekanisme amandemen yang sah dan konstitusional.

Yang perlu digarisbawahi, *constitutional reinstall* tidak berarti menghapus seluruh konstitusi yang ada dan menggantinya tanpa dasar yang jelas. Sebagaimana seorang teknisi tidak membuang seluruh sistem hanya karena menemukan beberapa bagian yang bermasalah, proses amandemen juga harus dilakukan berdasarkan diagnosis yang akurat. Bagian yang masih sehat dipertahankan. Bagian yang masih relevan diperkuat. Bagian yang terbukti menghasilkan ketidaksesuaian diperbaiki. Tujuan akhirnya bukan menciptakan konstitusi yang baru demi kebaruan itu sendiri, melainkan menciptakan konstitusi yang lebih mampu menerjemahkan prinsip kedaulatan rakyat ke dalam praktik ketatanegaraan.

Dalam kerangka ini, salah satu fokus utama amandemen adalah memastikan bahwa rakyat sebagai *root owner* benar-benar menjadi sumber utama legitimasi negara. Seluruh jalur kewenangan harus dapat ditelusuri kembali kepada rakyat. MPR sebagai *root administrator* harus memiliki kedudukan yang memungkinkan fungsi penjagaan terhadap kedaulatan rakyat dijalankan secara efektif. Pemerintah harus memperoleh kewenangan yang cukup untuk menjalankan negara, tetapi tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh pemilik kedaulatan. Lembaga-

lembaga negara lainnya harus dirancang untuk memperkuat keseimbangan sistem, bukan menciptakan kompetisi kewenangan yang menjauhkan negara dari tujuan utamanya.

Amandemen juga harus dipahami sebagai bagian dari proses pembelajaran bangsa. Tidak ada desain yang lahir dalam ruang hampa. Setiap konstitusi merupakan hasil dari pengalaman sejarah tertentu. Para pendiri bangsa merumuskan konstitusi berdasarkan tantangan yang dihadapi pada masanya. Generasi berikutnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga semangat yang sama sambil berani mengevaluasi apakah instrumen yang digunakan masih mampu menjawab tantangan zaman. Kesetiaan terhadap cita-cita para pendiri bangsa tidak selalu diwujudkan dengan mempertahankan setiap detail desain yang ada, tetapi dengan memastikan bahwa tujuan yang mereka perjuangkan tetap dapat diwujudkan secara efektif.

Karena itu, amandemen harus diposisikan sebagai instrumen pemulihan, bukan instrumen perebutan kekuasaan. Ketika amandemen dipahami hanya sebagai alat untuk mengubah konfigurasi kekuasaan jangka pendek, proses tersebut akan kehilangan legitimasi moralnya. Sebaliknya, ketika amandemen dipahami sebagai upaya memperkuat hubungan antara rakyat dan negara, memperjelas jalur kedaulatan, serta memperbaiki desain yang terbukti menghasilkan persoalan sistemik, maka amandemen menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keberlangsungan negara dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, *constitutional reinstall* melalui amandemen merupakan konsekuensi logis dari seluruh proses *recovery mode* yang telah dibahas sebelumnya. Setelah bangsa memahami sumber persoalan, setelah jalur kedaulatan diperiksa, dan setelah posisi rakyat sebagai *root owner* ditegaskan kembali, maka desain yang mengatur cara kerja negara harus diselaraskan dengan temuan-temuan tersebut. Sebab tidak ada sistem yang dapat menghasilkan keluaran yang berbeda apabila tetap menggunakan rancangan yang sama. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah negara yang benar-benar bekerja berdasarkan kedaulatan rakyat, maka *firmware* yang mengatur negara juga harus dirancang untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya hidup dalam deklarasi konstitusional, tetapi benar-benar menjadi fondasi operasional seluruh kehidupan bernegara. Dari sinilah amandemen memperoleh maknanya yang paling mendasar, bukan sebagai perubahan teks semata, melainkan sebagai proses mengembalikan konstitusi kepada fungsi utamanya sebagai instrumen bagi rakyat untuk mengelola negara yang menjadi miliknya.

18.8. Referendum sebagai Verifikasi Pemilik Sistem

Setelah pembahasan mengenai rakyat sebagai *root owner*, pemulihan *root access*, penguatan MPR sebagai *root administrator*, serta kebutuhan melakukan *constitutional reinstall* melalui amandemen, muncul satu pertanyaan yang sangat penting. Siapa yang berhak memberikan persetujuan akhir terhadap perubahan-perubahan yang menyangkut fondasi negara?

Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya dengan melihat siapa yang memiliki kewenangan prosedural. Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan kembali kepada prinsip dasar yang menjadi fondasi seluruh buku ini, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika rakyat adalah pemilik negara, maka perubahan yang menyangkut desain dasar negara pada akhirnya harus memperoleh legitimasi langsung dari rakyat sebagai pemilik sah negara.

Dalam dunia teknologi, terdapat prinsip yang sangat sederhana tetapi sangat penting. Ketika sebuah perubahan menyentuh konfigurasi inti sistem, administrator tidak dapat bertindak seolah-olah menjadi pemilik sistem. Administrator dapat melakukan analisis, menyusun rekomendasi, merancang perbaikan, dan menyiapkan berbagai alternatif solusi. Namun ketika perubahan tersebut menyangkut hakikat sistem yang dimiliki oleh pengguna, persetujuan akhir tetap harus berasal dari pemiliknya. Semakin besar dampak perubahan yang akan dilakukan, semakin penting proses verifikasi kepada pemilik sistem. Tujuannya bukan memperlambat proses perubahan, melainkan memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar memperoleh legitimasi dari pihak yang paling berhak menentukan arah sistem.

Prinsip tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan bernegara. Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, rakyat ditempatkan sebagai *root owner*. Posisi tersebut menegaskan bahwa rakyat bukan sekadar sumber

legitimasi yang digunakan pada saat pemilihan umum, melainkan pemilik sah negara yang menjadi sumber seluruh kedaulatan. Jika negara hendak melakukan perubahan yang menyangkut desain ketatanegaraan, distribusi kekuasaan, struktur konstitusional, atau keputusan-keputusan fundamental lain yang akan memengaruhi kehidupan bangsa dalam jangka panjang, maka logika kedaulatan rakyat mengharuskan adanya mekanisme yang memungkinkan rakyat memberikan persetujuan secara langsung.

Di sinilah referendum memperoleh maknanya. Referendum bukan sekadar instrumen kekuasaan. Referendum bukan pula sekadar mekanisme pemungutan suara dalam skala besar. Dalam perspektif Sekolah Negarawan, referendum merupakan bentuk verifikasi langsung kepada pemilik negara. Referendum menjadi sarana untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang menyangkut fondasi negara benar-benar memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki negara tersebut. Dengan demikian, referendum bukan pesaing sistem perwakilan, melainkan pelengkap yang digunakan ketika keputusan yang diambil telah menyentuh hakikat kepemilikan negara itu sendiri.

Pemahaman ini penting karena sering muncul anggapan bahwa referendum bertentangan dengan sistem perwakilan. Padahal kedua mekanisme tersebut bekerja pada tingkatan yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, rakyat tidak mungkin terlibat langsung dalam seluruh keputusan operasional negara. Karena itulah dibentuk berbagai lembaga perwakilan dan

pemerintahan. Pemerintah menjalankan fungsi eksekutif. Lembaga legislatif menjalankan fungsi legislasi. Berbagai institusi negara bekerja sesuai kewenangannya masing-masing. Sistem tersebut diperlukan agar negara dapat beroperasi secara efektif. Namun ketika pembahasan bergerak kepada persoalan yang menyangkut kepemilikan dan arah dasar negara, mekanisme perwakilan tidak selalu cukup. Pada titik itulah referendum menjadi relevan sebagai bentuk keterlibatan langsung dari pemilik negara.

Dalam analogi sistem digital, administrator dapat melakukan berbagai pembaruan rutin tanpa perlu meminta persetujuan setiap saat kepada pemilik sistem. Namun ketika perubahan menyentuh konfigurasi inti yang akan mengubah cara sistem bekerja secara mendasar, administrator akan meminta konfirmasi kepada pemilik. Semakin besar konsekuensi perubahan tersebut, semakin penting persetujuan dari pemilik. Dengan logika yang sama, referendum tidak digunakan untuk seluruh persoalan pemerintahan, tetapi digunakan untuk keputusan-keputusan yang menyangkut struktur dasar negara, jalur kedaulatan, dan masa depan bangsa dalam jangka panjang.

Dalam konteks *reinstall sistem negara*, referendum memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar alat legitimasi kekuasaan. Referendum berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan kembali rakyat dengan negara pada tingkat yang paling fundamental. Setelah berbagai proses diagnosis dilakukan dan setelah berbagai rancangan perubahan disusun, referendum menjadi ruang di mana rakyat

menggunakan haknya sebagai *root owner* untuk menentukan apakah perubahan tersebut layak diterima atau tidak. Dengan demikian, hasil akhir tidak hanya memperoleh legitimasi hukum dan pemerintahan, tetapi juga memperoleh legitimasi kedaulatan.

Perspektif ini juga membantu menjawab salah satu persoalan yang sering muncul dalam negara modern, yaitu jarak antara rakyat dan keputusan strategis negara. Dalam banyak kasus, masyarakat merasakan bahwa keputusan-keputusan besar yang memengaruhi kehidupan bangsa sering kali diambil jauh dari ruang partisipasi rakyat. Keadaan tersebut dapat menciptakan kesan bahwa negara bergerak berdasarkan logika institusinya sendiri tanpa hubungan yang cukup kuat dengan pemiliknya. Referendum berfungsi sebagai koreksi terhadap kecenderungan tersebut dengan membuka jalur langsung antara rakyat dan keputusan yang menentukan arah negara.

Dalam desain yang dibangun oleh Sekolah Negarawan, posisi MPR sebagai *root administrator* justru menjadi semakin penting ketika referendum digunakan. MPR tidak menggantikan rakyat dalam memberikan keputusan final terhadap persoalan yang menyangkut kedaulatan. Sebaliknya, MPR bertugas menyiapkan, mengelola, dan memastikan bahwa proses verifikasi kepada rakyat berlangsung secara tertib, konstitusional, dan transparan. Sebagaimana administrator sistem bertugas memfasilitasi komunikasi antara pemilik dan sistem yang dimilikinya, MPR bertugas memastikan bahwa kehendak rakyat

sebagai pemilik negara dapat diterjemahkan secara jelas ke dalam keputusan kenegaraan.

Yang perlu ditekankan, referendum bukan instrumen untuk menciptakan populisme atau keputusan emosional yang sesaat. Referendum harus ditempatkan dalam kerangka pendidikan politik yang matang, informasi yang terbuka, dan proses deliberasi yang sehat. Pemilik sistem yang baik mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi dari setiap pilihan. Karena itu, referendum harus didahului oleh proses penjelasan yang memadai agar rakyat dapat memberikan keputusan secara sadar dan bertanggung jawab. Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh suara terbanyak, melainkan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemilik negara.

Dalam jangka panjang, keberadaan referendum juga memiliki nilai pendidikan yang sangat penting. Referendum mengingatkan rakyat bahwa posisi sebagai pemegang kedaulatan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab. Rakyat tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pemilih yang hadir setiap beberapa tahun sekali, melainkan sebagai pemilik negara yang memiliki hak untuk menentukan arah masa depan bangsanya. Kesadaran semacam ini memperkuat hubungan antara rakyat dan negara karena kedaulatan tidak lagi dipahami sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai kewenangan nyata yang dapat digunakan ketika negara menghadapi keputusan-keputusan yang menentukan masa depannya.

Pada akhirnya, referendum sebagai verifikasi pemilik sistem merupakan konsekuensi logis dari seluruh konsep yang dibangun dalam buku ini. Jika rakyat adalah *root owner*, maka rakyat harus memiliki mekanisme untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan-perubahan yang menyangkut fondasi negara. Jika MPR adalah *root administrator*, maka MPR harus memastikan bahwa jalur tersebut tetap tersedia dan dapat digunakan secara konstitusional. Jika konstitusi adalah *firmware* negara, maka perubahan mendasar terhadap *firmware* tersebut harus memperoleh legitimasi langsung dari pemilik sistem. Dengan demikian, referendum bukan sekadar prosedur pemerintahan, melainkan perwujudan nyata dari prinsip bahwa negara ini pada akhirnya tetap milik rakyat, dan keputusan-keputusan yang menyangkut hakikat negara harus kembali kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

18.9. Negara sebagai Sistem yang Dapat Dipulihkan

Salah satu dampak paling berbahaya dari krisis yang berlangsung dalam waktu lama adalah munculnya keyakinan bahwa keadaan yang buruk merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah. Ketika masyarakat terlalu lama hidup di tengah berbagai persoalan yang berulang, perlahan muncul perasaan bahwa seluruh masalah tersebut merupakan bagian alami dari kehidupan bernegara. Ketika korupsi terus muncul dalam berbagai bentuk, sebagian orang mulai menganggap korupsi sebagai sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan. Ketika ketimpangan terus

berlangsung, sebagian masyarakat mulai percaya bahwa ketimpangan adalah takdir yang tidak dapat diubah. Ketika hubungan antara rakyat dan negara semakin jauh, banyak yang mulai menerima keadaan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Pada titik itulah sebuah bangsa menghadapi ancaman yang lebih besar daripada kerusakan sistem itu sendiri, yaitu hilangnya keyakinan bahwa sistem masih dapat diperbaiki.

Padahal sejarah manusia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna sejak hari pertama. Hampir tidak ada negara yang langsung menemukan bentuk idealnya tanpa melalui berbagai proses koreksi dan penyesuaian. Negara-negara yang hari ini sering dijadikan contoh keberhasilan juga pernah mengalami konflik pemerintahan, ketimpangan sosial, krisis legitimasi, bahkan kegagalan institusional. Perbedaan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya masalah, melainkan pada kemampuan sebuah bangsa untuk mengenali masalah tersebut dan melakukan perbaikan secara sadar. Dengan kata lain, kekuatan sebuah negara tidak ditentukan oleh kesempurnaan desain awalnya, tetapi oleh kemampuannya memperbaiki diri ketika menemukan kelemahan dalam sistem yang digunakan.

Dalam dunia teknologi, prinsip tersebut merupakan sesuatu yang sangat normal. Tidak ada perangkat lunak yang lahir tanpa kemungkinan kesalahan. Tidak ada sistem operasi yang sejak awal terbebas dari seluruh kelemahan. Tidak ada *firmware* yang langsung mampu menjawab seluruh kebutuhan masa depan. Karena itulah setiap sistem dirancang

dengan kemungkinan untuk diperbaiki, diperbarui, dan disempurnakan. Ketika ditemukan bug, dilakukan pembaruan. Ketika ditemukan celah keamanan, dilakukan perbaikan. Ketika ditemukan desain yang kurang efektif, dilakukan penyesuaian. Tidak ada seorang pun yang menyimpulkan bahwa sebuah perangkat harus dibuang hanya karena ditemukan kelemahan dalam sistemnya. Sebaliknya, kelemahan tersebut dipandang sebagai informasi yang diperlukan untuk membuat sistem menjadi lebih baik.

Perspektif yang sama perlu diterapkan dalam melihat negara. Seluruh pembahasan dalam buku ini, mulai dari konsep negara sebagai sistem, pembahasan mengenai *kernel*, *firmware*, *root owner*, *root administrator*, hingga proses *recovery mode* dan *reinstall sistem negara*, bukan dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang gagal. Kesimpulan semacam itu justru bertentangan dengan tujuan utama buku ini. Yang hendak ditunjukkan adalah bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bernegara bukanlah bukti bahwa bangsa ini tidak memiliki masa depan. Berbagai persoalan tersebut justru merupakan sinyal yang menunjukkan bagian mana dari sistem yang perlu diperiksa dan diperbaiki.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, Pancasila ditempatkan sebagai *kernel* negara. Posisi ini memiliki makna yang sangat penting karena menunjukkan bahwa fondasi nilai bangsa tetap berada pada tempatnya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial tetap menjadi arah dasar yang menjadi sumber legitimasi kehidupan

berbangsa dan bernegara. Ketika sebuah sistem masih memiliki *kernel* yang sehat, peluang untuk melakukan pemulihan selalu terbuka. Persoalan yang muncul mungkin berada pada lapisan *firmware*, mungkin berada pada distribusi akses, mungkin berada pada hubungan antar institusi, atau mungkin berada pada cara sistem dijalankan. Namun selama fondasi nilai tetap terjaga, bangsa masih memiliki titik acuan untuk melakukan koreksi terhadap arah perjalanannya.

Hal yang sama berlaku terhadap rakyat sebagai *root owner*. Salah satu temuan terpenting dalam proses *sovereignty audit* adalah bahwa sumber kedaulatan tetap berada pada rakyat. Mungkin jalur kedaulatan mengalami distorsi. Mungkin akses rakyat terhadap pengambilan keputusan belum sepenuhnya optimal. Mungkin hubungan antara rakyat dan negara membutuhkan perbaikan. Namun fakta bahwa rakyat tetap menjadi sumber legitimasi negara menunjukkan bahwa fondasi kepemilikan negara belum hilang. Selama pemilik sistem masih ada, proses pemulihan selalu memungkinkan untuk dilakukan.

Dalam perspektif ini, tantangan terbesar bukan terletak pada kerusakan sistem, melainkan pada hilangnya kesadaran bahwa sistem dapat dipulihkan. Ketika masyarakat mulai percaya bahwa tidak ada yang dapat diubah, seluruh energi bangsa akan habis untuk beradaptasi terhadap masalah, bukan menyelesaikannya. Ketika rakyat kehilangan keyakinan terhadap kemampuannya memperbaiki negara, maka berbagai mekanisme konstitusional yang tersedia menjadi kehilangan makna. Sebaliknya, ketika rakyat

memahami bahwa negara adalah hasil rancangan manusia yang dapat dievaluasi dan diperbaiki, ruang untuk melakukan perubahan secara damai dan konstitusional akan selalu terbuka.

Karena itu, pembahasan mengenai *reinstall sistem negara* tidak boleh dipahami sebagai ajakan untuk memulai dari nol. Bangsa ini tidak sedang membangun negara dari ketiadaan. Indonesia memiliki sejarah, memiliki pengalaman, memiliki institusi, memiliki konstitusi, dan memiliki fondasi nilai yang telah teruji dalam berbagai tantangan zaman. Seluruh aset tersebut merupakan modal yang sangat besar bagi proses pemulihan. Yang diperlukan bukan menghancurkan apa yang sudah ada, melainkan memahami bagian mana yang harus dipertahankan, bagian mana yang harus diperbaiki, dan bagian mana yang harus disesuaikan agar lebih selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam kerangka ini, posisi MPR sebagai *root administrator* juga memperoleh makna yang sangat strategis. Jika rakyat adalah pemilik negara dan Pancasila adalah fondasi nilai negara, maka MPR berfungsi sebagai penjaga jalur yang memungkinkan proses pemulihan dilakukan secara konstitusional. MPR menjadi ruang tempat bangsa dapat mengevaluasi desainnya sendiri, memperbaiki *firmware* yang tidak lagi efektif, dan memastikan bahwa seluruh perubahan tetap bergerak dalam koridor kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pemulihan tidak dilakukan melalui kekacauan, melainkan melalui mekanisme yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan negara.

Yang menarik, semakin dalam proses diagnosis dilakukan, semakin jelas bahwa banyak persoalan yang selama ini tampak mustahil ternyata sesungguhnya merupakan persoalan desain. Dan sebagaimana setiap desain dapat diperbaiki, persoalan tersebut juga dapat diperbaiki. Sistem yang dirancang manusia dapat dievaluasi oleh manusia. Struktur yang dibentuk manusia dapat disempurnakan oleh manusia. Kesalahan yang muncul dari rancangan tertentu dapat diperbaiki melalui rancangan yang lebih baik. Kesadaran inilah yang mengubah cara pandang terhadap masa depan negara. Fokus tidak lagi terjebak pada siapa yang salah di masa lalu, tetapi bergerak menuju bagaimana membangun sistem yang lebih baik untuk masa depan.

Pada akhirnya, salah satu pesan terpenting dari seluruh pembahasan dalam buku ini adalah bahwa Indonesia bukan negara yang rusak secara permanen. Indonesia adalah negara yang memiliki kemampuan untuk melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Pancasila sebagai *kernel* tetap menjadi fondasi yang kuat. Rakyat sebagai *root owner* tetap menjadi pemilik sah negara. Kedaulatan rakyat tetap menjadi sumber legitimasi tertinggi. Yang diperlukan adalah keberanian untuk melihat sistem secara jujur, kemauan untuk memperbaiki desain yang terbukti bermasalah, dan kedewasaan untuk melakukan perubahan melalui mekanisme yang konstitusional. Karena itu, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak masalah yang dimiliki hari ini, melainkan oleh seberapa besar kesediaan bangsa ini untuk memperbaiki sistem

yang dimilikinya. Selama kesediaan tersebut tetap ada, negara selalu dapat dipulihkan, dan selama negara dapat dipulihkan, harapan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya akan selalu tetap terbuka.

18.10. Menuju Negara yang Selaras dengan Kedaulatan Rakyat

Pada akhirnya, seluruh perjalanan yang dibahas dalam buku ini membawa bangsa kembali kepada satu pertanyaan yang sangat sederhana namun menentukan untuk siapa negara ini dibangun. Pertanyaan tersebut tampak mudah dijawab karena hampir seluruh warga negara akan mengatakan bahwa negara dibangun untuk rakyat. Namun perjalanan panjang sejarah menunjukkan bahwa menjawab pertanyaan tersebut secara teoritis jauh lebih mudah dibanding memastikan bahwa seluruh desain negara benar-benar bekerja sesuai dengan jawaban tersebut. Di sinilah letak pentingnya seluruh pembahasan mengenai negara sebagai sistem, tentang *kernel*, *firmware*, *root owner*, *root administrator*, *recovery mode*, hingga *reinstall sistem negara*. Seluruh konsep tersebut pada dasarnya tidak sedang berbicara mengenai teknologi, melainkan tentang bagaimana sebuah bangsa memastikan bahwa negara tetap menjadi alat bagi rakyat, bukan rakyat yang menjadi alat bagi negara.

Sejak awal buku ini dijelaskan bahwa persoalan terbesar yang sering dihadapi sebuah bangsa bukanlah kekurangan sumber daya, kekurangan regulasi, atau kekurangan institusi. Persoalan terbesar sering kali

terletak pada ketidaksesuaian antara tujuan dan desain. Sebuah sistem dapat memiliki niat yang baik tetapi menghasilkan dampak yang berbeda karena rancangan yang digunakan tidak sepenuhnya mendukung tujuan yang ingin dicapai. Sebuah negara dapat memiliki cita-cita yang luhur tetapi terus menghasilkan berbagai persoalan apabila struktur yang menopangnya mengarahkan energi bangsa ke arah yang berbeda. Karena itu, ketika berbagai gejala kerusakan muncul secara berulang, perhatian tidak cukup diarahkan kepada pelaksana sistem. Perhatian juga harus diarahkan kepada desain yang membentuk perilaku sistem tersebut.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, Pancasila ditempatkan sebagai *kernel* negara. Posisi tersebut menegaskan bahwa sumber nilai bangsa tidak berada pada individu, partai politik, pemerintahan, ataupun lembaga tertentu. Nilai dasar bangsa berada pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama sebagai fondasi kehidupan bernegara. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial bukan sekadar slogan yang ditempelkan pada dinding ruang sidang. Nilai-nilai tersebut merupakan sumber arah yang seharusnya menjadi referensi utama dalam setiap perancangan sistem negara. Ketika sistem negara bergerak menjauh dari nilai tersebut, bangsa memiliki alasan untuk melakukan evaluasi. Ketika sistem negara semakin mendekat kepada nilai tersebut, bangsa memiliki alasan untuk mempertahankannya.

Di atas fondasi nilai tersebut berdiri rakyat sebagai *root owner*. Konsep ini menjadi inti dari seluruh gagasan

Sekolah Negarawan. Rakyat bukan objek negara. Rakyat bukan sumber suara yang hanya dibutuhkan pada saat pemilihan umum. Rakyat bukan sekadar penerima manfaat dari kebijakan negara. Rakyat adalah pemilik sah negara. Seluruh legitimasi negara berasal dari rakyat. Seluruh kewenangan negara memperoleh dasar keberadaannya dari rakyat. Negara ada karena rakyat membentuknya, bukan sebaliknya. Karena itu, setiap pembahasan mengenai masa depan negara harus selalu dimulai dengan memastikan bahwa posisi rakyat sebagai pemilik tetap menjadi pusat dari keseluruhan desain ketatanegaraan.

Dari posisi tersebut lahir kebutuhan akan *root administrator*, yaitu institusi yang menerima mandat untuk menjaga agar negara tetap bekerja sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam kerangka yang dibangun dalam buku ini, fungsi tersebut dijalankan oleh MPR sebagai mandataris rakyat. MPR tidak diposisikan sebagai pemilik negara dan tidak pula diposisikan sebagai penguasa yang berdiri di atas rakyat. MPR berfungsi sebagai penjaga jalur kedaulatan yang memastikan bahwa hubungan antara rakyat dan negara tetap terpelihara. Ketika rakyat adalah sumber legitimasi, maka harus ada mekanisme yang menjaga agar sumber legitimasi tersebut tidak pernah terputus dari penyelenggaraan negara.

Seluruh pembahasan mengenai *recovery mode* memperlihatkan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bernegara sering kali berakar pada melemahnya hubungan antara rakyat dan negara. Jalur kedaulatan menjadi semakin panjang. Distribusi

kewenangan menjadi semakin sulit dipahami. Pengaruh terhadap kebijakan semakin tidak mudah ditelusuri. Pada saat yang sama, rakyat tetap disebut sebagai pemegang kedaulatan. Keadaan seperti ini menciptakan paradoks yang berbahaya. Kedaulatan rakyat hidup dalam teks, tetapi tidak selalu terasa dalam operasional negara. Karena itulah proses audit, pemeriksaan konstitusional, dan evaluasi desain negara menjadi penting. Tujuannya bukan mencari kesalahan masa lalu, melainkan memastikan bahwa negara kembali bergerak menuju tujuan yang menjadi alasan keberadaannya.

Dari seluruh proses tersebut lahirlah gagasan mengenai *reinstall sistem negara*. Istilah ini dipilih karena menggambarkan proses pemulihan yang lebih mendalam daripada sekadar perbaikan operasional. Sebagaimana sebuah sistem digital memerlukan *reinstall* ketika kerusakan telah mencapai lapisan yang mengatur cara kerja keseluruhan sistem, negara juga memerlukan penataan ulang ketika persoalan yang dihadapi tidak lagi bersifat parsial. Namun *reinstall* tidak pernah dimaksudkan sebagai penghancuran. Indonesia tetap Indonesia. Pancasila tetap menjadi dasar negara. Rakyat tetap menjadi pemilik negara. Yang diperbaiki adalah desain yang menghubungkan seluruh elemen tersebut agar bekerja secara lebih selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam perspektif ini, amandemen konstitusi, penguatan posisi MPR sebagai *root administrator*, serta penggunaan referendum sebagai verifikasi langsung kepada pemilik negara bukanlah tujuan akhir. Seluruh instrumen tersebut hanyalah sarana untuk mencapai

tujuan yang lebih besar, yaitu membangun negara yang benar-benar selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Negara yang sehat bukan negara yang memiliki lembaga paling banyak. Negara yang sehat bukan negara yang memiliki regulasi paling tebal. Negara yang sehat adalah negara yang mampu menjaga agar setiap penggunaan kekuasaan tetap dapat ditelusuri kembali kepada rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi.

Yang menarik, ketika seluruh pembahasan ini dirangkum ke dalam satu kesimpulan besar, ternyata inti persoalannya bukan terletak pada teknologi, hukum, pemerintahan, ataupun kelembagaan. Inti persoalannya terletak pada hubungan antara pemilik dan sistem yang dimilikinya. Sebuah sistem akan bekerja dengan baik ketika dirancang untuk melayani pemiliknya. Sebuah sistem akan mengalami penyimpangan ketika mulai bergerak untuk kepentingannya sendiri. Prinsip yang berlaku dalam dunia teknologi tersebut ternyata memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan bernegara. Negara yang sehat adalah negara yang tidak pernah melupakan siapa pemiliknya.

Karena itu, masa depan Indonesia tidak ditentukan semata-mata oleh siapa yang memimpin, partai apa yang menang dalam pemilu, atau kebijakan apa yang sedang populer pada suatu masa. Masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh keberanian bangsa ini untuk memastikan bahwa desain negaranya benar-benar selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Selama rakyat tetap menjadi *root owner*, selama MPR

tetap menjalankan fungsi sebagai *root administrator*, selama konstitusi sebagai *firmware* terus diselaraskan dengan Pancasila sebagai *kernel*, dan selama negara tetap dipahami sebagai instrumen yang dibangun untuk melayani rakyat, maka peluang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan akan selalu terbuka.

Pada akhirnya, tujuan dari seluruh perjalanan intelektual dalam buku ini bukan sekadar mengkritik sistem yang ada, melainkan mengajak bangsa melihat bahwa selalu tersedia kemungkinan untuk memperbaiki sistem tersebut. Negara bukan sesuatu yang sakral sehingga tidak boleh dievaluasi. Negara juga bukan sesuatu yang rapuh sehingga akan runtuh hanya karena diperbaiki. Negara adalah alat bersama yang dibangun oleh rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Ketika alat tersebut tidak bekerja secara optimal, bangsa memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk memperbaikinya. Dan ketika perbaikan tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip bahwa rakyat adalah pemilik sah kedaulatan, maka perjalanan menuju negara yang selaras dengan kedaulatan rakyat bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan menjadi arah yang nyata bagi masa depan Indonesia.

BAB 19
FREE INDONESIA

19.1. Merdeka Belum Tentu Bebas

Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya kepada dunia. Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik paling penting dalam sejarah bangsa karena menandai berakhirnya penjajahan formal yang berlangsung selama berabad-abad. Kemerdekaan memberikan hak kepada bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, membentuk pemerintahannya sendiri, menyusun hukumnya sendiri, dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Tidak ada lagi kekuasaan asing yang secara resmi memiliki hak untuk memerintah di atas bangsa Indonesia. Secara pemerintahan, Indonesia telah menjadi negara yang merdeka.

Namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa kemerdekaan dan kebebasan bukanlah dua hal yang selalu identik. Sebuah bangsa dapat merdeka tetapi belum sepenuhnya bebas. Sebuah negara dapat memiliki bendera, lagu kebangsaan, wilayah, pemerintahan, dan konstitusi sendiri, tetapi tetap mengalami berbagai bentuk ketergantungan yang membatasi kemampuan rakyat untuk menentukan arah kehidupannya sendiri. Karena itulah pembahasan mengenai *Free Indonesia* harus dimulai dengan membedakan terlebih dahulu antara kemerdekaan dan kebebasan. Kemerdekaan adalah terbebasnya bangsa dari penguasaan langsung pihak lain. Kebebasan adalah

kemampuan bangsa untuk menjalankan kedaulatannya secara utuh sesuai dengan kehendak rakyatnya sendiri.

Perbedaan tersebut sangat penting karena sejarah dunia memperlihatkan banyak negara yang berhasil memperoleh kemerdekaan tetapi masih menghadapi berbagai bentuk ketergantungan baru. Bentuknya tidak selalu berupa penjajahan militer sebagaimana terjadi pada masa lalu. Ketergantungan dapat hadir melalui sistem ekonomi, melalui struktur pemerintahan, melalui pengaruh informasi, melalui desain kelembagaan, bahkan melalui cara berpikir yang secara perlahan membuat sebuah bangsa kehilangan kemampuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, kemerdekaan tetap ada secara formal, tetapi kebebasan menjadi sesuatu yang belum sepenuhnya terwujud.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap dunia luar. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan hubungan antara rakyat dan negara. Sebuah bangsa tidak dapat disebut benar-benar bebas apabila rakyat sebagai pemilik negara kehilangan kemampuan untuk mengarahkan negara yang menjadi miliknya. Sebuah negara tidak dapat disebut sepenuhnya merdeka apabila kedaulatan rakyat hanya hidup sebagai pernyataan normatif tetapi tidak menjadi kekuatan nyata yang membentuk arah penyelenggaraan negara. Karena itu, ukuran kebebasan tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya penjajahan asing, tetapi juga dari seberapa jauh rakyat mampu menjalankan haknya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sepanjang buku ini telah dijelaskan bahwa rakyat merupakan *root owner* dari negara. Seluruh legitimasi negara berasal dari rakyat. Seluruh kewenangan negara memperoleh dasar keberadaannya dari rakyat. Negara dibentuk untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Namun berbagai audit yang telah dibahas pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara rakyat dan negara tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Jalur kedaulatan dapat mengalami distorsi. Mekanisme pengambilan keputusan dapat menjauh dari pemiliknya. Struktur ketatanegaraan dapat berkembang sedemikian rupa sehingga rakyat tetap disebut sebagai pemegang kedaulatan tetapi memiliki keterbatasan dalam menggunakan kedaulatan tersebut secara nyata.

Dalam kondisi seperti itu, bangsa menghadapi sebuah paradoks. Indonesia merdeka sebagai negara, tetapi rakyat belum tentu sepenuhnya bebas sebagai pemilik negara. Kemerdekaan telah diperoleh melalui perjuangan yang panjang dan pengorbanan yang besar, tetapi perjuangan untuk memastikan bahwa negara benar-benar bekerja berdasarkan kedaulatan rakyat masih terus berlangsung. Karena itulah pembahasan mengenai *Free Indonesia* tidak dimulai dari pertanyaan tentang bagaimana merebut kemerdekaan, melainkan dari pertanyaan tentang bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut agar benar-benar menghasilkan kebebasan bagi rakyat sebagai pemilik sah negara.

Analogi yang digunakan dalam buku ini dapat membantu menjelaskan persoalan tersebut secara lebih sederhana. Bayangkan seseorang yang berhasil merebut

kembali rumahnya setelah lama dikuasai pihak lain. Rumah tersebut kini secara sah telah menjadi miliknya. Sertifikat kepemilikan berada di tangannya. Tidak ada lagi pihak luar yang menguasai rumah tersebut. Namun ketika masuk ke dalam rumah, ternyata seluruh tata ruang, sistem kelistrikan, jalur air, dan berbagai mekanisme di dalam rumah dirancang sedemikian rupa sehingga pemilik rumah kesulitan mengatur rumahnya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, kepemilikan memang telah kembali, tetapi kebebasan untuk mengelola rumah belum sepenuhnya terwujud. Pemilik masih harus melakukan berbagai perbaikan agar rumah benar-benar dapat berfungsi sesuai dengan kehendaknya.

Perspektif inilah yang menjadi dasar seluruh gagasan mengenai *recovery mode* dan *reinstall sistem negara*. Tujuannya bukan mempertanyakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah fakta sejarah yang tidak perlu diperdebatkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kemerdekaan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebebasan rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Jika rakyat adalah *root owner*, maka rakyat harus memiliki akses yang nyata terhadap kedaulatan tersebut. Jika MPR adalah *root administrator*, maka MPR harus mampu menjaga hubungan antara rakyat dan negara. Jika konstitusi adalah *firmware* negara, maka konstitusi harus dirancang untuk memastikan bahwa seluruh sistem bergerak sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemilik negara.

Pada titik ini, makna kebebasan menjadi jauh lebih dalam daripada sekadar tidak dijajah oleh bangsa lain. Kebebasan berarti kemampuan sebuah bangsa menentukan arah pemerintahannya sendiri. Kebebasan berarti kemampuan mengelola kekayaan nasional untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Kebebasan berarti kemampuan memperbaiki sistem yang tidak lagi sesuai dengan tujuan bangsa. Kebebasan berarti kemampuan menjalankan kedaulatan tanpa kehilangan kendali atas instrumen yang digunakan untuk menjalankan kedaulatan tersebut. Dengan kata lain, kebebasan adalah keadaan ketika rakyat benar-benar menjadi subjek dalam kehidupan bernegara, bukan sekadar objek dari berbagai proses pemerintahan yang berlangsung di sekitarnya.

Karena itu, *Free Indonesia* bukanlah slogan yang lahir dari ketidakpuasan terhadap kemerdekaan yang telah dicapai. Sebaliknya, *Free Indonesia* lahir dari penghormatan terhadap kemerdekaan itu sendiri. Justru karena kemerdekaan dianggap begitu berharga, maka bangsa ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemerdekaan tersebut menghasilkan kedaulatan rakyat yang nyata. Perjuangan generasi pendiri bangsa tidak berhenti pada pengibaran bendera merah putih. Perjuangan tersebut menemukan maknanya ketika rakyat benar-benar menjadi pemilik negara yang mampu menentukan arah perjalanan bangsanya sendiri.

Dengan demikian, bab ini dimulai dari sebuah kesadaran yang sederhana namun mendasar. Indonesia telah merdeka sebagai negara. Pertanyaan yang kini

harus dijawab adalah apakah rakyat Indonesia telah sepenuhnya bebas sebagai pemilik negara. Dari pertanyaan inilah seluruh manifesto *Free Indonesia* memperoleh relevansinya. Sebab tujuan akhirnya bukan sekadar mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh, melainkan memastikan bahwa kemerdekaan tersebut berkembang menjadi kedaulatan rakyat yang hidup, bekerja, dan menjadi kenyataan dalam seluruh desain kehidupan berbangsa dan bernegara.

19.2. *Free* Indonesia Bukan Anti Negara

Salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul ketika membicarakan perubahan sistemik dalam kehidupan bernegara adalah anggapan bahwa kritik terhadap desain negara identik dengan sikap anti negara. Ketika seseorang mempertanyakan efektivitas sistem pemerintahan, mengusulkan perubahan konstitusi, mengkritik struktur ketatanegaraan, atau mengajak bangsa mengevaluasi arah perjalanan negara, tidak jarang muncul tuduhan bahwa tindakan tersebut merupakan ancaman terhadap negara itu sendiri. Padahal dalam banyak kasus, yang sedang dipersoalkan bukanlah keberadaan negara, melainkan cara negara bekerja. Perbedaan antara keduanya sangat penting untuk dipahami karena kegagalan membedakan negara dengan sistem yang digunakan negara sering kali membuat bangsa kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri.

Sepanjang buku ini telah dijelaskan bahwa negara dan pemerintah bukanlah hal yang sama. Negara adalah rumah bersama yang dimiliki oleh seluruh

rakyat. Pemerintah adalah salah satu organ yang bertugas mengelola rumah tersebut untuk jangka waktu tertentu. Demikian pula negara dan sistem ketatanegaraan juga bukan hal yang identik. Negara merupakan wadah yang menaungi kehidupan bersama suatu bangsa, sedangkan sistem ketatanegaraan adalah rancangan yang digunakan untuk mengelola wadah tersebut. Ketika sebuah bangsa mengevaluasi sistem yang digunakan, yang sedang dilakukan bukanlah menyerang negara, melainkan memastikan bahwa negara dapat bekerja lebih baik bagi pemiliknya.

Dalam dunia teknologi, tidak ada seorang pun yang menganggap perbaikan sistem operasi sebagai tindakan membenci perangkat yang digunakan. Ketika sebuah perangkat mengalami gangguan, pengguna akan mencari penyebabnya, mengevaluasi konfigurasi yang digunakan, memperbaiki bagian yang bermasalah, dan bila perlu melakukan *reinstall* terhadap sistem yang ada. Seluruh tindakan tersebut dilakukan justru karena perangkat tersebut dianggap berharga dan ingin dipertahankan. Tidak ada teknisi yang membongkar sebuah sistem karena membenci perangkatnya. Pembongkaran dilakukan karena terdapat keinginan agar perangkat dapat bekerja lebih baik sesuai tujuan penggunaannya.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Gagasan *Free Indonesia* lahir bukan karena kebencian terhadap negara Indonesia. Sebaliknya, gagasan ini lahir karena keyakinan bahwa Indonesia terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan dengan desain yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip

kedaulatan rakyat. Kritik terhadap struktur bukan berarti penolakan terhadap negara. Evaluasi terhadap konstitusi bukan berarti penolakan terhadap bangsa. Usulan perbaikan sistem bukan berarti keinginan untuk menghancurkan Indonesia. Seluruh gagasan tersebut justru berangkat dari kecintaan terhadap Indonesia sebagai rumah bersama yang harus dijaga agar tetap mampu melayani rakyat sebagai pemilik sahnya.

Dalam glosarium yang digunakan dalam buku ini, rakyat dipahami sebagai *root owner*. Posisi tersebut menunjukkan bahwa negara pada hakikatnya adalah milik rakyat. Jika negara adalah milik rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk mengevaluasi cara negara bekerja. Rakyat memiliki hak untuk mempertanyakan apakah sistem yang digunakan masih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Rakyat memiliki hak untuk memperbaiki desain yang terbukti menghasilkan persoalan. Tidak ada satu prinsip pun dalam kedaulatan rakyat yang melarang rakyat untuk mengoreksi sistem yang menjadi miliknya sendiri. Justru kemampuan melakukan koreksi merupakan salah satu ciri utama dari kepemilikan yang sehat.

Kesalahpahaman sering muncul karena negara diperlakukan seolah-olah identik dengan seluruh institusi yang ada di dalamnya. Akibatnya, kritik terhadap satu bagian sistem dianggap sebagai kritik terhadap keseluruhan negara. Padahal dalam kenyataannya, sebuah negara dapat tetap berdiri meskipun sistem pemerintahannya berubah. Sebuah negara dapat tetap eksis meskipun struktur kelembagaannya diperbaiki. Sebuah negara bahkan

dapat melakukan amandemen konstitusi tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Sejarah Indonesia sendiri menunjukkan bahwa berbagai perubahan ketatanegaraan pernah dilakukan tanpa menghilangkan keberadaan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Karena itu, *Free Indonesia* tidak dapat dipahami sebagai gerakan anti negara. *Free Indonesia* justru berangkat dari keyakinan bahwa negara harus diselamatkan dari berbagai desain yang berpotensi menjauhkan negara dari pemiliknya. Ketika jalur kedaulatan menjadi kabur, yang perlu diperbaiki adalah jalurnya. Ketika distribusi kewenangan menghasilkan ketidakseimbangan, yang perlu diperbaiki adalah distribusinya. Ketika konstitusi sebagai *firmware* tidak lagi mampu menerjemahkan prinsip kedaulatan rakyat secara optimal, yang perlu diperbaiki adalah *firmware*-nya. Negara sebagai rumah bersama tetap dipertahankan. Yang dievaluasi adalah cara rumah tersebut dikelola.

Perspektif ini penting karena sepanjang sejarah, banyak bangsa mengalami stagnasi bukan karena kekurangan gagasan, melainkan karena ketakutan untuk mengevaluasi sistem yang digunakan. Setiap kritik dianggap ancaman. Setiap usulan perubahan dianggap pembangkangan. Setiap evaluasi dianggap serangan terhadap negara. Akibatnya, berbagai persoalan yang sesungguhnya dapat diperbaiki dibiarkan menumpuk hingga menjadi lebih sulit diselesaikan. Sebaliknya, bangsa yang mampu bertahan dan berkembang biasanya adalah bangsa yang berani

melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri tanpa kehilangan rasa hormat terhadap negaranya.

Dalam konteks Sekolah Negarawan, kecintaan terhadap negara justru diwujudkan melalui keberanian untuk melihat negara secara jujur. Cinta yang dewasa bukanlah cinta yang menolak melihat kekurangan. Cinta yang dewasa adalah cinta yang berani mengakui kelemahan agar kelemahan tersebut dapat diperbaiki. Seorang arsitek yang menemukan keretakan pada fondasi bangunan tidak sedang membenci bangunan tersebut. Seorang dokter yang menemukan penyakit pada pasien tidak sedang membenci pasiennya. Demikian pula seorang warga negara yang mengusulkan perbaikan sistem ketatanegaraan tidak sedang membenci negaranya. Yang sedang dilakukan adalah usaha menjaga agar negara dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara *Free Indonesia* dan berbagai bentuk gerakan yang bersifat destruktif. Tujuan *Free Indonesia* bukan membubarkan negara. Tujuan *Free Indonesia* bukan menciptakan kekacauan. Tujuan *Free Indonesia* bukan mengganti Indonesia dengan entitas lain. Yang ingin diwujudkan adalah negara yang lebih selaras dengan prinsip bahwa rakyat adalah *root owner* dari seluruh sistem. Negara yang lebih mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila sebagai *kernel* ke dalam praktik penyelenggaraan negara. Negara yang lebih terbuka terhadap koreksi konstitusional. Negara yang lebih dekat dengan sumber kedaulatannya.

Dalam kerangka tersebut, MPR sebagai *root administrator* juga memiliki fungsi yang sangat penting. MPR menjadi mekanisme konstitusional yang memungkinkan perbaikan dilakukan tanpa harus menghancurkan sistem yang ada. MPR menjadi ruang tempat bangsa melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri secara tertib dan terukur. Dengan demikian, perubahan tidak dilakukan melalui benturan yang merusak negara, tetapi melalui mekanisme yang justru memperkuat hubungan antara negara dan rakyat sebagai pemiliknya.

Pada akhirnya, *Free Indonesia* bukanlah seruan untuk melawan negara. *Free Indonesia* adalah seruan untuk mengembalikan negara kepada tujuan keberadaannya. Negara dibentuk untuk melayani rakyat, bukan untuk menjauh dari rakyat. Negara dibangun untuk menjaga kedaulatan rakyat, bukan menggantikan kedaulatan rakyat. Negara diciptakan sebagai instrumen bersama untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa. Karena itu, ketika bangsa berbicara tentang *Free Indonesia*, yang sedang diperjuangkan bukan pembebasan dari negara, melainkan pembebasan negara dari berbagai desain dan praktik yang membuat negara semakin jauh dari pemilik sahnya. Dan ketika negara kembali terhubung dengan rakyat sebagai *root owner*, maka kebebasan yang diperjuangkan bukan lagi kebebasan dari negara, melainkan kebebasan melalui negara yang bekerja sesuai dengan kedaulatan rakyat.

19.3. Negara Kembali Menjadi Milik Rakyat



Jika terdapat satu gagasan yang menjadi pusat dari seluruh pemikiran dalam buku ini, maka gagasan tersebut adalah bahwa negara harus kembali menjadi milik rakyat. Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan bagi sebagian orang mungkin terdengar seperti sesuatu yang sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan. Namun semakin jauh perjalanan pembahasan dilakukan, semakin terlihat bahwa persoalan terbesar yang dihadapi banyak negara modern bukanlah tidak adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, melainkan semakin jauhnya praktik penyelenggaraan negara dari prinsip tersebut. Rakyat tetap disebut sebagai pemegang kedaulatan, tetapi jalur yang menghubungkan rakyat dengan negara menjadi semakin panjang, semakin rumit, dan dalam banyak

kasus semakin sulit dipahami. Akibatnya, negara tetap berdiri atas nama rakyat, tetapi rakyat tidak selalu merasakan bahwa negara benar-benar menjadi miliknya.

Sepanjang buku ini telah dijelaskan bahwa rakyat merupakan *root owner* dari negara. Istilah tersebut bukan sekadar analogi teknis, melainkan cara untuk mengembalikan pemahaman yang sering hilang dalam kehidupan bernegara. Dalam sebuah sistem, *root owner* adalah pemilik tertinggi yang menjadi sumber seluruh legitimasi. Tidak ada administrator tanpa pemilik. Tidak ada hak akses tanpa pemilik. Tidak ada sistem tanpa pemilik. Seluruh struktur memperoleh dasar keberadaannya karena adanya pihak yang memiliki sistem tersebut. Dalam konteks negara, posisi itu berada pada rakyat. Negara tidak melahirkan rakyat. Sebaliknya, rakyatlah yang melahirkan negara. Negara tidak menciptakan kedaulatan rakyat. Sebaliknya, kedaulatan rakyatlah yang menciptakan legitimasi negara.

Namun sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara rakyat dan negara sering mengalami perubahan yang tidak selalu disadari. Pada awalnya negara dibentuk sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Negara berfungsi melindungi rakyat, menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan mengelola sumber daya demi kesejahteraan bersama. Seiring berjalannya waktu, berbagai institusi dibangun untuk menjalankan fungsi tersebut. Pemerintah dibentuk. Birokrasi diperluas. Regulasi diperbanyak. Mekanisme pemerintahan berkembang semakin kompleks. Seluruh

perkembangan tersebut pada dasarnya dilakukan untuk mendukung fungsi negara. Akan tetapi dalam banyak kasus, kompleksitas yang terus bertambah perlahan menciptakan jarak antara pemilik negara dan instrumen yang dibentuk atas nama pemilik tersebut.

Dalam dunia teknologi, keadaan semacam ini sering terjadi pada sistem yang berkembang terlalu jauh dari kebutuhan pengguna. Pada awalnya sebuah perangkat dirancang untuk membantu pemiliknya. Namun setelah mengalami berbagai pembaruan, penambahan fitur, dan lapisan-lapisan baru yang terus bertambah, sistem tersebut dapat menjadi begitu kompleks hingga pengguna kesulitan memahami bagaimana perangkatnya sendiri bekerja. Secara formal perangkat tetap milik pengguna, tetapi secara praktis kendali pengguna terhadap perangkat menjadi semakin terbatas. Persoalan yang sama dapat muncul dalam kehidupan bernegara. Negara tetap disebut milik rakyat, tetapi struktur yang menghubungkan rakyat dengan negara berkembang sedemikian rupa sehingga rakyat semakin sulit merasakan kepemilikannya secara nyata.

Di sinilah pentingnya gagasan mengenai negara yang kembali menjadi milik rakyat. Yang dimaksud bukan perpindahan kepemilikan karena kepemilikan tersebut sebenarnya tidak pernah hilang. Rakyat tetap menjadi pemilik sah negara sebagaimana ditegaskan dalam prinsip kedaulatan rakyat. Yang perlu dipulihkan adalah hubungan antara pemilik dan negara yang dimilikinya. Yang perlu diperjelas adalah jalur yang memungkinkan rakyat menjalankan fungsi sebagai *root*

owner. Yang perlu diperkuat adalah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan negara tetap dapat ditelusuri kembali kepada rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, negara yang menjadi milik rakyat bukan berarti negara yang menjalankan seluruh urusannya melalui keputusan langsung setiap warga negara. Negara modern tetap membutuhkan institusi, pembagian fungsi, dan mekanisme perwakilan. Pemerintahan tetap diperlukan untuk menjalankan operasional negara. Lembaga legislatif tetap diperlukan untuk membentuk regulasi. Lembaga peradilan tetap diperlukan untuk menegakkan hukum. Berbagai organ negara tetap memiliki fungsi yang tidak tergantikan. Persoalannya bukan ada atau tidak adanya institusi tersebut. Persoalannya adalah apakah seluruh institusi tersebut bekerja sebagai alat rakyat atau berkembang menjadi pusat kekuasaan yang semakin jauh dari rakyat.

Karena itu, negara yang kembali menjadi milik rakyat adalah negara yang memiliki jalur kedaulatan yang jelas. Rakyat sebagai *root owner* berada pada sumber legitimasi tertinggi. MPR sebagai *root administrator* menjaga agar hubungan antara rakyat dan negara tetap terpelihara. Pemerintah menjalankan fungsi operasional berdasarkan mandat yang berasal dari rakyat. Konstitusi sebagai *firmware* mengatur hubungan antar komponen negara agar tetap selaras dengan Pancasila sebagai *kernel* yang menjadi sumber nilai dasar bangsa. Dengan desain seperti ini, setiap

penggunaan kekuasaan dapat ditelusuri kembali kepada rakyat sebagai pemilik sah negara.

Konsep kepemilikan juga membawa konsekuensi yang sangat penting. Pemilik bukan hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab. Selama rakyat diposisikan hanya sebagai objek kekuasaan, hubungan dengan negara cenderung bersifat pasif. Ketika negara berhasil, rakyat menjadi penonton keberhasilan. Ketika negara gagal, rakyat menjadi penonton kegagalan. Namun ketika rakyat menyadari posisinya sebagai pemilik negara, hubungan tersebut berubah secara mendasar. Keberhasilan negara menjadi keberhasilan bersama. Kegagalan negara menjadi tanggung jawab bersama untuk diperbaiki. Kesadaran seperti ini menciptakan budaya kewarganegaraan yang jauh lebih dewasa karena rakyat tidak lagi memandang negara sebagai entitas yang terpisah dari dirinya.

Perspektif tersebut juga mengubah cara memandang demokrasi. Demokrasi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai mekanisme memilih pengelola negara. Demokrasi menjadi sarana bagi pemilik negara untuk memastikan bahwa instrumen yang dibentuk atas namanya tetap bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemilu menjadi bagian dari mekanisme tersebut. Referendum menjadi bagian dari mekanisme tersebut. Pengawasan publik menjadi bagian dari mekanisme tersebut. Seluruhnya berfungsi untuk menjaga hubungan antara pemilik dan negara yang dimilikinya agar tetap hidup dan tidak berubah menjadi sekadar simbol formal.

Dalam kerangka inilah gagasan *Free Indonesia* memperoleh maknanya yang paling mendasar. Kebebasan yang diperjuangkan bukan hanya kebebasan dari penjajahan fisik, bukan hanya kebebasan dari ketergantungan ekonomi, dan bukan hanya kebebasan dari dominasi pemerintahan tertentu. Kebebasan yang diperjuangkan adalah kebebasan rakyat untuk benar-benar menjadi pemilik negara yang dimilikinya sendiri. Kebebasan untuk memastikan bahwa negara bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh rakyat. Kebebasan untuk mengoreksi sistem ketika sistem menjauh dari sumber kedaulatannya. Kebebasan untuk menentukan arah masa depan bangsa melalui mekanisme yang konstitusional dan berkeadaban.

Pada akhirnya, negara yang kembali menjadi milik rakyat bukanlah sebuah utopia. Gagasan tersebut bukan sesuatu yang berada di luar konstitusi, di luar demokrasi, atau di luar prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara. Justru sebaliknya, gagasan tersebut merupakan upaya mengembalikan negara kepada fondasi yang sejak awal telah menjadi alasan keberadaannya. Negara dibentuk oleh rakyat. Negara dijalankan atas nama rakyat. Negara memperoleh legitimasi dari rakyat. Karena itu, seluruh desain negara pada akhirnya harus kembali kepada satu prinsip yang paling mendasar bahwa rakyat bukan tamu di dalam negara, bukan penonton di dalam negara, dan bukan sekadar objek yang diatur oleh negara. Rakyat adalah pemilik negara. Ketika prinsip tersebut benar-benar hidup dalam seluruh desain ketatanegaraan, maka negara tidak lagi berdiri di atas rakyat, melainkan

berdiri bersama rakyat sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

19.4. MPR sebagai Rumah Kedaulatan

Apabila rakyat adalah *root owner* dari negara, maka sebuah pertanyaan mendasar harus dijawab dengan jernih bahwa melalui institusi apa kedaulatan rakyat dijaga, dirawat, dan diterjemahkan ke dalam kehidupan bernegara. Kedaulatan tidak dapat hidup hanya sebagai konsep filosofis. Kedaulatan juga tidak dapat bertahan hanya sebagai kalimat yang tertulis dalam konstitusi. Kedaulatan membutuhkan ruang kelembagaan yang mampu menjaga hubungan antara rakyat sebagai pemilik negara dan seluruh sistem yang bekerja atas nama rakyat. Tanpa ruang tersebut, kedaulatan akan mudah berubah menjadi slogan yang sering diucapkan tetapi semakin sulit ditemukan dalam praktik penyelenggaraan negara.

Dalam berbagai pembahasan ketatanegaraan, perhatian publik sering kali lebih banyak tertuju kepada lembaga yang menjalankan fungsi operasional negara. Presiden menjadi pusat perhatian karena memimpin pemerintahan. DPR menjadi sorotan karena membentuk undang-undang. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi perhatian ketika memutus perkara-perkara penting. Berbagai institusi tersebut memang memiliki fungsi yang sangat vital. Namun di atas seluruh aktivitas tersebut terdapat satu pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu siapa yang menjaga agar seluruh aktivitas negara tetap berada

dalam koridor kedaulatan rakyat. Sebab pemerintahan dapat berjalan dengan baik sekalipun, legislasi dapat berlangsung secara rutin sekalipun, dan proses peradilan dapat terus berlangsung sekalipun, tetapi tanpa penjaga kedaulatan yang jelas, negara berisiko bergerak semakin jauh dari pemilik sahnya.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, posisi rakyat sebagai *root owner* telah ditegaskan sebagai sumber legitimasi tertinggi negara. Rakyat adalah pemilik negara. Rakyat adalah sumber kedaulatan. Seluruh institusi memperoleh kewenangannya karena adanya rakyat yang memberikan mandat. Namun sebuah sistem yang kompleks tidak mungkin dikelola secara langsung oleh jutaan pemilik setiap saat. Karena itu diperlukan sebuah institusi yang menerima mandat untuk menjaga sistem atas nama pemiliknya. Dalam analogi sistem digital, fungsi tersebut dijalankan oleh *root administrator*. Dalam desain ketatanegaraan yang dibangun oleh Sekolah Negarawan, fungsi tersebut dijalankan oleh MPR sebagai mandataris rakyat.

Pemahaman ini mengubah cara pandang terhadap MPR secara mendasar. MPR tidak diposisikan sebagai lembaga yang sekadar menjalankan fungsi prosedural tertentu. MPR juga tidak dipahami sebagai lembaga yang bersaing dengan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan. MPR diposisikan sebagai rumah kedaulatan rakyat. Tempat di mana kedaulatan rakyat memperoleh bentuk kelembagaannya. Tempat di mana mandat rakyat dijaga. Tempat di mana hubungan antara rakyat dan negara tetap dipelihara. Dengan kata lain, MPR

bukan sekadar bagian dari sistem negara. MPR merupakan simpul yang menjaga agar keseluruhan sistem tetap terhubung dengan sumber legitimasi yang melahirkannya.

Dalam dunia teknologi, keberadaan *root administrator* bukan untuk menggantikan pemilik sistem. Administrator yang baik memahami bahwa seluruh hak akses yang dimiliki berasal dari pemilik. Tugas administrator adalah memastikan bahwa sistem berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemilik. Ketika terjadi gangguan, administrator melakukan koreksi. Ketika diperlukan pembaruan, administrator mengelola proses perubahan. Ketika muncul ancaman terhadap integritas sistem, administrator bertindak untuk melindungi kepentingan pemilik. Seluruh tindakan tersebut dilakukan bukan atas nama kepentingan administrator, melainkan atas nama kepentingan pemilik sistem.

Prinsip yang sama berlaku terhadap MPR. MPR tidak menjadi pemilik negara. MPR tidak mengambil alih kedaulatan rakyat. MPR justru bertugas menjaga agar kedaulatan rakyat tidak pernah berpindah kepada pihak lain. Dalam perspektif ini, MPR bukan pusat kekuasaan negara, melainkan pusat penjagaan kedaulatan negara. Perbedaan tersebut sangat penting. Kekuasaan dan kedaulatan bukanlah hal yang sama. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan menjalankan fungsi tertentu. Kedaulatan berkaitan dengan sumber legitimasi yang menjadi dasar seluruh penggunaan kekuasaan. Pemerintah menjalankan kekuasaan pemerintahan. Lembaga legislatif menjalankan fungsi

legislasi. Lembaga yudikatif menjalankan fungsi peradilan. Namun MPR bertugas menjaga agar seluruh penggunaan kekuasaan tersebut tetap berasal dari dan kembali kepada rakyat sebagai pemilik negara.

Karena itu, menyebut MPR sebagai rumah kedaulatan bukan berarti menjadikan MPR sebagai lembaga yang mengendalikan seluruh aktivitas negara. Sebaliknya, konsep ini justru menempatkan MPR sebagai penjaga keseimbangan dalam sistem. Ketika pemerintah menjalankan negara sehari-hari, MPR menjaga hubungan pemerintah dengan sumber legitimasi rakyat. Ketika terjadi perubahan konstitusi, MPR memastikan bahwa perubahan tersebut tetap bergerak dalam koridor kedaulatan rakyat. Ketika muncul kebutuhan untuk mengevaluasi desain ketatanegaraan, MPR menjadi ruang tempat bangsa melakukan refleksi terhadap arah sistem yang digunakan. Dengan demikian, fungsi MPR lebih dekat kepada penjaga fondasi daripada pengelola operasional bangunan.

Perspektif ini juga membantu menjelaskan mengapa dalam desain Sekolah Negarawan, MPR memiliki hubungan yang sangat erat dengan referendum. Sebagai rumah kedaulatan rakyat, MPR tidak boleh menjadi pengganti rakyat. Ketika keputusan menyangkut fondasi negara dan hakikat kedaulatan, keputusan akhir tetap harus kembali kepada rakyat sebagai *root owner*. MPR bertugas memfasilitasi proses tersebut, memastikan bahwa jalurnya terbuka, mekanismenya tertib, dan hasilnya dapat diterjemahkan ke dalam sistem negara. Dengan kata lain, MPR menjadi

jembatan antara kedaulatan rakyat dan operasional negara, bukan pengganti dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konsep bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat selalu menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Namun pengalaman sejarah juga menunjukkan bahwa prinsip tersebut memerlukan institusi yang secara khusus bertugas menjaganya. Tanpa penjaga yang jelas, kedaulatan mudah tereduksi menjadi formalitas administratif. Rakyat tetap disebut sebagai pemegang kedaulatan, tetapi berbagai keputusan strategis bergerak semakin jauh dari rakyat. Karena itu, keberadaan MPR sebagai rumah kedaulatan bukan semata-mata persoalan struktur kelembagaan, melainkan kebutuhan untuk memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat memiliki tempat yang nyata dalam sistem negara.

Pada akhirnya, *Free Indonesia* bukan hanya tentang membebaskan rakyat dari berbagai bentuk ketergantungan dan penyimpangan sistem. *Free Indonesia* juga berarti memastikan bahwa kedaulatan rakyat memiliki rumah yang mampu menjaganya dari generasi ke generasi. Rumah tersebut bukan dibangun untuk menyaingi pemerintah, bukan pula untuk mengurangi fungsi lembaga negara lainnya. Rumah tersebut dibangun untuk memastikan bahwa di tengah kompleksitas negara modern, bangsa Indonesia tidak pernah kehilangan hubungan dengan prinsip yang paling mendasar bahwa negara ini adalah milik rakyat. Selama rakyat tetap menjadi *root owner* dan MPR tetap

menjalankan perannya sebagai *root administrator*, rumah kedaulatan itu akan terus berdiri sebagai pengingat bahwa seluruh kekuasaan negara pada akhirnya berasal dari rakyat, dijalankan atas nama rakyat, dan harus selalu kembali kepada rakyat sebagai pemilik sah negara.

19.5. Konstitusi sebagai Instrumen, Bukan Berhala

Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan bernegara adalah menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap konstitusi dan keberanian untuk mengevaluasinya. Di satu sisi, konstitusi merupakan fondasi hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konstitusi, negara akan kehilangan arah, kehilangan batas kewenangan, dan kehilangan mekanisme yang menjaga keteraturan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Namun di sisi lain, konstitusi bukanlah tujuan akhir dari keberadaan negara. Konstitusi dibentuk untuk melayani tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ketika perbedaan ini mulai kabur, bangsa dapat terjebak pada keadaan di mana konstitusi yang seharusnya menjadi alat justru diperlakukan seolah-olah menjadi tujuan yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dipertanyakan, dan tidak boleh dievaluasi.

Sepanjang buku ini telah dijelaskan bahwa dalam glosarium Sekolah Negarawan, Pancasila dipahami sebagai *kernel* negara. Pancasila merupakan sumber nilai yang menjadi dasar seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari nilai-nilai itulah lahir tujuan nasional, arah pembangunan, serta prinsip-prinsip

dasar yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Di atas fondasi tersebut berdiri konstitusi sebagai *firmware* negara. Konstitusi bertugas menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke dalam desain kelembagaan, distribusi kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta hubungan antara rakyat dan negara. Dengan kata lain, Pancasila menjawab pertanyaan mengenai ke mana bangsa harus menuju, sedangkan konstitusi menjawab pertanyaan mengenai bagaimana bangsa bergerak menuju tujuan tersebut.

Pemahaman ini sangat penting karena banyak perdebatan ketatanegaraan sering kali berhenti pada teks konstitusi tanpa kembali kepada tujuan yang hendak dicapai oleh konstitusi tersebut. Akibatnya, konstitusi perlahan diperlakukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah dari nilai yang melahirkannya. Padahal dalam logika sistem, *firmware* tidak pernah lebih tinggi daripada *kernel*. Sebuah sistem operasi tidak diciptakan untuk dirinya sendiri. Sebuah konfigurasi tidak disusun untuk kepentingan konfigurasi itu sendiri. Seluruh instrumen tersebut dibangun untuk melayani tujuan yang lebih besar. Jika tujuan tersebut hilang dari perhatian, maka sistem berisiko terjebak pada pemeliharaan struktur tanpa lagi memahami alasan mengapa struktur itu dibentuk.

Dalam dunia teknologi, tidak ada pengguna yang memuja *firmware* perangkatnya. Pengguna menghargai *firmware* karena *firmware* membantu perangkat bekerja dengan baik. Ketika *firmware* menjalankan fungsinya dengan efektif, pengguna mempertahankannya. Ketika ditemukan kelemahan, dilakukan pembaruan. Ketika

ditemukan bug, dilakukan perbaikan. Ketika ditemukan konfigurasi yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, dilakukan penyesuaian. Seluruh proses tersebut tidak dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap sistem. Sebaliknya, proses tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem tetap mampu menjalankan fungsi yang diharapkan.

Prinsip yang sama seharusnya berlaku terhadap konstitusi. Menghormati konstitusi tidak berarti menempatkan konstitusi di luar ruang evaluasi. Menghormati konstitusi berarti menjaga agar konstitusi tetap mampu menjalankan fungsi yang menjadi alasan keberadaannya. Ketika konstitusi berhasil menjaga kedaulatan rakyat, menciptakan keseimbangan kekuasaan, dan mendukung pencapaian tujuan nasional, maka konstitusi telah menjalankan fungsinya dengan baik. Namun ketika pengalaman menunjukkan adanya bagian-bagian tertentu yang justru menghasilkan ketidaksesuaian antara tujuan dan hasil yang dicapai, bangsa memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara jujur dan konstitusional.

Dalam perspektif *Free Indonesia*, pemahaman ini menjadi sangat penting karena salah satu bentuk ketidakbebasan yang sering tidak disadari adalah ketika sebuah bangsa kehilangan kemampuan untuk mengevaluasi instrumen yang digunakannya sendiri. Sebuah bangsa dapat merdeka secara pemerintahan tetapi tetap terikat oleh keyakinan bahwa desain yang ada tidak boleh disentuh meskipun menghasilkan berbagai persoalan yang terus berulang. Dalam keadaan

seperti itu, konstitusi perlahan berubah dari instrumen menjadi sesuatu yang diperlakukan seolah-olah memiliki nilai yang lebih tinggi daripada tujuan yang hendak dicapai melalui konstitusi tersebut. Di sinilah muncul apa yang dalam bahasa sederhana dapat disebut sebagai "pengkultusan instrumen".

Padahal para pendiri bangsa tidak pernah merancang konstitusi untuk diperlakukan seperti itu. Konstitusi dibentuk untuk melayani bangsa, bukan bangsa yang dibentuk untuk melayani konstitusi. Konstitusi diciptakan untuk menjaga kedaulatan rakyat, bukan untuk menggantikan kedaulatan rakyat. Konstitusi dirancang untuk membantu negara mencapai cita-cita kemerdekaan, bukan menjadi penghalang ketika bangsa ingin menyempurnakan jalannya menuju cita-cita tersebut. Karena itu, kesetiaan terhadap konstitusi harus selalu ditempatkan dalam kerangka kesetiaan yang lebih besar terhadap Pancasila, terhadap kedaulatan rakyat, dan terhadap tujuan nasional yang menjadi alasan berdirinya negara.

Dalam kerangka inilah posisi rakyat sebagai *root owner* memperoleh makna yang sangat penting. Sebagai pemilik negara, rakyat tidak hanya memiliki hak untuk mematuhi konstitusi, tetapi juga memiliki hak untuk memperbaiki konstitusi melalui mekanisme yang sah ketika diperlukan. Kepemilikan selalu mengandung hak untuk melakukan koreksi terhadap instrumen yang digunakan. Seorang pemilik rumah berhak memperbaiki denah rumahnya. Seorang pemilik perusahaan berhak memperbarui aturan organisasinya. Demikian pula rakyat sebagai pemilik negara memiliki

hak untuk menyempurnakan desain konstitusional yang mengatur negaranya sendiri. Hak tersebut bukan ancaman terhadap negara, melainkan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat.

Di sinilah fungsi MPR sebagai *root administrator* menjadi sangat relevan. MPR bukan penjaga teks semata. MPR adalah penjaga hubungan antara rakyat dan sistem negara. Karena itu, tugas MPR bukan hanya mempertahankan konstitusi dalam bentuk yang ada, tetapi memastikan bahwa konstitusi tetap bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh rakyat. Ketika diperlukan perubahan untuk menjaga agar konstitusi tetap selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, MPR memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi proses tersebut melalui mekanisme yang tertib, konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang perlu dipahami, memperlakukan konstitusi sebagai instrumen bukan berarti meremehkan konstitusi. Justru sebaliknya, pendekatan ini menempatkan konstitusi pada fungsi yang paling terhormat, yaitu sebagai alat yang melayani tujuan luhur bangsa. Sebuah kompas dihargai bukan karena bentuknya, tetapi karena kemampuannya menunjukkan arah yang benar. Sebuah peta dihargai bukan karena kertasnya, tetapi karena kemampuannya membantu perjalanan mencapai tujuan. Demikian pula konstitusi dihargai karena kemampuannya membantu bangsa mewujudkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, persatuan nasional, dan cita-cita kemerdekaan.

Pada akhirnya, *Free Indonesia* menuntut sebuah keberanian intelektual yang sederhana tetapi mendasar.

Bangsa harus mampu membedakan antara nilai dan instrumen, antara tujuan dan sarana, antara *kernel* dan *firmware*. Pancasila sebagai *kernel* harus tetap menjadi fondasi yang kokoh. Rakyat sebagai *root owner* harus tetap menjadi sumber legitimasi tertinggi. Konstitusi sebagai *firmware* harus terus dijaga agar mampu menerjemahkan keduanya ke dalam praktik kehidupan bernegara. Dengan pemahaman seperti itu, konstitusi tidak akan pernah diperlakukan sebagai berhala yang kebal dari evaluasi, tetapi juga tidak akan diremehkan sebagai dokumen biasa. Konstitusi akan ditempatkan pada posisi yang semestinya yaitu sebagai instrumen bangsa untuk menjaga agar negara tetap bergerak dalam jalur kedaulatan rakyat menuju cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan bersama.

19.6. Referendum sebagai Hak Mengoreksi Negara

Salah satu konsekuensi paling mendasar dari pengakuan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara adalah adanya hak untuk mengoreksi negara ketika negara mulai bergerak menjauh dari tujuan pembentukannya. Kepemilikan tidak hanya memberikan hak untuk menikmati hasil dari sebuah sistem, tetapi juga memberikan kewenangan untuk memperbaiki sistem tersebut apabila ditemukan penyimpangan. Prinsip ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari, berlaku dalam dunia teknologi, dan seharusnya juga berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, ketika rakyat ditempatkan sebagai *root owner* sebagaimana dijelaskan dalam glosarium buku ini, maka rakyat tidak cukup hanya memiliki hak

memilih penyelenggara negara. Rakyat juga harus memiliki hak untuk mengoreksi arah negara ketika desain yang digunakan tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat.

Sepanjang perjalanan sejarah, banyak bangsa mengalami persoalan bukan karena kekurangan mekanisme pergantian pemimpin, melainkan karena tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk memperbaiki sistem yang digunakan. Pergantian presiden dapat berlangsung secara berkala. Pergantian anggota parlemen dapat terjadi setiap periode pemilu. Pergantian pejabat dapat dilakukan melalui berbagai prosedur administratif. Namun apabila persoalan utama justru berada pada struktur ketatanegaraan, distribusi kewenangan, atau desain konstitusional, maka pergantian individu tidak akan menghasilkan perubahan yang mendasar. Sistem yang sama cenderung melahirkan pola yang sama. Operator berganti, tetapi arah sistem tetap bergerak pada jalur yang sama.

Dalam analogi yang digunakan sepanjang buku ini, keadaan tersebut serupa dengan sebuah perangkat yang terus mengganti aplikasi tanpa pernah memperbaiki sistem operasinya. Ketika sebuah aplikasi mengalami gangguan, pengguna memang dapat mengganti aplikasi tersebut dengan aplikasi lain. Namun apabila sumber persoalan ternyata berada pada *firmware* atau konfigurasi inti perangkat, maka penggantian aplikasi tidak akan menyelesaikan masalah. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem yang lebih

mendasar. Dengan kata lain, pemilik sistem harus memiliki hak untuk mengoreksi sistem yang dimilikinya sendiri.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan mekanisme yang sangat penting karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pengelola negara. Namun pemilu tidak selalu dirancang untuk memperbaiki desain negara. Pemilu memilih orang. Pemilu memilih wakil. Pemilu memilih pemerintah. Akan tetapi pemilu tidak selalu menjawab pertanyaan apakah sistem yang digunakan masih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ketika persoalan telah mencapai tingkat struktural, diperlukan mekanisme lain yang memungkinkan rakyat berbicara langsung mengenai sistem yang menjadi miliknya.

Di sinilah referendum memperoleh makna yang sangat penting. Dalam perspektif Sekolah Negarawan, referendum bukan sekadar prosedur yang dipinjam dari praktik ketatanegaraan negara lain. Referendum merupakan konsekuensi logis dari prinsip bahwa rakyat adalah *root owner*. Sebagai pemilik negara, rakyat memiliki hak untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap perubahan yang menyangkut fondasi negara. Referendum menjadi ruang di mana kepemilikan rakyat memperoleh bentuk yang nyata. Bukan sekadar diakui dalam konstitusi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui mekanisme yang memungkinkan rakyat menentukan arah sistem yang menjadi miliknya.

Pemahaman ini perlu dibedakan dari anggapan bahwa referendum adalah bentuk ketidakpercayaan

terhadap lembaga perwakilan. Referendum tidak dibangun untuk menggantikan demokrasi perwakilan. Referendum juga tidak dimaksudkan untuk menjadikan seluruh persoalan negara diputuskan melalui pemungutan suara langsung. Negara modern tetap memerlukan pembagian fungsi, mekanisme representasi, serta institusi yang menjalankan tugas sehari-hari. Pemerintah tetap diperlukan untuk mengelola administrasi negara. DPR tetap menjalankan fungsi legislasi. Lembaga peradilan tetap menegakkan hukum. Seluruh organ negara tetap memiliki fungsi yang tidak tergantikan. Namun ketika persoalan telah menyentuh fondasi negara, konstitusi, atau jalur kedaulatan rakyat, maka keputusan tersebut layak memperoleh legitimasi langsung dari pemilik negara.

Dalam glosarium buku ini, MPR ditempatkan sebagai *root administrator*. Posisi tersebut memperjelas hubungan antara referendum dan struktur ketatanegaraan. MPR bukan pengganti rakyat dalam menggunakan kedaulatan. MPR adalah penjaga yang memastikan bahwa jalur antara rakyat dan negara tetap terbuka. Karena itu, ketika muncul kebutuhan untuk melakukan perubahan yang menyentuh fondasi negara, MPR berfungsi mempersiapkan, memfasilitasi, dan menjaga agar proses referendum berlangsung secara konstitusional, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan. MPR menjaga mekanismenya, sedangkan rakyat memberikan keputusan akhirnya sebagai pemilik negara.

Hak mengoreksi negara juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kedewasaan rakyat. Selama ini

rakyat sering diposisikan hanya sebagai pemberi suara pada saat pemilu, kemudian kembali menjadi penonton terhadap berbagai keputusan besar yang menentukan arah bangsa. Cara pandang seperti itu secara perlahan mereduksi makna kedaulatan rakyat menjadi sekadar hak memilih pejabat. Padahal kedaulatan jauh lebih luas daripada sekadar memilih pengelola negara. Kedaulatan adalah hak menentukan arah negara itu sendiri. Referendum mengembalikan dimensi tersebut dengan memberikan ruang bagi rakyat untuk berbicara ketika masa depan negara sedang dipertaruhkan.

Tentu saja hak mengoreksi negara bukan berarti setiap keputusan harus selalu dibawa kepada referendum. Kepemilikan yang dewasa selalu memahami perbedaan antara keputusan operasional dan keputusan fundamental. Seorang pemilik perusahaan tidak perlu dimintai persetujuan untuk setiap keputusan administratif, tetapi akan terlibat langsung ketika perusahaan hendak mengubah arah bisnisnya secara menyeluruh. Seorang pemilik rumah tidak perlu memutuskan setiap pekerjaan perawatan, tetapi akan menentukan sendiri ketika rumah hendak dibangun ulang. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Referendum digunakan untuk persoalan yang menyangkut desain dasar negara, bukan untuk seluruh keputusan pemerintahan sehari-hari.

Dalam kerangka *Free* Indonesia, hak mengoreksi negara juga memiliki dimensi moral yang sangat penting. Kepemilikan bukan hanya hak untuk menikmati hasil, tetapi juga tanggung jawab menjaga integritas sistem. Rakyat yang memiliki hak mengoreksi

negara pada saat yang sama memiliki kewajiban memahami persoalan yang dihadapi negara. Referendum tidak boleh berubah menjadi arena mobilisasi emosi sesaat. Referendum harus didahului oleh pendidikan kewarganegaraan yang kuat, keterbukaan informasi, ruang dialog yang sehat, serta budaya musyawarah yang menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang sadar, bukan sekadar reaksi terhadap dinamika pemerintahan jangka pendek.

Pada akhirnya, referendum sebagai hak mengoreksi negara merupakan salah satu perwujudan paling nyata dari prinsip bahwa rakyat adalah *root owner*. Hak tersebut tidak lahir karena kemurahan hati pemerintah. Hak tersebut tidak diberikan oleh lembaga negara. Hak tersebut melekat pada rakyat karena rakyat adalah pemilik sah negara. Selama negara tetap dipahami sebagai milik rakyat, maka rakyat harus selalu memiliki jalan konstitusional untuk memperbaiki negara ketika diperlukan. Dengan cara itulah *Free* Indonesia tidak berhenti sebagai gagasan mengenai kebebasan bernegara, tetapi berkembang menjadi sebuah sistem yang memberikan ruang nyata bagi rakyat untuk menjaga, mengoreksi, dan mengarahkan negara sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan yang telah menjadi dasar berdirinya Republik Indonesia.

19.7. Dari Demokrasi Elektoral Menuju Kedaulatan Rakyat

Selama beberapa dekade terakhir, demokrasi di Indonesia lebih sering dipahami melalui ukuran-ukuran elektoral. Keberhasilan demokrasi diukur dari terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, tingginya tingkat partisipasi pemilih, pergantian pemerintahan yang berlangsung damai, serta adanya kompetisi antarpartai politik. Seluruh unsur tersebut memang merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi modern. Pemilu adalah mekanisme yang memungkinkan rakyat menentukan siapa yang akan memperoleh mandat untuk menjalankan pemerintahan. Namun persoalan muncul ketika demokrasi berhenti pada proses elektoral semata. Pada titik itulah demokrasi perlahan berubah dari tujuan menjadi prosedur, sementara kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi ruh demokrasi justru semakin kehilangan ruangnya.

Perbedaan antara demokrasi elektoral dan kedaulatan rakyat perlu dipahami secara jernih. Demokrasi elektoral berfokus pada mekanisme memilih penyelenggara negara. Kedaulatan rakyat berbicara mengenai siapa yang menjadi pemilik negara dan siapa yang memiliki hak tertinggi untuk menentukan arah negara. Demokrasi elektoral menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemimpin dipilih. Kedaulatan rakyat menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar, yaitu untuk siapa negara dijalankan. Kedua konsep tersebut saling berkaitan, tetapi tidak identik. Sebuah negara dapat menyelenggarakan pemilu secara rutin,

tetapi belum tentu berhasil mewujudkan kedaulatan rakyat secara utuh.

Sepanjang buku ini telah dijelaskan bahwa rakyat merupakan *root owner* dari negara. Posisi tersebut menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam seluruh sistem kenegaraan. Konstitusi sebagai *firmware* memperoleh legitimasi dari rakyat. Pemerintah sebagai *applications* memperoleh mandat dari rakyat. MPR sebagai *root administrator* menerima tugas untuk menjaga agar hubungan antara rakyat dan keseluruhan sistem negara tetap terpelihara. Jika seluruh struktur tersebut dipahami secara utuh, maka pemilu hanyalah salah satu mekanisme dalam menjalankan kedaulatan rakyat, bukan keseluruhan makna dari kedaulatan itu sendiri.

Dalam praktik kehidupan pemerintahan, pemilu sering kali menjadi pusat perhatian yang begitu besar sehingga berbagai aspek lain dari kedaulatan rakyat perlahan tersisih. Energi bangsa terkonsentrasi pada kompetisi memperoleh kekuasaan. Perhatian masyarakat dipenuhi oleh dinamika kampanye, koalisi, strategi pemerintahan, dan pergantian jabatan. Setelah proses tersebut selesai, pembahasan mengenai bagaimana rakyat tetap mengendalikan arah negara justru semakin jarang dilakukan. Akibatnya, demokrasi dipersepsikan selesai ketika hasil pemilu telah ditetapkan, padahal sesungguhnya proses menjaga kedaulatan rakyat baru saja dimulai.

Analogi teknologi yang digunakan sepanjang buku ini membantu menjelaskan keadaan tersebut dengan lebih sederhana. Bayangkan sebuah perusahaan

yang memilih administrator sistem setiap lima tahun sekali. Proses pemilihannya berlangsung terbuka, jujur, dan transparan. Setelah administrator terpilih, seluruh pemilik sistem tidak lagi memiliki ruang untuk memastikan apakah sistem tetap berjalan sesuai kepentingan mereka. Dalam keadaan seperti itu, prosedur pemilihan memang telah berlangsung dengan baik, tetapi hubungan antara pemilik dan sistem perlahan menjadi semakin lemah. Administrator tetap dipilih oleh pemilik, tetapi sistem yang dikelola administrator dapat berkembang menjauh dari tujuan pemilik apabila tidak terdapat mekanisme yang menjaga hubungan tersebut.

Keadaan yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Pemilu berjalan dengan baik, tetapi jalur kedaulatan rakyat setelah pemilu menjadi semakin terbatas. Rakyat telah memilih pemerintah, namun tidak selalu memiliki ruang yang memadai untuk mengoreksi desain negara ketika muncul persoalan yang bersifat mendasar. Rakyat tetap disebut sebagai pemegang kedaulatan, tetapi sebagian besar aktivitas pemerintahan berhenti pada proses memilih pejabat. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi berubah menjadi demokrasi elektoral, sedangkan kedaulatan rakyat kehilangan sebagian makna substantifnya.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, pemilu tetap merupakan instrumen yang sangat penting. Tidak ada gagasan dalam buku ini yang menempatkan pemilu sebagai sesuatu yang harus dihilangkan. Justru sebaliknya, pemilu merupakan salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun pemilu harus

ditempatkan pada fungsi yang semestinya. Pemilu adalah instrumen untuk memilih pengelola negara, bukan instrumen yang memindahkan kepemilikan negara. Setelah pemilu selesai, rakyat tetap menjadi *root owner*. Pemerintah tetap menjadi pelaksana mandat. MPR tetap menjadi *root administrator* yang menjaga hubungan antara rakyat dan negara. Dengan demikian, tidak terjadi perubahan posisi kepemilikan hanya karena pergantian pemerintahan.

Pemahaman ini juga mengubah cara memandang keberhasilan demokrasi. Keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari seberapa sering pemilu dilaksanakan atau seberapa damai pergantian kekuasaan berlangsung. Keberhasilan demokrasi harus diukur dari seberapa besar negara tetap bergerak sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemiliknya. Apabila setelah pemilu rakyat semakin jauh dari proses pengambilan keputusan strategis, maka demokrasi kehilangan sebagian fungsi dasarnya. Sebaliknya, apabila setelah pemilu rakyat tetap memiliki jalur konstitusional untuk menjaga arah negara, mengoreksi sistem, serta memastikan bahwa seluruh kekuasaan tetap bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan, maka demokrasi berkembang menjadi demokrasi yang benar-benar berakar pada kedaulatan rakyat.

Perjalanan menuju kedaulatan rakyat juga menuntut perubahan budaya pemerintahan. Politik tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kompetisi memperebutkan jabatan, tetapi sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga sistem negara. Perdebatan kekuasaan tidak berhenti pada siapa yang menang dan

siapa yang kalah dalam pemilu, melainkan bergerak menuju bagaimana seluruh institusi negara tetap setia kepada prinsip bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Dengan cara pandang seperti ini, politik tidak lagi menjadi arena perebutan kekuasaan semata, tetapi menjadi sarana menjaga integritas sistem kebangsaan.

Dalam kerangka tersebut, referendum memperoleh posisi yang melengkapi demokrasi elektoral. Pemilu memberikan mandat kepada penyelenggara negara. Referendum memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah negara ketika persoalan yang dihadapi menyangkut fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua mekanisme tersebut tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Pemilu menjaga keberlangsungan pemerintahan. Referendum menjaga keberlangsungan kedaulatan rakyat. Bersama-sama keduanya membentuk sistem yang lebih utuh dalam menerjemahkan prinsip bahwa seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat.

Pada akhirnya, *Free Indonesia* mengajak bangsa Indonesia bergerak melampaui pemahaman yang sempit mengenai demokrasi. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin. Demokrasi adalah cara menjaga agar negara tetap menjadi milik rakyat. Demokrasi bukan hanya tentang kompetisi pemerintahan lima tahunan. Demokrasi adalah mekanisme yang memastikan bahwa setiap penggunaan kekuasaan selalu dapat ditelusuri kembali kepada rakyat sebagai *root owner*. Ketika demokrasi berhenti pada prosedur elektoral, rakyat hanya

berperan sebagai pemilih. Namun ketika demokrasi berkembang menjadi kedaulatan rakyat, rakyat benar-benar hadir sebagai pemilik negara yang memiliki hak untuk memilih, mengawasi, mengoreksi, dan menentukan arah masa depan bangsanya sendiri. Pada titik inilah demokrasi tidak lagi sekadar menjadi sistem pemerintahan, melainkan menjadi perwujudan nyata dari cita-cita kemerdekaan bahwa negara berdiri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

19.8. *Free* Indonesia adalah Indonesia yang Berdaulat

Seluruh pembahasan dalam buku ini pada akhirnya mengarah kepada satu tujuan besar, yaitu mewujudkan Indonesia yang benar-benar berdaulat. Kata *Free* dalam istilah *Free Indonesia* tidak dimaksudkan sekadar sebagai padanan dari kata "bebas". Makna yang hendak dibangun jauh lebih dalam daripada kebebasan dalam pengertian sehari-hari. *Free Indonesia* adalah keadaan ketika bangsa Indonesia mampu menentukan arah kehidupannya sendiri berdasarkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kebebasan dalam pengertian ini bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan untuk mengelola negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi yang berpihak kepada rakyat, dan tujuan nasional yang telah disepakati bersama.

Sejak awal buku ini telah ditegaskan bahwa negara bukan tujuan, melainkan instrumen. Negara dibentuk agar rakyat mampu mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, beradab, dan bermartabat. Oleh karena itu,

ukuran keberhasilan negara tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran, tingginya pertumbuhan ekonomi, banyaknya regulasi, ataupun megahnya lembaga-lembaga negara. Seluruh ukuran tersebut baru memiliki arti apabila mampu memperkuat kedaulatan rakyat. Sebaliknya, apabila seluruh kemajuan tersebut justru menjauhkan rakyat dari posisi sebagai pemilik negara, maka pembangunan hanya menghasilkan kemajuan administratif tanpa memperkuat kemerdekaan substantif bangsa.

Dalam glosarium buku ini, rakyat ditempatkan sebagai *root owner*, sedangkan Pancasila dipahami sebagai *kernel* yang menjadi inti sistem negara. Kedua konsep tersebut memberikan arah yang sangat jelas mengenai makna Indonesia yang berdaulat. Kedaulatan bukan semata-mata kemampuan mempertahankan wilayah dari ancaman militer. Kedaulatan juga bukan sekadar pengakuan diplomatik dari negara lain. Kedaulatan adalah kemampuan sebuah bangsa mengelola seluruh sistem kehidupannya berdasarkan nilai yang dipilihnya sendiri dan berdasarkan kehendak rakyat sebagai pemilik negara. Dengan demikian, *Free Indonesia* bukan hanya berbicara mengenai hubungan Indonesia dengan dunia luar, tetapi juga mengenai hubungan antara rakyat dan negara di dalam negeri.

Kedaulatan pemerintahan merupakan salah satu unsur pertama yang harus diwujudkan. Kekuasaan yang berdaulat adalah kekuasaan yang tidak kehilangan arah karena tekanan kepentingan jangka pendek ataupun dominasi kelompok tertentu. Seluruh proses pemerintahan harus kembali kepada prinsip bahwa

kekuasaan merupakan amanah yang berasal dari rakyat. Pemerintah menjalankan mandat, bukan memiliki negara. Partai politik menjadi sarana partisipasi rakyat, bukan pemilik kedaulatan. MPR sebagai *root administrator* menjaga agar seluruh proses pemerintahan tetap berada dalam koridor kedaulatan rakyat. Dengan desain seperti itu, pemerintahan tidak lagi menjadi arena perebutan kekuasaan semata, tetapi menjadi mekanisme untuk mengelola amanah yang diberikan oleh pemilik negara.

Kedaulatan juga harus hadir dalam bidang ekonomi. Selama ini pembahasan mengenai ekonomi sering terfokus pada angka-angka pertumbuhan, investasi, atau stabilitas fiskal. Seluruh indikator tersebut memang penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan apakah sebuah bangsa benar-benar berdaulat secara ekonomi. Ekonomi yang berdaulat adalah ekonomi yang mampu mengelola sumber daya nasional sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Kekayaan alam, kemampuan produksi, inovasi, teknologi, dan seluruh potensi ekonomi harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sebagai pemilik negara, bukan semata-mata menjadi objek eksploitasi yang menguntungkan segelintir pihak. Ketika arah ekonomi kembali kepada kepentingan rakyat, maka pembangunan ekonomi menjadi bagian dari penguatan kedaulatan, bukan sekadar peningkatan statistik pertumbuhan.

Dalam era digital, kedaulatan juga memiliki dimensi baru yang tidak kalah penting, yaitu

kedaulatan data dan sistem. Negara modern semakin bergantung pada informasi, teknologi, dan infrastruktur digital. Karena itu, kemampuan bangsa mengendalikan data strategis, sistem pemerintahan, teknologi nasional, serta infrastruktur digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara. Sebagaimana telah dijelaskan melalui berbagai analogi dalam buku ini, sistem yang dikendalikan oleh pihak lain akan selalu menghadapi risiko kehilangan arah. Oleh sebab itu, *Free Indonesia* juga berarti Indonesia yang memiliki kemampuan membangun, mengelola, dan mengamankan sistemnya sendiri sehingga data, keputusan, dan arah pembangunan tetap berada dalam kendali bangsa Indonesia.

Kedaulatan hukum juga menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan. Hukum yang berdaulat bukan hukum yang sekadar memiliki banyak peraturan, tetapi hukum yang bekerja untuk menjaga keadilan dan melindungi kedaulatan rakyat. Dalam desain negara yang sehat, hukum tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan menjadi instrumen yang mengikat seluruh penyelenggara negara secara setara. Tidak boleh ada pihak yang berada di atas hukum. Tidak boleh ada kekuasaan yang kebal terhadap mekanisme pertanggungjawaban. Ketika hukum bekerja berdasarkan prinsip keadilan dan berpijak pada kedaulatan rakyat, maka hukum menjadi penjaga integritas sistem negara, bukan sekadar perangkat administratif.

Tidak kalah penting adalah kedaulatan budaya. Bangsa yang kehilangan jati dirinya akan sangat mudah

kehilangan arah dalam membangun negaranya. Peradaban Nusantara yang dalam glosarium buku ini diposisikan sebagai *operating system* bukan dimaksudkan sebagai romantisme sejarah, melainkan sebagai pengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki warisan nilai, cara berpikir, dan tradisi yang dapat menjadi fondasi bagi pembangunan masa depan. Musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap kemanusiaan, keseimbangan antara individu dan kebersamaan, serta penghargaan terhadap keberagaman merupakan modal peradaban yang tidak boleh hilang di tengah arus globalisasi. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu menyerap perkembangan dunia tanpa kehilangan identitasnya sendiri.

Dalam perspektif *Free Indonesia*, seluruh bentuk kedaulatan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. Kekuasaan yang berdaulat membutuhkan ekonomi yang berdaulat. Ekonomi yang berdaulat membutuhkan hukum yang berdaulat. Hukum yang berdaulat membutuhkan budaya yang berdaulat. Seluruhnya bertemu pada satu titik yang sama, yaitu rakyat sebagai *root owner*. Ketika rakyat tetap menjadi sumber legitimasi tertinggi, maka seluruh dimensi kedaulatan memiliki orientasi yang jelas. Sebaliknya, ketika hubungan antara rakyat dan negara melemah, berbagai bentuk kedaulatan tersebut perlahan ikut mengalami erosi.

Yang juga perlu dipahami, *Free Indonesia* bukanlah gagasan yang dibangun di atas semangat permusuhan terhadap bangsa lain. Kedaulatan tidak identik dengan

isolasi. Bangsa yang berdaulat tetap dapat bekerja sama dengan negara lain, berdagang dengan dunia internasional, membangun hubungan diplomatik, dan menjadi bagian dari masyarakat global. Perbedaannya terletak pada posisi tawar. Kerja sama dilakukan karena menjadi pilihan yang menguntungkan bangsa, bukan karena kehilangan kemampuan menentukan arah sendiri. Hubungan internasional dibangun berdasarkan martabat sebagai bangsa yang merdeka, bukan sebagai bangsa yang bergantung kepada kehendak pihak lain.

Pada akhirnya, *Free Indonesia* adalah Indonesia yang kembali mengenali dirinya sendiri. Indonesia yang memahami bahwa negara dibangun untuk rakyat, bukan rakyat yang dibentuk untuk melayani negara. Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai *kernel* yang memberi arah, konstitusi sebagai *firmware* yang terus disempurnakan, MPR sebagai *root administrator* yang menjaga jalur kedaulatan, dan rakyat sebagai *root owner* yang menjadi sumber seluruh legitimasi. Ketika seluruh unsur tersebut bekerja secara selaras, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang merdeka secara formal, tetapi juga menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat dalam menentukan masa depannya sendiri. Pada saat itulah *Free Indonesia* bukan lagi sekadar slogan atau manifesto, melainkan menjadi gambaran tentang negara yang kembali bekerja sebagaimana tujuan awal pembentukannya, yaitu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik sah negara.

19.9. Manifesto Sekolah Negarawan

Setiap gagasan besar pada akhirnya memerlukan sebuah pernyataan sikap. Setelah melalui perjalanan panjang memahami negara sebagai sebuah sistem, membedakan antara negara dan pemerintah, mengenali posisi rakyat sebagai *root owner*, memahami fungsi MPR sebagai *root administrator*, menelaah konstitusi sebagai *firmware*, serta memaknai Pancasila sebagai *kernel* bangsa, seluruh pembahasan dalam buku ini akhirnya bermuara pada sebuah manifesto. Manifesto bukan sekadar kumpulan slogan atau deklarasi pemerintahan. Manifesto adalah penegasan mengenai arah yang hendak ditempuh, nilai yang hendak dipertahankan, serta tanggung jawab yang hendak dipikul bersama. Manifesto menjadi kompas yang memastikan bahwa seluruh gagasan yang telah dibangun tidak berhenti sebagai teori, melainkan berkembang menjadi kesadaran yang membimbing tindakan.

Sekolah Negarawan lahir dari keyakinan bahwa persoalan terbesar bangsa Indonesia bukan semata-mata terletak pada pergantian pemimpin, pergantian pemerintahan, atau pergantian kebijakan. Persoalan yang lebih mendasar berada pada cara bangsa memahami negara. Selama negara dipersepsikan sebagai milik penguasa, selama pemerintah dipandang identik dengan negara, selama konstitusi diperlakukan sebagai tujuan, dan selama rakyat hanya ditempatkan sebagai objek kekuasaan, berbagai perubahan yang dilakukan akan terus bergerak di permukaan tanpa pernah menyentuh akar persoalan. Karena itu, perjuangan utama Sekolah Negarawan bukan sekadar

mengganti aktor pemerintahan, melainkan membangun kembali cara berpikir mengenai negara berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

Manifesto ini berangkat dari keyakinan bahwa negara adalah amanah bersama yang dibangun untuk melayani rakyat. Negara bukan milik pemerintah. Negara bukan milik partai politik. Negara bukan milik kelompok ekonomi, organisasi tertentu, ataupun individu yang sedang memegang kekuasaan. Negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Dari rakyat lahir legitimasi. Dari rakyat lahir mandat. Dari rakyat lahir seluruh kewenangan yang digunakan oleh penyelenggara negara. Oleh sebab itu, seluruh desain ketatanegaraan harus selalu kembali kepada satu pertanyaan yang sederhana namun mendasar, yaitu apakah sistem yang dibangun benar-benar bekerja untuk rakyat sebagai pemilik sah negara.

Manifesto Sekolah Negarawan juga menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol kebangsaan. Dalam glosarium buku ini, Pancasila ditempatkan sebagai *kernel*, yaitu inti sistem yang menjadi sumber nilai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan pelengkap konstitusi, melainkan fondasi yang memberi arah kepada konstitusi. Karena itu, setiap pembaruan sistem negara harus selalu diukur berdasarkan kemampuannya menerjemahkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial ke dalam praktik penyelenggaraan negara. Konstitusi sebagai *firmware* dapat diperbaiki ketika diperlukan, tetapi nilai yang menjadi dasar

berdirinya bangsa harus tetap menjadi arah yang tidak berubah.

Manifesto ini juga menegaskan bahwa rakyat bukan sekadar pemilih dalam pemilihan umum. Rakyat adalah *root owner*, pemilik tertinggi negara. Kepemilikan tersebut tidak berhenti pada hak memilih penyelenggara negara, tetapi juga mencakup hak untuk mengawasi, mengevaluasi, mengoreksi, dan menentukan arah negara ketika diperlukan. Kedaulatan rakyat bukan hadiah yang diberikan oleh pemerintah, melainkan hak yang melekat pada rakyat sejak negara ini dibentuk. Oleh karena itu, seluruh mekanisme ketatanegaraan harus dirancang agar hubungan antara rakyat dan negara tetap hidup, nyata, dan dapat dijalankan secara konstitusional.

Dalam kerangka tersebut, MPR memperoleh kedudukan sebagai *root administrator*. MPR bukan pemilik negara, bukan pula penguasa yang berdiri di atas rakyat. MPR adalah mandataris rakyat yang bertugas menjaga agar negara tidak pernah terlepas dari pemilik sahnya. Fungsi utama MPR bukan mengelola pemerintahan sehari-hari, melainkan menjaga integritas jalur kedaulatan rakyat. Selama hubungan antara *root owner* dan *root administrator* tetap terpelihara, negara memiliki mekanisme yang memungkinkan setiap penyimpangan dikoreksi tanpa harus menghancurkan sistem yang telah dibangun.

Manifesto Sekolah Negarawan juga menolak cara berpikir yang menempatkan kekuasaan sebagai tujuan akhir. Kekuasaan hanyalah instrumen. Jabatan hanyalah amanah. Pemerintahan hanyalah perangkat

operasional negara. Seluruh kekuasaan harus selalu dipahami sebagai mandat yang berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Politik kehilangan maknanya ketika berubah menjadi kompetisi untuk menguasai negara. Politik memperoleh kehormatannya ketika menjadi sarana mengelola negara demi kemaslahatan rakyat sebagai pemilik negara.

Manifesto ini juga mengajak bangsa Indonesia membangun budaya kenegaraan yang lebih dewasa. Kecintaan kepada negara tidak diwujudkan melalui kepatuhan tanpa nalar. Kecintaan kepada negara diwujudkan melalui kesediaan menjaga integritas negara. Kritik terhadap penyimpangan bukan bentuk permusuhan terhadap negara. Usulan perubahan konstitusional bukan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Evaluasi terhadap desain ketatanegaraan bukan ancaman terhadap persatuan nasional. Seluruh tindakan tersebut justru merupakan bagian dari tanggung jawab pemilik negara yang ingin memastikan bahwa sistem tetap bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Lebih jauh lagi, Manifesto Sekolah Negarawan mengajak bangsa Indonesia membangun kembali budaya berpikir sistemik. Selama ini terlalu banyak persoalan diselesaikan dengan mengganti individu tanpa memperbaiki sistem. Ketika terjadi kegagalan, perhatian diarahkan kepada pelaku, sementara desain yang melahirkan kegagalan tersebut tetap dipertahankan. Cara berpikir seperti itu hanya menghasilkan siklus yang terus berulang. Sekolah

Negarawan menawarkan pendekatan yang berbeda. Sebelum menyalahkan operator, periksalah sistemnya. Sebelum mengganti pemimpin, pahamilah desain yang membentuk ruang gerak pemimpin tersebut. Sebelum menambah regulasi, pastikan bahwa struktur yang menopangnya telah dirancang secara benar. Dengan cara berpikir seperti ini, perubahan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi proses yang terarah dan berkelanjutan.

Manifesto ini juga merupakan ajakan untuk membangun kembali optimisme kebangsaan. Indonesia bukan bangsa yang kekurangan sumber daya. Indonesia bukan bangsa yang kekurangan kecerdasan. Indonesia bukan bangsa yang kehilangan nilai. Bangsa ini memiliki Pancasila sebagai fondasi, memiliki konstitusi sebagai instrumen, memiliki sejarah perjuangan yang panjang, memiliki keberagaman budaya yang luar biasa, dan memiliki rakyat yang menjadi sumber legitimasi negara. Yang diperlukan adalah keberanian untuk menyelaraskan kembali seluruh potensi tersebut ke dalam sebuah desain negara yang benar-benar berpihak kepada kedaulatan rakyat.

Pada akhirnya, Manifesto Sekolah Negarawan bukanlah akhir dari perjalanan intelektual yang dibangun dalam buku ini. Manifesto ini justru menjadi awal dari sebuah perjalanan kebangsaan yang lebih besar. Perjalanan untuk mengembalikan negara kepada pemilik sahnya. Perjalanan untuk menempatkan Pancasila kembali sebagai *kernel* kehidupan berbangsa. Perjalanan untuk menyempurnakan konstitusi sebagai *firmware* yang melayani rakyat. Perjalanan untuk

memperkuat MPR sebagai *root administrator* yang menjaga jalur kedaulatan. Dan yang paling penting, perjalanan untuk membangkitkan kembali kesadaran bahwa Indonesia hanya akan menjadi negara yang benar-benar merdeka apabila rakyat tidak pernah berhenti menjadi pemilik, penjaga, sekaligus penanggung jawab atas negara yang telah dibangun bersama. Inilah manifesto yang ditawarkan Sekolah Negarawan, bukan sebagai milik satu kelompok, melainkan sebagai undangan bagi seluruh anak bangsa untuk membangun Indonesia yang benar-benar berdaulat di atas kedaulatan rakyat.

19.10. *Free* Indonesia

Seluruh perjalanan dalam buku ini pada akhirnya bermuara pada satu gagasan yang sederhana tetapi sangat mendasar, yaitu menghadirkan Indonesia yang benar-benar bebas karena benar-benar berdaulat. *Free Indonesia* bukanlah nama sebuah Gerakan penguasa, bukan slogan yang lahir dari kekecewaan sesaat, dan bukan pula seruan untuk menumbangkan negara. *Free Indonesia* adalah sebuah cara pandang mengenai bagaimana negara seharusnya dipahami, dibangun, dan dijalankan. Gagasan ini lahir dari keyakinan bahwa negara akan menjalankan fungsinya secara utuh apabila seluruh desainnya kembali berpijak kepada prinsip paling mendasar, yaitu rakyat sebagai pemilik sah negara.

Perjalanan panjang dalam buku ini dimulai dengan melihat negara melalui sudut pandang yang berbeda. Negara tidak lagi dipahami sebagai sesuatu

yang abstrak, melainkan sebagai sebuah sistem yang memiliki *kernel*, *firmware*, *operating system*, *applications*, *root owner*, dan *root administrator*. Analogi tersebut bukan dimaksudkan untuk menyederhanakan negara menjadi sekadar perangkat teknologi, tetapi untuk membantu melihat bahwa setiap sistem yang baik selalu memiliki hubungan yang jelas antara nilai, desain, pengelolaan, dan kepemilikan. Ketika hubungan tersebut terjaga, sistem bekerja sebagaimana mestinya. Ketika hubungan tersebut terputus, berbagai penyimpangan mulai muncul meskipun bentuk luar sistem tampak tetap berjalan secara normal.

Dari seluruh pembahasan tersebut lahir satu kesimpulan yang terus berulang dan semakin kuat, yaitu negara bukan pemilik rakyat. Pemerintah bukan pemilik negara. Partai politik bukan pemilik kekuasaan. Seluruh struktur kenegaraan memperoleh legitimasi karena adanya rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam glosarium yang menjadi fondasi buku ini, rakyat dipahami sebagai *root owner*. Kedudukan tersebut bukan sekadar simbol konstitusional, tetapi merupakan sumber dari seluruh legitimasi negara. Seluruh cabang kekuasaan memperoleh kewenangannya dari rakyat. Seluruh institusi negara dibentuk untuk melayani rakyat. Seluruh penyelenggaraan negara pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Kesadaran inilah yang menjadi inti dari *Free Indonesia*. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa aturan. Kebebasan juga bukan berarti negara kehilangan kewibawaannya. Kebebasan yang diperjuangkan adalah kebebasan rakyat untuk

menjalankan kedaulatannya secara utuh melalui negara yang dibangun atas nama rakyat. Negara tetap memerlukan konstitusi. Negara tetap memerlukan hukum. Negara tetap memerlukan pemerintahan. Negara tetap memerlukan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi tertentu. Namun seluruh instrumen tersebut harus selalu dipahami sebagai alat yang bekerja bagi rakyat, bukan sebagai pusat kekuasaan yang berdiri di atas rakyat.

Karena itu, *Free Indonesia* bukanlah proyek mengganti Indonesia dengan negara baru. *Free Indonesia* adalah upaya mengembalikan Indonesia kepada jati dirinya sendiri. Pancasila tetap menjadi *kernel* yang memberikan arah kehidupan berbangsa. Konstitusi tetap menjadi *firmware* yang mengatur cara kerja negara. Peradaban Nusantara tetap menjadi *operating system* yang membentuk karakter kehidupan kebangsaan. MPR tetap menjalankan fungsi sebagai *root administrator* yang menjaga hubungan antara rakyat dan keseluruhan sistem negara. Pemerintah tetap menjadi pelaksana operasional negara. Yang berubah bukan identitas bangsa, melainkan keselarasan hubungan antara seluruh komponen tersebut agar kembali berpijak pada kedaulatan rakyat.

Pandangan ini juga mengubah cara melihat perubahan. Perubahan tidak lagi dipahami sebagai pergantian individu semata. Perubahan bukan sekadar pergantian presiden, pergantian partai politik, atau pergantian kabinet. Seluruh pergantian tersebut memang penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi tidak otomatis memperbaiki sistem apabila desain yang

mendasarinya tetap menghasilkan persoalan yang sama. Karena itu, *Free Indonesia* mengajak bangsa untuk berani membedakan antara persoalan operasional dan persoalan struktural. Ketika persoalan berada pada desain negara, maka penyelesaiannya harus menyentuh desain tersebut melalui mekanisme konstitusional yang sah. Bangsa tidak boleh terus-menerus mengganti operator sambil membiarkan sistem yang sama terus menghasilkan keluaran yang sama.

Dalam perjalanan menuju *Free Indonesia*, rakyat juga memikul tanggung jawab yang tidak kecil. Menjadi *root owner* bukan hanya berarti memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga negara. Kepemilikan menuntut kesadaran. Kepemilikan menuntut pengetahuan. Kepemilikan menuntut keberanian untuk mengoreksi ketika sistem mulai menyimpang. Bangsa yang memahami dirinya sebagai pemilik negara akan memandang negara dengan cara yang berbeda. Kritik tidak lagi lahir dari kebencian, melainkan dari rasa memiliki. Perubahan tidak lagi dilakukan demi kepentingan kelompok tertentu, melainkan demi menjaga rumah bersama yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perspektif tersebut, *Free Indonesia* juga bukan tujuan yang berhenti pada satu generasi. Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar hubungan antara rakyat dan negara tidak pernah terputus. Setiap generasi memiliki kewajiban memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi sumber nilai, bahwa konstitusi tetap melayani rakyat, bahwa MPR tetap menjaga jalur kedaulatan, bahwa pemerintah

tetap menjalankan mandatnya, dan bahwa seluruh penyelenggara negara tetap menyadari dirinya sebagai pelayan rakyat, bukan pemilik negara. Selama kesadaran tersebut terus hidup, negara akan selalu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya tanpa kehilangan jati dirinya.

Buku ini tidak menawarkan utopia tentang negara yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna. Tidak ada desain yang terbebas dari kemungkinan untuk dievaluasi. Yang ditawarkan adalah cara berpikir agar bangsa memiliki kemampuan memperbaiki sistemnya sendiri tanpa kehilangan arah. Bangsa yang memahami struktur negaranya akan lebih mudah mengenali penyimpangan. Bangsa yang memahami sumber kedaulatannya akan lebih sulit kehilangan kendali atas negaranya. Bangsa yang memahami bahwa negara adalah instrumen akan selalu berani memperbaiki instrumen tersebut ketika tidak lagi bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pada akhirnya, *Free Indonesia* bukan sekadar penutup dari buku ini. *Free Indonesia* adalah titik awal untuk membangun cara berpikir baru mengenai negara. Cara berpikir yang menempatkan rakyat sebagai *root owner*, MPR sebagai *root administrator*, Pancasila sebagai *kernel*, konstitusi sebagai *firmware*, dan negara sebagai instrumen yang bekerja demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketika seluruh komponen tersebut kembali bekerja secara selaras, kemerdekaan tidak lagi berhenti

sebagai peristiwa sejarah yang diperingati setiap tahun, melainkan berubah menjadi kenyataan yang hidup dalam setiap keputusan negara, setiap kebijakan publik, dan setiap hubungan antara rakyat dengan penyelenggara negara.

Itulah makna terdalam dari *Free Indonesia*. Bukan Indonesia yang bebas dari negara, melainkan Indonesia yang negara dan seluruh sistemnya benar-benar kembali kepada rakyat. Bukan Indonesia yang kehilangan aturan, melainkan Indonesia yang seluruh aturannya berpijak pada kedaulatan rakyat. Bukan Indonesia yang meniadakan lembaga-lembaga negara, melainkan Indonesia yang seluruh lembaganya bekerja sebagai amanah yang berasal dari rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ketika keadaan tersebut terwujud, kemerdekaan memperoleh makna yang utuh, kedaulatan tidak lagi berhenti sebagai kalimat konstitusi, dan negara benar-benar menjadi rumah bersama yang dibangun, dijaga, serta diwariskan oleh rakyat Indonesia kepada setiap generasi yang akan datang.

BAGIAN VI – SAVE NUSANTARA

BAB 20
MENYELAMATKAN KELUARGA

20.1. Keluarga sebagai Fondasi Peradaban



Seluruh pembahasan dalam buku ini telah membawa pembaca menelusuri perjalanan yang panjang, mulai dari memahami hakikat negara, membedakan negara dengan pemerintah, mengenali kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi, menata kembali desain ketatanegaraan, hingga membangun gagasan tentang *Free Indonesia* sebagai negara yang benar-benar berpijak pada rakyat sebagai *root owner*. Namun pada titik ini muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Setelah negara berhasil diperbaiki, siapakah yang akan mengisi negara tersebut? Sebab sebesar apa pun perubahan konstitusi, sebaik apa pun

desain kelembagaan, dan secanggih apa pun sistem yang dibangun, seluruhnya pada akhirnya akan dijalankan oleh manusia. Apabila manusia yang mengisi sistem kehilangan karakter, kehilangan integritas, dan kehilangan arah moral, maka sistem yang paling baik sekalipun perlahan akan kembali mengalami penyimpangan. Karena itulah pembahasan mengenai penyelamatan Nusantara harus dimulai bukan dari negara, melainkan dari keluarga.

Dalam perjalanan sejarah umat manusia, keluarga selalu hadir lebih dahulu daripada negara. Sebelum terdapat pemerintahan, sebelum lahir konstitusi, sebelum terbentuk lembaga-lembaga negara, manusia terlebih dahulu hidup dalam keluarga. Dari keluarga lahir komunitas. Dari komunitas berkembang masyarakat. Dari masyarakat kemudian tumbuh organisasi sosial yang semakin besar hingga akhirnya membentuk sebuah negara. Urutan sejarah tersebut menunjukkan bahwa keluarga bukan produk negara. Justru negara merupakan perkembangan dari kehidupan keluarga yang semakin luas. Oleh karena itu, apabila negara ingin dibangun dengan kokoh, fondasi yang pertama kali harus diperhatikan bukanlah istana pemerintahan ataupun gedung parlemen, melainkan rumah-rumah tempat manusia pertama kali belajar menjadi manusia.

Pemahaman ini sangat penting karena selama ini pembangunan bangsa sering kali terlalu terfokus pada pembangunan institusi. Negara membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya, pelabuhan, kawasan industri, hingga berbagai pusat pemerintahan yang megah.

Seluruh pembangunan tersebut tentu memiliki nilai yang sangat besar bagi kemajuan bangsa. Akan tetapi terdapat satu institusi yang sering luput dari perhatian, padahal menjadi fondasi bagi seluruh institusi lainnya, yaitu keluarga. Ketika keluarga kehilangan fungsi sebagai tempat lahirnya karakter, maka sekolah akan dibebani tugas yang terlalu berat. Ketika keluarga gagal menanamkan nilai, hukum dipaksa menggantikan fungsi moral. Ketika keluarga tidak lagi membangun integritas, negara harus mengeluarkan energi yang jauh lebih besar untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang sesungguhnya berawal dari dalam rumah.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, keluarga bukan sekadar tempat tinggal bersama. Keluarga adalah institusi pertama yang membentuk peradaban. Peradaban tidak diwariskan melalui bangunan-bangunan megah ataupun dokumen-dokumen kenegaraan. Peradaban diwariskan melalui kebiasaan yang hidup di dalam keluarga, melalui cara orang tua berbicara kepada anak-anaknya, melalui keteladanan yang terlihat setiap hari, melalui penghormatan terhadap sesama, melalui kejujuran yang dipraktikkan dalam kehidupan sederhana, dan melalui nilai-nilai yang terus diteruskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, keluarga sesungguhnya merupakan ruang pertama tempat sebuah bangsa membangun masa depannya.

Analogi yang digunakan sepanjang buku ini kembali membantu menjelaskan hubungan tersebut. Dalam glosarium telah dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa, konstitusi merupakan

firmware negara, dan Peradaban Nusantara merupakan *operating system* yang membentuk cara hidup masyarakat. Namun *operating system* tersebut tidak lahir dengan sendirinya. Nilai-nilai peradaban tidak otomatis muncul ketika seseorang memasuki sekolah atau ketika seseorang mulai bekerja di pemerintahan. Peradaban mulai ditanamkan jauh sebelum seluruh proses tersebut berlangsung, yaitu sejak seorang anak mengenal keluarganya. Rumah menjadi ruang pertama tempat nilai-nilai kehidupan diinstal ke dalam diri manusia. Dari rumah lahir cara berpikir, cara berbicara, cara menghormati orang lain, cara menyelesaikan konflik, hingga cara memandang Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

Karena itu, keluarga dapat dipahami sebagai fondasi tempat *operating system* peradaban mulai dibangun. Apabila fondasi tersebut kokoh, maka proses pendidikan, kehidupan bermasyarakat, dan penyelenggaraan negara memperoleh pijakan yang kuat. Sebaliknya, apabila fondasi tersebut rapuh, maka seluruh institusi di atasnya harus bekerja lebih keras untuk menutupi kekurangan yang sebenarnya muncul sejak awal kehidupan seseorang. Sekolah dipaksa mengajarkan etika yang seharusnya telah dipelajari di rumah. Aparat penegak hukum dipaksa menyelesaikan persoalan yang berakar pada kegagalan pembentukan karakter. Pemerintah dipaksa menciptakan berbagai regulasi untuk mengendalikan perilaku yang semestinya telah dikendalikan oleh kesadaran moral.

Persoalan inilah yang menjelaskan mengapa tidak sedikit negara dengan sistem pemerintahan yang baik

tetap menghadapi krisis sosial. Perubahan hukum tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku. Pergantian pemimpin tidak otomatis melahirkan masyarakat yang lebih berintegritas. Penambahan anggaran pendidikan belum tentu meningkatkan kualitas karakter bangsa. Selama keluarga kehilangan fungsi sebagai pembangun peradaban, negara akan terus berhadapan dengan persoalan yang sama dalam bentuk yang berbeda. Sistem dapat diperbaiki berkali-kali, tetapi manusia yang mengisi sistem tersebut tetap membawa kebiasaan yang terbentuk sejak berada di lingkungan keluarga.

Menyelamatkan keluarga karena itu bukan sekadar urusan kehidupan pribadi. Menyelamatkan keluarga merupakan agenda strategis dalam membangun negara. Negara yang kuat tidak lahir hanya karena memiliki konstitusi yang baik, tetapi karena memiliki keluarga-keluarga yang mampu melahirkan manusia yang berintegritas. Negara yang adil tidak hanya dibentuk oleh lembaga peradilan yang kuat, tetapi juga oleh keluarga yang mengajarkan kejujuran sejak usia dini. Negara yang berdaulat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh keluarga yang menanamkan kecintaan kepada bangsa, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Di sinilah makna *Save Nusantara* memperoleh kedalaman yang berbeda dibandingkan pembahasan sebelumnya. Jika *Restore Indonesia* mengajak bangsa memperbaiki cara berpikir, dan *Free Indonesia* mengajak bangsa memperbaiki desain negara, maka *Save Nusantara* mengajak bangsa memperbaiki manusia yang

akan menghidupkan seluruh sistem tersebut. Perubahan yang bersifat struktural memang sangat penting, tetapi perubahan struktural hanya akan bertahan apabila ditopang oleh manusia yang memiliki karakter kuat. Karakter tersebut tidak lahir secara tiba-tiba ketika seseorang menjadi pejabat, menjadi hakim, menjadi anggota legislatif, ataupun menjadi pemimpin bangsa. Karakter lahir jauh sebelum seluruh jabatan tersebut hadir, yaitu ketika seseorang bertumbuh di dalam keluarganya.

Oleh sebab itu, keluarga harus dipandang sebagai investasi peradaban yang paling mendasar. Rumah yang dipenuhi kasih sayang, keteladanan, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sesungguhnya sedang membangun negara, meskipun tidak pernah menyusun undang-undang ataupun merancang kebijakan publik. Sebaliknya, rumah yang kehilangan arah moral sedang melemahkan negara, meskipun seluruh institusi negara tetap bekerja sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, masa depan Nusantara tidak pertama-tama ditentukan oleh apa yang terjadi di ruang-ruang kekuasaan, melainkan oleh apa yang terjadi di ruang-ruang keluarga. Sebab dari rumah-rumah sederhana itulah lahir manusia yang kelak akan menjadi guru, hakim, tentara, ulama, budayawan, ilmuwan, pengusaha, negarawan, dan seluruh pribadi yang menentukan arah perjalanan bangsa. Dengan demikian, menyelamatkan keluarga sesungguhnya adalah langkah pertama untuk menyelamatkan Nusantara.

20.2. Rumah adalah Sekolah Pertama

Sebelum seorang anak mengenal ruang kelas, buku pelajaran, guru, ataupun kurikulum pendidikan, seorang anak terlebih dahulu mengenal rumah. Sebelum memahami huruf, angka, atau ilmu pengetahuan, seorang anak terlebih dahulu belajar mengenal kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, penghormatan, serta cara memperlakukan orang lain. Proses tersebut berlangsung secara alami, bahkan jauh sebelum seorang anak mampu membedakan mana pelajaran formal dan mana pembelajaran kehidupan. Karena itu, apabila keluarga dipahami sebagai fondasi peradaban, maka rumah merupakan sekolah pertama tempat peradaban mulai diajarkan. Tidak ada lembaga pendidikan mana pun yang mampu menggantikan pengalaman pertama yang diperoleh seorang anak di dalam rumah.

Kesadaran mengenai rumah sebagai sekolah pertama memiliki arti yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Selama ini pembicaraan mengenai pendidikan sering kali terlalu berpusat pada sekolah, perguruan tinggi, kurikulum, metode belajar, dan berbagai kebijakan pendidikan. Seluruh aspek tersebut memang sangat penting, tetapi semuanya baru bekerja setelah seorang anak melewati fase pendidikan yang paling menentukan, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga. Sekolah menerima anak yang telah membawa kebiasaan, karakter, bahasa, cara berpikir, serta nilai-nilai yang dibentuk di rumah. Guru dapat memperkaya pengetahuan, tetapi pembentukan

watak telah dimulai jauh sebelum proses belajar formal berlangsung.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, pendidikan tidak pertama-tama dipahami sebagai proses memindahkan pengetahuan, melainkan sebagai proses membentuk manusia. Pengetahuan dapat diperoleh melalui buku, teknologi, maupun pengalaman hidup. Akan tetapi karakter, akhlak, integritas, dan kebijaksanaan tidak dapat dibentuk hanya melalui penyampaian informasi. Seluruh nilai tersebut tumbuh melalui keteladanan yang terus-menerus dialami dalam kehidupan sehari-hari. Rumah menjadi ruang pertama tempat seorang anak melihat bagaimana orang tua berbicara, menyelesaikan persoalan, memperlakukan sesama, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan. Seluruh pengalaman tersebut perlahan membentuk cara berpikir yang kemudian dibawa ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Analogi yang digunakan dalam buku ini kembali memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara keluarga dan pembangunan peradaban. Dalam glosarium telah dijelaskan bahwa Peradaban Nusantara dipahami sebagai *operating system* yang membentuk cara hidup bangsa Indonesia. Namun *operating system* tersebut tidak dipasang ketika seseorang memasuki dunia kerja atau ketika seseorang menjadi pejabat negara. Proses instalasi dimulai sejak kehidupan keluarga berlangsung. Rumah menjadi ruang pertama tempat nilai-nilai peradaban ditanamkan. Di sanalah seorang anak mulai belajar menghormati orang yang

lebih tua, menyayangi yang lebih muda, berbagi dengan saudara, memegang janji, mengakui kesalahan, meminta maaf, memaafkan orang lain, dan memahami bahwa kehidupan tidak hanya berpusat pada kepentingan diri sendiri. Seluruh pengalaman sederhana tersebut sesungguhnya merupakan fondasi dari kehidupan berbangsa yang jauh lebih besar.

Karena itu, rumah tidak boleh dipahami hanya sebagai tempat beristirahat setelah bekerja atau tempat berlindung dari cuaca. Rumah adalah ruang pendidikan yang paling mendasar. Dinding rumah mungkin tidak dipenuhi papan tulis, tetapi setiap percakapan menjadi pelajaran. Ruang tamu mungkin tidak memiliki meja guru, tetapi setiap sikap orang tua menjadi contoh yang diamati oleh anak-anak. Tidak ada jadwal pelajaran yang tertulis, tetapi setiap hari berlangsung proses pendidikan yang terus membentuk kepribadian. Bahkan ketika orang tua merasa sedang tidak mengajarkan apa pun, sesungguhnya seorang anak tetap belajar melalui apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan di dalam rumah.

Inilah yang membedakan pendidikan keluarga dengan pendidikan formal. Sekolah memiliki jam belajar yang terbatas. Rumah menjalankan pendidikan sepanjang waktu. Sekolah menyampaikan materi tertentu sesuai kurikulum. Rumah membentuk cara memandang kehidupan secara menyeluruh. Sekolah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Rumah membangun disiplin hidup. Sekolah dapat mengukur keberhasilan melalui nilai akademik, sedangkan rumah membangun kualitas manusia yang sering kali tidak

dapat diukur dengan angka. Karena itu, ketika rumah kehilangan fungsi pendidikannya, sekolah akan menghadapi beban yang jauh lebih berat daripada yang seharusnya dipikul.

Fenomena tersebut semakin terlihat pada kehidupan modern. Banyak keluarga menyerahkan hampir seluruh proses pendidikan kepada sekolah. Orang tua merasa tugas utama hanyalah menyediakan biaya pendidikan, sementara pembentukan karakter dianggap menjadi tanggung jawab guru. Pada saat yang sama, sekolah justru berharap keluarga telah menanamkan nilai-nilai dasar sebelum anak memasuki lingkungan pendidikan formal. Akibatnya terjadi kekosongan yang tidak disadari. Rumah menganggap sekolah sebagai pendidik utama, sedangkan sekolah menganggap rumah sebagai tempat pembentukan karakter pertama. Di antara keduanya, anak kehilangan ruang yang utuh untuk bertumbuh sebagai manusia yang berkarakter.

Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah mata pelajaran atau memperbaiki kurikulum. Pendidikan karakter bukan terutama persoalan materi ajar, melainkan persoalan lingkungan hidup. Seorang anak lebih mudah memahami arti kejujuran ketika melihat orang tua bersikap jujur daripada mendengarkan ceramah tentang kejujuran. Seorang anak lebih mudah memahami arti tanggung jawab ketika melihat orang tua menepati janji daripada membaca definisi tanggung jawab dalam buku pelajaran. Nilai memperoleh kekuatannya ketika dihidupkan, bukan hanya ketika dijelaskan.

Dalam konteks pembangunan bangsa, rumah yang menjalankan fungsi sebagai sekolah pertama sesungguhnya sedang membangun negara dari lapisan yang paling mendasar. Seorang anak yang dibiasakan menghormati aturan di rumah akan lebih mudah menghormati hukum ketika dewasa. Seorang anak yang dibiasakan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kecil akan lebih siap memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang anak yang dibesarkan dalam budaya musyawarah akan lebih mampu menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan. Dengan demikian, rumah sedang mempersiapkan warga negara jauh sebelum negara mulai mengenal anak tersebut melalui administrasi kependudukan, sekolah, ataupun berbagai institusi publik lainnya.

Dalam kerangka *Save Nusantara*, memulihkan fungsi rumah sebagai sekolah pertama merupakan investasi peradaban yang tidak tergantikan. Negara dapat membangun ribuan sekolah baru, memperbarui kurikulum, meningkatkan kualitas guru, dan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan modern. Seluruh langkah tersebut akan memberikan manfaat yang besar apabila ditopang oleh rumah-rumah yang tetap menjalankan fungsi pendidikannya. Sebaliknya, apabila rumah kehilangan peran sebagai sekolah pertama, maka berbagai kebijakan pendidikan hanya akan memperbaiki sebagian kecil dari persoalan yang sesungguhnya berakar pada kehidupan keluarga.

Pada akhirnya, masa depan Nusantara tidak hanya ditentukan oleh apa yang diajarkan di ruang kelas,

tetapi juga oleh apa yang dihidupkan di ruang keluarga. Rumah menjadi sekolah pertama tempat manusia belajar mengenal Tuhan, menghormati sesama, mencintai bangsa, dan memahami tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Dari rumah lahir karakter yang kemudian dibawa ke sekolah, ke tempat kerja, ke ruang pemerintahan, hingga ke seluruh sendi kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, ketika bangsa Indonesia ingin membangun peradaban yang kuat, perhatian pertama harus kembali diarahkan kepada rumah. Sebab di sanalah pendidikan yang paling menentukan dimulai, dan di sanalah masa depan Nusantara sesungguhnya sedang dibentuk setiap hari.

20.3. Orang Tua sebagai Penjaga *Operating System* Keluarga

Setelah memahami bahwa keluarga merupakan fondasi peradaban dan rumah adalah sekolah pertama bagi setiap manusia, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Siapakah yang bertanggung jawab menjaga agar rumah tetap menjadi ruang tumbuh yang sehat bagi lahirnya peradaban? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua. Dalam perspektif Sekolah Negarawan, orang tua bukan sekadar pihak yang melahirkan dan membesarkan anak, bukan pula hanya pencari nafkah atau pengelola kebutuhan rumah tangga. Orang tua adalah penjaga *operating system* keluarga, yaitu pihak yang memastikan bahwa seluruh nilai, budaya, akhlak, dan cara hidup yang berkembang di dalam keluarga tetap bergerak menuju tujuan yang benar.

Analogi yang telah digunakan sepanjang buku ini memberikan kerangka yang sangat jelas untuk memahami posisi tersebut. Pancasila merupakan *kernel* bangsa yang menjadi sumber nilai dasar kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan *firmware* yang mengatur bagaimana negara bekerja. Peradaban Nusantara merupakan *operating system* yang membentuk karakter kehidupan masyarakat. Namun *operating system* tidak akan pernah berjalan dengan baik apabila tidak ada pihak yang merawat, memperbarui, dan menjaga agar seluruh komponennya tetap bekerja secara selaras. Dalam lingkup negara, tanggung jawab tersebut dijalankan oleh berbagai institusi kenegaraan. Dalam lingkup keluarga, tanggung jawab tersebut berada di tangan orang tua.

Karena itu, fungsi utama orang tua sesungguhnya bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik anak. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan formal, dan berbagai kebutuhan materi memang merupakan bagian penting dari tanggung jawab keluarga. Namun seluruh kebutuhan tersebut hanyalah sarana untuk mendukung pertumbuhan manusia. Tujuan yang jauh lebih besar adalah membentuk manusia yang memiliki karakter, integritas, kasih sayang, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Apabila seluruh kebutuhan materi terpenuhi tetapi karakter tidak bertumbuh, maka keluarga hanya berhasil membesarkan tubuh, tetapi gagal membangun manusia.

Dalam kehidupan modern, fungsi orang tua sering kali bergeser tanpa disadari. Kesibukan bekerja membuat keberhasilan orang tua lebih sering diukur

dari kemampuan menyediakan fasilitas terbaik bagi anak. Rumah menjadi semakin nyaman, sekolah menjadi semakin berkualitas, teknologi menjadi semakin lengkap, dan kebutuhan ekonomi semakin terpenuhi. Namun pada saat yang sama, waktu untuk berbicara bersama semakin berkurang. Kesempatan mendengarkan cerita anak semakin sempit. Keteladanan sehari-hari semakin jarang terlihat karena sebagian besar kehidupan keluarga dijalani dalam ritme yang serba terburu-buru. Tanpa disadari, fungsi sebagai penjaga *operating system* keluarga mulai tergeser oleh fungsi sebagai penyedia kebutuhan material.

Padahal *operating system* keluarga tidak dibangun melalui fasilitas. *Operating system* keluarga dibangun melalui nilai yang terus dihidupkan setiap hari. Seorang anak belajar mengenai kejujuran bukan pertama kali dari buku, tetapi dari melihat bagaimana orang tua bersikap ketika menghadapi persoalan. Seorang anak belajar mengenai tanggung jawab bukan dari nasihat yang panjang, tetapi dari kebiasaan melihat orang tua menepati janji. Seorang anak belajar mengenai kasih sayang bukan dari definisi yang dihafalkan, tetapi dari cara orang tua memperlakukan setiap anggota keluarga dengan penuh penghormatan. Seluruh pengalaman tersebut secara perlahan membentuk *operating system* yang akan terus bekerja dalam kehidupan anak hingga dewasa.

Dalam dunia teknologi dikenal istilah bahwa sistem yang baik tidak hanya dipasang sekali, tetapi harus terus dipelihara agar tetap berjalan dengan benar. Demikian pula keluarga. Nilai tidak cukup diajarkan

satu kali. Karakter tidak cukup dibentuk melalui satu peristiwa. Moral tidak tumbuh karena satu ceramah. Seluruhnya membutuhkan proses yang berlangsung terus-menerus melalui kebiasaan, dialog, keteladanan, dan kehidupan bersama. Orang tua menjadi pihak yang memastikan bahwa proses tersebut tidak pernah berhenti. Setiap hari sesungguhnya merupakan proses pembaruan terhadap *operating system* keluarga.

Peran tersebut menjadi semakin penting pada era digital ketika anak-anak menerima pengaruh dari berbagai arah secara bersamaan. Media sosial, televisi, permainan digital, lingkungan pergaulan, hingga berbagai platform informasi menghadirkan ribuan nilai yang masuk ke dalam kehidupan keluarga setiap hari. Tidak seluruh nilai tersebut sejalan dengan karakter bangsa Indonesia. Tidak seluruhnya mendukung tumbuhnya manusia yang berintegritas. Dalam situasi seperti ini, orang tua tidak cukup hanya menjadi pengawas. Orang tua harus menjadi penjaga yang mampu memilah, menjelaskan, dan menuntun anak agar mampu membedakan mana nilai yang memperkuat kehidupan dan mana yang justru merusaknya.

Dalam glosarium buku ini, berbagai pengaruh yang merusak sistem diibaratkan sebagai *malware*. Analogi tersebut tidak hanya berlaku bagi negara, tetapi juga relevan bagi keluarga. Keserakahan, individualisme yang berlebihan, budaya kekerasan, kebohongan, penyalahgunaan teknologi, hingga berbagai bentuk degradasi moral dapat dipahami sebagai *malware* yang perlahan mengganggu *operating*

system keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengenali ancaman tersebut sebelum berkembang menjadi kebiasaan. Tugas tersebut tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sekolah ataupun negara karena keluarga merupakan ruang pertama tempat berbagai pengaruh tersebut bertemu dengan kehidupan anak.

Perlu dipahami pula bahwa menjaga *operating system* keluarga bukan berarti menciptakan keluarga yang tertutup terhadap perubahan zaman. Sebaliknya, keluarga harus mampu bertumbuh mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika kehidupan. Namun perkembangan tersebut harus tetap berpijak pada nilai yang menjadi fondasi keluarga. Teknologi dapat berubah. Cara belajar dapat berubah. Cara bekerja dapat berubah. Akan tetapi kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, penghormatan kepada sesama, serta pengabdian kepada Tuhan tidak pernah kehilangan relevansinya. Orang tua menjadi penjaga agar perubahan yang terjadi tidak menghilangkan nilai yang menjadi inti kehidupan keluarga.

Peran ini juga menempatkan orang tua sebagai pemimpin pertama yang dikenal oleh setiap manusia. Kepemimpinan yang dimaksud bukan kepemimpinan karena kekuasaan, melainkan kepemimpinan melalui keteladanan. Seorang anak tidak pertama kali mengenal arti kepemimpinan dari presiden, gubernur, atau kepala daerah. Seorang anak mengenal kepemimpinan melalui ayah dan ibu yang setiap hari mengarahkan kehidupan keluarga. Dari sanalah lahir pemahaman tentang

bagaimana menggunakan kewenangan dengan penuh tanggung jawab, bagaimana menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, bagaimana meminta maaf ketika melakukan kesalahan, serta bagaimana menghormati martabat setiap manusia. Seluruh pengalaman tersebut menjadi dasar bagi cara seseorang memandang kepemimpinan ketika memasuki kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kerangka *Save Nusantara*, orang tua sesungguhnya sedang menjalankan salah satu tugas kenegaraan yang paling mendasar, meskipun tidak pernah memegang jabatan publik. Dari tangan orang tua lahir generasi yang kelak akan menjadi guru, ilmuwan, hakim, prajurit, budayawan, pengusaha, ulama, birokrat, maupun negarawan. Apabila *operating system* keluarga dibangun dengan baik, bangsa akan memperoleh manusia-manusia yang mampu menjaga negara. Sebaliknya, apabila *operating system* keluarga mengalami kerusakan, negara harus menghadapi berbagai persoalan yang sesungguhnya berakar pada kegagalan pembentukan karakter di dalam rumah.

Oleh sebab itu, menyelamatkan Nusantara tidak dapat dimulai hanya dari ruang-ruang kekuasaan. Penyelamatan Nusantara harus dimulai dari ruang keluarga, melalui orang tua yang menyadari bahwa tugas terbesar bukan sekadar membesarkan anak hingga dewasa, melainkan menjaga *operating system* keluarga agar tetap menghidupkan nilai-nilai yang akan membentuk manusia beradab. Ketika setiap keluarga mampu menjalankan fungsi tersebut, rumah-rumah di seluruh Nusantara akan menjadi pusat lahirnya

generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas. Dari rumah-rumah itulah peradaban Indonesia akan terus bertumbuh, dan dari rumah-rumah itulah masa depan bangsa akan memperoleh penjaga-penjaga terbaiknya.

20.4. Moral Tidak Diajarkan, Tetapi Dihidupkan

Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi dalam memahami pendidikan adalah menganggap bahwa moral dapat dipindahkan kepada seorang anak sebagaimana pengetahuan dipindahkan melalui proses belajar di ruang kelas. Banyak orang tua meyakini bahwa selama anak telah diberi nasihat, diajarkan mana yang benar dan mana yang salah, atau dimasukkan ke lembaga pendidikan yang baik, maka pembentukan karakter telah selesai dilakukan. Padahal pengalaman hidup menunjukkan kenyataan yang berbeda. Pengetahuan tentang moral belum tentu melahirkan manusia yang bermoral. Seseorang dapat memahami definisi kejujuran, tetapi tetap memilih berbohong. Seseorang dapat menghafal pentingnya tanggung jawab, tetapi tetap menghindari kewajiban. Seseorang dapat mengetahui bahwa korupsi adalah perbuatan yang salah, tetapi tetap melakukan korupsi ketika memiliki kesempatan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa moral bukan sekadar persoalan mengetahui, melainkan persoalan menghidupi nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, dalam perspektif Sekolah Negarawan, moral tidak pertama-tama diajarkan melalui kata-kata, melainkan melalui kehidupan yang dijalani bersama.

Rumah menjadi ruang pertama tempat seorang anak memahami makna kejujuran bukan karena mendengar definisinya, tetapi karena melihat orang tua berkata jujur meskipun menghadapi kesulitan. Rumah menjadi tempat pertama seorang anak memahami arti tanggung jawab bukan karena membaca buku tentang etika, tetapi karena menyaksikan setiap anggota keluarga menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesungguhan. Rumah menjadi tempat pertama seorang anak mengenal kasih sayang bukan melalui teori, tetapi melalui pengalaman dicintai, dihargai, didengarkan, dan diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Nilai memperoleh kekuatannya ketika diwujudkan dalam tindakan, bukan ketika berhenti sebagai kalimat yang diucapkan.

Proses tersebut sesungguhnya merupakan bentuk paling nyata dari *moral transmission*. Sebagaimana pengetahuan dapat diwariskan melalui pendidikan, moral diwariskan melalui keteladanan. Seorang anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat daripada dari apa yang didengar. Cara orang tua memperlakukan tetangga, menghormati orang yang lebih tua, berbicara kepada pasangan, menyikapi perbedaan pendapat, menyelesaikan konflik, menggunakan harta, bahkan menghadapi kegagalan, seluruhnya menjadi pelajaran yang secara perlahan membentuk struktur moral dalam diri anak. Tanpa disadari, kehidupan keluarga menjadi ruang tempat nilai-nilai tersebut berpindah dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Dalam glosarium buku ini telah dijelaskan bahwa Peradaban Nusantara merupakan *operating system* yang

membentuk cara hidup masyarakat. Namun *operating system* tersebut tidak dibangun melalui hafalan. Sebuah *operating system* bekerja karena seluruh komponennya saling terhubung dan berjalan secara konsisten. Hal yang sama berlaku pada moral. Moral tidak terbentuk karena seseorang mampu menghafal daftar nilai-nilai kebajikan. Moral terbentuk karena nilai tersebut terus dipraktikkan hingga menjadi kebiasaan, kemudian berkembang menjadi karakter, dan akhirnya menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Dengan demikian, keluarga tidak sekadar mengajarkan nilai, tetapi menginstal cara hidup yang akan terus bekerja sepanjang kehidupan.

Inilah sebabnya mengapa keteladanan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada nasihat. Ketika orang tua meminta anak untuk jujur tetapi terbiasa berbohong dalam kehidupan sehari-hari, anak tidak sedang belajar dari nasihat, melainkan dari perilaku yang dilihat setiap hari. Ketika orang tua mengajarkan kesederhanaan tetapi mempertontonkan gaya hidup yang berlebihan, anak menangkap pesan yang berbeda dari kata-kata yang diucapkan. Ketika orang tua meminta anak menghormati orang lain tetapi memperlihatkan kebiasaan merendahkan orang lain, proses *moral transmission* justru sedang berlangsung ke arah yang berlawanan. Anak tidak mengalami kebingungan karena terlalu sedikit nasihat, melainkan karena terlalu banyak pertentangan antara perkataan dan perbuatan.

Dalam kehidupan modern, tantangan tersebut menjadi semakin besar. Anak-anak hidup di tengah arus

informasi yang hampir tidak memiliki batas. Berbagai media menghadirkan tokoh, gaya hidup, dan nilai-nilai yang sering kali bertentangan dengan budaya keluarga. Dalam situasi seperti itu, rumah tidak mungkin bersaing dengan dunia luar melalui larangan semata. Rumah hanya akan tetap menjadi pusat pembentukan moral apabila keluarga mampu menghadirkan pengalaman hidup yang lebih kuat daripada pengaruh lingkungan. Seorang anak yang merasakan kehangatan keluarga akan lebih mudah membedakan antara kasih sayang yang sejati dan perhatian semu yang ditawarkan oleh dunia luar. Seorang anak yang tumbuh dalam budaya kejujuran akan lebih memiliki daya tahan ketika berhadapan dengan lingkungan yang menganggap kebohongan sebagai sesuatu yang biasa.

Perspektif tersebut juga menjelaskan mengapa pembentukan moral tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sekolah ataupun negara. Sekolah dapat menjelaskan nilai-nilai kehidupan melalui kurikulum. Negara dapat membangun regulasi untuk menjaga ketertiban sosial. Tokoh agama dapat menyampaikan ajaran moral melalui dakwah dan pendidikan. Seluruh institusi tersebut memiliki peran yang sangat penting. Namun tidak satu pun mampu menggantikan pengalaman hidup yang dialami seorang anak setiap hari di dalam rumah. Moral memperoleh akar yang paling kuat ketika anak melihat bahwa nilai yang diajarkan benar-benar menjadi cara hidup keluarga.

Dalam kerangka *Save Nusantara*, pembahasan mengenai moral tidak berhenti pada kepentingan

pribadi atau keluarga. Moral memiliki hubungan langsung dengan masa depan bangsa. Korupsi tidak lahir secara tiba-tiba ketika seseorang menduduki jabatan publik. Penyalahgunaan kekuasaan tidak muncul hanya karena adanya kesempatan. Ketidakjujuran, ketidakpedulian, dan penyalahgunaan amanah sering kali merupakan kebiasaan kecil yang dibiarkan tumbuh sejak masa kanak-kanak. Sebaliknya, integritas yang dimiliki seorang negarawan, hakim, guru, prajurit, ilmuwan, maupun pemimpin masyarakat biasanya berakar pada nilai-nilai yang telah dihidupkan sejak berada di lingkungan keluarga. Dengan demikian, setiap keluarga sesungguhnya sedang menentukan kualitas moral bangsa pada masa yang akan datang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan peradaban tidak pernah dimulai dari ruang sidang, kantor pemerintahan, ataupun lembaga negara. Pembangunan peradaban dimulai dari ruang keluarga yang setiap hari menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika seorang anak dibiasakan mengucapkan terima kasih, meminta maaf, menghormati orang lain, bertanggung jawab atas kesalahan, serta membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan, keluarga sesungguhnya sedang membangun fondasi peradaban yang jauh lebih kuat daripada sekadar membangun infrastruktur fisik. Nilai-nilai sederhana tersebut akan terus mengikuti kehidupan seseorang hingga memasuki sekolah, dunia kerja, masyarakat, bahkan ketika memegang amanah sebagai penyelenggara negara.

Oleh sebab itu, menyelamatkan Nusantara tidak cukup dilakukan melalui perubahan sistem pemerintahan ataupun pembaruan konstitusi. Seluruh perubahan tersebut membutuhkan manusia yang memiliki kompas moral yang benar. Kompas tersebut tidak lahir dari teori, tetapi dari kehidupan yang dihidupkan setiap hari di dalam keluarga. Ketika rumah menjadi tempat nilai-nilai dijalankan secara konsisten, anak-anak tidak hanya belajar tentang moral, tetapi bertumbuh menjadi manusia yang menjadikan moral sebagai bagian dari dirinya. Dari rumah-rumah seperti itulah akan lahir generasi yang mampu menjaga bangsa dengan integritas, mengelola negara dengan amanah, dan meneruskan peradaban Nusantara kepada generasi berikutnya bukan hanya melalui kata-kata, melainkan melalui kehidupan yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang diyakininya.

20.5. Ketika Rumah Kehilangan Arah

Peradaban yang besar tidak pernah runtuh secara tiba-tiba. Keruntuhan biasanya dimulai dari perubahan-perubahan kecil yang pada awalnya tampak sepele, kemudian berkembang menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya yang akhirnya membentuk arah kehidupan sebuah masyarakat. Hal yang sama terjadi pada keluarga. Rumah tidak serta-merta kehilangan fungsi sebagai tempat lahirnya peradaban dalam satu malam. Kehilangan arah berlangsung perlahan, hampir tidak terasa, hingga pada suatu saat keluarga masih berdiri secara fisik, tetapi telah kehilangan ruh yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Dinding rumah tetap

kokoh, meja makan masih tersedia, kamar-kamar masih terisi, namun fungsi rumah sebagai tempat membangun manusia mulai menghilang sedikit demi sedikit.

Fenomena tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia pada era modern. Kemajuan teknologi telah menghadirkan berbagai kemudahan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Komunikasi menjadi lebih cepat, akses terhadap ilmu pengetahuan semakin terbuka, dan berbagai pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Namun pada saat yang sama, kemajuan tersebut membawa perubahan besar terhadap kehidupan keluarga. Rumah yang dahulu menjadi ruang percakapan perlahan berubah menjadi ruang yang dipenuhi layar. Setiap anggota keluarga berada di bawah atap yang sama, tetapi hidup dalam dunia digital yang berbeda. Kebersamaan masih terlihat secara fisik, tetapi hubungan antarmanusia semakin berjarak secara emosional.

Padahal sepanjang sejarah, kekuatan keluarga selalu bertumpu pada kedekatan antaranggotanya. Rumah bukan hanya tempat berkumpul, melainkan tempat bertumbuh bersama. Di dalam rumah, setiap persoalan dibicarakan, setiap kegembiraan dirayakan, setiap kesedihan dibagi, dan setiap pengalaman menjadi pelajaran bersama. Dialog menjadi jembatan yang menghubungkan pengalaman hidup dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Ketika dialog tersebut mulai menghilang, proses *value transmission* dan *moral transmission* yang telah dibahas pada bagian sebelumnya ikut melemah. Nilai tidak lagi diwariskan

melalui percakapan yang hangat, tetapi perlahan digantikan oleh algoritma media sosial, tayangan hiburan, atau pengaruh lingkungan yang belum tentu memiliki arah yang sama dengan nilai-nilai keluarga.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Peradaban Nusantara merupakan *operating system* yang mengatur cara hidup masyarakat. Sebuah *operating system* hanya dapat bekerja dengan baik apabila proses pembaruannya tetap berada dalam kendali pemilik sistem. Namun ketika pembaruan dilakukan oleh pihak luar tanpa kendali, sistem dapat berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari tujuan awalnya. Analogi tersebut sangat relevan untuk memahami kondisi keluarga masa kini. Ketika orang tua berhenti menjadi penjaga *operating system* keluarga, ruang tersebut perlahan diisi oleh berbagai pengaruh eksternal yang setiap hari masuk melalui telepon genggam, media sosial, permainan digital, budaya populer, hingga berbagai bentuk hiburan yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada anak-anak.

Persoalan sesungguhnya bukan terletak pada teknologi. Teknologi hanyalah alat. Sama seperti negara yang dapat digunakan untuk menghadirkan keadilan ataupun menjadi alat penindasan, teknologi dapat menjadi sarana pendidikan maupun sumber kerusakan, bergantung pada siapa yang mengendalikan dan untuk tujuan apa teknologi tersebut digunakan. Masalah muncul ketika keluarga kehilangan kemampuan mengarahkan penggunaan teknologi sehingga teknologi justru mengambil alih fungsi keluarga. Anak

lebih percaya kepada pencarian internet daripada bertanya kepada orang tua. Nasihat keluarga kalah oleh pendapat seorang *influencer*. Pengakuan dari media sosial menjadi lebih penting daripada penghargaan dari keluarga. Pada titik tersebut, rumah mulai kehilangan otoritas moral sebagai sekolah pertama kehidupan.

Perubahan lain yang tidak kalah penting adalah bergesernya ukuran keberhasilan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang tanpa sadar mulai mengukur keberhasilan hanya dari aspek ekonomi. Orang tua bekerja semakin keras agar mampu menyediakan rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih baik, sekolah yang lebih mahal, dan fasilitas yang semakin lengkap. Seluruh usaha tersebut tentu merupakan bentuk tanggung jawab yang patut dihargai. Akan tetapi ketika keberhasilan keluarga hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan materi, ruang untuk membangun karakter perlahan semakin menyempit. Waktu bersama dianggap kurang produktif dibandingkan waktu bekerja. Percakapan keluarga digantikan oleh jadwal yang padat. Kehangatan rumah perlahan berubah menjadi rutinitas yang berjalan mekanis.

Dalam keadaan seperti itu, anak-anak sesungguhnya tidak sedang kekurangan fasilitas, tetapi mulai kehilangan arah kehidupan. Banyak generasi muda tumbuh dengan akses terhadap teknologi yang luar biasa, tetapi mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan keluarga. Pengetahuan berkembang sangat cepat, tetapi kedewasaan emosional tidak selalu bertumbuh dengan kecepatan yang sama.

Informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik, tetapi kebijaksanaan tetap membutuhkan proses panjang yang hanya dapat lahir melalui pengalaman hidup dan keteladanan. Akibatnya, tidak sedikit manusia yang sangat cerdas secara intelektual, tetapi rapuh dalam menghadapi tekanan hidup karena tidak memiliki fondasi karakter yang cukup kuat.

Gejala tersebut pada akhirnya tidak hanya memengaruhi kehidupan keluarga, tetapi juga kehidupan bangsa. Negara pada dasarnya merupakan kumpulan keluarga yang hidup dalam satu sistem kenegaraan. Ketika rumah-rumah kehilangan arah, dampaknya akan muncul di sekolah, lingkungan kerja, birokrasi, lembaga penegak hukum, bahkan sampai kepada penyelenggaraan negara. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, intoleransi, penyebaran kebencian, dan berbagai bentuk degradasi moral sering kali merupakan gejala yang tampak di permukaan. Akar persoalannya dapat berawal jauh sebelumnya, yaitu ketika keluarga gagal menjalankan fungsi sebagai tempat pembentukan karakter. Dengan kata lain, krisis keluarga pada akhirnya berkembang menjadi krisis peradaban.

Analogi yang telah digunakan sejak bagian awal buku ini kembali memberikan pemahaman yang menarik. Dalam dunia teknologi, sebuah sistem yang kehilangan arah biasanya tidak langsung mengalami kerusakan total. Gangguan dimulai dari kesalahan kecil yang dibiarkan terus berlangsung, kemudian muncul *bug*, diikuti penurunan kinerja, masuknya *malware*, hingga akhirnya sistem tidak lagi mampu menjalankan

fungsi sebagaimana mestinya. Hal yang sama dapat terjadi pada keluarga. Ketika kebiasaan berdialog mulai hilang, ketika keteladanan semakin jarang terlihat, ketika kebersamaan digantikan oleh kesibukan masing-masing, dan ketika nilai tidak lagi menjadi pusat kehidupan keluarga, *operating system* keluarga perlahan mengalami degradasi. Kerusakan tersebut mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya akan muncul bertahun-tahun kemudian melalui cara berpikir dan cara hidup generasi berikutnya.

Namun keadaan tersebut bukan alasan untuk bersikap pesimis. Sebagaimana negara yang dapat dipulihkan melalui proses *restore* dan *reinstall* sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, keluarga juga dapat menemukan kembali arah yang benar. Langkah pertama selalu dimulai dari kesadaran bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat pembentukan manusia. Ketika keluarga kembali menjadikan dialog sebagai budaya, keteladanan sebagai metode pendidikan, kasih sayang sebagai bahasa kehidupan, serta nilai sebagai dasar dalam setiap keputusan, *operating system* keluarga akan kembali bekerja sebagaimana mestinya. Rumah kembali menjadi tempat setiap anggota keluarga bertumbuh bersama, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara intelektual, emosional, spiritual, dan moral.

Oleh sebab itu, *Save Nusantara* tidak dimulai dengan membangun lebih banyak gedung atau menyusun lebih banyak peraturan. *Save Nusantara* dimulai dengan mengembalikan arah rumah-rumah Indonesia. Ketika setiap keluarga kembali menyadari

fungsi sebagai pusat lahirnya peradaban, bangsa ini sedang membangun benteng yang paling kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Dari rumah yang memiliki arah akan lahir manusia yang memiliki arah. Dari manusia yang memiliki arah akan lahir masyarakat yang memiliki arah. Dan dari masyarakat yang memiliki arah akan tumbuh negara yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga kokoh karena ditopang oleh peradaban yang hidup di dalam setiap keluarga Nusantara.

20.6. Menyelamatkan Bangsa Dimulai dari Rumah

Selama bertahun-tahun, pembangunan bangsa sering dipahami sebagai pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Ketika muncul persoalan kemiskinan, perhatian diarahkan kepada kebijakan ekonomi. Ketika kualitas pendidikan menurun, solusi dicari melalui perubahan kurikulum. Ketika korupsi semakin meluas, harapan diletakkan pada pembentukan lembaga baru atau pengetatan regulasi. Ketika moral masyarakat mengalami kemerosotan, tuntutan diarahkan kepada pemerintah agar membuat aturan yang lebih tegas. Seluruh langkah tersebut memang memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan negara. Namun terdapat satu kenyataan yang sering terlupakan, yaitu bahwa negara tidak pernah membangun manusia sejak awal kehidupannya. Negara baru berinteraksi dengan seseorang setelah keluarga lebih dahulu membentuk dasar kepribadian, cara berpikir, serta karakter yang akan dibawa sepanjang hidup. Oleh sebab itu, apabila

bangsa ingin diselamatkan secara menyeluruh, titik awal perubahannya tidak dapat hanya berada di ruang pemerintahan. Perubahan harus dimulai dari rumah.

Pemahaman tersebut sejalan dengan seluruh kerangka berpikir yang dibangun dalam buku ini. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa negara hanyalah instrumen yang dibentuk oleh rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Negara bukan pemilik bangsa, melainkan alat yang bekerja berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, kualitas negara selalu mengikuti kualitas manusia yang mengelolanya. Sebaik apa pun *firmware* konstitusi dirancang, sekuat apa pun kelembagaan negara dibangun, dan secanggih apa pun sistem administrasi dikembangkan, seluruhnya tetap dijalankan oleh manusia. Ketika manusia yang mengisi sistem kehilangan integritas, maka penyimpangan akan kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Sebaliknya, ketika manusia memiliki karakter yang kuat, sistem yang sederhana sekalipun dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itulah pembentukan manusia menjadi pekerjaan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar membangun institusi.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Peradaban Nusantara merupakan *operating system* yang membentuk cara hidup bangsa. *Operating system* tersebut tidak berjalan di gedung pemerintahan, tetapi hidup di tengah masyarakat melalui budaya, nilai, kebiasaan, dan karakter yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Rumah menjadi tempat pertama *operating system* tersebut diinstal.

Rumah pula yang menentukan apakah nilai-nilai yang menjadi fondasi bangsa tetap terjaga atau justru mulai mengalami degradasi. Oleh sebab itu, ketika keluarga menjalankan fungsi dengan baik, rumah sesungguhnya sedang memperkuat *operating system* bangsa. Sebaliknya, ketika keluarga kehilangan arah, kerusakan tidak berhenti pada kehidupan pribadi, tetapi perlahan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat hingga akhirnya memengaruhi kualitas penyelenggaraan negara.

Hubungan antara keluarga dan negara sering kali tidak terlihat karena dipisahkan oleh rentang waktu yang panjang. Seorang anak yang belajar menghargai kejujuran di rumah mungkin baru memperlihatkan buah pendidikan tersebut puluhan tahun kemudian ketika dipercaya mengelola keuangan negara. Seorang anak yang dibiasakan menghormati orang lain mungkin baru menunjukkan dampaknya ketika menjadi hakim yang mampu menegakkan keadilan tanpa membedakan status sosial. Seorang anak yang tumbuh dalam budaya musyawarah mungkin baru memperlihatkan hasilnya ketika menjadi pemimpin yang mengutamakan dialog daripada kekerasan. Proses tersebut berlangsung begitu panjang sehingga banyak orang tidak lagi menghubungkan kualitas seorang pemimpin dengan pendidikan yang diterima di lingkungan keluarga. Padahal akar dari berbagai keputusan besar sering kali telah ditanamkan sejak masa kanak-kanak.

Sebaliknya, berbagai persoalan bangsa juga memiliki akar yang serupa. Penyalahgunaan kekuasaan tidak muncul secara tiba-tiba ketika seseorang

memperoleh jabatan. Ketidakjujuran tidak lahir pada hari pertama seseorang memasuki dunia kerja. Kebiasaan menghindari tanggung jawab, meremehkan amanah, atau mengutamakan kepentingan pribadi biasanya telah tumbuh jauh sebelumnya melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak pernah diperbaiki. Oleh karena itu, pemberantasan berbagai persoalan bangsa tidak cukup dilakukan melalui penindakan setelah pelanggaran terjadi. Langkah yang jauh lebih strategis adalah membangun keluarga yang mampu melahirkan manusia berkarakter sehingga penyimpangan dapat dicegah sejak akar kehidupan.

Perspektif tersebut membawa perubahan besar dalam cara memandang pembangunan nasional. Selama ini pembangunan lebih sering diukur melalui pertumbuhan ekonomi, panjang jalan yang dibangun, jumlah investasi yang masuk, atau besarnya produk domestik bruto. Seluruh indikator tersebut memang penting untuk mengukur kemajuan material sebuah negara. Akan tetapi kemajuan peradaban tidak hanya ditentukan oleh angka-angka tersebut. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu melahirkan manusia yang jujur ketika tidak diawasi, bertanggung jawab ketika memperoleh kepercayaan, rendah hati ketika memiliki kekuasaan, dan tetap memegang prinsip ketika menghadapi godaan. Seluruh kualitas tersebut tidak dapat dibangun melalui proyek pembangunan fisik. Seluruhnya bertumbuh melalui kehidupan keluarga yang sehat.

Dalam kerangka *Save Nusantara*, rumah sesungguhnya merupakan pusat pembangunan

nasional yang paling mendasar. Ketika orang tua membiasakan anak menghormati waktu, keluarga sedang membangun budaya disiplin bangsa. Ketika anak diajarkan menjaga amanah, keluarga sedang membangun fondasi pemerintahan yang bersih. Ketika keluarga membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, rumah sedang menanamkan budaya demokrasi yang dewasa. Ketika anak dibesarkan dalam semangat gotong royong, keluarga sedang memperkuat modal sosial bangsa. Nilai-nilai tersebut mungkin tampak sederhana, tetapi justru menjadi fondasi yang menentukan kualitas kehidupan berbangsa dalam jangka panjang.

Pandangan ini juga mengingatkan bahwa setiap keluarga memiliki kontribusi terhadap masa depan Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, pendidikan, maupun kedudukan sosial. Tidak semua orang akan menjadi menteri, anggota legislatif, hakim, atau kepala daerah. Namun setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk melahirkan manusia yang suatu hari akan mengisi berbagai peran tersebut. Dengan demikian, rumah bukan sekadar ruang privat yang terpisah dari kehidupan negara. Rumah merupakan titik awal tempat masa depan bangsa sedang dipersiapkan setiap hari. Ketika satu keluarga berhasil membentuk manusia yang berintegritas, manfaatnya tidak berhenti pada keluarga tersebut, tetapi mengalir kepada masyarakat, negara, bahkan generasi yang belum lahir.

Pemahaman tersebut sekaligus memperluas makna patriotisme. Mencintai bangsa tidak selalu

diwujudkan melalui jabatan publik, pidato kenegaraan, ataupun pengabdian di medan perjuangan. Seorang ayah yang membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab sedang membangun Indonesia. Seorang ibu yang menanamkan kejujuran dan kasih sayang kepada anak-anak sedang memperkuat fondasi Nusantara. Sebuah keluarga yang membiasakan budaya membaca, berdialog, bermusyawarah, dan saling menghormati sesungguhnya sedang berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Pengabdian kepada negara dimulai dari kesungguhan menjalankan amanah di dalam rumah.

Pada akhirnya, menyelamatkan bangsa bukan hanya pekerjaan presiden, pemerintah, lembaga negara, ataupun para pemimpin masyarakat. Menyelamatkan bangsa adalah tanggung jawab seluruh keluarga Indonesia. Ketika setiap rumah kembali menjadi tempat lahirnya karakter, pusat pewarisan nilai, dan ruang bertumbuhnya manusia yang berintegritas, bangsa ini sedang membangun kekuatan yang tidak mudah digoyahkan oleh perubahan zaman. Dari rumah-rumah sederhana akan lahir guru yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ilmuwan yang memajukan peradaban, pengusaha yang beretika, hakim yang adil, prajurit yang setia kepada negara, ulama yang menuntun umat dengan hikmah, serta negarawan yang mengabdikan seluruh kemampuannya demi kepentingan rakyat.

Dengan demikian, *Save Nusantara* bukan sekadar seruan moral untuk memperbaiki kehidupan keluarga, melainkan sebuah strategi pembangunan peradaban

yang dimulai dari akar kehidupan manusia. Sebagaimana *Restore Indonesia* mengajak bangsa memperbaiki cara berpikir dan *Free Indonesia* mengajak bangsa memperbaiki desain sistem kenegaraan, maka *Save Nusantara* mengajak setiap keluarga Indonesia menyadari bahwa masa depan bangsa sesungguhnya sedang dibentuk setiap hari di dalam rumah. Ketika rumah-rumah Indonesia kembali menjadi pusat lahirnya manusia berkarakter, bangsa ini tidak hanya akan memiliki negara yang kuat, tetapi juga memiliki peradaban yang mampu bertahan, berkembang, dan diwariskan kepada generasi-generasi Nusantara di masa yang akan datang.

20.7. *Save Nusantara* Berawal dari Keluarga

Perjalanan panjang dalam buku ini dimulai dengan sebuah pertanyaan mendasar mengenai hakikat negara. Pembahasan kemudian berkembang menuju desain ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, konstitusi, kelembagaan negara, hingga gagasan tentang *Restore Indonesia* dan *Free Indonesia*. Seluruh pembahasan tersebut membawa satu kesimpulan penting bahwa negara hanyalah sebuah sistem yang dibangun untuk melayani rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Namun setelah seluruh desain negara berhasil dipahami dan diarahkan kembali kepada tujuan yang benar, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Untuk siapakah seluruh sistem tersebut dibangun? Jawabannya sederhana tetapi sangat mendasar, yaitu untuk manusia. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah negara pada akhirnya tidak ditentukan hanya oleh kualitas

sistemnya, tetapi oleh kualitas manusia yang hidup di dalamnya. Di sinilah makna *Save Nusantara* menemukan tempatnya. Menyelamatkan Nusantara pada hakikatnya adalah menyelamatkan manusia, dan penyelamatan manusia selalu dimulai dari keluarga.

Selama ini banyak bangsa di dunia berusaha memperbaiki kehidupan melalui perubahan pemerintahan, pembangunan ekonomi, atau reformasi birokrasi. Berbagai langkah tersebut memang dapat menghasilkan kemajuan yang nyata. Namun sejarah juga memperlihatkan bahwa tidak sedikit negara yang berhasil mencapai kemajuan material tetapi mengalami kemunduran moral. Gedung-gedung pemerintahan menjadi semakin megah, teknologi berkembang sangat pesat, kekayaan nasional meningkat, tetapi pada saat yang sama kepercayaan antarmanusia semakin menurun, hubungan keluarga semakin rapuh, dan masyarakat kehilangan arah kehidupan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak selalu berjalan seiring dengan pembangunan peradaban. Ketika manusia kehilangan fondasi moral, kemajuan justru dapat berubah menjadi alat yang mempercepat kerusakan.

Karena itu, *Save Nusantara* tidak dimaknai sebagai gerakan untuk menyelamatkan wilayah geografis Indonesia semata. Nusantara bukan sekadar gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Nusantara adalah ruang hidup yang dibangun oleh manusia, budaya, nilai, dan peradaban yang diwariskan lintas generasi. Menyelamatkan Nusantara berarti menjaga agar seluruh nilai luhur yang membentuk jati

diri bangsa tetap hidup di tengah perubahan zaman. Nilai tersebut tidak tersimpan di dalam arsip negara ataupun dokumen hukum. Nilai tersebut hidup dalam keluarga, tumbuh melalui keteladanan, dan diwariskan melalui kehidupan sehari-hari.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Peradaban Nusantara merupakan *operating system* yang menghubungkan seluruh unsur kehidupan bangsa. Sebagaimana sebuah *operating system* menentukan cara kerja seluruh perangkat, Peradaban Nusantara menentukan cara bangsa Indonesia berpikir, bersikap, bermusyawarah, menghormati sesama, serta membangun kehidupan bersama. Akan tetapi *operating system* tersebut tidak pernah bekerja secara otomatis. Nilai-nilai yang menjadi fondasinya harus terus dipelihara agar tidak mengalami degradasi. Tempat pertama pemeliharaan tersebut berlangsung bukanlah negara, melainkan keluarga. Rumah menjadi ruang tempat *operating system* peradaban terus diperbarui melalui kasih sayang, keteladanan, musyawarah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keluarga sesungguhnya merupakan institusi strategis dalam pembangunan bangsa. Selama ini keluarga sering dipandang hanya sebagai urusan privat yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan kenegaraan. Padahal setiap lembaga negara diisi oleh manusia yang terlebih dahulu dibentuk di dalam keluarga. Tidak ada hakim yang lahir dari ruang sidang. Tidak ada presiden yang lahir dari istana negara. Tidak

ada negarawan yang lahir dari gedung parlemen. Seluruhnya lahir dari rumah, dibesarkan oleh keluarga, dibentuk oleh nilai yang diterima sejak masa kanak-kanak, kemudian membawa seluruh pengalaman tersebut ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, kualitas keluarga pada hari ini sesungguhnya sedang menentukan kualitas kepemimpinan bangsa pada masa yang akan datang.

Kesadaran tersebut membawa perubahan cara pandang terhadap makna pengabdian kepada negara. Selama ini pengabdian sering diidentikkan dengan jabatan publik, pengambilan kebijakan, atau keterlibatan dalam pemerintahan. Padahal setiap orang tua yang membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab sedang mengabdi kepada bangsa. Setiap keluarga yang menjaga kejujuran sedang memperkuat fondasi kehidupan bernegara. Setiap rumah yang membiasakan musyawarah sedang menanamkan budaya demokrasi yang sehat. Setiap orang tua yang mengajarkan penghormatan kepada sesama sedang membangun masyarakat yang lebih beradab. Pengabdian kepada Nusantara tidak selalu dimulai dari ruang kekuasaan. Pengabdian sering kali dimulai dari ruang keluarga yang sederhana, jauh dari sorotan publik, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masa depan bangsa.

Pada titik inilah hubungan antara *Restore Indonesia*, *Free Indonesia*, dan *Save Nusantara* menjadi utuh. *Restore Indonesia* mengajak bangsa mengembalikan cara berpikir yang benar tentang negara dan kedaulatan rakyat. *Free Indonesia* mengajak bangsa memperbaiki

desain sistem kenegaraan agar kembali berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Namun seluruh perubahan tersebut hanya akan bertahan apabila didukung oleh manusia yang memiliki karakter kuat. Oleh sebab itu, *Save Nusantara* hadir sebagai fondasi peradaban yang memastikan bahwa manusia yang mengisi negara memiliki integritas, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan akhlak yang baik. Ketiga gagasan tersebut bukanlah tiga konsep yang berdiri sendiri, melainkan tiga tahapan yang saling melengkapi dalam membangun masa depan Indonesia.

Apabila dianalogikan dengan kerangka teknologi yang digunakan sepanjang buku ini, maka *Restore Indonesia* merupakan proses memperbaiki cara memahami sistem. *Free Indonesia* merupakan proses memperbaiki arsitektur sistem agar kembali sesuai dengan desain awal. Adapun *Save Nusantara* merupakan proses memastikan bahwa pengguna sistem memiliki karakter yang mampu menjalankan sistem tersebut secara benar. Sebuah perangkat yang memiliki *kernel* yang baik, *firmware* yang benar, dan *operating system* yang stabil tetap dapat mengalami kerusakan apabila digunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, pengguna yang memiliki pemahaman, integritas, dan tanggung jawab akan mampu menjaga sistem agar tetap bekerja dengan baik dalam jangka panjang. Analogi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan manusia bukan pelengkap dari pembangunan negara, melainkan syarat utama keberhasilan seluruh sistem kenegaraan.

Harapan terhadap masa depan Indonesia karena itu tidak boleh hanya bergantung pada pergantian pemimpin, perubahan pemerintahan, atau lahirnya kebijakan baru. Harapan terbesar justru berada di dalam jutaan rumah yang setiap hari membentuk generasi penerus bangsa. Ketika rumah-rumah Indonesia kembali menjadi tempat lahirnya kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, kerja keras, musyawarah, dan penghormatan terhadap martabat manusia, bangsa ini sedang membangun kekuatan yang jauh lebih kokoh daripada sekadar kekuatan ekonomi ataupun pemerintahan. Dari rumah-rumah tersebut akan lahir manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana serta tidak hanya berani, tetapi juga bertanggung jawab adapun tidak hanya memiliki kemampuan memimpin, tetapi juga memiliki kerendahan hati untuk melayani.

Pada akhirnya, masa depan Nusantara tidak ditentukan oleh seberapa megah gedung-gedung pemerintahan dibangun ataupun seberapa banyak regulasi diterbitkan. Masa depan Nusantara ditentukan oleh rumah-rumah yang tetap menjaga nilai-nilai kehidupan di tengah perubahan zaman. Ketika keluarga berhasil mempertahankan fungsi sebagai fondasi peradaban, sekolah akan lebih mudah menjalankan pendidikan, masyarakat akan lebih mudah membangun kepercayaan, dan negara akan lebih mudah menghadirkan keadilan. Dari rumah yang sehat lahir masyarakat yang sehat. Dari masyarakat yang sehat tumbuh negara yang sehat. Dari negara yang sehat

berkembang peradaban yang mampu bertahan melintasi zaman.

Dengan demikian, *Save Nusantara* bukanlah penutup dari pembahasan buku ini, melainkan awal dari sebuah gerakan peradaban. Gerakan tersebut tidak dimulai dengan membangun organisasi baru, bukan pula dengan membentuk lembaga tambahan, melainkan dengan menghidupkan kembali fungsi keluarga sebagai tempat lahirnya manusia yang berkarakter. Ketika setiap rumah di Indonesia kembali menjadi sekolah pertama, pusat pewarisan nilai, dan penjaga *operating system* Peradaban Nusantara, sesungguhnya bangsa ini sedang menulis masa depannya sendiri. Dari rumah-rumah sederhana di seluruh pelosok negeri akan lahir generasi yang mampu menjaga Pancasila sebagai *kernel* bangsa, mengelola konstitusi sebagai *firmware* negara, menghidupkan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan bersama, serta memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi negara yang kuat, tetapi juga menjadi bangsa yang beradab dan bermartabat bagi generasi yang akan datang.

BAB 21
MENYELAMATKAN PENDIDIKAN

21.1. Pendidikan sebagai Jalan Peradaban

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa keluarga merupakan fondasi peradaban. Rumah menjadi sekolah pertama, orang tua menjadi penjaga *operating system* keluarga, dan proses pembentukan karakter dimulai jauh sebelum seorang anak mengenal pendidikan formal. Namun kehidupan manusia tidak berhenti di dalam rumah. Seiring bertambahnya usia, setiap manusia memasuki ruang sosial yang lebih luas melalui pendidikan. Pada titik inilah sekolah mengambil peran sebagai kelanjutan dari keluarga. Apabila keluarga membangun fondasi karakter, maka pendidikan mengembangkan kemampuan berpikir, memperluas wawasan, memperhalus akhlak, dan mempersiapkan manusia agar mampu hidup sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh dipahami sekadar sebagai proses memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi sebagai jalan yang menghubungkan keluarga dengan peradaban.

Pandangan tersebut membawa konsekuensi yang sangat besar terhadap cara memahami tujuan pendidikan. Selama beberapa dekade terakhir, pendidikan semakin sering dipandang sebagai sarana untuk memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan, atau memenangkan persaingan ekonomi. Sekolah dinilai berhasil apabila lulusannya cepat memperoleh pekerjaan. Perguruan tinggi dianggap unggul apabila alumninya memiliki penghasilan tinggi.

Orang tua merasa berhasil apabila anak memperoleh profesi yang bergengsi. Seluruh ukuran tersebut memang memiliki nilai dalam kehidupan modern. Akan tetapi apabila pendidikan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka fungsi yang jauh lebih mendasar perlahan mulai terlupakan. Pendidikan tidak lagi membangun manusia, tetapi sekadar mempersiapkan tenaga kerja.

Padahal sejak awal sejarah peradaban, pendidikan tidak pernah lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pendidikan lahir karena manusia membutuhkan proses pembentukan diri agar mampu hidup secara bermartabat. Pengetahuan memang penting, tetapi pengetahuan hanyalah salah satu unsur dari pendidikan. Kebijaksanaan jauh lebih penting daripada sekadar kecerdasan. Integritas jauh lebih penting daripada sekadar kemampuan teknis. Kemampuan berpikir kritis jauh lebih berharga daripada sekadar kemampuan menghafal. Pendidikan yang sesungguhnya bertujuan melahirkan manusia yang mampu menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghadirkan kemaslahatan, bukan sekadar memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam kerangka berpikir yang dibangun sepanjang buku ini, pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi jembatan antara keluarga dan negara. Negara membutuhkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran terhadap kehidupan bersama. Namun negara tidak dapat membentuk seluruh kualitas tersebut secara langsung. Proses tersebut berlangsung

melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar kepentingan individu, melainkan kepentingan peradaban. Kualitas pendidikan pada hari ini akan menentukan kualitas masyarakat beberapa dekade kemudian. Sekolah yang membentuk karakter akan melahirkan bangsa yang kuat. Sebaliknya, sekolah yang hanya menghasilkan manusia berorientasi materi akan melahirkan masyarakat yang kehilangan arah ketika menghadapi godaan kekuasaan dan kepentingan pribadi.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Peradaban Nusantara merupakan *operating system* yang membentuk cara hidup bangsa Indonesia. Jika keluarga berfungsi menginstal *operating system* tersebut pada masa awal kehidupan, maka pendidikan bertugas memperkuat, mengembangkan, dan memperbarui *operating system* tersebut agar mampu menghadapi perubahan zaman. Pendidikan menjadi proses *update* yang tidak mengubah nilai dasarnya, tetapi memperkaya kemampuan manusia dalam mengimplementasikan nilai tersebut di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kehidupan global. Dengan demikian, pendidikan tidak boleh memutus hubungan manusia dengan akar budayanya. Pendidikan justru harus memperkuat kemampuan manusia untuk membawa nilai-nilai luhur bangsa ke dalam dunia yang terus berubah.

Sayangnya, tidak sedikit sistem pendidikan modern yang lebih menekankan kompetisi daripada kolaborasi, lebih menekankan hasil daripada proses, serta lebih menghargai nilai akademik daripada kualitas

karakter. Anak-anak sejak dini diajarkan bagaimana memperoleh nilai tinggi, tetapi tidak selalu dibimbing untuk memahami mengapa kejujuran lebih penting daripada sekadar kemenangan. Kemampuan menyelesaikan soal ujian berkembang dengan baik, tetapi kemampuan memahami penderitaan sesama tidak selalu memperoleh ruang yang memadai. Pendidikan menjadi sangat berhasil dalam menghasilkan manusia yang kompetitif, tetapi belum tentu berhasil membangun manusia yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Fenomena tersebut membawa dampak yang sangat luas. Bangsa dapat memiliki ribuan lulusan perguruan tinggi, tetapi tetap menghadapi krisis integritas. Negara dapat memiliki banyak ahli, tetapi masih mengalami penyalahgunaan kekuasaan. Dunia usaha dapat dipenuhi tenaga profesional, tetapi tetap menghadapi praktik-praktik yang mengabaikan etika. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual tidak selalu berjalan seiring dengan kedewasaan moral. Pendidikan yang hanya menambah pengetahuan tanpa membentuk karakter pada akhirnya melahirkan manusia yang memiliki kemampuan besar, tetapi tidak selalu memiliki arah penggunaan kemampuan tersebut.

Karena itu, menyelamatkan pendidikan bukan berarti sekadar memperbaiki kurikulum, membangun sekolah baru, atau memperbarui metode pembelajaran. Seluruh langkah tersebut memang penting, tetapi perubahan yang paling mendasar adalah mengembalikan tujuan pendidikan kepada hakikatnya

sebagai pembentuk manusia. Pendidikan harus kembali dipahami sebagai proses memanusiakan manusia. Pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan berbagai kemampuan profesional harus berkembang di atas fondasi karakter yang kuat. Tanpa fondasi tersebut, pendidikan hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara teknis tetapi miskin kebijaksanaan dalam menggunakan kecerdasannya.

Pandangan tersebut juga sangat relevan dengan tantangan era kecerdasan buatan. Dunia sedang memasuki masa ketika informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik. Berbagai pekerjaan mulai dikerjakan oleh mesin yang memiliki kemampuan komputasi jauh melampaui manusia. Dalam situasi seperti itu, pendidikan tidak lagi dapat bersaing hanya melalui penyampaian informasi karena teknologi mampu melakukannya dengan jauh lebih cepat. Nilai utama pendidikan justru terletak pada kemampuan membentuk manusia yang memiliki daya pikir kritis, kreativitas, empati, kebijaksanaan, integritas, dan tanggung jawab. Seluruh kualitas tersebut tidak dapat digantikan oleh teknologi karena seluruhnya merupakan bagian dari kematangan peradaban manusia.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, pendidikan juga memiliki tanggung jawab membentuk kesadaran bahwa setiap manusia adalah bagian dari kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya menghasilkan dokter, insinyur, guru, pengusaha, ilmuwan, hakim, atau birokrat yang kompeten, tetapi juga membentuk warga negara yang memahami bahwa seluruh profesi tersebut

merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ketika pendidikan berhasil membangun kesadaran tersebut, ilmu pengetahuan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat mencapai keberhasilan pribadi, melainkan sebagai amanah untuk menghadirkan kemanfaatan bagi kehidupan bersama.

Oleh sebab itu, pendidikan harus diposisikan sebagai jalan peradaban, bukan sekadar jalan menuju karier. Peradaban yang besar selalu dibangun oleh manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter. Peradaban bertahan bukan karena memiliki teknologi paling maju, melainkan karena memiliki manusia yang mampu menggunakan kemajuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dari ruang-ruang kelas seharusnya lahir generasi yang mampu berpikir jernih, bersikap adil, menghormati martabat manusia, mencintai bangsa, serta mengabdikan ilmu pengetahuan demi kemajuan bersama. Ketika pendidikan kembali menjalankan fungsi tersebut, sekolah tidak lagi sekadar menjadi tempat belajar, tetapi menjadi jalan yang menghubungkan keluarga, masyarakat, negara, dan Peradaban Nusantara menuju masa depan yang lebih bermartabat.

21.2. Krisis Literasi, Krisis Berpikir

Salah satu persoalan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia pada abad ke-21 bukanlah sekadar rendahnya kemampuan membaca, melainkan melemahnya kemampuan berpikir. Selama bertahun-tahun istilah literasi lebih sering dipahami sebagai

kemampuan mengenal huruf, membaca kalimat, atau memahami isi bacaan. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi terlalu sempit untuk menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi masyarakat modern. Pada era ketika informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik dan jutaan dokumen tersedia melalui jaringan internet, persoalan utama bukan lagi bagaimana memperoleh informasi, melainkan bagaimana memahami, menghubungkan, menguji, dan menggunakan informasi tersebut secara benar. Dengan demikian, krisis literasi pada hakikatnya adalah krisis berpikir.

Fenomena tersebut semakin terlihat ketika masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang tidak pernah berhenti. Setiap hari manusia menerima berita, opini, gambar, video, hingga berbagai bentuk informasi dari berbagai platform digital. Jumlah informasi yang diterima dalam satu hari jauh melampaui kemampuan manusia untuk memproses seluruhnya secara mendalam. Akibatnya, banyak orang terbiasa membaca secara cepat, tetapi kehilangan kemampuan memahami konteks. Banyak orang mampu mengutip sebuah kalimat, tetapi tidak memahami keseluruhan gagasan yang melatarbelakanginya. Banyak orang mampu menyampaikan pendapat, tetapi belum tentu mampu membangun argumentasi yang utuh. Informasi bertambah, tetapi pemahaman tidak selalu ikut berkembang.

Dalam kerangka berpikir Sekolah Negarawan, literasi bukan sekadar kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan membaca realitas. Membaca

buku hanyalah salah satu bentuk literasi. Seorang manusia juga harus mampu membaca sejarah, membaca masyarakat, membaca kebudayaan, membaca perkembangan teknologi, membaca perubahan geopolitik, bahkan membaca dirinya sendiri. Kemampuan tersebut tidak lahir hanya melalui kebiasaan menghafal, tetapi melalui latihan berpikir yang terus-menerus. Pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan manusia yang banyak mengetahui, tetapi juga menghasilkan manusia yang mampu memahami hubungan antara berbagai pengetahuan tersebut sehingga dapat mengambil keputusan secara bijaksana.

Perkembangan teknologi informasi justru memperlihatkan bahwa pengetahuan tidak lagi menjadi sesuatu yang langka. Mesin pencari, kecerdasan buatan, perpustakaan digital, dan berbagai platform pembelajaran membuat hampir seluruh informasi tersedia dalam waktu yang sangat singkat. Dalam situasi seperti itu, keunggulan manusia tidak lagi terletak pada kemampuan mengingat sebanyak mungkin informasi. Keunggulan manusia terletak pada kemampuan memahami makna di balik informasi, membedakan fakta dan opini, mengenali hubungan sebab akibat, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Literasi pada era modern karena itu berkembang menjadi kemampuan berpikir secara utuh, bukan sekadar kemampuan membaca tulisan.

Sayangnya, sistem pendidikan di banyak tempat masih terlalu berorientasi pada hafalan. Keberhasilan belajar sering kali diukur melalui kemampuan

mengingat jawaban yang benar, bukan melalui kemampuan menyusun pertanyaan yang tepat. Peserta didik lebih banyak dilatih menjawab soal daripada memahami persoalan. Proses belajar menjadi berpusat pada hasil ujian, sementara kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis informasi belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal kehidupan nyata tidak pernah memberikan pilihan jawaban seperti yang tersedia dalam lembar ujian. Kehidupan menuntut kemampuan berpikir yang mandiri, kemampuan memahami konteks, dan kemampuan mengambil keputusan ketika jawaban tidak tersedia secara langsung.

Persoalan tersebut membawa dampak yang jauh melampaui dunia pendidikan. Masyarakat yang memiliki literasi rendah cenderung mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Berita bohong menyebar dengan cepat karena lebih banyak dibagikan daripada dipahami. Pendapat yang emosional sering kali lebih mudah diterima daripada argumentasi yang rasional. Polarisasi sosial semakin mudah terjadi karena masyarakat lebih cepat bereaksi daripada melakukan verifikasi. Dalam kondisi seperti itu, ruang publik kehilangan kualitas dialog yang sehat. Perbedaan pendapat tidak lagi dipandang sebagai kesempatan untuk memperkaya pemahaman, tetapi berubah menjadi pertentangan yang memecah kehidupan bersama.

Krisis literasi juga berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami negara. Sepanjang buku ini telah dijelaskan bahwa salah satu persoalan mendasar

Indonesia adalah belum dipahaminya perbedaan antara negara dan pemerintah. Banyak orang masih menganggap kritik terhadap pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap negara. Sebaliknya, tidak sedikit yang menganggap pergantian pemerintah sama dengan perubahan negara. Kesalahpahaman tersebut pada dasarnya merupakan persoalan literasi konseptual. Ketika masyarakat tidak terbiasa memahami konsep secara mendalam, istilah-istilah penting seperti negara, pemerintah, kedaulatan rakyat, konstitusi, demokrasi, bahkan Pancasila mudah dipersempit maknanya sehingga kehilangan substansi yang sebenarnya.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa dan Peradaban Nusantara merupakan *operating system* yang membentuk cara hidup masyarakat. Agar *operating system* tersebut berjalan dengan baik, manusia tidak cukup hanya menerima informasi mengenai nilai-nilai bangsa. Manusia harus mampu memahami mengapa nilai tersebut dibangun, bagaimana nilai tersebut diterapkan, dan apa akibatnya apabila nilai tersebut diabaikan. Proses tersebut hanya dapat berlangsung apabila pendidikan berhasil membangun budaya berpikir yang mendalam. Tanpa kemampuan tersebut, nilai-nilai luhur bangsa hanya berhenti sebagai slogan yang dihafalkan tanpa benar-benar dipahami.

Era kecerdasan buatan semakin memperjelas pentingnya kemampuan berpikir. Berbagai sistem kecerdasan buatan mampu menghasilkan ringkasan, menjawab pertanyaan, menerjemahkan bahasa, bahkan

menyusun analisis dalam waktu yang sangat singkat. Kemampuan tersebut akan terus berkembang pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, manusia tidak lagi dapat bersaing dengan mesin dalam hal kecepatan mengolah informasi. Keunggulan manusia justru terletak pada kemampuan memberikan makna, memahami konteks, mempertimbangkan aspek moral, serta menghubungkan berbagai disiplin ilmu menjadi kebijaksanaan yang utuh. Pendidikan yang hanya berfokus pada penyampaian informasi akan semakin kehilangan relevansi. Pendidikan masa depan harus berfokus pada pembangunan cara berpikir.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, literasi pada akhirnya bukan sekadar alat untuk memperoleh ilmu, tetapi jalan menuju kebijaksanaan. Manusia yang memiliki literasi tinggi tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terjebak dalam fanatisme sempit, dan tidak mudah menyimpulkan persoalan hanya dari potongan informasi. Kemampuan membaca secara mendalam melahirkan kemampuan berpikir secara jernih. Kemampuan berpikir secara jernih melahirkan keputusan yang adil. Keputusan yang adil kemudian menjadi fondasi bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sehat. Dengan demikian, literasi sesungguhnya merupakan investasi peradaban yang menentukan kualitas kehidupan bangsa dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu, menyelamatkan pendidikan harus dimulai dengan menyelamatkan budaya literasi. Gerakan tersebut tidak cukup diwujudkan melalui peningkatan minat membaca, meskipun membaca tetap

menjadi fondasi yang sangat penting. Budaya literasi harus berkembang menjadi budaya berpikir, budaya berdialog, budaya bertanya, budaya menelaah, dan budaya mencari kebenaran secara bertanggung jawab. Ketika sekolah berhasil membangun manusia yang gemar membaca sekaligus mampu berpikir kritis, masyarakat akan memiliki daya tahan terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi. Dari budaya berpikir yang sehat akan lahir warga negara yang memahami hak dan tanggung jawabnya, pemimpin yang mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, serta negarawan yang melihat persoalan bangsa secara utuh. Dengan demikian, menyelamatkan literasi pada hakikatnya adalah menyelamatkan kemampuan bangsa Indonesia untuk berpikir jernih, dan dari kejernihan berpikir itulah Peradaban Nusantara akan terus bertumbuh menghadapi setiap perubahan zaman.

21.3. Pendidikan Kewarganegaraan yang Kehilangan Negara

Salah satu ironi terbesar dalam sistem pendidikan Indonesia adalah bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah diajarkan selama puluhan tahun, tetapi pemahaman masyarakat mengenai negara justru masih sangat lemah. Hampir setiap warga negara pernah mempelajari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan, serta berbagai simbol kenegaraan sejak berada di bangku sekolah. Namun ketika memasuki kehidupan bermasyarakat, masih banyak yang belum mampu membedakan antara negara dan pemerintah,

antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan pejabat sebagai penyelenggara negara, bahkan antara kepentingan bangsa dengan kepentingan kekuasaan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pendidikan kewarganegaraan bukan terletak pada sedikitnya materi yang diajarkan, melainkan pada belum tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri.

Sepanjang buku ini telah dijelaskan bahwa negara merupakan organisasi yang dibentuk oleh rakyat untuk mewujudkan tujuan bersama. Negara bukanlah milik pemerintah, bukan pula milik kelompok tertentu. Dalam kerangka tersebut, rakyat berkedudukan sebagai pemilik kedaulatan, sedangkan seluruh penyelenggara negara hanyalah penerima amanah untuk menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan konstitusi. Apabila konsep tersebut benar-benar dipahami sejak dini melalui pendidikan, hubungan antara rakyat dan negara akan menjadi jauh lebih sehat. Warga negara tidak akan memandang pejabat sebagai penguasa yang berada di atas rakyat, tetapi sebagai pelayan publik yang menjalankan mandat konstitusi. Sebaliknya, pejabat negara juga akan menyadari bahwa setiap kewenangan yang dimiliki berasal dari amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun konstitusional.

Sayangnya, dalam praktik pendidikan selama ini, Pendidikan Kewarganegaraan sering kali lebih menekankan hafalan mengenai struktur lembaga negara daripada pemahaman mengenai filosofi keberadaan negara. Peserta didik mengenal nama lembaga, masa jabatan, susunan pemerintahan, dan

berbagai ketentuan normatif lainnya, tetapi tidak selalu diajak memahami mengapa negara dibentuk, bagaimana hubungan antara rakyat dan negara seharusnya berjalan, serta apa makna kedaulatan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, pendidikan menghasilkan pengetahuan administratif mengenai negara, tetapi belum tentu menghasilkan kesadaran kenegaraan.

Padahal pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi ruang untuk membangun kesadaran bahwa setiap warga negara merupakan bagian aktif dari kehidupan bangsa. Kewarganegaraan bukan sekadar status hukum yang melekat sejak lahir, melainkan tanggung jawab moral untuk ikut menjaga kehidupan bersama. Menjadi warga negara berarti memahami hak sekaligus kewajiban, menghormati hukum sekaligus mengawasi penyelenggaraan negara, mencintai bangsa tanpa kehilangan kemampuan berpikir kritis, serta menjaga kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kesadaran tersebut tidak lahir melalui hafalan, tetapi melalui proses pendidikan yang membentuk cara berpikir dan cara memandang kehidupan bernegara.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa Indonesia. Sebagaimana *kernel* mengatur hubungan antara seluruh komponen dalam sebuah sistem, Pancasila menjadi fondasi yang menghubungkan rakyat, negara, pemerintah, hukum, dan seluruh unsur kehidupan kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya mengajarkan bagaimana *kernel* tersebut bekerja dalam praktik kehidupan, bukan hanya menghafalkan lima

sila sebagai rangkaian kalimat. Ketika Pancasila dipahami sebagai sistem nilai yang hidup, peserta didik akan mampu melihat hubungan antara keadilan sosial dengan kebijakan publik, antara kemanusiaan dengan penegakan hukum, antara musyawarah dengan proses demokrasi, serta antara Ketuhanan Yang Maha Esa dengan integritas dalam menjalankan amanah negara.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari konsep Peradaban Nusantara sebagai *operating system* bangsa. *Operating system* tersebut membentuk cara bangsa Indonesia menjalankan kehidupan bersama berdasarkan nilai, budaya, dan sejarah yang dimiliki. Pendidikan kewarganegaraan bertugas memastikan bahwa setiap generasi memahami cara kerja *operating system* tersebut sehingga mampu menjadi warga negara yang tidak hanya taat terhadap hukum, tetapi juga memahami semangat yang melahirkan hukum. Ketika hubungan tersebut dipahami secara utuh, kepatuhan kepada konstitusi tidak lagi lahir karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan karena kesadaran bahwa konstitusi merupakan kesepakatan bersama yang menjaga kehidupan seluruh rakyat.

Kelemahan pemahaman kewarganegaraan pada akhirnya memengaruhi kualitas demokrasi. Demokrasi sering dipersempit hanya menjadi kegiatan memilih pemimpin setiap lima tahun. Setelah proses pemilihan selesai, sebagian masyarakat merasa bahwa seluruh tanggung jawab terhadap negara telah berakhir. Padahal demokrasi merupakan proses yang berlangsung setiap hari melalui partisipasi warga

negara dalam menjaga kepentingan bersama, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, menghormati hak sesama warga, serta ikut membangun solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan yang benar harus mampu menanamkan kesadaran bahwa demokrasi merupakan budaya hidup, bukan sekadar mekanisme pemerintahan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kecenderungan pendidikan yang membentuk kepatuhan tanpa membangun daya kritis. Tidak sedikit peserta didik tumbuh dengan anggapan bahwa menjadi warga negara yang baik berarti selalu menerima setiap kebijakan negara tanpa mempertanyakan dasar dan tujuannya. Pemahaman tersebut bertentangan dengan hakikat negara demokratis yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dalam negara yang sehat, warga negara justru memiliki tanggung jawab untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, mengoreksi penyelenggaraan pemerintahan apabila terjadi penyimpangan, serta ikut menjaga agar negara tetap berjalan sesuai dengan konstitusi. Sikap kritis yang dilandasi tanggung jawab bukan ancaman bagi negara, melainkan bagian dari mekanisme menjaga kualitas kehidupan bernegara.

Era digital semakin memperkuat kebutuhan tersebut. Informasi mengenai kebijakan pemerintah, proses pemerintahan, dan berbagai persoalan kebangsaan tersebar sangat cepat melalui berbagai media. Tanpa kemampuan berpikir kritis yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, masyarakat mudah

terjebak dalam polarisasi, propaganda, maupun manipulasi informasi. Pendidikan kewarganegaraan karena itu harus berkembang dari sekadar penyampaian materi menjadi pendidikan yang melatih kemampuan berdialog, menganalisis kebijakan, memahami konstitusi, serta membedakan kepentingan negara dengan kepentingan sesaat. Dengan demikian, warga negara memiliki ketahanan intelektual dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan demokrasi.

Dalam perspektif pembangunan peradaban, tujuan akhir pendidikan kewarganegaraan bukan sekadar melahirkan warga negara yang patuh, tetapi melahirkan negarawan pada setiap bidang kehidupan. Negarawan tidak selalu harus menduduki jabatan kekuasaan. Seorang guru yang mengutamakan kepentingan peserta didik, seorang dokter yang menjunjung etika profesi, seorang pengusaha yang menjalankan usaha secara jujur, seorang hakim yang menegakkan keadilan, maupun seorang birokrat yang mengelola amanah rakyat dengan penuh integritas, seluruhnya merupakan bagian dari kehidupan kenegaraan. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu membangun kesadaran bahwa setiap profesi memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

Oleh sebab itu, menyelamatkan pendidikan kewarganegaraan berarti mengembalikan negara ke dalam ruang pendidikan. Negara tidak boleh hanya diperkenalkan sebagai kumpulan lembaga, tetapi harus dipahami sebagai amanah bersama yang dibangun atas dasar kedaulatan rakyat, dijalankan berdasarkan konstitusi, dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan

serta kesejahteraan seluruh bangsa. Ketika pendidikan berhasil membangun kesadaran tersebut, sekolah tidak hanya menghasilkan lulusan yang mengenal struktur negara, tetapi juga melahirkan warga negara yang memahami kedudukannya sebagai pemilik kedaulatan. Dari kesadaran itulah akan lahir masyarakat yang mampu menjaga Pancasila sebagai *kernel* bangsa, menjalankan konstitusi sebagai *firmware* negara, menghidupkan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan bersama, dan memastikan bahwa Indonesia tidak sekadar memiliki pemerintahan yang berjalan, tetapi memiliki kehidupan kenegaraan yang benar-benar berpihak kepada rakyat sebagai pemilik sah republik ini.

21.4. Kesadaran Sejarah sebagai Identitas Bangsa

Setiap bangsa yang besar selalu memiliki hubungan yang kuat dengan sejarahnya. Hubungan tersebut bukan sekadar kebanggaan terhadap masa lalu, melainkan kesadaran bahwa perjalanan sejarah membentuk jati diri, karakter, dan arah masa depan sebuah bangsa. Sejarah bukan kumpulan tanggal, nama tokoh, atau daftar peristiwa yang harus dihafalkan untuk menghadapi ujian. Sejarah merupakan memori kolektif yang menjelaskan mengapa sebuah bangsa lahir, bagaimana sebuah peradaban berkembang, mengapa berbagai keputusan penting pernah diambil, serta pelajaran apa yang harus dijaga agar kesalahan yang sama tidak terus berulang. Oleh sebab itu, menyelamatkan pendidikan tidak dapat dipisahkan

dari upaya membangun kesadaran sejarah sebagai fondasi identitas bangsa.

Sayangnya, dalam praktik pendidikan, sejarah sering kali kehilangan ruhnya. Mata pelajaran sejarah lebih banyak dipahami sebagai materi hafalan dibandingkan sebagai proses memahami perjalanan bangsa. Peserta didik diminta mengingat tahun terjadinya sebuah peristiwa, nama tokoh tertentu, atau urutan pergantian pemerintahan, tetapi tidak selalu diajak memahami hubungan sebab akibat di balik peristiwa tersebut. Ketika sejarah hanya menjadi kumpulan informasi, peserta didik mungkin berhasil memperoleh nilai yang baik, tetapi belum tentu memahami makna perjalanan bangsanya sendiri. Akibatnya, sejarah berhenti sebagai pengetahuan akademik, bukan sebagai kesadaran yang membentuk cara berpikir.

Padahal kesadaran sejarah memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar mengenang masa lalu. Kesadaran sejarah membantu manusia memahami bahwa kondisi bangsa pada hari ini merupakan hasil dari rangkaian keputusan yang diambil oleh generasi-generasi sebelumnya. Kemerdekaan Indonesia tidak lahir secara kebetulan. Pancasila tidak muncul tanpa pergulatan pemikiran. Konstitusi tidak disusun dalam ruang kosong. Seluruh perjalanan tersebut merupakan proses panjang yang dipenuhi perdebatan, pengorbanan, dan pencarian bentuk terbaik bagi kehidupan berbangsa. Tanpa memahami proses tersebut, generasi muda akan melihat negara hanya

sebagai sesuatu yang sudah selesai, bukan sebagai amanah yang harus terus disempurnakan.

Dalam kerangka buku ini, sejarah memiliki kedudukan yang sangat penting karena seluruh gagasan mengenai **Restore Indonesia**, ***Free*** **Indonesia**, dan ***Save*** **Nusantara** berangkat dari pembacaan terhadap perjalanan bangsa. Mustahil memperbaiki masa depan apabila akar persoalan masa lalu tidak pernah dipahami. Banyak bangsa mengalami kemunduran bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena kehilangan kemampuan belajar dari sejarahnya sendiri. Bangsa yang melupakan sejarah akan mudah mengulangi kesalahan yang sama, sedangkan bangsa yang memahami sejarah memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Kesadaran sejarah juga membentuk cara masyarakat memahami identitas nasional. Identitas bangsa tidak dibangun oleh simbol semata, melainkan oleh pengalaman kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa Indonesia, semangat persatuan, Pancasila, serta cita-cita mewujudkan keadilan sosial lahir dari perjalanan sejarah yang panjang. Apabila generasi muda tidak memahami proses tersebut, identitas nasional akan berubah menjadi sekadar atribut seremonial yang mudah tergeser oleh berbagai pengaruh luar. Sebaliknya, ketika sejarah dipahami secara utuh, identitas bangsa tumbuh sebagai kesadaran yang hidup di dalam cara berpikir dan cara bertindak.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa Indonesia,

sedangkan konstitusi merupakan *firmware* yang mengatur bagaimana negara dijalankan. Keduanya tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kesadaran sejarah membantu masyarakat memahami mengapa *kernel* tersebut dirumuskan, mengapa *firmware* negara dibentuk, dan mengapa keduanya harus terus dijaga. Tanpa pemahaman sejarah, Pancasila hanya dipandang sebagai lima sila yang dihafalkan, sementara konstitusi hanya dianggap sebagai kumpulan pasal-pasal hukum. Padahal keduanya merupakan hasil pergulatan panjang bangsa Indonesia dalam mencari dasar kehidupan bernegara yang sesuai dengan karakter dan cita-cita nasional.

Kesadaran sejarah juga memiliki hubungan yang erat dengan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* bangsa. Sebuah *operating system* tidak muncul begitu saja, tetapi berkembang melalui pengalaman panjang sebuah masyarakat dalam membangun tata nilai, budaya, hukum, dan kehidupan sosial. Peradaban Nusantara dibentuk oleh perjalanan berbagai kerajaan, tradisi musyawarah, semangat gotong royong, keberagaman budaya, hingga perjuangan membangun negara modern. Pendidikan sejarah seharusnya memperlihatkan kesinambungan tersebut sehingga peserta didik memahami bahwa Indonesia bukan bangsa yang kehilangan akar, melainkan bangsa yang memiliki warisan peradaban yang sangat kaya dan terus berkembang.

Tantangan globalisasi membuat kesadaran sejarah menjadi semakin penting. Arus informasi yang begitu

cepat sering kali mendorong masyarakat lebih mengenal budaya bangsa lain daripada memahami sejarah bangsanya sendiri. Tokoh-tokoh dunia lebih dikenal dibandingkan para pemikir yang membentuk Indonesia. Peristiwa internasional lebih banyak dibahas daripada proses lahirnya konstitusi atau perjalanan pembentukan republik. Globalisasi memang membuka kesempatan untuk belajar dari seluruh dunia, tetapi tanpa kesadaran sejarah yang kuat, keterbukaan tersebut dapat berubah menjadi hilangnya identitas. Bangsa yang kehilangan identitas akan mudah mengikuti setiap perubahan tanpa memiliki arah yang jelas.

Kesadaran sejarah juga melatih kemampuan berpikir kritis. Sejarah bukan cerita hitam dan putih yang hanya membedakan antara pihak yang benar dan pihak yang salah. Sejarah mengajarkan bahwa setiap keputusan lahir dalam konteks tertentu, setiap kebijakan memiliki konsekuensi, dan setiap generasi menghadapi tantangan yang berbeda. Dengan memahami sejarah secara mendalam, peserta didik belajar melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, memahami hubungan sebab akibat, serta mengembangkan kebijaksanaan dalam mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa yang semakin kompleks.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, pendidikan sejarah tidak bertujuan menciptakan nostalgia terhadap masa lalu, melainkan membangun tanggung jawab terhadap masa depan. Sejarah menjadi cermin yang

menunjukkan keberhasilan yang patut dilanjutkan sekaligus kesalahan yang harus diperbaiki. Dari sejarah perjuangan bangsa lahir semangat pengabdian. Dari sejarah penyimpangan kekuasaan lahir pentingnya konstitusi. Dari sejarah perpecahan lahir nilai persatuan. Dari sejarah ketidakadilan lahir cita-cita keadilan sosial. Seluruh pelajaran tersebut menjadi bekal bagi setiap generasi untuk melanjutkan pembangunan bangsa dengan lebih bijaksana.

Oleh karena itu, menyelamatkan pendidikan sejarah berarti mengembalikan sejarah sebagai proses membangun kesadaran, bukan sekadar membangun ingatan. Pendidikan harus mengajak peserta didik memahami mengapa bangsa Indonesia memilih bentuk negara republik, mengapa Pancasila ditempatkan sebagai *kernel* bangsa, mengapa konstitusi menjadi *firmware* negara, dan mengapa Peradaban Nusantara harus terus dijaga sebagai *operating system* kehidupan bersama. Ketika sejarah dipahami sebagai perjalanan yang hidup, setiap generasi akan menyadari bahwa masa depan Indonesia bukanlah sesuatu yang diwariskan begitu saja, melainkan sesuatu yang harus terus dibangun melalui pembelajaran dari masa lalu. Dari kesadaran sejarah itulah akan lahir warga negara yang tidak hanya mengenal bangsanya, tetapi juga memahami tanggung jawab untuk melanjutkan perjalanan panjang Indonesia menuju peradaban yang semakin maju, adil, dan bermartabat.

21.5. Sekolah Menghasilkan Pekerja atau Negarawan?

Setiap sistem pendidikan pada akhirnya akan menghasilkan tipe manusia tertentu. Pendidikan bukan sekadar memindahkan ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik, melainkan proses panjang yang membentuk cara berpikir, cara mengambil keputusan, serta cara memandang kehidupan. Oleh karena itu, kualitas sebuah bangsa tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan yang sangat mendasar yaitu manusia seperti apa yang ingin dibentuk melalui pendidikan? Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar membahas kurikulum, metode pembelajaran, atau teknologi pendidikan. Apabila tujuan pendidikan tidak dirumuskan dengan benar, seluruh perbaikan teknis hanya akan menghasilkan sistem yang semakin efisien dalam mencapai tujuan yang keliru.

Dalam beberapa dekade terakhir, orientasi pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia, semakin diarahkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja. Sekolah dipersiapkan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Perguruan tinggi berlomba mencetak sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Keberhasilan pendidikan sering diukur dari besarnya tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja, tingginya pendapatan alumni, atau banyaknya perusahaan yang merekrut lulusan dari sebuah institusi pendidikan. Seluruh ukuran tersebut tentu memiliki nilai ekonomi yang penting, tetapi muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar apakah tujuan pendidikan hanya sebatas menghasilkan pekerja?

Pertanyaan tersebut bukan berarti merendahkan profesi pekerja. Setiap profesi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Indonesia membutuhkan dokter, guru, insinyur, petani, nelayan, pengusaha, ilmuwan, hakim, prajurit, birokrat, dan berbagai profesi lainnya. Persoalannya bukan pada profesinya, melainkan pada cara pandang terhadap profesi tersebut. Pendidikan yang hanya berorientasi pada pekerjaan cenderung membentuk manusia yang melihat profesi sebagai alat memperoleh penghasilan. Sebaliknya, pendidikan yang berorientasi pada peradaban membentuk manusia yang memandang profesi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Perbedaannya mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas kehidupan bernegara.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, bangsa yang besar tidak cukup memiliki banyak tenaga kerja yang kompeten. Bangsa yang besar membutuhkan manusia yang memiliki jiwa kenegarawanan. Negarawan bukanlah jabatan, bukan pula gelar akademik. Negarawan adalah karakter yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, mengutamakan keadilan di atas keuntungan sesaat, serta menjadikan amanah sebagai dasar dalam setiap keputusan. Dengan pengertian tersebut, seorang guru dapat menjadi negarawan, seorang pengusaha dapat menjadi negarawan, seorang hakim dapat menjadi negarawan, seorang petani dapat menjadi negarawan, bahkan seorang pelajar pun dapat mulai

membangun jiwa kenegarawanan sejak berada di bangku sekolah.

Perbedaan antara pekerja dan negarawan bukan terletak pada jenis pekerjaan yang dilakukan, melainkan pada orientasi kehidupan yang dimiliki. Seorang pekerja dapat menjadi sangat ahli dalam bidang tertentu, tetapi seluruh kemampuan tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, seorang negarawan memandang setiap kemampuan sebagai amanah yang harus memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Seorang insinyur yang memiliki jiwa kenegarawanan akan membangun infrastruktur yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Seorang dokter yang memiliki jiwa kenegarawanan akan menempatkan keselamatan pasien di atas kepentingan materi. Seorang birokrat yang memiliki jiwa kenegarawanan akan memahami bahwa jabatan merupakan bentuk pelayanan kepada rakyat, bukan sarana memperoleh kekuasaan.

Perspektif tersebut sangat berkaitan dengan gagasan besar yang dibangun sepanjang buku ini. **Restore Indonesia** mengajak bangsa Indonesia memperbaiki cara berpikir mengenai negara. ***Free* Indonesia** menawarkan perbaikan terhadap desain sistem kenegaraan agar kembali berpijak pada prinsip-prinsip republik yang benar. Namun seluruh perubahan tersebut tidak akan menghasilkan dampak yang berkelanjutan apabila pendidikan tetap melahirkan manusia yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Sistem yang baik membutuhkan manusia yang baik. Konstitusi yang baik membutuhkan penyelenggara

negara yang berintegritas. Peradaban yang maju membutuhkan manusia yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kehidupan bersama. Oleh sebab itu, ***Save* Nusantara** dimulai dengan membangun manusia melalui pendidikan.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa, sedangkan Peradaban Nusantara merupakan *operating system* yang membentuk kehidupan masyarakat Indonesia. Pendidikan seharusnya menjadi proses yang menanamkan *kernel* tersebut ke dalam cara berpikir setiap generasi sekaligus menghidupkan *operating system* Peradaban Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sekolah hanya mengajarkan keterampilan teknis tanpa membangun karakter, maka peserta didik memang akan menjadi tenaga profesional yang kompeten, tetapi *operating system* kehidupan berbangsa tidak pernah benar-benar terpasang secara utuh. Akibatnya, kecerdasan berkembang lebih cepat daripada kebijaksanaan, kemampuan meningkat lebih cepat daripada tanggung jawab, dan kekuasaan diperoleh lebih cepat daripada kedewasaan moral.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini. Banyak penyalahgunaan jabatan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Berbagai praktik korupsi melibatkan lulusan perguruan tinggi terbaik. Manipulasi hukum, penyalahgunaan kewenangan, hingga berbagai bentuk ketidakadilan sering dilakukan oleh manusia yang secara akademik sangat cerdas. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa

pendidikan formal saja tidak cukup membentuk karakter. Pengetahuan tanpa integritas dapat berubah menjadi alat yang justru memperbesar kerusakan. Semakin tinggi kemampuan seseorang, semakin besar pula dampak yang ditimbulkan apabila kemampuan tersebut digunakan tanpa landasan moral yang kuat.

Perkembangan kecerdasan buatan juga mengubah cara memandang tujuan pendidikan. Pada masa lalu, penguasaan pengetahuan teknis menjadi keunggulan utama manusia di dunia kerja. Saat ini sebagian kemampuan tersebut mulai dapat dilakukan oleh mesin dengan tingkat kecepatan dan akurasi yang sangat tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masa depan tidak lagi ditentukan hanya oleh kemampuan teknis, tetapi oleh kemampuan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi, seperti kebijaksanaan, kepemimpinan, empati, kreativitas, integritas, serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral. Seluruh kemampuan tersebut merupakan ciri utama seorang negarawan. Dengan demikian, pendidikan yang hanya berorientasi pada pasar kerja justru berisiko kehilangan relevansi di tengah perkembangan zaman.

Sekolah juga harus menjadi ruang latihan kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya kemampuan memimpin organisasi, melainkan kemampuan memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Peserta didik perlu dibiasakan untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, menghormati perbedaan pendapat, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah,

menjaga kejujuran dalam setiap proses belajar, serta mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan kelompok. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi lahirnya jiwa kenegarawanan. Tanpa latihan seperti itu, sekolah hanya menghasilkan lulusan yang mahir mengerjakan tugas, tetapi belum tentu siap memikul amanah ketika kelak memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai apakah sekolah menghasilkan pekerja atau negarawan bukanlah pilihan yang saling bertentangan. Indonesia tetap membutuhkan tenaga profesional yang unggul dalam berbagai bidang. Namun profesionalisme harus dibangun di atas karakter kenegarawanan. Bangsa ini tidak memerlukan sekadar pekerja yang cerdas, melainkan pekerja yang memiliki integritas. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kompeten, tetapi juga pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan ilmuwan yang menghasilkan inovasi, tetapi ilmuwan yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan menghadirkan kemaslahatan.

Oleh sebab itu, menyelamatkan pendidikan berarti mengembalikan tujuan sekolah kepada hakikatnya sebagai tempat membentuk manusia yang utuh. Sekolah harus melahirkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan profesional, memahami negara secara benar, menghargai sejarah, berpikir kritis, serta memiliki keberanian moral untuk mengabdikan seluruh kemampuan bagi bangsa dan negara. Ketika pendidikan berhasil membentuk

manusia seperti itu, setiap profesi akan melahirkan negarawan dalam bidangnya masing-masing. Dari ruang-ruang kelas akan lahir generasi yang menjaga Pancasila sebagai *kernel* bangsa, menghidupkan konstitusi sebagai *firmware* negara, menjalankan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan bersama, dan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan **Restore Indonesia**, ***Free* Indonesia**, serta ***Save* Nusantara** bagi generasi yang akan datang.

21.6. Guru sebagai Arsitek Peradaban



Di dalam setiap peradaban yang besar selalu terdapat sosok-sosok yang bekerja dalam diam, tetapi meninggalkan pengaruh yang jauh melampaui zamannya. Pengaruh tersebut bukan dibangun melalui kekuasaan, bukan pula melalui kekuatan ekonomi,

melainkan melalui proses membentuk manusia. Sosok tersebut adalah guru. Ketika berbicara mengenai pembangunan bangsa, perhatian sering tertuju kepada presiden, menteri, pejabat negara, pengusaha, atau tokoh pemerintahan. Padahal jauh sebelum seorang pemimpin menduduki jabatan, sebelum seorang ilmuwan menemukan inovasi, atau sebelum seorang negarawan mengambil keputusan penting bagi bangsanya, seluruhnya pernah duduk sebagai peserta didik yang dibimbing oleh seorang guru. Oleh karena itu, masa depan sebuah bangsa sesungguhnya dibangun terlebih dahulu di ruang-ruang kelas.

Sayangnya, dalam kehidupan modern, profesi guru sering kali dipersempit menjadi penyampai materi pembelajaran. Keberhasilan seorang guru diukur dari kemampuan menyelesaikan kurikulum, meningkatkan nilai ujian, atau memastikan peserta didik lulus sesuai standar akademik yang ditentukan. Seluruh tugas tersebut memang penting, tetapi belum menggambarkan hakikat profesi seorang guru. Guru bukan sekadar pengajar. Guru adalah pembentuk manusia. Ketika seorang guru memasuki ruang kelas, sesungguhnya yang sedang dibentuk bukan hanya kemampuan akademik peserta didik, melainkan cara berpikir, karakter, kebiasaan, serta pandangan hidup yang akan memengaruhi kehidupan bangsa pada masa yang akan datang.

Peran tersebut menjadikan guru sebagai arsitek peradaban. Seorang arsitek tidak sekadar menyusun batu bata menjadi bangunan, tetapi merancang struktur yang akan berdiri dalam jangka waktu yang panjang.

Demikian pula seorang guru. Pengetahuan yang disampaikan mungkin akan terlupakan seiring berjalannya waktu, tetapi karakter yang dibentuk melalui keteladanan akan terus hidup dalam diri peserta didik. Cara guru memperlakukan murid, menghargai perbedaan, menyelesaikan persoalan, bersikap jujur, menepati janji, dan menjalankan amanah sering kali meninggalkan pengaruh yang jauh lebih besar daripada materi pelajaran yang disampaikan. Pendidikan pada akhirnya lebih banyak ditentukan oleh keteladanan daripada ceramah.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, guru tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan yang cerdas, tetapi membangun generasi yang memiliki jiwa kenegarawanan. Jiwa tersebut tidak lahir dari hafalan mengenai negara, melainkan dari pengalaman hidup yang menunjukkan bahwa integritas lebih penting daripada kecerdasan, tanggung jawab lebih penting daripada kepentingan pribadi, dan pengabdian lebih bernilai daripada sekadar keberhasilan individu. Nilai-nilai tersebut tidak dapat ditransfer melalui buku semata. Nilai tersebut tumbuh ketika peserta didik melihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kualitas seorang guru tidak hanya diukur dari penguasaan ilmu, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan nilai melalui tindakan.

Pandangan tersebut sangat selaras dengan glosarium buku ini yang menempatkan Pancasila sebagai *kernel* bangsa Indonesia. Sebuah *kernel* hanya dapat bekerja apabila seluruh sistem menjalankan fungsi masing-masing secara benar. Guru merupakan

salah satu unsur yang memastikan *kernel* tersebut benar-benar hidup dalam proses pendidikan. Pancasila tidak cukup diajarkan sebagai teori, tetapi harus terlihat dalam budaya sekolah. Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam integritas. Kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam penghormatan terhadap setiap peserta didik. Persatuan Indonesia tercermin dalam kemampuan membangun kebersamaan di tengah keberagaman. Kerakyatan tercermin melalui budaya musyawarah. Keadilan sosial tercermin melalui perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang. Ketika seluruh nilai tersebut hidup di sekolah, Pancasila tidak lagi menjadi hafalan, tetapi menjadi pengalaman hidup.

Guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* bangsa. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, keluarga menjadi tempat pertama menginstal nilai-nilai kehidupan. Setelah itu, sekolah bertugas memperkuat dan mengembangkan *operating system* tersebut agar mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan zaman. Dalam proses tersebut, guru bukan sekadar operator pendidikan, melainkan penjaga agar *operating system* bangsa tidak mengalami kerusakan. Tanpa guru yang memahami tugas tersebut, pendidikan akan menghasilkan manusia yang cerdas secara teknis tetapi kehilangan orientasi moral sebagai bagian dari Peradaban Nusantara.

Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, semakin memperjelas bahwa posisi guru tidak

mungkin digantikan oleh mesin. Teknologi mampu menjelaskan konsep, menjawab pertanyaan, menerjemahkan bahasa, bahkan menghasilkan berbagai bentuk materi pembelajaran dalam hitungan detik. Namun teknologi tidak mampu menggantikan keteladanan, kasih sayang, kebijaksanaan, maupun sentuhan kemanusiaan yang menjadi inti dari pendidikan. Seorang guru tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi memahami karakter setiap peserta didik. Guru membantu membangun rasa percaya diri, menumbuhkan semangat belajar, menguatkan ketika mengalami kegagalan, serta membimbing agar setiap kemampuan berkembang sesuai dengan tujuan hidup yang benar. Seluruh proses tersebut merupakan hubungan antarmanusia yang tidak dapat digantikan oleh algoritma.

Pada saat yang sama, guru juga harus terus berkembang. Perubahan dunia berlangsung sangat cepat sehingga pendidikan tidak dapat lagi mengandalkan metode lama yang hanya menempatkan peserta didik sebagai penerima informasi. Guru masa depan harus menjadi pembimbing dalam proses berpikir, fasilitator dalam proses belajar, sekaligus mentor dalam pembangunan karakter. Peserta didik perlu dibimbing agar mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, memilah informasi secara kritis, memahami berbagai persoalan bangsa secara komprehensif, dan mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam menghadapi tantangan global. Dengan demikian, guru bukan hanya mengajarkan pengetahuan yang tersedia hari ini, tetapi

mempersiapkan manusia menghadapi persoalan yang mungkin belum pernah muncul sebelumnya.

Dalam konteks pembangunan negara, profesi guru memiliki dampak yang sangat panjang. Seorang pejabat mungkin menjalankan amanah selama lima atau sepuluh tahun. Seorang pemimpin perusahaan mungkin memengaruhi organisasi selama beberapa dekade. Akan tetapi seorang guru dapat memengaruhi ratusan bahkan ribuan manusia sepanjang perjalanan kariernya. Setiap peserta didik yang dibimbing akan membawa nilai-nilai tersebut ke dalam keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, dan negara. Dampak tersebut terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, investasi terbesar sebuah bangsa sesungguhnya bukan hanya pembangunan fisik, melainkan pembangunan kualitas guru yang akan membentuk manusia-manusia masa depan.

Pandangan tersebut mengingatkan bahwa profesi guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan peradaban. Guru memegang tanggung jawab untuk menjaga agar bangsa Indonesia tidak hanya melahirkan generasi yang kompeten, tetapi juga generasi yang memiliki karakter. Bangsa ini membutuhkan guru yang mampu membangkitkan rasa ingin tahu, menumbuhkan budaya berpikir kritis, membangun kesadaran sejarah, mengajarkan makna kewarganegaraan yang benar, sekaligus menanamkan semangat pengabdian kepada bangsa. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi lahirnya

manusia yang mampu menjaga keberlangsungan republik.

Oleh sebab itu, menyelamatkan pendidikan tidak cukup dilakukan melalui pembangunan gedung sekolah, penyusunan kurikulum baru, atau penyediaan teknologi yang semakin canggih. Seluruh langkah tersebut akan kehilangan makna apabila tidak disertai upaya membangun kualitas guru sebagai arsitek peradaban. Ketika guru memahami bahwa tugas utamanya adalah membentuk manusia, sekolah akan melahirkan generasi yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Dari tangan para guru akan lahir warga negara yang menjaga Pancasila sebagai *kernel* bangsa, menjalankan konstitusi sebagai *firmware* negara, menghidupkan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan bersama, serta menjadi penggerak utama dalam mewujudkan **Restore Indonesia**, ***Free* Indonesia**, dan ***Save* Nusantara** bagi masa depan Indonesia yang lebih bermartabat.

21.7. AI, Teknologi, dan Masa Depan Pendidikan

Peradaban manusia selalu mengalami perubahan setiap kali muncul teknologi yang mampu mengubah cara manusia berpikir, bekerja, dan berinteraksi. Penemuan mesin cetak mengubah penyebaran ilmu pengetahuan. Revolusi industri mengubah cara manusia bekerja. Internet mengubah cara manusia memperoleh informasi. Kini dunia memasuki babak baru melalui perkembangan kecerdasan buatan

(*Artificial Intelligence* atau AI), sebuah teknologi yang mampu memproses informasi, menghasilkan analisis, menyusun tulisan, menerjemahkan bahasa, bahkan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Perubahan tersebut bukan sekadar perkembangan teknologi, tetapi perubahan besar yang akan menentukan arah pendidikan dan masa depan peradaban.

Dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah sekolah masih relevan ketika hampir seluruh informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik? Apakah guru masih dibutuhkan ketika kecerdasan buatan mampu menjelaskan berbagai konsep dengan cepat? Apakah pendidikan masih memiliki makna ketika mesin mampu menjawab hampir seluruh pertanyaan akademik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul karena pendidikan masih dipahami sebagai proses penyampaian informasi. Padahal sejak awal bab ini telah dijelaskan bahwa pendidikan bukan sekadar memindahkan pengetahuan, melainkan membentuk manusia. Selama manusia masih membutuhkan karakter, kebijaksanaan, integritas, dan tanggung jawab, pendidikan akan tetap memiliki peran yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Perkembangan AI justru memperlihatkan perbedaan yang semakin jelas antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengetahuan dapat dikumpulkan oleh mesin dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. AI mampu mengakses jutaan dokumen, mengenali pola, dan menghasilkan jawaban dalam waktu yang sangat

singkat. Namun kebijaksanaan tidak lahir hanya dari banyaknya informasi. Kebijaksanaan tumbuh melalui pengalaman, refleksi, nilai moral, empati, serta kemampuan memahami makna di balik setiap keputusan. Teknologi dapat membantu manusia memperoleh jawaban, tetapi teknologi tidak dapat menentukan mana jawaban yang paling bermartabat bagi kehidupan bersama. Di sinilah pendidikan memiliki kedudukan yang tidak tergantikan.

Perubahan tersebut seharusnya mengubah orientasi pendidikan. Selama bertahun-tahun sekolah lebih banyak mengajarkan bagaimana mencari jawaban yang benar. Pada era kecerdasan buatan, kemampuan tersebut tidak lagi menjadi pembeda utama karena mesin mampu menemukan jawaban jauh lebih cepat. Pendidikan masa depan harus beralih kepada kemampuan yang tidak mudah digantikan oleh teknologi, yaitu kemampuan berpikir kritis, menyusun pertanyaan yang berkualitas, memahami konteks, menghubungkan berbagai disiplin ilmu, membangun kreativitas, bekerja sama, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral. Dengan demikian, sekolah tidak lagi berfungsi sebagai gudang informasi, tetapi sebagai ruang pembentukan manusia yang mampu menggunakan teknologi secara bijaksana.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, AI hanyalah alat. Sebagaimana teknologi lainnya, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membangun maupun merusak. Dampak yang dihasilkan sepenuhnya bergantung pada manusia yang menggunakannya. Apabila teknologi berada di tangan

manusia yang berintegritas, teknologi akan mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat penelitian, memperbaiki tata kelola negara, dan memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan. Sebaliknya, apabila teknologi berada di tangan manusia yang kehilangan arah moral, AI dapat digunakan untuk menyebarkan manipulasi informasi, memperkuat propaganda, menghasilkan disinformasi dalam skala besar, bahkan memperdalam berbagai bentuk ketidakadilan. Oleh sebab itu, tantangan utama bukanlah perkembangan AI, melainkan kualitas manusia yang mengendalikan AI.

Pandangan tersebut sangat berkaitan dengan glosarium buku ini. Pancasila sebagai *kernel* bangsa merupakan fondasi nilai yang harus tetap menjadi pusat dalam setiap perkembangan teknologi. Konstitusi sebagai *firmware* negara menyediakan kerangka hukum agar pemanfaatan teknologi tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan. Sementara itu, Peradaban Nusantara sebagai *operating system* memastikan bahwa seluruh kemajuan teknologi digunakan untuk memperkuat kehidupan bersama, bukan sekadar mengejar efisiensi ekonomi. Tanpa *kernel*, *firmware*, dan *operating system* yang sehat, teknologi akan berkembang lebih cepat daripada kedewasaan manusia dalam menggunakannya.

Perkembangan AI juga membawa perubahan terhadap makna belajar. Pada masa lalu, keberhasilan belajar sering diukur melalui banyaknya informasi yang berhasil dihafalkan. Saat ini hampir seluruh informasi dapat dicari dalam hitungan detik. Oleh karena itu,

pendidikan tidak boleh lagi berhenti pada kemampuan mengingat. Pendidikan harus melatih kemampuan memahami hubungan antarkonsep, mengevaluasi kebenaran informasi, mengenali bias, menyusun argumentasi yang logis, serta mengembangkan solusi terhadap persoalan nyata. Kemampuan tersebut menjadikan manusia tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi pengendali arah pemanfaatan teknologi.

Tantangan lain yang muncul adalah melemahnya kemampuan berpikir mendalam. Kemudahan memperoleh jawaban sering membuat manusia kehilangan kebiasaan merenung, menelaah, dan membangun argumentasi secara mandiri. Ketika seluruh persoalan langsung diserahkan kepada mesin, kemampuan berpikir perlahan dapat mengalami degradasi. Fenomena tersebut sangat berbahaya bagi masa depan bangsa karena kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan lahir dari proses berpikir yang panjang. AI seharusnya membantu memperluas kapasitas manusia untuk berpikir, bukan menggantikan proses berpikir itu sendiri. Pendidikan memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan tersebut agar teknologi menjadi sarana pemberdayaan, bukan penyebab kemunduran intelektual.

Dalam konteks pembangunan bangsa, AI juga membuka peluang yang sangat besar. Pendidikan dapat menjadi lebih inklusif karena materi pembelajaran tersedia secara luas. Penelitian dapat berlangsung lebih cepat. Pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif. Analisis kebijakan dapat dilakukan secara lebih

komprehensif. Seluruh peluang tersebut akan memberikan manfaat besar apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir strategis dan karakter yang kuat. Sebaliknya, tanpa kualitas manusia yang memadai, bangsa hanya akan menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan oleh pihak lain tanpa mampu menjadi pencipta inovasi. Oleh sebab itu, pendidikan harus mempersiapkan generasi yang bukan hanya mampu memanfaatkan AI, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, perkembangan AI mengharuskan bangsa Indonesia memperbarui cara berpikir mengenai pendidikan dan pembangunan manusia. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, teknologi harus ditempatkan dalam sistem kenegaraan yang menjamin perlindungan terhadap martabat manusia, kebebasan berpikir, dan kepentingan rakyat. Sementara dalam perspektif ***Save* Nusantara**, teknologi harus menjadi sarana memperkuat Peradaban Nusantara, bukan menggantikannya. Kemajuan teknologi tidak boleh membuat manusia kehilangan akar budaya, identitas nasional, maupun nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Justru melalui teknologi, bangsa Indonesia memiliki kesempatan memperkenalkan kekayaan peradabannya kepada dunia sekaligus membangun inovasi yang berpijak pada karakter nasional.

Pada akhirnya, masa depan pendidikan tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh

kualitas manusia yang dibentuk melalui pendidikan. AI akan terus berkembang, komputasi akan semakin cepat, dan berbagai pekerjaan akan terus berubah. Namun kebutuhan terhadap manusia yang jujur, bijaksana, bertanggung jawab, mampu berpikir kritis, dan memiliki jiwa kenegarawanan tidak akan pernah berkurang. Seluruh kualitas tersebut tidak dapat diproduksi oleh mesin. Seluruhnya hanya dapat dibentuk melalui pendidikan yang memandang manusia sebagai pusat peradaban.

Oleh sebab itu, menyelamatkan pendidikan pada era kecerdasan buatan bukan berarti melawan teknologi, melainkan memastikan bahwa teknologi tetap berada di bawah kendali manusia yang berkarakter. Sekolah harus melahirkan generasi yang mampu menggunakan AI untuk memperluas ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat inovasi, dan memperkuat pembangunan bangsa, tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi identitas Indonesia. Ketika pendidikan berhasil membentuk manusia seperti itu, Pancasila akan tetap menjadi *kernel* bangsa, konstitusi tetap menjadi *firmware* negara, Peradaban Nusantara tetap menjadi *operating system* kehidupan bersama, dan teknologi akan berfungsi sebagai instrumen untuk mempercepat terwujudnya **Restore Indonesia**, ***Free* Indonesia**, dan ***Save* Nusantara** menuju peradaban Indonesia yang unggul, berdaulat, dan bermartabat.

21.8. Menyelamatkan Indonesia melalui Pendidikan

Setiap bangsa pada akhirnya akan bergerak mengikuti kualitas manusia yang dimilikinya. Kekayaan alam dapat habis, teknologi dapat berubah, kekuatan ekonomi dapat bergeser, bahkan sistem pemerintahan dapat mengalami pergantian. Namun selama sebuah bangsa mampu melahirkan manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki visi peradaban, bangsa tersebut akan selalu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Sebaliknya, apabila pendidikan gagal membentuk manusia yang berkualitas, tidak ada sistem pemerintahan, kekuatan ekonomi, ataupun kemajuan teknologi yang mampu menyelamatkan masa depan bangsa dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, menyelamatkan Indonesia sesungguhnya dimulai dari menyelamatkan pendidikan.

Pandangan tersebut menjadi benang merah dari seluruh pembahasan pada bab ini. Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah, bukan pula semata-mata tanggung jawab pemerintah. Pendidikan merupakan proses membangun manusia yang berlangsung sepanjang kehidupan. Keluarga menjadi tempat pertama menanamkan nilai. Sekolah mengembangkan pengetahuan, karakter, dan kemampuan berpikir. Masyarakat menjadi ruang untuk menguji seluruh nilai yang telah dipelajari. Negara menyediakan sistem agar seluruh proses tersebut berjalan secara adil. Ketika seluruh unsur tersebut saling menguatkan, lahirlah manusia yang mampu membangun peradaban. Sebaliknya, apabila salah satu unsur mengalami

kerusakan, kualitas manusia yang dihasilkan juga akan mengalami penurunan.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa keluarga merupakan fondasi pendidikan pertama. Pada bab ini juga telah dibahas bahwa sekolah tidak boleh berhenti menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan. Pendidikan harus membangun kemampuan berpikir kritis, kesadaran sejarah, pemahaman kewarganegaraan yang benar, karakter kepemimpinan, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pendidikan yang hanya menghasilkan manusia cerdas tanpa karakter akan melahirkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang hanya membentuk karakter tanpa kemampuan berpikir akan menghasilkan manusia yang mudah dipengaruhi. Pendidikan yang menguasai teknologi tanpa memiliki nilai akan mempercepat kerusakan. Pendidikan yang seimbang harus mampu membangun seluruh dimensi tersebut secara utuh.

Dalam perspektif buku ini, persoalan terbesar Indonesia bukan semata-mata keterbatasan sumber daya, melainkan kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya dipersiapkan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Bangsa ini memiliki jumlah penduduk yang besar, kekayaan alam yang melimpah, letak geografis yang strategis, serta keberagaman budaya yang luar biasa. Namun seluruh potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal apabila pendidikan belum mampu melahirkan manusia yang memiliki visi kebangsaan dan tanggung jawab terhadap

masa depan republik. Kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh banyaknya gedung sekolah atau tingginya angka partisipasi pendidikan semata, tetapi oleh kualitas manusia yang keluar dari sistem pendidikan tersebut.

Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan tidak boleh lagi diukur hanya melalui nilai ujian, tingkat kelulusan, atau jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja. Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah sejauh mana pendidikan mampu melahirkan manusia yang jujur, bertanggung jawab, berpikir kritis, memiliki kepedulian terhadap sesama, memahami negara secara benar, serta menjadikan pengabdian kepada bangsa sebagai bagian dari tujuan hidupnya. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang tidak hanya mampu mencari nafkah, tetapi juga mampu memimpin diri sendiri, memimpin masyarakat, dan menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa.

Pandangan tersebut sejalan dengan glosarium yang menjadi fondasi buku ini. Pancasila sebagai *kernel* bangsa merupakan sumber nilai yang membentuk karakter manusia Indonesia. Konstitusi sebagai *firmware* negara mengatur bagaimana kehidupan bernegara dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Peradaban Nusantara sebagai *operating system* menjadi ruang hidup yang menghubungkan seluruh unsur kehidupan bangsa, mulai dari keluarga, pendidikan, masyarakat, ekonomi, hukum, hingga penyelenggaraan negara. Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi proses yang menanamkan *kernel*, memperkenalkan *firmware*, sekaligus

menghidupkan *operating system* tersebut ke dalam kehidupan setiap generasi. Tanpa pendidikan yang benar, seluruh sistem kenegaraan akan kehilangan manusia yang mampu menjalankannya.

Dalam kerangka besar **Restore Indonesia**, pendidikan menjadi jalan untuk mengembalikan cara berpikir bangsa kepada tujuan pembentukan negara sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri republik. Pendidikan harus membantu masyarakat memahami bahwa negara dibentuk untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Dalam kerangka ***Free*** **Indonesia**, pendidikan membangun manusia yang mampu memperbaiki berbagai kelemahan sistem melalui pemikiran yang kritis, konstitusional, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam kerangka ***Save*** **Nusantara**, pendidikan menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa seluruh nilai luhur bangsa tidak hilang di tengah perubahan zaman, melainkan berkembang menjadi kekuatan yang mampu membawa Indonesia menuju peradaban yang semakin maju.

Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan semakin mempertegas pentingnya perubahan orientasi pendidikan. Dunia kerja akan terus berubah. Banyak profesi baru akan muncul, sementara sebagian profesi lama akan tergantikan oleh otomatisasi. Namun terdapat satu kebutuhan yang tidak akan pernah hilang, yaitu kebutuhan terhadap manusia yang mampu berpikir, memimpin, bekerja sama, menjaga integritas, dan mengambil keputusan yang berpihak kepada kemanusiaan. Pendidikan harus mempersiapkan generasi yang memiliki kemampuan tersebut. Dengan

demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi global, tetapi mampu melahirkan inovasi yang berakar pada karakter dan nilai-nilai bangsa sendiri.

Menyelamatkan pendidikan juga berarti mengembalikan makna belajar sebagai proses sepanjang hayat. Pendidikan tidak berhenti ketika seseorang lulus dari sekolah atau perguruan tinggi. Setiap pengalaman hidup merupakan bagian dari pendidikan. Setiap tantangan merupakan kesempatan untuk bertumbuh. Setiap perubahan zaman menuntut manusia untuk terus belajar tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi identitas bangsa. Budaya belajar sepanjang hayat akan membentuk masyarakat yang adaptif terhadap perubahan sekaligus kokoh dalam menjaga prinsip-prinsip kehidupan berbangsa.

Pada akhirnya, menyelamatkan Indonesia bukanlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh satu orang, satu lembaga, atau satu periode pemerintahan. Menyelamatkan Indonesia merupakan pekerjaan lintas generasi yang dimulai dari membangun manusia. Ketika keluarga menanamkan nilai, guru membentuk karakter, sekolah mengembangkan kemampuan berpikir, masyarakat menyediakan ruang pengabdian, dan negara menjalankan amanah berdasarkan konstitusi, maka seluruh unsur tersebut akan membentuk siklus pembangunan peradaban yang berkelanjutan. Dari siklus inilah lahir generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral, kuat secara spiritual, unggul dalam kepemimpinan, dan memiliki kesadaran bahwa

kehidupan pribadi tidak dapat dipisahkan dari masa depan bangsa.

Bab ini kemudian mengantarkan pada sebuah kesimpulan yang sederhana, tetapi sangat mendasar. Masa depan Indonesia tidak pertama-tama ditentukan oleh siapa yang memimpin negara, melainkan oleh manusia seperti apa yang dibentuk melalui pendidikan. Pemimpin negara lahir dari ruang-ruang kelas. Penyelenggara negara lahir dari keluarga. Ilmuwan, pengusaha, hakim, guru, prajurit, ulama, birokrat, dan seluruh unsur yang membangun republik merupakan hasil dari proses pendidikan yang berlangsung sejak masa kanak-kanak. Apabila pendidikan berhasil membentuk manusia yang berkarakter, seluruh bidang kehidupan bangsa akan ikut mengalami perbaikan. Sebaliknya, apabila pendidikan gagal, berbagai persoalan akan terus berulang meskipun sistem terus berganti.

Dengan demikian, menyelamatkan pendidikan sesungguhnya adalah menyelamatkan Indonesia. Pendidikan menjadi jembatan yang menghubungkan keluarga dengan negara, ilmu pengetahuan dengan kebijaksanaan, teknologi dengan kemanusiaan, serta masa lalu dengan masa depan. Dari pendidikan yang benar akan lahir manusia yang menjaga Pancasila sebagai *kernel* bangsa, menjalankan konstitusi sebagai *firmware* negara, menghidupkan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan bersama, serta menggerakkan agenda besar **Restore Indonesia**, ***Free* Indonesia**, dan ***Save* Nusantara** menuju Indonesia yang

berdaulat, berkeadilan, maju, dan bermartabat sebagai sebuah peradaban.

BAB 22
MENYELAMATKAN BAHASA DAN BUDAYA

22.1. Bahasa sebagai Cara Berpikir Bangsa



Manusia membangun peradaban melalui bahasa. Sebelum sebuah gagasan menjadi kebijakan, sebelum sebuah pengetahuan menjadi ilmu, sebelum sebuah peradaban melahirkan karya-karya besar, seluruhnya berawal dari kemampuan manusia menyusun makna melalui kata-kata. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan ruang tempat pikiran dibentuk, nilai diwariskan, dan identitas suatu bangsa dipelihara. Oleh sebab itu, ketika membahas upaya menyelamatkan Indonesia, pembahasan mengenai bahasa tidak dapat

dipisahkan dari pembahasan mengenai masa depan bangsa. Bangsa yang kehilangan kualitas bahasanya perlahan akan kehilangan kualitas cara berpikirnya, sedangkan bangsa yang menjaga bahasanya sedang menjaga fondasi peradabannya.

Selama ini bahasa sering dipahami sebagai kumpulan kosakata, aturan tata bahasa, atau media percakapan sehari-hari. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi belum menyentuh hakikat bahasa sebagai pembentuk kesadaran manusia. Setiap kata membawa konsep, setiap konsep membentuk cara berpikir, dan cara berpikir akan menentukan tindakan. Dengan kata lain, kualitas sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh banyaknya ilmu pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami makna yang terkandung di balik bahasa yang digunakan. Ketika makna sebuah kata berubah atau mengalami penyempitan, cara masyarakat memahami kenyataan juga akan ikut berubah.

Perubahan makna tersebut dapat ditemukan dalam berbagai istilah yang digunakan dalam kehidupan berbangsa. Salah satu contoh yang paling mendasar adalah penggunaan istilah negara dan pemerintah. Dalam percakapan sehari-hari, kedua istilah tersebut sering dianggap sama, padahal memiliki makna yang berbeda. Negara merupakan organisasi yang dibentuk oleh rakyat berdasarkan konstitusi untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan pemerintah hanyalah penyelenggara yang memperoleh amanah untuk menjalankan negara dalam jangka waktu tertentu. Ketika kedua istilah tersebut dipertukarkan

tanpa disadari, masyarakat perlahan kehilangan pemahaman mengenai kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kesalahan memahami bahasa akhirnya berkembang menjadi kesalahan memahami sistem kenegaraan.

Hal yang sama juga terjadi pada penggunaan kata rakyat dan masyarakat. Kata masyarakat sering digunakan untuk menggantikan kata rakyat sehingga hubungan antara negara dan pemilik kedaulatan menjadi semakin kabur. Padahal dalam konsep republik, rakyat bukan sekadar kumpulan penduduk, melainkan pemegang kedaulatan tertinggi yang memberikan amanah kepada penyelenggara negara. Perbedaan makna tersebut bukan persoalan linguistik semata, tetapi menyangkut cara sebuah bangsa memahami dirinya sendiri. Bahasa membentuk kesadaran pemerintah, kesadaran hukum, bahkan kesadaran mengenai posisi setiap warga negara di dalam kehidupan berbangsa.

Dalam buku ini telah dijelaskan bahwa Indonesia memerlukan pembaruan cara berpikir mengenai negara melalui gagasan **Restore Indonesia**. Pembaruan tersebut tidak mungkin dilakukan apabila bahasa yang digunakan untuk memahami negara masih keliru. Perubahan sistem selalu diawali oleh perubahan cara berpikir, sedangkan perubahan cara berpikir selalu diawali oleh perubahan cara memahami makna. Oleh sebab itu, membangun bangsa tidak cukup melalui pembangunan fisik ataupun perubahan kelembagaan. Bangsa juga harus membangun kembali ketepatan

bahasa agar setiap konsep dipahami sesuai makna yang sebenarnya.

Bahasa juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya. Budaya hidup melalui bahasa, sedangkan bahasa berkembang melalui budaya. Nilai-nilai gotong royong, musyawarah, sopan santun, penghormatan kepada orang tua, hingga berbagai bentuk kearifan lokal diwariskan melalui kata-kata yang terus digunakan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Ketika suatu bahasa kehilangan kosakata yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, budaya perlahan ikut mengalami pelemahan. Sebaliknya, ketika bahasa terus dipelihara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan tetap hidup meskipun zaman terus berubah.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa Indonesia. Sebagaimana *kernel* pada sebuah sistem komputer mengatur cara kerja seluruh sistem, Pancasila menjadi sumber nilai yang mengarahkan kehidupan berbangsa. Namun *kernel* tersebut hanya dapat dipahami apabila diterjemahkan melalui bahasa yang benar. Setiap sila Pancasila mengandung konsep yang sangat mendalam. Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekadar identitas keagamaan, melainkan fondasi moral. Kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya berbicara mengenai hubungan antarmanusia, tetapi juga penghormatan terhadap martabat manusia. Persatuan Indonesia bukan berarti menyeragamkan keberagaman, melainkan menyatukan seluruh perbedaan dalam tujuan bersama. Seluruh makna tersebut hanya dapat dipahami apabila

bahasa mampu menjelaskan konsep secara utuh, bukan sekadar menghafalkan bunyi kalimatnya.

Begitu pula dengan konstitusi yang dalam glosarium dipahami sebagai *firmware* negara. Konstitusi terdiri atas rangkaian kata yang disusun secara sistematis untuk mengatur kehidupan bernegara. Apabila masyarakat tidak memahami bahasa hukum secara benar, konstitusi hanya akan dipandang sebagai dokumen formal tanpa makna substantif. Banyak persoalan ketatanegaraan muncul bukan semata-mata karena lemahnya aturan, melainkan karena lemahnya pemahaman terhadap makna yang terkandung di dalam aturan tersebut. Dengan demikian, kualitas bahasa menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas penyelenggaraan negara.

Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan bangsa juga berkembang melalui bahasa. Bahasa menjadi media yang menghubungkan sejarah, tradisi, ilmu pengetahuan, seni, agama, dan berbagai pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Setiap daerah di Nusantara memiliki kekayaan bahasa yang menyimpan cara pandang terhadap alam, kehidupan, dan hubungan antarmanusia. Bahasa Indonesia kemudian hadir sebagai jembatan yang mempersatukan seluruh keberagaman tersebut menjadi identitas nasional. Keberhasilan bahasa Indonesia bukan hanya karena mampu menjadi alat komunikasi, tetapi karena berhasil menjadi ruang bersama tempat berbagai kebudayaan Nusantara saling bertemu tanpa kehilangan kekhasannya masing-masing.

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru terhadap kualitas bahasa. Arus informasi yang sangat cepat mendorong manusia menggunakan kalimat yang semakin singkat, sederhana, bahkan sering kali kehilangan ketepatan makna. Budaya membaca panjang mulai tergantikan oleh potongan informasi yang berdurasi beberapa detik. Kemampuan menyusun argumentasi perlahan menurun karena ruang diskusi semakin banyak digantikan oleh komentar singkat yang lebih menonjolkan emosi daripada penalaran. Fenomena tersebut tidak hanya memengaruhi cara berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi kualitas berpikir masyarakat. Ketika bahasa menjadi dangkal, proses berpikir juga cenderung menjadi dangkal.

Kondisi tersebut semakin penting diperhatikan pada era kecerdasan buatan. AI mampu menghasilkan jutaan kalimat dalam waktu yang sangat singkat, tetapi kualitas hasil tersebut tetap bergantung pada kemampuan manusia menyusun pertanyaan dan memahami makna jawaban yang diterima. Bangsa yang memiliki kemampuan bahasa yang kuat akan mampu memanfaatkan AI sebagai alat untuk memperluas pengetahuan. Sebaliknya, bangsa yang kehilangan kemampuan berbahasa hanya akan menjadi pengguna teknologi tanpa mampu menghasilkan gagasan-gagasan baru. Oleh sebab itu, penguasaan bahasa menjadi salah satu bentuk kedaulatan intelektual pada abad ke-21.

Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, pembebasan bangsa bukan hanya pembebasan dari berbagai

kelemahan sistem kenegaraan, tetapi juga pembebasan dari cara berpikir yang kabur akibat penggunaan bahasa yang tidak tepat. Sementara dalam perspektif ***Save* Nusantara**, penyelamatan bahasa berarti menjaga ruang tempat seluruh nilai, sejarah, dan kebudayaan bangsa diwariskan kepada generasi berikutnya. Bangsa yang mampu menjaga bahasa akan mampu menjaga identitasnya meskipun menghadapi perubahan global yang sangat cepat.

Pada akhirnya, bahasa merupakan lebih dari sekadar alat berbicara. Bahasa adalah rumah tempat pikiran bertumbuh, nilai berkembang, dan peradaban dibangun. Menyelamatkan bahasa berarti menyelamatkan kemampuan bangsa untuk berpikir secara jernih, memahami negara secara benar, menjaga kebudayaan secara berkelanjutan, serta membangun masa depan berdasarkan identitas sendiri. Ketika bahasa Indonesia terus berkembang sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa kebangsaan, sekaligus bahasa peradaban, Pancasila akan tetap hidup sebagai *kernel* bangsa, konstitusi akan dijalankan sebagai *firmware* negara, dan Peradaban Nusantara akan terus berfungsi sebagai *operating system* yang mengarahkan Indonesia menuju bangsa yang berdaulat, maju, dan bermartabat.

22.2. Krisis Bahasa Indonesia di Era Digital

Bahasa Indonesia lahir bukan sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai perekat bangsa. Jauh sebelum Indonesia merdeka, para pemuda telah menyadari bahwa keberagaman suku, budaya, dan

bahasa daerah memerlukan satu bahasa bersama yang mampu menyatukan seluruh anak bangsa. Kesadaran tersebut diwujudkan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak saat itu, bahasa Indonesia berkembang menjadi salah satu fondasi terpenting dalam pembentukan identitas nasional. Melalui bahasa Indonesia, berbagai kelompok masyarakat dapat membangun dialog, menyusun konstitusi, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan membangun negara yang bernama Republik Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga kualitas bahasa Indonesia sesungguhnya berarti menjaga salah satu fondasi utama keberlangsungan bangsa.

Namun perkembangan teknologi digital membawa perubahan yang sangat besar terhadap cara masyarakat menggunakan bahasa. Informasi bergerak dalam hitungan detik, media sosial mendorong komunikasi yang serba singkat, dan perhatian manusia semakin terbatas karena harus menghadapi arus informasi yang tidak pernah berhenti. Perubahan tersebut memang memberikan banyak manfaat, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan tantangan baru terhadap kualitas bahasa. Bahasa Indonesia semakin sering digunakan hanya sebagai sarana menyampaikan informasi secara cepat, bukan sebagai media untuk membangun pemikiran yang mendalam. Akibatnya, kemampuan menyusun argumentasi, menjelaskan konsep secara sistematis, dan memahami makna secara utuh mulai mengalami penurunan.

Fenomena tersebut terlihat dari semakin dominannya budaya membaca singkat dibandingkan membaca mendalam. Banyak orang lebih terbiasa membaca judul daripada isi, lebih tertarik pada potongan video berdurasi beberapa detik daripada buku yang membutuhkan konsentrasi, dan lebih sering mengutip pendapat orang lain daripada membangun pemikiran secara mandiri. Kebiasaan tersebut perlahan mengubah pola berpikir masyarakat. Proses berpikir yang seharusnya berlangsung melalui analisis, refleksi, dan penalaran digantikan oleh reaksi yang cepat terhadap potongan-potongan informasi. Ketika bahasa kehilangan kedalaman, kemampuan berpikir juga kehilangan kedalaman.

Kondisi tersebut diperkuat oleh budaya *copy and paste* yang semakin meluas. Kemudahan mengakses informasi membuat banyak orang lebih memilih menyalin daripada memahami. Tulisan, pendapat, bahkan hasil penelitian sering kali dipindahkan tanpa melalui proses berpikir yang kritis. Dalam jangka pendek, kebiasaan tersebut mungkin terlihat efisien. Namun dalam jangka panjang, budaya tersebut melemahkan kemampuan bangsa untuk menghasilkan gagasan yang orisinal. Bahasa tidak lagi menjadi alat untuk melahirkan pemikiran baru, tetapi hanya menjadi sarana menggandakan pemikiran yang sudah ada.

Perkembangan kecerdasan buatan mempercepat perubahan tersebut. AI mampu menghasilkan artikel, laporan, presentasi, bahkan berbagai bentuk karya tulis dalam waktu yang sangat singkat. Kemampuan tersebut merupakan kemajuan teknologi yang luar biasa dan

memberikan manfaat besar dalam meningkatkan produktivitas. Namun terdapat risiko yang perlu disadari. Ketika manusia terlalu bergantung pada mesin untuk berpikir dan menulis, kemampuan menyusun logika secara mandiri dapat mengalami penurunan. AI seharusnya menjadi alat yang memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikan proses intelektual yang menjadi inti dari pendidikan dan pengembangan peradaban.

Persoalan yang lebih mendasar sebenarnya bukan terletak pada penggunaan teknologi, melainkan pada hilangnya budaya berpikir melalui bahasa. Menulis merupakan proses berpikir. Ketika seseorang berusaha menyusun kalimat yang runtut, sesungguhnya sedang menyusun hubungan antargagasan. Ketika seseorang memilih kata yang tepat, sesungguhnya sedang memilih konsep yang paling sesuai untuk menggambarkan kenyataan. Oleh sebab itu, kemampuan berbahasa tidak dapat dipisahkan dari kemampuan berpikir. Bangsa yang kehilangan tradisi menulis secara perlahan akan kehilangan tradisi berpikir secara mendalam.

Krisis bahasa juga terlihat dari semakin kaburnya penggunaan berbagai istilah penting dalam kehidupan berbangsa. Banyak konsep digunakan tanpa memahami makna yang sebenarnya. Istilah demokrasi sering dipersempit hanya menjadi pemilihan umum. Meritokrasi dipahami sekadar sebagai penghargaan terhadap prestasi tanpa melihat integritas. Negara dipertukarkan dengan pemerintah, sementara rakyat sering disamakan dengan masyarakat. Kekaburan

makna tersebut akhirnya memengaruhi cara masyarakat memahami berbagai persoalan kebangsaan. Ketika konsep dipahami secara keliru, solusi yang dibangun juga berpotensi keliru. Oleh sebab itu, memperbaiki bahasa berarti memperbaiki kualitas cara berpikir bangsa.

Dalam glosarium buku ini telah dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa Indonesia. Agar *kernel* tersebut dapat bekerja secara benar, setiap nilai Pancasila harus dipahami melalui bahasa yang tepat. Pancasila tidak boleh direduksi menjadi slogan, hafalan, atau simbol seremonial. Setiap sila mengandung konsep filosofis yang memerlukan pemahaman bahasa yang baik agar mampu diterapkan dalam kehidupan nyata. Ketika kemampuan memahami bahasa menurun, nilai-nilai Pancasila juga berisiko dipahami secara dangkal. Akibatnya, bangsa kehilangan kemampuan menerjemahkan nilai menjadi tindakan.

Hal yang sama berlaku terhadap konstitusi sebagai *firmware* negara. Seluruh norma hukum dibangun melalui bahasa. Setiap pasal, setiap frasa, bahkan setiap pilihan kata memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Rendahnya kemampuan memahami bahasa hukum akan menyebabkan masyarakat sulit memahami hak, kewajiban, maupun struktur negara yang sesungguhnya. Dalam banyak kasus, persoalan bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya kemampuan memahami bahasa yang digunakan dalam aturan tersebut. Oleh karena itu, kualitas bahasa memiliki hubungan langsung dengan kualitas penyelenggaraan negara.

Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan bersama juga memerlukan bahasa yang sehat agar mampu terus berkembang. Bahasa menjadi media yang menghubungkan generasi terdahulu dengan generasi masa depan. Melalui bahasa, sejarah diwariskan, ilmu dikembangkan, budaya dipelihara, dan identitas bangsa dipertahankan. Apabila bahasa Indonesia kehilangan kualitasnya, Peradaban Nusantara akan kehilangan salah satu jalur utama pewarisan nilai. Bangsa mungkin tetap memiliki teknologi yang maju, tetapi kehilangan kemampuan memahami jati dirinya sendiri.

Di sisi lain, era digital sebenarnya juga menghadirkan peluang yang sangat besar. Teknologi memungkinkan bahasa Indonesia menjangkau dunia dengan lebih luas. Jutaan buku dapat didigitalkan, karya ilmiah dapat diakses secara terbuka, dan berbagai hasil penelitian dapat dipelajari oleh masyarakat tanpa batas geografis. AI juga dapat membantu penerjemahan, pengembangan kosakata, serta penyebaran ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia. Peluang tersebut akan memberikan manfaat yang besar apabila diiringi dengan peningkatan kualitas literasi masyarakat. Teknologi tidak boleh diposisikan sebagai pengganti kemampuan berbahasa, tetapi sebagai sarana untuk memperluas daya jangkau bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa peradaban.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, membangun kembali bangsa harus dimulai dengan membangun kembali kejernihan berpikir melalui bahasa yang benar. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, bangsa harus

dibebaskan dari budaya berpikir instan yang membuat masyarakat mudah dipengaruhi oleh informasi yang belum tentu benar. Sementara dalam perspektif ***Save* Nusantara**, bahasa Indonesia harus terus berkembang sebagai rumah bersama yang mampu menyatukan keberagaman Nusantara sekaligus menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan pada era global.

Pada akhirnya, krisis bahasa di era digital bukan semata-mata persoalan tata bahasa, ejaan, atau pilihan kosakata. Krisis tersebut merupakan persoalan peradaban karena menyangkut kemampuan bangsa untuk berpikir secara mendalam, berdialog secara rasional, dan membangun masa depan berdasarkan pemahaman yang benar. Menyelamatkan bahasa Indonesia berarti membangun kembali budaya membaca, budaya menulis, budaya berdiskusi, dan budaya berpikir kritis. Ketika bahasa Indonesia tetap hidup sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa kebangsaan, dan bahasa peradaban, Pancasila akan terus menjadi *kernel* yang mengarahkan nilai bangsa, konstitusi akan berfungsi sebagai *firmware* yang menjaga kehidupan bernegara, dan Peradaban Nusantara akan tetap menjadi *operating system* yang membawa Indonesia menuju masa depan yang cerdas, berdaulat, dan bermartabat.

22.3. Budaya sebagai *Operating System* Peradaban

Ketika membicarakan kemajuan sebuah bangsa, perhatian sering kali tertuju pada pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kekuatan militer, atau kemegahan infrastruktur. Padahal seluruh

pencapaian tersebut hanya merupakan hasil yang tampak di permukaan. Di balik setiap bangsa yang maju selalu terdapat sesuatu yang bekerja secara senyap, mengatur cara manusia berpikir, bersikap, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan sesama. Unsur tersebut adalah budaya. Budaya bukan sekadar tarian tradisional, pakaian adat, kesenian, atau upacara yang diwariskan turun-temurun. Budaya merupakan sistem nilai yang membentuk cara hidup suatu bangsa. Oleh sebab itu, ketika budaya mengalami kerusakan, kerusakan tersebut tidak hanya terlihat pada hilangnya tradisi, tetapi juga pada berubahnya cara berpikir dan cara hidup masyarakat.

Dalam glosarium buku ini, Peradaban Nusantara dijelaskan sebagai *operating system* kehidupan berbangsa. Analogi tersebut memberikan pemahaman bahwa sebagaimana sebuah *operating system* mengatur seluruh fungsi komputer agar dapat bekerja secara terpadu, budaya mengatur bagaimana nilai-nilai bangsa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia mungkin tidak selalu menyadari keberadaan *operating system*, tetapi seluruh aktivitas bergantung pada sistem tersebut. Demikian pula budaya. Banyak tindakan dilakukan secara otomatis karena telah menjadi kebiasaan yang diwariskan melalui keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan pengalaman hidup. Budaya menjadi ruang tempat nilai diterjemahkan menjadi perilaku yang nyata.

Dalam kerangka tersebut, Pancasila sebagai *kernel* bangsa menyediakan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan nasional. Konstitusi sebagai *firmware*

negara memberikan aturan agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Namun nilai dan aturan tersebut tidak akan hidup apabila tidak diwujudkan dalam budaya sehari-hari. Dengan kata lain, budaya merupakan mekanisme yang membuat *kernel* dan *firmware* dapat dijalankan secara nyata di tengah kehidupan masyarakat. Pancasila dapat ditulis dalam berbagai dokumen, konstitusi dapat dicetak dalam ribuan buku, tetapi tanpa budaya yang mendukung, keduanya hanya akan menjadi teks yang kehilangan daya hidup.

Hal tersebut menjelaskan mengapa bangsa yang memiliki konstitusi yang baik belum tentu menjadi bangsa yang maju. Banyak negara memiliki aturan yang lengkap, lembaga yang modern, bahkan sistem pemerintahan yang tampak demokratis. Namun apabila budaya yang berkembang justru membenarkan ketidakjujuran, penyalahgunaan kekuasaan, atau kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, maka aturan tersebut akan kehilangan makna. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki budaya integritas akan mampu menjaga kualitas kehidupan bersama meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Pada akhirnya, budaya bukan hanya pelengkap sistem kenegaraan, melainkan faktor yang menentukan apakah sistem tersebut benar-benar berfungsi.

Budaya juga menjadi mekanisme pewarisan nilai antargenerasi. Seorang anak tidak mempelajari kejujuran pertama kali melalui buku pelajaran, tetapi melalui kebiasaan yang dilihat setiap hari di dalam keluarga. Sikap menghormati orang lain tidak tumbuh

karena hafalan definisi, melainkan karena terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong tidak berkembang melalui teori, tetapi melalui pengalaman bekerja bersama. Seluruh proses tersebut membentuk pola perilaku yang kemudian berkembang menjadi budaya. Oleh sebab itu, budaya tidak diwariskan melalui ceramah semata, melainkan melalui keteladanan yang dilakukan secara terus-menerus.

Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki modal budaya yang sangat besar. Nilai gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, penghormatan terhadap orang tua, semangat kebersamaan, keramahan, serta kehidupan religius telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Peradaban Nusantara. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan aset peradaban yang relevan untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan. Di tengah dunia yang semakin individualistis, budaya gotong royong justru menawarkan model kolaborasi yang semakin dibutuhkan. Di tengah polarisasi kekuasaan global, tradisi musyawarah memberikan pendekatan yang lebih mengedepankan dialog daripada konfrontasi. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, budaya yang berakar pada nilai kemanusiaan menjadi pengingat bahwa kemajuan harus tetap berpihak kepada martabat manusia.

Sayangnya, perkembangan globalisasi juga membawa perubahan terhadap cara masyarakat memandang budaya. Budaya sering direduksi menjadi pertunjukan seni, festival tahunan, atau objek pariwisata. Padahal kebudayaan jauh lebih luas

daripada ekspresi seni. Budaya mencakup etos kerja, cara menghormati waktu, cara membangun kepercayaan, cara menyelesaikan konflik, cara memandang ilmu pengetahuan, hingga cara memperlakukan alam. Ketika budaya dipersempit hanya menjadi simbol-simbol yang bersifat seremonial, bangsa kehilangan kesempatan untuk menjadikan budaya sebagai kekuatan pembangunan.

Era digital semakin mempercepat perubahan tersebut. Arus informasi lintas negara membuat berbagai gaya hidup baru masuk tanpa batas. Fenomena tersebut pada satu sisi memperkaya wawasan masyarakat, tetapi pada sisi lain dapat melemahkan identitas apabila tidak disertai kemampuan menyaring nilai. Budaya populer global berkembang dengan sangat cepat melalui media sosial, film, musik, permainan digital, dan berbagai platform daring. Tidak ada yang salah dengan mempelajari budaya bangsa lain. Justru peradaban yang maju selalu terbuka terhadap pertukaran pengetahuan. Namun keterbukaan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menjaga identitas sendiri. Bangsa yang kuat bukan bangsa yang menolak pengaruh luar, melainkan bangsa yang mampu menyerap hal-hal baik dari luar tanpa kehilangan jati dirinya.

Dalam perspektif Peradaban Nusantara, budaya tidak bersifat statis. Budaya harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa melepaskan nilai-nilai dasarnya. Sebagaimana sebuah *operating system* terus diperbarui agar mampu menjalankan teknologi yang semakin kompleks, budaya juga memerlukan

pembaruan agar tetap relevan menghadapi tantangan baru. Pembaruan tersebut bukan berarti meninggalkan identitas, tetapi memperkuat identitas melalui cara-cara yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Gotong royong dapat berkembang melalui kolaborasi digital. Musyawarah dapat diperkuat melalui teknologi komunikasi. Semangat kebersamaan dapat diwujudkan dalam inovasi sosial yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Nilai tetap dipertahankan, sementara cara pelaksanaannya berkembang mengikuti zaman.

Peran pendidikan menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan budaya. Sekolah tidak hanya mengajarkan sejarah kebudayaan Indonesia, tetapi juga harus membentuk kebiasaan hidup yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Pendidikan harus melatih disiplin sebagai budaya, integritas sebagai budaya, tanggung jawab sebagai budaya, dan pengabdian kepada bangsa sebagai budaya. Dengan demikian, budaya tidak dipahami sebagai warisan masa lalu yang hanya dikenang, melainkan sebagai cara hidup yang terus dibangun setiap hari.

Dalam kerangka **Restore Indonesia**, pembangunan budaya berarti mengembalikan kehidupan bangsa kepada nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pembentukan republik. Dalam kerangka ***Free*** **Indonesia**, budaya menjadi kekuatan yang membebaskan masyarakat dari berbagai kebiasaan yang menghambat kemajuan, seperti budaya korupsi, budaya ketergantungan, budaya manipulasi, dan budaya berpikir instan. Selanjutnya, dalam kerangka ***Save*** **Nusantara**, budaya menjadi fondasi untuk

memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi tetap berada dalam jalur yang memperkuat Peradaban Nusantara, bukan justru menghilangkan identitas bangsa.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam atau kecanggihan teknologinya, tetapi oleh budaya yang menggerakkan seluruh kehidupan masyarakat. Budaya merupakan *operating system* yang membuat nilai menjadi tindakan, hukum menjadi kebiasaan, dan cita-cita bangsa menjadi kenyataan. Ketika *operating system* tersebut berjalan dengan baik, Pancasila sebagai *kernel* akan terus memberikan arah moral, konstitusi sebagai *firmware* akan menjaga keteraturan negara, dan seluruh unsur kehidupan bangsa akan bekerja secara harmonis menuju tujuan bersama. Oleh sebab itu, menyelamatkan budaya bukan sekadar melestarikan warisan leluhur, melainkan menjaga sistem kehidupan yang memungkinkan Indonesia tumbuh sebagai bangsa yang berkarakter, berdaulat, maju, dan bermartabat di tengah perubahan dunia yang semakin cepat.

22.4. Globalisasi, Identitas, dan Kedaulatan Budaya

Tidak ada bangsa yang hidup dalam ruang yang tertutup. Sejak ribuan tahun yang lalu, Nusantara telah menjadi titik pertemuan berbagai peradaban dunia. Pedagang dari India, Tiongkok, Timur Tengah, hingga Eropa datang membawa barang dagangan, ilmu pengetahuan, agama, bahasa, seni, dan cara hidup yang kemudian berinteraksi dengan budaya lokal. Pertemuan tersebut melahirkan proses akulturasi yang

memperkaya Peradaban Nusantara tanpa menghilangkan identitas dasarnya. Dengan demikian, keterbukaan terhadap dunia bukanlah sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Yang menjadi tantangan pada abad ke-21 bukan lagi sekadar bertemunya berbagai kebudayaan, melainkan kecepatan arus globalisasi yang mampu mengubah pola pikir, gaya hidup, dan sistem nilai dalam waktu yang sangat singkat.

Globalisasi menghadirkan berbagai peluang yang tidak pernah dimiliki generasi sebelumnya. Ilmu pengetahuan dapat diakses dari seluruh penjuru dunia hanya melalui telepon genggam. Kolaborasi lintas negara berlangsung tanpa hambatan geografis. Inovasi teknologi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Produk budaya dari berbagai bangsa dapat dinikmati dalam hitungan detik. Dunia menjadi semakin terhubung sehingga batas-batas fisik antarnegara tidak lagi menjadi penghalang bagi pertukaran gagasan. Kondisi tersebut merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk belajar, berkolaborasi, dan mengambil bagian dalam pembangunan peradaban dunia.

Namun setiap peluang selalu disertai tantangan. Arus globalisasi yang tidak disertai dengan identitas yang kuat dapat menyebabkan sebuah bangsa kehilangan arah. Ketika masyarakat lebih mengenal budaya bangsa lain daripada budayanya sendiri, lebih memahami sejarah negara lain daripada sejarah bangsanya sendiri, atau lebih bangga menggunakan simbol-simbol asing daripada identitas nasional, maka

persoalan yang muncul bukan lagi sekadar perubahan gaya hidup. Persoalan tersebut telah menyentuh akar peradaban karena menyangkut bagaimana sebuah bangsa memandang dirinya sendiri. Bangsa yang kehilangan kebanggaan terhadap identitasnya akan semakin sulit menentukan arah pembangunan masa depannya.

Perubahan tersebut semakin nyata pada era media sosial. Algoritma digital tidak mengenal batas negara. Informasi yang paling menarik akan menyebar lebih cepat daripada informasi yang paling benar. Budaya populer dari berbagai belahan dunia hadir setiap hari melalui musik, film, permainan digital, fesyen, hingga berbagai bentuk konten yang dikonsumsi oleh jutaan masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut tidak dapat dihindari, bahkan tidak perlu dipandang sebagai ancaman selama masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring nilai yang diterima. Masalah sesungguhnya muncul ketika kemampuan menyaring tersebut melemah sehingga masyarakat lebih mudah meniru daripada memahami, lebih mudah mengikuti tren daripada membangun identitas, dan lebih mudah mengagumi budaya luar daripada mengembangkan kekayaan budayanya sendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa globalisasi bukan sekadar persoalan ekonomi atau teknologi, tetapi juga persoalan budaya. Persaingan antarbangsa tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer atau perdagangan, melainkan juga melalui pengaruh budaya. Negara-negara yang mampu memperkenalkan bahasa, seni, musik, film, kuliner, nilai, dan cara hidup

kepada masyarakat dunia akan memperoleh posisi yang semakin kuat dalam percaturan global. Budaya berkembang menjadi salah satu bentuk kekuatan strategis yang mampu memengaruhi cara pandang masyarakat internasional tanpa menggunakan tekanan kekuasaan maupun kekuatan senjata.

Dalam perspektif tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang sangat besar. Peradaban Nusantara dibangun di atas keberagaman yang hampir tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, beragam tradisi, serta sejarah panjang interaksi antarperadaban telah melahirkan kekayaan budaya yang luar biasa. Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, kekeluargaan, serta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam merupakan bagian dari identitas bangsa yang memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan dunia modern. Persoalannya bukan terletak pada ketiadaan budaya, melainkan pada kemampuan bangsa untuk mengelola dan mengembangkannya menjadi kekuatan peradaban.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa. Analogi tersebut menjadi sangat penting dalam menghadapi globalisasi. Sebagaimana sebuah *operating system* mampu menjalankan berbagai aplikasi tanpa kehilangan identitas sistemnya, Peradaban Nusantara harus mampu menerima ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai perkembangan global tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Bangsa yang memiliki *operating system* yang kuat tidak akan

takut terhadap perubahan karena setiap inovasi akan diproses melalui sistem nilai yang telah dimiliki. Sebaliknya, bangsa yang kehilangan *operating system* akan mudah mengalami kebingungan identitas karena setiap pengaruh baru diterima tanpa proses penyaringan yang memadai.

Pancasila sebagai *kernel* bangsa berfungsi sebagai pusat nilai yang menentukan arah proses penyaringan tersebut. Setiap perkembangan global perlu diukur berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, keterbukaan terhadap dunia tidak berarti menerima seluruh pengaruh secara tanpa batas, melainkan memilih berbagai unsur yang mampu memperkuat kehidupan bangsa. Pada saat yang sama, konstitusi sebagai *firmware* negara menyediakan kerangka hukum agar proses globalisasi tetap berjalan sesuai dengan kepentingan nasional dan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan kecerdasan buatan juga memperluas dimensi globalisasi budaya. AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga mengubah cara manusia menciptakan dan mengonsumsi kebudayaan. Musik dapat dihasilkan oleh mesin, karya visual dapat dibuat dalam hitungan detik, penerjemahan bahasa berlangsung secara otomatis, bahkan berbagai bentuk ekspresi budaya dapat diproduksi dengan biaya yang semakin rendah. Perubahan tersebut membuka peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk memperkenalkan budaya

Nusantara kepada dunia melalui teknologi digital. Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila bangsa memiliki kesadaran yang kuat terhadap nilai budayanya sendiri. Teknologi hanyalah alat. Identitas tetap ditentukan oleh manusia yang menggunakannya.

Kedaulatan budaya karena itu tidak berarti menutup diri dari pengaruh luar. Kedaulatan budaya berarti memiliki kemampuan menentukan arah perkembangan budaya nasional berdasarkan kepentingan bangsa sendiri. Bangsa yang berdaulat secara budaya mampu memilih mana yang perlu dipelajari, mana yang perlu disesuaikan, dan mana yang perlu ditolak karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Kedaulatan budaya juga berarti memiliki keberanian untuk mengembangkan inovasi yang berakar pada identitas sendiri sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen budaya global, tetapi juga menjadi salah satu kontributor penting dalam perkembangan peradaban dunia.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, penguatan identitas budaya merupakan bagian dari upaya mengembalikan bangsa kepada kesadaran mengenai jati dirinya. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, kedaulatan budaya membebaskan bangsa dari ketergantungan psikologis yang selalu menganggap budaya asing lebih unggul daripada budaya sendiri. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, budaya menjadi fondasi yang memastikan bahwa seluruh proses modernisasi, digitalisasi, dan globalisasi tetap memperkuat Peradaban Nusantara sebagai identitas

nasional yang hidup, berkembang, dan mampu memberikan kontribusi bagi dunia.

Pada akhirnya, globalisasi bukanlah musuh yang harus ditolak, melainkan realitas yang harus dikelola dengan bijaksana. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menutup pintu terhadap dunia, tetapi bangsa yang mampu berdialog dengan dunia tanpa kehilangan dirinya sendiri. Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi bangsa seperti itu karena memiliki Pancasila sebagai *kernel* bangsa, konstitusi sebagai *firmware* negara, dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan bersama. Ketika ketiga fondasi tersebut terus dijaga, globalisasi tidak akan menghapus identitas Indonesia, melainkan menjadi jalan untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur Nusantara sebagai bagian dari peradaban dunia yang semakin maju, damai, dan bermartabat.

22.5. Bahasa, Budaya, dan Soft Power Indonesia

Perkembangan dunia pada abad ke-21 menunjukkan bahwa kekuatan suatu bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, kekayaan sumber daya alam, ataupun kekuatan militernya. Dalam hubungan internasional modern, pengaruh suatu negara semakin banyak dibangun melalui kemampuan menarik simpati, membangun kepercayaan, dan memengaruhi cara pandang masyarakat dunia. Bentuk kekuatan tersebut dikenal sebagai *soft power*, yaitu kemampuan sebuah bangsa memengaruhi bangsa lain melalui daya tarik budaya, nilai, ilmu pengetahuan, pendidikan, bahasa, inovasi,

dan kualitas peradabannya. Bangsa yang memiliki *soft power* yang kuat tidak perlu memaksa dunia untuk menghormatinya karena penghormatan tersebut tumbuh secara alami melalui kontribusi yang diberikan kepada umat manusia.

Berbagai negara telah menunjukkan bagaimana budaya dapat berkembang menjadi kekuatan strategis. Jepang dikenal melalui etos kerja, teknologi, anime, kuliner, dan filosofi hidup yang membentuk citra positif di mata dunia. Korea Selatan membangun pengaruh global melalui industri musik, film, drama, kosmetik, hingga teknologi digital yang berhasil memperkenalkan budaya Korea kepada berbagai bangsa. Turki memanfaatkan sejarah panjang peradabannya melalui film, pariwisata, kuliner, dan diplomasi kebudayaan. Tiongkok mengembangkan bahasa, pendidikan, teknologi, dan warisan sejarah sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi global. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga modal strategis untuk membangun masa depan.

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi *soft power* yang tidak kalah besar. Kekayaan budaya Nusantara merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, beragam tradisi, seni pertunjukan, arsitektur, kuliner, filosofi hidup, hingga kekayaan spiritual menjadi modal yang hampir tidak dimiliki bangsa lain. Selain itu, Indonesia juga memiliki Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang digunakan oleh lebih dari dua ratus juta penduduk dan terus

berkembang sebagai salah satu bahasa penting di kawasan Asia Tenggara. Potensi tersebut merupakan aset strategis yang dapat menjadi kekuatan besar apabila dikelola dengan visi peradaban.

Sayangnya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi pengaruh global. Banyak unsur budaya Indonesia dikenal secara terpisah, tetapi belum terintegrasi menjadi narasi besar mengenai identitas bangsa. Dunia mengenal batik, wayang, angklung, rendang, atau Bali sebagai destinasi wisata, namun belum sepenuhnya memahami filosofi Peradaban Nusantara yang melahirkan seluruh kekayaan tersebut. Padahal sebuah bangsa akan memiliki *soft power* yang kuat apabila mampu menjelaskan bukan hanya produk budayanya, melainkan juga sistem nilai yang melandasi seluruh produk budaya tersebut.

Dalam perspektif buku ini, sistem nilai tersebut adalah Peradaban Nusantara. Peradaban Nusantara bukan sekadar kumpulan tradisi lokal, melainkan sebuah cara pandang terhadap kehidupan yang dibangun melalui perjalanan sejarah yang panjang. Nilai gotong royong, musyawarah, keseimbangan antara manusia dan alam, penghormatan terhadap keberagaman, serta kehidupan yang berlandaskan moral merupakan karakter yang membedakan Indonesia dari banyak bangsa lain. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang semakin tinggi di tengah dunia yang menghadapi polarisasi kekuasaan, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan krisis kepercayaan terhadap berbagai institusi modern.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya memiliki daya tarik universal karena berbicara mengenai kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial. Nilai tersebut bukan hanya penting bagi kehidupan nasional, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap peradaban dunia. Ketika Pancasila benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dunia tidak hanya akan mengenal Indonesia sebagai negara yang besar, tetapi juga sebagai bangsa yang memiliki model kehidupan bersama yang mampu menjawab berbagai tantangan global.

Konstitusi sebagai *firmware* negara juga memiliki peran penting dalam memperkuat *soft power*. Dunia akan lebih mudah mempercayai sebuah bangsa apabila penyelenggaraan negaranya menunjukkan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kelembagaan. Dengan demikian, *soft power* tidak hanya dibangun melalui kebudayaan, tetapi juga melalui kualitas penyelenggaraan negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Budaya yang kuat tanpa tata kelola negara yang baik akan sulit memperoleh kepercayaan internasional. Sebaliknya, tata kelola yang baik akan semakin bernilai apabila ditopang oleh identitas budaya yang kuat.

Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa menjadi fondasi yang menghubungkan seluruh unsur tersebut. Sebagaimana

sebuah *operating system* mengintegrasikan berbagai perangkat agar bekerja secara harmonis, Peradaban Nusantara menyatukan bahasa, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kehidupan kenegaraan ke dalam satu sistem nilai yang utuh. Dari sistem tersebut lahir cara hidup yang khas, cara memandang manusia yang khas, dan cara membangun hubungan sosial yang khas. Inilah identitas yang sesungguhnya dapat ditawarkan Indonesia kepada dunia.

Bahasa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan *soft power*. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga pintu masuk untuk memahami cara berpikir suatu bangsa. Ketika semakin banyak masyarakat dunia mempelajari Bahasa Indonesia, semakin besar pula peluang dunia memahami sejarah, sastra, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Nusantara. Oleh sebab itu, pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek linguistik, melainkan sebagai strategi peradaban. Bahasa Indonesia harus berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan, bahasa diplomasi, bahasa ekonomi, dan bahasa kebudayaan yang mampu menjembatani hubungan Indonesia dengan masyarakat dunia.

Pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting. Universitas, lembaga penelitian, pertukaran pelajar, kerja sama akademik, hingga publikasi ilmiah merupakan instrumen *soft power* yang sangat efektif. Banyak negara berhasil membangun pengaruh global melalui kualitas pendidikan yang menarik mahasiswa

dari berbagai belahan dunia. Indonesia memiliki peluang yang sama apabila mampu mengembangkan pusat-pusat studi mengenai Peradaban Nusantara, Pancasila, bahasa Indonesia, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan berbagai bidang ilmu yang memiliki keunggulan khas Indonesia. Dengan demikian, dunia tidak hanya datang untuk menikmati keindahan alam Indonesia, tetapi juga datang untuk belajar dari pemikiran dan peradaban Indonesia.

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan semakin membuka peluang tersebut. Konten budaya dapat disebarluaskan ke seluruh dunia tanpa batas geografis. Film, musik, buku, permainan digital, museum virtual, hingga pembelajaran bahasa dapat menjangkau masyarakat internasional dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan masa sebelumnya. Tantangan terbesar bukan lagi keterbatasan media, melainkan kemampuan bangsa untuk menghasilkan narasi yang mampu menjelaskan identitas Indonesia secara utuh. Bangsa yang mampu menceritakan dirinya sendiri akan lebih dihormati daripada bangsa yang identitasnya selalu diceritakan oleh orang lain.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, pembangunan *soft power* merupakan bagian dari upaya mengembalikan kepercayaan bangsa terhadap kekuatan budayanya sendiri. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, *soft power* membebaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap pengakuan yang selalu berasal dari luar, karena bangsa ini memiliki kemampuan membangun pengaruh berdasarkan nilai-

nilai yang dimilikinya sendiri. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, *soft power* menjadi jalan untuk memastikan bahwa Peradaban Nusantara tidak hanya bertahan di dalam negeri, tetapi juga berkembang sebagai salah satu kontribusi Indonesia bagi kemajuan peradaban dunia.

Pada akhirnya, bahasa dan budaya bukan sekadar simbol identitas nasional, melainkan instrumen strategis yang menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global. Bangsa yang mampu mengubah kebudayaannya menjadi sumber inspirasi akan memperoleh penghormatan yang jauh lebih besar daripada bangsa yang hanya mengandalkan kekuatan ekonomi atau militer. Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk membangun kekuatan tersebut melalui Pancasila sebagai *kernel* bangsa, konstitusi sebagai *firmware* negara, dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa. Ketika ketiga fondasi tersebut benar-benar hidup dalam masyarakat, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, tetapi juga sebagai bangsa yang mampu menawarkan nilai, gagasan, dan jalan peradaban bagi dunia yang sedang mencari keseimbangan baru antara kemajuan teknologi dan kemuliaan manusia.

22.6. Menyelamatkan Bahasa dan Budaya untuk Menyelamatkan Peradaban

Perjalanan sebuah bangsa selalu ditentukan oleh kemampuan menjaga identitasnya di tengah perubahan zaman. Sejarah menunjukkan bahwa banyak peradaban

besar tidak runtuh karena kekalahan dalam peperangan, melainkan karena kehilangan arah hidup, kehilangan sistem nilai, dan kehilangan kepercayaan terhadap jati dirinya sendiri. Ketika sebuah bangsa tidak lagi memahami bahasa yang membentuk cara berpikirnya, tidak lagi menghargai budaya yang membentuk cara hidupnya, dan tidak lagi memiliki kesadaran terhadap sejarah yang membentuk identitasnya, maka proses kemunduran sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum keruntuhan tersebut tampak secara kasat mata. Oleh sebab itu, menyelamatkan bahasa dan budaya bukanlah agenda kebudayaan semata, melainkan agenda strategis untuk menjaga keberlangsungan peradaban bangsa.

Bahasa dan budaya merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa menyimpan konsep-konsep yang membentuk cara berpikir, sedangkan budaya menerjemahkan konsep-konsep tersebut menjadi kebiasaan hidup. Ketika bahasa kehilangan makna, budaya kehilangan arah. Sebaliknya, ketika budaya mengalami kerusakan, bahasa perlahan kehilangan konteks yang membuatnya tetap hidup. Hubungan tersebut membentuk sebuah siklus yang terus berlangsung dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, upaya menyelamatkan salah satunya tidak akan pernah berhasil tanpa menyelamatkan yang lainnya secara bersamaan.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, bahasa Indonesia berhasil menjadi perekat yang menyatukan keberagaman Nusantara. Ratusan bahasa daerah tetap hidup sebagai kekayaan lokal, sementara bahasa

Indonesia berkembang menjadi ruang bersama tempat seluruh anak bangsa dapat berdialog tanpa kehilangan identitas daerah masing-masing. Keberhasilan tersebut merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Namun keberhasilan tersebut tidak boleh dianggap selesai. Bahasa Indonesia harus terus berkembang sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa teknologi, bahasa diplomasi, bahasa ekonomi, dan bahasa peradaban agar mampu menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat.

Pada saat yang sama, budaya Nusantara juga harus dipahami sebagai sistem kehidupan yang terus berkembang. Budaya bukan benda mati yang hanya disimpan di museum atau dipertontonkan pada acara-acara seremonial. Budaya merupakan cara hidup yang terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Nilai gotong royong harus menemukan bentuk baru di era digital. Musyawarah harus berkembang dalam ruang-ruang partisipasi masyarakat modern. Semangat kebersamaan harus mampu hadir di tengah masyarakat yang semakin individualistis. Dengan demikian, pelestarian budaya bukan berarti mempertahankan bentuk lama tanpa perubahan, melainkan menjaga nilai dasarnya agar tetap hidup dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa Indonesia. Sebagaimana *kernel* menjadi pusat yang mengendalikan seluruh sistem, Pancasila menyediakan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar kehidupan nasional. Nilai tersebut tidak akan hidup hanya melalui hafalan

ataupun simbol-simbol formal. Nilai Pancasila hanya akan menjadi kenyataan apabila diterjemahkan melalui bahasa yang dipahami secara benar dan diwujudkan melalui budaya yang dipraktikkan secara konsisten. Dengan demikian, bahasa menjadi media untuk memahami Pancasila, sedangkan budaya menjadi media untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Konstitusi sebagai *firmware* negara memiliki fungsi yang sama pentingnya. Seluruh aturan kenegaraan disusun melalui bahasa dan dijalankan melalui budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Konstitusi yang baik tidak akan mampu menciptakan keadilan apabila masyarakat tidak memiliki budaya menghormati hukum. Sebaliknya, budaya yang baik akan semakin kuat apabila memperoleh kepastian melalui sistem hukum yang jelas. Hubungan antara bahasa, budaya, dan konstitusi menunjukkan bahwa pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan secara parsial. Ketiganya harus berkembang secara bersamaan agar negara mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa menjadi ruang tempat seluruh unsur tersebut saling terhubung. Sebagaimana sebuah *operating system* mengintegrasikan berbagai komponen teknologi agar bekerja sebagai satu kesatuan, Peradaban Nusantara mengintegrasikan nilai, hukum, pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kehidupan sosial ke dalam satu sistem yang utuh. Ketika salah satu unsur mengalami kerusakan, keseluruhan sistem akan

ikut terdampak. Sebaliknya, ketika seluruh unsur berkembang secara harmonis, bangsa akan memiliki kemampuan menghadapi perubahan tanpa kehilangan identitasnya.

Era digital memberikan tantangan sekaligus peluang bagi proses tersebut. Kemajuan teknologi memungkinkan bahasa Indonesia menjangkau masyarakat dunia melalui berbagai platform digital. Kebudayaan Nusantara dapat dipelajari melalui museum virtual, film, buku digital, permainan interaktif, kecerdasan buatan, hingga berbagai bentuk media baru yang terus berkembang. Generasi muda memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk memperkenalkan identitas bangsa kepada dunia dibandingkan generasi sebelumnya. Tantangan terbesar bukan lagi keterbatasan teknologi, melainkan kemampuan menghasilkan karya yang mencerminkan kualitas bahasa, kedalaman budaya, dan kekuatan pemikiran Indonesia.

Oleh sebab itu, pembangunan bangsa pada masa depan harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap pembangunan manusia dan pembangunan teknologi. Kemajuan teknologi tanpa budaya akan menghasilkan masyarakat yang semakin canggih tetapi kehilangan arah moral. Sebaliknya, kebanggaan terhadap budaya tanpa penguasaan ilmu pengetahuan akan menyebabkan bangsa tertinggal dalam persaingan global. Indonesia memerlukan keseimbangan antara keduanya. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat bahasa dan budaya, sementara bahasa dan

budaya harus menjadi kompas yang mengarahkan pemanfaatan teknologi bagi kepentingan kemanusiaan.

Peran keluarga, sekolah, perguruan tinggi, media massa, komunitas, dunia usaha, dan negara menjadi sangat menentukan dalam membangun ekosistem tersebut. Keluarga menanamkan bahasa pertama dan nilai-nilai dasar kehidupan. Sekolah mengembangkan kemampuan berpikir melalui bahasa dan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi menghasilkan inovasi yang memperkaya peradaban. Media membentuk ruang diskusi publik. Dunia usaha mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Negara memastikan seluruh proses tersebut memperoleh perlindungan melalui kebijakan yang berpihak kepada pembangunan peradaban. Ketika seluruh unsur tersebut bergerak dalam arah yang sama, bahasa dan budaya akan berkembang menjadi kekuatan strategis bangsa.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, menyelamatkan bahasa dan budaya berarti mengembalikan bangsa kepada kesadaran mengenai jati dirinya sebagai bangsa yang memiliki sejarah, nilai, dan peradaban yang besar. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, penyelamatan tersebut merupakan proses membebaskan bangsa dari ketergantungan intelektual, budaya, dan psikologis yang membuat masyarakat selalu memandang dirinya lebih rendah daripada bangsa lain. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, bahasa dan budaya menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa Peradaban Nusantara tetap hidup, berkembang, dan memberikan kontribusi bagi dunia pada masa yang akan datang.

Pada akhirnya, membangun Indonesia tidak cukup hanya melalui pembangunan ekonomi, infrastruktur, atau teknologi. Seluruh pencapaian tersebut memerlukan fondasi yang jauh lebih mendasar, yaitu manusia yang memahami bahasa bangsanya, menghargai budayanya, serta memiliki kesadaran terhadap identitas peradabannya. Bahasa menjaga kejernihan berpikir. Budaya menjaga keluhuran cara hidup. Pancasila sebagai *kernel* memberikan arah moral bagi bangsa. Konstitusi sebagai *firmware* menjaga keteraturan kehidupan negara. Peradaban Nusantara sebagai *operating system* menghubungkan seluruh unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Ketika bahasa dipelihara, budaya dihidupkan, Pancasila diamalkan, konstitusi ditegakkan, dan Peradaban Nusantara terus dikembangkan, Indonesia tidak hanya akan mampu menghadapi tantangan zaman, tetapi juga akan tumbuh sebagai bangsa yang berdaulat, maju, bermartabat, serta mampu memberikan warisan peradaban bagi generasi yang akan datang. Inilah hakikat **Restore Indonesia**, jalan menuju ***Free* Indonesia**, dan fondasi utama untuk ***Save* Nusantara**.

BAB 23
MENYELAMATKAN SPIRITUALITAS

23.1. Manusia Bukan Hanya Makhluk Ekonomi

Salah satu kesalahan terbesar dalam pembangunan modern adalah memandang manusia hanya dari sisi produktivitas ekonomi. Keberhasilan pembangunan sering diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto, peningkatan investasi, daya beli masyarakat, jumlah lapangan kerja, atau besarnya konsumsi. Ukuran-ukuran tersebut memang penting karena negara memerlukan fondasi ekonomi yang kuat untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Namun persoalan mulai muncul ketika manusia direduksi hanya menjadi angka dalam statistik ekonomi. Manusia dipandang sebagai tenaga kerja, konsumen, pembayar pajak, pemilih dalam pemilu, atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan. Cara pandang seperti ini perlahan menghilangkan dimensi terdalam yang membedakan manusia dari sekadar mesin produksi, yaitu dimensi spiritual yang menjadi sumber kesadaran, moralitas, dan tujuan hidup.

Akibat dari cara pandang tersebut mulai terlihat di berbagai belahan dunia. Kemajuan teknologi berkembang sangat cepat, tetapi kebahagiaan tidak selalu meningkat. Pendapatan masyarakat bertambah, tetapi angka depresi, kecemasan, kesepian, dan konflik sosial juga terus meningkat. Berbagai negara berhasil membangun kota-kota modern yang dipenuhi gedung pencakar langit, tetapi pada saat yang sama mengalami

krisis kepercayaan, krisis keluarga, krisis moral, dan krisis makna hidup. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan material tidak secara otomatis melahirkan pembangunan manusia. Kekayaan dapat memperbaiki kualitas hidup, tetapi tidak selalu mampu menjawab pertanyaan paling mendasar mengenai tujuan keberadaan manusia.

Indonesia menghadapi tantangan yang serupa. Perdebatan publik sering kali berpusat pada pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja, inflasi, atau pembangunan infrastruktur. Seluruh pembahasan tersebut tentu memiliki arti penting bagi penyelenggaraan negara. Namun terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu bagaimana membangun manusia Indonesia yang memiliki karakter, integritas, kebijaksanaan, dan kesadaran spiritual. Negara dapat membangun jalan raya, pelabuhan, bendungan, kawasan industri, maupun kota-kota baru, tetapi seluruh pembangunan tersebut pada akhirnya akan dijalankan oleh manusia. Apabila kualitas manusia mengalami kemunduran, maka seluruh hasil pembangunan berpotensi kehilangan arah dan bahkan menjadi alat untuk memperbesar berbagai bentuk penyimpangan.

Dalam buku ini telah dijelaskan bahwa bahasa membentuk cara berpikir, budaya membentuk cara hidup, dan pendidikan membentuk kualitas akal manusia. Namun seluruh unsur tersebut masih memerlukan fondasi yang lebih dalam, yaitu spiritualitas. Spiritualitas bukan sekadar praktik ritual keagamaan, melainkan kesadaran bahwa kehidupan

manusia memiliki tujuan yang melampaui kepentingan material. Kesadaran tersebut melahirkan tanggung jawab moral, kejujuran, pengendalian diri, kepedulian terhadap sesama, serta keberanian untuk memilih kebenaran meskipun harus mengorbankan kepentingan pribadi. Tanpa spiritualitas, kecerdasan dapat berubah menjadi alat manipulasi, kekuasaan berubah menjadi sarana penindasan, dan ilmu pengetahuan kehilangan arah pengabdian kepada kemanusiaan.

Dalam glosarium buku ini, Pancasila dipahami sebagai *kernel* bangsa. Analogi tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. Sebagaimana *kernel* menjadi pusat yang mengatur seluruh sistem komputer, Pancasila menjadi pusat nilai yang mengarahkan kehidupan berbangsa. Menarik untuk diperhatikan bahwa *kernel* tersebut dimulai dengan sila **Ketuhanan Yang Maha Esa**. Penempatan sila pertama bukanlah kebetulan historis, melainkan menunjukkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia dibangun di atas pengakuan terhadap dimensi spiritual manusia. Artinya, pembangunan nasional tidak hanya diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang makmur secara ekonomi, tetapi juga masyarakat yang memiliki hubungan moral dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

Konstitusi sebagai *firmware* negara kemudian menerjemahkan nilai tersebut ke dalam sistem penyelenggaraan negara. Berbagai aturan hukum, kelembagaan, dan mekanisme pemerintahan disusun agar mampu menciptakan keadilan dan ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sebagaimana telah

dibahas pada bab-bab sebelumnya, aturan tidak pernah mampu bekerja sendirian. Hukum tetap dijalankan oleh manusia. Lembaga tetap dipimpin oleh manusia. Kebijakan tetap dirumuskan oleh manusia. Oleh karena itu, kualitas spiritual manusia menjadi faktor yang menentukan apakah konstitusi benar-benar mampu menghadirkan keadilan atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa memperlihatkan hubungan yang utuh antara spiritualitas dan kehidupan sosial. Sejak masa lampau, masyarakat Nusantara membangun kehidupan yang tidak memisahkan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Tradisi gotong royong, penghormatan kepada orang tua, musyawarah, kepedulian terhadap lingkungan, serta berbagai bentuk kehidupan komunal lahir dari pandangan bahwa manusia bukan pusat dari segala sesuatu, melainkan bagian dari tatanan kehidupan yang lebih besar. Nilai tersebut menjadikan spiritualitas tidak berhenti pada ruang ibadah, tetapi hadir dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari.

Sebaliknya, ketika manusia hanya dipandang sebagai makhluk ekonomi, orientasi hidup perlahan bergeser menuju akumulasi materi. Kesuksesan diukur berdasarkan kekayaan, jabatan, popularitas, atau kemampuan mengonsumsi berbagai simbol kemewahan. Pendidikan diarahkan semata-mata untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan tinggi. Pemerintahan berubah menjadi kompetisi merebut

kekuasaan. Ekonomi berkembang menjadi arena persaingan tanpa batas. Bahkan ilmu pengetahuan pun terkadang kehilangan orientasi kemanusiaannya karena hanya diarahkan untuk meningkatkan keuntungan. Dalam kondisi seperti itu, manusia berisiko kehilangan kesadaran mengenai makna hidup yang sesungguhnya.

Era kecerdasan buatan semakin memperjelas persoalan tersebut. AI mampu menghasilkan tulisan, gambar, musik, analisis data, bahkan membantu pengambilan keputusan yang kompleks. Berbagai pekerjaan rutin mulai digantikan oleh mesin. Perubahan tersebut akan terus berlangsung dengan kecepatan yang semakin tinggi. Pertanyaannya bukan lagi apakah manusia mampu bekerja lebih cepat daripada mesin, melainkan apa yang tetap menjadi keunggulan manusia ketika kecerdasan buatan semakin berkembang. Jawabannya terletak pada dimensi yang tidak dapat direplikasi oleh teknologi, yaitu hati nurani, kebijaksanaan, kasih sayang, keikhlasan, tanggung jawab moral, dan kesadaran spiritual. Inilah kualitas yang menjadikan manusia tetap memiliki martabat yang tidak tergantikan.

Oleh sebab itu, pembangunan Indonesia pada masa depan tidak cukup hanya menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas secara intelektual dan kompeten secara profesional. Indonesia memerlukan manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kematangan emosional, dan kedalaman spiritual. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang mampu berpikir kritis sekaligus rendah hati. Teknologi harus digunakan oleh manusia yang

memiliki integritas. Kekuasaan harus dijalankan oleh manusia yang menyadari bahwa setiap keputusan memiliki dimensi moral. Ekonomi harus dikembangkan oleh manusia yang memahami bahwa kesejahteraan bukan hanya persoalan angka, tetapi juga persoalan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, pembangunan spiritual berarti mengembalikan manusia Indonesia kepada jati dirinya sebagai makhluk yang tidak hanya hidup untuk mengejar kepentingan material, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, spiritualitas membebaskan manusia dari berbagai bentuk perbudakan modern, seperti materialisme, hedonisme, konsumerisme, serta ambisi kekuasaan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, spiritualitas menjadi fondasi yang menjaga agar Peradaban Nusantara tetap berkembang sebagai *operating system* kehidupan berbangsa yang berakar pada keseimbangan antara ilmu pengetahuan, budaya, hukum, dan nilai-nilai ketuhanan.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak pernah hanya ditentukan oleh besarnya kekayaan yang dimiliki, tetapi oleh kualitas manusia yang mengelola kekayaan tersebut. Manusia bukan sekadar makhluk ekonomi yang hidup untuk memproduksi, mengonsumsi, dan mengumpulkan materi. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal untuk mencari kebenaran, hati untuk membedakan yang baik dan yang

buruk, serta spiritualitas untuk memahami tujuan kehidupan. Ketika pembangunan mampu memelihara seluruh dimensi tersebut secara seimbang, Pancasila sebagai *kernel* bangsa akan benar-benar hidup dalam kesadaran masyarakat, konstitusi sebagai *firmware* negara akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa akan terus berkembang sebagai fondasi Indonesia yang adil, maju, bermartabat, dan diridhai Tuhan Yang Maha Esa.

23.2. Spiritualitas sebagai Fondasi Peradaban



Sepanjang sejarah umat manusia, tidak pernah ada peradaban besar yang dibangun hanya di atas kekuatan ekonomi, teknologi, ataupun militer. Seluruh peradaban yang mampu bertahan dalam rentang waktu yang

panjang selalu memiliki fondasi yang lebih dalam, yaitu sistem nilai yang memberikan arah bagi kehidupan manusia. Sistem nilai tersebut melahirkan cara berpikir, membentuk moral, memengaruhi budaya, dan pada akhirnya menentukan kualitas suatu peradaban. Oleh karena itu, apabila ingin memahami mengapa sebuah bangsa dapat mencapai puncak kejayaan atau justru mengalami kemunduran, perhatian tidak cukup diarahkan pada kondisi ekonominya, tetapi juga harus melihat kualitas spiritual masyarakat yang menjadi penggerak seluruh aktivitas kehidupan.

Spiritualitas merupakan dimensi terdalam yang menghubungkan manusia dengan makna hidup, tujuan keberadaan, dan tanggung jawab moral. Spiritualitas tidak identik dengan ritual keagamaan semata, meskipun ritual merupakan bagian penting dari kehidupan beragama. Spiritualitas adalah kesadaran bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi yang melampaui kepentingan pribadi. Kesadaran tersebut melahirkan kejujuran ketika tidak ada yang mengawasi, melahirkan amanah ketika memegang kekuasaan, melahirkan kasih sayang ketika berhadapan dengan sesama, serta melahirkan rasa tanggung jawab terhadap alam yang menjadi tempat kehidupan bersama. Dari spiritualitas inilah tumbuh karakter yang kemudian membentuk budaya, dan dari budaya lahirlah sebuah peradaban.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa peradaban tidak pernah dibangun dari atas ke bawah, melainkan dari dalam ke luar. Perubahan besar selalu dimulai dari perubahan manusia. Manusia yang

memiliki spiritualitas akan membangun moral yang kuat. Moral yang kuat melahirkan budaya yang sehat. Budaya yang sehat menghasilkan lembaga-lembaga yang berintegritas. Lembaga yang berintegritas membangun negara yang adil. Negara yang adil kemudian melahirkan peradaban yang maju dan bermartabat. Sebaliknya, ketika spiritualitas mengalami kemunduran, moral mulai melemah, budaya kehilangan arah, lembaga menjadi rapuh, dan negara perlahan kehilangan kemampuan menjalankan fungsi-fungsinya secara benar. Dengan demikian, akar sebuah peradaban sesungguhnya berada pada kualitas spiritual manusia, bukan semata-mata pada kualitas institusinya.

Banyak bangsa modern berhasil membangun kemajuan material yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama menghadapi berbagai persoalan moral yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi belum tentu diikuti dengan meningkatnya integritas. Pertumbuhan ekonomi belum tentu melahirkan keadilan sosial. Perkembangan kecerdasan buatan belum tentu memperkuat rasa kemanusiaan. Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan alat yang sangat kuat, tetapi arah penggunaannya tetap ditentukan oleh kualitas spiritual manusia. Teknologi dapat digunakan untuk menyelamatkan kehidupan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar manipulasi, eksploitasi, bahkan penghancuran manusia apabila kehilangan landasan moral.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut memiliki makna yang sangat penting. Bangsa Indonesia

sejak awal tidak dibangun di atas pandangan hidup yang materialistis. Para pendiri bangsa menempatkan **Ketuhanan Yang Maha Esa** sebagai sila pertama Pancasila, sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa pembangunan nasional harus bertumpu pada kesadaran spiritual. Dalam glosarium buku ini, Pancasila dipahami sebagai *kernel* bangsa, yaitu pusat nilai yang menjadi sumber arah bagi seluruh kehidupan nasional. Sebagaimana *kernel* menentukan cara kerja seluruh sistem komputer, Pancasila menentukan arah moral bangsa Indonesia. Penempatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada urutan pertama menunjukkan bahwa dimensi spiritual bukan pelengkap kehidupan bernegara, melainkan fondasi yang menghidupkan seluruh sila berikutnya.

Perspektif tersebut menjelaskan mengapa keadilan sosial tidak mungkin terwujud tanpa moral. Persatuan Indonesia tidak mungkin bertahan tanpa kejujuran dan rasa saling menghormati. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan tidak mungkin berjalan apabila para pemimpin kehilangan integritas. Bahkan kemanusiaan yang adil dan beradab pun tidak akan menjadi kenyataan apabila manusia tidak lagi memiliki kesadaran bahwa setiap sesama manusia memiliki martabat yang berasal dari Tuhan. Dengan demikian, seluruh sila dalam Pancasila sesungguhnya bertumpu pada fondasi spiritual yang sama.

Konstitusi sebagai *firmware* negara kemudian memberikan bentuk kelembagaan terhadap nilai-nilai tersebut. Berbagai aturan hukum disusun untuk

menjaga kehidupan bersama agar berlangsung secara tertib dan adil. Namun konstitusi tidak pernah mampu menciptakan moralitas secara otomatis. Konstitusi hanya menyediakan kerangka hukum. Pelaksanaan kerangka tersebut tetap bergantung pada manusia yang menjalankannya. Hakim, pejabat negara, aparat penegak hukum, pendidik, pelaku usaha, maupun seluruh warga negara tetap harus membuat keputusan-keputusan moral setiap hari. Oleh sebab itu, keberhasilan konstitusi sangat ditentukan oleh kualitas spiritual masyarakat yang berada di balik penyelenggaraan negara.

Dalam glosarium buku ini, Peradaban Nusantara dipahami sebagai *operating system* kehidupan berbangsa. Analogi tersebut menunjukkan bahwa spiritualitas tidak berdiri sendiri, tetapi mengalir ke seluruh aspek kehidupan nasional. Nilai spiritual diterjemahkan menjadi budaya gotong royong, semangat musyawarah, penghormatan terhadap orang tua, kepedulian terhadap sesama, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Seluruh nilai tersebut kemudian menjadi bagian dari *operating system* yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika *operating system* tersebut berjalan dengan baik, kehidupan sosial berlangsung secara harmonis meskipun masyarakat terdiri atas latar belakang yang sangat beragam.

Krisis yang dihadapi banyak bangsa saat ini pada dasarnya merupakan krisis spiritual yang kemudian menjalar ke berbagai bidang kehidupan. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral.

Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan keserakahan manusia. Polarisasi kekuasaan bukan hanya persoalan sistem demokrasi, tetapi juga persoalan hilangnya kemampuan menghormati sesama. Penyalahgunaan ilmu pengetahuan bukan hanya persoalan akademik, tetapi juga persoalan hilangnya orientasi kemanusiaan. Seluruh persoalan tersebut memiliki akar yang sama, yaitu melemahnya kesadaran spiritual yang seharusnya menjadi pengendali berbagai dorongan kepentingan manusia.

Karena itu, membangun spiritualitas bukan berarti menjauhkan manusia dari kehidupan modern. Sebaliknya, spiritualitas justru memberikan arah agar kemajuan modern tetap berpihak kepada kemanusiaan. Spiritualitas tidak menghambat inovasi, tetapi memastikan inovasi digunakan untuk kemaslahatan bersama. Spiritualitas tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi, tetapi menjaga agar pertumbuhan tersebut berlangsung secara adil. Spiritualitas tidak menghambat perkembangan teknologi, tetapi memastikan teknologi tetap menghormati martabat manusia. Dengan demikian, spiritualitas bukan lawan dari kemajuan, melainkan kompas yang mengarahkan kemajuan menuju tujuan yang benar.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, membangun spiritualitas berarti mengembalikan fondasi moral yang menjadi sumber kekuatan bangsa sejak awal berdirinya republik. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, spiritualitas membebaskan manusia dari berbagai bentuk penjajahan modern yang lahir akibat keserakahan,

materialisme, individualisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, spiritualitas menjadi energi yang menjaga Peradaban Nusantara agar terus berkembang sebagai *operating system* kehidupan berbangsa yang mampu memadukan kemajuan ilmu pengetahuan dengan keluhuran nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

Pada akhirnya, peradaban bukan sekadar kumpulan gedung megah, teknologi canggih, atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peradaban adalah cerminan kualitas manusia yang hidup di dalamnya. Ketika spiritualitas tumbuh, moral akan menguat. Ketika moral menguat, budaya akan menjadi sehat. Ketika budaya menjadi sehat, negara akan dijalankan dengan integritas. Ketika negara dijalankan dengan integritas, peradaban akan berkembang menuju kemajuan yang berkeadilan dan bermartabat. Oleh sebab itu, membangun masa depan Indonesia tidak dapat dimulai hanya dari pembangunan fisik, tetapi harus dimulai dari pembangunan manusia yang memiliki kedalaman spiritual. Dari fondasi inilah Pancasila sebagai *kernel* bangsa memperoleh daya hidup, konstitusi sebagai *firmware* negara memperoleh kekuatan pelaksanaan, dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa mampu berkembang menjadi warisan luhur bagi generasi yang akan datang.

23.3. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sumber Moral Bangsa

Bangsa Indonesia sejak awal berdiri telah mengambil sebuah keputusan yang sangat mendasar dalam menentukan arah kehidupan nasional. Keputusan tersebut bukan mengenai bentuk sistem ekonomi, bukan pula mengenai ideologi pemerintahan, melainkan mengenai fondasi moral yang akan menjadi dasar seluruh penyelenggaraan negara. Para pendiri bangsa menempatkan **Ketuhanan Yang Maha Esa** sebagai sila pertama Pancasila. Penempatan tersebut bukan sekadar urutan redaksional, tetapi merupakan pernyataan filosofis bahwa seluruh kehidupan berbangsa harus bertumpu pada kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, moral bangsa tidak dibangun semata-mata berdasarkan kesepakatan sosial, melainkan berakar pada nilai-nilai ketuhanan yang melampaui kepentingan manusia.

Makna sila pertama sering kali dipersempit hanya sebagai jaminan kebebasan beragama atau pengakuan terhadap keberadaan agama-agama yang hidup di Indonesia. Kedua hal tersebut memang merupakan bagian penting dari implementasi konstitusional. Namun makna Ketuhanan Yang Maha Esa jauh lebih luas daripada sekadar pengaturan hubungan antara negara dan agama. Sila pertama sesungguhnya merupakan sumber etika publik yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan kehidupan nasional. Ketika manusia menyadari bahwa setiap tindakan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan, maka lahirlah

moral yang tidak bergantung pada ada atau tidaknya pengawasan manusia.

Kesadaran tersebut menjadi pembeda yang sangat penting antara hukum dan moral. Hukum mengatur perilaku manusia melalui aturan yang dapat dipaksakan oleh negara. Moral mengatur perilaku manusia melalui kesadaran batin. Hukum bekerja ketika pelanggaran dapat dibuktikan. Moral bekerja bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengetahui suatu perbuatan. Oleh sebab itu, sebuah negara tidak akan pernah mampu menciptakan keadilan hanya dengan memperbanyak peraturan apabila masyarakat kehilangan kesadaran moral. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki moral yang kuat akan lebih mudah membangun kehidupan yang tertib meskipun tidak seluruh tindakan diatur secara rinci oleh hukum.

Dalam glosarium buku ini, Pancasila dipahami sebagai *kernel* bangsa. Analogi tersebut memberikan pemahaman bahwa seluruh sistem kehidupan nasional memperoleh arah dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sebagaimana *kernel* menjadi pusat yang mengendalikan seluruh fungsi sistem, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber moral yang menghidupkan seluruh sila berikutnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab memperoleh makna karena manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki martabat di hadapan Tuhan. Persatuan Indonesia memperoleh kekuatan karena seluruh rakyat dipandang sebagai bagian dari satu keluarga besar bangsa yang memiliki tanggung jawab moral bersama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan memperoleh arah karena kekuasaan dipahami sebagai amanah, bukan hak untuk menguasai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memperoleh landasan karena keadilan dipandang sebagai kewajiban moral, bukan sekadar pilihan.

Apabila sila pertama kehilangan maknanya dalam kehidupan berbangsa, maka seluruh bangunan moral bangsa akan mulai mengalami keretakan. Hukum dapat berubah menjadi alat transaksi kekuasaan. Jabatan dipandang sebagai kesempatan memperoleh keuntungan pribadi. Pendidikan diarahkan hanya untuk mengejar gelar dan pekerjaan tanpa membentuk karakter. Ekonomi berkembang menjadi arena persaingan yang menghalalkan segala cara. Pemerintahan kehilangan orientasi pengabdian kepada rakyat dan berubah menjadi perebutan kekuasaan. Seluruh gejala tersebut bukan semata-mata kegagalan sistem administrasi negara, melainkan cerminan melemahnya fondasi moral yang seharusnya bersumber dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konstitusi sebagai *firmware* negara kemudian menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem penyelenggaraan negara. Berbagai aturan mengenai hak asasi manusia, penyelenggaraan pemerintahan, peradilan, pendidikan, perekonomian, dan kehidupan sosial disusun agar mampu menciptakan ketertiban serta keadilan. Namun konstitusi hanya dapat memberikan kerangka hukum. Pelaksanaan konstitusi tetap berada di tangan manusia. Hakim yang memutus perkara, pejabat yang menetapkan kebijakan, aparat

yang menegakkan hukum, pendidik yang membentuk generasi muda, hingga rakyat yang menggunakan haknya, seluruhnya harus membuat pilihan-pilihan moral setiap hari. Oleh sebab itu, keberhasilan konstitusi tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga pada kualitas manusia yang menjalankannya.

Dalam perspektif Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa, nilai ketuhanan tidak berhenti pada ruang ibadah atau ritual keagamaan. Nilai tersebut mengalir ke dalam budaya gotong royong, sikap saling menghormati, kejujuran dalam berdagang, amanah dalam memimpin, kepedulian terhadap sesama, serta penghormatan terhadap alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Seluruh nilai tersebut menjadi mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Ketika *operating system* tersebut berjalan dengan baik, hubungan antara negara, rakyat, dan seluruh unsur kehidupan berkembang secara harmonis karena masing-masing digerakkan oleh kesadaran moral yang sama.

Pada era modern, tantangan terhadap moral bangsa tidak selalu datang dalam bentuk penolakan terhadap agama. Tantangan yang lebih besar justru muncul ketika agama hanya dipahami sebagai identitas sosial, sementara nilai-nilai moral yang dikandungnya tidak lagi menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat tampil religius di ruang publik, tetapi kehilangan kejujuran ketika mengelola amanah. Simbol-simbol keagamaan dapat berkembang di

berbagai tempat, tetapi belum tentu diikuti dengan meningkatnya integritas dalam kehidupan berbangsa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa spiritualitas dan moral tidak dapat diukur hanya melalui simbol, melainkan melalui kualitas tindakan yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting pada era kecerdasan buatan dan digitalisasi. Teknologi mampu mempercepat berbagai proses kehidupan, tetapi tidak mampu menggantikan hati nurani manusia. Algoritma dapat membantu mengambil keputusan berdasarkan data, tetapi tidak dapat menentukan mana yang adil dan mana yang zalim. Mesin mampu menghitung manfaat ekonomi, tetapi tidak mampu memahami keikhlasan, kasih sayang, amanah, maupun tanggung jawab moral. Oleh sebab itu, semakin maju teknologi berkembang, semakin besar pula kebutuhan terhadap manusia yang memiliki fondasi spiritual yang kokoh. Masa depan tidak hanya membutuhkan manusia yang cerdas, tetapi juga manusia yang mampu menggunakan kecerdasannya sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, menghidupkan kembali makna Ketuhanan Yang Maha Esa berarti mengembalikan moral sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Pembangunan tidak lagi hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui pertumbuhan integritas, kejujuran, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, sila pertama membebaskan bangsa dari berbagai bentuk

penyembahan modern terhadap kekuasaan, uang, popularitas, maupun teknologi yang sering kali menggantikan posisi nilai-nilai moral dalam kehidupan. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi energi spiritual yang menjaga Peradaban Nusantara agar tetap berkembang di atas keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan, keluhuran budaya, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada akhirnya, kekuatan Indonesia tidak akan pernah ditentukan hanya oleh besarnya anggaran negara, tingginya pertumbuhan ekonomi, ataupun kecanggihan teknologinya. Seluruh pencapaian tersebut memerlukan fondasi moral yang kokoh agar benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat. Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekadar sila pertama dalam susunan Pancasila, melainkan sumber moral yang menghidupkan seluruh sistem kehidupan nasional. Ketika Pancasila sebagai *kernel* bangsa benar-benar dijalankan mulai dari sila pertamanya, konstitusi sebagai *firmware* negara akan memperoleh roh dalam pelaksanaannya, dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa akan berkembang menjadi peradaban yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga luhur secara moral, adil dalam penyelenggaraan negara, serta bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

23.4. Agama sebagai Tata Nilai, Bukan Sekadar Identitas

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat modern bukanlah hilangnya agama dari kehidupan manusia, melainkan bergesernya fungsi agama dari tata nilai menjadi sekadar identitas. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, simbol-simbol keagamaan semakin mudah dijumpai. Tempat ibadah bertambah, kegiatan keagamaan berkembang, dan ekspresi keberagamaan semakin tampak di ruang publik. Namun pada saat yang sama, berbagai persoalan moral seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, manipulasi hukum, kekerasan, hingga rusaknya kepercayaan publik masih terus terjadi. Fenomena tersebut mengajukan sebuah pertanyaan mendasar yaitu apakah agama telah benar-benar menjadi pedoman hidup, atau hanya berhenti sebagai identitas sosial yang melekat pada seseorang atau suatu kelompok?

Agama pada hakikatnya bukan sekadar kumpulan ritual, simbol, atau atribut yang membedakan seseorang dengan orang lain. Agama merupakan sistem nilai yang membentuk cara berpikir, cara memandang kehidupan, cara memperlakukan sesama manusia, serta cara menjalankan amanah yang diberikan Tuhan. Ketika agama dipahami sebagai tata nilai, seluruh aktivitas kehidupan memperoleh arah moral. Bekerja menjadi bentuk pengabdian. Memimpin menjadi amanah. Berdagang menjadi ruang untuk menegakkan kejujuran. Menuntut ilmu menjadi jalan mendekatkan diri kepada kebenaran. Bahkan menjalankan kekuasaan

dipahami sebagai tanggung jawab yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dengan cara pandang seperti inilah agama mampu menjadi fondasi sebuah peradaban.

Sebaliknya, ketika agama dipersempit menjadi identitas, perhatian manusia sering kali lebih tertuju pada penampilan luar daripada pembentukan karakter. Ukuran keberagamaan perlahan bergeser dari kualitas akhlak menuju simbol-simbol yang tampak secara fisik. Perdebatan mengenai identitas menjadi lebih dominan dibandingkan upaya memperbaiki moral kehidupan bersama. Akibatnya, seseorang dapat dikenal sebagai tokoh agama, pejabat yang religius, atau bagian dari kelompok mayoritas, tetapi belum tentu memiliki integritas dalam menjalankan amanah. Kondisi seperti ini bukan hanya merugikan kehidupan sosial, tetapi juga mengurangi fungsi agama sebagai sumber transformasi moral.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut memiliki arti yang sangat penting. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia tidak dibangun sebagai negara sekuler yang memisahkan kehidupan publik dari nilai-nilai ketuhanan, tetapi juga tidak dibangun sebagai negara agama yang menjadikan satu tafsir keagamaan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Para pendiri bangsa memilih jalan yang lebih mendasar, yaitu menjadikan **Ketuhanan Yang Maha Esa** sebagai sumber moral bersama. Pilihan tersebut memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk menjalankan keyakinan masing-masing, sekaligus

menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi etika publik dalam kehidupan berbangsa.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa. Sebagai *kernel*, Pancasila bukan sekadar simbol kenegaraan, tetapi pusat nilai yang menghidupkan seluruh sistem kehidupan nasional. Sila pertama menjadi sumber moral bagi seluruh sila berikutnya. Oleh karena itu, agama tidak diposisikan sebagai alat untuk membangun sekat-sekat identitas, melainkan sebagai sumber nilai yang memperkuat kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Ketika agama benar-benar dipahami sebagai tata nilai, Pancasila tidak lagi menjadi kumpulan kalimat normatif, tetapi berubah menjadi karakter yang hidup dalam perilaku masyarakat.

Pandangan tersebut juga memperlihatkan hubungan yang erat antara agama dan konstitusi. Dalam buku ini, konstitusi dipahami sebagai *firmware* negara yang menerjemahkan nilai-nilai dasar bangsa ke dalam sistem hukum dan kelembagaan. Namun konstitusi tidak pernah mampu menciptakan masyarakat yang bermoral apabila manusia yang menjalankannya kehilangan nilai-nilai agama. Hukum dapat mengatur batas minimal perilaku manusia, tetapi tidak mampu memaksa seseorang untuk bersikap ikhlas, jujur, amanah, atau adil. Nilai-nilai tersebut hanya dapat tumbuh apabila agama benar-benar hadir sebagai kesadaran batin yang membimbing setiap keputusan dan tindakan.

Hubungan antara agama dan Peradaban Nusantara juga tidak dapat dipisahkan. Dalam glosarium buku ini, Peradaban Nusantara dipahami sebagai *operating system* kehidupan berbangsa. Seperti halnya sebuah *operating system* yang menghubungkan seluruh komponen agar bekerja secara harmonis, Peradaban Nusantara mengintegrasikan agama, budaya, ilmu pengetahuan, hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial ke dalam satu kesatuan yang utuh. Agama memberikan arah moral, budaya menerjemahkan nilai tersebut menjadi kebiasaan hidup, hukum memberikan kepastian, dan pendidikan memastikan nilai-nilai tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya. Seluruh unsur tersebut saling menguatkan sehingga membentuk masyarakat yang beradab.

Dalam konteks inilah pernyataan budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun menjadi sangat relevan ketika menyampaikan harapan, *"Mudah-mudahan ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW benar-benar dipakai di Indonesia."* Pernyataan tersebut bukan sekadar ajakan untuk memperbanyak simbol keagamaan, melainkan sebuah refleksi bahwa ajaran Rasulullah SAW semestinya hadir sebagai tata nilai yang membentuk kehidupan publik. Kejujuran, amanah, keadilan, kasih sayang, perlindungan terhadap yang lemah, penghormatan terhadap ilmu, dan tanggung jawab terhadap masyarakat merupakan bagian dari nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika nilai-nilai tersebut benar-benar menjadi dasar penyelenggaraan negara, agama akan berfungsi sebagai

kekuatan yang membangun peradaban, bukan sekadar identitas yang diperlihatkan di ruang publik.

Pandangan tersebut tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga mencerminkan prinsip universal yang terdapat dalam seluruh agama yang diakui di Indonesia. Setiap agama mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, serta larangan menyalahgunakan kekuasaan. Dengan demikian, titik temu kehidupan berbangsa bukan terletak pada penyamaan doktrin keagamaan, melainkan pada pengamalan nilai-nilai moral yang memperkuat kehidupan bersama. Inilah yang menjadikan Indonesia memiliki kekayaan spiritual yang sangat besar apabila seluruh agama benar-benar dipahami sebagai sumber pembentukan karakter bangsa.

Era digital menghadirkan tantangan baru terhadap cara manusia memahami agama. Informasi keagamaan dapat diakses dengan sangat mudah, tetapi kedalaman pemahaman belum tentu meningkat. Potongan ceramah, kutipan singkat, dan perdebatan di media sosial sering kali menggantikan proses belajar yang utuh. Agama berisiko dipahami secara dangkal karena lebih banyak diperlakukan sebagai bahan perdebatan daripada sebagai pedoman kehidupan. Oleh sebab itu, tantangan terbesar generasi masa depan bukan hanya memperbanyak informasi keagamaan, tetapi membangun kedewasaan spiritual agar mampu menerjemahkan ajaran agama ke dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, menjadikan agama sebagai tata nilai berarti mengembalikan kehidupan berbangsa kepada fondasi moral yang menjadi cita-cita para pendiri republik. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, pemahaman tersebut membebaskan masyarakat dari kecenderungan menjadikan agama sebagai alat kepentingan pemerintahan, ekonomi, maupun identitas kelompok. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, agama yang dipahami sebagai tata nilai akan menjadi energi spiritual yang menjaga Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa agar terus berkembang di atas nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada akhirnya, kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak simbol keagamaan yang ditampilkan, tetapi oleh seberapa jauh nilai-nilai agama hidup dalam perilaku masyarakat dan penyelenggara negara. Agama yang berhenti pada identitas hanya menghasilkan pengakuan, sedangkan agama yang menjadi tata nilai melahirkan perubahan. Ketika nilai-nilai ketuhanan benar-benar membimbing cara berpikir, cara memimpin, cara bekerja, cara menegakkan hukum, dan cara memperlakukan sesama manusia, Pancasila sebagai *kernel* bangsa akan memperoleh kekuatan moralnya, konstitusi sebagai *firmware* negara akan dijalankan dengan penuh amanah, dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa akan berkembang menjadi peradaban yang tidak hanya maju dalam ilmu

pengetahuan dan teknologi, tetapi juga luhur dalam akhlak, adil dalam penyelenggaraan negara, serta membawa rahmat bagi seluruh rakyat Indonesia.

23.5. Krisis Spiritualitas di Era Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Peradaban manusia sedang memasuki salah satu titik perubahan terbesar dalam sejarah. Setelah revolusi pertanian, revolusi industri, dan revolusi digital, dunia kini bergerak menuju era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI), sebuah fase ketika mesin tidak lagi hanya menjalankan perintah, tetapi mulai mampu belajar, menganalisis, menghasilkan karya, bahkan membantu mengambil keputusan. Perubahan tersebut menghadirkan peluang yang luar biasa bagi kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Namun di balik seluruh optimisme tersebut, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar perkembangan teknologi, yaitu bagaimana menjaga kemanusiaan ketika kecerdasan buatan berkembang semakin pesat.

Sepanjang sejarah, setiap kemajuan teknologi selalu mengubah cara manusia bekerja. Mesin uap menggantikan tenaga manusia dalam industri. Komputer menggantikan sebagian besar pekerjaan administratif. Internet mengubah cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kini, AI mulai mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dianggap hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti menulis, menerjemahkan, menganalisis data, menyusun strategi, menciptakan

karya seni, membantu diagnosis medis, hingga mendukung proses penyusunan kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan intelektual yang selama ini menjadi keunggulan manusia tidak lagi menjadi satu-satunya pembeda.

Perubahan tersebut seharusnya tidak menimbulkan ketakutan, tetapi mengundang refleksi yang lebih dalam mengenai hakikat manusia. Apabila mesin mampu menghitung lebih cepat, mengingat lebih banyak, dan menganalisis lebih akurat, lalu di manakah letak keunggulan manusia? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak ditemukan pada kecepatan berpikir ataupun kapasitas memori, melainkan pada dimensi spiritual yang tidak dapat direplikasi oleh teknologi. Hati nurani, kasih sayang, keikhlasan, kebijaksanaan, rasa syukur, pengampunan, cinta, serta kemampuan membedakan benar dan salah berdasarkan kesadaran moral merupakan kualitas yang membentuk martabat manusia. Seluruh kualitas tersebut lahir dari spiritualitas, bukan dari kecerdasan buatan.

AI bekerja berdasarkan data, algoritma, dan pola statistik. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin baik kemampuan sistem dalam menghasilkan prediksi atau rekomendasi. Namun AI tidak memiliki kesadaran moral. AI tidak merasakan penyesalan setelah melakukan kesalahan. AI tidak memahami makna pengorbanan. AI tidak mengenal keikhlasan ketika menolong orang lain. AI juga tidak memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sebesar apa pun perkembangan teknologi pada masa depan, AI tetap merupakan alat yang memperoleh arah dari manusia

yang menggunakannya. Masa depan peradaban tidak akan ditentukan oleh kecerdasan mesin semata, tetapi oleh kualitas spiritual manusia yang mengendalikan teknologi tersebut.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika masyarakat mulai mengukur kualitas manusia berdasarkan produktivitas yang dapat dibandingkan dengan mesin. Kecepatan bekerja, jumlah karya yang dihasilkan, efisiensi, dan kemampuan memproses informasi sering kali menjadi ukuran utama keberhasilan. Akibatnya, manusia terdorong memasuki kompetisi tanpa henti dengan teknologi yang memang dirancang untuk bekerja tanpa lelah. Tekanan tersebut melahirkan berbagai persoalan psikologis, seperti kecemasan, kehilangan makna hidup, kelelahan mental, bahkan krisis identitas. Banyak orang mulai mempertanyakan nilai keberadaan manusia ketika berbagai kemampuan intelektual ternyata dapat dilakukan oleh mesin.

Di sinilah spiritualitas memperoleh relevansinya yang paling besar. Spiritualitas mengingatkan bahwa nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh produktivitas semata. Manusia memiliki martabat bukan karena kemampuan menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi karena manusia merupakan makhluk yang memiliki akal, hati, tanggung jawab moral, dan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran tersebut membebaskan manusia dari kecenderungan menjadikan teknologi sebagai ukuran utama keberhasilan hidup. Teknologi tetap penting, tetapi

teknologi harus ditempatkan sebagai alat yang melayani manusia, bukan sebagai pusat kehidupan manusia.

Dalam glosarium buku ini, Pancasila dipahami sebagai *kernel* bangsa. Analogi tersebut memberikan pelajaran bahwa setiap perkembangan teknologi harus tetap memperoleh arah dari nilai-nilai dasar bangsa. Kemajuan AI tidak boleh memisahkan pembangunan nasional dari Pancasila sebagai pusat moral kehidupan berbangsa. Ketuhanan Yang Maha Esa tetap menjadi fondasi yang mengingatkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan harus membawa manusia semakin bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi pengingat bahwa teknologi harus digunakan untuk meningkatkan martabat manusia, bukan justru menghilangkannya. Persatuan Indonesia mengingatkan bahwa transformasi digital harus memperkuat solidaritas nasional, bukan memperdalam kesenjangan sosial.

Konstitusi sebagai *firmware* negara juga menghadapi tantangan baru pada era AI. Berbagai persoalan mengenai privasi data, keamanan siber, disinformasi, otomatisasi pekerjaan, hak kekayaan intelektual, hingga penggunaan AI dalam pengambilan keputusan publik memerlukan kerangka hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Namun sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, hukum tidak pernah cukup apabila kehilangan landasan moral. Regulasi mengenai AI hanya akan efektif apabila dijalankan oleh manusia yang memiliki integritas dan kesadaran bahwa teknologi harus digunakan demi kemaslahatan masyarakat, bukan

semata-mata demi keuntungan ekonomi atau kepentingan sesaat.

Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa memberikan perspektif yang sangat relevan dalam menghadapi era kecerdasan buatan. Sejak dahulu, masyarakat Nusantara membangun kehidupan berdasarkan keseimbangan antara akal, rasa, dan spiritualitas. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak dipisahkan dari kebijaksanaan. Hubungan manusia dengan alam tidak dipahami sebagai hubungan eksploitasi, melainkan hubungan yang harus dijaga secara harmonis. Nilai gotong royong mengajarkan bahwa kemajuan bersama lebih penting daripada kemenangan individu. Nilai musyawarah mengajarkan bahwa keputusan terbaik lahir melalui kebijaksanaan, bukan semata-mata melalui perhitungan matematis. Seluruh nilai tersebut menjadi kekuatan yang dapat membimbing Indonesia menghadapi transformasi teknologi tanpa kehilangan identitas peradabannya.

Pendidikan pada era AI juga memerlukan perubahan paradigma. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan lebih banyak menekankan kemampuan menghafal informasi dan menjawab soal-soal yang memiliki jawaban pasti. Padahal kemampuan tersebut semakin mudah digantikan oleh teknologi. Pendidikan masa depan harus lebih banyak membentuk karakter, integritas, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, empati, kepemimpinan, serta kedewasaan spiritual. Sekolah dan perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan AI,

tetapi harus menghasilkan manusia yang mengetahui kapan AI boleh digunakan, untuk tujuan apa teknologi dimanfaatkan, dan bagaimana menjaga agar perkembangan tersebut tetap menghormati martabat manusia.

Dalam kehidupan bernegara, tantangan terbesar bukanlah menciptakan pemerintahan berbasis AI, melainkan membangun pemimpin yang memiliki spiritualitas dalam memanfaatkan AI. Teknologi dapat membantu menganalisis data kemiskinan, memprediksi bencana, mengoptimalkan pelayanan publik, bahkan mendukung penyusunan kebijakan. Namun keputusan akhir mengenai keadilan, keberpihakan kepada rakyat, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta keseimbangan antara efisiensi dan kemanusiaan tetap memerlukan kebijaksanaan manusia. Tidak ada algoritma yang mampu menggantikan hati nurani seorang negarawan.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, era AI harus menjadi momentum untuk membangun kembali manusia Indonesia yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kuat dalam spiritualitas dan karakter. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa Indonesia harus terbebas dari ketergantungan terhadap teknologi yang mengikis kebebasan berpikir, mengurangi kemampuan merenung, atau menjadikan manusia sekadar objek ekonomi digital. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Peradaban Nusantara harus mampu memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai instrumen pembangunan tanpa kehilangan nilai-nilai ketuhanan,

kemanusiaan, dan kebudayaan yang menjadi jati diri bangsa.

Pada akhirnya, kecerdasan buatan bukanlah ancaman terbesar bagi masa depan manusia. Ancaman yang sesungguhnya adalah ketika manusia kehilangan spiritualitas sehingga menggunakan teknologi tanpa arah moral. AI dapat menjadi alat yang mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan apabila dikendalikan oleh manusia yang memiliki integritas. Sebaliknya, AI dapat memperbesar ketidakadilan, manipulasi, dan kerusakan apabila berada di tangan manusia yang kehilangan hati nurani. Oleh karena itu, masa depan Indonesia tidak cukup dipersiapkan dengan investasi pada teknologi semata, tetapi juga dengan investasi pada pembangunan spiritual manusia. Ketika Pancasila sebagai *kernel* bangsa tetap menjadi pusat nilai, konstitusi sebagai *firmware* negara mampu mengatur perkembangan teknologi secara adil, dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa terus menjaga keseimbangan antara ilmu pengetahuan, budaya, dan ketuhanan, Indonesia akan mampu memasuki era kecerdasan buatan bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai bangsa yang menghadirkan peradaban digital yang bermartabat, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual.

23.6. Menyelamatkan Spiritualitas untuk Menyelamatkan Indonesia

Setiap peradaban pada akhirnya akan diuji bukan oleh kemampuan membangun gedung-gedung tinggi, menciptakan teknologi canggih, ataupun mengumpulkan kekayaan yang melimpah, melainkan oleh kemampuan menjaga kualitas manusia yang hidup di dalamnya. Sejarah memperlihatkan bahwa banyak peradaban besar mengalami kemunduran bukan karena kehabisan sumber daya alam atau kalah dalam persaingan ekonomi, tetapi karena kehilangan fondasi moral yang sebelumnya menjadi sumber kekuatannya. Ketika kejujuran berganti dengan manipulasi, amanah berganti dengan penyalahgunaan kekuasaan, dan pengabdian berganti dengan kepentingan pribadi, maka kemunduran sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum keruntuhan itu terlihat secara kasat mata. Oleh sebab itu, menyelamatkan Indonesia pada hakikatnya tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik maupun reformasi kelembagaan, tetapi harus dimulai dengan menyelamatkan spiritualitas manusia Indonesia.

Bab ini telah menguraikan bahwa manusia bukan sekadar makhluk ekonomi yang hidup untuk memproduksi, mengonsumsi, dan mengumpulkan kekayaan. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal untuk memahami kebenaran, hati untuk merasakan kasih sayang, nurani untuk membedakan benar dan salah, serta spiritualitas yang menghubungkan seluruh kehidupannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika salah satu dimensi tersebut diabaikan, keseimbangan

kehidupan akan terganggu. Akal tanpa spiritualitas dapat berubah menjadi kecerdasan yang manipulatif. Kekuasaan tanpa spiritualitas dapat berubah menjadi penindasan. Kekayaan tanpa spiritualitas dapat melahirkan keserakahan. Bahkan ilmu pengetahuan tanpa spiritualitas dapat kehilangan arah pengabdiannya kepada kemanusiaan.

Karena itu, pembangunan manusia harus dipahami sebagai proses yang utuh. Pendidikan membentuk kemampuan berpikir. Bahasa membentuk cara manusia memahami dunia. Budaya membentuk kebiasaan hidup bersama. Negara membangun sistem hukum dan kelembagaan. Namun seluruh unsur tersebut memerlukan fondasi yang lebih dalam agar mampu berjalan menuju tujuan yang benar. Fondasi tersebut adalah spiritualitas. Tanpa spiritualitas, pendidikan hanya menghasilkan manusia yang cerdas tetapi kehilangan integritas. Bahasa hanya menjadi alat retorika. Budaya kehilangan makna. Negara berubah menjadi mesin administrasi yang bekerja tanpa hati nurani. Sebaliknya, ketika spiritualitas hidup di dalam masyarakat, seluruh unsur tersebut saling menguatkan dan membentuk peradaban yang bermartabat.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa. Analogi tersebut menunjukkan bahwa seluruh kehidupan nasional memperoleh arah dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Apabila *kernel* mengalami kerusakan, seluruh sistem akan kehilangan kemampuan menjalankan fungsinya secara benar. Demikian pula bangsa Indonesia. Selama nilai-nilai

Pancasila benar-benar hidup dalam kesadaran masyarakat, bangsa ini akan selalu memiliki kompas moral untuk menghadapi perubahan zaman. Namun apabila Pancasila hanya diperlakukan sebagai simbol tanpa penghayatan, maka berbagai kebijakan, lembaga, bahkan pembangunan ekonomi akan kehilangan arah karena tidak lagi memiliki sumber nilai yang mengikat seluruh kehidupan nasional.

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama menunjukkan bahwa spiritualitas merupakan inti dari *kernel* tersebut. Seluruh sila berikutnya memperoleh makna karena bertumpu pada kesadaran bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab lahir dari penghormatan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kesadaran bahwa seluruh rakyat merupakan bagian dari satu keluarga kebangsaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan hanya mungkin terwujud apabila kekuasaan dipahami sebagai amanah. Keadilan sosial tidak akan pernah menjadi kenyataan apabila keserakahan mengalahkan tanggung jawab moral. Dengan demikian, menyelamatkan spiritualitas berarti menghidupkan kembali keseluruhan jiwa Pancasila, bukan hanya sila pertamanya.

Konstitusi sebagai *firmware* negara kemudian berfungsi menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum, kelembagaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi menyediakan aturan, prosedur, serta pembagian kewenangan agar kehidupan berbangsa berlangsung secara tertib. Akan

tetapi, sebagaimana sebuah *firmware* hanya mampu bekerja sesuai kualitas *kernel* yang mengarahkannya, konstitusi juga memerlukan manusia yang memiliki moral dan spiritualitas agar mampu diwujudkan secara benar. Sebaik apa pun rumusan konstitusi, seluruh ketentuan tersebut tetap dijalankan oleh manusia. Oleh sebab itu, penyelamatan spiritualitas menjadi syarat utama agar konstitusi tidak berhenti sebagai kumpulan norma hukum, tetapi benar-benar hidup dalam praktik penyelenggaraan negara.

Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa merupakan ruang tempat seluruh nilai tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak dahulu masyarakat Nusantara membangun tradisi gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap orang tua, kepedulian terhadap sesama, serta keseimbangan hubungan dengan alam. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar kebiasaan budaya, melainkan manifestasi dari kesadaran spiritual yang memandang kehidupan sebagai amanah yang harus dijaga bersama. Peradaban Nusantara menunjukkan bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan nilai-nilai ketuhanan, bahkan justru memperoleh kekuatannya ketika spiritualitas hadir dalam seluruh aspek kehidupan.

Pada era globalisasi dan kecerdasan buatan, penyelamatan spiritualitas menjadi semakin mendesak. Dunia sedang bergerak menuju masyarakat yang semakin cepat, semakin efisien, dan semakin bergantung pada teknologi. Informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik. Keputusan dapat dibantu oleh algoritma. Berbagai pekerjaan mulai dilakukan oleh

mesin. Namun tidak satu pun perkembangan tersebut mampu menggantikan hati nurani manusia. Tidak ada algoritma yang mampu mengajarkan keikhlasan. Tidak ada kecerdasan buatan yang mampu menghadirkan kasih sayang. Tidak ada mesin yang mampu merasakan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, semakin maju teknologi berkembang, semakin besar pula kebutuhan terhadap manusia yang memiliki kedalaman spiritual.

Penyelamatan spiritualitas juga harus dimulai dari keluarga dan pendidikan. Anak-anak tidak cukup dibekali kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga perlu dibimbing untuk memahami makna kehidupan, tanggung jawab kepada Tuhan, penghormatan kepada orang tua, kepedulian terhadap sesama, serta keberanian menjaga kejujuran meskipun menghadapi berbagai tekanan. Sekolah dan perguruan tinggi tidak cukup menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional, tetapi juga harus membentuk calon pemimpin yang memiliki integritas. Negara tidak cukup membangun sistem pemerintahan yang efisien, tetapi juga harus melahirkan budaya pelayanan publik yang didasarkan pada amanah dan pengabdian.

Penyelamatan spiritualitas pada akhirnya bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga keagamaan. Seluruh unsur bangsa memiliki peran yang sama. Keluarga membangun karakter. Sekolah mengembangkan akal. Universitas memperkuat ilmu pengetahuan. Budaya menjaga identitas bangsa. Negara menciptakan sistem yang adil. Dunia usaha menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan. Media

membentuk kesadaran publik. Seluruh komponen tersebut harus bergerak dalam satu arah yang sama, yaitu membangun manusia Indonesia yang utuh, manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kematangan emosional, dan kedalaman spiritual secara seimbang.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, menyelamatkan spiritualitas berarti mengembalikan pembangunan nasional kepada fondasi moral yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Pembangunan tidak lagi semata-mata diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui tumbuhnya kejujuran, amanah, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, spiritualitas membebaskan bangsa dari berbagai bentuk penjajahan modern berupa materialisme, hedonisme, konsumerisme, penyalahgunaan kekuasaan, serta ketergantungan terhadap teknologi yang menghilangkan makna kehidupan. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, spiritualitas menjadi energi yang menjaga Peradaban Nusantara agar terus berkembang sebagai *operating system* kehidupan berbangsa yang mampu memadukan ilmu pengetahuan, budaya, hukum, dan nilai-nilai ketuhanan dalam satu kesatuan yang harmonis.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya produk domestik bruto, jumlah investasi, kecanggihan teknologi, ataupun kekuatan militer. Masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kualitas manusia Indonesia. Ketika pendidikan melahirkan manusia yang berilmu, bahasa

membentuk cara berpikir yang benar, budaya membangun karakter yang luhur, negara menghadirkan keadilan melalui konstitusi sebagai *firmware*, dan seluruh kehidupan berbangsa diarahkan oleh Pancasila sebagai *kernel* bangsa, maka Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa akan berkembang menjadi peradaban yang kokoh, adil, dan bermartabat. Dari fondasi spiritual inilah cita-cita besar bangsa dapat diwujudkan melalui **Restore Indonesia**, mengembalikan Indonesia kepada jati dirinya yaitu ***Free* Indonesia**, membebaskan bangsa dari segala bentuk penyimpangan nilai dan ***Save* Nusantara**, menjaga warisan peradaban Nusantara agar terus hidup sebagai cahaya bagi Indonesia dan bagi dunia.

BAB 24
MENYELAMATKAN MARTABAT EKONOMI

24.1. Ekonomi untuk Memuliakan Manusia



Selama beberapa dekade terakhir, keberhasilan pembangunan hampir selalu diukur menggunakan indikator-indikator ekonomi. Pertumbuhan produk domestik bruto, peningkatan investasi, ekspor, nilai tukar, inflasi, hingga konsumsi rumah tangga menjadi tolok ukur utama yang menentukan apakah sebuah negara dianggap berhasil atau mengalami kemunduran. Ukuran-ukuran tersebut tentu memiliki arti penting karena menggambarkan dinamika aktivitas ekonomi suatu bangsa. Namun persoalan muncul ketika angka-

angka tersebut berubah menjadi tujuan akhir pembangunan. Pada titik inilah manusia mulai bergeser dari tujuan utama menjadi sekadar instrumen ekonomi. Pembangunan tidak lagi bertanya apakah manusia hidup lebih bermartabat, melainkan apakah angka-angka ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Cara pandang seperti itu perlahan membentuk paradigma bahwa manusia dinilai berdasarkan produktivitas ekonomi yang mampu dihasilkan. Seorang pekerja dihargai berdasarkan nilai tambah yang diberikan kepada perusahaan. Seorang konsumen dihargai berdasarkan daya belinya. Seorang pelajar dipersiapkan agar mampu memasuki pasar kerja. Bahkan keberhasilan suatu daerah sering kali diukur melalui besarnya investasi yang masuk tanpa terlebih dahulu bertanya apakah investasi tersebut benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akibatnya, ekonomi yang seharusnya menjadi alat untuk melayani manusia justru berubah menjadi sistem yang menuntut manusia menyesuaikan diri terhadap kepentingan ekonomi.

Padahal sejak awal, ilmu ekonomi lahir untuk menjawab persoalan kesejahteraan manusia. Seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi pada hakikatnya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup agar manusia dapat berkembang secara utuh. Kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pekerjaan bukan sekadar alat memperoleh penghasilan, tetapi juga ruang pengabdian dan aktualisasi diri. Pasar bukan sekadar tempat transaksi, melainkan mekanisme untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Ketika tujuan tersebut terlupakan, ekonomi kehilangan martabatnya karena lebih banyak menghasilkan akumulasi kekayaan daripada peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Dalam perspektif buku ini, manusia tidak pernah boleh diposisikan sebagai alat produksi semata. Pembahasan pada bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki akal, hati, moral, dan spiritualitas. Oleh karena itu, ekonomi yang benar harus menghormati seluruh dimensi tersebut. Pekerjaan yang layak tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga menjaga harga diri pekerja. Kegiatan usaha tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga memperhatikan keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian, martabat manusia selalu menjadi pusat dari seluruh aktivitas ekonomi.

Pandangan tersebut sejalan dengan filosofi Pancasila sebagai *kernel* bangsa. Sebagaimana *kernel* menjadi pusat yang mengendalikan seluruh sistem, Pancasila memberikan arah bagi seluruh aktivitas ekonomi nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan bahwa seluruh kekayaan pada akhirnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus memuliakan manusia, bukan mengeksploitasinya. Persatuan Indonesia mengarahkan pembangunan ekonomi agar

memperkuat kemandirian nasional dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi harus lahir melalui pertimbangan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Sementara Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir yang harus diwujudkan oleh seluruh aktivitas ekonomi.

Dengan cara pandang tersebut, pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan yang tinggi tidak memiliki makna apabila hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Investasi yang besar tidak dapat disebut berhasil apabila mengorbankan lingkungan hidup dan memiskinkan masyarakat di sekitarnya. Kemajuan industri tidak dapat dibanggakan apabila menghasilkan ketimpangan yang semakin lebar. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan ekonomi harus diperluas, tidak hanya menghitung nilai produksi, tetapi juga memperhatikan kualitas kehidupan manusia, pemerataan kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan meningkatnya martabat rakyat.

Konstitusi sebagai *firmware* negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Melalui konstitusi, negara membentuk berbagai aturan mengenai hak atas pekerjaan, pengelolaan sumber daya alam, sistem perpajakan, perlindungan tenaga kerja, serta kebijakan ekonomi nasional. Seluruh perangkat hukum tersebut merupakan instrumen agar aktivitas ekonomi tidak berkembang tanpa arah. Namun sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab

sebelumnya, konstitusi tidak dapat bekerja sendiri. Pelaksanaan konstitusi tetap bergantung pada manusia yang menjalankannya. Ketika moral penyelenggara negara melemah, kebijakan ekonomi dapat berubah menjadi alat untuk melayani kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, apabila penyelenggara negara memiliki integritas, konstitusi akan menjadi *firmware* yang mampu menjaga agar sistem ekonomi tetap berjalan sesuai cita-cita bangsa.

Dalam konteks tersebut, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki makna yang sangat mendalam. Perekonomian nasional tidak dibangun semata-mata berdasarkan persaingan bebas ataupun dominasi negara secara mutlak, melainkan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Indonesia memiliki pandangan ekonomi yang berpusat pada manusia. Kesejahteraan bersama ditempatkan di atas kepentingan individu, sementara penguasaan cabang-cabang produksi yang penting diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia dirancang bukan untuk memuliakan modal, tetapi untuk memuliakan manusia.

Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa memberikan dimensi yang lebih luas terhadap cara memandang ekonomi. Sejak dahulu masyarakat Nusantara mengenal tradisi gotong royong, lumbung pangan bersama, musyawarah desa, sistem pengelolaan sumber daya secara kolektif, hingga berbagai bentuk solidaritas sosial yang menjaga

keseimbangan kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi tidak dipisahkan dari hubungan sosial maupun tanggung jawab moral. Keuntungan pribadi tetap dihargai, tetapi tidak boleh menghilangkan kepedulian terhadap sesama. Kekayaan dipandang sebagai amanah yang membawa tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Peradaban Nusantara sejak awal menempatkan ekonomi sebagai bagian dari kehidupan yang harus memperkuat harmoni, bukan memperbesar kesenjangan.

Era globalisasi menghadirkan tantangan baru terhadap martabat ekonomi. Persaingan berlangsung dalam skala dunia. Modal bergerak melintasi batas negara. Teknologi mengubah hampir seluruh proses produksi. Kecerdasan buatan mulai menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Dalam situasi seperti itu, godaan untuk memandang manusia semata-mata sebagai faktor produksi menjadi semakin besar. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan paradigma ekonomi yang tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan teknologi harus meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan justru mengurangi martabat pekerja. Digitalisasi harus memperluas kesempatan, bukan menciptakan bentuk-bentuk baru eksploitasi. Pertumbuhan ekonomi harus memperkuat kehidupan masyarakat, bukan hanya memperbesar akumulasi kekayaan.

Membangun ekonomi yang memuliakan manusia juga berarti mengubah cara negara memandang rakyat. Rakyat bukan beban pembangunan yang harus dibantu ketika miskin, melainkan pemilik kedaulatan yang

harus diberdayakan agar mampu berkembang. Pendidikan harus melahirkan manusia yang kreatif, bukan sekadar pencari kerja. Dunia usaha harus menjadi mitra pembangunan, bukan hanya pencari keuntungan. Kebijakan fiskal dan moneter harus diarahkan untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, seluruh sistem ekonomi bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu meningkatkan martabat manusia sebagai pusat pembangunan.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, ekonomi harus dikembalikan kepada tujuan awalnya sebagai sarana memuliakan manusia dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa ini harus terbebas dari cara pandang yang menjadikan manusia sekadar angka statistik, tenaga kerja murah, atau objek konsumsi pasar. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, pembangunan ekonomi harus menjadi bagian dari Peradaban Nusantara yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada akhirnya, kekuatan ekonomi sebuah bangsa tidak semata-mata terletak pada besarnya cadangan devisa, tingginya pertumbuhan produk domestik bruto, atau banyaknya investasi yang masuk. Kekuatan ekonomi yang sesungguhnya terletak pada kemampuan menghadirkan kehidupan yang bermartabat bagi setiap warga negara. Ketika Pancasila sebagai *kernel* bangsa memberikan arah moral bagi seluruh aktivitas ekonomi,

konstitusi sebagai *firmware* negara menerjemahkan arah tersebut menjadi kebijakan yang adil, dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa menjaga keseimbangan antara kesejahteraan, kemanusiaan, dan spiritualitas, maka ekonomi Indonesia tidak lagi sekadar menghasilkan pertumbuhan, tetapi benar-benar memuliakan manusia sebagai tujuan utama pembangunan nasional.

24.2. Krisis Martabat dalam Sistem Ekonomi Modern

Perkembangan ekonomi modern telah menghasilkan kemajuan yang luar biasa dalam berbagai bidang kehidupan. Revolusi industri meningkatkan kapasitas produksi, globalisasi memperluas perdagangan, teknologi digital mempercepat transaksi, dan kecerdasan buatan mulai mengubah hampir seluruh aktivitas ekonomi. Berbagai pencapaian tersebut berhasil meningkatkan efisiensi, mempercepat pertumbuhan, dan membuka kesempatan baru yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Namun di balik seluruh keberhasilan tersebut, tersimpan sebuah persoalan yang semakin nyata, yaitu menurunnya martabat manusia dalam sistem ekonomi yang semakin berorientasi pada keuntungan dan produktivitas. Fenomena tersebut tidak selalu tampak melalui angka-angka statistik, tetapi dapat dirasakan melalui semakin besarnya jarak antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan manusia.

Salah satu ciri utama sistem ekonomi modern adalah kecenderungan menempatkan manusia sebagai bagian dari mekanisme produksi. Dalam berbagai

laporan ekonomi, manusia sering kali dipandang sebagai sumber daya (*human resources*), faktor produksi, tenaga kerja, atau modal manusia (*human capital*). Seluruh istilah tersebut memang memiliki fungsi analitis dalam ilmu ekonomi. Namun ketika cara pandang tersebut berkembang tanpa keseimbangan moral, manusia perlahan kehilangan kedudukannya sebagai tujuan utama pembangunan. Nilai seseorang mulai diukur berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan ekonomi, bukan berdasarkan martabat sebagai manusia. Akibatnya, produktivitas menjadi ukuran utama, sedangkan kemanusiaan hanya menjadi pelengkap dalam berbagai kebijakan pembangunan.

Pandangan tersebut melahirkan berbagai paradoks. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sementara ketimpangan sosial terus melebar. Investasi dapat bertambah sementara kesejahteraan masyarakat sekitar tidak mengalami perubahan yang berarti. Perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar sementara pekerja menghadapi tekanan kerja yang semakin tinggi. Kemajuan teknologi mampu meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghilangkan banyak lapangan pekerjaan tanpa diimbangi kesiapan transformasi sumber daya manusia. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi berkembang sebagai mesin yang menghasilkan kekayaan, tetapi belum tentu menghasilkan kehidupan yang lebih bermartabat bagi seluruh masyarakat.

Krisis tersebut semakin terlihat ketika keberhasilan hidup diukur hampir sepenuhnya melalui kepemilikan materi. Kekayaan dipersepsikan sebagai

simbol keberhasilan tertinggi. Konsumsi menjadi ukuran status sosial. Persaingan memperoleh keuntungan berkembang menjadi budaya yang dianggap wajar meskipun mengorbankan kejujuran, solidaritas, bahkan kelestarian lingkungan. Masyarakat perlahan terdorong memasuki perlombaan tanpa garis akhir. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula keinginan untuk memperoleh lebih banyak lagi. Dalam situasi seperti itu, ekonomi tidak lagi menjadi sarana memenuhi kebutuhan hidup, melainkan berubah menjadi tujuan hidup itu sendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis ekonomi modern sesungguhnya bukan semata-mata krisis distribusi kekayaan, tetapi krisis cara pandang terhadap manusia. Ketika manusia hanya dipandang sebagai pekerja, konsumen, pembayar pajak, atau angka dalam statistik pembangunan, maka martabat manusia mengalami penyempitan makna. Padahal manusia memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar fungsi ekonomi. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, manusia merupakan makhluk yang memiliki akal, hati, moral, dan spiritualitas. Mengabaikan dimensi tersebut berarti membangun sistem ekonomi yang kehilangan pusat orientasinya.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan *kernel* bangsa. Analogi tersebut memberikan pemahaman bahwa seluruh aktivitas ekonomi nasional harus memperoleh arah dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Apabila *kernel* tersebut diabaikan, sistem ekonomi akan berjalan hanya berdasarkan logika pasar dan keuntungan.

Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan bahwa kekayaan merupakan amanah, bukan tujuan akhir kehidupan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar alat produksi. Persatuan Indonesia menghendaki agar pertumbuhan ekonomi memperkuat kemandirian bangsa, bukan menciptakan ketergantungan yang melemahkan rakyat. Kerakyatan mengarahkan kebijakan ekonomi agar lahir melalui kebijaksanaan yang berpihak kepada kepentingan bersama. Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh aktivitas ekonomi nasional.

Apabila arah tersebut hilang, maka pasar perlahan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi daripada manusia. Nilai suatu pekerjaan ditentukan hanya berdasarkan keuntungan finansial yang dihasilkan. Pendidikan diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan industri tanpa memperhatikan pembentukan karakter. Ilmu pengetahuan berkembang mengikuti kepentingan pasar. Bahkan inovasi teknologi sering kali lebih diarahkan untuk meningkatkan konsumsi daripada menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Seluruh gejala tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern berisiko mengalami pembalikan tujuan, ketika manusia bekerja demi melayani ekonomi, bukan ekonomi yang bekerja untuk melayani manusia.

Konstitusi sebagai *firmware* negara sesungguhnya dirancang agar kecenderungan tersebut tidak berkembang tanpa batas. Negara memiliki kewajiban membangun sistem hukum yang menjaga

keseimbangan antara kebebasan berusaha, perlindungan terhadap pekerja, pengelolaan sumber daya alam, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial. Namun konstitusi hanya dapat menjalankan fungsi tersebut apabila dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara negara yang memiliki integritas. Ketika kebijakan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek, kelompok tertentu, atau orientasi sesaat, maka konstitusi kehilangan daya pengarahnya. Akibatnya, berbagai kebijakan yang secara formal sah menurut hukum belum tentu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa menawarkan perspektif yang berbeda terhadap hubungan antara ekonomi dan manusia. Sejak dahulu masyarakat Nusantara membangun kehidupan ekonomi melalui semangat gotong royong, musyawarah, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Kekayaan dipandang sebagai sarana memperkuat kehidupan bersama. Hubungan ekonomi tidak dipisahkan dari hubungan kekeluargaan maupun tanggung jawab moral. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu menjadi bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Oleh sebab itu, Peradaban Nusantara tidak memandang keberhasilan ekonomi hanya melalui besarnya akumulasi kekayaan, tetapi melalui kemampuan menghadirkan keseimbangan, keharmonisan, dan kesejahteraan bersama.

Era globalisasi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru yang semakin memperbesar risiko hilangnya martabat manusia. Otomatisasi meningkatkan efisiensi, tetapi sekaligus mengurangi kebutuhan terhadap berbagai jenis pekerjaan. Algoritma mulai menentukan berbagai keputusan ekonomi, mulai dari pemasaran hingga rekrutmen tenaga kerja. Data pribadi berubah menjadi komoditas ekonomi yang memiliki nilai sangat tinggi. Pada saat yang sama, manusia semakin mudah diperlakukan sebagai kumpulan data, perilaku konsumsi, dan target pasar. Apabila perkembangan tersebut tidak dibimbing oleh nilai-nilai moral, maka teknologi justru akan mempercepat proses dehumanisasi dalam sistem ekonomi.

Oleh sebab itu, krisis martabat dalam ekonomi modern tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan fiskal, reformasi perpajakan, atau peningkatan investasi. Seluruh instrumen tersebut memang penting, tetapi belum menyentuh akar persoalan. Yang perlu dipulihkan adalah cara pandang terhadap manusia. Pembangunan ekonomi harus kembali menempatkan manusia sebagai tujuan utama, bukan sekadar instrumen pertumbuhan. Dunia usaha harus dipandang sebagai mitra pembangunan manusia. Negara harus menjadi penjaga keadilan ekonomi. Pendidikan harus membentuk manusia yang mampu menciptakan nilai, bukan hanya mencari pekerjaan. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar memperbesar efisiensi pasar.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, bangsa ini harus mengembalikan ekonomi kepada cita-cita awal pembangunan nasional, yaitu menghadirkan kesejahteraan yang memuliakan manusia. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, Indonesia perlu membebaskan diri dari paradigma yang menilai manusia hanya berdasarkan produktivitas, daya beli, atau nilai ekonominya. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, Peradaban Nusantara harus menjadi *operating system* yang mengembalikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kelestarian alam, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada akhirnya, krisis terbesar dalam sistem ekonomi modern bukanlah kurangnya kekayaan, melainkan berkurangnya penghormatan terhadap martabat manusia. Ketika manusia diperlakukan sebagai tujuan pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi sarana menciptakan kehidupan yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermakna. Sebaliknya, ketika manusia diperlakukan hanya sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan, maka sebesar apa pun pertumbuhan ekonomi yang dicapai, peradaban akan kehilangan ruh kemanusiaannya. Karena itu, Pancasila sebagai *kernel* bangsa harus terus menjadi pusat orientasi moral ekonomi, konstitusi sebagai *firmware* negara harus memastikan keadilan hadir dalam seluruh kebijakan ekonomi, dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa harus menjaga agar setiap aktivitas ekonomi selalu berujung pada satu tujuan utama, yaitu

memuliakan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

24.3. Pancasila sebagai *Kernel* Ekonomi Indonesia

Pembahasan mengenai ekonomi Pancasila selama ini sering berhenti pada slogan atau istilah normatif tanpa disertai penjelasan yang utuh mengenai bagaimana Pancasila bekerja sebagai fondasi sistem ekonomi nasional. Akibatnya, ekonomi Pancasila kerap dipahami hanya sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, tanpa mampu menjelaskan karakter asli yang membedakannya dari kedua sistem tersebut. Padahal kekuatan terbesar ekonomi Indonesia tidak terletak pada posisinya di antara dua kutub pemikiran ekonomi dunia, melainkan pada kenyataan bahwa Indonesia memiliki landasan filosofis sendiri yang lahir dari sejarah, budaya, spiritualitas, dan cita-cita kebangsaannya. Dalam perspektif buku ini, landasan tersebut dipahami melalui analogi bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**, termasuk *kernel* yang mengarahkan seluruh sistem ekonomi nasional.

Dalam dunia teknologi informasi, *kernel* merupakan inti dari sebuah sistem operasi. Seluruh perangkat keras dan perangkat lunak memperoleh arah kerja dari *kernel*. Tanpa *kernel*, seluruh komponen akan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan akhirnya mengalami kegagalan sistem. Analogi tersebut sangat relevan untuk memahami posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pancasila bukan sekadar simbol negara, bukan pula sekadar kumpulan nilai moral yang ditempelkan pada kebijakan pemerintah. Pancasila

merupakan pusat orientasi yang menentukan arah seluruh penyelenggaraan negara, termasuk arah pembangunan ekonomi. Dengan demikian, seluruh kebijakan ekonomi seharusnya lahir dari nilai-nilai yang hidup di dalam Pancasila, bukan semata-mata dari tekanan pasar global, kepentingan jangka pendek, ataupun teori ekonomi yang berkembang di luar konteks Indonesia.

Sila pertama, **Ketuhanan Yang Maha Esa**, menjadi fondasi moral seluruh aktivitas ekonomi. Kekayaan dipandang sebagai amanah, bukan sebagai tujuan akhir kehidupan. Kepemilikan tidak dipahami sebagai hak yang dapat digunakan tanpa batas, tetapi sebagai tanggung jawab yang harus membawa manfaat bagi sesama. Aktivitas ekonomi tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada hukum negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran tersebut melahirkan etika bisnis yang menjunjung kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat. Dengan demikian, ekonomi tidak berkembang hanya berdasarkan logika keuntungan, tetapi juga berdasarkan kesadaran moral.

Sila kedua, **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Seluruh kebijakan mengenai investasi, industri, perdagangan, perpajakan, pendidikan, maupun ketenagakerjaan harus bertanya terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan martabat manusia. Pekerja bukan sekadar faktor produksi. Petani bukan sekadar penyedia bahan pangan. Nelayan bukan sekadar pelaku ekonomi

tradisional. Pelaku usaha bukan hanya pencipta keuntungan. Seluruhnya merupakan manusia yang memiliki hak untuk berkembang secara bermartabat. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang mengorbankan manusia demi meningkatkan keuntungan tidak pernah sejalan dengan semangat Pancasila.

Sila ketiga, **Persatuan Indonesia**, memberikan arah bahwa pembangunan ekonomi harus memperkuat kemandirian nasional. Persatuan tidak hanya bermakna menjaga keutuhan wilayah, tetapi juga membangun struktur ekonomi yang mampu menghubungkan seluruh daerah sebagai satu kesatuan nasional. Kekayaan alam yang tersebar di berbagai wilayah bukanlah milik kelompok tertentu, melainkan modal bersama untuk memperkuat kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat ekonomi tertentu, sementara daerah lain tertinggal. Persatuan dalam bidang ekonomi berarti membangun konektivitas, pemerataan kesempatan, dan penguatan kapasitas seluruh wilayah agar berkembang secara bersama.

Sila keempat, **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh lahir hanya berdasarkan kepentingan segelintir kelompok yang memiliki kekuatan modal atau kekuasaan. Keputusan-keputusan ekonomi harus disusun melalui kebijaksanaan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Musyawarah dalam konteks ekonomi bukan berarti menghambat dinamika pasar, melainkan memastikan bahwa setiap

kebijakan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Negara hadir sebagai pengarah, penyeimbang, dan pelindung agar mekanisme ekonomi tetap berjalan secara adil.

Puncak dari seluruh orientasi tersebut berada pada sila kelima, **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**. Keadilan sosial bukan berarti seluruh orang memiliki kekayaan yang sama, tetapi setiap warga negara memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang dan menikmati hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat disebut berhasil apabila hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Sebaliknya, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil apabila mampu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermartabat bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, keadilan sosial bukan sekadar akibat dari pembangunan ekonomi, melainkan tujuan utama yang harus mengarahkan seluruh proses pembangunan.

Cara pandang tersebut membedakan ekonomi Pancasila dari berbagai paradigma ekonomi yang berkembang di dunia. Kapitalisme cenderung memberikan ruang yang sangat besar kepada mekanisme pasar untuk menentukan arah distribusi sumber daya. Sosialisme menempatkan negara sebagai pengendali utama aktivitas ekonomi. Pancasila tidak memulai pembahasannya dari pertanyaan mengenai siapa yang paling dominan, negara atau pasar. Pancasila memulai dari pertanyaan yang jauh lebih mendasar,

yaitu bagaimana seluruh aktivitas ekonomi dapat memuliakan manusia dan menghadirkan keadilan sosial. Dengan demikian, negara, pasar, dunia usaha, koperasi, masyarakat, dan seluruh pelaku ekonomi dipandang sebagai bagian dari satu sistem yang harus bekerja sama mencapai tujuan bersama.

Di sinilah hubungan antara Pancasila sebagai *kernel* bangsa dengan konstitusi sebagai *firmware* negara menjadi sangat penting. Pancasila memberikan arah filosofis, sedangkan konstitusi menerjemahkan arah tersebut ke dalam sistem hukum dan kelembagaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu bentuk konkret penerjemahan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan ekonomi. Prinsip usaha bersama, asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, serta pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menunjukkan bahwa konstitusi tidak dibangun di atas logika keuntungan semata, tetapi di atas logika keadilan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, *firmware* negara memperoleh arah kerjanya langsung dari *kernel* bangsa.

Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa kemudian menjadi ruang tempat nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Budaya gotong royong, musyawarah, kepedulian terhadap sesama, penghormatan terhadap alam, dan semangat kekeluargaan merupakan mekanisme sosial yang menjaga agar aktivitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-

nilai kemanusiaan. Dalam Peradaban Nusantara, keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Kekayaan memperoleh makna ketika mampu memperkuat kehidupan bersama. Kekuasaan memperoleh legitimasi ketika digunakan untuk melayani rakyat. Ilmu pengetahuan memperoleh kemuliaan ketika menghadirkan kemaslahatan. Seluruhnya bergerak dalam satu sistem yang saling menguatkan.

Pada era globalisasi, banyak negara menghadapi tekanan untuk mengikuti berbagai model ekonomi yang berkembang secara internasional. Indonesia tentu tidak dapat menutup diri terhadap perdagangan dunia, investasi, maupun perkembangan teknologi. Namun keterbukaan tersebut tidak boleh menyebabkan bangsa ini kehilangan orientasi filosofisnya sendiri. Justru pada saat dunia mengalami berbagai krisis ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan melemahnya solidaritas sosial, ekonomi Pancasila menawarkan paradigma yang lebih seimbang karena menempatkan moral, kemanusiaan, dan keadilan sebagai pusat pembangunan ekonomi. Kekuatan Indonesia bukan terletak pada kemampuan meniru sistem ekonomi bangsa lain, melainkan pada keberanian mengembangkan sistem ekonomi yang berakar pada identitas nasionalnya sendiri.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, Pancasila harus dikembalikan sebagai *kernel* yang benar-benar mengarahkan kebijakan ekonomi nasional, bukan hanya menjadi simbol dalam berbagai dokumen

kenegaraan. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa ini harus membebaskan diri dari ketergantungan terhadap paradigma ekonomi yang mengabaikan martabat manusia dan mengutamakan akumulasi kekayaan semata. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Peradaban Nusantara harus menjadi *operating system* yang memastikan setiap aktivitas ekonomi tetap berada dalam keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada akhirnya, ekonomi Indonesia tidak akan menemukan jati dirinya apabila Pancasila hanya dipahami sebagai ideologi pemerintahan. Pancasila sesungguhnya merupakan *kernel* yang menghidupkan seluruh sistem kehidupan nasional, termasuk sistem ekonomi. Ketika *kernel* tersebut menjadi sumber orientasi moral, konstitusi sebagai *firmware* negara menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang adil, dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa memastikan seluruh nilai tersebut hidup dalam praktik masyarakat, maka ekonomi Indonesia tidak sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang bermartabat, memperkuat persatuan nasional, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

24.4. Negara, Pasar, dan Rakyat

Salah satu perdebatan paling panjang dalam sejarah pemikiran ekonomi adalah mengenai siapa yang seharusnya memegang peranan utama dalam

menggerakkan perekonomian. Sebagian pandangan menempatkan pasar sebagai mekanisme yang paling efektif untuk mengalokasikan sumber daya karena dianggap mampu bekerja secara efisien melalui persaingan. Di sisi lain, terdapat pandangan yang memberikan peran dominan kepada negara dengan keyakinan bahwa kesejahteraan hanya dapat diwujudkan melalui pengendalian yang kuat terhadap aktivitas ekonomi. Perdebatan tersebut telah melahirkan berbagai sistem ekonomi yang terus berkembang hingga saat ini. Namun bagi Indonesia, pertanyaan mendasarnya bukanlah apakah negara harus lebih kuat daripada pasar atau sebaliknya, melainkan bagaimana hubungan antara negara, pasar, dan rakyat dibangun agar seluruh aktivitas ekonomi benar-benar menghadirkan kemakmuran bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Kesalahan yang sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan negara adalah menjadikan salah satu unsur tersebut sebagai tujuan utama. Ada masa ketika negara berkembang menjadi sangat dominan sehingga kreativitas masyarakat kehilangan ruang untuk tumbuh. Sebaliknya, terdapat pula keadaan ketika pasar memperoleh kebebasan yang sangat besar sehingga negara kehilangan kemampuan melindungi kepentingan rakyat. Dalam kedua keadaan tersebut, rakyat justru menjadi pihak yang paling sering menanggung akibat. Ketika negara terlalu kuat, masyarakat kehilangan kebebasan berinovasi. Ketika pasar terlalu kuat, masyarakat berhadapan dengan persaingan yang tidak selalu adil. Oleh sebab itu,

hubungan antara negara, pasar, dan rakyat harus dibangun berdasarkan keseimbangan, bukan dominasi.

Dalam perspektif kenegaraan Indonesia, rakyat merupakan pemegang kedaulatan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan tersebut bukan hanya memiliki makna, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi. Seluruh penyelenggaraan negara, termasuk kebijakan ekonomi, pada akhirnya harus diarahkan untuk melayani kepentingan rakyat. Negara dibentuk oleh rakyat, memperoleh legitimasi dari rakyat, dan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Dengan demikian, sangat bertentangan dengan hakikat negara apabila seluruh kebijakan ekonomi lebih banyak menguntungkan negara sebagai institusi ataupun kelompok ekonomi tertentu, sementara rakyat hanya menjadi objek pembangunan.

Dalam kerangka tersebut, pasar juga harus dipahami secara proporsional. Pasar merupakan instrumen yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi karena memungkinkan terjadinya pertukaran barang, jasa, pengetahuan, dan inovasi. Melalui pasar, pelaku usaha memperoleh kesempatan berkembang, masyarakat memperoleh berbagai pilihan, dan efisiensi ekonomi dapat meningkat. Namun pasar bukanlah tujuan akhir pembangunan. Pasar hanyalah salah satu mekanisme yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Ketika pasar ditempatkan sebagai tujuan yang harus dilayani oleh seluruh kebijakan negara, maka arah pembangunan mulai bergeser. Negara tidak lagi bertanya apakah rakyat semakin

sejahtera, tetapi lebih banyak bertanya apakah pasar merasa nyaman. Pergeseran orientasi inilah yang sering menjadi awal melemahnya martabat ekonomi.

Negara memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan oleh pasar. Negara bertugas menjaga keadilan, menciptakan kepastian hukum, melindungi kelompok yang lemah, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan bahwa kekayaan nasional dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut tidak muncul karena negara lebih penting daripada masyarakat, tetapi karena negara merupakan instrumen yang dibentuk oleh rakyat untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, negara tidak boleh berubah menjadi pelaku yang bersaing dengan rakyat, apalagi menjadi alat yang hanya melayani kepentingan pasar. Negara harus tetap berdiri sebagai pengatur yang adil dan pelindung kepentingan seluruh rakyat.

Pemahaman tersebut selaras dengan glosarium buku ini yang menjelaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Sebagaimana *kernel* mengatur arah kerja seluruh sistem, Pancasila memberikan orientasi bagi hubungan antara negara, pasar, dan rakyat. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar moral agar kekuasaan ekonomi tidak berkembang tanpa batas. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi selalu menghormati martabat manusia. Persatuan Indonesia mengarahkan pembangunan ekonomi untuk memperkuat kemandirian nasional. Kerakyatan yang

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menempatkan rakyat sebagai pusat pengambilan kebijakan. Sementara Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir seluruh aktivitas ekonomi nasional. Dengan demikian, Pancasila tidak memihak negara maupun pasar, melainkan memihak kepada kemaslahatan rakyat.

Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Konstitusi memberikan batasan mengenai kewenangan negara, menjamin hak-hak warga negara, mengatur penguasaan cabang-cabang produksi yang penting, serta menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak membangun sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh mekanisme kepada pasar, tetapi juga tidak membangun negara yang menguasai seluruh aktivitas ekonomi secara mutlak. Konstitusi membentuk keseimbangan antara kebebasan ekonomi, tanggung jawab negara, dan kepentingan rakyat. Sebagai *firmware*, konstitusi memastikan bahwa arah yang diberikan oleh *kernel* bangsa dapat diwujudkan ke dalam kebijakan yang nyata.

Namun sebagaimana sebuah *firmware* tidak dapat bekerja tanpa perangkat yang menjalankannya, konstitusi juga memerlukan penyelenggara negara yang memiliki integritas. Sebaik apa pun rumusan konstitusi, seluruh kebijakan tetap akan ditentukan oleh kualitas manusia yang melaksanakannya. Ketika penyelenggara

negara lebih dekat kepada kepentingan modal daripada kepentingan rakyat, maka negara kehilangan fungsi sebagai pelindung masyarakat. Sebaliknya, ketika kebijakan ekonomi hanya berorientasi pada kepentingan birokrasi tanpa memberi ruang bagi inovasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami hambatan. Oleh sebab itu, keseimbangan antara negara dan pasar hanya dapat diwujudkan apabila penyelenggara negara menjadikan rakyat sebagai pusat orientasi setiap kebijakan.

Hubungan yang harmonis tersebut sesungguhnya telah lama hidup dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Berbagai komunitas di Nusantara membangun kehidupan ekonomi melalui semangat gotong royong, musyawarah, perdagangan yang saling menguntungkan, serta pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Negara dalam bentuk kerajaan maupun pemerintahan lokal hadir untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat, sementara kegiatan ekonomi berkembang melalui kreativitas rakyat. Tidak terdapat pemisahan yang tajam antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial karena keduanya dipandang sebagai bagian dari kehidupan bersama. Peradaban Nusantara mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak lahir dari dominasi salah satu pihak, tetapi dari keseimbangan hubungan antara negara, masyarakat, alam, dan nilai-nilai spiritual.

Pada era globalisasi, keseimbangan tersebut menghadapi tantangan yang semakin besar. Pergerakan modal berlangsung sangat cepat melintasi batas negara.

Perusahaan multinasional memiliki kekuatan ekonomi yang bahkan melebihi sebagian negara berkembang. Teknologi digital menciptakan pasar yang tidak lagi mengenal batas wilayah. Dalam situasi seperti ini, negara tidak boleh kehilangan kapasitas untuk melindungi kepentingan rakyat. Kebijakan ekonomi harus mampu mendorong inovasi dan investasi tanpa mengorbankan kedaulatan nasional maupun kesejahteraan masyarakat. Pasar harus diberi ruang berkembang, tetapi tetap berada dalam kerangka hukum yang menjamin keadilan. Negara harus menjadi fasilitator pembangunan, bukan penghambat kreativitas. Pada saat yang sama, negara juga tidak boleh menjadi pelayan kepentingan modal yang mengabaikan hak-hak rakyat.

Paradigma tersebut membawa konsekuensi bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur melalui tingginya investasi atau besarnya pertumbuhan produk domestik bruto. Keberhasilan yang sesungguhnya tercermin ketika rakyat memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum, pekerja memperoleh perlindungan yang layak, sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan, dan hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, negara menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pasar menjalankan fungsinya sebagai mekanisme ekonomi, dan rakyat tetap menjadi tujuan utama seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, hubungan antara negara, pasar, dan rakyat harus dikembalikan

kepada cita-cita para pendiri bangsa yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa ini perlu membebaskan diri dari cara pandang yang menjadikan negara sebagai tujuan atau pasar sebagai penguasa kehidupan ekonomi. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Peradaban Nusantara harus menjadi *operating system* yang menjaga keseimbangan antara kewenangan negara, dinamika pasar, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pada akhirnya, negara dan pasar hanyalah instrumen dalam kehidupan berbangsa. Tujuan utama seluruh penyelenggaraan ekonomi tetaplah rakyat yang hidup bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** memberikan arah moral, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menerjemahkan arah tersebut ke dalam sistem hukum dan kebijakan, serta **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menjaga keseimbangan hubungan antara negara, pasar, dan rakyat, maka ekonomi Indonesia akan berkembang bukan sebagai arena perebutan kepentingan, melainkan sebagai sarana bersama untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

24.5. Menuju Peradaban Ekonomi Nusantara

Perjalanan panjang bangsa Indonesia tidak seharusnya berhenti pada upaya membangun pertumbuhan ekonomi semata. Pertumbuhan merupakan salah satu indikator penting dalam

mengukur dinamika pembangunan, tetapi bukan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh sebuah peradaban. Bangsa yang besar tidak diukur hanya dari besarnya produk domestik bruto, tingginya investasi, atau luasnya perdagangan internasional, melainkan dari kemampuan menghadirkan kehidupan yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya. Oleh sebab itu, setelah memahami pentingnya memuliakan manusia, mengatasi krisis martabat dalam sistem ekonomi modern, menempatkan Pancasila sebagai *kernel* ekonomi bangsa, serta membangun hubungan yang seimbang antara negara, pasar, dan rakyat, langkah berikutnya adalah membangun sebuah paradigma yang lebih utuh, yaitu **Peradaban Ekonomi Nusantara**.

Istilah Peradaban Ekonomi Nusantara bukan sekadar menunjuk pada sistem ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia, melainkan menggambarkan cara pandang yang memosisikan ekonomi sebagai bagian dari kehidupan peradaban. Dalam paradigma ini, ekonomi tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas menghasilkan keuntungan, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan sistem kehidupan yang mencakup moral, budaya, spiritualitas, pendidikan, hukum, lingkungan hidup, dan hubungan antarmanusia. Ekonomi bukan mesin yang bekerja tanpa arah, melainkan instrumen yang mendukung berkembangnya kualitas manusia dan kemajuan bangsa secara menyeluruh.

Sejak dahulu masyarakat Nusantara telah memperlihatkan berbagai praktik ekonomi yang

dibangun di atas semangat kebersamaan. Tradisi gotong royong dalam mengolah sawah, sistem lumbung pangan desa, perdagangan antarpulau yang saling menguntungkan, pengelolaan sumber daya alam secara kolektif, hingga kebiasaan bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Nusantara tidak dibangun di atas semangat persaingan tanpa batas. Kompetisi tetap hadir sebagai bagian dari dinamika kehidupan, tetapi selalu diseimbangkan dengan solidaritas sosial, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter ekonomi yang lebih manusiawi dibandingkan sekadar hubungan transaksional antara penjual dan pembeli.

Peradaban Ekonomi Nusantara juga memandang kekayaan secara berbeda. Kekayaan tidak ditempatkan sebagai simbol utama keberhasilan hidup, melainkan sebagai amanah yang membawa tanggung jawab sosial. Semakin besar kekayaan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Pandangan seperti ini berakar pada kesadaran spiritual bahwa seluruh sumber daya pada akhirnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya diberikan kesempatan untuk mengelola, memanfaatkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh amanah tersebut. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi selalu memiliki dimensi moral yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi material.

Cara pandang tersebut sangat selaras dengan glosarium buku ini yang menempatkan **Pancasila**

sebagai *kernel* bangsa. Sebagai *kernel*, Pancasila menjadi sumber nilai yang menggerakkan seluruh aktivitas ekonomi nasional. Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan arah bahwa kekayaan harus dikelola secara bertanggung jawab. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi menghormati martabat manusia. Persatuan Indonesia mengarahkan pembangunan agar memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menjadikan musyawarah sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Sementara Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir yang harus diwujudkan oleh seluruh pelaku ekonomi, baik negara, dunia usaha, koperasi, maupun masyarakat.

Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai aturan melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Konstitusi tidak sekadar mengatur hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga memberikan arah bagaimana perekonomian nasional harus diselenggarakan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperlihatkan dengan jelas bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar usaha bersama dan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara bukan untuk memperbesar kekuasaan negara, melainkan agar pengelolaannya benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konstitusi menjadi *firmware* yang menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam mekanisme hukum sehingga arah moral yang diberikan

oleh *kernel* bangsa dapat diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan ekonomi.

Namun, sebuah *kernel* dan *firmware* hanya akan menghasilkan sistem yang baik apabila dijalankan melalui *operating system* yang tepat. Dalam buku ini, **Peradaban Nusantara dipahami sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Analogi tersebut menunjukkan bahwa budaya, kebiasaan, nilai sosial, etika, serta karakter masyarakat merupakan lingkungan tempat seluruh sistem kenegaraan bekerja. Sebagus apa pun konstitusi yang dimiliki sebuah negara tidak akan menghasilkan keadilan apabila budaya masyarakat dipenuhi korupsi, manipulasi, dan ketidakjujuran. Sebaliknya, budaya yang menjunjung gotong royong, amanah, kerja keras, dan tanggung jawab akan memperkuat pelaksanaan seluruh kebijakan ekonomi. Oleh sebab itu, Peradaban Ekonomi Nusantara tidak dapat dibangun hanya melalui perubahan regulasi, tetapi juga melalui pembentukan karakter masyarakat.

Dalam Peradaban Ekonomi Nusantara, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga manusia yang memiliki integritas. Dunia usaha tidak hanya menciptakan keuntungan, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Negara tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan kesempatan dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap

pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Seluruh unsur tersebut saling mendukung dalam membangun kualitas peradaban yang lebih tinggi.

Peradaban Ekonomi Nusantara juga menempatkan hubungan antara manusia dan alam dalam posisi yang seimbang. Kekayaan alam tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi tanpa batas, tetapi sebagai titipan yang harus dijaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Pembangunan ekonomi yang mengorbankan kelestarian lingkungan pada akhirnya hanya akan menciptakan kemakmuran semu karena meninggalkan kerusakan yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Oleh sebab itu, keberlanjutan lingkungan bukan sekadar isu ekologis, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari martabat ekonomi sebuah bangsa.

Di era globalisasi dan kecerdasan buatan, Peradaban Ekonomi Nusantara justru semakin relevan. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi berbasis data, otomatisasi, dan kecerdasan mesin. Perubahan tersebut membuka peluang besar bagi peningkatan produktivitas, tetapi sekaligus menghadirkan risiko semakin lebarnya kesenjangan sosial serta berkurangnya penghargaan terhadap manusia. Indonesia tidak perlu menolak perkembangan teknologi, tetapi juga tidak boleh kehilangan identitas peradabannya. Teknologi harus diposisikan sebagai alat untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat, bukan sebagai pengganti nilai-nilai kemanusiaan. Inovasi harus berjalan berdampingan dengan etika. Efisiensi

harus diseimbangkan dengan keadilan. Pertumbuhan harus selalu diikuti pemerataan. Dengan demikian, kemajuan teknologi justru memperkuat, bukan melemahkan, Peradaban Nusantara.

Paradigma tersebut menuntut hadirnya negarawan, pelaku usaha, akademisi, pemimpin masyarakat, dan generasi muda yang memiliki cara pandang peradaban. Kebijakan ekonomi tidak lagi disusun hanya berdasarkan target pertumbuhan tahunan, tetapi berdasarkan visi jangka panjang mengenai kualitas bangsa yang ingin diwujudkan. Setiap investasi harus dinilai dari manfaatnya bagi rakyat. Setiap inovasi harus diukur dari kontribusinya terhadap kemanusiaan. Setiap kebijakan fiskal maupun moneter harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian nasional sekaligus meningkatkan martabat masyarakat. Ketika seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam paradigma yang sama, ekonomi akan berkembang bukan hanya sebagai aktivitas produksi, tetapi sebagai instrumen membangun masa depan bangsa.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, Peradaban Ekonomi Nusantara berarti mengembalikan pembangunan ekonomi kepada jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, bangsa ini harus membebaskan diri dari paradigma ekonomi yang hanya mengagungkan pertumbuhan dan akumulasi kekayaan tanpa memperhatikan martabat manusia. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, pembangunan ekonomi harus menjadi bagian dari Peradaban

Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa yang menjaga keseimbangan antara kesejahteraan, keadilan sosial, kelestarian alam, budaya, dan spiritualitas.

Pada akhirnya, Peradaban Ekonomi Nusantara bukanlah sekadar konsep ekonomi alternatif, melainkan visi besar mengenai masa depan Indonesia. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** menjadi sumber orientasi moral, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum dan kelembagaan, serta **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menghidupkan seluruh nilai tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari, maka ekonomi Indonesia tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga melahirkan masyarakat yang adil, berdaya, berkarakter, dan bermartabat. Dari fondasi inilah Indonesia dapat tumbuh sebagai sebuah peradaban yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga menjadi teladan bagi dunia dalam memadukan kemajuan, kemanusiaan, dan nilai-nilai ketuhanan.

24.6. Menyelamatkan Martabat Ekonomi untuk Menyelamatkan Indonesia

Perjalanan pembahasan pada bab ini membawa satu kesimpulan penting bahwa persoalan ekonomi Indonesia sesungguhnya bukan semata-mata persoalan pertumbuhan, investasi, perdagangan, ataupun penerimaan negara. Seluruh aspek tersebut memang memiliki arti penting dalam penyelenggaraan negara, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan apakah

pembangunan benar-benar telah mencapai tujuannya. Ukuran keberhasilan ekonomi yang sesungguhnya bukan terletak pada semakin besarnya angka-angka statistik, melainkan pada semakin meningkatnya martabat manusia Indonesia. Ketika rakyat memperoleh kesempatan hidup yang layak, mampu mengembangkan potensi terbaik, memperoleh perlindungan hukum, menikmati hasil pembangunan secara adil, serta menjalankan kehidupan dengan penuh kehormatan, pada saat itulah ekonomi telah menjalankan fungsi hakikinya sebagai sarana memuliakan manusia.

Martabat ekonomi tidak dapat dipisahkan dari martabat bangsa. Bangsa yang bergantung sepenuhnya kepada kekuatan ekonomi luar, kehilangan kemampuan mengelola sumber daya sendiri, membiarkan ketimpangan sosial semakin melebar, dan membangun sistem yang hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok, lambat laun akan kehilangan kemandiriannya. Sebaliknya, bangsa yang mampu mengembangkan ekonomi berdasarkan kekuatan rakyat, memanfaatkan kekayaan alam secara bertanggung jawab, membangun industri yang berdaya saing, serta menghadirkan pemerataan kesempatan akan memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh untuk menghadapi perubahan zaman. Oleh sebab itu, penyelamatan martabat ekonomi pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menyelamatkan masa depan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Selama beberapa dekade terakhir, berbagai indikator ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Infrastruktur berkembang, investasi meningkat, teknologi semakin maju, dan akses terhadap berbagai layanan ekonomi menjadi lebih luas. Namun pada saat yang sama, berbagai tantangan juga masih terlihat dengan jelas. Ketimpangan kesejahteraan masih menjadi persoalan di banyak daerah. Sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Pelaku usaha kecil sering kali menghadapi kesulitan memperoleh pembiayaan maupun akses pasar. Generasi muda memasuki dunia kerja dengan tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi dan otomatisasi. Seluruh kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masih memerlukan orientasi yang lebih kuat terhadap martabat manusia.

Karena itu, penyelamatan martabat ekonomi tidak cukup dilakukan melalui perubahan kebijakan fiskal, moneter, atau regulasi perdagangan semata. Perubahan yang lebih mendasar harus dimulai dari cara bangsa ini memandang ekonomi itu sendiri. Ekonomi tidak boleh diperlakukan sebagai arena kompetisi tanpa batas yang hanya menghasilkan pemenang dan pecundang. Ekonomi juga tidak boleh dipahami hanya sebagai alat negara untuk meningkatkan penerimaan ataupun sekadar ruang akumulasi modal bagi dunia usaha. Ekonomi harus dipahami sebagai sistem yang menghubungkan manusia dengan pekerjaan, ilmu pengetahuan, sumber daya alam, teknologi, budaya,

dan nilai-nilai spiritual dalam satu kesatuan yang utuh. Ketika cara pandang tersebut berubah, arah pembangunan pun akan mengalami perubahan yang mendasar.

Dalam glosarium buku ini telah ditegaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Sebagai *kernel*, Pancasila tidak hanya memberikan arah dalam bidang pemerintahan dan hukum, tetapi juga menjadi fondasi moral bagi seluruh aktivitas ekonomi nasional. Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan bahwa kekayaan merupakan amanah yang harus dipergunakan secara bertanggung jawab. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi menghormati martabat manusia. Persatuan Indonesia mengarahkan pembangunan untuk memperkuat kemandirian nasional dan mengurangi kesenjangan antardaerah. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan memastikan bahwa kebijakan ekonomi lahir melalui orientasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Keadilan Sosial menjadi tujuan yang harus selalu hadir dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian, penyelamatan martabat ekonomi sesungguhnya merupakan upaya menghidupkan kembali Pancasila sebagai *kernel* yang mengarahkan seluruh sistem kehidupan bangsa.

Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan oleh **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Melalui konstitusi, cita-cita keadilan sosial diwujudkan ke dalam sistem hukum, kebijakan fiskal, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan terhadap tenaga kerja, pembangunan ekonomi nasional, dan berbagai bentuk

pelayanan publik. Namun sebagaimana telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, *firmware* hanya dapat bekerja dengan baik apabila dijalankan oleh manusia yang memiliki integritas. Sebaik apa pun rumusan konstitusi, seluruh kebijakan tetap akan bergantung pada kualitas moral para penyelenggara negara. Oleh sebab itu, penyelamatan martabat ekonomi juga menuntut lahirnya pemimpin-pemimpin yang memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai sarana memperkaya diri maupun kelompok.

Selanjutnya, seluruh nilai tersebut memperoleh ruang hidup melalui **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak lahir dari keserakahan, tetapi dari keseimbangan. Gotong royong, musyawarah, kepedulian terhadap sesama, penghormatan terhadap alam, dan tanggung jawab sosial merupakan nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Nusantara. Nilai tersebut perlu dihidupkan kembali agar pembangunan ekonomi tidak kehilangan akar budayanya. Bangsa yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa menjaga karakter peradabannya akan memperoleh kemajuan yang rapuh. Sebaliknya, bangsa yang mampu memadukan kemajuan ekonomi dengan kekuatan budaya dan spiritualitas akan memiliki daya tahan yang jauh lebih besar dalam menghadapi berbagai perubahan global.

Era kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan globalisasi justru memperkuat pentingnya paradigma tersebut. Dunia sedang memasuki masa ketika

teknologi mampu menghasilkan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mesin mampu menggantikan berbagai pekerjaan rutin. Algoritma mampu membantu pengambilan keputusan ekonomi. Data telah menjadi salah satu sumber daya paling berharga dalam kehidupan modern. Namun seluruh perkembangan tersebut tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan kedudukannya sebagai pusat pembangunan. Teknologi harus memperbesar martabat manusia, bukan menggantikannya. Produktivitas harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya meningkatkan keuntungan ekonomi. Inovasi harus memperluas kesempatan, bukan memperbesar kesenjangan. Dengan demikian, kemajuan teknologi menjadi bagian dari proses memuliakan manusia, bukan sebaliknya.

Menyelamatkan martabat ekonomi juga berarti membangun ekosistem yang memungkinkan setiap warga negara berkembang sesuai potensinya. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang kreatif, inovatif, dan berintegritas. Dunia usaha harus menjadi ruang bagi lahirnya kewirausahaan yang bertanggung jawab. Negara harus memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat. Lembaga keuangan harus memperluas akses terhadap pembiayaan yang produktif. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu sistem yang mendukung berkembangnya kesejahteraan yang berkeadilan.

Pada akhirnya, menyelamatkan martabat ekonomi bukan sekadar menyusun strategi pembangunan lima atau sepuluh tahun ke depan. Penyelamatan martabat ekonomi merupakan proses membangun arah baru peradaban Indonesia. Ekonomi tidak lagi ditempatkan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai instrumen untuk melahirkan manusia yang merdeka, bermartabat, dan bertanggung jawab. Negara tidak lagi diukur hanya berdasarkan besarnya anggaran ataupun tingginya pertumbuhan, tetapi berdasarkan kemampuannya menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Dunia usaha tidak lagi dipandang hanya sebagai mesin keuntungan, tetapi sebagai mitra dalam membangun kemajuan bangsa. Teknologi tidak lagi menjadi simbol modernitas semata, tetapi menjadi alat yang memperkuat kualitas kehidupan manusia.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, penyelamatan martabat ekonomi berarti mengembalikan arah pembangunan kepada cita-cita para pendiri bangsa yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama negara. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa ini harus membebaskan diri dari paradigma pembangunan yang hanya mengejar angka-angka ekonomi tanpa memperhatikan kualitas manusia dan kedaulatan nasional. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, pembangunan ekonomi harus menjadi bagian yang utuh dari Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa yang memadukan kemajuan ilmu pengetahuan, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, budaya, dan spiritualitas dalam satu kesatuan yang harmonis.

Pada akhirnya, Indonesia tidak membutuhkan ekonomi yang hanya mampu menciptakan pertumbuhan, tetapi membutuhkan ekonomi yang mampu menjaga kehormatan setiap manusia Indonesia. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** terus menjadi sumber orientasi moral, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum dan kebijakan yang adil, serta **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menghidupkan seluruh nilai tersebut dalam budaya masyarakat, maka ekonomi Indonesia akan berkembang menjadi fondasi lahirnya bangsa yang berdaulat, masyarakat yang sejahtera, dan peradaban yang bermartabat. Dari fondasi inilah cita-cita besar **Restore Indonesia**, ***Free* Indonesia**, dan ***Save* Nusantara** memperoleh makna yang utuh sebagai jalan menuju Indonesia yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga mulia sebagai sebuah peradaban.

BAGIAN VII – SYSTEM GUARDIANS

BAB 25
EMPAT PENJAGA BANGSA

25.1. Mengapa Sebuah Bangsa Membutuhkan Penjaga Sistem



Setiap bangsa selalu berusaha membangun sistem terbaik untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara. Berbagai undang-undang disusun, lembaga negara dibentuk, teknologi dikembangkan, birokrasi diperbaiki, serta kebijakan publik terus disempurnakan. Semua upaya tersebut menunjukkan bahwa sebuah negara membutuhkan sistem yang kuat agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Namun sejarah dunia juga memperlihatkan bahwa banyak negara dengan konstitusi yang baik, lembaga yang lengkap, bahkan sumber daya alam yang

melimpah, tetap mengalami kemunduran ketika sistem yang dibangun kehilangan para penjaganya. Pada akhirnya, sebuah sistem tidak hanya bergantung pada desain kelembagaan, tetapi juga bergantung pada manusia yang menjaga agar sistem tersebut tetap berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

Persoalan tersebut sering kali luput dari perhatian. Banyak orang beranggapan bahwa negara dapat dipertahankan hanya melalui kekuatan hukum, birokrasi, teknologi, atau anggaran yang besar. Pandangan tersebut hanya melihat negara sebagai kumpulan institusi administratif. Padahal negara pada hakikatnya merupakan sebuah sistem kehidupan yang terus bergerak. Sistem tersebut tidak hanya terdiri atas aturan, tetapi juga nilai, budaya, moral, ilmu pengetahuan, dan semangat kebangsaan. Ketika seluruh unsur tersebut tidak lagi dijaga oleh manusia yang memiliki integritas, maka kerusakan perlahan akan muncul dari dalam, meskipun bangunan negara secara fisik masih tampak berdiri dengan kokoh.

Bab-bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang sangat jelas dalam membangun kehidupan berbangsa. **Pancasila merupakan *kernel* bangsa** yang menjadi sumber nilai seluruh penyelenggaraan negara. **Konstitusi merupakan *firmware* negara** yang menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum, kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, **Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa** yang menghidupkan seluruh nilai tersebut melalui budaya,

pendidikan, spiritualitas, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Ketiga unsur tersebut membentuk arsitektur besar kehidupan nasional yang saling berkaitan dan saling menguatkan.

Namun sebagaimana sebuah sistem komputer, keberadaan *kernel*, *firmware*, dan *operating system* saja belum cukup untuk menjamin bahwa sistem akan terus bekerja dengan baik. Sebuah sistem selalu menghadapi ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Ancaman tersebut dapat berupa kerusakan moral, penyalahgunaan kekuasaan, hilangnya integritas, lunturnya identitas budaya, berkembangnya disinformasi, meningkatnya individualisme, hingga melemahnya rasa cinta kepada tanah air. Seluruh ancaman tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka. Sebagian justru berkembang secara perlahan, masuk melalui perubahan cara berpikir, perubahan nilai, maupun perubahan orientasi hidup masyarakat. Ketika ancaman seperti itu dibiarkan, sistem perlahan kehilangan daya tahannya meskipun seluruh perangkat kelembagaan masih terlihat bekerja.

Karena itu, sebuah bangsa membutuhkan **penjaga sistem**. Penjaga sistem bukanlah sekadar jabatan formal dalam struktur negara, melainkan manusia-manusia yang secara sadar menjaga agar arah perjalanan bangsa tidak menyimpang dari nilai-nilai dasarnya. Penjaga sistem memastikan bahwa ilmu pengetahuan tetap berpihak kepada kebenaran, moral tetap menjadi dasar pengambilan keputusan, budaya tetap menjaga identitas bangsa, dan semangat pengabdian kepada negara tetap hidup di tengah masyarakat. Tanpa

kehadiran para penjaga tersebut, sistem negara akan kehilangan mekanisme koreksi dari dalam. Kesalahan demi kesalahan akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa hingga akhirnya berkembang menjadi budaya yang merusak kehidupan berbangsa.

Dalam sejarah berbagai peradaban besar, keruntuhan sering kali tidak diawali oleh kekalahan militer ataupun krisis ekonomi. Keruntuhan justru bermula ketika para penjaga nilai kehilangan fungsinya. Intelektual berhenti mencari kebenaran dan mulai mencari pembenaran. Tokoh-tokoh spiritual lebih sibuk mempertahankan pengaruh daripada menjaga moral masyarakat. Budaya diperlakukan hanya sebagai hiburan, bukan sebagai pembentuk karakter bangsa. Patriotisme bergeser menjadi sekadar slogan tanpa pengabdian nyata kepada negara. Ketika empat unsur tersebut melemah secara bersamaan, sebuah bangsa kehilangan daya tahan moral yang selama ini menopang seluruh sistem kehidupannya.

Indonesia tentu tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Sebagai bangsa yang dibangun di atas nilai-nilai Pancasila, Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang menjaga keberlangsungan sistem kenegaraan dari generasi ke generasi. Tugas tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah ataupun lembaga negara. Negara memang memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan, tetapi keberlangsungan sebuah peradaban selalu bergantung pada partisipasi seluruh warga bangsa. Guru menjaga ilmu pengetahuan. Ulama menjaga moral. Seniman menjaga identitas budaya. Prajurit menjaga kedaulatan.

Akademisi menjaga objektivitas ilmu. Orang tua menjaga pendidikan karakter di dalam keluarga. Seluruhnya menjalankan peran yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bangsa tetap berjalan sesuai cita-cita pendiriannya.

Dalam perspektif buku ini, para penjaga tersebut disebut sebagai **System Guardians**. Istilah tersebut dipilih bukan untuk menunjukkan kelompok yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada masyarakat, melainkan untuk menegaskan adanya tanggung jawab moral dalam menjaga keberlangsungan sistem kehidupan bangsa. Seorang penjaga tidak selalu memegang jabatan penting. Penjaga juga tidak selalu dikenal oleh masyarakat luas. Yang membedakan seorang penjaga adalah kesediaan menjaga sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Penjaga tetap menjalankan tanggung jawab meskipun tidak selalu memperoleh penghargaan. Penjaga tetap mempertahankan nilai ketika lingkungan mulai meninggalkannya. Penjaga tetap berdiri menjaga arah bangsa meskipun harus menghadapi berbagai tekanan.

Konsep **System Guardians** juga memperlihatkan bahwa menjaga bangsa tidak identik dengan mempertahankan kekuasaan. Menjaga bangsa berarti menjaga sistem nilai yang memungkinkan kehidupan berbangsa terus berlangsung secara sehat. Kekuasaan dapat berganti melalui mekanisme demokrasi. Pemerintahan dapat berubah sesuai pilihan rakyat. Kebijakan publik dapat mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan zaman. Namun nilai-nilai dasar bangsa tidak boleh berubah hanya karena

pergantian pemimpin ataupun perubahan situasi. Oleh sebab itu, para penjaga sistem sesungguhnya menjaga kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan Indonesia.

Empat penjaga yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya merupakan empat pilar utama yang menopang keberlangsungan sistem kehidupan bangsa. **Penjaga intelektual** menjaga agar akal bangsa tetap sehat sehingga mampu membedakan antara pengetahuan dan propaganda, antara kebenaran dan manipulasi. **Penjaga spiritual** menjaga hati nurani bangsa agar kemajuan tidak kehilangan arah moral. **Penjaga budaya** menjaga identitas bangsa agar Indonesia tidak kehilangan jati dirinya di tengah arus globalisasi. **Penjaga patriotisme** menjaga semangat pengabdian kepada tanah air sehingga kepentingan bangsa selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Keempatnya bukan bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi sebagai satu kesatuan yang menjaga keberlangsungan sistem kehidupan nasional.

Apabila salah satu penjaga melemah, seluruh sistem akan ikut terdampak. Ketika intelektual kehilangan integritas, kebijakan akan kehilangan dasar ilmiah. Ketika spiritualitas melemah, kekuasaan kehilangan kendali moral. Ketika budaya ditinggalkan, identitas nasional perlahan memudar. Ketika patriotisme menghilang, kepentingan bangsa mudah dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan asing. Sebaliknya, apabila keempat penjaga tersebut mampu menjalankan perannya secara

harmonis, bangsa akan memiliki kemampuan memperbaiki diri setiap kali menghadapi tantangan. Inilah mekanisme pertahanan peradaban yang sesungguhnya, yaitu kemampuan sebuah bangsa menjaga nilai-nilai dasarnya melalui manusia-manusia yang berintegritas.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, membangun kembali Indonesia tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki institusi negara, tetapi juga dengan melahirkan kembali para penjaga sistem yang memiliki keberanian menjaga kebenaran, moral, budaya, dan pengabdian kepada bangsa. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa ini perlu membebaskan diri dari berbagai bentuk degradasi intelektual, spiritual, budaya, dan patriotisme yang perlahan melemahkan fondasi kehidupan nasional. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, keberlangsungan Peradaban Nusantara hanya dapat dijaga apabila hadir generasi yang bersedia menjadi penjaga sistem bagi bangsanya.

Pada akhirnya, sebuah bangsa tidak akan bertahan hanya karena memiliki wilayah yang luas, sumber daya alam yang melimpah, ataupun sistem pemerintahan yang modern. Bangsa akan tetap hidup apabila terdapat manusia-manusia yang setia menjaga nilai-nilai yang menjadi fondasinya. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** terus menjadi sumber orientasi, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menjaga keteraturan penyelenggaraan negara, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** terus dihidupkan oleh para **System Guardians**, Indonesia

tidak hanya mampu mempertahankan keberadaan negaranya, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan peradabannya untuk generasi yang akan datang.

25.2. Penjaga Intelektual

Setiap peradaban besar selalu lahir dari kekuatan intelektual yang mampu menjaga arah berpikir sebuah bangsa. Bangunan fisik dapat dihancurkan oleh perang, kekayaan dapat hilang karena krisis, bahkan kekuasaan dapat berganti melalui dinamika pemerintahan. Namun selama kemampuan berpikir tetap hidup, sebuah bangsa selalu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Sebaliknya, ketika kehidupan intelektual mengalami kemunduran, kerusakan pada bidang lain akan mengikuti secara perlahan. Hukum kehilangan kualitasnya karena tidak lagi disusun berdasarkan penalaran yang benar. Ekonomi kehilangan orientasi karena lebih banyak dipengaruhi kepentingan sesaat daripada pemikiran jangka panjang. Politik berubah menjadi perebutan kekuasaan tanpa arah. Pendidikan hanya menghasilkan ijazah tanpa melahirkan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, salah satu penjaga utama sebuah bangsa adalah para penjaga intelektual.

Penjaga intelektual bukan sekadar orang yang memiliki gelar akademik tinggi ataupun bekerja di lingkungan perguruan tinggi. Intelektualitas tidak ditentukan oleh panjangnya nama akademik yang tertulis di belakang seseorang, melainkan oleh kesetiaan terhadap kebenaran. Seorang guru yang dengan jujur mendidik murid-muridnya, seorang peneliti yang

mempertahankan integritas ilmiah, seorang dosen yang membimbing mahasiswa berpikir kritis, seorang penulis yang menyampaikan gagasan secara bertanggung jawab, maupun seorang ilmuwan yang mengabdikan pengetahuan bagi kemaslahatan masyarakat, seluruhnya menjalankan fungsi sebagai penjaga intelektual. Tugas utama bukan menciptakan orang yang sekadar pintar, tetapi menjaga agar bangsa tetap mampu membedakan antara fakta dan manipulasi, antara ilmu pengetahuan dan propaganda, antara kebijaksanaan dan kepentingan sesaat.

Dalam kehidupan modern, ancaman terhadap kehidupan intelektual tidak selalu datang melalui pelarangan berpikir sebagaimana terjadi pada berbagai masa dalam sejarah. Ancaman justru sering hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus. Informasi berkembang begitu cepat sehingga kemampuan memverifikasi kebenaran semakin melemah. Media sosial memungkinkan setiap orang menyampaikan pendapat tanpa selalu didukung oleh pengetahuan yang memadai. Algoritma digital lebih sering memperkuat informasi yang menarik perhatian daripada informasi yang paling benar. Akibatnya, ruang publik perlahan dipenuhi opini yang bergerak lebih cepat daripada proses berpikir yang sehat. Dalam situasi seperti itu, keberadaan penjaga intelektual menjadi semakin penting karena masyarakat membutuhkan sumber pengetahuan yang dapat dipercaya.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas intelektual sebuah bangsa.

Akses terhadap informasi memang semakin mudah, tetapi kemampuan memahami informasi justru menjadi tantangan yang lebih besar. Pengetahuan dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik, sementara kebijaksanaan tetap memerlukan proses panjang yang melibatkan pembelajaran, pengalaman, refleksi, dan kejujuran intelektual. Oleh sebab itu, tugas penjaga intelektual pada era kecerdasan buatan bukan lagi sekadar menyebarkan pengetahuan, melainkan membimbing masyarakat agar mampu menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab.

Penjaga intelektual juga memiliki tanggung jawab menjaga kebebasan berpikir tanpa kehilangan tanggung jawab moral. Kebebasan akademik merupakan syarat penting bagi berkembangnya ilmu pengetahuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh berubah menjadi pembenaran terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan ataupun manipulasi ilmiah demi kepentingan tertentu. Integritas menjadi fondasi utama kehidupan intelektual. Ketika integritas hilang, ilmu pengetahuan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Penelitian kehilangan objektivitas. Pendidikan kehilangan kejujuran. Akademisi kehilangan kepercayaan masyarakat. Pada saat itulah kerusakan intelektual mulai merusak seluruh sendi kehidupan bangsa.

Dalam glosarium buku ini dijelaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Analogi tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas intelektual harus memperoleh orientasi dari nilai-nilai dasar bangsa. Pengetahuan yang berkembang tanpa arah moral dapat

melahirkan teknologi yang merusak kemanusiaan. Kecerdasan yang tidak dibimbing oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dapat berubah menjadi alat eksploitasi. Kemampuan ilmiah yang mengabaikan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat menghasilkan berbagai inovasi yang justru memperlebar ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, penjaga intelektual tidak hanya menjaga perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memastikan bahwa ilmu tersebut tetap berada dalam kerangka nilai yang memuliakan manusia.

Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan oleh **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Negara memiliki tanggung jawab menyediakan sistem pendidikan yang berkualitas, menjamin kebebasan akademik yang bertanggung jawab, mendukung penelitian, serta menciptakan ruang bagi berkembangnya inovasi. Konstitusi memberikan kerangka hukum agar kehidupan intelektual tumbuh secara sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya. Sebaik apa pun kebijakan pendidikan, hasilnya tidak akan optimal apabila para pendidik kehilangan idealisme. Sebesar apa pun anggaran penelitian, manfaatnya akan terbatas apabila integritas ilmiah mulai ditinggalkan.

Lebih jauh lagi, kehidupan intelektual memperoleh ruang tumbuh melalui **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Sejak dahulu masyarakat Nusantara mengenal tradisi belajar yang tidak memisahkan ilmu dari kebijaksanaan. Pengetahuan diwariskan melalui

pendidikan keluarga, pesantren, padepokan, tradisi lisan, karya sastra, maupun pengalaman hidup bermasyarakat. Belajar bukan sekadar mengumpulkan informasi, tetapi membentuk karakter. Orang yang berilmu dihormati bukan hanya karena kecerdasannya, melainkan karena kebijaksanaan dan keteladanannya. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa intelektualitas selalu berjalan berdampingan dengan akhlak dan tanggung jawab sosial.

Pada era globalisasi, penjaga intelektual juga memikul tanggung jawab menjaga kemandirian berpikir bangsa. Indonesia tentu perlu mempelajari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Namun proses tersebut tidak boleh membuat bangsa ini kehilangan kemampuan melahirkan pemikiran sendiri. Bangsa yang hanya menjadi konsumen gagasan dari luar akan selalu tertinggal dalam membangun masa depannya. Sebaliknya, bangsa yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan karakter peradabannya sendiri akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam percaturan global. Oleh sebab itu, penjaga intelektual tidak hanya bertugas menguasai ilmu pengetahuan internasional, tetapi juga mengembangkan pemikiran yang berakar pada kebutuhan Indonesia.

Perkembangan kecerdasan buatan semakin memperjelas perbedaan antara informasi dan kebijaksanaan. Mesin mampu mengolah data dalam jumlah yang sangat besar, menyusun analisis yang kompleks, bahkan membantu menghasilkan berbagai karya ilmiah. Namun kecerdasan buatan tidak memiliki

tanggung jawab moral terhadap hasil yang dihasilkan. Penilaian mengenai benar atau salah, adil atau tidak adil, bermanfaat atau merusak, tetap berada pada manusia. Di sinilah peran penjaga intelektual menjadi semakin penting. Kehadiran teknologi tidak mengurangi kebutuhan terhadap manusia yang berpikir secara kritis, jujur, dan bertanggung jawab. Justru semakin maju teknologi, semakin besar kebutuhan terhadap manusia yang mampu menjaga arah penggunaannya.

Penjaga intelektual juga harus memiliki keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran ketika menghadapi tekanan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kemajuan peradaban lahir dari keberanian para pemikir mempertahankan kebenaran meskipun tidak selalu sejalan dengan kepentingan penguasa ataupun arus mayoritas. Keberanian tersebut bukan lahir dari sikap konfrontatif, melainkan dari kesadaran bahwa ilmu pengetahuan hanya akan memberikan manfaat apabila tetap berpijak pada kejujuran. Bangsa yang kehilangan keberanian intelektual perlahan akan kehilangan kemampuan melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang berkembang di dalam sistemnya sendiri.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, pembangunan bangsa harus dimulai dengan membangun kembali kehidupan intelektual yang berorientasi pada pencarian kebenaran, bukan sekadar pencapaian akademik. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa ini perlu membebaskan diri dari degradasi intelektual, budaya instan, penyebaran

disinformasi, serta berbagai bentuk manipulasi ilmu pengetahuan yang melemahkan kualitas berpikir masyarakat. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Indonesia membutuhkan generasi penjaga intelektual yang mampu memadukan ilmu pengetahuan, integritas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral dalam menjaga keberlangsungan Peradaban Nusantara.

Pada akhirnya, penjaga intelektual bukan hanya menjaga dunia pendidikan ataupun dunia akademik. Penjaga intelektual menjaga kemampuan sebuah bangsa untuk terus berpikir benar di tengah perubahan zaman. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** terus menjadi sumber orientasi nilai, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan ruang bagi berkembangnya ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** membentuk budaya belajar yang berakar pada kebijaksanaan, maka kehidupan intelektual Indonesia akan menjadi salah satu pilar utama yang menjaga keberlangsungan bangsa dan peradabannya dari generasi ke generasi.

25.3. Penjaga Spiritualitas

Setiap bangsa memerlukan kekuatan yang menjaga bukan hanya cara berpikir, tetapi juga arah hati. Pengetahuan mampu menunjukkan apa yang mungkin dilakukan, sedangkan spiritualitas menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Ilmu pengetahuan dapat melahirkan teknologi yang luar biasa, tetapi hanya spiritualitas yang mampu

memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kemaslahatan manusia. Hukum dapat mengatur perilaku melalui sanksi, tetapi spiritualitas membentuk kesadaran sehingga seseorang memilih berbuat benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Karena itu, salah satu penjaga terpenting dalam kehidupan berbangsa adalah penjaga spiritualitas, yaitu manusia-manusia yang menjaga agar hati nurani bangsa tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Spiritualitas dalam konteks kehidupan berbangsa tidak boleh dipersempit hanya sebagai aktivitas ritual keagamaan. Ritual merupakan bagian penting dari kehidupan beragama, tetapi spiritualitas memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Spiritualitas adalah kesadaran bahwa kehidupan manusia selalu berada di bawah tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran tersebut melahirkan kejujuran, amanah, kasih sayang, keadilan, pengendalian diri, kerendahan hati, dan keberanian moral. Nilai-nilai inilah yang kemudian membentuk karakter individu, memengaruhi perilaku sosial, dan akhirnya menentukan kualitas penyelenggaraan sebuah negara.

Bangsa yang kehilangan spiritualitas sesungguhnya sedang kehilangan kompas moral. Kemajuan ekonomi masih dapat berlangsung. Teknologi tetap berkembang. Infrastruktur dapat terus dibangun. Pendidikan menghasilkan lulusan dalam jumlah besar. Namun tanpa fondasi spiritual, seluruh kemajuan tersebut mudah berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi. Kekuasaan kehilangan rasa tanggung jawab. Kekayaan menjadi tujuan hidup.

Ilmu pengetahuan digunakan untuk membenarkan kepentingan tertentu. Hukum dijalankan secara formal tanpa menghadirkan keadilan. Dalam keadaan seperti itu, kerusakan tidak selalu tampak dari luar karena institusi negara masih berjalan. Akan tetapi, dari dalam, kehidupan berbangsa mulai kehilangan ruh yang selama ini menjaga keseimbangannya.

Oleh sebab itu, penjaga spiritual bukan hanya tokoh agama yang menyampaikan ajaran di rumah ibadah. Penjaga spiritual adalah seluruh manusia yang dengan keteladanan hidup menjaga agar nilai-nilai ketuhanan tetap hadir dalam ruang publik. Seorang ulama yang membimbing umat dengan hikmah, seorang pendeta yang menumbuhkan kasih kepada sesama, seorang guru yang mengajarkan kejujuran kepada murid-muridnya, seorang hakim yang memutus perkara dengan hati nurani, seorang pejabat yang menolak penyalahgunaan kekuasaan, seorang pengusaha yang menjalankan usaha secara amanah, bahkan seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik, seluruhnya menjalankan fungsi sebagai penjaga spiritual. Spiritualitas tidak dibatasi oleh profesi, tetapi tercermin dalam cara seseorang menghidupkan nilai-nilai Tuhan di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan modern, tantangan terbesar terhadap spiritualitas bukanlah berkurangnya jumlah rumah ibadah ataupun terbatasnya kebebasan menjalankan agama. Tantangan yang lebih besar justru muncul ketika agama hanya dipahami sebagai identitas, sementara nilai-nilai moral yang terkandung di

dalamnya semakin terpisah dari kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol keagamaan berkembang dengan sangat cepat, tetapi kejujuran semakin langka. Aktivitas ibadah semakin ramai, tetapi korupsi tetap terjadi. Ceramah dan pengajian mudah diakses melalui berbagai media, tetapi kebencian juga semakin mudah disebarkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kehidupan spiritual tidak cukup diukur melalui banyaknya aktivitas keagamaan, melainkan melalui sejauh mana nilai-nilai ketuhanan membentuk perilaku individu maupun kehidupan publik.

Bab-bab sebelumnya telah menegaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya menjadi dasar hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi sumber moral bagi seluruh kehidupan berbangsa. Penempatan sila tersebut pada urutan pertama menunjukkan bahwa seluruh aktivitas kenegaraan harus memiliki orientasi moral yang bersumber dari kesadaran ketuhanan. Kekuasaan tanpa moral akan melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Ekonomi tanpa moral akan melahirkan eksploitasi. Ilmu pengetahuan tanpa moral dapat digunakan untuk merusak kemanusiaan. Oleh sebab itu, penjaga spiritual memiliki tugas menjaga agar *kernel* bangsa tetap hidup sebagai sumber nilai yang membimbing seluruh aktivitas nasional.

Nilai-nilai tersebut kemudian memperoleh bentuk kelembagaan melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Konstitusi menjamin kebebasan beragama, memberikan ruang bagi berkembangnya kehidupan

spiritual masyarakat, serta menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi kehidupan bernegara. Namun konstitusi hanya mampu menyediakan kerangka hukum. Konstitusi tidak dapat memaksa lahirnya kejujuran. Konstitusi tidak mampu menciptakan kasih sayang. Konstitusi tidak dapat membentuk hati nurani. Seluruh nilai tersebut hanya dapat tumbuh apabila masyarakat memiliki kesadaran spiritual yang hidup. Karena itu, penjaga spiritual sesungguhnya menjaga sesuatu yang berada di balik seluruh perangkat hukum, yaitu kesadaran moral yang menjadi sumber lahirnya perilaku yang benar.

Dalam perspektif **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**, spiritualitas selalu menyatu dengan kehidupan sosial. Tradisi Nusantara memperlihatkan bahwa agama tidak dipisahkan dari penghormatan kepada sesama manusia, kepedulian terhadap lingkungan, gotong royong, musyawarah, serta penghargaan terhadap kebijaksanaan para pendahulu. Nilai-nilai tersebut membentuk budaya yang memandang kehidupan sebagai amanah, bukan sekadar ruang untuk memenuhi kepentingan pribadi. Peradaban Nusantara tidak membangun masyarakat yang hanya taat secara ritual, tetapi juga berusaha membentuk masyarakat yang memiliki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, spiritualitas menjadi energi yang menghidupkan seluruh aspek kehidupan berbangsa.

Perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi digital semakin memperjelas pentingnya penjaga spiritual. Mesin mampu membantu manusia

mengambil keputusan berdasarkan data yang sangat kompleks. Algoritma mampu memprediksi berbagai kecenderungan perilaku masyarakat. Teknologi mampu meningkatkan efisiensi hampir di seluruh bidang kehidupan. Namun seluruh kemampuan tersebut tidak memiliki hati nurani. Kecerdasan buatan tidak mengenal kasih sayang, tidak memahami pengorbanan, dan tidak memiliki kesadaran moral. Penilaian mengenai benar atau salah tetap menjadi tanggung jawab manusia. Oleh sebab itu, semakin maju teknologi, semakin besar pula kebutuhan terhadap manusia yang mampu menjaga dimensi spiritual kehidupan. Masa depan tidak hanya membutuhkan manusia yang cerdas, tetapi juga manusia yang memiliki hati nurani.

Penjaga spiritual juga berperan menjaga persatuan bangsa. Indonesia dibangun di atas keberagaman agama, budaya, bahasa, dan tradisi. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, spiritualitas tidak boleh berkembang menjadi alat untuk mempertentangkan perbedaan. Sebaliknya, spiritualitas harus menjadi kekuatan yang mempertemukan seluruh warga negara dalam nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika nilai-nilai tersebut menjadi titik temu, keberagaman justru berubah menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan nasional.

Tanggung jawab penjaga spiritual bukan hanya memperbaiki individu, tetapi juga menjaga kesehatan moral sistem kehidupan bangsa. Ketika kehidupan

spiritual masyarakat kuat, korupsi akan berkurang bukan semata-mata karena takut terhadap hukuman, melainkan karena tumbuh rasa takut melanggar amanah. Kekuasaan dijalankan sebagai bentuk pengabdian, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan. Dunia usaha berkembang dengan etika. Pendidikan membentuk karakter, bukan hanya kecerdasan. Hukum dijalankan dengan rasa keadilan, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif. Seluruh perubahan tersebut lahir dari kekuatan yang bekerja di dalam hati manusia, bukan semata-mata dari tekanan eksternal.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, kebangkitan bangsa harus dimulai dengan menghidupkan kembali spiritualitas sebagai sumber moral kehidupan nasional. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, bangsa ini perlu membebaskan diri dari kecenderungan memisahkan agama dari akhlak, ritual dari tanggung jawab sosial, serta simbol dari substansi nilai. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, Indonesia membutuhkan generasi penjaga spiritual yang mampu menghadirkan nilai-nilai ketuhanan sebagai energi yang menghidupkan Peradaban Nusantara di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada akhirnya, penjaga spiritual bukan hanya menjaga agama dalam ruang ibadah, melainkan menjaga hati nurani bangsa agar tetap menjadi sumber lahirnya keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** terus memberikan orientasi moral melalui Ketuhanan Yang Maha Esa, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menjamin ruang

bagi berkembangnya kehidupan spiritual yang sehat, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menghidupkan nilai-nilai tersebut dalam budaya masyarakat, maka Indonesia akan memiliki fondasi moral yang kokoh untuk menghadapi setiap perubahan zaman. Dari fondasi itulah lahir bangsa yang bukan hanya maju dalam ilmu pengetahuan dan pembangunan, tetapi juga mulia dalam akhlak, adil dalam penyelenggaraan negara, serta kuat menjaga peradabannya untuk generasi yang akan datang.

25.4. Penjaga Budaya

Tidak ada bangsa yang mampu bertahan hanya karena memiliki wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, ataupun kekuatan ekonomi yang tinggi. Seluruh faktor tersebut dapat berubah mengikuti dinamika sejarah. Yang membuat sebuah bangsa tetap dikenali dari generasi ke generasi adalah budaya yang hidup di dalam masyarakatnya. Budaya membentuk cara manusia berpikir, berbicara, bekerja, menghormati sesama, memandang alam, membangun keluarga, menyelesaikan konflik, hingga menentukan arah masa depan. Oleh sebab itu, budaya bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan sistem nilai yang menjaga kesinambungan kehidupan sebuah bangsa. Ketika budaya tetap hidup, identitas bangsa tetap terjaga. Sebaliknya, ketika budaya mulai kehilangan tempat dalam kehidupan masyarakat, bangsa perlahan kehilangan jati dirinya meskipun seluruh simbol kenegaraan masih berdiri dengan utuh.

Banyak orang memandang budaya hanya sebagai kesenian, tarian tradisional, pakaian adat, upacara adat, atau berbagai peninggalan sejarah yang dipamerkan pada acara-acara tertentu. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi terlalu sempit untuk menggambarkan makna budaya dalam kehidupan berbangsa. Budaya sesungguhnya merupakan tata nilai yang membentuk perilaku masyarakat setiap hari. Cara menghormati orang tua, cara berbicara kepada orang lain, cara bermusyawarah, cara bekerja bersama, cara menyelesaikan perselisihan, hingga cara memperlakukan lingkungan merupakan bagian dari budaya. Dengan demikian, budaya bukan sekadar sesuatu yang dipertontonkan, melainkan sesuatu yang dijalani.

Karena budaya membentuk perilaku masyarakat, maka keberlangsungan sebuah bangsa sangat bergantung pada hadirnya para penjaga budaya. Penjaga budaya bukan hanya seniman, budayawan, ataupun pelaku kesenian tradisional. Penjaga budaya adalah seluruh manusia yang menjaga agar nilai-nilai luhur bangsa tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua yang membiasakan anak berbicara dengan santun, guru yang mengajarkan gotong royong, penulis yang merawat bahasa Indonesia, seniman yang melahirkan karya bermakna, tokoh adat yang menjaga kearifan lokal, pemimpin yang memberikan teladan kesederhanaan, hingga masyarakat yang mempertahankan tradisi musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama, seluruhnya menjalankan fungsi sebagai penjaga budaya. Tugas

utama bukan mempertahankan bentuk-bentuk budaya semata, tetapi menjaga nilai yang terkandung di dalamnya agar tetap relevan sepanjang zaman.

Dalam kehidupan modern, ancaman terhadap budaya sering kali datang bukan melalui penjajahan fisik sebagaimana terjadi pada masa lalu. Ancaman justru berkembang melalui perubahan gaya hidup, arus informasi global, budaya konsumtif, serta masuknya berbagai nilai yang perlahan menggantikan karakter bangsa. Globalisasi membuka kesempatan yang sangat besar bagi pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi pada saat yang sama juga membawa tantangan terhadap identitas nasional. Apabila sebuah bangsa hanya menjadi konsumen budaya global tanpa kemampuan menyaring dan mengolahnya sesuai karakter sendiri, maka perlahan-lahan budaya lokal akan kehilangan daya hidupnya. Bahasa menjadi asing di negeri sendiri, tradisi dianggap kuno, sopan santun dipandang sebagai kelemahan, dan gotong royong tergeser oleh individualisme. Kerusakan seperti itu tidak selalu terlihat dalam waktu singkat, tetapi dampaknya dapat berlangsung selama beberapa generasi.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, serta beragam tradisi merupakan anugerah yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Namun kekayaan tersebut baru memiliki arti apabila mampu dipersatukan oleh nilai-nilai yang sama. Di sinilah pentingnya budaya nasional sebagai ruang perjumpaan seluruh keragaman Nusantara. Budaya

nasional bukanlah penghapusan identitas lokal, melainkan penyatuan berbagai kekayaan budaya ke dalam semangat kebangsaan yang sama. Dengan cara demikian, keberagaman berubah menjadi kekuatan yang memperkaya Indonesia, bukan menjadi sumber perpecahan.

Dalam glosarium buku ini telah ditegaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi bagi seluruh kehidupan budaya Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa membentuk budaya yang menghormati kehidupan sebagai amanah Tuhan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab melahirkan budaya saling menghargai dan memuliakan martabat manusia. Persatuan Indonesia membangun budaya yang menempatkan kebangsaan di atas kepentingan golongan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan mendorong berkembangnya tradisi musyawarah sebagai cara menyelesaikan persoalan bersama. Keadilan Sosial membentuk budaya kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, penjaga budaya pada hakikatnya menjaga agar *kernel* bangsa terus hidup dalam perilaku masyarakat sehari-hari.

Nilai-nilai tersebut memperoleh bentuk kelembagaan melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap kebudayaan nasional, menjamin kebebasan masyarakat mengembangkan nilai-nilai budaya, serta memberikan dasar bagi negara untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Namun sebagaimana halnya hukum tidak dapat menciptakan kejujuran, konstitusi juga tidak

dapat menciptakan budaya. Negara dapat membangun museum, menetapkan kawasan cagar budaya, maupun menyelenggarakan berbagai festival kebudayaan. Akan tetapi, budaya hanya benar-benar hidup apabila masyarakat menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberhasilan menjaga budaya lebih banyak ditentukan oleh kualitas manusia daripada banyaknya regulasi.

Dalam perspektif buku ini, **Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa**. Analogi tersebut menunjukkan bahwa budaya bukan sekadar salah satu bagian dari kehidupan nasional, melainkan lingkungan tempat seluruh nilai bangsa dijalankan. Bahasa, adat istiadat, gotong royong, musyawarah, penghormatan kepada orang tua, kepedulian terhadap lingkungan, serta semangat hidup bersama merupakan komponen yang membuat *operating system* tersebut dapat bekerja secara harmonis. Ketika salah satu nilai mulai hilang, keseimbangan sistem juga mulai terganggu. Oleh sebab itu, menjaga budaya berarti menjaga keberlangsungan *operating system* kehidupan berbangsa agar tetap mampu menjalankan seluruh fungsi peradaban Indonesia.

Perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi digital menghadirkan tantangan baru bagi para penjaga budaya. Dunia digital mempercepat penyebaran informasi, mempertemukan berbagai budaya dunia dalam satu ruang virtual, sekaligus mengubah pola interaksi masyarakat. Generasi muda dapat mengakses berbagai budaya asing hanya melalui telepon genggam. Kondisi tersebut membawa peluang untuk memperluas

wawasan, tetapi juga menghadirkan risiko hilangnya akar budaya apabila kemampuan menyaring informasi semakin melemah. Oleh sebab itu, penjaga budaya tidak dapat bersikap menolak perkembangan teknologi. Tugas yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa teknologi menjadi sarana memperkuat identitas bangsa, memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia, serta membangun kreativitas yang tetap berakar pada nilai-nilai Nusantara.

Budaya juga memiliki peran penting dalam menjaga kohesi sosial. Masyarakat yang memiliki budaya saling menghormati akan lebih mudah menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Tradisi musyawarah mengurangi kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Gotong royong memperkuat solidaritas sosial ketika menghadapi bencana maupun kesulitan ekonomi. Rasa malu yang dibangun oleh budaya menjadi pengendali perilaku yang sering kali lebih efektif daripada ancaman hukuman. Dengan demikian, budaya tidak hanya membentuk identitas, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang menjaga stabilitas kehidupan bangsa.

Tanggung jawab penjaga budaya semakin besar ketika dunia bergerak menuju masyarakat global yang semakin terbuka. Indonesia tentu perlu belajar dari berbagai bangsa dan menyerap berbagai kemajuan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Namun proses tersebut tidak boleh menghilangkan karakter bangsa sendiri. Kemajuan yang kehilangan identitas hanya akan menghasilkan masyarakat yang modern secara teknologi tetapi rapuh secara budaya. Sebaliknya,

bangsa yang mampu menggabungkan inovasi dengan akar budayanya akan memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dalam menghadapi perubahan zaman. Peradaban besar sepanjang sejarah selalu berkembang melalui kemampuan memadukan pembaruan dengan nilai-nilai yang telah menjadi fondasi kehidupannya.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, menjaga budaya berarti menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa sebagai dasar pembentukan karakter masyarakat. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa ini perlu membebaskan diri dari cara pandang yang menganggap budaya sendiri lebih rendah daripada budaya bangsa lain, sekaligus membebaskan diri dari kecenderungan memisahkan kemajuan dari identitas nasional. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, seluruh kekayaan budaya Indonesia harus menjadi kekuatan yang memperkokoh Peradaban Nusantara sebagai fondasi kehidupan berbangsa yang mampu bertahan menghadapi perubahan global.

Pada akhirnya, penjaga budaya bukan sekadar menjaga peninggalan masa lalu, tetapi menjaga masa depan bangsa. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** terus menjadi sumber nilai yang membimbing perilaku masyarakat, **konstitusi sebagai *firmware* negara** memberikan perlindungan terhadap perkembangan kebudayaan nasional, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** tetap hidup dalam bahasa, adat, gotong royong, musyawarah, etika, dan cara hidup masyarakat Indonesia, maka bangsa ini tidak hanya akan dikenal karena kemajuan pembangunan atau kekuatan ekonominya, tetapi juga

karena kemampuannya menjaga identitas sebagai sebuah peradaban yang berakar kuat, terbuka terhadap kemajuan, dan tetap setia pada nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.

25.5. Penjaga Patriotisme

Setiap bangsa membutuhkan manusia-manusia yang bersedia menjaga keberlangsungan negaranya dengan penuh kesadaran dan pengabdian. Kekuatan tersebut tidak selalu lahir dari senjata, kekuasaan, ataupun jabatan. Kekuatan terbesar justru berasal dari rasa memiliki terhadap tanah air, kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, serta keberanian mempertahankan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bersama. Keseluruhan sikap tersebut dikenal sebagai patriotisme. Oleh sebab itu, patriotisme bukan sekadar perasaan bangga terhadap bangsa sendiri, melainkan komitmen untuk menjaga keberlangsungan negara dan peradaban melalui tindakan nyata. Dalam konteks inilah hadir sosok **penjaga patriotisme**, yaitu manusia-manusia yang memastikan semangat kebangsaan tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Selama ini patriotisme sering dipahami secara sempit sebagai keberanian mengangkat senjata di medan perang. Pemahaman tersebut memang memiliki akar sejarah yang kuat karena perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia banyak dilakukan melalui pengorbanan fisik para pejuang, prajurit, dan rakyat. Akan tetapi, setelah kemerdekaan berhasil diraih, bentuk pengabdian kepada bangsa

mengalami perkembangan yang jauh lebih luas. Ancaman terhadap negara tidak lagi selalu berupa invasi militer. Ancaman dapat muncul dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan ekonomi, disinformasi, radikalisme, kejahatan siber, kerusakan lingkungan, ketergantungan teknologi, hingga melemahnya karakter generasi muda. Karena bentuk ancaman berubah, maka bentuk patriotisme juga harus berkembang mengikuti kebutuhan zaman.

Penjaga patriotisme karena itu tidak hanya ditemukan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun kedua institusi tersebut memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Patriotisme juga hidup dalam diri aparatur sipil negara yang bekerja dengan jujur, guru yang mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat dengan penuh pengabdian, petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menjaga kedaulatan laut, pengusaha yang membangun industri nasional secara bertanggung jawab, ilmuwan yang mengembangkan inovasi untuk kepentingan bangsa, hingga masyarakat yang menaati hukum dan menjaga persatuan. Seluruh pengabdian tersebut merupakan bentuk nyata patriotisme karena seluruhnya menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi.

Patriotisme juga tidak identik dengan slogan ataupun simbol-simbol kebangsaan yang ditampilkan pada momen-momen tertentu. Mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan memperingati hari-

hari nasional memiliki makna yang penting sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah bangsa. Namun patriotisme yang sesungguhnya baru terlihat ketika seseorang dihadapkan pada pilihan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bangsa. Seorang pejabat yang menolak korupsi meskipun memiliki kesempatan, seorang hakim yang tetap menegakkan keadilan di tengah tekanan, seorang pengusaha yang tidak merusak lingkungan demi keuntungan jangka pendek, atau seorang akademisi yang tetap menyampaikan kebenaran ilmiah meskipun bertentangan dengan kepentingan kelompok tertentu, seluruhnya menunjukkan bentuk patriotisme yang jauh lebih substansial daripada sekadar simbol-simbol kebangsaan.

Bangsa yang kehilangan patriotisme perlahan akan kehilangan kemampuan mempertahankan dirinya sendiri. Pada tahap awal, kerusakan mungkin belum terlihat secara nyata. Pemerintahan tetap berjalan, ekonomi masih tumbuh, dan kehidupan sosial tampak stabil. Namun ketika semakin banyak warga negara lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, fondasi negara mulai mengalami pengikisan dari dalam. Korupsi dianggap sebagai hal yang biasa. Kepentingan asing lebih mudah memengaruhi kebijakan nasional. Sumber daya alam dieksploitasi tanpa mempertimbangkan masa depan bangsa. Perbedaan dalam pendapat berkembang menjadi permusuhan yang merusak persatuan. Dalam kondisi seperti itu, ancaman terbesar terhadap negara

justru lahir dari melemahnya semangat pengabdian kepada bangsa.

Dalam glosarium buku ini telah ditegaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Patriotisme Indonesia tidak lahir dari nasionalisme yang sempit ataupun rasa superioritas terhadap bangsa lain. Patriotisme Indonesia tumbuh dari nilai-nilai Pancasila yang memandang cinta tanah air sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa menjaga bangsa merupakan bagian dari amanah kepada Tuhan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memastikan bahwa patriotisme tidak berubah menjadi kebencian terhadap bangsa lain. Persatuan Indonesia menjadi pusat orientasi seluruh pengabdian kebangsaan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan mengajarkan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh bentuk pengabdian kepada negara. Dengan demikian, patriotisme Indonesia selalu berjalan berdampingan dengan kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab moral.

Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Konstitusi mengatur pembagian kewenangan, pertahanan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta berbagai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi menyediakan kerangka hukum agar setiap warga negara dapat mengabdikan diri kepada bangsa melalui bidang masing-masing. Akan tetapi, sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, konstitusi hanya

mampu mengatur tindakan lahiriah. Konstitusi tidak dapat memaksa lahirnya rasa cinta tanah air. Tidak ada undang-undang yang mampu menciptakan kesediaan berkorban bagi bangsa apabila kesadaran tersebut tidak tumbuh dari dalam diri setiap warga negara. Oleh sebab itu, penjaga patriotisme sesungguhnya menjaga sesuatu yang berada di balik seluruh sistem hukum, yaitu semangat pengabdian yang menjadi energi kehidupan berbangsa.

Dalam perspektif **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**, patriotisme memiliki akar yang sangat kuat dalam sejarah panjang masyarakat Nusantara. Tradisi gotong royong, musyawarah, solidaritas antarkampung, penghormatan terhadap tanah leluhur, serta kesediaan melindungi komunitas merupakan bentuk-bentuk awal patriotisme yang telah hidup jauh sebelum lahirnya negara modern. Setelah Indonesia merdeka, semangat tersebut berkembang menjadi pengabdian kepada negara kesatuan yang menaungi seluruh keberagaman Nusantara. Dengan demikian, patriotisme Indonesia bukan sekadar konsep pemerintahan modern, melainkan kelanjutan dari nilai-nilai peradaban yang telah tumbuh selama berabad-abad.

Perkembangan globalisasi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru bagi patriotisme. Dunia menjadi semakin terbuka. Arus modal, teknologi, informasi, dan budaya bergerak melampaui batas-batas negara. Dalam situasi seperti itu, patriotisme tidak boleh berubah menjadi sikap tertutup terhadap perkembangan dunia. Sebaliknya, patriotisme harus

menjadi kemampuan menjaga kepentingan nasional di tengah keterbukaan global. Bangsa Indonesia perlu menguasai teknologi dunia, tetapi tetap menjaga kedaulatan digital. Indonesia perlu membangun kerja sama internasional, tetapi tetap mempertahankan kemandirian dalam menentukan arah pembangunan. Indonesia perlu menyerap ilmu pengetahuan global, tetapi tetap membangun kemampuan inovasi sendiri. Patriotisme abad ke-21 bukanlah penolakan terhadap dunia luar, melainkan kemampuan berdiri sejajar dengan bangsa lain tanpa kehilangan identitas dan kepentingan nasional.

Penjaga patriotisme juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Perbedaan agama, budaya, bahasa, suku, dan pandangan pemerintahan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Patriotisme memastikan bahwa seluruh keberagaman tersebut tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan, tetapi menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun masa depan bersama. Ketika rasa cinta tanah air lebih besar daripada kepentingan kelompok, maka berbagai persoalan nasional dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan kerja sama.

Pada akhirnya, patriotisme adalah bentuk pengabdian yang menghubungkan seluruh penjaga bangsa. Penjaga intelektual menjaga kebenaran berpikir. Penjaga spiritual menjaga hati nurani. Penjaga budaya menjaga identitas. Penjaga patriotisme memastikan bahwa seluruh kekuatan tersebut

diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara. Tanpa patriotisme, ilmu pengetahuan dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Spiritualitas dapat terjebak dalam ruang individual. Budaya dapat kehilangan orientasi kebangsaan. Patriotisme menjadi energi yang menyatukan seluruh potensi bangsa menuju tujuan yang sama.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, patriotisme berarti membangkitkan kembali semangat pengabdian yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, bangsa ini perlu membebaskan diri dari berbagai bentuk mentalitas yang menjadikan jabatan, kekayaan, atau kekuasaan sebagai tujuan utama, sekaligus membangun kembali kesadaran bahwa seluruh profesi merupakan ruang pengabdian kepada negara. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, Indonesia membutuhkan generasi penjaga patriotisme yang mampu menjaga kedaulatan negara, memperkuat persatuan nasional, serta memastikan bahwa Peradaban Nusantara tetap berkembang sebagai rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, penjaga patriotisme bukan hanya menjaga batas wilayah negara, tetapi menjaga arah perjalanan bangsa. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** terus menjadi sumber nilai yang membimbing rasa cinta tanah air, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan sistem yang memungkinkan setiap warga negara mengabdi sesuai perannya, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan**

berbangsa menumbuhkan budaya gotong royong, persatuan, serta tanggung jawab kepada generasi mendatang, maka Indonesia akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar pertahanan fisik. Indonesia akan memiliki warga negara yang menjadikan pengabdian kepada bangsa sebagai bagian dari kehormatan hidup, sehingga cita-cita **Restore Indonesia**, ***Free*** **Indonesia**, dan ***Save*** **Nusantara** dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui semangat patriotisme yang hidup di setiap generasi.

25.6. Menjaga Penjaga Bangsa

Sebuah bangsa tidak hanya membutuhkan sistem yang baik, tetapi juga membutuhkan manusia-manusia yang menjaga sistem tersebut agar tetap bekerja sesuai tujuan pembentukannya. Pada bab ini telah dibahas empat kelompok penjaga bangsa, yaitu penjaga intelektual yang menjaga kebenaran, penjaga spiritual yang menjaga hati nurani, penjaga budaya yang menjaga identitas, dan penjaga patriotisme yang menjaga kedaulatan serta semangat pengabdian kepada tanah air. Keempatnya membentuk lapisan pertahanan yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi justru menentukan apakah sebuah bangsa mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Namun terdapat satu persoalan yang sering terlupakan. Apabila bangsa membutuhkan penjaga, maka muncul pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu siapakah yang menjaga para penjaga bangsa?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan teoritis. Sejarah berbagai peradaban menunjukkan

bahwa keruntuhan suatu bangsa sering kali tidak diawali oleh kegagalan sistem, melainkan oleh rusaknya para penjaga sistem itu sendiri. Ketika intelektual kehilangan integritas, ilmu pengetahuan berubah menjadi alat pembenaran kekuasaan. Ketika tokoh spiritual kehilangan keteladanan, agama kehilangan daya transformasi moral. Ketika budayawan lebih mengejar popularitas daripada menjaga nilai, budaya berubah menjadi komoditas hiburan semata. Ketika patriotisme bergeser menjadi kepentingan kelompok atau pribadi, pengabdian kepada bangsa berubah menjadi perebutan kekuasaan. Pada saat itulah kerusakan mulai menyebar ke seluruh sistem kehidupan berbangsa.

Bahaya terbesar bagi sebuah bangsa bukanlah ketika musuh datang dari luar, melainkan ketika penjaga bangsa mulai meninggalkan nilai-nilai yang seharusnya dijaga. Seorang intelektual yang menjual pengetahuan demi kepentingan tertentu dapat menghasilkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada orang yang tidak berpendidikan. Tokoh spiritual yang kehilangan akhlak mampu melahirkan krisis kepercayaan yang meluas. Budayawan yang memutus hubungan antara generasi muda dengan akar budayanya dapat mempercepat hilangnya identitas bangsa. Pemimpin yang kehilangan patriotisme mampu menyerahkan masa depan negara kepada kepentingan yang bertentangan dengan cita-cita nasional. Seluruh kerusakan tersebut tidak selalu terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang perlahan hingga akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang normal.

Oleh sebab itu, menjaga para penjaga bangsa menjadi salah satu tugas terpenting dalam membangun sebuah peradaban. Menjaga bukan berarti memberikan perlindungan terhadap kritik ataupun menempatkan kelompok tertentu di atas hukum. Menjaga berarti memastikan bahwa seluruh penjaga bangsa tetap memiliki mekanisme pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan regenerasi. Tidak ada manusia yang kebal terhadap kekeliruan. Tidak ada profesi yang otomatis menjamin integritas. Setiap orang memerlukan ruang untuk terus belajar, memperbaiki diri, menerima kritik, serta mengembangkan kualitas moral dan intelektual sepanjang hidup. Peradaban yang sehat selalu memiliki kemampuan memperbaiki para penjaganya sebelum kerusakan berkembang menjadi krisis nasional.

Di sinilah pentingnya pendidikan sebagai proses pembentukan generasi penjaga bangsa. Pendidikan tidak boleh berhenti pada penguasaan ilmu pengetahuan ataupun keterampilan teknis. Pendidikan harus mampu melahirkan manusia yang berpikir jernih, memiliki hati nurani, mencintai budayanya, dan bersedia mengabdikan kemampuan terbaik bagi bangsa. Pendidikan yang hanya menghasilkan tenaga kerja mungkin mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun pendidikan yang melahirkan penjaga bangsa akan menentukan keberlangsungan sebuah peradaban. Masa depan Indonesia lebih banyak ditentukan oleh kualitas manusia yang dihasilkan sistem pendidikan daripada oleh besarnya anggaran pembangunan.

Keluarga juga memiliki peran yang tidak dapat digantikan oleh institusi mana pun. Karakter seorang

penjaga bangsa mulai dibentuk sejak lingkungan keluarga memperkenalkan kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, disiplin, dan penghormatan kepada sesama. Sekolah kemudian mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan hidup. Masyarakat menjadi ruang untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Negara menyediakan sistem yang mendukung pertumbuhan seluruh potensi tersebut. Dengan demikian, menjaga penjaga bangsa merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, pendidikan, masyarakat, lembaga keagamaan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga seluruh penyelenggara negara.

Dalam glosarium buku ini telah dijelaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Sebagaimana *kernel* pada sebuah sistem operasi yang menjaga seluruh proses tetap berjalan sesuai fungsi dasarnya, Pancasila harus terus menjadi sumber orientasi bagi para penjaga bangsa. Penjaga intelektual memperoleh arah dari nilai kebenaran yang berlandaskan Ketuhanan dan Kemanusiaan. Penjaga spiritual memperoleh kekuatan moral dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjaga budaya menjaga Persatuan Indonesia melalui keberagaman Nusantara. Penjaga patriotisme memastikan bahwa seluruh pengabdian bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila hubungan antara para penjaga bangsa dengan *kernel* tersebut mulai terputus, maka seluruh sistem kehidupan nasional perlahan kehilangan arah.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** memiliki fungsi memastikan bahwa sistem kenegaraan

mampu melindungi serta mengembangkan para penjaga bangsa melalui tata kelola yang baik. Konstitusi menciptakan ruang bagi pendidikan, kebebasan akademik, kehidupan beragama, pelestarian kebudayaan, serta pertahanan negara. Namun konstitusi tetap memerlukan manusia yang menjalankannya dengan integritas. Sebaik apa pun desain kelembagaan, seluruhnya akan kehilangan makna apabila para penjaga bangsa tidak lagi menjadikan konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, kualitas *firmware* negara selalu bergantung pada kualitas manusia yang mengoperasikannya.

Lebih jauh lagi, **Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa**. Di dalam *operating system* inilah seluruh penjaga bangsa menjalankan perannya secara terpadu. Penjaga intelektual melahirkan gagasan. Penjaga spiritual memberikan arah moral. Penjaga budaya menjaga identitas. Penjaga patriotisme memastikan seluruh kekuatan tersebut diabdikan bagi kepentingan bangsa. Tidak ada satu pun yang dapat bekerja sendiri. Apabila salah satu melemah, keseimbangan seluruh sistem akan terganggu. Sebaliknya, apabila keempatnya berjalan secara harmonis, Indonesia akan memiliki daya tahan yang jauh lebih besar daripada sekadar kekuatan ekonomi ataupun militer. Indonesia akan memiliki ketahanan peradaban.

Perkembangan dunia pada abad ke-21 memperlihatkan bahwa persaingan antarbangsa semakin ditentukan oleh kualitas manusianya.

Teknologi berkembang sangat cepat. Kecerdasan buatan mengambil alih banyak pekerjaan rutin. Persaingan ekonomi semakin terbuka. Informasi bergerak tanpa mengenal batas negara. Dalam situasi seperti itu, bangsa yang hanya mengandalkan sumber daya alam akan semakin tertinggal. Bangsa yang hanya mengandalkan teknologi juga belum tentu bertahan. Keunggulan sesungguhnya akan dimiliki oleh bangsa yang mampu melahirkan manusia-manusia berintegritas, berilmu, berakhlak, berbudaya, dan memiliki semangat pengabdian kepada tanah air. Dengan kata lain, masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan membangun dan menjaga para penjaga bangsa.

Konsep **System Guardians** yang diperkenalkan dalam buku ini pada akhirnya bukan sekadar klasifikasi mengenai empat kelompok manusia yang memiliki peran strategis. Konsep tersebut merupakan sebuah kerangka pembangunan peradaban. Sebuah bangsa yang ingin bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun harus memiliki mekanisme untuk terus melahirkan penjaga-penjaga baru pada setiap generasi. Regenerasi menjadi kunci keberlangsungan peradaban. Ketika satu generasi selesai menjalankan tugasnya, generasi berikutnya telah siap melanjutkan perjuangan dengan nilai yang sama, meskipun menghadapi tantangan yang berbeda.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, menjaga penjaga bangsa berarti membangun kembali ekosistem yang melahirkan manusia-manusia berintegritas pada seluruh bidang kehidupan. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa ini perlu membebaskan para penjaga

bangsa dari berbagai bentuk degradasi moral, penyalahgunaan kekuasaan, pragmatisme, serta budaya instan yang mengikis kualitas kepemimpinan nasional. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, seluruh elemen bangsa harus bersama-sama memastikan bahwa regenerasi penjaga intelektual, penjaga spiritual, penjaga budaya, dan penjaga patriotisme terus berlangsung sehingga Peradaban Nusantara memiliki daya hidup yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak diukur hanya dari besarnya anggaran negara, tingginya gedung-gedung pencakar langit, canggihnya teknologi, ataupun besarnya kekuatan militer. Kekuatan sejati terletak pada kualitas manusia yang menjaga seluruh sistem tersebut tetap berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** terus menjadi sumber nilai yang menghidupkan karakter para penjaga bangsa, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menjaga keteraturan sistem kenegaraan, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menjadi ruang hidup yang melahirkan generasi-generasi berilmu, berakhlak, berbudaya, serta berjiwa patriot, maka Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan eksistensi sebagai sebuah negara, tetapi juga akan tumbuh menjadi sebuah peradaban besar yang diwariskan dengan penuh kehormatan kepada generasi-generasi yang akan datang. Dengan jalan itulah cita-cita **Restore Indonesia**, ***Free* Indonesia**, dan ***Save* Nusantara** memperoleh fondasi yang kokoh, bukan hanya untuk menghadapi tantangan hari ini,

tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan bangsa sepanjang perjalanan sejarah.

BAB 26
SERIBU ROOT USERS

26.1. Mengapa Bangsa Tidak Membutuhkan Sejuta Pemimpin

Banyak orang meyakini bahwa kemajuan sebuah bangsa bergantung pada banyaknya pemimpin yang hebat. Pandangan tersebut tampak masuk akal karena hampir setiap persoalan nasional selalu dihubungkan dengan kebutuhan akan pemimpin baru. Ketika ekonomi mengalami kesulitan, masyarakat mencari pemimpin ekonomi. Ketika hukum melemah, harapan diarahkan kepada pemimpin yang tegas. Ketika pendidikan tertinggal, perhatian tertuju kepada pemimpin yang dianggap mampu melakukan perubahan. Perlahan-lahan muncul keyakinan bahwa setiap persoalan bangsa akan selesai apabila berhasil menemukan sosok pemimpin yang tepat. Padahal sejarah memperlihatkan kenyataan yang jauh lebih menarik. Perubahan besar tidak pernah lahir semata-mata karena hadirnya banyak pemimpin, melainkan karena hadirnya sejumlah kecil manusia yang mampu menjaga nilai, menggerakkan masyarakat, dan membangun kesadaran bersama.

Perjalanan peradaban manusia menunjukkan bahwa titik balik sejarah hampir selalu dimulai oleh kelompok yang jumlahnya sangat sedikit. Perubahan besar tidak pernah menunggu seluruh masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang sama. Selalu ada sekelompok kecil manusia yang terlebih dahulu memahami arah perubahan, memegang teguh prinsip,

berani memberikan keteladanan, kemudian menggerakkan lingkungan di sekitarnya. Dari kelompok kecil tersebut lahir gelombang perubahan yang terus meluas hingga akhirnya membentuk wajah baru sebuah peradaban. Dengan demikian, kekuatan sejarah tidak terutama ditentukan oleh jumlah manusia yang berada di garis depan, melainkan oleh kualitas manusia yang mampu menghidupkan kesadaran kolektif.

Bangsa yang besar karena itu tidak memerlukan sejuta pemimpin yang berlomba-lomba berada di puncak kekuasaan. Bangsa justru memerlukan manusia-manusia yang bersedia menjadi sumber keteladanan pada bidang kehidupannya masing-masing. Tidak semua orang harus menjadi presiden. Tidak semua orang harus menjadi menteri. Tidak semua orang harus menjadi anggota parlemen. Sebuah bangsa hanya dapat berjalan dengan baik apabila setiap bidang kehidupan dipenuhi oleh manusia yang memiliki integritas, kompetensi, dan keberanian moral. Guru yang mendidik dengan penuh tanggung jawab, hakim yang menjaga keadilan, ilmuwan yang menjaga kebenaran, pengusaha yang menjaga amanah, petani yang menjaga ketahanan pangan, aparat negara yang menjaga pelayanan publik, hingga orang tua yang menjaga pendidikan keluarga, seluruhnya sedang menjalankan kepemimpinan dalam bentuk yang paling mendasar.

Kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan pemerintahan modern adalah menyamakan kepemimpinan dengan jabatan. Jabatan memang

memberikan kewenangan formal, tetapi kepemimpinan lahir dari kepercayaan. Jabatan dapat diperoleh melalui mekanisme administratif atau pemerintahan, sedangkan kepemimpinan hanya diberikan oleh masyarakat kepada manusia yang mampu menunjukkan keteladanan. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang yang memiliki jabatan tinggi tetapi gagal menjadi pemimpin. Sebaliknya, banyak manusia sederhana yang tidak memiliki kekuasaan formal, namun mampu menggerakkan ribuan bahkan jutaan orang melalui integritas, pemikiran, dan pengabdiannya. Sejarah Indonesia maupun sejarah dunia memberikan banyak contoh mengenai kenyataan tersebut.

Dalam kehidupan berbangsa, keteladanan selalu memiliki daya pengaruh yang jauh lebih besar daripada instruksi. Peraturan dapat memaksa seseorang menaati hukum, tetapi keteladanan menggerakkan hati untuk melakukan kebaikan secara sukarela. Pidato dapat membangkitkan semangat untuk sementara waktu, tetapi karakter seorang pemimpin mampu mengubah cara hidup masyarakat dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, bangsa yang ingin membangun masa depan tidak cukup hanya menghasilkan banyak pejabat. Bangsa tersebut harus mampu melahirkan manusia-manusia yang dipercaya karena kualitas moral dan intelektualnya. Ketika kepercayaan tumbuh, pengaruh akan mengikuti. Ketika pengaruh berkembang, perubahan akan bergerak secara alami.

Bab sebelumnya telah memperkenalkan empat kelompok **System Guardians**, yaitu penjaga intelektual, penjaga spiritual, penjaga budaya, dan penjaga

patriotisme. Keempat kelompok tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan sebuah bangsa tidak ditentukan hanya oleh struktur pemerintahan. Bangsa bertahan karena terdapat manusia-manusia yang menjaga ilmu pengetahuan, menjaga hati nurani, menjaga identitas, dan menjaga semangat pengabdian kepada tanah air. Seluruh penjaga tersebut tidak harus berada dalam lingkaran kekuasaan negara. Sebagian besar justru hidup di tengah masyarakat sebagai guru, ulama, akademisi, seniman, aparat negara, pelaku usaha, tokoh masyarakat, maupun warga negara biasa yang menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran.

Di sinilah muncul kebutuhan terhadap sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar kepemimpinan formal, yaitu keberadaan manusia-manusia yang memiliki kesadaran sistemik terhadap kehidupan bangsa. Buku ini menyebut kelompok tersebut sebagai ***Root Users***, yaitu manusia-manusia yang memahami nilai dasar bangsa, menjaga arah perjalanan negara, dan mampu menggerakkan lingkungan sekitarnya tanpa harus bergantung pada kekuasaan formal. Sebagaimana dalam sebuah sistem komputer hanya terdapat sedikit pengguna yang memiliki hak akses tertinggi untuk menjaga keseluruhan sistem tetap berjalan dengan baik, demikian pula sebuah bangsa memerlukan sejumlah kecil manusia yang memiliki kedewasaan moral dan intelektual untuk menjaga arah perjalanan peradabannya. Jumlah tidak perlu banyak, tetapi kualitas harus sangat tinggi.

Konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk melahirkan kelompok eksklusif ataupun elit yang memisahkan diri dari masyarakat. Sebaliknya, *Root Users* lahir dari rakyat dan tetap menjadi bagian dari rakyat. Perbedaan hanya terletak pada tingkat kesadaran. Kesadaran untuk mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Kesadaran untuk menjaga nilai ketika orang lain mulai mengabaikannya. Kesadaran untuk membangun, bukan sekadar mengkritik. Kesadaran untuk menjadi solusi, bukan memperbesar persoalan. Dengan demikian, *Root Users* bukanlah elit kekuasaan, melainkan **elit moral rakyat sadar** yang memperoleh pengaruh karena kualitas pengabdian, bukan karena kedudukan.

Dalam glosarium buku ini telah ditegaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Sebagaimana *kernel* menjadi inti yang mengendalikan seluruh proses dalam sebuah sistem operasi, Pancasila menjadi pusat orientasi seluruh tindakan para *Root Users*. Ketuhanan Yang Maha Esa menjaga arah moral. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjaga penghormatan terhadap martabat manusia. Persatuan Indonesia menjadi landasan pengabdian kepada bangsa. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menjaga cara mengambil keputusan. Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh perjuangan. *Root Users* tidak bergerak berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam *kernel* bangsa tersebut.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan kerangka kelembagaan agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Namun sebagaimana perangkat lunak tidak akan bekerja tanpa operator yang memahami fungsinya, konstitusi juga memerlukan manusia-manusia yang memiliki kesadaran untuk menjalankannya secara benar. *Root Users* menjadi penghubung antara nilai dasar bangsa dengan pelaksanaan kehidupan bernegara. Melalui keteladanan, kritik yang konstruktif, pendidikan masyarakat, serta pengabdian pada bidang masing-masing, kelompok inilah yang menjaga agar *firmware* negara tidak kehilangan arah karena penyimpangan manusia yang mengoperasikannya.

Lebih jauh lagi, **Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa**. *Root Users* tidak berdiri di luar sistem tersebut, tetapi menjadi bagian yang memastikan seluruh komponen *operating system* tetap bekerja secara harmonis. Pengetahuan berkembang tanpa kehilangan moralitas. Spiritualitas tumbuh tanpa meninggalkan rasionalitas. Budaya terus hidup tanpa menolak kemajuan. Patriotisme berkembang tanpa berubah menjadi kebencian terhadap bangsa lain. Keharmonisan seperti inilah yang memungkinkan sebuah peradaban bertahan menghadapi perubahan zaman.

Perkembangan dunia pada abad ke-21 justru memperbesar kebutuhan terhadap manusia-manusia seperti ini. Kecerdasan buatan mampu menghasilkan informasi dalam hitungan detik, tetapi tidak mampu menentukan arah moral sebuah bangsa. Teknologi

dapat mempercepat komunikasi, tetapi tidak dapat menggantikan keteladanan. Kekuasaan dapat mengatur perilaku melalui hukum, tetapi tidak mampu menciptakan kesadaran. Oleh sebab itu, masa depan Indonesia tidak terutama ditentukan oleh banyaknya pejabat ataupun besarnya anggaran pembangunan, melainkan oleh keberhasilan melahirkan manusia-manusia yang memiliki kualitas sebagai *Root Users* pada setiap bidang kehidupan.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, kebangkitan bangsa harus dimulai dengan membangun manusia-manusia yang mampu menjadi pusat keteladanan di lingkungannya masing-masing. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa ini perlu membebaskan diri dari cara berpikir yang menggantungkan seluruh harapan kepada segelintir pemimpin, kemudian mulai membangun kesadaran bahwa perubahan merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Indonesia memerlukan bukan sejuta orang yang berebut memimpin, melainkan seribu manusia yang mampu menjaga nilai, menggerakkan masyarakat, dan melahirkan ribuan penjaga bangsa berikutnya.

Pada akhirnya, sebuah bangsa tidak pernah diselamatkan oleh banyaknya pemimpin yang berdiri di panggung kekuasaan. Bangsa diselamatkan oleh sedikit manusia yang memilih menjadi cahaya bagi lingkungan sekitarnya. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** menjadi sumber nilai yang membentuk karakter, **konstitusi sebagai *firmware* negara** memberikan arah penyelenggaraan kehidupan bernegara, dan **Peradaban**

Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa menjadi ruang tumbuh bagi manusia-manusia yang berintegritas, maka Indonesia tidak membutuhkan sejuta pemimpin. Indonesia hanya membutuhkan cukup banyak manusia sadar yang mampu menjaga nilai, menggerakkan masyarakat, dan memastikan perjalanan bangsa tetap berada pada arah yang benar dari generasi ke generasi.

26.2. *Root Users*: Penguasa Moral Rakyat Sadar



Setiap sistem yang kompleks selalu memiliki sejumlah kecil pengguna yang memperoleh tingkat kepercayaan paling tinggi untuk menjaga keberlangsungan sistem tersebut. Dalam dunia teknologi, kelompok tersebut dikenal sebagai *root users*, yaitu pengguna yang memiliki akses penuh terhadap

inti sistem, bertanggung jawab menjaga stabilitas, melakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan, serta memastikan seluruh komponen dapat bekerja sesuai fungsinya. Analogi tersebut memberikan inspirasi yang sangat penting bagi pembangunan sebuah bangsa. Indonesia juga memerlukan manusia-manusia yang memiliki kedewasaan moral, keluasan wawasan, dan keberanian menjaga arah perjalanan bangsa. Kelompok inilah yang dalam buku ini disebut sebagai ***Root Users***, bukan sebagai elit kekuasaan, melainkan sebagai **elit moral rakyat sadar**.

Istilah elit sering kali menimbulkan kesan negatif dalam kehidupan pemerintahan modern. Pejabat dipahami sebagai kelompok kecil yang menikmati berbagai keistimewaan, memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, serta hidup terpisah dari masyarakat. Pengalaman sejarah memang menunjukkan bahwa tidak sedikit kelompok elit yang menjadikan kedudukannya sebagai alat mempertahankan kepentingan sendiri. Akibatnya, kata elit identik dengan oligarki, privilese, bahkan ketimpangan sosial. Padahal secara substantif, setiap masyarakat selalu membutuhkan kelompok manusia yang memiliki kualitas di atas rata-rata untuk menjaga arah perjalanan bersama. Persoalannya bukan terletak pada keberadaan elit, melainkan pada dasar yang menjadikan seseorang layak disebut sebagai elit.

Buku ini menawarkan paradigma yang berbeda. Elit yang dibutuhkan Indonesia bukanlah elit berdasarkan kekayaan, jabatan, keturunan, ataupun kekuasaan. Indonesia memerlukan pejabat yang lahir

dari kualitas moral, keluasan ilmu pengetahuan, keteladanan hidup, dan kesediaan mengabdikan seluruh kemampuan bagi kepentingan bangsa. Dengan demikian, elit moral bukan kelompok yang berdiri di atas rakyat, melainkan bagian dari rakyat yang memilih memikul tanggung jawab lebih besar daripada hak yang diterima. Kehormatan seorang Root User tidak lahir dari kedudukan, melainkan dari pengabdian.

Karena itu, Root User tidak dapat dibentuk melalui penunjukan administratif ataupun kemenangan dalam kontestasi kekuasaan. Status tersebut juga tidak diberikan oleh lembaga tertentu. Root User tumbuh melalui perjalanan panjang pembentukan karakter. Kesadaran moral dibangun melalui keluarga. Kejujuran ditempa melalui pendidikan. Integritas diuji melalui berbagai tantangan kehidupan. Kepedulian terhadap bangsa berkembang melalui pengalaman mengabdi kepada masyarakat. Seluruh proses tersebut melahirkan manusia yang mampu memandang kepentingan bangsa lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Pada titik itulah seseorang mulai menjalankan fungsi sebagai Root User, meskipun masyarakat mungkin tidak pernah memberikan gelar khusus.

Kesadaran menjadi pembeda utama antara Root User dan manusia pada umumnya. Kesadaran yang dimaksud bukan sekadar memahami persoalan bangsa secara intelektual, tetapi menyadari bahwa setiap tindakan pribadi memiliki konsekuensi terhadap kehidupan bersama. Kesadaran tersebut melahirkan tanggung jawab. Tanggung jawab melahirkan keberanian. Keberanian melahirkan keteladanan.

Keteladanan kemudian menggerakkan masyarakat secara alami. Oleh sebab itu, Root User tidak bekerja melalui paksaan, melainkan melalui pengaruh yang tumbuh dari kualitas pribadi. Pengaruh tersebut jauh lebih kuat daripada kekuasaan formal karena lahir dari kepercayaan.

Root User juga tidak dibatasi oleh profesi tertentu. Seorang guru dapat menjadi Root User ketika berhasil membentuk generasi yang berintegritas. Seorang ilmuwan dapat menjadi Root User ketika menjaga kejujuran akademik di tengah tekanan kepentingan. Seorang ulama menjadi Root User ketika membimbing masyarakat menuju akhlak yang mulia tanpa memecah belah persatuan. Seorang pengusaha menjadi Root User ketika membangun usaha yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Seorang aparatur negara menjadi Root User ketika menjalankan amanah dengan penuh integritas. Bahkan seorang petani yang menjaga ketahanan pangan dengan penuh tanggung jawab juga sedang menjalankan fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa. Root User tidak ditentukan oleh profesi, tetapi oleh kualitas pengabdian.

Perbedaan mendasar antara pemimpin biasa dan Root User terletak pada orientasi berpikir. Pemimpin sering kali berfokus pada penyelesaian persoalan jangka pendek sesuai ruang lingkup kewenangannya. Root User memandang persoalan secara lebih mendasar. Perhatian utama tidak hanya tertuju pada gejala yang tampak di permukaan, tetapi juga pada akar penyebab yang memengaruhi keberlangsungan sistem secara keseluruhan. Ketika melihat kerusakan pendidikan,

perhatian tidak berhenti pada kurikulum. Ketika melihat persoalan hukum, perhatian tidak berhenti pada peraturan. Ketika melihat kemiskinan, perhatian tidak berhenti pada bantuan sosial. Root User selalu berusaha memahami hubungan antara nilai, manusia, sistem, dan masa depan peradaban. Cara berpikir seperti inilah yang membuat pengaruh seorang Root User sering kali bertahan jauh lebih lama daripada masa jabatan seorang pejabat.

Dalam glosarium buku ini telah ditegaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. *Root Users* memperoleh orientasi utama dari *kernel* tersebut. Seluruh tindakan, keputusan, dan pengabdian selalu dikembalikan kepada nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi moral. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjaga penghormatan terhadap martabat manusia. Persatuan Indonesia menjadi kompas dalam menghadapi perbedaan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan membentuk cara berpikir yang mengutamakan musyawarah dan kebijaksanaan. Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh perjuangan. Dengan demikian, Root User bukan sekadar manusia yang cerdas, tetapi manusia yang hidup berdasarkan nilai-nilai yang menjadi inti kehidupan bangsa.

Nilai-nilai tersebut kemudian dijalankan melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Root User memahami bahwa konstitusi bukan sekadar kumpulan norma hukum, melainkan perangkat yang menghubungkan nilai dasar bangsa dengan praktik penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, Root User

tidak hanya taat kepada hukum karena takut terhadap sanksi, tetapi juga berusaha menjaga semangat yang melahirkan hukum tersebut. Ketika terjadi penyimpangan, kritik disampaikan secara konstruktif. Ketika sistem berjalan baik, dukungan diberikan secara bertanggung jawab. Sikap seperti inilah yang menjadikan Root User sebagai penjaga keberlangsungan *firmware* negara tanpa harus selalu berada di dalam struktur pemerintahan.

Lebih jauh lagi, **Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa**. *Root Users* menjadi pengguna yang memahami cara kerja *operating system* tersebut secara utuh. Pengetahuan modern dipadukan dengan kebijaksanaan lokal. Teknologi dimanfaatkan tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan. Spiritualitas hidup berdampingan dengan rasionalitas. Budaya terus berkembang tanpa kehilangan akar sejarah. Patriotisme tumbuh tanpa berubah menjadi permusuhan terhadap bangsa lain. Keseimbangan seperti itu hanya dapat dijaga oleh manusia yang memiliki kesadaran peradaban, bukan sekadar kesadaran.

Pada abad ke-21, kebutuhan terhadap *Root Users* justru semakin besar. Kecerdasan buatan mampu menghasilkan jawaban atas berbagai persoalan teknis, tetapi tidak mampu menentukan arah moral sebuah bangsa. Media sosial mampu membangun popularitas dalam waktu singkat, tetapi tidak mampu menciptakan integritas. Kekuasaan dapat mengendalikan kebijakan, tetapi tidak selalu mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, bangsa

memerlukan manusia-manusia yang tetap berpijak pada nilai, berpikir jangka panjang, serta mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kemuliaan kemanusiaan. *Root Users* menjadi jangkar moral sekaligus jangkar intelektual yang menjaga agar Indonesia tidak kehilangan arah di tengah perubahan global.

Jumlah *Root Users* memang tidak perlu banyak. Sejarah membuktikan bahwa perubahan besar hampir selalu dimulai oleh kelompok kecil yang memiliki kualitas luar biasa. Namun jumlah yang sedikit tersebut harus terus bertambah melalui proses regenerasi yang berkelanjutan. Setiap Root User memiliki tanggung jawab melahirkan *Root Users* berikutnya. Keteladanan harus diwariskan. Pengetahuan harus dibagikan. Pengalaman harus diteruskan. Dengan cara demikian, bangsa tidak pernah mengalami kekosongan penjaga nilai meskipun pergantian generasi terus berlangsung.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, pembangunan bangsa harus dimulai dengan melahirkan elit moral yang tumbuh dari rakyat dan tetap mengabdi kepada rakyat. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa ini perlu membebaskan diri dari anggapan bahwa elit selalu identik dengan kekuasaan, kemudian menggantinya dengan paradigma bahwa kehormatan tertinggi lahir dari integritas dan pengabdian. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Indonesia memerlukan ribuan *Root Users* yang tersebar di seluruh bidang kehidupan sebagai penjaga nilai, penggerak masyarakat, dan pembangun peradaban.

Pada akhirnya, *Root Users* merupakan manifestasi tertinggi dari rakyat yang sadar akan tanggung jawab sejarahnya. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** membentuk karakter para *Root Users*, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menjadi pedoman dalam menjalankan pengabdian, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menjadi ruang tumbuh bagi lahirnya keteladanan, maka elit yang terbentuk bukan lagi elit kekuasaan, melainkan elit moral rakyat sadar. Dari kelompok kecil inilah lahir kekuatan yang mampu menjaga bangsa tetap berada pada jalan yang benar, melahirkan penjaga-penjaga baru pada setiap generasi, serta memastikan bahwa cita-cita **Restore Indonesia**, ***Free* Indonesia**, dan ***Save* Nusantara** terus hidup sebagai gerakan peradaban yang tidak pernah berhenti.

26.3. Root User Bukan Penguasa

Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam kehidupan berbangsa adalah anggapan bahwa perubahan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan. Cara berpikir seperti ini secara perlahan membentuk budaya yang sangat bergantung kepada jabatan. Ketika ingin memperbaiki pendidikan, perhatian diarahkan kepada menteri. Ketika ingin memperbaiki hukum, harapan diletakkan kepada lembaga peradilan. Ketika ingin memperbaiki ekonomi, seluruh pandangan tertuju kepada pemerintah. Akibatnya, masyarakat berkembang menjadi penonton yang menunggu perubahan datang dari atas. Padahal sejarah menunjukkan bahwa

perubahan yang bertahan lama justru lahir dari kesadaran yang tumbuh di tengah masyarakat, kemudian memengaruhi negara, bukan sebaliknya.

Bab sebelumnya telah memperkenalkan konsep ***Root Users*** sebagai elit moral rakyat sadar. Namun penting untuk ditegaskan bahwa Root User bukanlah sinonim dari penguasa. Root User adalah manusia yang memiliki kemampuan menjaga arah kehidupan bangsa melalui keteladanan, integritas, dan pengaruh moral, bukan melalui kewenangan formal. Kekuasaan memang dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan, tetapi pengaruh moral mampu mengubah cara berpikir manusia. Kekuasaan berakhir ketika masa jabatan selesai, sedangkan keteladanan sering kali terus hidup melampaui generasi. Oleh sebab itu, Root User tidak diukur dari luasnya kewenangan yang dimiliki, melainkan dari besarnya manfaat yang diberikan kepada kehidupan bangsa.

Perbedaan antara penguasa dan Root User terletak pada sumber pengaruhnya. Penguasa memperoleh legitimasi melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan. Root User memperoleh kepercayaan melalui kualitas pribadi. Penguasa dapat mengeluarkan keputusan yang mengikat secara administratif. Root User menggerakkan kesadaran melalui keteladanan. Penguasa dapat memerintahkan sesuatu dilakukan karena kewenangan yang dimiliki. Root User menginspirasi masyarakat sehingga kebaikan dilakukan tanpa paksaan. Kedua peran tersebut tidak saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya akan saling menguatkan apabila dijalankan oleh manusia yang

memiliki integritas. Namun apabila penguasa kehilangan arah moral, *Root Users* tetap memiliki tanggung jawab menjaga agar bangsa tidak kehilangan kompas nilai.

Karena itu, seorang Root User dapat ditemukan di mana saja. Seorang guru yang selama puluhan tahun membentuk karakter peserta didik sedang membangun masa depan bangsa jauh sebelum para murid memasuki dunia kerja dan pemerintahan. Seorang dosen yang menjaga kejujuran akademik sedang menjaga kualitas intelektual generasi berikutnya. Seorang ulama yang mengajarkan akhlak dengan penuh kebijaksanaan sedang memperkuat fondasi moral masyarakat. Seorang hakim yang tetap menegakkan keadilan di tengah tekanan sedang menjaga kepercayaan terhadap hukum. Seorang pengusaha yang mengembangkan usaha dengan penuh tanggung jawab sedang memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Bahkan seorang ibu yang membesarkan anak-anak dengan kasih sayang, disiplin, dan kejujuran sedang membangun kualitas bangsa pada tingkat yang paling mendasar. Tidak satu pun dari seluruh peran tersebut harus diawali oleh jabatan.

Pandangan ini mengubah cara melihat kepemimpinan nasional. Kepemimpinan bukan lagi dipahami sebagai piramida yang hanya berpusat pada segelintir orang di puncak struktur negara, melainkan sebagai jejaring manusia sadar yang tersebar pada seluruh bidang kehidupan. Setiap Root User menjadi pusat pengaruh dalam lingkungannya masing-masing. Guru memengaruhi sekolah. Peneliti memengaruhi

dunia ilmu pengetahuan. Tokoh masyarakat memengaruhi komunitas. Aparatur negara memengaruhi kualitas pelayanan publik. Pelaku usaha memengaruhi etika ekonomi. Ketika seluruh pusat pengaruh tersebut bergerak menuju arah yang sama, perubahan nasional akan berlangsung jauh lebih kokoh daripada perubahan yang hanya bergantung pada pergantian pemerintahan.

Cara berpikir seperti ini juga mengurangi kecenderungan masyarakat untuk mengkultuskan individu. Bangsa yang terlalu bergantung kepada satu tokoh akan selalu berada dalam keadaan rapuh. Ketika tokoh tersebut meninggal dunia, kehilangan jabatan, atau gagal menjalankan amanah, seluruh harapan bangsa ikut runtuh. Sebaliknya, bangsa yang memiliki banyak *Root Users* tidak akan kehilangan arah hanya karena bergantinya pemimpin pemerintahan. Nilai tetap hidup. Keteladanan tetap berjalan. Pengabdian tetap berlanjut. Dengan demikian, keberlangsungan bangsa tidak lagi ditentukan oleh satu figur, melainkan oleh keberlangsungan ekosistem manusia-manusia yang menjaga nilai secara bersama-sama.

Dalam glosarium buku ini telah ditegaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Root User tidak memperoleh otoritas dari jabatan, tetapi dari kesetiaan kepada nilai-nilai yang hidup dalam *kernel* tersebut. Ketuhanan Yang Maha Esa menjaga orientasi moral. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab membentuk penghormatan terhadap setiap manusia. Persatuan Indonesia menjadi landasan seluruh tindakan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

membentuk cara mengambil keputusan yang mengedepankan dialog dan kebijaksanaan. Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh pengabdian. Oleh sebab itu, siapa pun yang menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman hidup sesungguhnya sedang menjalankan fungsi sebagai Root User, terlepas dari ada atau tidaknya jabatan formal.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan ruang bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Konstitusi tidak membatasi pengabdian hanya kepada penyelenggara negara. Sebaliknya, seluruh warga negara memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk ikut menjaga kehidupan nasional sesuai kemampuan masing-masing. Root User memahami bahwa negara yang sehat memerlukan partisipasi masyarakat yang sehat. Karena itu, perhatian tidak hanya tertuju pada bagaimana memperoleh kekuasaan, tetapi juga pada bagaimana membangun budaya kewargaan yang bertanggung jawab. Kesadaran tersebut menjadikan Root User sebagai mitra strategis negara dalam menjaga keberlangsungan sistem kenegaraan.

Lebih jauh lagi, **Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa**. Dalam sebuah *operating system*, tidak semua proses dijalankan oleh komponen yang terlihat di permukaan. Banyak proses penting justru berlangsung di belakang layar, menjaga keseimbangan agar seluruh sistem tetap stabil. Analogi tersebut sangat tepat menggambarkan peran Root User. Sebagian besar pengabdian dilakukan tanpa sorotan publik, tanpa popularitas, bahkan tanpa penghargaan.

Namun justru dari pengabdian yang tenang tersebut lahir daya tahan sebuah bangsa. Ketika guru tetap mengajar dengan jujur, ilmuwan tetap meneliti dengan integritas, ulama tetap membimbing masyarakat dengan akhlak, dan aparatur negara tetap bekerja secara profesional, *operating system* kehidupan berbangsa terus berjalan secara sehat meskipun masyarakat tidak selalu menyadarinya.

Pada era digital, kecenderungan mengukur keberhasilan berdasarkan popularitas semakin kuat. Media sosial sering kali menciptakan kesan bahwa pengaruh ditentukan oleh jumlah pengikut, jangkauan informasi, atau perhatian publik. Padahal pengaruh yang sesungguhnya sering kali tumbuh secara perlahan melalui konsistensi, bukan melalui sensasi. Root User tidak mengejar popularitas. Pengakuan masyarakat bukan tujuan utama. Fokus utama selalu tertuju pada kualitas pengabdian. Apabila pengaruh datang sebagai akibat dari pengabdian tersebut, maka pengaruh akan digunakan untuk memperkuat kehidupan bangsa, bukan untuk membangun kultus individu.

Pandangan bahwa Root User bukan penguasa juga memperluas ruang partisipasi masyarakat. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penjaga bangsa tanpa harus memasuki dunia kekuasaan praktis. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk merasa kecil atau tidak memiliki arti. Bangsa dibangun oleh jutaan tindakan baik yang dilakukan setiap hari. Kejujuran seorang pegawai, dedikasi seorang tenaga kesehatan, tanggung jawab seorang petani, kreativitas seorang wirausaha, serta kepedulian

seorang warga terhadap lingkungan sekitar merupakan bagian dari fondasi yang menopang keberlangsungan negara. Root User hanya memperlihatkan bahwa seluruh tindakan tersebut dapat mencapai kualitas tertinggi ketika dilakukan dengan kesadaran moral dan orientasi kebangsaan.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, bangsa ini memerlukan perubahan cara pandang bahwa pengabdian kepada negara tidak selalu harus dimulai dari kekuasaan. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, masyarakat perlu dibebaskan dari budaya yang terlalu mengagungkan jabatan dan mulai membangun penghormatan terhadap integritas, kompetensi, serta keteladanan. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Indonesia membutuhkan ribuan *Root Users* yang bekerja pada setiap bidang kehidupan sehingga kekuatan bangsa tidak lagi bertumpu pada segelintir penguasa, tetapi tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, Root User bukanlah penguasa yang berdiri di atas rakyat, melainkan bagian dari rakyat yang memilih memikul tanggung jawab lebih besar demi kepentingan bangsa. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** membentuk karakter setiap Root User, **konstitusi sebagai *firmware* negara** memberikan ruang bagi pengabdian seluruh warga negara, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menumbuhkan budaya keteladanan dalam setiap profesi, maka Indonesia tidak lagi bergantung kepada satu pusat kekuasaan. Indonesia akan memiliki ribuan pusat pengaruh yang saling menguatkan,

menjaga nilai, menggerakkan masyarakat, dan memastikan perjalanan bangsa tetap berada pada arah yang benar dari generasi ke generasi.

26.4. Membangun Seribu *Root Users*

Setiap peradaban besar selalu memiliki mekanisme untuk melahirkan manusia-manusia yang menjaga keberlangsungan nilai-nilai dasarnya. Tidak ada bangsa yang mampu bertahan hanya dengan mengandalkan keberhasilan satu generasi. Sebaliknya, kekuatan sebuah bangsa diukur dari kemampuan menyiapkan generasi berikutnya agar memiliki kualitas yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, gagasan mengenai **Seribu *Root Users*** bukan sekadar berbicara tentang keberadaan sekelompok elit moral rakyat sadar, tetapi terutama mengenai bagaimana membangun ekosistem yang secara terus-menerus melahirkan manusia-manusia dengan kualitas tersebut. Sebuah bangsa akan kehilangan arah apabila mampu menghasilkan teknologi baru, tetapi gagal melahirkan manusia yang mampu menggunakannya secara bijaksana.

Proses membangun *Root Users* tidak dapat dilakukan secara instan. Tidak ada pendidikan singkat yang mampu membentuk integritas. Tidak ada pelatihan beberapa hari yang mampu melahirkan negarawan. Karakter dibangun melalui perjalanan panjang yang melibatkan pengalaman, keteladanan, disiplin, pengorbanan, serta keberanian menghadapi berbagai ujian kehidupan. Karena itu, pembangunan *Root Users* harus dipahami sebagai proses pembentukan

manusia secara utuh, bukan sekadar peningkatan kompetensi teknis. Pengetahuan memang penting, tetapi pengetahuan tanpa karakter justru berpotensi melahirkan kerusakan yang lebih besar karena kecerdasan tidak lagi diarahkan oleh kebijaksanaan.

Fondasi pertama pembangunan *Root Users* dimulai dari keluarga. Di dalam keluarga seorang anak pertama kali belajar mengenai kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, disiplin, kerja keras, serta penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut sering kali tidak diajarkan melalui ceramah panjang, melainkan melalui keteladanan yang dilakukan setiap hari. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kejujuran akan lebih mudah memahami arti integritas ketika dewasa. Sebaliknya, pendidikan formal akan menghadapi kesulitan besar apabila harus memperbaiki karakter yang sejak awal dibangun di atas kebiasaan yang keliru. Oleh sebab itu, keluarga merupakan sekolah pertama bagi lahirnya *Root Users*.

Setelah keluarga, pendidikan menjadi ruang yang memperluas kualitas manusia. Namun pendidikan yang dimaksud tidak boleh berhenti pada penguasaan ilmu pengetahuan ataupun pencapaian akademik. Pendidikan harus membentuk kemampuan berpikir kritis tanpa kehilangan kerendahan hati. Pendidikan harus melatih keberanian menyampaikan kebenaran tanpa kehilangan etika. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang mampu memecahkan persoalan, bukan sekadar menghafalkan teori. Pada akhirnya, pendidikan harus melahirkan manusia yang memahami bahwa ilmu pengetahuan merupakan amanah untuk

menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, sekolah dan universitas bukan sekadar tempat mencetak lulusan, melainkan tempat menumbuhkan calon penjaga bangsa.

Komunitas menjadi tahap berikutnya dalam pembentukan *Root Users*. Di dalam komunitas, seseorang belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, memikul tanggung jawab bersama, serta menghadapi persoalan nyata yang tidak selalu ditemukan di ruang kelas. Organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, komunitas kepemudaan, lembaga keagamaan, hingga berbagai bentuk gerakan sosial memberikan ruang bagi lahirnya kepemimpinan yang berakar pada pengalaman langsung. Melalui proses tersebut, kemampuan mengelola konflik, membangun kolaborasi, dan mengutamakan kepentingan bersama berkembang secara alami. Pengalaman seperti inilah yang membentuk kedewasaan sosial seorang Root User.

Pembentukan *Root Users* juga memerlukan budaya belajar sepanjang hayat. Perubahan dunia berlangsung sangat cepat. Teknologi berkembang hampir setiap hari. Tantangan kebangsaan terus berubah mengikuti dinamika global. Dalam situasi seperti itu, manusia yang berhenti belajar akan kehilangan kemampuan memahami realitas. Root User harus memiliki kerendahan hati untuk terus memperbaiki diri, memperluas wawasan, serta membuka ruang dialog dengan berbagai disiplin ilmu. Kesadaran seperti ini menjaga agar kualitas kepemimpinan moral tidak membeku pada cara berpikir masa lalu, tetapi tetap

mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar bangsa.

Di sinilah pentingnya membangun ekosistem yang secara sadar dirancang untuk melahirkan negarawan dan *Root Users*. Ekosistem tersebut harus mempertemukan ilmu pengetahuan, spiritualitas, kebudayaan, patriotisme, serta pengalaman nyata dalam mengabdi kepada masyarakat. Proses pembelajaran tidak cukup berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui praktik kehidupan, pengabdian sosial, dialog lintas disiplin, penelitian, pelatihan kepemimpinan, hingga keterlibatan langsung dalam menyelesaikan persoalan bangsa. *Root Users* lahir ketika teori bertemu dengan kenyataan, ketika nilai bertemu dengan tindakan, dan ketika idealisme diuji oleh tantangan kehidupan yang sesungguhnya.

Dalam konteks inilah gagasan **Sekolah Negarawan** memperoleh relevansinya. Sekolah Negarawan bukan dipahami sekadar sebagai lembaga pendidikan, melainkan sebagai sebuah ekosistem pembentukan manusia yang dirancang untuk melahirkan penjaga bangsa. Fokus utamanya bukan menghasilkan sebanyak mungkin pemegang jabatan, melainkan melahirkan manusia yang memiliki keluasan berpikir, kedalaman moral, keteguhan karakter, kemampuan memimpin, serta kesediaan mengabdikan seluruh potensi bagi bangsa dan negara. Negarawan bukanlah profesi, tetapi kualitas manusia. Oleh sebab itu, proses pembentukannya harus berlangsung secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi pada pembangunan peradaban.

Dalam glosarium buku ini telah ditegaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Seluruh proses pembangunan *Root Users* harus berakar pada *kernel* tersebut. Ketuhanan Yang Maha Esa membentuk fondasi spiritual. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab membentuk kepekaan sosial. Persatuan Indonesia menjadi orientasi kebangsaan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan melatih kemampuan bermusyawarah dan mengambil keputusan secara bijaksana. Keadilan Sosial membangun orientasi pengabdian kepada seluruh rakyat Indonesia. Tanpa fondasi tersebut, pembentukan manusia berisiko hanya menghasilkan individu-individu yang cerdas, tetapi kehilangan arah moral.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menjadi kerangka yang menghubungkan nilai dengan praktik penyelenggaraan negara. *Root Users* perlu memahami bagaimana negara bekerja, bagaimana lembaga-lembaga saling berhubungan, bagaimana hukum melindungi kehidupan bersama, serta bagaimana kebijakan publik memengaruhi masa depan bangsa. Pemahaman tersebut penting agar pengabdian tidak berhenti pada idealisme, tetapi mampu diwujudkan dalam tindakan nyata yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, *Root Users* tidak hanya menjadi penjaga nilai, tetapi juga mampu menjaga agar *firmware* negara terus berfungsi sebagaimana tujuan pembentukannya.

Lebih jauh lagi, **Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa**. *Root Users* harus memahami bahwa pembangunan Indonesia tidak

dapat dilakukan hanya dengan meniru bangsa lain. Kemajuan teknologi perlu dipadukan dengan kebijaksanaan lokal. Ilmu pengetahuan harus berjalan bersama budaya gotong royong. Spiritualitas harus berjalan berdampingan dengan rasionalitas. Patriotisme harus berkembang bersama keterbukaan terhadap kerja sama global. Peradaban Nusantara menyediakan ruang tempat seluruh unsur tersebut bekerja secara harmonis sehingga Indonesia mampu menjadi bangsa modern tanpa kehilangan jati dirinya.

Target membangun **Seribu *Root Users*** sesungguhnya bukanlah tujuan akhir. Angka seribu dipilih sebagai simbol bahwa perubahan besar tidak memerlukan jumlah yang sangat banyak apabila kualitas manusianya luar biasa. Seribu manusia yang memiliki integritas, kompetensi, keberanian moral, serta kemampuan menggerakkan masyarakat akan melahirkan ribuan *Root Users* baru. Setiap Root User menjadi pusat regenerasi. Setiap lingkungan melahirkan lingkungan berikutnya. Pada akhirnya, gerakan tersebut berkembang menjadi budaya nasional yang secara terus-menerus menghasilkan penjaga bangsa pada setiap generasi.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, pembangunan bangsa harus dimulai dengan membangun manusia yang mampu menjadi teladan sebelum menjadi pemimpin. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, bangsa ini perlu membebaskan pendidikan dari orientasi yang hanya mengejar ijazah, jabatan, dan prestise, kemudian mengembalikannya sebagai proses pembentukan karakter dan pengabdian. Selanjutnya,

dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Indonesia harus membangun ekosistem yang mampu melahirkan *Root Users* secara berkelanjutan sehingga regenerasi penjaga intelektual, penjaga spiritual, penjaga budaya, dan penjaga patriotisme tidak pernah terputus oleh pergantian zaman.

Pada akhirnya, membangun Seribu *Root Users* berarti membangun masa depan Indonesia dari manusianya terlebih dahulu. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** menjadi sumber pembentukan karakter, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menjadi pedoman pengabdian dalam kehidupan bernegara, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menjadi ruang tumbuh bagi lahirnya manusia-manusia yang berintegritas, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki generasi yang cerdas, tetapi juga generasi yang mampu menjaga arah perjalanan bangsa. Dari proses regenerasi yang berkelanjutan inilah akan lahir peradaban yang kokoh, karena setiap generasi tidak sekadar mewarisi Indonesia, melainkan juga mewarisi tanggung jawab untuk menjaga dan menyempurnakannya.

26.5. Ketika Seribu *Root Users* Menggerakkan Nusantara

Perubahan terbesar dalam sejarah hampir tidak pernah dimulai oleh jumlah manusia yang sangat besar. Perubahan selalu lahir dari sekelompok kecil manusia yang memiliki kejernihan berpikir, keteguhan moral, dan keberanian untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar daripada kepentingan pribadinya.

Kelompok kecil tersebut kemudian menjadi pusat gravitasi yang perlahan mengubah cara berpikir masyarakat, membentuk budaya baru, melahirkan institusi yang lebih baik, dan akhirnya mengubah arah perjalanan sebuah bangsa. Karena itu, gagasan tentang **Seribu *Root Users*** bukanlah cita-cita untuk membangun kelompok eksklusif, melainkan upaya menghadirkan seribu pusat keteladanan yang mampu menggerakkan jutaan rakyat menuju kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat.

Angka seribu dalam bab ini bukanlah angka matematis yang harus dipenuhi secara literal. Angka tersebut merupakan simbol bahwa perubahan besar tidak memerlukan mayoritas sejak awal. Yang dibutuhkan adalah sejumlah manusia yang benar-benar memahami arah perubahan dan bersedia menghidupkan nilai-nilai tersebut melalui tindakan nyata. Ketika satu Root User mampu membimbing sepuluh orang, kemudian sepuluh orang tersebut masing-masing membentuk sepuluh *Root Users* baru, maka dalam beberapa generasi akan lahir jaringan manusia yang memiliki orientasi moral yang sama. Perubahan seperti inilah yang bersifat organik, tumbuh dari bawah, mengakar dalam kehidupan masyarakat, dan jauh lebih tahan terhadap perubahan kekuasaan maupun pergantian kekuasaan.

Bangsa yang sehat sesungguhnya bukan bangsa yang hanya memiliki pemimpin-pemimpin hebat di tingkat nasional. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang memiliki ribuan pusat keteladanan pada setiap lapisan kehidupan. Di desa terdapat tokoh masyarakat yang

dipercaya karena kejujurannya. Di sekolah terdapat guru yang dihormati karena pengabdiannya. Di kampus terdapat akademisi yang menjaga integritas ilmu pengetahuan. Di dunia usaha terdapat pengusaha yang membangun kesejahteraan tanpa mengorbankan etika. Di lembaga negara terdapat aparatur yang melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab. Di dalam keluarga terdapat orang tua yang menanamkan nilai kepada generasi berikutnya. Ketika seluruh pusat keteladanan tersebut bekerja secara bersamaan, bangsa memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar kekuatan birokrasi.

Inilah perbedaan mendasar antara negara yang hanya mengandalkan struktur kekuasaan dengan bangsa yang memiliki peradaban yang matang. Struktur kekuasaan dapat berubah setiap lima tahun. Pemerintahan dapat berganti. Kebijakan dapat diperbarui. Namun apabila pusat-pusat keteladanan tetap hidup di tengah masyarakat, arah bangsa tidak mudah bergeser. Nilai tetap diwariskan. Integritas tetap dijaga. Semangat pengabdian tetap tumbuh. Dengan demikian, keberlangsungan bangsa tidak lagi bergantung pada siapa yang sedang memegang kekuasaan, tetapi pada kualitas manusia yang menjaga kehidupan bangsa dari berbagai bidang.

Root Users tidak bekerja secara terpisah. Masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi memiliki orientasi yang sama. Seorang ilmuwan memperkuat bangsa melalui ilmu pengetahuan. Seorang pendidik memperkuat bangsa melalui pendidikan karakter. Seorang pemimpin agama

memperkuat bangsa melalui pembinaan moral. Seorang seniman memperkuat bangsa melalui kebudayaan. Seorang aparat negara memperkuat bangsa melalui pelayanan publik. Seorang pengusaha memperkuat bangsa melalui penciptaan nilai ekonomi. Seorang petani memperkuat bangsa melalui ketahanan pangan. Seluruh pengabdian tersebut saling melengkapi seperti organ-organ dalam tubuh manusia. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Seluruhnya bekerja untuk menjaga kehidupan tetap berlangsung secara harmonis.

Dalam glosarium buku ini telah ditegaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Ketika seribu *Root Users* lahir dari berbagai bidang kehidupan, seluruhnya memperoleh orientasi yang sama dari *kernel* tersebut. Perbedaan profesi tidak menimbulkan perpecahan karena seluruh tindakan berakar pada nilai yang sama. Ketuhanan Yang Maha Esa menjaga arah moral. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjaga penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Persatuan Indonesia menjadi ikatan yang melampaui perbedaan suku, agama, budaya, maupun kepentingan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan membentuk budaya dialog dan musyawarah. Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh pengabdian. Dengan demikian, keberagaman tidak lagi menjadi sumber konflik, tetapi menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan bangsa.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan kerangka kelembagaan agar energi positif dari ribuan *Root Users* dapat berkembang secara sehat.

Konstitusi memberikan kepastian hukum, menjamin hak warga negara, mengatur hubungan antarlembaga, serta menciptakan mekanisme penyelenggaraan negara yang tertib. Namun *firmware* yang baik tetap membutuhkan manusia yang mampu mengoperasikannya dengan benar. *Root Users* menjadi penghubung antara nilai dengan praktik. Melalui pengabdian pada bidang masing-masing, kelompok ini memastikan bahwa semangat konstitusi tidak berhenti sebagai teks hukum, tetapi benar-benar hidup dalam praktik kehidupan berbangsa.

Lebih jauh lagi, **Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa**. Ketika seribu *Root Users* bergerak secara bersamaan, sesungguhnya yang sedang diperkuat bukan hanya negara, melainkan keseluruhan *operating system* kehidupan nasional. Pendidikan menjadi lebih bermakna karena menghasilkan manusia yang berkarakter. Ekonomi berkembang tanpa kehilangan keadilan. Hukum ditegakkan tanpa meninggalkan kemanusiaan. Teknologi berkembang tanpa menghilangkan kebijaksanaan. Budaya terus hidup tanpa menolak kemajuan. Spiritualitas tumbuh tanpa meninggalkan rasionalitas. Seluruh komponen tersebut bekerja secara terpadu sehingga Peradaban Nusantara berkembang sebagai peradaban yang modern sekaligus berakar kuat pada nilai-nilai luhur bangsa.

Perubahan seperti ini memang tidak berlangsung secepat perubahan kebijakan pemerintah. Membangun karakter memerlukan waktu. Menumbuhkan kepercayaan membutuhkan konsistensi. Melahirkan

budaya baru memerlukan keteladanan yang terus-menerus. Namun perubahan yang tumbuh melalui kesadaran masyarakat memiliki daya tahan yang jauh lebih panjang daripada perubahan yang hanya didorong oleh instruksi. Ketika budaya integritas telah hidup di tengah masyarakat, korupsi akan semakin sulit berkembang. Ketika budaya gotong royong kembali menguat, individualisme yang berlebihan akan melemah dengan sendirinya. Ketika budaya berpikir kritis tumbuh, manipulasi informasi menjadi semakin sulit memengaruhi masyarakat. Seluruh perubahan tersebut lahir bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran yang dibangun oleh para *Root Users*.

Pada era kecerdasan buatan dan transformasi digital, kebutuhan terhadap *Root Users* justru menjadi semakin mendesak. Teknologi mampu mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran disinformasi. Kecerdasan buatan mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga berpotensi memperbesar ketimpangan apabila kehilangan arah moral. Dunia digital membuka peluang kolaborasi global, tetapi sekaligus membawa tantangan terhadap identitas nasional. Dalam situasi seperti ini, *Root Users* berfungsi sebagai penjaga orientasi. Kemajuan diterima, tetapi nilai tidak ditinggalkan. Inovasi didorong, tetapi martabat manusia tetap menjadi pusat seluruh pembangunan. Modernitas dipeluk tanpa kehilangan akar kebudayaan dan spiritualitas bangsa.

Pada akhirnya, keberhasilan membangun Seribu *Root Users* bukan diukur dari banyaknya orang yang mengenal istilah tersebut, melainkan dari tumbuhnya

budaya baru dalam kehidupan bangsa. Budaya yang menghormati integritas lebih tinggi daripada popularitas. Budaya yang mengutamakan pengabdian daripada ambisi pribadi. Budaya yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai jalan menuju kemaslahatan. Budaya yang memandang jabatan sebagai amanah, bukan sebagai tujuan hidup. Ketika budaya tersebut tumbuh, Indonesia tidak lagi bergantung kepada munculnya tokoh-tokoh besar secara kebetulan. Indonesia secara terus-menerus akan melahirkan manusia-manusia besar melalui sistem pembinaan yang sehat.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, kebangkitan nasional dimulai dari kebangkitan karakter manusia yang kemudian menyebar menjadi budaya bangsa. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, kemerdekaan sejati terwujud ketika rakyat tidak lagi menggantungkan masa depan kepada segelintir penguasa, tetapi menjadi warga negara yang sadar akan tanggung jawabnya. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, keberlangsungan Indonesia hanya dapat dijaga apabila setiap generasi terus melahirkan *Root Users* yang menjaga ilmu, menjaga moral, menjaga budaya, menjaga patriotisme, dan menjaga arah perjalanan bangsa.

Pada akhirnya, Nusantara tidak memerlukan seorang penyelamat yang berdiri sendirian di atas panggung sejarah. Nusantara memerlukan ribuan manusia yang bersedia menjadi penjaga pada tempat pengabdiannya masing-masing. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** membentuk karakter para *Root*

Users, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan kerangka kehidupan bernegara yang adil dan tertib, serta **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menjadi ruang tempat seluruh pengabdian tersebut bertemu, maka akan lahir sebuah bangsa yang tidak lagi rapuh karena bergantung pada satu tokoh. Sebaliknya, Indonesia akan menjadi peradaban yang kokoh karena ditopang oleh ribuan pusat keteladanan yang terus melahirkan generasi baru penjaga bangsa. Dari sanalah perjalanan **Restore Indonesia**, ***Free* Indonesia**, dan ***Save* Nusantara** memperoleh fondasi yang sesungguhnya, yaitu manusia-manusia yang memilih mengabdi bukan demi kekuasaan, melainkan demi keberlangsungan peradaban Indonesia.

BAB 27
WALI RAJA

27.1. Mengapa Kekuasaan Selalu Memerlukan Penjaga



Setiap peradaban yang bertahan lama memiliki satu kesadaran yang sama, yaitu bahwa tidak ada manusia yang layak memegang kekuasaan tanpa mekanisme yang menjaga arah penggunaan kekuasaan tersebut. Kesadaran ini lahir bukan karena manusia selalu jahat, melainkan karena manusia memiliki keterbatasan. Pengetahuan dapat berkembang, pengalaman dapat bertambah, bahkan niat baik dapat dimiliki oleh seorang pemimpin, tetapi seluruh kemampuan tersebut tidak pernah menghapus kemungkinan terjadinya kekeliruan. Oleh sebab itu,

bangsa yang matang bukanlah bangsa yang mencari pemimpin sempurna, melainkan bangsa yang membangun sistem agar setiap pemimpin tetap berada pada jalan yang benar.

Dalam kehidupan modern, pembahasan mengenai kepemimpinan sering kali berhenti pada bagaimana memperoleh kekuasaan. Perhatian masyarakat lebih banyak diarahkan kepada proses pemilihan umum, strategi pemerintahan, koalisi partai, popularitas tokoh, maupun efektivitas pemerintahan setelah pemimpin terpilih. Sangat sedikit perhatian diberikan kepada pertanyaan yang jauh lebih mendasar, yaitu siapa yang menjaga pemimpin setelah memperoleh kekuasaan. Pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menentukan kualitas sebuah peradaban. Sebab sejarah memperlihatkan bahwa keruntuhan bangsa lebih sering disebabkan oleh kekuasaan yang kehilangan arah daripada oleh kekurangan sumber daya.

Banyak negara telah membangun berbagai mekanisme pengawasan melalui konstitusi, lembaga perwakilan, badan peradilan, media massa, maupun masyarakat sipil. Seluruh mekanisme tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kehidupan demokrasi. Namun pengalaman juga menunjukkan bahwa perangkat kelembagaan tidak selalu mampu menjaga substansi kepemimpinan. Sebuah konstitusi dapat ditafsirkan secara sempit. Lembaga negara dapat dipengaruhi oleh kepentingan pemerintahan. Media dapat kehilangan independensi. Bahkan masyarakat dapat terbelah oleh informasi yang menyesatkan. Pada

titik inilah muncul kesadaran bahwa persoalan utama bukan hanya menjaga sistem, tetapi juga menjaga manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Bab-bab sebelumnya telah memperlihatkan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**, **konstitusi merupakan *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa**. Ketiga unsur tersebut membentuk arsitektur dasar kehidupan nasional. Akan tetapi sebagaimana sebuah sistem komputer yang memiliki *kernel*, *firmware*, dan *operating system* tetap memerlukan administrator yang bertanggung jawab, demikian pula sebuah negara memerlukan manusia yang memahami cara menjaga keseluruhan sistem agar tetap berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Masalahnya, administrator juga merupakan manusia yang memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, bangsa memerlukan mekanisme penjagaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat moral.

Kesadaran seperti ini sesungguhnya telah dikenal oleh berbagai peradaban sepanjang sejarah. Tidak ada kerajaan yang mampu bertahan hanya karena kekuatan militernya. Tidak ada republik yang bertahan hanya karena keunggulan konstitusinya. Selalu terdapat kelompok manusia yang berfungsi sebagai penjaga nilai, penjaga akhlak, penjaga ilmu pengetahuan, ataupun penjaga tradisi yang terus mengingatkan agar kekuasaan tidak kehilangan orientasi. Kelompok tersebut tidak selalu memiliki jabatan formal, tetapi memiliki kewibawaan moral yang membuat suara dan nasihatnya didengar. Keberadaan mereka sering kali

menjadi pembeda antara negara yang sekadar memiliki pemerintahan dengan bangsa yang benar-benar memiliki peradaban.

Konsep tersebut telah dipersiapkan secara bertahap dalam buku ini. Pada Bab XXV diperkenalkan **System Guardians**, yaitu penjaga intelektual, penjaga spiritual, penjaga budaya, dan penjaga patriotisme. Pada Bab XXVI dijelaskan bahwa penjaga-penjaga tersebut lahir melalui proses pembentukan **Seribu *Root Users***, yaitu elit moral rakyat sadar yang tersebar di berbagai bidang kehidupan. Seluruh pembahasan tersebut sesungguhnya mengarah kepada satu pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana hubungan antara para penjaga bangsa dengan pemegang kekuasaan negara. Jawaban atas pertanyaan inilah yang menjadi dasar lahirnya paradigma **Wali Raja**.

Paradigma ini berangkat dari pemahaman bahwa kekuasaan tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian. Seorang pemimpin dapat memiliki kecerdasan luar biasa, pengalaman yang panjang, serta legitimasi kekuasaan yang kuat, tetapi seluruh kelebihan tersebut tidak menjamin keputusan yang diambil selalu benar. Setiap manusia memiliki keterbatasan informasi, dipengaruhi oleh lingkungan, menghadapi tekanan kekuasaan, bahkan berhadapan dengan godaan kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh sebab itu, seorang pemimpin memerlukan lingkungan yang berani mengingatkan, bukan lingkungan yang hanya pandai memuji. Bangsa yang sehat bukan bangsa yang menghasilkan banyak pendukung kekuasaan,

melainkan bangsa yang menghasilkan banyak penjaga nilai.

Kesalahan yang sering muncul dalam kehidupan pemerintahan adalah menganggap setiap kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Cara pandang seperti ini melahirkan budaya saling mencurigai antara pemerintah dan masyarakat. Padahal penjagaan yang dimaksud dalam buku ini bukanlah upaya melemahkan pemimpin, melainkan menjaga agar pemimpin tetap mampu menjalankan amanah sesuai tujuan pembentukannya. Penjaga bukan lawan penguasa. Penjaga juga bukan pesaing kekuasaan. Penjaga justru merupakan unsur yang memastikan kekuasaan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya negara. Dengan demikian, hubungan antara pemimpin dan penjaga bukan hubungan konflik, tetapi hubungan saling menyempurnakan.

Dalam konteks tersebut, bangsa tidak memerlukan budaya yang membangun kultus individu. Kekaguman yang berlebihan kepada seorang tokoh sering kali melahirkan keadaan di mana seluruh keputusan dianggap benar hanya karena berasal dari pemimpin yang dihormati. Keadaan seperti ini berbahaya karena menghilangkan ruang koreksi yang sehat. Sebaliknya, kebiasaan merendahkan seluruh pemimpin juga tidak akan menghasilkan pemerintahan yang berkualitas. Bangsa memerlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap kepemimpinan dan keberanian menjaga arah kepemimpinan. Keseimbangan inilah yang menjadi salah satu ciri utama masyarakat yang telah dewasa secara pikiran dan moral.

Pada titik ini perlu dibedakan antara pengawasan dan penjagaan. Pengawasan lebih banyak berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, prosedur, serta penggunaan kewenangan. Penjagaan memiliki makna yang lebih dalam. Penjagaan menyangkut arah, tujuan, dan ruh dari kekuasaan itu sendiri. Seorang pemimpin mungkin tidak melanggar hukum, tetapi dapat kehilangan orientasi moral. Sebuah kebijakan mungkin sah secara administratif, tetapi belum tentu menghadirkan keadilan. Sebuah keputusan mungkin menguntungkan secara ekonomi, tetapi merugikan martabat manusia. Persoalan-persoalan seperti inilah yang hanya dapat dijawab apabila terdapat penjaga yang mampu melihat melampaui aspek legal menuju aspek etis dan peradaban.

Dalam perspektif buku ini, penjaga tersebut tidak berdiri di luar negara, tetapi menjadi bagian dari kehidupan bangsa. Para penjaga berasal dari dunia pendidikan, dunia ilmu pengetahuan, kehidupan keagamaan, kebudayaan, pelayanan publik, dunia usaha, maupun masyarakat luas. Seluruhnya berakar pada **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**, memahami arah **konstitusi sebagai *firmware* negara**, serta menghidupkan nilai-nilai **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Karena memiliki orientasi yang sama, seluruh penjaga tersebut tidak diarahkan untuk menguasai negara, melainkan memastikan negara tetap bergerak menuju cita-cita nasional.

Pemahaman ini sekaligus mengubah cara memandang kekuasaan. Kekuasaan bukan lagi

dipahami sebagai hak istimewa untuk memerintah, melainkan sebagai amanah yang harus terus dijaga agar tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kebutuhan terhadap penjaga yang mampu memberikan nasihat, koreksi, dan pengingat. Dengan demikian, kualitas seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga dari kerendahan hati untuk menerima penjagaan demi kepentingan bangsa.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, bangsa ini memerlukan budaya pemerintahan yang menghargai keberanian menjaga pemimpin sebagaimana menghargai keberanian memimpin. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, Indonesia perlu membebaskan diri dari budaya yang menganggap kekuasaan sebagai wilayah yang tidak boleh disentuh oleh kritik dan nasihat yang jujur. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, keberlangsungan bangsa hanya dapat dijaga apabila setiap pemegang kekuasaan didampingi oleh manusia-manusia yang setia kepada nilai, bukan kepada kepentingan sesaat.

Atas dasar itulah Bab XXVII memperkenalkan konsep **Wali Raja** sebagai sebuah **Guardian Leadership Model**. Wali Raja bukanlah penguasa baru yang berdiri di atas pemimpin negara, melainkan paradigma kepemimpinan yang menempatkan penjagaan moral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan kekuasaan. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu memerintah dengan baik, tetapi juga membutuhkan manusia-

manusia yang memastikan setiap kekuasaan tetap berjalan di bawah cahaya kebenaran, keadilan, dan pengabdian kepada Tuhan serta kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

27.2. Wali Raja: Paradigma Kepemimpinan Nusantara

Setiap zaman melahirkan cara tersendiri dalam memandang kepemimpinan. Ada masa ketika kekuasaan dipahami sebagai hak turun-temurun yang diwariskan melalui garis keturunan. Ada masa ketika kepemimpinan ditentukan oleh kekuatan militer. Ada pula masa ketika legitimasi diperoleh melalui pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat. Seluruh bentuk tersebut merupakan bagian dari perjalanan sejarah umat manusia dalam mencari cara terbaik mengelola kehidupan bersama. Namun di balik seluruh perubahan sistem pemerintahan tersebut, terdapat satu pertanyaan yang tetap relevan hingga hari ini, yaitu seperti apakah hakikat seorang pemimpin yang mampu menjaga keberlangsungan sebuah bangsa.

Bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa setiap kekuasaan memerlukan penjaga agar tidak kehilangan arah. Kesadaran tersebut membawa pembahasan kepada sebuah paradigma yang lebih mendasar, yaitu **Wali Raja**. Dalam buku ini, Wali Raja tidak dimaknai sebagai gelar kebangsawanan, bukan pula sebagai bentuk monarki, sistem kerajaan, ataupun jabatan konstitusional tertentu. Wali Raja merupakan sebuah paradigma kepemimpinan yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipelihara

dengan tanggung jawab moral, spiritual, dan kebangsaan.

Penggunaan istilah **Wali Raja** bukan dimaksudkan untuk menghidupkan kembali sistem kerajaan dalam kehidupan bernegara modern. Sebaliknya, istilah tersebut dipilih karena mampu menghadirkan dua dimensi kepemimpinan yang sering kali berjalan terpisah dalam praktik kekuasaan kontemporer. Kata **wali** melambangkan penjagaan, kedekatan, tanggung jawab, dan pengayoman. Sementara itu, kata **raja** melambangkan kewenangan untuk mengelola kehidupan publik dalam skala yang luas. Ketika kedua makna tersebut dipadukan, lahirlah sebuah paradigma bahwa kekuasaan seharusnya dijalankan bukan semata-mata untuk memerintah, melainkan untuk menjaga kehidupan yang dipercayakan kepada seorang pemimpin.

Paradigma ini mengubah cara memandang hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dalam pola kepemimpinan yang hanya berorientasi pada kekuasaan, rakyat sering kali diposisikan sebagai objek yang diatur melalui hukum, kebijakan, maupun administrasi pemerintahan. Sebaliknya, dalam paradigma Wali Raja, rakyat dipandang sebagai amanah yang harus dilindungi, diberdayakan, dan dimuliakan. Pemimpin tidak lagi menjadi pusat dari seluruh kehidupan berbangsa, melainkan menjadi pelayan utama yang bertanggung jawab memastikan seluruh sistem negara bekerja demi kesejahteraan rakyat serta keberlangsungan peradaban.

Pandangan seperti ini memiliki akar yang kuat dalam perjalanan panjang peradaban Nusantara. Berbagai tradisi kepemimpinan di Nusantara memperlihatkan bahwa ukuran kebesaran seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah kekuasaan ataupun kekuatan militernya. Seorang pemimpin dihormati karena mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, budaya, dan kehidupan spiritual masyarakat. Kepemimpinan dipandang sebagai tanggung jawab untuk memelihara harmoni, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan. Nilai tersebut terus hidup dalam berbagai bentuk kebudayaan Nusantara, meskipun sistem pemerintahan mengalami perubahan dari masa ke masa.

Paradigma Wali Raja juga sejalan dengan pembahasan mengenai **Khalifatullah** pada bagian awal buku ini. Manusia sebagai Khalifatullah menerima amanah untuk memakmurkan bumi, menjaga keadilan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan. Amanah tersebut tidak berhenti ketika seseorang memperoleh jabatan publik. Justru pada saat memperoleh kekuasaan, tanggung jawab sebagai Khalifatullah menjadi semakin besar karena setiap keputusan akan memengaruhi kehidupan banyak manusia. Dengan demikian, Wali Raja merupakan manifestasi kepemimpinan Khalifatullah dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbedaan mendasar antara paradigma Wali Raja dengan kepemimpinan yang berpusat pada kekuasaan terletak pada orientasi penggunaannya. Dalam paradigma kekuasaan, kewenangan sering kali menjadi

tujuan yang harus dipertahankan. Dalam paradigma Wali Raja, kewenangan hanyalah sarana untuk menjaga kehidupan. Jabatan bukan tujuan akhir. Kekuasaan bukan identitas utama. Seluruh instrumen negara dipahami sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, persatuan, dan martabat manusia. Ketika tujuan tersebut tercapai, kekuasaan telah menjalankan fungsi yang benar. Sebaliknya, apabila kekuasaan hanya dipakai untuk mempertahankan dirinya sendiri, maka hakikat kepemimpinan telah bergeser dari amanah menjadi kepentingan.

Pada titik inilah hubungan antara Wali Raja dengan **System Guardians** dan ***Root Users*** menjadi sangat penting. Seorang Wali Raja tidak pernah berdiri sendirian. Kepemimpinan yang sehat selalu didukung oleh penjaga intelektual yang menjaga kualitas pemikiran, penjaga spiritual yang menjaga arah moral, penjaga budaya yang menjaga identitas bangsa, serta penjaga patriotisme yang menjaga semangat pengabdian kepada tanah air. Seluruh penjaga tersebut lahir melalui proses pembentukan **Seribu *Root Users*** sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Dengan demikian, Wali Raja bukan figur yang bekerja secara individual, melainkan pusat koordinasi dari sebuah ekosistem kepemimpinan yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam glosarium buku ini telah ditegaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**. Paradigma Wali Raja memperoleh orientasi moral dari *kernel* tersebut. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber tanggung jawab spiritual dalam menggunakan kekuasaan.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memastikan bahwa setiap kebijakan menghormati martabat manusia. Persatuan Indonesia menjadi kompas dalam menjaga keutuhan bangsa. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan membentuk cara mengambil keputusan melalui kebijaksanaan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Wali Raja bukan sekadar pemimpin yang efektif, tetapi pemimpin yang seluruh tindakannya berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan kerangka hukum agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Paradigma Wali Raja tidak menempatkan pemimpin di atas konstitusi. Sebaliknya, konstitusi menjadi pedoman yang menjaga penggunaan kekuasaan tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh kehidupan bernegara. Kepemimpinan yang kuat bukanlah kepemimpinan yang mampu melampaui hukum, melainkan kepemimpinan yang mampu menghidupkan semangat konstitusi melalui kebijakan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Lebih jauh lagi, **Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa**. Paradigma Wali Raja tumbuh dan bekerja di dalam *operating system* tersebut. Seorang pemimpin tidak cukup memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga harus memahami karakter masyarakat, kebudayaan bangsa, dinamika sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan, tantangan teknologi, serta perubahan geopolitik dunia.

Seluruh pemahaman tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak sekadar menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga memperkuat keberlangsungan Peradaban Nusantara dalam jangka panjang.

Pada era globalisasi dan kecerdasan buatan, paradigma Wali Raja justru menjadi semakin relevan. Kemajuan teknologi memberikan kemampuan yang sangat besar kepada negara untuk mengelola informasi, mengendalikan sumber daya, bahkan memengaruhi perilaku masyarakat. Di sisi lain, teknologi juga menghadirkan risiko baru berupa penyalahgunaan data, manipulasi opini publik, ketimpangan ekonomi, dan melemahnya nilai-nilai kemanusiaan. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan tidak cukup hanya menguasai teknologi. Kepemimpinan harus memiliki kompas moral yang mampu memastikan bahwa setiap kemajuan tetap berpihak kepada martabat manusia dan masa depan bangsa.

Paradigma Wali Raja juga mengubah ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Keberhasilan tidak lagi diukur semata-mata melalui pertumbuhan ekonomi, banyaknya proyek pembangunan, ataupun tingginya tingkat popularitas. Seluruh pencapaian tersebut memang penting, tetapi belum cukup menggambarkan kualitas kepemimpinan. Keberhasilan sejati diukur dari kemampuan menjaga kehidupan bangsa tetap bertumbuh secara utuh. Pendidikan berkembang tanpa kehilangan karakter. Ekonomi tumbuh tanpa meninggalkan keadilan. Hukum ditegakkan tanpa kehilangan kemanusiaan. Teknologi

maju tanpa mengikis spiritualitas. Budaya berkembang tanpa kehilangan jati diri. Ketika keseimbangan tersebut terpelihara, kepemimpinan telah menjalankan fungsi sebagai Wali Raja.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, paradigma Wali Raja mengajak bangsa ini membangun kembali pemahaman bahwa kepemimpinan merupakan amanah untuk menjaga kehidupan, bukan sarana mengejar kehormatan pribadi. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, paradigma ini membebaskan kehidupan pemerintahan dari orientasi yang hanya berpusat pada perebutan kekuasaan, kemudian mengarahkannya kepada pengabdian bagi rakyat dan negara. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, Wali Raja menjadi model kepemimpinan yang memastikan bahwa seluruh kekuasaan negara tetap bergerak sesuai nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan arah Peradaban Nusantara.

Pada akhirnya, Wali Raja bukanlah simbol masa lalu yang hendak dihidupkan kembali, melainkan paradigma kepemimpinan masa depan yang berakar pada kearifan Nusantara sekaligus relevan menghadapi tantangan dunia modern. Ketika **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** menjadi sumber karakter seorang pemimpin, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menjadi pedoman penggunaan kewenangan, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menjadi ruang pengabdian bagi seluruh rakyat, maka kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai puncak kekuasaan. Kepemimpinan menjadi jalan pengabdian untuk menjaga manusia, menjaga

bangsa, dan menjaga keberlangsungan peradaban Indonesia dari generasi ke generasi.

27.3. Guardian Leadership Model

Peradaban tidak dibangun hanya oleh pemimpin yang hebat. Peradaban dibangun oleh sebuah ekosistem kepemimpinan yang mampu menjaga arah perjalanan bangsa dari generasi ke generasi. Banyak negara pernah memiliki pemimpin yang cerdas, berani, bahkan sangat populer, tetapi tetap mengalami kemunduran setelah pergantian kepemimpinan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak boleh bertumpu pada kualitas satu orang, melainkan pada kualitas sistem yang terus menghasilkan kepemimpinan yang benar. Atas dasar pemikiran inilah buku ini menawarkan sebuah paradigma yang disebut sebagai **Guardian Leadership Model**, yaitu model kepemimpinan yang tidak menjadikan pemimpin sebagai pusat kekuasaan, melainkan sebagai penjaga keberlangsungan kehidupan bangsa.

Istilah *guardian* dipilih karena mengandung makna menjaga, memelihara, mengarahkan, dan memastikan sesuatu tetap berjalan sesuai tujuan penciptaannya. Seorang *guardian* tidak selalu berada di garis depan, tetapi selalu hadir ketika arah mulai menyimpang. Tugas utama seorang penjaga bukan mengambil alih seluruh pekerjaan, melainkan memastikan keseluruhan sistem tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan bernegara, fungsi tersebut jauh lebih penting daripada sekadar kemampuan mengelola administrasi pemerintahan.

Sebab negara yang dikelola dengan sangat rapi sekalipun tetap dapat kehilangan tujuan apabila seluruh penyelenggara negara melupakan nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya bangsa.

Guardian Leadership Model lahir dari pemahaman bahwa kepemimpinan merupakan bagian dari sebuah sistem yang utuh. Bab-bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa **Pancasila merupakan *kernel* bangsa**, **konstitusi merupakan *firmware* negara**, sedangkan **Peradaban Nusantara merupakan *operating system* kehidupan berbangsa**. Ketiga unsur tersebut membentuk fondasi utama kehidupan nasional. Akan tetapi sebuah sistem tidak pernah mampu bekerja hanya dengan memiliki rancangan yang baik. Selalu diperlukan manusia-manusia yang memahami cara menjaga, mengoperasikan, dan mengembangkan sistem tersebut agar tetap sesuai dengan tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, Guardian Leadership Model menempatkan manusia sebagai penjaga sistem, bukan sebagai pemilik sistem.

Cara pandang seperti ini membawa perubahan mendasar terhadap konsep kepemimpinan modern. Selama ini, pembahasan kepemimpinan sering berpusat pada kemampuan seorang pemimpin memengaruhi orang lain, memenangkan kompetisi kekuasaan, mengambil keputusan, ataupun mencapai target organisasi. Seluruh kemampuan tersebut tentu memiliki nilai penting. Namun Guardian Leadership Model memulai pembahasan dari pertanyaan yang berbeda, yaitu apa yang sebenarnya harus dijaga oleh seorang pemimpin. Pertanyaan tersebut membawa

perhatian kepada substansi yang lebih dalam, yakni menjaga nilai, menjaga konstitusi, menjaga keadilan, menjaga persatuan, menjaga martabat manusia, dan menjaga keberlangsungan peradaban.

Dalam perspektif tersebut, seorang pemimpin bukanlah penguasa yang berdiri di atas negara. Seorang pemimpin merupakan bagian dari sistem yang harus tunduk kepada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh sebab itu, Guardian Leadership Model tidak dibangun di atas kultus individu, melainkan di atas kesadaran bahwa setiap pemegang kekuasaan hanyalah pelaksana amanah yang suatu saat akan berganti. Yang harus tetap hidup bukan nama seorang pemimpin, melainkan nilai-nilai yang menopang kehidupan bangsa.

Model kepemimpinan ini bertumpu pada empat lapisan yang saling berhubungan. Lapisan pertama adalah **Khalifatullah**, yaitu kesadaran bahwa setiap manusia memperoleh amanah dari Tuhan untuk memakmurkan bumi serta menghadirkan keadilan. Kesadaran tersebut menjadi fondasi spiritual yang membentuk integritas seorang pemimpin. Tanpa kesadaran sebagai Khalifatullah, kekuasaan mudah berubah menjadi alat pemuasan ambisi pribadi. Sebaliknya, ketika amanah kepada Tuhan menjadi pusat orientasi, setiap keputusan akan selalu dipertimbangkan berdasarkan manfaatnya bagi kehidupan bersama.

Lapisan kedua adalah **System Guardians** sebagaimana telah dibahas pada Bab XXV. Penjaga intelektual memastikan bahwa negara tidak kehilangan

akal sehat dalam menyusun kebijakan. Penjaga spiritual menjaga agar pembangunan tidak kehilangan arah moral. Penjaga budaya memastikan bahwa modernisasi tidak menghapus jati diri bangsa. Penjaga patriotisme menjaga agar seluruh penyelenggaraan negara tetap berorientasi kepada kepentingan Indonesia. Keempat penjaga tersebut membentuk pagar yang melindungi bangsa dari penyimpangan kekuasaan maupun penyimpangan nilai.

Lapisan ketiga adalah **Seribu *Root Users*** yang telah dibahas pada Bab XXVI. *Root Users* merupakan elit moral rakyat sadar yang tersebar dalam berbagai profesi dan lapisan masyarakat. Kehadiran *Root Users* menjamin bahwa penjagaan terhadap bangsa tidak hanya berlangsung di tingkat elite negara, tetapi tumbuh dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, Guardian Leadership Model tidak bergantung kepada sedikit orang yang menduduki jabatan publik. Seluruh rakyat yang memiliki kesadaran moral dapat menjadi bagian dari sistem penjagaan bangsa sesuai bidang pengabdian masing-masing.

Lapisan keempat adalah **Wali Raja**, yaitu pemimpin yang mengintegrasikan seluruh unsur tersebut ke dalam penyelenggaraan negara. Seorang Wali Raja tidak berdiri terpisah dari System Guardians maupun *Root Users*. Sebaliknya, kepemimpinan dijalankan melalui dialog, musyawarah, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap seluruh penjaga bangsa. Dalam paradigma ini, pemimpin bukan satu-satunya sumber kebijaksanaan. Kebijaksanaan justru lahir melalui sinergi antara pemegang amanah negara

dengan manusia-manusia yang menjaga ilmu pengetahuan, moralitas, budaya, serta patriotisme bangsa.

Hubungan antar lapisan tersebut membentuk arsitektur kepemimpinan yang utuh. **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** menyediakan nilai dasar yang menjadi sumber seluruh kebijakan. **Konstitusi sebagai *firmware* negara** mengubah nilai tersebut menjadi aturan dasar penyelenggaraan negara. **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menjadi ruang hidup tempat seluruh nilai diwujudkan dalam budaya, pendidikan, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan sosial. Guardian Leadership Model memastikan bahwa hubungan antara ketiga unsur tersebut tetap berjalan secara harmonis melalui kepemimpinan yang berorientasi pada penjagaan, bukan penguasaan.

Paradigma ini juga memberikan jawaban terhadap salah satu kelemahan utama sistem pemerintahan modern, yaitu kecenderungan mengukur keberhasilan hanya berdasarkan hasil jangka pendek. Pergantian pemerintahan sering kali diikuti perubahan arah pembangunan, perubahan prioritas kebijakan, bahkan perubahan identitas nasional. Akibatnya, bangsa terus bergerak mengikuti siklus kekuasaan tanpa memiliki kesinambungan peradaban. Guardian Leadership Model berusaha memutus siklus tersebut dengan menempatkan kepemimpinan sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang jauh lebih panjang daripada masa jabatan seorang pemimpin. Pergantian

pemerintahan boleh terjadi, tetapi arah peradaban harus tetap terjaga.

Dalam model ini, keberhasilan seorang pemimpin tidak lagi diukur semata-mata melalui capaian ekonomi atau kemenangan kekuasaan. Keberhasilan diukur dari kemampuan meninggalkan sistem yang semakin sehat setelah masa kepemimpinan berakhir. Pemimpin yang baik bukan hanya menghasilkan program yang berhasil, tetapi juga melahirkan generasi penerus yang lebih baik. Pemimpin yang berhasil bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat infrastruktur moral bangsa. Pemimpin yang berhasil bukan hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap keadilan, hukum, dan masa depan negara.

Model kepemimpinan seperti ini menjadi semakin penting pada abad ke-21 ketika perubahan berlangsung sangat cepat. Perkembangan kecerdasan buatan, revolusi digital, persaingan geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi ekonomi global menuntut negara memiliki kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan identitas. Kemampuan tersebut tidak cukup dibangun melalui kecanggihan teknologi ataupun kekuatan ekonomi. Diperlukan kepemimpinan yang mampu menjaga arah perubahan agar tetap berpijak pada nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks Indonesia, nilai dasar tersebut bersumber dari **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**, diterjemahkan melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**, kemudian dihidupkan dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**.

Guardian Leadership Model pada akhirnya bukan sekadar teori kepemimpinan, melainkan sebuah arsitektur kenegaraan yang menghubungkan manusia, nilai, sistem, dan peradaban ke dalam satu kesatuan yang utuh. Model ini tidak menempatkan kekuasaan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan bangsa. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga arah perjalanan negara sesuai amanah Tuhan, cita-cita para pendiri bangsa, dan harapan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, Guardian Leadership Model mengajak bangsa ini membangun kembali budaya kepemimpinan yang berakar pada tanggung jawab moral, bukan sekadar legitimasi kekuasaan. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, model ini membebaskan kepemimpinan nasional dari orientasi jangka pendek yang hanya berpusat pada perebutan kekuasaan. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Guardian Leadership Model menjadi fondasi bagi lahirnya negarawan-negarawan yang tidak hanya mampu memimpin pemerintahan, tetapi juga mampu menjaga kesinambungan Peradaban Nusantara bagi generasi yang akan datang.

27.4. Jiwa Kepemimpinan Wali Raja

Setiap sistem pemerintahan pada akhirnya akan bergantung kepada kualitas jiwa manusia yang menjalankannya. Sebaik apa pun rancangan kelembagaan sebuah negara, selengkap apa pun peraturan perundang-undangan yang dimiliki, serta

secanggih apa pun teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seluruhnya tetap akan bermuara pada karakter orang-orang yang memegang amanah. Karena itu, pembahasan mengenai Wali Raja tidak cukup berhenti pada struktur kepemimpinan ataupun mekanisme kenegaraan. Pembahasan tersebut harus masuk ke wilayah yang lebih mendasar, yaitu jiwa kepemimpinan. Sebab sejarah menunjukkan bahwa yang meruntuhkan sebuah bangsa bukan hanya sistem yang buruk, tetapi juga jiwa kepemimpinan yang kehilangan arah.

Selama ini dunia pemerintahan lebih banyak membentuk kemampuan memimpin daripada membentuk kualitas batin seorang pemimpin. Berbagai lembaga pendidikan mengajarkan strategi, manajemen, komunikasi, diplomasi, bahkan teknik memenangkan pemilihan umum. Seluruh kemampuan tersebut memang penting, tetapi tidak otomatis melahirkan negarawan. Banyak pemimpin mampu mengelola organisasi dengan sangat baik, namun gagal mengelola hawa nafsu ketika berhadapan dengan kekuasaan. Banyak pemimpin mampu menyusun kebijakan yang cerdas, tetapi kehilangan keberanian ketika harus memilih antara kepentingan bangsa dan kepentingan kelompok. Oleh sebab itu, persoalan terbesar kepemimpinan bukan terletak pada kecerdasan, melainkan pada kualitas jiwa yang mengendalikan kecerdasan tersebut.

Dalam paradigma Wali Raja, kekuasaan bukanlah alat untuk memperbesar diri, melainkan sarana untuk memperbesar manfaat bagi kehidupan. Semakin tinggi

kedudukan seseorang, semakin luas pula tanggung jawab yang dipikul. Kekuasaan tidak menambah kemuliaan manusia, tetapi memperbesar amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Cara pandang seperti ini melahirkan kerendahan hati, karena seorang pemimpin menyadari bahwa setiap kewenangan yang dimiliki pada hakikatnya hanyalah titipan yang suatu saat akan berakhir. Jabatan dapat berganti, masa kekuasaan dapat selesai, tetapi dampak dari setiap keputusan akan terus hidup dalam kehidupan masyarakat jauh setelah seorang pemimpin meninggalkan kursi kekuasaan.

Di sinilah konsep **Rububiyah** memberikan landasan moral bagi jiwa seorang Wali Raja. Dalam konteks buku ini, Rububiyah tidak dipahami sebagai upaya manusia mengambil sifat ketuhanan. Hal tersebut tentu tidak mungkin dan tidak dibenarkan. Rububiyah dipahami sebagai usaha meneladani cara Allah SWT memelihara kehidupan sesuai kapasitas manusia sebagai **Khalifatullah**. Tuhan menciptakan, memelihara, memberi petunjuk, menyediakan rezeki, serta menjaga keseimbangan alam semesta. Manusia tidak mungkin menyamai sifat-sifat tersebut, tetapi manusia dapat meneladani prinsip-prinsip pemeliharaan dalam lingkup amanah yang diberikan. Seorang pemimpin yang berjiwa Rububiyah memandang rakyat bukan sebagai objek kekuasaan, melainkan sebagai amanah yang harus dipelihara, dilindungi, dikembangkan, dan dimuliakan.

Cara pandang tersebut melahirkan perubahan besar dalam orientasi kepemimpinan. Pemimpin biasa

sering bertanya bagaimana mempertahankan kekuasaan. Wali Raja bertanya bagaimana menjaga amanah. Pemimpin biasa berusaha memperbesar pengaruh kekuasaan. Wali Raja berusaha memperbesar manfaat bagi masyarakat. Pemimpin biasa mengejar popularitas agar tetap dicintai ketika masih berkuasa. Wali Raja lebih memilih bekerja dalam kesunyian apabila pekerjaan tersebut membawa kebaikan bagi bangsa. Perbedaan tersebut tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi pembatas yang sangat jelas antara kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan pribadi dan kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian.

Jiwa seorang Wali Raja juga ditandai oleh keberanian untuk menempatkan kebenaran di atas kenyamanan. Dalam kehidupan pemerintahan, godaan terbesar sering kali bukan ancaman dari lawan, melainkan pujian dari pendukung. Pujian yang berlebihan perlahan dapat membentuk ilusi bahwa seluruh keputusan selalu benar. Dari sinilah lahir kesombongan kekuasaan yang akhirnya menutup ruang koreksi. Sebaliknya, seorang Wali Raja justru menghargai keberadaan manusia-manusia yang berani mengingatkan ketika kebijakan mulai menyimpang. Kritik yang jujur dipandang sebagai bentuk kasih sayang kepada bangsa, bukan sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu, Guardian Leadership Model tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga membutuhkan lingkungan moral yang sehat agar pemimpin tetap berada pada jalan yang benar.

Kerendahan hati menjadi salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari jiwa Wali Raja. Kerendahan hati bukan berarti lemah dalam mengambil keputusan ataupun ragu menghadapi tantangan. Kerendahan hati berarti kesediaan untuk terus belajar, mengakui keterbatasan, mendengar pendapat yang berbeda, serta menerima bahwa kebijaksanaan tidak pernah dimonopoli oleh satu orang. Seorang Wali Raja memahami bahwa ilmu pengetahuan tersebar di tengah masyarakat, pengalaman hidup dimiliki oleh banyak orang, sedangkan hikmah sering kali lahir dari dialog yang jujur. Kesadaran tersebut membuat kepemimpinan berkembang menjadi ruang musyawarah yang hidup, bukan sekadar ruang perintah yang harus dipatuhi.

Jiwa kepemimpinan seperti ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan **System Guardians** dan **Seribu *Root Users*** yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Seorang Wali Raja tidak merasa terancam oleh hadirnya penjaga intelektual, penjaga spiritual, penjaga budaya, maupun penjaga patriotisme. Sebaliknya, seluruh penjaga tersebut dipandang sebagai bagian dari mekanisme yang menjaga bangsa tetap berada pada jalur yang benar. Kehadiran ***Root Users*** juga tidak dipersepsikan sebagai kelompok tandingan kekuasaan, melainkan sebagai elit moral rakyat sadar yang membantu memastikan kehidupan nasional tetap berakar pada nilai-nilai yang benar. Dengan demikian, kepemimpinan berubah dari hubungan yang bersifat vertikal menjadi hubungan yang saling menguatkan dalam satu ekosistem pengabdian.

Pandangan tersebut sekaligus mengubah cara memahami keberhasilan seorang pemimpin. Selama ini ukuran keberhasilan sering kali didasarkan pada angka-angka statistik, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau tingkat elektabilitas. Seluruh indikator tersebut memang penting sebagai alat ukur kinerja pemerintahan, tetapi belum cukup untuk mengukur kualitas jiwa kepemimpinan. Jiwa seorang Wali Raja diukur melalui kemampuan menghadirkan rasa keadilan, memperkuat kepercayaan masyarakat, menjaga persatuan bangsa, menumbuhkan manusia yang bermartabat, serta meninggalkan sistem yang lebih sehat daripada ketika amanah pertama kali diterima. Pembangunan fisik dapat selesai dalam hitungan tahun, tetapi pembangunan karakter bangsa memerlukan kepemimpinan yang mampu menanamkan nilai kepada generasi berikutnya.

Dalam konteks Indonesia, jiwa Wali Raja harus tumbuh dari nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** menjadi sumber karakter yang membentuk hati seorang pemimpin. Nilai Ketuhanan membangun kesadaran bahwa seluruh kekuasaan berada di bawah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nilai Kemanusiaan menjaga agar setiap kebijakan menghormati martabat manusia. Nilai Persatuan mencegah penggunaan kekuasaan untuk memecah belah bangsa. Nilai Kerakyatan membentuk tradisi musyawarah yang bijaksana. Nilai Keadilan Sosial mengarahkan seluruh penyelenggaraan negara kepada kesejahteraan bersama. Seluruh nilai tersebut tidak

cukup hanya dihafalkan, tetapi harus menjadi karakter yang hidup dalam diri setiap pemimpin.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** memberikan batas-batas agar karakter tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, adil, dan bertanggung jawab. Konstitusi menjaga agar kekuasaan tidak melampaui kewenangannya, sedangkan jiwa Wali Raja menjaga agar setiap kewenangan digunakan untuk tujuan yang benar. Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi. Hukum memberikan kepastian, sedangkan jiwa kepemimpinan memberikan arah moral. Tanpa hukum, kekuasaan kehilangan batas. Tanpa jiwa kepemimpinan, hukum kehilangan ruh keadilan.

Akhirnya, seluruh pengabdian tersebut diarahkan untuk menghidupkan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban tidak dibangun hanya melalui proyek pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi, melainkan melalui manusia-manusia yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana memuliakan kehidupan. Ketika seorang pemimpin mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan material dan pembangunan moral, antara kemajuan teknologi dan keluhuran budaya, antara kepastian hukum dan keadilan sosial, pada saat itulah kepemimpinan benar-benar bekerja sebagai penjaga peradaban.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, jiwa Wali Raja mengajak bangsa ini memulihkan kembali makna kepemimpinan sebagai amanah, bukan sebagai privilese. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, jiwa

tersebut membebaskan kekuasaan dari dominasi ambisi pribadi maupun kepentingan kelompok yang sempit. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, jiwa Wali Raja memastikan bahwa setiap kebijakan negara selalu berpihak kepada keberlangsungan bangsa, kemuliaan manusia, dan masa depan Peradaban Nusantara.

Pada akhirnya, Wali Raja tidak dibedakan dari pemimpin lain karena pakaian, jabatan, gelar, ataupun simbol kekuasaan. Perbedaan sesungguhnya terletak pada kualitas jiwa. Ketika kekuasaan melahirkan kerendahan hati, ketika kewenangan melahirkan pengabdian, ketika keberhasilan melahirkan rasa syukur, dan ketika setiap keputusan selalu diarahkan untuk memelihara kehidupan, pada saat itulah seorang pemimpin mulai menapaki jalan sebagai Wali Raja. Dari jiwa seperti itulah lahir negarawan yang bukan hanya mampu memimpin sebuah pemerintahan, tetapi juga mampu menjaga arah perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih adil, bermartabat, dan berperadaban.

27.5. Ketika Negarawan Menjadi Wali Raja

Pada akhirnya, sebuah bangsa tidak akan dikenang karena banyaknya pemimpin yang pernah berkuasa, melainkan karena kualitas peradaban yang berhasil diwariskan kepada generasi berikutnya. Nama-nama pemimpin datang dan pergi mengikuti perjalanan sejarah. Jabatan memiliki batas waktu. Kekuasaan memiliki akhir. Namun nilai-nilai yang ditanamkan oleh seorang pemimpin dapat hidup jauh melampaui masa kepemimpinannya. Oleh sebab itu, ukuran

terbesar dari seorang negarawan bukanlah lamanya memegang kekuasaan, melainkan kemampuan meninggalkan bangsa dalam keadaan yang lebih baik daripada ketika amanah pertama kali diterima.

Sepanjang pembahasan buku ini telah dibangun sebuah alur yang utuh mengenai bagaimana sebuah bangsa dapat bangkit. Bab-bab awal mengajak pembaca memahami bahwa perubahan tidak dimulai dari perebutan jabatan, tetapi dari perubahan cara berpikir manusia sebagai **Khalifatullah**. Selanjutnya dibahas perlunya membangun **System Guardians** yang menjaga kehidupan intelektual, spiritual, budaya, dan patriotisme bangsa. Setelah itu diperkenalkan **Seribu *Root Users*** sebagai elit moral rakyat sadar yang menjadi fondasi perubahan nasional. Seluruh perjalanan tersebut bermuara pada satu kesimpulan bahwa bangsa memerlukan pemimpin yang tidak sekadar mampu mengelola negara, tetapi juga mampu menjaga arah perjalanan peradaban. Pemimpin seperti itulah yang dalam buku ini disebut sebagai **Wali Raja**.

Wali Raja bukanlah tingkatan jabatan yang lebih tinggi daripada presiden, perdana menteri, gubernur, ataupun kepala daerah. Wali Raja juga bukan gelar yang diberikan oleh lembaga tertentu. Paradigma tersebut merupakan kualitas kepemimpinan yang dapat hadir pada siapa pun yang menerima amanah publik. Seorang presiden dapat menjadi Wali Raja. Seorang gubernur dapat menjadi Wali Raja. Seorang bupati, wali kota, kepala desa, pimpinan lembaga, bahkan pemimpin organisasi masyarakat pun dapat menjadi Wali Raja apabila menjalankan kepemimpinan sebagai bentuk

penjagaan terhadap kehidupan yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, Wali Raja bukan berbicara mengenai posisi, melainkan mengenai cara memandang dan menggunakan kekuasaan.

Perubahan cara pandang inilah yang membedakan seorang negarawan dari seorang politisi biasa. Politisi berusaha memenangkan kontestasi agar memperoleh kesempatan memimpin. Negarawan mempersiapkan diri agar layak memikul amanah ketika kesempatan memimpin datang. Politisi sering kali berpikir dalam siklus pemilihan berikutnya. Negarawan berpikir dalam siklus generasi berikutnya. Politisi mengejar keberhasilan yang dapat diukur dalam masa jabatan. Negarawan menanamkan nilai yang mungkin baru akan dirasakan puluhan tahun kemudian. Ketika kualitas seorang negarawan mencapai tingkat di mana seluruh keputusan selalu diarahkan untuk menjaga kehidupan bangsa secara menyeluruh, pada saat itulah kepemimpinan berkembang menjadi Wali Raja.

Perjalanan menuju kualitas tersebut tidak pernah selesai. Tidak ada manusia yang dapat mengklaim telah menjadi Wali Raja secara sempurna. Setiap pemimpin akan terus berhadapan dengan godaan kekuasaan, keterbatasan pengetahuan, tekanan kekuasaan, perubahan zaman, serta berbagai persoalan yang tidak pernah sederhana. Justru karena kesadaran terhadap keterbatasan tersebut, seorang Wali Raja terus membuka ruang belajar, ruang musyawarah, dan ruang koreksi. Kerendahan hati menjadi kekuatan yang menjaga kepemimpinan tetap hidup. Semakin besar

amanah yang dipikul, semakin besar pula kebutuhan untuk mendengar, memahami, dan memperbaiki diri.

Dalam konteks Indonesia, paradigma Wali Raja memiliki makna yang sangat strategis. Indonesia merupakan bangsa yang besar, majemuk, kaya budaya, kaya sumber daya alam, dan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Mengelola keberagaman seperti itu tidak cukup hanya dengan kemampuan administratif. Diperlukan kepemimpinan yang mampu melihat Indonesia sebagai satu kesatuan kehidupan yang harus dipelihara secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi tidak boleh merusak persatuan. Penegakan hukum tidak boleh menghilangkan kemanusiaan. Kemajuan teknologi tidak boleh menghapus kebudayaan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh memecah belah bangsa. Seluruh keseimbangan tersebut hanya mungkin diwujudkan apabila kepemimpinan berangkat dari kesadaran untuk menjaga, bukan sekadar menguasai.

Di sinilah hubungan antara Wali Raja dengan glosarium utama buku ini menjadi semakin nyata. **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** merupakan sumber nilai yang membentuk karakter seorang pemimpin. Selama *kernel* tersebut tetap terjaga, bangsa akan selalu memiliki arah moral yang jelas. **Konstitusi sebagai *firmware* negara** menjadi pedoman yang memastikan penggunaan kewenangan berjalan sesuai hukum, keadilan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang benar. Selanjutnya, **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menjadi ruang tempat seluruh nilai tersebut diwujudkan dalam

kehidupan sehari-hari melalui pendidikan, kebudayaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, serta hubungan antarmanusia. Wali Raja bertugas menjaga agar ketiga lapisan tersebut tetap bekerja secara selaras. Apabila salah satu lapisan mengalami kerusakan, keseluruhan sistem kehidupan bangsa akan ikut terganggu.

Karena itu, Wali Raja tidak pernah memandang pembangunan hanya sebagai pembangunan fisik. Jalan raya, pelabuhan, bendungan, gedung pemerintahan, maupun pusat industri merupakan bagian penting dari kemajuan bangsa, tetapi seluruhnya hanyalah sarana. Tujuan akhirnya adalah lahirnya manusia Indonesia yang semakin beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, semakin berilmu, semakin beradab, semakin mandiri, semakin bersatu, serta semakin mampu menjaga Nusantara sebagai rumah bersama. Peradaban tidak diukur dari tingginya bangunan, melainkan dari tingginya akhlak masyarakat yang hidup di dalamnya.

Paradigma ini juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh meninggalkan rakyat dalam keadaan bergantung kepada sosok tertentu. Kepemimpinan yang baik justru melahirkan masyarakat yang semakin dewasa, semakin berdaya, serta semakin mampu menjaga bangsanya sendiri. Oleh sebab itu, keberhasilan terbesar seorang Wali Raja bukanlah menciptakan pengikut yang selalu memerlukan arahan, melainkan melahirkan semakin banyak ***Root Users*** yang memiliki kesadaran moral, kecerdasan intelektual, keberanian menjaga kebenaran, dan kesediaan mengabdikan hidup bagi Indonesia.

Ketika masyarakat semakin dewasa, negara menjadi semakin kuat. Ketika rakyat semakin sadar, demokrasi menjadi semakin bermartabat. Ketika semakin banyak negarawan lahir, masa depan bangsa tidak lagi bergantung kepada satu orang.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, lahirnya Wali Raja berarti memulihkan kembali makna kepemimpinan sebagai amanah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan keberlangsungan bangsa. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, Wali Raja membebaskan kehidupan pemerintahan dari budaya transaksional, kultus individu, serta orientasi kekuasaan jangka pendek yang selama ini menguras energi nasional. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Wali Raja memastikan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya menghasilkan negara yang kuat, tetapi juga menghasilkan peradaban yang mampu bertahan menghadapi perubahan zaman.

Pada akhirnya, seorang Wali Raja tidak meminta rakyat untuk memuliakan dirinya. Penghormatan bukan tujuan yang dikejar. Kekuasaan juga bukan sesuatu yang dipertahankan dengan segala cara. Seluruh pengabdian diarahkan agar bangsa tetap memiliki masa depan, agar negara tetap berjalan di atas nilai-nilai Pancasila, agar konstitusi tetap menjadi pedoman penyelenggaraan negara, dan agar Peradaban Nusantara terus tumbuh sebagai warisan yang dapat dinikmati oleh anak cucu di masa mendatang.

Sejarah menunjukkan bahwa kekaguman kepada seorang pemimpin dapat lahir karena pidato yang memukau, kemenangan yang besar, atau keberhasilan

pembangunan yang terlihat oleh mata. Namun kekaguman belum tentu melahirkan ikatan batin antara pemimpin dan rakyat. Yang jauh lebih berharga adalah ketika kehadiran seorang pemimpin menghadirkan rasa aman, keadilan, harapan, dan ketenangan sehingga ketika masa pengabdian berakhir, masyarakat tidak hanya mengenang prestasinya, tetapi juga merindukan nilai-nilai yang pernah dihidupkan selama memimpin. Kekaguman lahir dari jarak. Kerinduan lahir dari cinta. Seorang Wali Raja tidak bekerja agar dikenang sebagai penguasa yang hebat, melainkan agar bangsa terus berjalan di jalan yang benar meskipun kelak tidak lagi berada di tengah-tengah rakyat.

Dengan demikian, Indonesia pada masa depan sesungguhnya tidak hanya membutuhkan lebih banyak pejabat, lebih banyak politisi, atau lebih banyak administrator negara. Indonesia membutuhkan lebih banyak negarawan yang bertumbuh menjadi Wali Raja. Sebab bangsa yang besar tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat memegang kekuasaan, melainkan oleh siapa yang paling setia menjaga amanah. Ketika semakin banyak pemimpin memandang dirinya sebagai penjaga, bukan pemilik negara, maka **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** akan tetap hidup, **konstitusi sebagai *firmware* negara** akan terus bekerja sebagaimana mestinya, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** akan berkembang menjadi fondasi kokoh bagi lahirnya Indonesia yang adil, bermartabat, berdaulat, dan berkelanjutan bagi generasi-generasi yang akan datang.

27.6. Sekolah Negarawan dan Lahirnya Wali Raja

Seluruh perjalanan dalam buku ini sesungguhnya mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu melahirkan manusia-manusia yang mampu menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa. Setiap bab yang telah dibahas bukanlah kumpulan gagasan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian tahapan yang saling melengkapi dalam membangun sebuah ekosistem peradaban. Oleh sebab itu, Wali Raja tidak boleh dipahami sebagai sebuah konsep yang muncul secara tiba-tiba pada bagian akhir buku. Wali Raja merupakan puncak dari proses panjang pembentukan manusia, pembentukan karakter, pembentukan kesadaran kenegaraan, hingga pembentukan kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian. Dalam kerangka tersebut, Sekolah Negarawan bukan sekadar lembaga pendidikan kepemimpinan, melainkan ruang persemaian bagi lahirnya Wali Raja yang akan menjaga arah perjalanan Indonesia dan Peradaban Nusantara pada masa depan.

Perjalanan tersebut selalu dimulai dari manusia. Sebelum membangun negara, manusia terlebih dahulu harus membangun dirinya sendiri. Sebelum memimpin orang lain, manusia harus mampu memimpin hawa nafsunya sendiri. Sebelum memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, manusia harus membiasakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Sekolah Negarawan tidak memulai pendidikan dari teknik kedaulatan ataupun strategi kekuasaan, melainkan dari kesadaran bahwa setiap manusia diciptakan sebagai **Khalifatullah** yang memikul amanah untuk

memakmurkan bumi. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi seluruh perjalanan berikutnya.

Ketika kesadaran sebagai Khalifatullah tumbuh, lahirlah manusia yang tidak lagi memandang kehidupan sebagai ruang persaingan semata, melainkan sebagai ruang pengabdian. Dari kesadaran tersebut berkembang karakter yang menjunjung kejujuran, keberanian, tanggung jawab, kasih sayang, keadilan, serta kerendahan hati. Karakter tersebut tidak dibangun melalui ceramah sesaat ataupun pelatihan singkat, tetapi melalui proses panjang pembiasaan berpikir, bersikap, dan bertindak. Seorang negarawan pada hakikatnya tidak dibentuk oleh jabatan, melainkan oleh kebiasaan hidup yang terus menerus melatih diri untuk mendahulukan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.

Tahap berikutnya adalah tumbuhnya kesadaran untuk menjaga lingkungan kehidupan bersama. Seorang Khalifatullah yang telah matang tidak lagi hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi mulai merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Dari sinilah lahir **Seribu *Root Users***, yaitu manusia-manusia yang memiliki kesadaran moral untuk menjaga kehidupan nasional sesuai bidang pengabdian masing-masing. *Root Users* bukan kelompok pejabat kekuasaan, bukan pula organisasi eksklusif. *Root Users* adalah representasi rakyat sadar yang memahami bahwa masa depan bangsa tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pemegang jabatan. Kehidupan berbangsa hanya akan sehat apabila

masyarakat turut mengambil bagian sebagai penjaga nilai, penjaga akal sehat, serta penjaga moral publik.

Ketika *Root Users* berkembang dalam jumlah yang cukup, lahirlah **System Guardians**. Penjaga intelektual memastikan bangsa tidak kehilangan nalar dalam menghadapi perubahan zaman. Penjaga spiritual menjaga agar pembangunan tetap berpijak pada nilai-nilai ketuhanan. Penjaga budaya memastikan modernisasi tidak memutus akar peradaban. Penjaga patriotisme menjaga agar seluruh energi bangsa tetap diabdikan bagi kepentingan Indonesia. Kehadiran para penjaga tersebut membentuk sistem kekebalan moral yang memungkinkan negara bertahan menghadapi berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan, infiltrasi nilai, maupun tekanan global yang dapat menggeser arah perjalanan bangsa.

Di atas fondasi itulah seorang negarawan bertumbuh. Negarawan bukan sekadar manusia yang memahami teori kenegaraan, tetapi manusia yang hidup bersama nilai-nilai yang diperjuangkan. Keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keuntungan kekuasaan, melainkan juga keberlangsungan bangsa dalam jangka panjang. Pandangan seperti itu membuat seorang negarawan mampu melihat hubungan antara manusia, negara, dan peradaban sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Negara hadir untuk melayani kehidupan manusia, sedangkan peradaban menjadi ruang tempat seluruh nilai kemanusiaan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ketika seorang negarawan menerima amanah memimpin negara, kepemimpinan tersebut memasuki tingkatan yang lebih tinggi. Pada titik itulah lahir seorang **Wali Raja**. Wali Raja bukan identitas baru yang menggantikan negarawan, melainkan penyempurnaan dari perjalanan seorang negarawan yang memperoleh tanggung jawab menjaga bangsa secara langsung. Seorang negarawan dapat hidup tanpa jabatan, tetapi ketika amanah kepemimpinan datang, seluruh kualitas kenegarawanan harus diwujudkan dalam kebijakan, keputusan, dan tindakan nyata. Dengan demikian, Wali Raja adalah negarawan yang menjalankan kekuasaan sebagai amanah penjagaan terhadap kehidupan bangsa.

Paradigma tersebut memperlihatkan bahwa proses pembentukan pemimpin sesungguhnya jauh lebih penting daripada proses pemilihan pemimpin. Demokrasi dapat menghasilkan pergantian pemerintahan secara damai, tetapi demokrasi tidak secara otomatis menghasilkan negarawan. Pemilihan umum dapat memilih siapa yang akan memimpin, tetapi tidak dapat membentuk kualitas jiwa orang yang terpilih. Oleh sebab itu, bangsa yang ingin memiliki pemimpin berkualitas harus terlebih dahulu membangun ekosistem yang secara terus-menerus melahirkan manusia-manusia berkarakter. Sekolah Negarawan hadir untuk mengisi ruang yang selama ini belum banyak disentuh oleh sistem pemerintahan modern, yaitu ruang pembentukan jiwa kepemimpinan.

Dalam konteks tersebut, Sekolah Negarawan tidak dimaksudkan sebagai institusi yang mencetak penguasa. Tujuan utamanya adalah melahirkan

manusia yang mampu menjaga kehidupan bangsa pada setiap tingkat pengabdian. Sebagian akan mengabdi sebagai guru, sebagian sebagai ulama, ilmuwan, birokrat, prajurit, pengusaha, hakim, diplomat, pemimpin masyarakat, ataupun penyelenggara negara. Jalur pengabdian dapat berbeda-beda, tetapi orientasi yang dibangun tetap sama, yaitu menjaga kehidupan bersama sesuai amanah yang diterima. Dengan demikian, Sekolah Negarawan tidak membangun budaya mengejar jabatan, melainkan budaya mempersiapkan diri agar layak menerima amanah.

Seluruh proses tersebut hanya dapat berjalan apabila bangsa memiliki fondasi nilai yang kokoh. **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** menjadi sumber nilai yang membentuk karakter seluruh peserta didik, seluruh pemimpin, serta seluruh penyelenggara negara. Nilai-nilai Pancasila tidak diposisikan sebagai slogan, tetapi sebagai inti yang menghidupkan seluruh sistem kehidupan nasional. Dari *kernel* tersebut lahir arah moral yang menjadi pedoman dalam setiap bentuk pengabdian kepada bangsa.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menjadi instrumen yang menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam tata kelola pemerintahan. Konstitusi memastikan bahwa seluruh kewenangan dijalankan secara tertib, bertanggung jawab, dan sesuai prinsip negara hukum. Namun konstitusi hanya akan bekerja secara optimal apabila dijalankan oleh manusia-manusia yang memiliki integritas. Karena itu, pembangunan karakter melalui Sekolah Negarawan menjadi pelengkap yang memastikan *firmware* negara

benar-benar dijalankan sesuai semangat keadilan dan kemanusiaan.

Akhirnya, seluruh perjalanan tersebut bermuara pada penguatan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Dalam buku ini, Nusantara dipahami sebagai ruang peradaban yang jauh lebih luas daripada sekadar batas administratif negara. Indonesia merupakan bentuk negara yang menaungi kehidupan nasional, sedangkan Peradaban Nusantara merupakan warisan nilai, budaya, cara pandang, dan kebijaksanaan yang menjadi ruh kehidupan bangsa. Karena itu, Wali Raja tidak hanya menjaga Indonesia sebagai sebuah negara, tetapi juga menjaga Peradaban Nusantara sebagai rumah besar tempat identitas bangsa terus bertumbuh dan diwariskan kepada generasi mendatang. Negara dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi peradaban harus tetap hidup sebagai sumber jati diri bangsa.

Inilah alasan mengapa perjalanan dalam buku ini selalu bergerak dari manusia menuju peradaban. Perubahan bangsa tidak dimulai dari pergantian presiden, perubahan kabinet, ataupun pergantian konstitusi semata. Perubahan dimulai dari lahirnya manusia-manusia yang memahami amanah sebagai Khalifatullah, bertumbuh menjadi *Root Users*, menguat sebagai System Guardians, berkembang menjadi negarawan, dan ketika menerima amanah kepemimpinan menjelma menjadi Wali Raja. Setiap tahapan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu mata rantai terputus,

pembangunan bangsa akan kehilangan kesinambungannya.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, perjalanan tersebut memulihkan kembali tradisi kenegarawanan sebagai fondasi kehidupan nasional. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, perjalanan tersebut membebaskan bangsa dari ketergantungan kepada figur-figur sesaat dengan membangun sistem yang terus melahirkan pemimpin berkarakter. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, perjalanan tersebut memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan sebagai negara, tetapi juga berkembang sebagai peradaban yang melahirkan manusia-manusia unggul sepanjang zaman.

Pada akhirnya, keberhasilan Sekolah Negarawan tidak diukur dari banyaknya lulusan, luasnya jaringan organisasi, ataupun besarnya pengaruh kekuasaan yang dimiliki. Keberhasilan sesungguhnya diukur ketika bangsa mulai dipenuhi oleh manusia-manusia yang memandang kekuasaan sebagai amanah, jabatan sebagai pengabdian, rakyat sebagai keluarga besar yang harus dimuliakan, dan negara sebagai titipan yang wajib dijaga. Ketika semakin banyak manusia seperti itu lahir, bangsa tidak lagi bergantung kepada sosok pemimpin tertentu. Bangsa akan memiliki kemampuan untuk terus melahirkan Wali Raja dari generasi ke generasi. Dari sanalah Indonesia memperoleh kekuatan yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai sebuah negara yang berdaulat, tetapi sebagai Peradaban Nusantara yang terus hidup, tumbuh, dan memberi manfaat bagi kemanusiaan.

BAGIAN VIII – INDONESIA BARU

BAB 28
BOOTING ULANG BANGSA

28.1. Mengapa Indonesia Perlu Di-*Boot* Ulang

Setiap sistem yang dibangun oleh manusia pada suatu saat akan menghadapi penurunan kinerja. Semakin lama sebuah sistem bekerja, semakin besar pula kemungkinan munculnya kesalahan, penumpukan beban, konflik antarproses, hingga kondisi yang membuat keseluruhan sistem tidak lagi mampu bekerja secara optimal. Dalam dunia teknologi informasi, keadaan seperti itu bukan sesuatu yang asing. Sebuah komputer yang terus digunakan tanpa pengelolaan yang baik dapat menjadi lambat, tidak responsif, bahkan mengalami kegagalan menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Menariknya, penyebab utama sering kali bukan terletak pada perangkat keras maupun sistem operasi yang rusak, melainkan pada banyaknya proses yang berjalan tidak semestinya. Dalam kondisi tertentu, solusi yang paling tepat bukan mengganti seluruh perangkat ataupun memasang sistem yang baru, melainkan melakukan *booting* ulang agar sistem kembali bekerja sesuai rancangan awalnya.

Analogi tersebut memberikan cara pandang yang sangat relevan untuk memahami kondisi Indonesia saat ini. Selama puluhan tahun bangsa ini terus bergerak, membangun, memperbaiki, serta menghadapi berbagai dinamika pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum, dan budaya. Banyak capaian berhasil diraih, tetapi pada saat yang sama berbagai persoalan terus berulang tanpa penyelesaian yang benar-benar mendasar. Korupsi

berganti pelaku tetapi tetap terjadi. Konflik pemerintahan berganti tokoh tetapi pola yang muncul hampir selalu sama. Pergantian pemerintahan berlangsung berkali-kali, namun sebagian persoalan mendasar tetap bertahan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masalah Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individu ataupun pergantian kekuasaan. Permasalahan yang dihadapi telah berkembang menjadi persoalan sistemik yang memerlukan cara pandang yang lebih mendasar.

Dalam konteks buku ini, kondisi tersebut tidak dipahami sebagai alasan untuk membangun negara baru ataupun membuang seluruh fondasi yang telah dimiliki bangsa. Justru sebaliknya, Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat. **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** tetap menjadi sumber nilai yang mampu mempersatukan keberagaman Indonesia. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial masih memiliki relevansi yang sangat tinggi untuk menjawab tantangan zaman. Persoalan utama bukan terletak pada *kernel*-nya, melainkan pada semakin jauhnya praktik penyelenggaraan negara dari nilai-nilai yang terkandung di dalam *kernel* tersebut.

Demikian pula dengan **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Konstitusi dibentuk untuk mengatur bagaimana negara dijalankan agar kekuasaan memiliki batas, hak-hak rakyat memperoleh perlindungan, serta penyelenggaraan pemerintahan berlangsung sesuai prinsip negara hukum. Namun sebagaimana sebuah *firmware* dalam perangkat digital, konstitusi hanya akan bekerja sesuai tujuan apabila dijalankan oleh manusia

yang memahami semangat pembentukannya. Ketika penyelenggaraan negara lebih banyak dikuasai oleh kepentingan jangka pendek, budaya transaksional, serta orientasi kekuasaan yang sempit, maka *firmware* tetap ada, tetapi tidak lagi menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pada lapisan berikutnya terdapat **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban merupakan ruang tempat nilai-nilai hidup dalam praktik sehari-hari. Peradaban mencakup cara manusia mendidik generasi muda, membangun ilmu pengetahuan, memperlakukan alam, menyelesaikan konflik, menghormati hukum, menjalankan ekonomi, serta membangun hubungan antarsesama. Ketika *operating system* tersebut mengalami gangguan, seluruh aspek kehidupan akan ikut merasakan dampaknya. Pendidikan kehilangan orientasi pembentukan karakter. Kekuasaan kehilangan etika. Ekonomi kehilangan keadilan. Teknologi berkembang tanpa arah moral. Budaya perlahan bergeser menjadi sekadar hiburan, bukan lagi sumber kebijaksanaan. Pada saat seperti itulah bangsa mulai mengalami gejala yang dalam dunia teknologi dapat dianalogikan sebagai *system slowdown*, yaitu sistem masih berjalan, tetapi tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya.

Karena itu, solusi yang ditawarkan dalam buku ini bukanlah melakukan *reinstall* terhadap bangsa. *Reinstall* berarti menghapus seluruh sistem dan menggantinya dengan sistem yang sama sekali baru. Jalan seperti itu bukan hanya berisiko menghilangkan identitas

nasional, tetapi juga mengabaikan warisan luhur yang telah menjadi fondasi Indonesia sejak awal berdiri. Buku ini juga tidak menawarkan *formatting*, yaitu menghapus seluruh perjalanan sejarah dan memulai kembali dari titik nol. Bangsa tidak mungkin melupakan pengalaman sejarahnya sendiri, karena sejarah merupakan guru yang membentuk kedewasaan sebuah peradaban.

Yang diperlukan adalah melakukan *booting* ulang. *Booting* ulang berarti mengembalikan sistem kepada keadaan awal yang benar agar seluruh proses dapat bekerja sesuai fungsi masing-masing. Dalam kehidupan berbangsa, *booting* ulang berarti menghidupkan kembali nilai-nilai dasar yang selama ini mulai tertutup oleh berbagai kepentingan sesaat. Pancasila harus kembali menjadi *kernel* yang benar-benar mengendalikan arah bangsa, bukan sekadar simbol yang diucapkan dalam seremoni. Konstitusi harus kembali berfungsi sebagai *firmware* yang memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai amanat rakyat dan prinsip keadilan. Selanjutnya, Peradaban Nusantara harus kembali menjadi *operating system* yang menghidupkan seluruh aktivitas kehidupan nasional.

Namun *booting* ulang bangsa tidak dapat dimulai dari lembaga negara semata. Seluruh pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perubahan selalu dimulai dari manusia. Sistem tidak pernah memperbaiki dirinya sendiri. Sistem selalu diperbaiki oleh manusia yang memiliki kesadaran untuk menjaga kehidupan bersama. Oleh sebab itu, *booting* ulang Indonesia dimulai dari lahirnya manusia-

manusia yang memahami amanah sebagai **Khalifatullah**, bertumbuh menjadi ***Root Users***, menguat sebagai **System Guardians**, berkembang menjadi negarawan, dan ketika menerima amanah kepemimpinan menjalankan peran sebagai **Wali Raja**. Tanpa manusia seperti itu, perubahan kelembagaan hanya akan menghasilkan wajah baru dengan pola lama.

Analogi *booting* ulang juga mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Dalam sebuah sistem komputer, proses *booting* berlangsung secara berurutan. Setiap komponen bekerja sesuai fungsinya hingga akhirnya keseluruhan sistem kembali aktif. Demikian pula dengan kebangkitan bangsa. Tidak diperlukan tindakan yang tergesa-gesa ataupun revolusi yang menghancurkan seluruh tatanan. Yang diperlukan adalah keberanian untuk menghidupkan kembali setiap unsur kehidupan nasional sesuai fungsi aslinya. Pendidikan kembali membentuk karakter. Hukum kembali menghadirkan keadilan. Politik kembali menjadi sarana pengabdian. Ekonomi kembali berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Kebudayaan kembali menjadi sumber identitas bangsa. Agama kembali menjadi cahaya moral dalam kehidupan publik. Ketika setiap unsur kembali bekerja sesuai tujuan penciptaannya, keseluruhan sistem bangsa akan bangkit secara alami.

Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya alam, tidak kekurangan penduduk, tidak kekurangan kecerdasan, bahkan tidak kekurangan cita-cita besar. Yang sering kali hilang adalah keselarasan

antarbagian sehingga energi nasional bergerak ke arah yang berbeda-beda. *Booting* ulang bangsa bertujuan menyatukan kembali seluruh energi tersebut agar bergerak menuju tujuan yang sama. Keselarasan inilah yang menjadi inti dari pembangunan peradaban. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang memiliki sumber daya paling banyak, melainkan bangsa yang mampu mengarahkan seluruh sumber daya kepada cita-cita bersama.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, *booting* ulang berarti memulihkan kembali arah perjalanan bangsa kepada nilai-nilai yang menjadi dasar pendiriannya. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, *booting* ulang membebaskan bangsa dari proses-proses yang selama ini menghambat lahirnya kehidupan bernegara yang sehat, adil, dan bermartabat. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, *booting* ulang memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi peradaban yang kokoh bagi generasi-generasi mendatang.

Pada akhirnya, *booting* ulang bangsa bukanlah proyek kekuasaan, bukan pula agenda pergantian kekuasaan. *Booting* ulang adalah proses menghidupkan kembali ruh Indonesia melalui manusia-manusia yang bersedia mengabdikan hidup untuk menjaga bangsa. Ketika **Pancasila kembali menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi kembali bekerja sebagai *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara kembali hidup sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**, maka Indonesia tidak sekadar bangkit dari berbagai persoalan

yang dihadapi, tetapi memasuki fase baru sebagai bangsa yang semakin matang, semakin berdaulat, semakin bermartabat, dan semakin siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

28.2. Indonesia Baru Bukan Negara Baru

Setiap gagasan besar yang menawarkan perubahan hampir selalu berhadapan dengan satu pertanyaan yang sama, yaitu apakah perubahan tersebut berarti mengganti seluruh tatanan yang telah ada. Pertanyaan seperti itu juga akan muncul ketika membahas konsep **Indonesia Baru**. Sebagian orang mungkin membayangkan lahirnya negara baru, perubahan identitas nasional, atau bahkan pembubaran seluruh sistem yang telah dibangun sejak kemerdekaan. Pandangan seperti itu justru bertolak belakang dengan semangat yang dibangun dalam buku ini. Indonesia Baru bukanlah negara baru. Indonesia Baru adalah Indonesia yang kembali bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya, kembali hidup sesuai dengan nilai-nilai yang melahirkannya, serta kembali bergerak menuju cita-cita yang telah disepakati oleh seluruh bangsa.

Bangsa yang besar tidak selalu membutuhkan pergantian identitas ketika menghadapi persoalan. Dalam banyak peristiwa sejarah, bangsa-bangsa justru mampu bangkit karena kembali menemukan jati dirinya sendiri. Krisis sering kali tidak muncul karena identitas yang salah, melainkan karena semakin jauhnya praktik kehidupan dari nilai-nilai yang menjadi fondasi bangsa. Oleh sebab itu, solusi yang paling mendasar

bukan membangun identitas baru, tetapi menghidupkan kembali identitas yang selama ini mulai tertutup oleh berbagai penyimpangan, kepentingan sesaat, dan kebiasaan yang menjauh dari cita-cita awal.

Indonesia telah memiliki dasar yang kokoh sejak awal berdiri. Para pendiri bangsa meletakkan **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**, yaitu inti nilai yang menjadi sumber seluruh kehidupan nasional. Pancasila bukan sekadar hasil kompromi kekuasaan, melainkan titik temu yang mempersatukan keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan sejarah Nusantara ke dalam satu cita-cita bersama. Oleh sebab itu, Indonesia Baru tidak lahir dengan mengganti Pancasila. Sebaliknya, Indonesia Baru lahir ketika Pancasila kembali benar-benar menjadi sumber nilai yang menggerakkan seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian pula dengan **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Konstitusi merupakan perangkat dasar yang mengatur bagaimana negara dijalankan, bagaimana kekuasaan dibatasi, bagaimana hak rakyat dilindungi, serta bagaimana hubungan antarlembaga negara dibangun. Dalam praktiknya, konstitusi dapat mengalami perubahan, penyempurnaan, ataupun penyesuaian sesuai kebutuhan zaman. Namun perubahan tersebut tidak identik dengan membangun negara baru. Sebagaimana sebuah *firmware* yang dapat diperbarui agar bekerja lebih baik tanpa mengubah identitas perangkatnya, penyempurnaan tata kelola negara merupakan bagian dari proses pendewasaan bangsa. Indonesia Baru karena itu bukanlah penolakan

terhadap konstitusi, melainkan usaha memastikan bahwa konstitusi benar-benar berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang berkeadilan, berpihak kepada rakyat, dan mampu menjaga tujuan nasional.

Di atas kedua fondasi tersebut berdiri **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban inilah yang sesungguhnya memberikan ruh bagi kehidupan Indonesia. Nusantara bukan sekadar istilah geografis yang merujuk pada gugusan kepulauan. Dalam buku ini, Nusantara dipahami sebagai ruang peradaban yang telah tumbuh jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nusantara merupakan himpunan nilai, kebijaksanaan, pengalaman sejarah, budaya, dan cara hidup yang membentuk karakter masyarakat di kawasan ini selama berabad-abad. Indonesia hadir sebagai bentuk negara modern yang menaungi Peradaban Nusantara, sedangkan Peradaban Nusantara menjadi ruh yang memberi makna bagi keberadaan Indonesia.

Perbedaan tersebut sangat penting dipahami. Negara merupakan instrumen penyelenggaraan kehidupan bersama, sedangkan peradaban merupakan tujuan jangka panjang yang hendak dijaga dan diwariskan. Negara dapat mengalami perubahan dalam tata kelola, kelembagaan, maupun kebijakan publik sesuai perkembangan zaman. Namun peradaban harus tetap hidup sebagai identitas yang menyatukan seluruh perjalanan bangsa. Oleh sebab itu, Indonesia Baru bukanlah upaya meninggalkan Indonesia menuju

sesuatu yang lain, melainkan usaha menguatkan Indonesia agar semakin mampu menjaga dan mengembangkan Peradaban Nusantara.

Cara pandang tersebut sekaligus membedakan konsep Indonesia Baru dari berbagai gagasan perubahan yang hanya berpusat pada pergantian pemimpin atau pergantian pemerintahan. Pergantian presiden dapat menghasilkan kebijakan baru, tetapi belum tentu melahirkan budaya pemerintahan yang baru. Pergantian kabinet dapat menghasilkan program baru, tetapi belum tentu memperbaiki kualitas kehidupan bangsa. Bahkan perubahan konstitusi pun tidak akan menghasilkan kemajuan apabila karakter manusia yang menjalankannya tetap sama. Karena itu, Indonesia Baru tidak dimulai dari pergantian orang, melainkan dari pembaruan cara berpikir, cara memimpin, dan cara membangun kehidupan berbangsa.

Pembaruan tersebut dimulai dari manusia sebagai **Khalifatullah**. Manusia yang memahami amanah akan membangun keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat akan melahirkan masyarakat yang kuat. Dari masyarakat yang kuat tumbuh ***Root Users*** yang menjaga kesadaran moral bangsa. *Root Users* memperkuat lahirnya **System Guardians** yang menjaga kehidupan intelektual, spiritual, budaya, dan patriotisme. Dari lingkungan seperti itu tumbuh negarawan yang ketika menerima amanah kepemimpinan menjalankan peran sebagai **Wali Raja**. Seluruh proses tersebut membentuk perubahan yang

berangkat dari akar kehidupan bangsa, bukan sekadar dari puncak kekuasaan.

Karena itu, Indonesia Baru bukan revolusi yang menghancurkan seluruh tatanan lama, melainkan transformasi yang menghidupkan kembali tujuan awal bangsa. Dalam dunia teknologi, sebuah sistem yang bekerja tidak selalu memerlukan perangkat baru. Yang sering diperlukan adalah memastikan bahwa seluruh komponen kembali menjalankan fungsi sebagaimana dirancang sejak awal. Analogi tersebut berlaku pula dalam kehidupan bernegara. Pendidikan kembali diarahkan untuk membentuk manusia berkarakter. Kekuasaan kembali diposisikan sebagai sarana pengabdian. Hukum kembali menghadirkan keadilan. Ekonomi kembali menjadi instrumen kesejahteraan rakyat. Ilmu pengetahuan kembali diabdikan untuk kemajuan bangsa. Seluruh unsur kehidupan kembali bergerak menuju tujuan yang sama.

Indonesia Baru juga bukan berarti menolak modernitas. Kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, digitalisasi, ekonomi berbasis pengetahuan, serta perkembangan ilmu pengetahuan merupakan bagian dari kenyataan zaman yang harus dihadapi. Namun modernitas tidak boleh menghapus identitas bangsa. Kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan kemajuan moral. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama keadilan sosial. Globalisasi harus diimbangi dengan penguatan jati diri nasional. Dengan demikian, Indonesia Baru bukan memilih antara tradisi atau modernitas, melainkan memadukan keduanya dalam

satu arah pembangunan yang berakar pada nilai-nilai bangsa.

Paradigma tersebut sekaligus mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah negara tidak hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi atau kekuatan militer. Keberhasilan sejati terlihat ketika rakyat merasakan keadilan, memperoleh kesempatan berkembang, hidup dalam suasana damai, serta memiliki keyakinan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi seluruh warganya. Negara yang berhasil bukan hanya membangun gedung-gedung tinggi, tetapi juga membangun manusia yang memiliki integritas, kecerdasan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Inilah esensi Indonesia Baru yang hendak dibangun melalui perjalanan panjang dalam buku ini.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, Indonesia Baru berarti mengembalikan bangsa kepada nilai-nilai yang menjadi dasar kelahirannya tanpa kehilangan kemampuan menghadapi tantangan masa depan. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, Indonesia Baru membebaskan penyelenggaraan negara dari budaya kekuasaan yang sempit, praktik kekuasaan yang menyimpang, serta cara berpikir yang memisahkan negara dari tujuan peradabannya. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, Indonesia Baru memastikan bahwa negara tetap menjadi instrumen yang menjaga, mengembangkan, dan mewariskan Peradaban Nusantara kepada generasi-generasi yang akan datang.

Pada akhirnya, Indonesia Baru bukanlah nama bagi sebuah negara yang berbeda. Indonesia Baru

adalah keadaan ketika bangsa ini kembali menemukan dirinya sendiri. Ketika **Pancasila benar-benar hidup sebagai *kernel* bangsa**, **konstitusi bekerja sebagai *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara tumbuh sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**, Indonesia tidak kehilangan identitasnya. Justru pada saat itulah Indonesia menjadi semakin utuh, semakin dewasa, dan semakin mampu menjalankan amanah sejarah sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, bermartabat, serta memberikan manfaat bagi peradaban dunia.

28.3. *Boot Sequence* Kebangkitan Bangsa



Sebuah sistem tidak pernah aktif secara tiba-tiba. Ketika sebuah komputer dinyalakan, terdapat urutan kerja yang berlangsung secara sistematis. Setiap

komponen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi seluruh komponen bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu menghidupkan sistem agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Apabila salah satu tahapan gagal dijalankan, keseluruhan sistem akan mengalami gangguan, bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Prinsip tersebut memberikan pelajaran yang sangat penting bagi pembangunan bangsa. Kebangkitan sebuah negara juga tidak pernah terjadi secara instan. Kebangkitan selalu mengikuti urutan yang teratur, dimulai dari fondasi yang paling dalam hingga menghasilkan perubahan yang tampak pada seluruh aspek kehidupan nasional. Dalam buku ini, urutan tersebut disebut sebagai *Boot Sequence* Kebangkitan Bangsa.

Tahapan pertama selalu dimulai dari manusia sebagai **Khalifatullah**. Tidak ada bangsa yang dapat bangkit apabila manusia-manusia yang menghuninya kehilangan kesadaran mengenai tujuan keberadaannya. Kemajuan ilmu pengetahuan, kekuatan ekonomi, ataupun kecanggihan teknologi tidak akan menghasilkan peradaban yang sehat apabila manusia kehilangan orientasi moral. Oleh sebab itu, seluruh proses kebangkitan dimulai dari pembangunan kesadaran bahwa setiap manusia memikul amanah untuk memakmurkan bumi, menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan kehidupan, serta mengabdikan kemampuan terbaik bagi kemaslahatan bersama. Kesadaran tersebut menjadi sumber yang menghidupkan seluruh proses berikutnya.

Kesadaran sebagai Khalifatullah kemudian membentuk karakter. Karakter melahirkan kebiasaan.

Kebiasaan membangun budaya hidup. Dari budaya hidup lahirlah keluarga yang sehat sebagai unit sosial terkecil dalam kehidupan berbangsa. Tidak ada negara yang mampu bertahan lama apabila keluarga kehilangan fungsi pendidikan, kasih sayang, keteladanan, dan pembentukan akhlak. Sebaliknya, keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang memiliki integritas, rasa tanggung jawab, keberanian, serta kemampuan bekerja sama. Kebangkitan bangsa dengan demikian bukan dimulai dari gedung parlemen ataupun istana negara, melainkan dari rumah-rumah yang berhasil melahirkan manusia berkarakter.

Keluarga-keluarga yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat. Dalam masyarakat seperti itulah tumbuh manusia-manusia yang memiliki kesadaran untuk menjaga kehidupan bersama tanpa harus menunggu jabatan ataupun kewenangan formal. Buku ini menyebut kelompok tersebut sebagai ***Root Users***. Sebagaimana *root user* dalam sebuah sistem komputer memiliki kemampuan memahami dan menjaga keseluruhan sistem, *Root Users* merupakan warga negara yang memiliki kedewasaan moral, kecerdasan berpikir, serta kepedulian terhadap arah perjalanan bangsa. Kehadiran *Root Users* menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga Indonesia tidak hanya berada di tangan pemerintah, melainkan menjadi amanah seluruh rakyat.

Jumlah *Root Users* yang terus bertambah akan membentuk lingkungan yang sehat bagi lahirnya **System Guardians**. Pada tahap ini, penjagaan terhadap bangsa tidak lagi dilakukan secara individual, tetapi

berkembang menjadi ekosistem yang saling menguatkan. Penjaga ilmu memastikan bahwa perkembangan pengetahuan tetap diabdikan bagi kemajuan bangsa. Penjaga spiritual memastikan bahwa pembangunan tidak kehilangan dimensi ketuhanan. Penjaga budaya menjaga agar identitas bangsa tidak larut dalam arus globalisasi. Penjaga patriotisme memastikan bahwa seluruh potensi nasional tetap diarahkan bagi kepentingan Indonesia. Masing-masing menjalankan fungsi berbeda, tetapi seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa.

Ketika ekosistem tersebut tumbuh dengan baik, lahirlah manusia-manusia yang memiliki kualitas kenegarawanan. Negarawan tidak muncul secara tiba-tiba ketika memperoleh jabatan. Kenegarawanan merupakan hasil dari perjalanan panjang yang ditempa oleh pengalaman, pengabdian, integritas, serta kemampuan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Seorang negarawan mampu melihat Indonesia bukan hanya sebagai organisasi pemerintahan, tetapi sebagai ruang pengabdian yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik kepada generasi berikutnya. Cara berpikir seperti itulah yang membedakan negarawan dari sekadar pelaku kekuasaan.

Apabila seorang negarawan memperoleh amanah memimpin negara, maka perjalanan tersebut mencapai tahapan berikutnya, yaitu lahirnya **Wali Raja**. Wali Raja bukan tingkatan kekuasaan yang lebih tinggi daripada negarawan, melainkan bentuk pelaksanaan

kenegarawanan dalam kepemimpinan negara. Pada titik tersebut, kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai hak untuk memerintah, tetapi sebagai amanah untuk menjaga kehidupan bersama. Setiap kebijakan diarahkan bukan sekadar menyelesaikan persoalan hari ini, melainkan membangun masa depan bangsa. Kepemimpinan seperti inilah yang menjadi tujuan akhir proses pembentukan manusia dalam Sekolah Negarawan.

Menariknya, seluruh tahapan tersebut tidak bergerak dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas. Banyak negara berusaha melakukan perubahan melalui pergantian pemimpin, pergantian kabinet, ataupun pergantian undang-undang. Langkah-langkah tersebut memang penting, tetapi tidak pernah cukup apabila akar kehidupan bangsa tidak ikut berubah. Pemimpin yang baik dapat mempercepat perubahan, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi masyarakat yang sehat. Sebaliknya, masyarakat yang sehat pada akhirnya akan melahirkan pemimpin yang sehat. Oleh sebab itu, *Boot Sequence* Kebangkitan Bangsa selalu dimulai dari manusia, kemudian berkembang menjadi keluarga, masyarakat, *Root Users*, System Guardians, negarawan, dan akhirnya melahirkan Wali Raja sebagai pemimpin bangsa.

Urutan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perubahan tidak boleh melompati proses. Sebuah sistem komputer tidak dapat langsung menjalankan aplikasi sebelum *kernel* aktif dan seluruh komponen dasar berhasil diinisialisasi. Demikian pula Indonesia tidak dapat berharap memperoleh kepemimpinan yang

unggul apabila pembentukan manusia diabaikan. Bangsa tidak dapat mengharapkan pemerintahan yang bersih apabila budaya masyarakat masih mentoleransi penyimpangan. Bangsa juga tidak dapat berharap hadirnya negarawan apabila sistem pendidikan lebih banyak menghasilkan pencari pekerjaan daripada pembangun peradaban. Setiap tahapan memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan oleh tahapan lain.

Dalam kerangka tersebut, **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** merupakan pusat seluruh proses *boot sequence*. Seluruh nilai dasar kehidupan nasional bersumber dari Pancasila. Ketuhanan membentuk orientasi moral. Kemanusiaan membangun penghormatan terhadap martabat manusia. Persatuan menyatukan keberagaman menjadi kekuatan. Kerakyatan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan melalui hikmat kebijaksanaan. Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh penyelenggaraan negara. Apabila *kernel* tersebut aktif, seluruh proses kebangkitan bangsa memperoleh arah yang benar.

Berikutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan tata kelola yang memungkinkan nilai-nilai tersebut diterapkan secara nyata. Konstitusi mengatur hubungan antar-lembaga negara, pembagian kewenangan, perlindungan hak warga negara, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Namun sebagaimana *firmware* pada sebuah sistem digital, keberhasilan konstitusi sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya. Konstitusi yang baik tetap memerlukan negarawan yang

berintegritas agar mampu menghasilkan pemerintahan yang adil dan berpihak kepada rakyat.

Seluruh proses tersebut kemudian berjalan di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban menjadi ruang tempat seluruh nilai diterjemahkan ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Pendidikan, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, hukum, pemerintahan, teknologi, serta hubungan sosial seluruhnya merupakan bagian dari *operating system* tersebut. Ketika Peradaban Nusantara hidup dengan sehat, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang stabil, tetapi juga menjadi ruang yang mampu melahirkan manusia-manusia unggul secara berkelanjutan.

Dengan demikian, *Boot Sequence* Kebangkitan Bangsa bukanlah sekadar urutan konseptual, melainkan peta jalan pembangunan nasional. Seluruh pembahasan dalam buku ini sesungguhnya telah menyusun tahapan tersebut secara bertahap. Dimulai dari pembentukan manusia sebagai Khalifatullah, berkembang melalui keluarga dan masyarakat, diperkuat oleh *Root Users*, dijaga oleh System Guardians, diwujudkan melalui negarawan, dan mencapai puncaknya dalam kepemimpinan Wali Raja. Dari sanalah lahir Indonesia Baru yang tidak dibangun melalui perubahan simbol, melainkan melalui perubahan kualitas manusia dan sistem kehidupan nasional.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, *boot sequence* menghidupkan kembali fondasi-fondasi yang selama ini melemah agar bangsa kembali berjalan sesuai cita-cita kemerdekaan. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**,

tahapan tersebut membebaskan bangsa dari ketergantungan kepada perubahan yang bersifat sesaat dengan membangun ekosistem yang terus melahirkan pemimpin berkarakter. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, *boot sequence* memastikan bahwa seluruh proses pembangunan tidak berhenti pada keberhasilan pemerintahan, tetapi bermuara pada lahirnya Peradaban Nusantara yang semakin kuat, semakin bermartabat, dan semakin mampu memberikan kontribusi bagi kemanusiaan. Dengan memahami urutan tersebut, kebangkitan bangsa tidak lagi dipandang sebagai peristiwa yang bergantung pada satu generasi atau satu pemimpin, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang terus diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

28.4. Momentum Sejarah Indonesia

Perjalanan sebuah bangsa tidak berlangsung dalam ruang yang hampa. Setiap generasi selalu hidup di dalam momentum sejarahnya masing-masing. Ada masa ketika sebuah bangsa hanya berjuang mempertahankan keberadaan, ada masa ketika bangsa berusaha membangun kekuatan ekonomi, dan ada pula masa ketika seluruh tatanan dunia berubah sehingga menuntut cara berpikir yang sama sekali baru. Indonesia saat ini berada pada persimpangan sejarah yang sangat menentukan. Berbagai perubahan berlangsung secara bersamaan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan teknologi, pergeseran geopolitik, transformasi ekonomi global, krisis lingkungan, perkembangan kecerdasan buatan,

hingga perubahan karakter masyarakat terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Keadaan tersebut menjadikan masa kini bukan sekadar periode perubahan biasa, melainkan momentum sejarah yang akan menentukan arah Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.

Sepanjang sejarah kemerdekaan, Indonesia telah melewati berbagai fase penting. Masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan menuntut keberanian dan pengorbanan. Masa pembangunan menuntut stabilitas dan kerja keras. Masa reformasi menuntut keterbukaan dan demokratisasi. Setiap fase memiliki tantangan yang berbeda, sehingga setiap generasi dituntut melahirkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Tantangan yang dihadapi generasi sekarang memiliki karakter yang jauh lebih kompleks. Persoalan tidak lagi hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan global yang bergerak sangat cepat dan saling berkaitan.

Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu penanda terbesar perubahan zaman tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia memasuki revolusi yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Informasi bergerak melintasi batas negara dalam hitungan detik. Keputusan ekonomi dipengaruhi oleh algoritma. Interaksi sosial berlangsung melalui ruang digital. Bahkan kecerdasan buatan mulai mengambil alih berbagai pekerjaan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Perubahan seperti ini menghadirkan peluang yang sangat besar, tetapi sekaligus menghadirkan risiko yang

tidak kalah besar apabila bangsa tidak memiliki kesiapan menghadapi transformasi tersebut.

Pada titik inilah kualitas sumber daya manusia menjadi penentu utama masa depan Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah tidak lagi menjadi jaminan keberhasilan apabila bangsa tidak memiliki manusia yang mampu mengelola, mengembangkan, dan melindungi kekayaan tersebut. Bonus demografi yang selama ini sering disebut sebagai peluang emas dapat berubah menjadi beban apabila jutaan generasi muda tidak memperoleh pendidikan yang berkualitas, karakter yang kuat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Sebaliknya, bangsa yang mampu membangun manusia unggul akan tetap memiliki daya saing meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Perubahan geopolitik global juga menghadirkan tantangan baru. Persaingan antarnegara tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui penguasaan teknologi, energi, pangan, rantai pasok global, data, kecerdasan buatan, serta pengaruh budaya. Dalam situasi seperti itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar bagi produk-produk dunia ataupun menjadi penyedia bahan mentah. Indonesia harus mampu menjadi pelaku utama yang memiliki kemampuan menentukan arah pembangunan nasional berdasarkan kepentingan bangsa sendiri. Hal tersebut hanya dapat dicapai apabila Indonesia memiliki kepemimpinan yang memahami perubahan global tanpa kehilangan pijakan terhadap jati diri nasional.

Momentum sejarah tersebut juga menuntut perubahan cara memandang pembangunan. Selama bertahun-tahun pembangunan sering kali diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan investasi. Seluruh indikator tersebut memang penting, tetapi tidak cukup menggambarkan kualitas sebuah bangsa. Bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang memiliki jalan tol, gedung pencakar langit, ataupun kawasan industri modern. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu membangun manusia berintegritas, masyarakat yang saling percaya, hukum yang menghadirkan keadilan, pendidikan yang melahirkan kebijaksanaan, serta kepemimpinan yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah. Tanpa pembangunan manusia, seluruh pembangunan fisik hanya akan menghasilkan kemajuan yang rapuh.

Dalam konteks tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang sangat besar. Keberagaman budaya, kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, jumlah penduduk yang besar, serta sejarah panjang Peradaban Nusantara merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Namun seluruh potensi tersebut hanya akan menjadi kekuatan apabila mampu dikelola dalam satu arah pembangunan yang utuh. Bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan sumber daya, tetapi juga membutuhkan visi bersama yang mampu menyatukan seluruh potensi menuju tujuan yang sama.

Visi tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan pemerintahan lima tahunan. Momentum

sejarah yang sedang dihadapi Indonesia memerlukan pandangan jangka panjang yang melampaui pergantian pemimpin maupun pergantian pemerintahan. Karena itu, pembangunan bangsa harus kembali berpijak pada **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**. Pancasila menjadi sumber orientasi moral yang memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menghilangkan kemanusiaan, pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keadilan sosial, serta persaingan global tidak menghapus persatuan bangsa. Tanpa *kernel* yang kuat, kemajuan hanya akan menghasilkan percepatan tanpa arah.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** harus mampu menjadi perangkat yang menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Tata kelola pemerintahan perlu dibangun agar mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip negara hukum. Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan perangkat yang memastikan bahwa seluruh perubahan tetap berjalan dalam koridor keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Ketika *firmware* negara bekerja secara sehat, perubahan tidak berubah menjadi kekacauan, melainkan menjadi proses pembaruan yang tertata.

Di atas kedua fondasi tersebut, **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa** menjadi ruang tempat seluruh perubahan diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata. Peradaban Nusantara mengajarkan keseimbangan antara kemajuan dan kebijaksanaan, antara ilmu pengetahuan

dan akhlak, antara pembangunan material dan pembangunan spiritual. Nilai-nilai tersebut justru semakin relevan di tengah dunia yang bergerak semakin cepat. Bangsa yang kehilangan peradaban akan mudah kehilangan arah ketika menghadapi perubahan global. Sebaliknya, bangsa yang memiliki peradaban yang kuat mampu menerima kemajuan tanpa kehilangan identitasnya.

Momentum sejarah yang sedang dihadapi Indonesia juga merupakan momentum untuk melahirkan kepemimpinan baru. Dunia tidak lagi cukup dipimpin oleh administrator yang sekadar menjalankan rutinitas birokrasi ataupun politisi yang hanya memikirkan siklus pemilihan umum. Indonesia memerlukan negarawan yang mampu membaca perubahan global, memahami kebutuhan rakyat, menjaga identitas bangsa, serta berpikir dalam horizon lintas generasi. Dari negarawan seperti itulah akan lahir **Wali Raja**, yaitu pemimpin yang memandang kekuasaan sebagai amanah menjaga kehidupan bangsa dan Peradaban Nusantara.

Seluruh pembahasan dalam buku ini menunjukkan bahwa momentum sejarah tidak boleh disia-siakan. Tidak setiap generasi memperoleh kesempatan untuk menentukan arah perjalanan bangsanya. Generasi yang hidup pada masa perubahan besar memikul tanggung jawab yang jauh lebih berat dibandingkan generasi yang hidup pada masa stabil. Tanggung jawab tersebut bukan hanya memastikan Indonesia mampu bertahan menghadapi perubahan dunia, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia mampu

tampil sebagai bangsa yang memberi kontribusi bagi peradaban global melalui nilai-nilai, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan kemanusiaan.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, momentum sejarah merupakan kesempatan untuk memulihkan kembali orientasi pembangunan bangsa agar kembali berpijak pada nilai-nilai yang menjadi dasar kemerdekaan. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, momentum tersebut menjadi peluang membebaskan bangsa dari berbagai pola pikir dan sistem yang menghambat lahirnya kehidupan nasional yang adil, produktif, dan bermartabat. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, momentum sejarah menjadi panggilan untuk memastikan bahwa seluruh perubahan global justru memperkuat, bukan melemahkan, Peradaban Nusantara sebagai warisan yang harus dijaga oleh setiap generasi.

Pada akhirnya, setiap momentum sejarah selalu menghadirkan dua kemungkinan. Momentum dapat menjadi awal kebangkitan apabila mampu dibaca dengan benar, tetapi dapat pula berubah menjadi awal kemunduran apabila diabaikan. Indonesia saat ini memiliki seluruh syarat untuk menjadi bangsa yang besar. Yang diperlukan bukan sekadar keberanian menghadapi perubahan, melainkan kebijaksanaan untuk mengarahkan perubahan menuju cita-cita nasional. Ketika **Pancasila tetap menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi tetap bekerja sebagai *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara tetap menjadi *operating system* kehidupan berbangsa**, maka momentum sejarah yang sedang dihadapi tidak akan menjadi ancaman,

melainkan menjadi pintu masuk menuju lahirnya Indonesia Baru yang lebih berdaulat, lebih adil, lebih maju, dan lebih bermartabat di tengah peradaban dunia.

28.5. Indonesia Baru

Indonesia Baru bukanlah sebuah slogan kekuasaan, bukan pula sekadar istilah yang digunakan untuk membangkitkan optimisme sesaat. Indonesia Baru merupakan gambaran mengenai keadaan bangsa ketika seluruh unsur kehidupan nasional kembali bekerja sesuai tujuan pembentukannya. Indonesia Baru bukan dimulai dari perubahan nama negara, bukan pula dari pergantian simbol-simbol kenegaraan, melainkan dari pulihnya hubungan yang utuh antara manusia, negara, dan peradaban. Ketika hubungan tersebut kembali selaras, pembangunan tidak lagi bergerak secara parsial, tetapi menjadi proses yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan bangsa secara bersamaan.

Selama perjalanan buku ini telah dijelaskan bahwa bangsa yang kuat selalu dibangun dari manusia yang kuat. Karena itu, Indonesia Baru tidak diawali oleh perubahan lembaga negara, melainkan oleh lahirnya manusia-manusia yang memiliki kesadaran sebagai **Khalifatullah**. Kesadaran tersebut membentuk manusia yang memahami bahwa kehidupan bukan hanya ruang untuk memperoleh kekuasaan, kekayaan, ataupun kedudukan, melainkan amanah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi sesama. Dari manusia seperti inilah lahir keluarga yang sehat, masyarakat yang kuat,

budaya yang bermartabat, serta kepemimpinan yang menjadikan pengabdian sebagai orientasi utama.

Masyarakat yang dibangun di atas kesadaran tersebut akan melahirkan ***Root Users***, yaitu warga negara yang tidak sekadar menikmati hasil pembangunan, tetapi ikut menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa. *Root Users* memahami bahwa masa depan Indonesia tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah ataupun penyelenggara negara. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga arah perjalanan bangsa sesuai kemampuan masing-masing. Dari kesadaran kolektif seperti itu tumbuh masyarakat yang tidak mudah dipecah oleh perbedaan, tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sesaat, serta memiliki daya tahan yang kuat menghadapi berbagai perubahan zaman.

Keberadaan *Root Users* kemudian melahirkan **System Guardians** yang menjaga kesehatan sistem kehidupan nasional. Penjaga ilmu memastikan bahwa kemajuan pengetahuan tetap diarahkan untuk kepentingan bangsa. Penjaga spiritual menjaga agar pembangunan tidak kehilangan dimensi ketuhanan. Penjaga budaya menjaga agar modernisasi tidak memutus hubungan bangsa dengan akar peradabannya. Penjaga patriotisme memastikan bahwa seluruh kekuatan nasional tetap diabdikan bagi kepentingan Indonesia. Kehadiran para penjaga tersebut menciptakan keseimbangan yang membuat bangsa mampu berkembang tanpa kehilangan arah.

Dari lingkungan seperti itulah lahir negarawan. Negarawan memahami bahwa jabatan hanyalah sarana,

sedangkan tujuan sesungguhnya adalah menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa. Cara berpikir seorang negarawan selalu melampaui kepentingan penguasa jangka pendek. Setiap keputusan dipertimbangkan bukan hanya berdasarkan manfaat bagi masa pemerintahan yang sedang berjalan, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap generasi yang akan datang. Ketika seorang negarawan memperoleh amanah memimpin negara, kepemimpinan tersebut berkembang menjadi **Wali Raja**, yaitu kepemimpinan yang menjalankan kekuasaan sebagai amanah untuk menjaga manusia, negara, dan peradaban secara bersamaan.

Indonesia Baru tidak mungkin lahir apabila pembangunan hanya berpusat pada aspek material. Gedung-gedung dapat dibangun dalam waktu singkat, jalan raya dapat diperluas, pelabuhan dapat dimodernisasi, teknologi dapat dibeli, bahkan kecerdasan buatan dapat diadopsi dengan cepat. Namun seluruh kemajuan tersebut tidak akan menghasilkan bangsa yang besar apabila karakter manusia terus mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan Indonesia Baru bukan hanya meningkatnya pendapatan nasional ataupun pertumbuhan ekonomi, melainkan meningkatnya kualitas manusia Indonesia sebagai pusat seluruh pembangunan.

Dalam Indonesia Baru, pendidikan tidak lagi hanya berorientasi pada kelulusan akademik, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter, kebijaksanaan, kreativitas, dan tanggung jawab. Ilmu pengetahuan

dipandang sebagai jalan untuk memuliakan kehidupan, bukan sekadar alat memperoleh pekerjaan. Sekolah, perguruan tinggi, keluarga, tempat ibadah, serta seluruh ruang sosial bekerja bersama membentuk manusia yang memiliki integritas dan semangat pengabdian. Pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja, tetapi melahirkan pembangun peradaban.

Pada saat yang sama, politik kembali menemukan makna aslinya sebagai sarana mengelola kehidupan bersama. Politik tidak lagi dipahami sebagai arena perebutan kekuasaan tanpa batas, melainkan sebagai instrumen pelayanan kepada rakyat. Kekuasaan dijalankan dengan kesadaran bahwa setiap kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, kepada sejarah, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suasana seperti itu, kualitas demokrasi tidak lagi hanya diukur melalui prosedur pemilihan umum, tetapi juga melalui kemampuan melahirkan kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

Hukum dalam Indonesia Baru tidak berhenti pada kepastian prosedural, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan substantif. Penegakan hukum tidak tunduk kepada kekuatan kekuasaan ataupun kepentingan ekonomi. Seluruh warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kedudukan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum tumbuh karena hukum dijalankan sebagai instrumen keadilan, bukan sebagai alat mempertahankan kekuasaan.

Pembangunan ekonomi juga mengalami perubahan orientasi. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi keberhasilannya diukur dari kemampuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Kekayaan alam dikelola secara bertanggung jawab untuk kemakmuran bersama. Kemajuan industri berjalan berdampingan dengan pelestarian lingkungan. Inovasi teknologi diarahkan untuk memperkuat kemandirian nasional. Seluruh aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat martabat bangsa sebagai negara yang mampu berdiri di atas kemampuan sendiri.

Seluruh transformasi tersebut hanya dapat berlangsung apabila **Pancasila kembali hidup sebagai *kernel* bangsa**. Pancasila menjadi sumber nilai yang menghidupkan seluruh aspek kehidupan nasional. Nilai Ketuhanan menjadi fondasi moral. Nilai Kemanusiaan menjaga penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Nilai Persatuan mengikat keberagaman menjadi kekuatan bersama. Nilai Kerakyatan memastikan bahwa penyelenggaraan negara dilakukan melalui kebijaksanaan dan musyawarah. Nilai Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh pembangunan nasional. Ketika *kernel* tersebut benar-benar aktif, Indonesia tidak hanya memiliki arah pembangunan yang jelas, tetapi juga memiliki identitas yang kokoh di tengah perubahan dunia.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** memastikan bahwa seluruh nilai tersebut diterjemahkan ke dalam sistem penyelenggaraan negara yang tertib, transparan, akuntabel, dan berpihak

kepada kepentingan rakyat. Konstitusi bukan sekadar kumpulan pasal, tetapi menjadi perangkat yang menjaga agar kekuasaan selalu berada dalam koridor hukum dan keadilan. Tata kelola negara dibangun untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk memperbesar kekuasaan lembaga-lembaga negara.

Di atas fondasi tersebut berdiri **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara menjadi ruang tempat seluruh nilai diwujudkan dalam kehidupan nyata. Kemajuan teknologi berjalan bersama kebijaksanaan. Modernisasi berjalan bersama pelestarian budaya. Daya saing global berjalan bersama penguatan identitas nasional. Indonesia tidak menutup diri terhadap perubahan dunia, tetapi juga tidak kehilangan jati diri ketika memasuki era baru peradaban manusia. Peradaban Nusantara menjadi sumber inspirasi yang memungkinkan Indonesia memberikan kontribusi bagi dunia tanpa harus meniru seluruh cara hidup bangsa lain.

Indonesia Baru juga merupakan Indonesia yang mampu memandang masa depan dalam horizon lintas generasi. Setiap kebijakan tidak hanya dirancang untuk menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan kehidupan anak cucu pada masa yang akan datang. Cara berpikir jangka panjang tersebut menjadikan pembangunan tidak lagi terjebak dalam siklus kekuasaan lima tahunan, melainkan bergerak sebagai proyek peradaban yang terus diwariskan dari satu generasi kepada generasi

berikutnya. Dalam konteks inilah lahir kesinambungan antara Khalifatullah, *Root Users*, System Guardians, negarawan, dan Wali Raja sebagai satu ekosistem yang terus memperbarui kualitas bangsa secara berkelanjutan.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, Indonesia Baru merupakan keadaan ketika cita-cita kemerdekaan kembali menjadi arah pembangunan nasional. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, Indonesia Baru menghadirkan bangsa yang merdeka bukan hanya secara pemerintahan, tetapi juga merdeka dalam berpikir, berkarya, mengelola sumber daya, serta menentukan masa depannya sendiri. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, Indonesia Baru memastikan bahwa seluruh proses pembangunan bermuara pada terjaganya Peradaban Nusantara sebagai warisan luhur yang terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kemanusiaan.

Pada akhirnya, Indonesia Baru bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju peradaban yang semakin matang. Sebuah bangsa tidak pernah selesai dibangun karena setiap generasi akan menghadapi tantangan yang berbeda. Namun selama **Pancasila tetap menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi tetap bekerja sebagai *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara tetap hidup sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**, Indonesia akan selalu memiliki kemampuan untuk memperbarui dirinya tanpa kehilangan jati diri. Dari sanalah lahir harapan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi negara yang berhasil bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi menjadi

bangsa yang mampu memimpin melalui keteladanan, keadilan, kebijaksanaan, dan pengabdian bagi kemaslahatan seluruh umat manusia.

BAB 29
GEMAH RIPAH LOH JINAWI

29.1. Gemah Ripah Loh Jinawi: Filosofi Kemakmuran Nusantara

Setiap peradaban besar selalu memiliki gambaran mengenai kehidupan ideal yang ingin diwujudkan. Gambaran tersebut bukan sekadar cita-cita ekonomi, melainkan pandangan menyeluruh tentang bagaimana manusia seharusnya hidup, bekerja, memimpin, memanfaatkan alam, dan membangun hubungan dengan sesama. Dalam tradisi Nusantara, salah satu ungkapan yang paling dikenal untuk menggambarkan keadaan ideal tersebut adalah **Gemah Ripah Loh Jinawi**. Ungkapan ini telah diwariskan lintas generasi dan sering dipahami sebagai simbol negeri yang subur, makmur, serta penuh keberlimpahan. Namun apabila ditelaah lebih mendalam, makna Gemah Ripah Loh Jinawi jauh melampaui persoalan hasil panen atau kekayaan material. Ungkapan tersebut sesungguhnya merupakan visi tentang kehidupan yang harmonis antara manusia, negara, alam, dan Tuhan.

Secara etimologis, kata *gemah* menggambarkan keadaan yang melimpah, *ripah* menunjukkan kemakmuran yang merata, *loh* melambangkan kesuburan tanah yang terus memberikan kehidupan, sedangkan *jinawi* menggambarkan hasil yang berkembang dengan baik sehingga mampu menopang kesejahteraan masyarakat. Keempat unsur tersebut membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Kemakmuran tidak dipahami sebagai akumulasi

kekayaan pada segelintir orang, melainkan sebagai keadaan ketika seluruh kehidupan memperoleh ruang untuk tumbuh secara seimbang. Tanah memberikan hasil, manusia bekerja dengan penuh tanggung jawab, negara menjaga keadilan, dan masyarakat menikmati hasil pembangunan secara bersama-sama.

Cara pandang tersebut sangat berbeda dengan sebagian ukuran kemajuan ekonomi modern yang sering kali menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan utama. Banyak negara mengukur keberhasilan melalui peningkatan produk domestik bruto, besarnya investasi, tingginya konsumsi, ataupun pertumbuhan pasar modal. Seluruh indikator tersebut memang memiliki nilai penting sebagai alat ukur, tetapi tidak selalu menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat. Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara kesenjangan sosial semakin melebar. Pendapatan nasional dapat meningkat, tetapi kerusakan lingkungan terus meluas. Aktivitas industri dapat berkembang pesat, tetapi keluarga kehilangan ketahanan, budaya semakin terpinggirkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menurun. Dalam keadaan seperti itu, kemajuan ekonomi tidak selalu identik dengan kemakmuran.

Filosofi Gemah Ripah Loh Jinawi mengajarkan bahwa kemakmuran tidak pernah berdiri sendiri. Kemakmuran merupakan hasil dari keteraturan seluruh sistem kehidupan. Tanah yang subur memerlukan manusia yang mampu mengelola dengan bijaksana. Kekayaan alam memerlukan tata kelola yang adil. Perdagangan memerlukan kepercayaan. Inovasi

memerlukan pendidikan yang berkualitas. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketika salah satu unsur mengalami kerusakan, keseimbangan kehidupan perlahan ikut terganggu. Sebaliknya, ketika seluruh unsur bekerja secara harmonis, kemakmuran akan tumbuh sebagai akibat yang alami.

Pandangan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Indonesia Baru tidak dibangun semata-mata untuk menciptakan negara yang kuat, tetapi untuk menghadirkan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai manusia, negara, dan peradaban. Kemakmuran tidak lahir hanya karena kebijakan ekonomi yang tepat, tetapi juga karena kualitas manusia yang mengelola kehidupan bersama. Manusia yang memahami amanah sebagai **Khalifatullah** akan memandang kekayaan bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan titipan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi kemaslahatan seluruh makhluk.

Dalam perspektif tersebut, alam tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat dihabiskan tanpa batas. Alam merupakan bagian dari amanah peradaban yang harus dijaga keberlangsungannya. Hutan, sungai, laut, tanah, udara, dan seluruh kekayaan Nusantara bukan hanya sumber pendapatan negara, tetapi fondasi kehidupan generasi sekarang sekaligus hak generasi yang akan datang. Filosofi Gemah Ripah Loh Jinawi mengandung pesan bahwa keberlimpahan hanya dapat

bertahan apabila manusia menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Kemakmuran yang diperoleh melalui perusakan lingkungan pada akhirnya akan melahirkan kemiskinan baru dalam bentuk bencana, krisis pangan, dan hilangnya sumber kehidupan.

Karena itu, Gemah Ripah Loh Jinawi bukanlah konsep ekonomi yang hanya berbicara mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Filosofi tersebut merupakan gambaran mengenai tatanan kehidupan yang sehat. Dalam tatanan seperti itu, petani memperoleh penghormatan atas hasil kerja yang memberikan pangan bagi bangsa. Nelayan memperoleh perlindungan dalam menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Pelaku usaha memperoleh kepastian hukum sehingga mampu mengembangkan inovasi. Ilmuwan memperoleh ruang untuk menghasilkan pengetahuan baru. Generasi muda memperoleh pendidikan yang membangun karakter sekaligus keterampilan. Seluruh profesi memperoleh tempat yang terhormat karena setiap pekerjaan dipahami sebagai bagian dari pengabdian kepada kehidupan bersama.

Pandangan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila **Pancasila benar-benar hidup sebagai *kernel* bangsa**. Nilai Ketuhanan menjadi fondasi moral dalam mengelola kekayaan. Nilai Kemanusiaan memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan martabat manusia. Nilai Persatuan menjaga agar kekayaan nasional tidak menjadi sumber perpecahan. Nilai Kerakyatan memastikan bahwa kebijakan ekonomi lahir melalui kebijaksanaan yang berpihak kepada

kepentingan rakyat. Nilai Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh aktivitas ekonomi. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar kehidupan pemerintahan, tetapi juga menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi yang bermartabat.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** memberikan kerangka kelembagaan agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam tata kelola negara. Negara memiliki tanggung jawab mengatur agar kekayaan nasional dikelola secara adil, sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta kesempatan ekonomi terbuka bagi seluruh warga negara. Konstitusi memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata dikendalikan oleh kekuatan pasar ataupun kekuatan penguasa, tetapi selalu diarahkan kepada tujuan nasional sebagaimana dicita-citakan sejak awal kemerdekaan.

Seluruh proses tersebut berlangsung di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara mengajarkan bahwa hubungan antara manusia dan alam dibangun atas dasar keseimbangan, bukan dominasi. Hubungan antara manusia dan negara dibangun atas dasar amanah, bukan ketakutan. Hubungan antarmanusia dibangun atas dasar gotong royong, bukan persaingan yang saling menghancurkan. Nilai-nilai tersebut telah hidup dalam berbagai tradisi Nusantara jauh sebelum lahirnya negara modern. Oleh sebab itu, Gemah Ripah Loh Jinawi bukan konsep yang asing bagi masyarakat Indonesia, melainkan bagian dari

memori peradaban yang telah mengakar selama berabad-abad.

Dalam konteks Indonesia Baru, filosofi Gemah Ripah Loh Jinawi memperoleh makna yang semakin luas. Kemakmuran tidak lagi hanya diukur dari banyaknya hasil bumi, tetapi juga dari kualitas manusia yang mengelola hasil bumi tersebut. Kemajuan tidak lagi hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tumbuhnya kepercayaan sosial, tegaknya keadilan hukum, berkembangnya ilmu pengetahuan, kuatnya ketahanan keluarga, lestarinya lingkungan, serta hadirnya kepemimpinan yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Dengan kata lain, kemakmuran dipahami sebagai keadaan ketika seluruh unsur kehidupan berkembang secara harmonis.

Pandangan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap cara berpikir yang memisahkan ekonomi dari moralitas. Ketika ekonomi dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan, kekayaan mudah berubah menjadi alat penindasan. Ketika pembangunan dipisahkan dari keadilan, kemajuan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Ketika eksploitasi sumber daya alam dipisahkan dari tanggung jawab antargenerasi, keberlimpahan hari ini dapat berubah menjadi krisis pada masa depan. Filosofi Gemah Ripah Loh Jinawi justru mengajarkan bahwa keberlimpahan sejati hanya dapat bertahan apabila dibangun di atas keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara pemanfaatan dan pelestarian.

Pada akhirnya, Gemah Ripah Loh Jinawi bukan sekadar ungkapan budaya ataupun romantisme masa lalu. Filosofi tersebut merupakan visi ekonomi Peradaban Nusantara yang tetap relevan menghadapi tantangan abad ke-21. Ketika **Pancasila menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi menjadi *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara menjadi *operating system* kehidupan berbangsa**, kemakmuran tidak lagi dipahami sebagai penumpukan kekayaan, melainkan sebagai keadaan ketika manusia hidup bermartabat, negara menjalankan amanah dengan adil, alam tetap lestari, dan seluruh rakyat memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh serta berkembang. Itulah makna terdalam Gemah Ripah Loh Jinawi sebagai cita-cita kesejahteraan Indonesia Baru.

29.2. Kemakmuran adalah Akibat, Bukan Tujuan

Salah satu kekeliruan paling mendasar dalam cara berpikir pembangunan modern adalah menempatkan kemakmuran sebagai tujuan yang harus dikejar dengan segala cara. Pertumbuhan ekonomi kemudian dijadikan ukuran utama keberhasilan negara. Produk domestik bruto meningkat dianggap sebagai tanda kemajuan, investasi yang besar dipandang sebagai keberhasilan, sementara tingginya konsumsi sering dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat. Cara pandang tersebut memang mampu menghasilkan berbagai capaian ekonomi, tetapi tidak selalu mampu menghadirkan kehidupan yang benar-benar sejahtera. Di banyak negara, pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan meningkatnya kesenjangan sosial,

kerusakan lingkungan, melemahnya institusi keluarga, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemakmuran material tidak selalu identik dengan kemakmuran kehidupan.

Buku ini memandang persoalan tersebut dari sudut yang berbeda. Kemakmuran bukanlah titik awal pembangunan, melainkan hasil akhir dari sebuah tata kehidupan yang benar. Sebagaimana buah tidak pernah menjadi penyebab tumbuhnya pohon, kemakmuran juga bukan penyebab lahirnya negara yang kuat. Pohon menghasilkan buah karena akar menyerap air dengan baik, batang tumbuh kokoh, daun menjalankan fungsinya, dan seluruh bagian bekerja secara harmonis. Apabila akar rusak, batang rapuh, atau tanah kehilangan kesuburan, buah tidak akan muncul meskipun seluruh perhatian diarahkan kepada cabang dan ranting. Demikian pula sebuah bangsa. Kemakmuran akan tumbuh secara alami apabila manusia, negara, dan peradaban berada dalam keadaan yang sehat.

Karena itu, pembahasan mengenai ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai manusia. Seluruh perjalanan buku ini sejak bab pertama telah menunjukkan bahwa kualitas sebuah negara selalu mengikuti kualitas manusia yang membangunnya. Manusia yang memahami amanah sebagai **Khalifatullah** akan bekerja bukan semata-mata untuk mengumpulkan kekayaan pribadi, tetapi juga untuk menghadirkan manfaat bagi kehidupan bersama. Cara berpikir tersebut melahirkan etos kerja, tanggung

jawab, kejujuran, disiplin, inovasi, serta kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi yang sesungguhnya dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebaliknya, apabila manusia kehilangan integritas, kemakmuran yang berhasil dicapai sering kali hanya bersifat sementara. Korupsi berkembang, penyalahgunaan kewenangan menjadi kebiasaan, kepercayaan masyarakat menurun, investasi produktif berkurang, biaya ekonomi meningkat, dan pada akhirnya produktivitas nasional ikut melemah. Dalam keadaan seperti itu, negara dapat saja memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi kekayaan tersebut tidak pernah benar-benar berubah menjadi kesejahteraan rakyat. Persoalan utama bukan terletak pada kurangnya kekayaan, melainkan pada rusaknya fondasi moral yang mengelola kekayaan tersebut.

Hal yang sama berlaku terhadap sistem ketatanegaraan. Tata negara yang sehat akan melahirkan kepastian hukum, stabilitas kelembagaan, serta kepercayaan publik. Seluruh kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi secara alami. Pelaku usaha berani berinvestasi karena memperoleh kepastian hukum. Inovasi berkembang karena hasil karya memperoleh perlindungan. Dunia pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan. Infrastruktur dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan kekuasaan. Dalam suasana seperti itu, pertumbuhan ekonomi bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, tetapi

menjadi konsekuensi logis dari sistem yang bekerja dengan baik.

Sebaliknya, apabila negara dibangun di atas tata kelola yang lemah, pembangunan ekonomi akan selalu menghadapi hambatan. Ketidakpastian hukum meningkatkan risiko usaha. Birokrasi yang tidak efisien memperbesar biaya produksi. Korupsi mengurangi efektivitas anggaran negara. Kebijakan yang berubah-ubah menurunkan kepercayaan dunia usaha. Seluruh kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi bukanlah sektor yang berdiri sendiri. Ekonomi selalu dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, kualitas kepemimpinan, serta kualitas budaya masyarakat.

Karena itu, kemakmuran sesungguhnya merupakan akibat dari bekerjanya seluruh sistem kehidupan secara harmonis. Ketika keluarga berhasil membangun karakter yang kuat, masyarakat menjadi produktif. Ketika masyarakat produktif, lahirlah ***Root Users*** yang memiliki kesadaran menjaga kehidupan bersama. *Root Users* kemudian melahirkan **System Guardians** yang memastikan ilmu pengetahuan, budaya, spiritualitas, dan patriotisme tetap menjadi penyangga pembangunan bangsa. Dari ekosistem tersebut tumbuh negarawan yang menjalankan negara berdasarkan kepentingan rakyat, dan pada akhirnya lahir kepemimpinan **Wali Raja** yang memandang kekuasaan sebagai amanah. Dalam kondisi seperti itulah kemakmuran berkembang sebagai hasil alami, bukan sebagai proyek yang dipaksakan.

Cara berpikir tersebut sekaligus menjelaskan mengapa negara-negara yang memiliki kekayaan alam

melimpah belum tentu menjadi negara yang makmur. Kekayaan sumber daya hanyalah potensi. Potensi memerlukan manusia yang berkualitas, sistem yang sehat, serta kepemimpinan yang benar agar berubah menjadi kesejahteraan. Sebaliknya, banyak negara yang memiliki sumber daya alam terbatas justru mampu mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi karena berhasil membangun kualitas manusia, tata kelola, dan budaya kerja yang unggul. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa akar kemakmuran bukanlah kekayaan alam, melainkan kualitas peradaban.

Dalam konteks Indonesia, pandangan tersebut memiliki arti yang sangat penting. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, posisi geografis yang strategis, jumlah penduduk yang besar, serta keberagaman budaya yang menjadi modal sosial yang sangat kuat. Namun seluruh potensi tersebut hanya akan menghasilkan kemakmuran apabila dikelola melalui sistem yang benar. Indonesia tidak memerlukan perubahan arah pembangunan yang hanya berfokus pada angka-angka statistik ekonomi, tetapi memerlukan perubahan paradigma yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Ketika manusia berkembang, produktivitas meningkat. Ketika produktivitas meningkat, kesejahteraan tumbuh. Ketika kesejahteraan tumbuh secara merata, stabilitas nasional ikut menguat. Seluruh proses tersebut membentuk lingkaran kebajikan yang memperkuat bangsa dari waktu ke waktu.

Dalam kerangka tersebut, **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** menjadi sumber nilai yang mengarahkan

seluruh aktivitas ekonomi. Ketuhanan memberikan dimensi moral terhadap aktivitas produksi dan perdagangan. Kemanusiaan memastikan bahwa pembangunan menghormati martabat setiap manusia. Persatuan menjaga agar kekayaan nasional menjadi kekuatan bersama, bukan sumber konflik. Kerakyatan mengarahkan kebijakan ekonomi melalui kebijaksanaan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Keadilan Sosial menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan nasional yang bermartabat.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel. Negara berkewajiban menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, mengelola kekayaan nasional secara bertanggung jawab, serta membangun iklim yang mendorong lahirnya kreativitas dan produktivitas. Ketika *firmware* negara bekerja dengan baik, aktivitas ekonomi berkembang di atas fondasi yang kokoh, bukan di atas praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik.

Di atas seluruh fondasi tersebut berdiri **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara mengajarkan bahwa bekerja merupakan bentuk pengabdian, berdagang harus dilandasi kejujuran, mengelola kekayaan harus disertai tanggung jawab, dan memperoleh keuntungan harus tetap memperhatikan keseimbangan sosial serta kelestarian alam. Nilai-nilai tersebut menjadikan

ekonomi bukan sekadar aktivitas mencari laba, tetapi bagian dari pembangunan kehidupan yang utuh. Ketika nilai-nilai tersebut hidup dalam masyarakat, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka yang lebih besar, tetapi juga menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik.

Pandangan bahwa kemakmuran adalah akibat, bukan tujuan, juga memberikan pelajaran penting bagi arah pembangunan Indonesia Baru. Negara tidak perlu mengejar kemakmuran melalui jalan pintas yang mengorbankan masa depan. Negara justru perlu memperbaiki fondasi kehidupan bangsa. Bangun manusia yang berkarakter, tegakkan hukum yang berkeadilan, kuatkan keluarga, tingkatkan kualitas pendidikan, pelihara kepercayaan sosial, dan hadirkan kepemimpinan yang amanah. Ketika seluruh fondasi tersebut bekerja secara harmonis, kemakmuran akan hadir sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, kemakmuran lahir ketika fondasi kehidupan bangsa dipulihkan sesuai cita-cita kemerdekaan. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, kemakmuran tumbuh karena rakyat memperoleh ruang untuk berkarya, berinovasi, dan mengembangkan potensi tanpa dibelenggu oleh sistem yang menghambat. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang melalui pengelolaan sumber daya yang adil, bijaksana, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Gemah Ripah Loh Jinawi bukanlah hasil dari pengejaran kekayaan semata,

melainkan buah dari sebuah bangsa yang berhasil menata manusia, negara, dan peradabannya secara benar.

29.3. Negara sebagai Pengelola Amanah Kekayaan

Setiap bangsa yang dikaruniai kekayaan alam selalu dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar yaitu siapakah sesungguhnya pemilik kekayaan tersebut? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawaban yang diberikan akan menentukan arah pembangunan sebuah negara. Apabila negara menganggap dirinya sebagai pemilik seluruh kekayaan nasional, maka kekuasaan cenderung berkembang menjadi alat untuk menguasai sumber daya. Sebaliknya, apabila kekayaan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa tanggung jawab negara, maka penguasaan sumber daya berpotensi berpindah kepada kelompok-kelompok yang memiliki modal paling besar. Kedua cara pandang tersebut sama-sama berisiko menjauhkan rakyat dari tujuan utama pembentukan negara, yaitu menghadirkan keadilan dan kemakmuran bersama.

Buku ini memandang persoalan tersebut melalui paradigma yang berbeda. Negara bukanlah pemilik kekayaan bangsa. Negara adalah **pengelola amanah kekayaan**. Kekayaan alam bukan diciptakan oleh negara, bukan pula dihasilkan oleh pemerintah. Seluruh kekayaan yang terdapat di bumi Nusantara telah ada jauh sebelum lahirnya negara modern. Gunung, hutan, sungai, laut, tanah, udara, minyak bumi, gas alam, mineral, hingga keanekaragaman hayati merupakan

karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diwariskan kepada bangsa Indonesia untuk dipelihara dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, negara tidak memiliki hak moral untuk memperlakukan kekayaan tersebut sebagai milik kekuasaan, melainkan berkewajiban mengelolanya sebagai amanah bagi seluruh rakyat.

Cara pandang tersebut sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak seharusnya dipahami sebagai legitimasi kepemilikan negara atas seluruh sumber daya. Frasa "dikuasai oleh negara" lebih tepat dipahami sebagai pemberian mandat kepada negara untuk mengatur, melindungi, mengelola, dan memastikan bahwa seluruh kekayaan nasional benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, negara menjalankan fungsi pengelolaan, sedangkan tujuan akhirnya tetap bermuara pada kemakmuran rakyat.

Pandangan tersebut menjadi semakin kuat apabila dikaitkan dengan konsep **Khalifatullah** yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Seorang khalifah tidak pernah dipahami sebagai pemilik bumi, melainkan sebagai penjaga amanah yang bertanggung jawab memakmurkan kehidupan tanpa merusak keseimbangannya. Prinsip yang sama berlaku dalam penyelenggaraan negara. Negara hadir bukan untuk memiliki sumber daya, tetapi untuk menjaga agar

sumber daya dikelola secara adil, produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, negara sesungguhnya menjalankan amanah kolektif seluruh bangsa.

Cara pandang sebagai pengelola amanah juga mengubah orientasi pembangunan ekonomi. Kekayaan alam tidak lagi dipandang sebagai objek yang harus dieksploitasi secepat mungkin demi mengejar pertumbuhan jangka pendek. Sebaliknya, kekayaan alam diperlakukan sebagai modal peradaban yang harus dijaga agar tetap memberikan manfaat lintas generasi. Setiap keputusan mengenai pengelolaan hutan, pertambangan, energi, perikanan, pertanian, maupun sumber daya lainnya harus mempertimbangkan bukan hanya keuntungan ekonomi hari ini, tetapi juga keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Amanah tidak pernah berhenti pada kepentingan satu generasi, melainkan mencakup seluruh perjalanan bangsa.

Dalam kerangka tersebut, keberhasilan negara tidak diukur dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam, tetapi dari seberapa besar nilai tambah yang berhasil diciptakan bagi masyarakat. Kekayaan mineral tidak cukup hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Kekayaan pertanian tidak cukup hanya menghasilkan komoditas primer. Kekayaan laut tidak cukup hanya diukur dari banyaknya hasil tangkapan. Negara yang menjalankan amanah dengan benar akan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, serta inovasi

sehingga setiap sumber daya mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi rakyat.

Negara sebagai pengelola amanah juga berkewajiban memastikan bahwa manfaat kekayaan nasional tidak berhenti pada kelompok tertentu. Kemakmuran tidak boleh terkonsentrasi hanya pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah lain tertinggal. Pembangunan harus mampu menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh daerah, baik kawasan perkotaan maupun pedesaan, wilayah barat maupun timur Indonesia. Prinsip tersebut bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan konsekuensi dari amanah yang melekat pada negara. Amanah selalu mengandung kewajiban untuk menghadirkan keadilan.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, pengelolaan amanah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kehadiran ***Root Users*** menjadi fondasi penting dalam menjaga agar pengelolaan kekayaan nasional tetap berada pada jalur yang benar. *Root Users* merupakan warga negara yang memiliki kesadaran untuk mengawasi, menjaga, dan mengembangkan kehidupan bersama tanpa didorong oleh kepentingan pribadi semata. Kesadaran tersebut kemudian diperkuat oleh **System Guardians** yang memastikan bahwa ilmu pengetahuan, budaya, spiritualitas, patriotisme, dan etika tetap menjadi penuntun dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan bangsa tidak hanya

diawasi melalui mekanisme hukum, tetapi juga melalui budaya moral yang tumbuh di tengah masyarakat.

Pada tingkat kepemimpinan nasional, negarawan memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Seorang negarawan tidak memandang kekayaan negara sebagai sumber kekuasaan pemerintahan, tetapi sebagai sarana membangun kesejahteraan rakyat. Ketika kepemimpinan berkembang menjadi **Wali Raja**, amanah tersebut mencapai bentuk yang paling utuh. Seluruh kebijakan ekonomi diarahkan bukan untuk memperbesar kekuasaan negara ataupun memperkaya kelompok tertentu, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan Peradaban Nusantara.

Pandangan tersebut sekaligus membedakan Indonesia Baru dari berbagai pendekatan ekonomi yang hanya berpusat pada kepemilikan negara ataupun dominasi pasar. Negara tidak mengambil alih seluruh aktivitas ekonomi sehingga mematikan kreativitas masyarakat. Negara juga tidak melepaskan seluruh pengelolaan kepada mekanisme pasar sehingga mengabaikan tanggung jawab sosial. Negara hadir sebagai pengelola amanah yang menciptakan ekosistem sehat agar masyarakat dapat berkarya, berinovasi, berusaha, dan berkembang dalam suasana yang adil. Peran negara adalah memastikan bahwa setiap pelaku ekonomi memperoleh kesempatan yang setara, perlindungan hukum yang memadai, serta akses terhadap sumber daya yang menjadi milik bersama bangsa.

Dalam kerangka tersebut, **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** memberikan arah moral bagi seluruh pengelolaan kekayaan nasional. Ketuhanan mengingatkan bahwa seluruh kekayaan pada hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya selalu menghormati martabat manusia. Persatuan menjaga agar kekayaan nasional menjadi perekat bangsa, bukan sumber konflik. Kerakyatan memastikan bahwa kebijakan ekonomi disusun melalui kebijaksanaan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh proses pengelolaan kekayaan nasional. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi kompas moral dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan perangkat kelembagaan agar amanah tersebut dapat dijalankan secara konsisten. Konstitusi mengatur kewenangan negara, melindungi hak-hak rakyat, mengarahkan pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum. *Firmware* yang sehat memungkinkan negara menjalankan amanah secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat terus tumbuh.

Seluruh proses tersebut berlangsung di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara sejak dahulu mengenal hubungan yang harmonis antara

manusia dan alam. Tanah dipelihara agar tetap subur. Hutan dijaga sebagai sumber kehidupan. Laut dihormati sebagai ruang penghidupan. Air dipelihara sebagai sumber keberlangsungan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kekayaan alam selalu dipahami sebagai titipan yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik kepada generasi berikutnya. Peradaban seperti inilah yang perlu dihidupkan kembali dalam Indonesia Baru.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, negara sebagai pengelola amanah berarti mengembalikan pengelolaan kekayaan nasional kepada tujuan konstitusional, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, pengelolaan amanah membebaskan bangsa dari ketergantungan terhadap eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan mendorong lahirnya ekonomi yang produktif serta mandiri. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, amanah tersebut memastikan bahwa seluruh kekayaan Nusantara tetap terpelihara sebagai modal peradaban yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pada akhirnya, negara yang memahami dirinya sebagai pengelola amanah akan memandang setiap gunung, hutan, sungai, laut, ladang, tambang, dan setiap jengkal tanah Nusantara bukan sebagai objek kekuasaan, melainkan sebagai titipan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ketika **Pancasila menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi menjadi *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara menjadi *operating system* kehidupan berbangsa**, maka pengelolaan

kekayaan nasional tidak lagi berorientasi pada penguasaan, melainkan pada pemeliharaan, pemberdayaan, dan pemerataan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, hari ini maupun pada masa-masa yang akan datang.

29.4. Negara sebagai Arsitek Ekosistem Ekonomi



Perdebatan mengenai peran negara dalam perekonomian telah berlangsung selama berabad-abad. Sebagian pandangan menempatkan negara sebagai pelaku utama yang menguasai hampir seluruh aktivitas ekonomi. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menghendaki agar negara sebisa mungkin mengurangi campur tangan dan menyerahkan seluruh dinamika ekonomi kepada mekanisme pasar. Kedua pendekatan tersebut telah melahirkan berbagai keberhasilan

sekaligus berbagai persoalan di banyak negara. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara yang terlalu dominan sering kali menghambat kreativitas masyarakat, sedangkan negara yang terlalu pasif berpotensi membiarkan ketimpangan berkembang tanpa kendali. Indonesia Baru memerlukan pendekatan yang berbeda, yaitu negara sebagai **arsitek ekosistem ekonomi**.

Seorang arsitek tidak membangun seluruh isi bangunan seorang diri. Arsitek merancang struktur, menentukan fondasi, memastikan setiap bagian saling terhubung, serta menciptakan ruang yang memungkinkan seluruh penghuni menjalankan fungsinya secara optimal. Prinsip yang sama berlaku dalam penyelenggaraan negara. Negara tidak harus menjadi pelaku utama dalam setiap aktivitas ekonomi, tetapi berkewajiban merancang ekosistem yang sehat sehingga masyarakat, dunia usaha, koperasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan seluruh pelaku ekonomi dapat berkembang secara produktif. Keberhasilan negara bukan diukur dari seberapa banyak perusahaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan seluruh potensi bangsa tumbuh bersama.

Cara pandang tersebut berangkat dari keyakinan bahwa kekuatan ekonomi sesungguhnya berada pada masyarakat. Kreativitas, inovasi, kerja keras, keberanian mengambil risiko, kemampuan membaca peluang, serta semangat menciptakan nilai tambah lahir dari manusia-manusia yang memperoleh ruang untuk berkembang. Negara tidak dapat menggantikan kreativitas tersebut,

tetapi negara dapat menciptakan kondisi yang membuat kreativitas tumbuh subur. Kepastian hukum, birokrasi yang sederhana, pendidikan yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, perlindungan hak milik, akses terhadap pembiayaan, dan iklim persaingan yang sehat merupakan bagian dari rancangan ekosistem yang menjadi tanggung jawab negara.

Dalam kerangka tersebut, negara tidak diposisikan sebagai pesaing masyarakat. Negara juga tidak hadir sekadar sebagai penonton yang membiarkan seluruh dinamika ekonomi berjalan tanpa arah. Negara berfungsi sebagai pengarah, penghubung, pelindung, sekaligus katalisator yang memastikan seluruh unsur ekonomi bergerak menuju tujuan nasional. Ketika sebuah sektor mengalami hambatan, negara hadir membantu membuka jalan. Ketika terjadi ketimpangan, negara memperbaiki keseimbangan. Ketika inovasi memerlukan dukungan, negara menyediakan ruang agar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang lebih cepat. Dengan demikian, hubungan antara negara dan masyarakat bersifat saling menguatkan, bukan saling menggantikan.

Peran sebagai arsitek juga menuntut kemampuan melihat pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Ekonomi bukan sekadar persoalan perdagangan atau investasi. Produktivitas nasional dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, stabilitas hukum, budaya kerja, perkembangan teknologi, hingga kualitas kepemimpinan. Negara yang hanya berfokus pada satu sektor akan kesulitan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebaliknya, negara

yang mampu menyusun hubungan antarsektor secara harmonis akan melahirkan daya saing yang jauh lebih kuat. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari pembangunan manusia dan pembangunan kelembagaan.

Dalam Indonesia Baru, pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian utama dari arsitektur ekonomi nasional. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai sektor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan produktivitas bangsa. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga melahirkan inovasi. Dunia penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi menghasilkan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia industri. Pelatihan vokasi berkembang mengikuti kebutuhan zaman sehingga setiap warga negara memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan sepanjang hayat. Ketika manusia berkembang, kapasitas ekonomi bangsa ikut meningkat secara alami.

Arsitektur ekonomi juga harus mampu menghubungkan potensi daerah dengan kebutuhan nasional. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki keunggulan yang berbeda, baik dalam bidang pertanian, perikanan, industri, pariwisata, energi, maupun ekonomi kreatif. Negara berkewajiban menyusun keterhubungan antardaerah sehingga seluruh potensi tersebut saling melengkapi, bukan saling bersaing secara tidak sehat. Infrastruktur transportasi, jaringan logistik, konektivitas digital, dan

integrasi pasar menjadi bagian dari rancangan besar yang memungkinkan seluruh wilayah berkembang secara seimbang.

Di tengah perubahan global, peran negara sebagai arsitek menjadi semakin penting. Perkembangan kecerdasan buatan, ekonomi digital, transisi energi, industri hijau, bioteknologi, dan otomasi akan mengubah struktur ekonomi dunia secara mendasar. Negara tidak cukup hanya bereaksi terhadap perubahan tersebut. Negara perlu membaca arah perkembangan masa depan dan menyiapkan ekosistem yang memungkinkan masyarakat beradaptasi. Pendidikan diperbarui, regulasi disesuaikan, riset diperkuat, dan inovasi didorong agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta nilai di era baru peradaban.

Pandangan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan konsep ***Root Users*** dan **System Guardians** yang telah dibahas sebelumnya. *Root Users* menjadi fondasi sosial yang menjaga etika, produktivitas, dan semangat gotong royong dalam kehidupan ekonomi. System Guardians memastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak kehilangan arah karena tetap dituntun oleh ilmu pengetahuan, nilai spiritual, budaya, dan patriotisme. Dengan fondasi tersebut, pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat karakter bangsa.

Pada tingkat kepemimpinan nasional, negarawan berperan menyusun visi pembangunan yang melampaui kepentingan jangka pendek. Seorang negarawan memahami bahwa keberhasilan ekonomi

tidak dapat dibangun hanya melalui proyek-proyek yang menghasilkan manfaat sesaat. Diperlukan keberanian membangun fondasi yang mungkin baru memberikan hasil pada generasi berikutnya. Ketika kepemimpinan berkembang menjadi **Wali Raja**, seluruh kebijakan ekonomi diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan, keadilan, keberlanjutan, dan kemanusiaan. Kekuasaan tidak digunakan untuk mengendalikan pasar demi kepentingan penguasa, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh ekosistem ekonomi tetap sehat dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Seluruh arsitektur tersebut memperoleh arah dari **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**. Nilai Ketuhanan menjaga agar aktivitas ekonomi tidak kehilangan dimensi moral. Nilai Kemanusiaan memastikan bahwa pembangunan menghormati martabat setiap pekerja, pelaku usaha, dan konsumen. Nilai Persatuan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nilai Kerakyatan mengarahkan kebijakan ekonomi melalui musyawarah dan kebijaksanaan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Nilai Keadilan Sosial menjadi ukuran keberhasilan seluruh rancangan ekonomi nasional. Dengan demikian, *kernel* bangsa memastikan bahwa ekosistem ekonomi tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan bermartabat.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan kerangka kelembagaan yang memungkinkan arsitektur tersebut berjalan secara konsisten. Kepastian hukum, pembagian kewenangan

yang jelas, perlindungan hak-hak masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel menjadi perangkat yang menjaga agar pembangunan ekonomi tidak bergantung pada pergantian pemerintahan ataupun perubahan kepentingan. *Firmware* yang kuat menciptakan stabilitas yang diperlukan oleh masyarakat untuk bekerja, berinvestasi, berinovasi, dan membangun masa depan.

Semua itu berlangsung di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara mengajarkan bahwa gotong royong lebih kuat daripada persaingan yang saling melemahkan, bahwa keberhasilan individu memiliki makna ketika ikut mengangkat kehidupan bersama, dan bahwa kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan kelestarian alam serta keharmonisan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadikan pembangunan ekonomi Indonesia tidak kehilangan identitas di tengah arus globalisasi. Modernisasi diterima, tetapi tidak menghapus jati diri bangsa.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, negara sebagai arsitek ekosistem ekonomi berarti membangun kembali fondasi kelembagaan yang mampu menghidupkan seluruh potensi bangsa secara adil dan produktif. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, negara menciptakan ruang yang membebaskan masyarakat untuk berkarya, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah tanpa terhambat oleh sistem yang tidak sehat. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, seluruh rancangan pembangunan diarahkan agar kekayaan alam, budaya, dan manusia Indonesia berkembang

secara berkelanjutan sebagai bagian dari Peradaban Nusantara.

Pada akhirnya, negara yang berperan sebagai arsitek tidak diingat karena besarnya campur tangan terhadap kehidupan ekonomi, melainkan karena kemampuannya menghadirkan ekosistem yang membuat masyarakat mampu berkembang dengan kekuatannya sendiri. Ketika **Pancasila menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi menjadi *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara menjadi *operating system* kehidupan berbangsa**, negara tidak lagi dipahami sebagai pusat seluruh aktivitas ekonomi, melainkan sebagai perancang tata kehidupan yang memungkinkan setiap warga negara tumbuh, berkarya, berinovasi, dan bersama-sama mewujudkan cita-cita **Gemah Ripah Loh Jinawi**.

29.5. Kedaulatan Ekonomi dalam Era Global

Abad ke-21 menghadirkan perubahan yang jauh lebih cepat dibandingkan seluruh periode sebelumnya dalam sejarah manusia. Perkembangan kecerdasan buatan, komputasi awan, robotika, bioteknologi, energi terbarukan, ekonomi digital, hingga penguasaan data telah mengubah cara bangsa-bangsa membangun kekuatan ekonomi. Persaingan tidak lagi hanya terjadi dalam perdagangan barang, tetapi juga dalam penguasaan teknologi, inovasi, sumber daya strategis, rantai pasok global, bahkan kemampuan mengendalikan arus informasi. Dalam situasi seperti itu, sebuah negara tidak cukup hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Diperlukan kemampuan

membangun kedaulatan ekonomi agar bangsa tetap mampu menentukan arah masa depannya sendiri.

Kedaulatan ekonomi sering dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan nasional tanpa bergantung kepada bangsa lain. Pengertian tersebut memang memiliki nilai penting, tetapi dalam konteks globalisasi makna kedaulatan ekonomi jauh lebih luas. Tidak ada negara yang sepenuhnya dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan dunia internasional. Perdagangan antarnegara, investasi lintas batas, pertukaran ilmu pengetahuan, kerja sama teknologi, hingga integrasi rantai pasok telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi modern. Oleh sebab itu, kedaulatan ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memiliki kemampuan menentukan kepentingan nasional secara merdeka di tengah keterhubungan global.

Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk membangun kedaulatan tersebut. Letak geografis yang berada pada jalur perdagangan dunia, jumlah penduduk yang besar, kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, potensi energi, serta bonus demografi merupakan modal yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Namun seluruh potensi tersebut hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola melalui visi yang jelas. Tanpa arah pembangunan yang tepat, kekayaan alam hanya menjadi bahan baku bagi industri negara lain, sementara Indonesia tetap berada pada posisi sebagai pemasok komoditas bernilai rendah. Sebaliknya, dengan strategi yang tepat, seluruh kekayaan tersebut dapat menjadi fondasi bagi lahirnya

industri, teknologi, dan inovasi yang memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Perubahan terbesar pada era ini bukan hanya terjadi pada komoditas, melainkan pada pengetahuan. Nilai ekonomi semakin banyak dihasilkan oleh kemampuan menciptakan teknologi, mengolah data, membangun sistem, serta menghasilkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia saat ini memperoleh nilai yang sangat tinggi bukan semata-mata karena memiliki tambang, lahan pertanian, atau pabrik yang luas, tetapi karena menguasai ilmu pengetahuan, perangkat lunak, algoritma, desain produk, jaringan digital, dan ekosistem inovasi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kekayaan masa depan tidak lagi hanya berada di bawah permukaan bumi, tetapi juga berada di dalam kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, Indonesia Baru tidak boleh membangun ekonomi hanya berdasarkan eksploitasi sumber daya alam. Kekayaan mineral harus menjadi dasar tumbuhnya industri pengolahan yang menghasilkan nilai tambah. Kekayaan pertanian harus berkembang menjadi industri pangan modern yang memanfaatkan teknologi. Kekayaan laut harus melahirkan ekonomi maritim yang maju. Potensi energi harus menjadi pintu masuk bagi pengembangan teknologi baru. Seluruh sumber daya tersebut perlu dihubungkan dengan riset, pendidikan, industri, dan kewirausahaan sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Kedaulatan ekonomi juga menuntut kemampuan menguasai teknologi strategis. Bangsa yang hanya menjadi pengguna teknologi akan selalu bergantung kepada bangsa lain. Ketergantungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perangkat keras, tetapi juga perangkat lunak, sistem digital, pusat data, kecerdasan buatan, keamanan siber, hingga penguasaan standar internasional. Indonesia tidak harus memproduksi seluruh teknologi sendiri, tetapi Indonesia harus memiliki kemampuan memahami, mengembangkan, memodifikasi, serta menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Dengan demikian, hubungan dengan dunia internasional dibangun atas dasar kemitraan yang setara, bukan ketergantungan.

Perubahan geopolitik dunia juga memperlihatkan bahwa ekonomi semakin berkaitan dengan keamanan nasional. Gangguan terhadap rantai pasok global, konflik energi, krisis pangan, pandemi, maupun persaingan teknologi dapat memengaruhi stabilitas sebuah negara dalam waktu yang sangat singkat. Oleh sebab itu, kedaulatan ekonomi harus mencakup kemampuan menjaga ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan industri, ketahanan teknologi, dan ketahanan data nasional. Ketahanan tersebut bukan berarti menutup impor atau menghentikan perdagangan internasional, melainkan memastikan bahwa kebutuhan strategis bangsa tetap dapat dipenuhi dalam berbagai situasi.

Dalam konteks tersebut, negara berperan membangun fondasi jangka panjang yang memperkuat daya saing nasional. Pendidikan diarahkan untuk

menghasilkan manusia yang kreatif dan adaptif. Dunia penelitian didorong menghasilkan inovasi yang memiliki manfaat nyata. Dunia usaha memperoleh kepastian hukum sehingga mampu berinvestasi dalam pengembangan teknologi. Industri memperoleh dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Seluruh kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi nasional membangun kemandirian ekonomi di tengah keterbukaan global.

Pada saat yang sama, masyarakat juga memegang peranan yang tidak kalah penting. Kedaulatan ekonomi tidak akan terwujud apabila budaya produktif tidak tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Semangat belajar, bekerja keras, menciptakan inovasi, menghargai karya anak bangsa, membangun usaha yang berkelanjutan, serta menjaga etika dalam aktivitas ekonomi merupakan fondasi yang tidak dapat digantikan oleh kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, perjalanan menuju kedaulatan ekonomi selalu dimulai dari kualitas manusianya.

Di sinilah hubungan antara ekonomi dan konsep ***Root Users*** menjadi semakin jelas. *Root Users* merupakan warga negara yang tidak hanya memahami hak, tetapi juga menyadari tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Kesadaran tersebut melahirkan budaya produktif yang tidak mudah bergantung kepada bantuan ataupun fasilitas semata. *Root Users* menjadi penggerak perubahan dari bawah melalui kreativitas, inovasi, kewirausahaan, serta pengabdian terhadap masyarakat. Kesadaran tersebut kemudian

diperkuat oleh **System Guardians** yang menjaga agar perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan spiritualitas tetap berjalan seimbang. Dengan fondasi seperti itu, pembangunan ekonomi tidak kehilangan arah karena selalu berakar pada nilai-nilai peradaban.

Pada tingkat kepemimpinan nasional, negarawan memiliki tanggung jawab membaca perubahan dunia jauh sebelum perubahan tersebut benar-benar terjadi. Seorang negarawan tidak hanya memikirkan kebutuhan ekonomi hari ini, tetapi juga mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan. Ketika kepemimpinan berkembang menjadi **Wali Raja**, pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa tanpa kehilangan semangat kerja sama internasional. Kepemimpinan seperti itu memahami bahwa dunia yang saling terhubung bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk memperluas manfaat bagi rakyat selama kepentingan nasional tetap menjadi orientasi utama.

Seluruh strategi tersebut memperoleh arah dari **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**. Ketuhanan menjaga agar kemajuan ekonomi tidak kehilangan dimensi etika. Kemanusiaan memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap menghormati martabat manusia. Persatuan mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi harus memperkuat integrasi nasional. Kerakyatan mengarahkan kebijakan ekonomi melalui kebijaksanaan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Keadilan Sosial memastikan bahwa hasil pembangunan tidak

berhenti pada kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, *kernel* bangsa menjadi kompas yang menjaga agar Indonesia tetap memiliki identitas di tengah perubahan global.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan kepastian kelembagaan yang memungkinkan seluruh strategi tersebut berjalan secara berkesinambungan. Regulasi yang konsisten, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, kepastian investasi, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta keberpihakan kepada kepentingan nasional merupakan bagian dari *firmware* yang memungkinkan Indonesia bersaing secara sehat dalam ekonomi global. Kekuatan ekonomi yang berkelanjutan selalu memerlukan fondasi kelembagaan yang stabil.

Semua itu berlangsung di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara mengajarkan keterbukaan terhadap dunia tanpa kehilangan jati diri. Sejarah menunjukkan bahwa Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan berbagai bangsa, agama, budaya, dan jalur perdagangan internasional. Keterbukaan tersebut tidak menghilangkan identitas Nusantara, justru memperkaya peradaban yang telah ada. Nilai tersebut tetap relevan pada era global saat ini. Indonesia tidak perlu menutup diri untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga tidak boleh kehilangan kemampuan menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan bangsa sendiri.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, kedaulatan ekonomi berarti mengembalikan orientasi pembangunan kepada kepentingan nasional yang berlandaskan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Dalam perspektif ***Free*** **Indonesia**, kedaulatan ekonomi membebaskan bangsa dari ketergantungan yang melemahkan kemampuan menentukan masa depan sendiri. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, kedaulatan ekonomi memastikan bahwa kekayaan alam, manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi berkembang sebagai kekuatan yang menjaga keberlanjutan Peradaban Nusantara di tengah perubahan dunia.

Pada akhirnya, kedaulatan ekonomi bukanlah tentang membangun tembok yang memisahkan Indonesia dari bangsa-bangsa lain, melainkan membangun kemampuan berdiri sejajar dengan bangsa mana pun melalui kualitas manusia, kekuatan institusi, penguasaan ilmu pengetahuan, dan keteguhan nilai. Ketika **Pancasila menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi menjadi *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara menjadi *operating system* kehidupan berbangsa**, Indonesia tidak hanya mampu berpartisipasi dalam ekonomi global, tetapi juga mampu menentukan arah perjalanan ekonomi nasional secara merdeka, bermartabat, dan berkelanjutan.

29.6. Ekonomi Peradaban

Setiap sistem ekonomi pada hakikatnya merupakan cerminan dari cara sebuah peradaban memandang manusia. Ketika manusia dipandang

semata-mata sebagai makhluk yang mengejar keuntungan, sistem ekonomi akan dibangun untuk memaksimalkan akumulasi kekayaan. Ketika manusia dipandang hanya sebagai bagian dari mesin produksi, pembangunan akan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi tanpa selalu mempertimbangkan martabat manusia. Sebaliknya, apabila manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual, moral, sosial, intelektual, dan tanggung jawab terhadap alam, maka sistem ekonomi akan berkembang menjadi bagian dari pembangunan peradaban. Dari titik inilah lahir gagasan mengenai **Ekonomi Peradaban**.

Ekonomi Peradaban bukanlah penolakan terhadap ilmu ekonomi modern. Ekonomi Peradaban juga bukan upaya membangun sistem yang sepenuhnya baru dengan mengabaikan pengalaman bangsa-bangsa lain. Ekonomi Peradaban merupakan cara pandang yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai salah satu instrumen untuk membangun kualitas kehidupan manusia. Produksi, perdagangan, investasi, inovasi, industri, teknologi, dan keuangan tetap memiliki peranan penting, tetapi seluruh aktivitas tersebut diarahkan kepada tujuan yang lebih besar, yaitu membangun masyarakat yang adil, bermartabat, produktif, berkelanjutan, dan berkeadaban.

Dalam paradigma tersebut, pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir. Pertumbuhan hanyalah salah satu indikator bahwa kehidupan berkembang ke arah yang lebih baik. Ukuran keberhasilan bangsa tidak berhenti pada besarnya pendapatan nasional, melainkan juga pada meningkatnya kualitas manusia,

menguatnya keluarga, tumbuhnya kepercayaan sosial, berkembangnya ilmu pengetahuan, terpeliharanya lingkungan, serta hadirnya kepemimpinan yang amanah. Dengan demikian, ekonomi tidak berdiri di atas peradaban, melainkan menjadi salah satu bagian yang menopang tegaknya peradaban.

Ekonomi Peradaban berangkat dari keyakinan bahwa manusia merupakan aset paling berharga bagi sebuah bangsa. Kekayaan alam dapat habis, teknologi dapat berubah, bahkan pusat-pusat ekonomi dunia dapat bergeser, tetapi manusia yang memiliki karakter, ilmu pengetahuan, kreativitas, dan integritas akan selalu mampu menciptakan nilai baru. Oleh sebab itu, investasi terbesar dalam Ekonomi Peradaban bukan hanya pembangunan fisik, melainkan pembangunan kualitas manusia. Pendidikan, riset, kesehatan, budaya membaca, etika kerja, serta pembentukan karakter memperoleh kedudukan yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan industri.

Pandangan tersebut sekaligus mengubah hubungan antara ekonomi dan moralitas. Dalam banyak praktik pembangunan, moral sering diperlakukan sebagai urusan pribadi yang terpisah dari aktivitas ekonomi. Padahal kepercayaan merupakan fondasi yang membuat ekonomi dapat berjalan. Perdagangan berlangsung karena terdapat kepercayaan antara penjual dan pembeli. Investasi berkembang karena terdapat kepastian hukum. Kerja sama tumbuh karena terdapat integritas. Kredit dapat diberikan karena terdapat keyakinan bahwa amanah akan dijaga. Seluruh aktivitas ekonomi sesungguhnya bertumpu

pada modal sosial yang tidak dapat dihitung hanya dengan angka-angka statistik. Ketika moralitas melemah, biaya ekonomi meningkat, konflik bertambah, dan produktivitas nasional ikut menurun.

Karena itu, Ekonomi Peradaban memandang etika sebagai bagian dari infrastruktur pembangunan. Kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi juga faktor ekonomi. Amanah bukan hanya ajaran agama, tetapi juga modal pembangunan. Gotong royong bukan sekadar tradisi budaya, melainkan kekuatan produktivitas sosial. Disiplin bukan hanya karakter individu, tetapi juga syarat lahirnya daya saing nasional. Nilai-nilai tersebut membentuk lingkungan yang memungkinkan aktivitas ekonomi berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Ekonomi Peradaban juga memandang bahwa penciptaan nilai tambah lebih penting daripada eksploitasi sumber daya. Kekayaan bangsa tidak bertambah hanya karena mengeluarkan lebih banyak bahan mentah dari dalam bumi. Kekayaan bertambah ketika ilmu pengetahuan mengubah sumber daya menjadi produk bernilai tinggi, ketika kreativitas menghasilkan inovasi baru, ketika teknologi meningkatkan produktivitas, dan ketika masyarakat mampu menciptakan solusi atas berbagai persoalan kehidupan. Dengan demikian, pusat pembangunan bergeser dari eksploitasi menuju penciptaan nilai.

Di era kecerdasan buatan dan transformasi digital, perubahan tersebut menjadi semakin nyata. Data, algoritma, perangkat lunak, desain, kreativitas, dan kemampuan berpikir strategis menjadi sumber nilai

ekonomi yang terus berkembang. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi inovasi bangsa lain. Indonesia harus menjadi ruang lahirnya inovasi yang berakar pada kebutuhan masyarakat sendiri. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, komunitas teknologi, pelaku ekonomi kreatif, dan pemerintah perlu membangun hubungan yang saling menguatkan sehingga ilmu pengetahuan benar-benar berubah menjadi kesejahteraan.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, perubahan tersebut hanya mungkin terjadi apabila perjalanan pembangunan dimulai dari manusianya. **Khalifatullah** membangun kesadaran bahwa bekerja merupakan bagian dari amanah. Kesadaran tersebut melahirkan keluarga yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan semangat belajar. Dari keluarga lahir masyarakat yang produktif. Di tengah masyarakat tumbuh ***Root Users*** yang menjaga kehidupan bersama melalui keteladanan dan pengabdian. *Root Users* kemudian melahirkan **System Guardians** yang memastikan bahwa ilmu pengetahuan, budaya, spiritualitas, patriotisme, dan etika tetap menjadi fondasi pembangunan bangsa. Dari ekosistem tersebut lahir negarawan yang mampu menyusun arah pembangunan nasional, hingga akhirnya hadir kepemimpinan **Wali Raja** yang menggunakan kekuasaan sebagai amanah untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Seluruh rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi yang sehat selalu merupakan hasil dari manusia yang bertumbuh secara benar.

Karena itu, Ekonomi Peradaban tidak mengenal pertentangan antara kemajuan dan kemanusiaan. Teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikannya. Industri dikembangkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik, bukan sekadar meningkatkan keuntungan. Inovasi diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan hanya menghasilkan produk baru. Pertumbuhan ekonomi didorong agar mampu memperluas kesejahteraan, bukan memperbesar kesenjangan. Setiap kemajuan selalu diukur berdasarkan manfaat yang diberikan kepada kehidupan bersama.

Seluruh arah tersebut memperoleh landasan dari **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**. Nilai Ketuhanan memastikan bahwa aktivitas ekonomi selalu berada dalam koridor etika. Nilai Kemanusiaan menjaga agar pembangunan menghormati martabat setiap manusia. Nilai Persatuan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai alat memperkuat integrasi nasional. Nilai Kerakyatan mengarahkan pengambilan kebijakan melalui kebijaksanaan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Nilai Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir seluruh proses pembangunan. Sebagai *kernel* bangsa, Pancasila memberikan prinsip dasar yang menjaga agar Ekonomi Peradaban tidak kehilangan arah di tengah perubahan zaman.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam tata kelola kelembagaan. Konstitusi menyediakan kerangka hukum yang melindungi hak masyarakat, mengatur

pengelolaan sumber daya nasional, menciptakan kepastian bagi dunia usaha, dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan negara. *Firmware* yang kuat menjadikan pembangunan tidak bergantung pada pergantian pemimpin, tetapi terus bergerak menuju cita-cita nasional yang sama.

Semua itu berkembang di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara telah lama mengenal keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan sosial. Tradisi gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap alam, penghargaan terhadap ilmu, serta semangat membangun kehidupan bersama merupakan bagian dari sistem nilai yang telah hidup jauh sebelum konsep ekonomi modern berkembang. Nilai-nilai tersebut bukan untuk menghambat kemajuan, melainkan menjadi fondasi agar kemajuan tidak kehilangan arah. Modernisasi yang berakar pada Peradaban Nusantara akan menghasilkan pembangunan yang mampu mengikuti perkembangan dunia tanpa kehilangan identitas bangsa.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, Ekonomi Peradaban berarti mengembalikan orientasi pembangunan kepada manusia sebagai tujuan utama. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, Ekonomi Peradaban membebaskan bangsa dari cara berpikir yang hanya mengejar angka-angka pertumbuhan tanpa memperhatikan kualitas kehidupan. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Ekonomi Peradaban memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak

mengorbankan generasi yang akan datang, tetapi justru memperkuat keberlanjutan Peradaban Nusantara.

Pada akhirnya, Ekonomi Peradaban bukan hanya berbicara mengenai bagaimana sebuah bangsa menjadi kaya, tetapi bagaimana sebuah bangsa tetap bermartabat ketika menjadi makmur. Kekayaan tanpa nilai hanya akan melahirkan perebutan. Teknologi tanpa etika hanya akan mempercepat kerusakan. Kekuasaan tanpa amanah hanya akan memperbesar ketimpangan. Sebaliknya, ketika **Pancasila menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi menjadi *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara menjadi *operating system* kehidupan berbangsa**, aktivitas ekonomi berkembang menjadi jalan untuk membangun manusia, memperkuat negara, memelihara alam, serta mewariskan peradaban yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Itulah hakikat Ekonomi Peradaban sebagai fondasi menuju **Gemah Ripah Loh Jinawi**.

29.7. Dari *Root Users* Menuju Kemakmuran Nasional

Kemakmuran sebuah bangsa sering dipersepsikan sebagai hasil dari kebijakan ekonomi, besarnya investasi, atau keberhasilan pemerintah mengelola anggaran negara. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi hanya menjelaskan bagian paling akhir dari sebuah proses yang jauh lebih panjang. Sebelum lahir kebijakan ekonomi, terdapat kualitas kepemimpinan yang menyusunnya. Sebelum hadir kepemimpinan yang baik, terdapat sistem kenegaraan yang membentuk arah penyelenggaraan negara. Sebelum sistem kenegaraan mampu berjalan dengan

benar, terdapat masyarakat yang menopang keberlangsungannya. Pada titik paling dasar, seluruh proses tersebut berawal dari kualitas manusia. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai ekonomi pada hakikatnya tidak pernah dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai pembangunan manusia.

Buku ini sejak awal mengajukan sebuah alur berpikir yang berbeda. Kebangkitan bangsa tidak dimulai dari pergantian pemimpin, perubahan kabinet, ataupun peningkatan anggaran pembangunan. Kebangkitan bangsa dimulai ketika lahir manusia yang memahami tujuan keberadaannya sebagai **Khalifatullah**. Kesadaran tersebut melahirkan perubahan cara berpikir terhadap pekerjaan, ilmu pengetahuan, keluarga, masyarakat, dan negara. Bekerja tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana memperoleh penghasilan, tetapi sebagai bagian dari amanah untuk menghadirkan manfaat bagi kehidupan bersama. Belajar tidak hanya bertujuan memperoleh gelar, tetapi menjadi ikhtiar meningkatkan kualitas pengabdian. Memimpin tidak lagi dipahami sebagai jalan menuju kekuasaan, melainkan sebagai tanggung jawab menjaga kemaslahatan.

Kesadaran tersebut kemudian membentuk keluarga sebagai sekolah pertama bagi lahirnya karakter bangsa. Dalam keluarga ditanamkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, semangat belajar, serta penghormatan terhadap kerja keras. Nilai-nilai tersebut tampak sederhana, tetapi menjadi fondasi yang menentukan kualitas kehidupan ekonomi suatu bangsa. Masyarakat yang terbiasa menghargai amanah akan

lebih mudah membangun kepercayaan. Masyarakat yang menghargai ilmu akan lebih cepat berinovasi. Masyarakat yang terbiasa bekerja keras akan lebih produktif. Dengan demikian, akar pertumbuhan ekonomi sesungguhnya telah mulai tumbuh sejak pembentukan karakter di dalam keluarga.

Dari keluarga yang sehat lahirlah masyarakat yang mampu menjaga kehidupan bersama. Pada tahap inilah muncul kelompok yang dalam buku ini disebut sebagai ***Root Users***. *Root Users* bukanlah kelompok elit, bukan pula organisasi tertentu. *Root Users* merupakan warga negara yang memiliki kesadaran mendalam terhadap tanggung jawab sebagai penjaga kehidupan bangsa. Kesadaran tersebut diwujudkan melalui keteladanan, produktivitas, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, penghormatan terhadap hukum, serta keberanian memperjuangkan kepentingan bersama. *Root Users* tidak menunggu perubahan datang dari atas, melainkan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.

Keberadaan *Root Users* memiliki arti yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Tidak ada negara yang mampu menciptakan kemakmuran apabila masyarakat kehilangan kepercayaan satu sama lain. Aktivitas perdagangan memerlukan kejujuran. Dunia usaha memerlukan kepastian. Investasi memerlukan rasa aman. Inovasi memerlukan keberanian mengambil risiko. Seluruh unsur tersebut tidak mungkin tumbuh hanya melalui regulasi, tetapi berkembang dari budaya masyarakat yang sehat. *Root Users* menjadi fondasi sosial yang menjaga agar nilai-nilai tersebut tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Di atas fondasi tersebut tumbuh **System Guardians**. Kelompok ini menjaga agar sistem nilai bangsa tidak mengalami degradasi di tengah perubahan zaman. Ilmu pengetahuan terus dikembangkan agar bangsa mampu bersaing. Budaya dipelihara agar identitas tidak hilang. Spiritualitas dijaga agar pembangunan tidak kehilangan dimensi moral. Patriotisme dipupuk agar kepentingan bangsa tetap berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Seluruh fungsi tersebut menjadikan System Guardians sebagai penjaga keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai yang melandasinya. Tanpa keseimbangan tersebut, pertumbuhan ekonomi mudah berubah menjadi perlombaan yang mengabaikan kemanusiaan.

Dari ekosistem yang dibangun oleh *Root Users* dan System Guardians lahirlah negarawan. Negarawan memiliki kemampuan melihat hubungan antara manusia, negara, dan peradaban sebagai satu kesatuan yang utuh. Kebijakan ekonomi tidak lagi disusun semata-mata untuk mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari strategi membangun masa depan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai investasi. Penelitian menjadi sumber inovasi. Infrastruktur dibangun untuk memperkuat produktivitas nasional. Hukum ditegakkan untuk membangun kepercayaan. Seluruh kebijakan saling mendukung karena lahir dari visi yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Ketika kepemimpinan negarawan mencapai tingkat pengabdian yang lebih tinggi, lahirlah

paradigma **Wali Raja**. Wali Raja bukanlah penguasa yang mengejar kemegahan kekuasaan, melainkan penjaga amanah bangsa. Dalam kepemimpinan seperti itu, pembangunan ekonomi tidak dijadikan alat mempertahankan kekuasaan, tetapi menjadi jalan menghadirkan keadilan sosial. Kekayaan negara tidak dipandang sebagai sumber keuntungan pemerintahan, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seluruh keputusan diambil dengan mempertimbangkan keberlanjutan bangsa, bukan sekadar keberhasilan pemerintahan pada satu periode tertentu.

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa kemakmuran nasional bukanlah hasil dari satu kebijakan tunggal. Kemakmuran merupakan hasil dari keterhubungan yang harmonis antara manusia, masyarakat, negara, dan peradaban. Ketika salah satu mata rantai mengalami kerusakan, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh sistem. Pendidikan yang lemah menghasilkan sumber daya manusia yang kurang produktif. Kepemimpinan yang tidak amanah melemahkan kepercayaan publik. Hukum yang tidak konsisten meningkatkan biaya ekonomi. Budaya yang kehilangan etika mengurangi kualitas kerja sama sosial. Sebaliknya, ketika seluruh mata rantai bekerja secara selaras, pertumbuhan ekonomi berkembang secara alami sebagai akibat dari sistem kehidupan yang sehat.

Dalam konteks tersebut, **Pancasila sebagai *kernel* bangsa** menjadi sumber nilai yang menghubungkan seluruh proses tersebut. Ketuhanan membentuk integritas manusia. Kemanusiaan menumbuhkan

penghormatan terhadap martabat setiap orang. Persatuan menjaga kohesi sosial yang menjadi modal pembangunan. Kerakyatan memastikan bahwa kebijakan lahir melalui kebijaksanaan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Keadilan Sosial menjadi arah akhir seluruh proses pembangunan. Sebagai *kernel* bangsa, Pancasila bekerja bukan hanya pada tingkat konstitusi, tetapi juga pada tingkat karakter setiap warga negara.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan struktur kelembagaan yang memungkinkan nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara. Konstitusi memberikan kepastian mengenai pembagian kewenangan, perlindungan hak-hak rakyat, pengelolaan kekayaan nasional, dan arah pembangunan. *Firmware* yang baik memastikan bahwa kualitas manusia yang tumbuh di masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang efektif. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan negara tidak terputus, tetapi saling memperkuat.

Semua proses tersebut berkembang di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara menyediakan ruang tempat nilai, budaya, ilmu pengetahuan, dan pengalaman sejarah bangsa saling bertemu membentuk karakter nasional. Gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap alam, semangat belajar, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian dari sistem operasi yang menjaga agar pembangunan tidak kehilangan identitas. Modernisasi

diterima sebagai kebutuhan zaman, tetapi tetap bergerak di atas fondasi nilai-nilai Nusantara.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, perjalanan dari *Root Users* menuju kemakmuran nasional berarti mengembalikan pembangunan kepada fondasi manusia yang berkarakter serta negara yang menjalankan amanah sesuai tujuan kemerdekaan. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, perjalanan tersebut membebaskan bangsa dari ketergantungan terhadap perubahan yang bersifat semu dengan membangun kekuatan dari dalam masyarakat sendiri. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, perjalanan tersebut memastikan bahwa kemakmuran yang berhasil diwujudkan bukan hanya dinikmati oleh satu generasi, tetapi menjadi warisan bagi generasi-generasi berikutnya melalui penguatan Peradaban Nusantara.

Dengan demikian, **Gemah Ripah Loh Jinawi** bukanlah titik awal perjalanan bangsa, melainkan buah yang tumbuh dari akar yang sehat. Akar tersebut adalah manusia yang memahami amanah sebagai Khalifatullah. Batangnya adalah keluarga dan masyarakat yang melahirkan *Root Users*. Cabangnya adalah System Guardians yang menjaga nilai-nilai bangsa. Tajuknya adalah negarawan dan Wali Raja yang mengarahkan perjalanan negara. Ketika **Pancasila menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi menjadi *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara menjadi *operating system* kehidupan berbangsa**, seluruh pohon kehidupan nasional akan tumbuh kokoh, menghasilkan kemakmuran yang tidak hanya besar, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Itulah perjalanan dari

Root Users menuju kemakmuran nasional yang menjadi inti visi Indonesia Baru.

29.8. Gemah Ripah Loh Jinawi

Di sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, terdapat sebuah ungkapan yang terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat, yaitu **Gemah Ripah Loh Jinawi**. Ungkapan tersebut sering diterjemahkan sebagai gambaran negeri yang subur, makmur, dan kaya akan sumber daya. Namun makna sesungguhnya jauh melampaui kelimpahan hasil bumi. Gemah Ripah Loh Jinawi merupakan cita-cita peradaban, sebuah keadaan ketika manusia, alam, negara, dan kehidupan sosial berkembang dalam keseimbangan yang saling menguatkan. Kemakmuran tidak hanya hadir dalam bentuk kekayaan material, tetapi juga dalam bentuk ketenteraman, keadilan, ilmu pengetahuan, budaya, serta hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

Seluruh pembahasan pada bab ini sesungguhnya bermuara pada pemahaman tersebut. Kemakmuran bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan akibat dari sistem kehidupan yang dibangun di atas fondasi yang benar. Kekayaan alam merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Negara hadir sebagai arsitek ekosistem ekonomi yang memungkinkan seluruh potensi bangsa berkembang. Kedaulatan ekonomi dibangun melalui kualitas manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kelembagaan. Seluruh aktivitas ekonomi kemudian ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan

peradaban. Ketika seluruh unsur tersebut saling terhubung, Gemah Ripah Loh Jinawi tidak lagi menjadi slogan romantis masa lalu, tetapi berubah menjadi arah pembangunan Indonesia Baru.

Pandangan tersebut berbeda dengan cara berpikir yang mengukur keberhasilan bangsa hanya melalui besarnya pertumbuhan ekonomi. Angka-angka statistik memang penting sebagai alat ukur, tetapi tidak pernah mampu menggambarkan seluruh kualitas kehidupan. Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tetap menghadapi kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, melemahnya keluarga, meningkatnya korupsi, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam keadaan seperti itu, kemakmuran sesungguhnya masih rapuh karena hanya bertumpu pada aspek material. Gemah Ripah Loh Jinawi mengajarkan bahwa kemakmuran yang sejati selalu memiliki dimensi moral, sosial, budaya, spiritual, dan ekologis.

Bangsa yang benar-benar makmur bukanlah bangsa yang memiliki gedung-gedung tertinggi atau pusat-pusat perbelanjaan terbesar, melainkan bangsa yang mampu melahirkan manusia-manusia yang berkarakter, keluarga yang kuat, masyarakat yang saling percaya, pemimpin yang amanah, ilmu pengetahuan yang berkembang, serta lingkungan yang tetap lestari. Kemajuan ekonomi menjadi bagian dari kehidupan yang utuh, bukan tujuan yang mengorbankan seluruh aspek lainnya. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya memperbesar

kapasitas produksi, tetapi juga memperbesar kualitas kehidupan.

Di sinilah letak pentingnya perjalanan yang telah dibangun sejak awal buku ini. Gemah Ripah Loh Jinawi tidak dapat diwujudkan hanya melalui perubahan kebijakan ekonomi. Perubahan harus dimulai dari manusianya. Ketika seseorang memahami amanah sebagai **Khalifatullah**, cara memandang pekerjaan akan berubah. Produktivitas tidak lagi didorong oleh keserakahan, tetapi oleh tanggung jawab. Ilmu pengetahuan dipelajari bukan sekadar untuk memperoleh kedudukan, melainkan untuk memberikan manfaat. Kepemimpinan dijalankan bukan demi kekuasaan, tetapi demi pelayanan kepada masyarakat. Perubahan tersebut kemudian menjalar ke dalam keluarga, membentuk masyarakat, dan akhirnya mengubah arah pembangunan bangsa.

Dari masyarakat yang sehat lahirlah ***Root Users***, yaitu manusia-manusia yang menjaga kehidupan bersama melalui keteladanan, produktivitas, serta kepedulian terhadap masa depan bangsa. *Root Users* tidak menunggu negara berubah lebih dahulu. Perubahan dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan ruang-ruang sosial tempat kehidupan berlangsung. Kesadaran tersebut membangun budaya yang menghargai ilmu, kerja keras, integritas, dan gotong royong. Budaya seperti inilah yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat karena kepercayaan sosial tumbuh secara alami.

Di atas fondasi tersebut berdiri **System Guardians**, yaitu para penjaga sistem nilai bangsa. Ilmu

pengetahuan dikembangkan agar Indonesia mampu menciptakan inovasi, bukan hanya mengonsumsi inovasi bangsa lain. Budaya dipelihara agar modernisasi tidak menghapus identitas nasional. Spiritualitas dijaga agar pembangunan tidak kehilangan dimensi moral. Patriotisme dipupuk agar seluruh kemajuan selalu diarahkan untuk memperkuat kepentingan bangsa. Dengan hadirnya System Guardians, pertumbuhan ekonomi memperoleh arah yang benar karena tetap berada di dalam koridor nilai-nilai peradaban.

Ekosistem tersebut melahirkan negarawan yang memahami bahwa pembangunan ekonomi bukan sekadar persoalan anggaran, investasi, ataupun perdagangan. Pembangunan ekonomi dipahami sebagai bagian dari pembangunan manusia dan pembangunan negara. Seorang negarawan melihat hubungan antara pendidikan, riset, teknologi, hukum, budaya, lingkungan, dan ekonomi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari kepemimpinan seperti itu kemudian berkembang paradigma **Wali Raja**, yaitu kepemimpinan yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah untuk menjaga keseimbangan seluruh kehidupan bangsa. Pada titik inilah Gemah Ripah Loh Jinawi memperoleh makna yang utuh sebagai buah dari kepemimpinan yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat.

Seluruh perjalanan tersebut memperoleh arah dari **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**. Sebagaimana *kernel* pada sebuah sistem operasi menjadi inti yang mengatur seluruh fungsi komputer, Pancasila menjadi sumber nilai yang menggerakkan kehidupan nasional.

Ketuhanan membangun integritas. Kemanusiaan menjaga martabat setiap orang. Persatuan memperkuat kohesi bangsa. Kerakyatan menghadirkan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara. Keadilan Sosial memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Seluruh aktivitas ekonomi memperoleh orientasi moral karena bertumpu pada *kernel* bangsa yang kokoh.

Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam penyelenggaraan negara melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Sebagaimana *firmware* menghubungkan perangkat keras dengan sistem yang lebih besar, konstitusi menghubungkan cita-cita bangsa dengan praktik penyelenggaraan negara. Melalui konstitusi, kewenangan diatur, hak rakyat dilindungi, kekayaan nasional dikelola, serta arah pembangunan ditetapkan. *Firmware* yang sehat memungkinkan negara bekerja secara konsisten, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga setiap kebijakan ekonomi tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan nasional.

Semua itu berlangsung di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara bukan sekadar warisan sejarah, melainkan sistem nilai yang terus hidup dan menjadi ruang tempat seluruh aktivitas bangsa berlangsung. Gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap alam, penghargaan terhadap ilmu, kesederhanaan, serta semangat membangun kehidupan bersama menjadi bagian dari sistem operasi yang menjaga agar Indonesia tidak kehilangan jati diri di tengah derasnya perubahan global. Modernisasi

diterima sebagai kebutuhan, tetapi seluruh kemajuan tetap bergerak di atas fondasi nilai-nilai Nusantara.

Gemah Ripah Loh Jinawi pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai kemakmuran ekonomi, melainkan mengenai terciptanya keseimbangan antara manusia, negara, dan peradaban. Alam tetap terpelihara meskipun industri berkembang. Teknologi terus maju tanpa menghilangkan kemanusiaan. Kekayaan meningkat tanpa melahirkan kesenjangan yang ekstrem. Ilmu pengetahuan berkembang tanpa kehilangan etika. Kekuasaan dijalankan tanpa meninggalkan amanah. Dalam keadaan seperti itu, pertumbuhan ekonomi menjadi bagian dari kehidupan yang utuh dan berkelanjutan.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, Gemah Ripah Loh Jinawi berarti mengembalikan arah pembangunan kepada cita-cita bangsa yang berakar pada karakter manusia, keadilan sosial, dan kemakmuran bersama. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, Gemah Ripah Loh Jinawi menjadi simbol bangsa yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri melalui kualitas manusia, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kemandirian ekonomi. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, Gemah Ripah Loh Jinawi menjadi komitmen untuk mewariskan tanah air yang lebih baik kepada generasi berikutnya, bukan hanya dalam bentuk kekayaan material, tetapi juga dalam bentuk peradaban yang tetap hidup dan berkembang.

Dengan demikian, Gemah Ripah Loh Jinawi bukanlah akhir dari sebuah bab, melainkan gambaran

masa depan Indonesia yang ingin diwujudkan. Sebuah Indonesia yang melahirkan manusia-manusia berkarakter sebagai **Khalifatullah**, membangun masyarakat melalui ***Root Users***, menjaga arah pembangunan melalui **System Guardians**, dipimpin oleh negarawan yang menjalankan amanah sebagai **Wali Raja**, serta berdiri di atas **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**, **konstitusi sebagai *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Ketika seluruh unsur tersebut bekerja secara harmonis, kemakmuran tidak lagi menjadi sekadar target pembangunan, melainkan menjadi buah alami dari sebuah bangsa yang berhasil menemukan kembali jati dirinya sebagai negara yang berkeadaban.

BAB 30
NUSANTARA ADIKUASA KEBAHAGIAAN

30.1. Mengapa Kebahagiaan Menjadi Tujuan Akhir Negara



Setiap bangsa membangun negara dengan harapan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi, penegakan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga penguatan pertahanan pada akhirnya diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, adil, dan sejahtera. Namun dalam perjalanan sejarah modern, ukuran keberhasilan sebuah negara sering kali bergeser. Kemajuan lebih banyak diukur melalui pertumbuhan ekonomi, besarnya produk domestik bruto, tingginya

investasi, luasnya infrastruktur, atau meningkatnya kekuatan militer. Berbagai indikator tersebut memang penting, tetapi seluruhnya sesungguhnya hanyalah alat. Tujuan akhir dari penyelenggaraan negara tetaplah kehidupan rakyat yang berbahagia.

Kebahagiaan dalam konteks kenegaraan tidak dapat dipahami sebagai perasaan sesaat yang muncul karena terpenuhinya keinginan pribadi. Kebahagiaan bangsa merupakan keadaan ketika manusia dapat menjalani kehidupan secara bermartabat, merasa aman terhadap masa depan, memperoleh kesempatan mengembangkan potensi, hidup dalam lingkungan yang adil, serta memiliki harapan bahwa generasi berikutnya akan menikmati kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan seperti itu lahir dari keseimbangan antara kebutuhan material, ketenteraman batin, hubungan sosial yang sehat, kepastian hukum, lingkungan yang lestari, dan kepemimpinan yang amanah.

Pandangan tersebut sesungguhnya sejalan dengan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia menunjukkan bahwa negara tidak dibentuk hanya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Negara dibentuk untuk menghadirkan kehidupan yang utuh. Perlindungan menghadirkan rasa aman. Kesejahteraan menghadirkan kecukupan hidup.

Pendidikan menghadirkan kesempatan berkembang. Perdamaian menghadirkan ketenteraman. Seluruh tujuan tersebut pada akhirnya bermuara pada kualitas kehidupan manusia.

Karena itu, negara yang berhasil tidak selalu identik dengan negara yang memiliki pendapatan nasional terbesar. Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi apabila masyarakat hidup dalam ketakutan, hukum kehilangan keadilan, korupsi merajalela, keluarga mengalami disintegrasi, dan lingkungan mengalami kerusakan, maka keberhasilan tersebut menjadi kehilangan makna. Sebaliknya, bangsa yang mampu menghadirkan rasa aman, kepercayaan sosial, kesempatan bekerja, pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang layak, lingkungan yang lestari, dan kepemimpinan yang dipercaya masyarakat sesungguhnya sedang membangun fondasi kebahagiaan yang jauh lebih kokoh daripada sekadar peningkatan angka-angka ekonomi.

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mulai menyadari bahwa ukuran pembangunan tidak dapat berhenti pada indikator ekonomi semata. Berbagai negara mulai mengembangkan pendekatan yang memasukkan kualitas hidup, kesehatan mental, hubungan sosial, kualitas lingkungan, dan tingkat kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa peradaban modern mulai kembali kepada kesadaran lama, yaitu bahwa manusia tidak

hidup hanya untuk menghasilkan kekayaan, tetapi untuk mencapai kehidupan yang bermakna.

Namun Indonesia sesungguhnya memiliki landasan yang lebih kaya daripada sekadar mengadopsi berbagai indikator internasional tersebut. Sejak dahulu Nusantara mengenal konsep kehidupan yang menempatkan keseimbangan sebagai inti pembangunan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan negara dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari cara pandang tersebut lahirlah berbagai falsafah kehidupan, termasuk konsep **Gemah Ripah Loh Jinawi**, yang tidak hanya berbicara mengenai kemakmuran material, tetapi juga mengenai kehidupan yang tenteram, adil, lestari, dan penuh keberkahan.

Dalam perspektif buku ini, kebahagiaan bangsa juga tidak dapat dipisahkan dari kualitas manusianya. Tidak mungkin menghadirkan masyarakat yang bahagia apabila manusia kehilangan arah hidup. Kekayaan yang melimpah tidak selalu menghasilkan ketenteraman apabila keserakahan terus berkembang. Teknologi yang semakin maju tidak otomatis menghadirkan kebahagiaan apabila hubungan antarmanusia semakin renggang. Oleh sebab itu, perjalanan menuju kebahagiaan nasional selalu dimulai dari pembentukan manusia yang memahami amanah kehidupannya sebagai **Khalifatullah**. Kesadaran tersebut melahirkan tanggung jawab, integritas, kasih sayang, semangat belajar, dan etos kerja yang menjadi fondasi seluruh pembangunan bangsa.

Manusia yang bertumbuh dengan kesadaran tersebut kemudian membangun keluarga yang sehat, masyarakat yang saling percaya, dan lingkungan sosial yang produktif. Dari masyarakat seperti itu lahirlah ***Root Users***, yaitu warga negara yang menjaga kehidupan bersama melalui keteladanan, pengabdian, dan kepedulian terhadap kepentingan bangsa. *Root Users* tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan modal sosial berupa kepercayaan, gotong royong, dan solidaritas. Nilai-nilai tersebut merupakan unsur yang sangat menentukan kualitas kebahagiaan masyarakat karena kehidupan yang tenteram tidak pernah lahir dari masyarakat yang saling mencurigai.

Di atas fondasi tersebut berkembang **System Guardians** yang menjaga agar ilmu pengetahuan, budaya, spiritualitas, patriotisme, dan etika tetap menjadi penuntun perjalanan bangsa. Kehadiran System Guardians memastikan bahwa modernisasi tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan teknologi tidak menghapus penghormatan terhadap alam. Persaingan ekonomi tidak menghancurkan solidaritas sosial. Pertumbuhan industri tidak mengorbankan masa depan generasi berikutnya. Dengan demikian, kebahagiaan tidak dipahami sebagai kenikmatan jangka pendek, tetapi sebagai keberlanjutan kehidupan yang sehat bagi seluruh bangsa.

Ekosistem tersebut kemudian melahirkan negarawan yang memahami bahwa tugas negara bukan sekadar mengelola pemerintahan, melainkan menjaga

kualitas kehidupan rakyat. Dari paradigma tersebut berkembang kepemimpinan **Wali Raja**, yaitu kepemimpinan yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan ketenteraman. Dalam kepemimpinan seperti itu, keberhasilan pembangunan tidak diukur hanya dari jumlah proyek yang selesai, tetapi dari bertambahnya kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat keluarga. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia berkarakter. Penegakan hukum diarahkan untuk membangun rasa keadilan. Teknologi diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Seluruh kebijakan bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan rakyat.

Arah tersebut memperoleh fondasi dari **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**. Sebagai inti kehidupan nasional, Pancasila memastikan bahwa kebahagiaan tidak dipisahkan dari nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kebahagiaan yang dibangun di atas Pancasila bukanlah kebahagiaan individual yang mengabaikan orang lain, melainkan kebahagiaan kolektif yang tumbuh melalui kehidupan bersama. Kebahagiaan tidak dicapai dengan mengorbankan sesama, tetapi melalui kerja sama, gotong royong, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.

Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam penyelenggaraan negara melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Konstitusi memberikan arah kelembagaan agar tujuan negara benar-benar

diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang konsisten. Perlindungan terhadap hak rakyat, kepastian hukum, pengelolaan kekayaan nasional, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi memperoleh dasar yang jelas melalui *firmware* negara yang sehat. Dengan demikian, kebahagiaan bukan hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga menjadi orientasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara.

Semua itu berlangsung di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara telah lama mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari keharmonisan. Hubungan manusia dengan alam dijaga. Hubungan antarsesama dipelihara melalui gotong royong dan musyawarah. Ilmu pengetahuan dihargai sebagai jalan menuju kemajuan. Spiritualitas menjadi penuntun moral dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut membentuk sistem operasi yang memungkinkan bangsa Indonesia membangun konsep kebahagiaan yang berakar pada identitas sendiri, bukan sekadar meniru pengalaman bangsa lain.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, kebahagiaan menjadi tujuan akhir negara karena seluruh proses pembangunan dikembalikan kepada amanah konstitusi untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, kebahagiaan membebaskan bangsa dari cara berpikir yang menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save***

Nusantara, kebahagiaan menjadi komitmen untuk membangun kehidupan yang layak diwariskan kepada generasi mendatang melalui penguatan manusia, negara, dan Peradaban Nusantara.

Dengan demikian, tujuan akhir negara bukanlah menjadi negara terkaya, bukan pula menjadi negara terkuat, melainkan menjadi negara yang mampu menghadirkan kehidupan paling bermartabat bagi seluruh rakyat. Ketika **Pancasila menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi menjadi *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara menjadi *operating system* kehidupan berbangsa**, maka pembangunan tidak lagi berhenti pada pencapaian angka-angka ekonomi, tetapi berkembang menjadi perjalanan panjang menuju kebahagiaan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berkeadaban. Inilah makna terdalam dari cita-cita **Nusantara Adikuasa Kebahagiaan**.

30.2. Gemah Ripah Loh Jinawi sebagai Ekonomi Kebahagiaan

Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi di berbagai negara lebih banyak diarahkan untuk mengejar pertumbuhan. Produk domestik bruto meningkat, investasi bertambah, konsumsi berkembang, kawasan industri meluas, dan berbagai indikator ekonomi menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Namun pada saat yang sama, banyak masyarakat justru menghadapi tekanan hidup yang semakin besar. Hubungan antarmanusia menjadi renggang, kerusakan lingkungan meningkat, ketimpangan sosial melebar, kesehatan mental menjadi

persoalan yang semakin nyata, dan rasa percaya terhadap institusi publik terus menurun. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan meningkatnya kebahagiaan manusia.

Keadaan tersebut mendorong lahirnya kesadaran baru bahwa pembangunan memerlukan orientasi yang lebih luas daripada sekadar meningkatkan kapasitas produksi. Bangsa yang benar-benar maju bukan hanya mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, tetapi juga mampu menciptakan kehidupan yang lebih layak, lebih tenteram, dan lebih bermakna bagi seluruh rakyat. Dari titik inilah konsep **Gemah Ripah Loh Jinawi** memperoleh relevansi yang sangat kuat. Falsafah Nusantara tersebut tidak menempatkan kemakmuran sebagai akumulasi kekayaan semata, melainkan sebagai keadaan ketika kehidupan berkembang secara seimbang antara manusia, alam, negara, dan peradaban.

Dalam pandangan ini, ekonomi bukan sekadar aktivitas menghasilkan keuntungan, melainkan cara sebuah bangsa mengelola seluruh potensi kehidupan agar mampu menghadirkan kebahagiaan bersama. Kekayaan alam dikelola secara bertanggung jawab. Ilmu pengetahuan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Teknologi dimanfaatkan untuk memperkuat produktivitas tanpa menghilangkan kemanusiaan. Dunia usaha berkembang melalui persaingan yang sehat. Negara membangun kepastian hukum dan keadilan. Masyarakat menumbuhkan budaya gotong royong dan saling percaya. Seluruh

unsur tersebut bekerja sebagai satu ekosistem yang saling menguatkan.

Karena itu, Gemah Ripah Loh Jinawi dapat dipahami sebagai **ekonomi kebahagiaan**. Istilah tersebut bukan berarti mengabaikan pertumbuhan ekonomi ataupun menolak mekanisme pasar. Ekonomi kebahagiaan justru mengakui pentingnya pertumbuhan, investasi, inovasi, perdagangan, dan industri, tetapi seluruh instrumen tersebut ditempatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pertumbuhan ekonomi tidak menjadi tujuan akhir, melainkan salah satu jalan menuju masyarakat yang lebih sehat, lebih berpendidikan, lebih aman, lebih adil, dan lebih bermartabat.

Pandangan tersebut sejalan dengan kenyataan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang jauh lebih luas daripada kebutuhan material. Kecukupan ekonomi memang penting karena kemiskinan sering menjadi sumber berbagai persoalan sosial. Namun setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kualitas hidup semakin banyak ditentukan oleh rasa aman, hubungan keluarga yang harmonis, kesempatan memperoleh pendidikan, lingkungan yang sehat, pekerjaan yang bermakna, kepastian hukum, kepercayaan sosial, serta kesempatan berkontribusi bagi masyarakat. Seluruh unsur tersebut tidak dapat dibeli hanya dengan uang. Seluruh unsur tersebut dibangun melalui kualitas peradaban.

Gemah Ripah Loh Jinawi juga mengajarkan bahwa kemakmuran sejati tidak boleh mengorbankan keberlanjutan. Kekayaan yang diperoleh melalui perusakan alam sesungguhnya hanya memindahkan

beban kepada generasi berikutnya. Pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kesenjangan sosial pada akhirnya akan melahirkan konflik. Kemajuan teknologi yang menghilangkan nilai kemanusiaan akan menciptakan keterasingan. Oleh sebab itu, ekonomi kebahagiaan selalu memandang keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang. Setiap kebijakan dinilai bukan hanya berdasarkan manfaat hari ini, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan generasi yang akan datang.

Dalam perspektif tersebut, manusia menjadi pusat pembangunan. Bukan sebagai objek yang hanya menerima hasil pembangunan, melainkan sebagai subjek yang menciptakan pembangunan. Kualitas karakter, kreativitas, integritas, kemampuan berpikir, serta semangat bekerja menjadi modal utama bagi lahirnya kemakmuran. Kekayaan alam memang merupakan anugerah yang besar, tetapi tanpa manusia yang berkualitas, seluruh potensi tersebut tidak akan berkembang menjadi kesejahteraan. Sebaliknya, bangsa yang memiliki manusia unggul akan mampu menciptakan nilai baru bahkan dari sumber daya yang terbatas.

Karena itu, perjalanan menuju ekonomi kebahagiaan selalu dimulai dari pembentukan manusia sebagai **Khalifatullah**. Kesadaran tersebut melahirkan cara pandang bahwa bekerja merupakan bagian dari amanah, belajar merupakan bentuk pengabdian, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain merupakan ukuran keberhasilan hidup. Ketika cara berpikir seperti itu tumbuh di tengah masyarakat, produktivitas tidak

lagi didorong oleh keserakahan, tetapi oleh tanggung jawab. Persaingan berubah menjadi ruang untuk menghadirkan inovasi. Kekayaan dipahami sebagai sarana memperluas kemaslahatan. Dari titik tersebut ekonomi mulai berkembang sebagai bagian dari pembangunan peradaban.

Kesadaran tersebut kemudian melahirkan ***Root Users***, yaitu manusia-manusia yang menjadi akar kehidupan bangsa. *Root Users* membangun budaya kerja yang produktif, menjaga kepercayaan sosial, menghormati hukum, serta memperkuat gotong royong. Budaya tersebut menciptakan lingkungan yang memungkinkan dunia usaha berkembang secara sehat. Investasi menjadi lebih aman karena masyarakat memiliki integritas. Perdagangan menjadi lebih efisien karena kepercayaan tumbuh. Produktivitas meningkat karena budaya belajar berkembang. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan sosial dan kemajuan ekonomi bukan dua tujuan yang saling bertentangan, tetapi saling memperkuat.

Di atas fondasi tersebut hadir **System Guardians** yang menjaga agar pembangunan ekonomi tetap berada di dalam koridor nilai-nilai peradaban. Ilmu pengetahuan terus dikembangkan agar Indonesia mampu menciptakan inovasi sendiri. Budaya dipelihara agar modernisasi tidak menghilangkan identitas bangsa. Spiritualitas dijaga agar kemajuan material tidak berubah menjadi materialisme. Patriotisme dipupuk agar setiap kemajuan selalu diarahkan untuk memperkuat kepentingan nasional. Dengan demikian, ekonomi kebahagiaan berkembang bukan hanya

melalui pertumbuhan produksi, tetapi juga melalui pertumbuhan kualitas manusia.

Ekosistem tersebut melahirkan negarawan yang memahami bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada laporan statistik tahunan. Keberhasilan sesungguhnya tercermin ketika masyarakat merasa lebih aman, lebih sehat, lebih percaya terhadap negara, lebih mudah memperoleh pendidikan, lebih mudah membangun usaha, dan lebih optimistis menghadapi masa depan. Dari kepemimpinan seperti itu kemudian berkembang paradigma **Wali Raja**, yaitu kepemimpinan yang memandang seluruh sumber daya bangsa sebagai amanah untuk menghadirkan kehidupan yang semakin bermartabat. Dalam paradigma tersebut, setiap kebijakan ekonomi selalu ditimbang berdasarkan manfaatnya terhadap kualitas hidup rakyat.

Seluruh perjalanan tersebut memperoleh arah dari **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**. Ketuhanan menjaga agar aktivitas ekonomi tidak kehilangan etika. Kemanusiaan memastikan bahwa pembangunan selalu menghormati martabat setiap orang. Persatuan memperkuat kohesi sosial sebagai modal pembangunan. Kerakyatan menghadirkan kebijaksanaan dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Keadilan Sosial menjadi ukuran akhir keberhasilan pembangunan. Sebagai *kernel* bangsa, Pancasila memastikan bahwa ekonomi kebahagiaan tidak berubah menjadi sekadar slogan, tetapi menjadi prinsip dasar dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**. Konstitusi memberikan arah bagi penyelenggaraan negara agar perlindungan terhadap rakyat, pengelolaan kekayaan nasional, kepastian hukum, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi berjalan secara terpadu. *Firmware* negara yang sehat memungkinkan cita-cita kesejahteraan diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebahagiaan tidak hanya menjadi aspirasi moral, tetapi juga menjadi orientasi kelembagaan negara.

Semua itu berlangsung di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara menyediakan ruang tempat nilai gotong royong, musyawarah, keseimbangan dengan alam, penghormatan terhadap ilmu, serta semangat hidup bersama terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Sistem operasi inilah yang membuat Indonesia memiliki cara pandang sendiri mengenai hubungan antara ekonomi dan kebahagiaan. Kemajuan tidak dipisahkan dari keberlanjutan. Kekayaan tidak dipisahkan dari keadilan. Produktivitas tidak dipisahkan dari kemanusiaan. Modernisasi tidak dipisahkan dari identitas bangsa.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, Gemah Ripah Loh Jinawi sebagai ekonomi kebahagiaan berarti mengembalikan orientasi pembangunan kepada tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa, yaitu menghadirkan kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, ekonomi kebahagiaan membebaskan bangsa

dari cara berpikir yang hanya mengejar angka-angka pertumbuhan tanpa memperhatikan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, ekonomi kebahagiaan menjadi komitmen untuk membangun kemakmuran yang tetap menjaga manusia, alam, budaya, dan peradaban bagi generasi yang akan datang.

Dengan demikian, **Gemah Ripah Loh Jinawi** bukan hanya dapat dipahami sebagai cita-cita kemakmuran Nusantara, tetapi juga sebagai konsep **ekonomi kebahagiaan** yang berakar pada identitas bangsa Indonesia. Ketika **Pancasila menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi menjadi *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara menjadi *operating system* kehidupan berbangsa**, maka seluruh aktivitas ekonomi tidak lagi semata-mata mengejar pertumbuhan, melainkan diarahkan untuk menghadirkan masyarakat yang hidup berkecukupan, merasa aman, memperoleh keadilan, menjaga kelestarian alam, dan menikmati kebahagiaan yang berkelanjutan sebagai tujuan akhir penyelenggaraan negara.

30.3. Mengukur Kebahagiaan Bangsa

Setiap pembangunan memerlukan arah, dan setiap arah memerlukan ukuran keberhasilan. Bangsa yang tidak memiliki ukuran yang tepat akan mudah terjebak pada pencapaian-pencapaian yang bersifat semu. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, investasi dapat bertambah, dan berbagai proyek pembangunan dapat selesai tepat waktu, tetapi seluruh keberhasilan tersebut belum tentu mencerminkan

meningkatnya kualitas kehidupan rakyat. Oleh sebab itu, apabila tujuan akhir negara adalah menghadirkan kebahagiaan, maka kebahagiaan juga harus memiliki indikator yang mampu menggambarkan kondisi bangsa secara utuh.

Selama ini berbagai ukuran pembangunan lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomi. Produk domestik bruto, pendapatan per kapita, tingkat inflasi, nilai investasi, neraca perdagangan, hingga pertumbuhan industri menjadi indikator yang sangat penting dalam mengevaluasi keberhasilan negara. Seluruh indikator tersebut tetap memiliki manfaat karena mampu menggambarkan kapasitas ekonomi nasional. Namun indikator ekonomi hanya menjelaskan sebagian kecil dari kehidupan bangsa. Angka-angka tersebut belum mampu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah rakyat merasa lebih aman, lebih sehat, lebih percaya kepada negara, lebih optimistis menghadapi masa depan, dan lebih bermartabat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, berbagai indeks internasional mengenai kualitas hidup juga telah berkembang dengan memasukkan unsur kesehatan, pendidikan, lingkungan, kebebasan, maupun kepuasan hidup. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kesadaran global bahwa pembangunan tidak boleh diukur hanya melalui besarnya kekayaan. Meskipun demikian, setiap bangsa tetap memerlukan ukuran yang lahir dari nilai-nilai, sejarah, budaya, dan cita-cita yang menjadi identitasnya sendiri. Indonesia tidak cukup hanya mengadopsi ukuran yang dibangun oleh bangsa

lain, tetapi juga perlu mengembangkan ukuran yang berakar pada Pancasila, konstitusi, dan Peradaban Nusantara.

Dalam perspektif buku ini, kebahagiaan bangsa tidak dipahami sebagai keadaan emosional yang berubah-ubah, melainkan sebagai kualitas kehidupan yang tumbuh secara berkelanjutan. Kebahagiaan nasional lahir ketika manusia berkembang secara utuh, masyarakat hidup dalam harmoni, negara menjalankan amanah secara adil, ekonomi menghadirkan kesejahteraan yang merata, dan peradaban terus bertumbuh tanpa kehilangan identitas. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan juga harus mencerminkan lima dimensi tersebut sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Dimensi pertama adalah **kualitas manusia**. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebahagiaan apabila manusia kehilangan integritas, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan arah hidup. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan fisik dan mental, karakter, etika, produktivitas, kreativitas, serta kesadaran spiritual masyarakat. Manusia yang sehat, berilmu, dan berintegritas merupakan fondasi utama bagi lahirnya kehidupan yang bahagia.

Dimensi kedua adalah **kualitas masyarakat**. Kehidupan yang tenteram tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi individu, tetapi juga oleh hubungan sosial yang sehat. Tingkat kepercayaan antarmasyarakat, kekuatan keluarga, budaya gotong royong, keamanan lingkungan, rendahnya konflik

sosial, serta tingginya kepedulian terhadap sesama menjadi indikator yang sangat penting. Masyarakat yang saling percaya akan lebih mudah bekerja sama, lebih mudah berinovasi, dan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan bersama. Modal sosial seperti itu sering kali jauh lebih berharga daripada modal finansial.

Dimensi ketiga adalah **kualitas negara**. Negara yang berhasil bukan hanya negara yang mampu mengumpulkan penerimaan, tetapi negara yang dipercaya oleh rakyatnya. Penegakan hukum yang adil, pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan yang bersih, birokrasi yang efektif, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, serta kepemimpinan yang amanah menjadi ukuran yang menentukan tingkat kebahagiaan nasional. Negara yang hadir sebagai pelindung akan melahirkan rasa aman. Negara yang adil akan melahirkan rasa percaya. Negara yang melayani akan melahirkan optimisme terhadap masa depan.

Dimensi keempat adalah **kualitas ekonomi**. Kemakmuran tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebahagiaan. Namun ukuran ekonomi tidak berhenti pada besarnya pendapatan nasional. Kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, pemerataan kesejahteraan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, produktivitas nasional, kedaulatan ekonomi, serta kesempatan mengembangkan usaha menjadi ukuran yang lebih menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memperoleh makna ketika hasilnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.

Dimensi kelima adalah **kualitas peradaban**. Bangsa yang bahagia tidak hanya hidup pada masa kini, tetapi juga mempersiapkan masa depan. Oleh sebab itu, pembangunan ilmu pengetahuan, pelestarian budaya, perlindungan lingkungan hidup, kemampuan berinovasi, kualitas demokrasi, dan keberlanjutan pembangunan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ukuran kebahagiaan nasional. Peradaban yang terus berkembang akan memberikan harapan bahwa generasi berikutnya akan memperoleh kehidupan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya.

Kelima dimensi tersebut sesungguhnya merupakan satu rangkaian perjalanan yang telah dibangun sepanjang buku ini. Seluruh perjalanan dimulai dari manusia yang memahami amanah sebagai **Khalifatullah**. Kesadaran tersebut melahirkan karakter, integritas, dan tanggung jawab. Dari manusia yang bertumbuh lahirlah keluarga yang sehat dan masyarakat yang produktif. Di tengah masyarakat berkembang ***Root Users***, yaitu warga negara yang menjaga kehidupan bersama melalui keteladanan, kerja keras, kepedulian, dan semangat gotong royong. *Root Users* menjadi fondasi sosial yang memungkinkan kebahagiaan berkembang secara alami karena kepercayaan menjadi budaya kehidupan sehari-hari.

Di atas fondasi tersebut tumbuh **System Guardians** yang menjaga arah perkembangan bangsa. Ilmu pengetahuan terus diperkaya. Budaya tetap dipelihara. Spiritualitas dijaga sebagai sumber etika. Patriotisme ditumbuhkan agar kepentingan bangsa

selalu menjadi prioritas. System Guardians memastikan bahwa modernisasi tidak menghilangkan nilai-nilai yang menjadi identitas Indonesia. Dengan demikian, kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini, tetapi juga diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Ekosistem tersebut kemudian melahirkan negarawan yang mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi kebijakan negara. Kepemimpinan berkembang menuju paradigma **Wali Raja**, yaitu kepemimpinan yang memandang seluruh sumber daya bangsa sebagai amanah untuk menghadirkan kehidupan yang semakin bermartabat. Dalam paradigma tersebut, keberhasilan pembangunan tidak lagi dinilai hanya dari banyaknya proyek fisik, tetapi dari meningkatnya kualitas manusia, menguatnya masyarakat, hadirnya keadilan, tumbuhnya kesejahteraan, dan berkembangnya peradaban.

Seluruh indikator tersebut memperoleh arah dari **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**. Sebagai inti sistem kehidupan nasional, Pancasila memastikan bahwa kebahagiaan dibangun di atas Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kebahagiaan tidak dipisahkan dari moralitas. Kemajuan tidak dipisahkan dari kemanusiaan. Kekayaan tidak dipisahkan dari keadilan. Sebagai *kernel* bangsa, Pancasila menjadi standar nilai yang memberi makna terhadap setiap indikator pembangunan.

Selanjutnya, **konstitusi sebagai *firmware* negara** menyediakan kerangka kelembagaan agar seluruh indikator tersebut dapat diwujudkan melalui

penyelenggaraan negara. Perlindungan terhadap rakyat, kepastian hukum, pengelolaan kekayaan nasional, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi memperoleh dasar konstitusional yang jelas. *Firmware* negara memastikan bahwa orientasi pembangunan tetap konsisten meskipun menghadapi perubahan zaman dan pergantian kepemimpinan.

Semua itu berlangsung di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara menyediakan lingkungan tempat seluruh nilai tersebut tumbuh menjadi budaya kehidupan. Gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap alam, penghargaan terhadap ilmu, dan semangat hidup bersama membentuk sistem operasi yang menjadikan kebahagiaan sebagai pengalaman kolektif, bukan sekadar pencapaian individu. Kehidupan yang baik tidak diukur dari seberapa banyak seseorang memiliki, tetapi dari seberapa besar masyarakat mampu hidup bersama dalam keadilan, keamanan, dan keharmonisan.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, mengukur kebahagiaan bangsa berarti mengembalikan ukuran keberhasilan pembangunan kepada tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, ukuran tersebut membebaskan bangsa dari ketergantungan terhadap indikator yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save* Nusantara**, ukuran kebahagiaan menjadi kompas yang

memastikan bahwa setiap kebijakan hari ini benar-benar memperkuat keberlanjutan manusia, negara, dan Peradaban Nusantara.

Dengan demikian, kebahagiaan bangsa bukanlah konsep yang abstrak ataupun sekadar cita-cita moral. Kebahagiaan dapat diukur melalui kualitas manusia, masyarakat, negara, ekonomi, dan peradaban yang saling menguatkan. Ketika **Pancasila menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi menjadi *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara menjadi *operating system* kehidupan berbangsa**, maka keberhasilan Indonesia tidak lagi hanya tercermin pada besarnya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi pada lahirnya kehidupan yang semakin adil, aman, sejahtera, bermartabat, dan membahagiakan seluruh rakyat. Inilah ukuran keberhasilan yang selayaknya menjadi arah perjalanan menuju **Nusantara Adikuasa Kebahagiaan**.

30.4. Nusantara Adikuasa Kebahagiaan

Setiap bangsa memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan melalui perjalanan sejarahnya. Sebagian bangsa bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi terbesar. Sebagian lain berusaha menjadi negara dengan teknologi paling maju atau kekuatan militer paling dominan. Berbagai tujuan tersebut merupakan pilihan strategis yang lahir dari pengalaman sejarah masing-masing bangsa. Indonesia tentu memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat, penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi, teknologi yang maju, serta pertahanan negara yang tangguh. Namun seluruh pencapaian tersebut sesungguhnya bukanlah tujuan

akhir. Seluruhnya merupakan instrumen yang harus diarahkan kepada tujuan yang lebih luhur, yaitu menghadirkan kehidupan yang semakin membahagiakan bagi seluruh rakyat. Dari cara pandang tersebut lahirlah gagasan **Nusantara Adikuasa Kebahagiaan**.

Istilah *adikuasa* dalam bab ini tidak dimaknai sebagai dominasi terhadap bangsa lain ataupun kemampuan memaksakan kehendak melalui kekuatan ekonomi dan militer. Adikuasa dipahami sebagai kemampuan sebuah bangsa menghadirkan kualitas kehidupan yang unggul sehingga menjadi teladan bagi dunia. Bangsa yang mampu menciptakan manusia berkarakter, masyarakat yang harmonis, negara yang adil, ekonomi yang berkeadilan, ilmu pengetahuan yang maju, lingkungan yang lestari, dan peradaban yang terus berkembang sesungguhnya telah menunjukkan bentuk kekuatan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar keunggulan material. Kekuatan seperti itu tidak lahir dari rasa takut, tetapi dari penghormatan. Tidak lahir dari dominasi, tetapi dari keteladanan.

Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kekayaan alam yang melimpah, keberagaman budaya, jumlah penduduk yang besar, posisi geopolitik yang strategis, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa merupakan fondasi yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Namun seluruh potensi tersebut hanya akan menjadi sumber daya yang tidak bernilai apabila tidak dikelola oleh manusia yang memiliki karakter,

ilmu pengetahuan, integritas, dan visi kebangsaan. Karena itu, kekuatan terbesar Indonesia sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas manusianya.

Seluruh pembahasan dalam buku ini sejak awal bergerak menuju kesimpulan tersebut. Kebangkitan bangsa dimulai dari manusia yang memahami amanah sebagai **Khalifatullah**. Kesadaran tersebut mengubah cara memandang kehidupan. Pekerjaan dipahami sebagai pengabdian. Ilmu pengetahuan menjadi jalan menghadirkan kemaslahatan. Kepemimpinan menjadi bentuk pelayanan. Kekayaan menjadi amanah yang harus memberi manfaat bagi masyarakat. Perubahan pada tingkat manusia kemudian melahirkan keluarga yang lebih kuat, masyarakat yang lebih produktif, dan budaya yang lebih sehat.

Dari masyarakat yang bertumbuh lahirlah ***Root Users***, yaitu warga negara yang menjadi akar kehidupan bangsa. *Root Users* menjaga nilai-nilai kehidupan melalui keteladanan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan semangat gotong royong. Kehadiran *Root Users* membuat perubahan tidak bergantung sepenuhnya kepada negara. Energi pembangunan tumbuh dari masyarakat sendiri. Kepercayaan sosial meningkat. Produktivitas berkembang. Inovasi lahir dari berbagai lapisan masyarakat. Bangsa yang memiliki *Root Users* dalam jumlah yang memadai akan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai tantangan zaman.

Fondasi tersebut diperkuat oleh **System Guardians** yang menjaga agar arah perjalanan bangsa tetap berada di dalam koridor nilai-nilai peradaban.

Ilmu pengetahuan terus dikembangkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta teknologi. Budaya dipelihara agar modernisasi tidak menghapus identitas nasional. Spiritualitas dijaga agar kemajuan material tidak menghilangkan dimensi moral. Patriotisme dipupuk agar setiap kemajuan diarahkan untuk memperkuat kepentingan bangsa. Kehadiran System Guardians memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dan tidak kehilangan arah.

Ekosistem tersebut kemudian melahirkan negarawan yang memahami hubungan antara manusia, negara, dan peradaban sebagai satu kesatuan yang utuh. Negara tidak lagi dipandang sekadar sebagai organisasi kekuasaan, tetapi sebagai instrumen yang mengelola amanah rakyat menuju kehidupan yang lebih baik. Dari kepemimpinan negarawan berkembang paradigma **Wali Raja**, yaitu kepemimpinan yang menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, kelestarian alam, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam paradigma tersebut, keberhasilan tidak diukur dari lamanya kekuasaan bertahan, melainkan dari bertambahnya kualitas hidup rakyat.

Pada titik inilah Nusantara Adikuasa Kebahagiaan memperoleh makna yang utuh. Indonesia tidak diarahkan untuk menjadi bangsa yang paling kaya apabila kekayaan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Indonesia juga tidak diarahkan menjadi bangsa yang paling kuat apabila kekuatan tersebut dibangun dengan mengorbankan keadilan. Indonesia tidak pula mengejar kemajuan

teknologi apabila kemajuan tersebut justru memperlemah kemanusiaan. Nusantara Adikuasa Kebahagiaan menghendaki seluruh kemajuan berjalan secara serempak sehingga manusia, masyarakat, negara, ekonomi, dan peradaban berkembang dalam keseimbangan.

Cita-cita tersebut memperoleh fondasi filosofis dari **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**. Sebagaimana *kernel* menjadi inti yang mengatur seluruh fungsi dalam sebuah sistem, Pancasila menjadi sumber nilai yang mengarahkan seluruh perjalanan Indonesia. Ketuhanan menghadirkan integritas. Kemanusiaan menjaga martabat setiap warga negara. Persatuan memperkuat solidaritas nasional. Kerakyatan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan melalui kebijaksanaan. Keadilan Sosial menjadi tujuan yang harus diwujudkan dalam seluruh bidang kehidupan. Sebagai *kernel* bangsa, Pancasila memastikan bahwa setiap kemajuan selalu memiliki orientasi moral.

Nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam penyelenggaraan negara melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**. *Firmware* negara menyediakan kerangka kelembagaan yang memungkinkan cita-cita kebangsaan diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik, pelayanan negara, perlindungan terhadap rakyat, pengelolaan kekayaan nasional, serta pembangunan yang berkelanjutan. Konstitusi menjadi penghubung antara nilai-nilai Pancasila dengan praktik penyelenggaraan negara sehingga seluruh institusi bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.

Seluruh proses tersebut berlangsung di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**. Peradaban Nusantara bukan hanya kumpulan warisan budaya, melainkan sistem nilai yang menghidupkan seluruh aktivitas bangsa. Gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap alam, penghargaan terhadap ilmu, semangat kebersamaan, dan keseimbangan antara material serta spiritual menjadi sistem operasi yang memungkinkan Indonesia berkembang tanpa kehilangan jati diri. Dengan sistem operasi tersebut, modernisasi tidak berarti westernisasi, dan globalisasi tidak berarti kehilangan identitas nasional.

Apabila seluruh perjalanan tersebut diwujudkan secara konsisten, Indonesia akan memiliki bentuk kekuatan yang berbeda dari berbagai negara besar di dunia. Dunia mungkin mengenal negara yang unggul dalam teknologi, ekonomi, atau militer. Namun Indonesia dapat menghadirkan model baru mengenai negara yang unggul karena mampu membangun manusia yang berkarakter, masyarakat yang harmonis, negara yang dipercaya rakyat, ekonomi yang berkeadilan, serta peradaban yang tetap menjaga keseimbangan dengan alam dan nilai-nilai kemanusiaan. Bentuk kekuatan seperti itulah yang layak disebut sebagai adikuasa kebahagiaan.

Dalam perspektif **Restore Indonesia**, Nusantara Adikuasa Kebahagiaan berarti mengembalikan seluruh penyelenggaraan negara kepada tujuan kemerdekaan sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dalam perspektif ***Free* Indonesia**, Nusantara Adikuasa

Kebahagiaan membebaskan bangsa dari paradigma pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa membangun kualitas manusia dan peradaban. Selanjutnya, dalam perspektif ***Save*** **Nusantara**, Nusantara Adikuasa Kebahagiaan menjadi komitmen untuk mewariskan Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, lebih berbudaya, lebih berilmu, dan lebih bermartabat kepada generasi-generasi yang akan datang.

Buku ini dimulai dengan pertanyaan mengenai hakikat negara dan perjalanan bangsa Indonesia menuju bentuk kenegaraan yang mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Perjalanan tersebut membawa pembahasan mengenai manusia sebagai **Khalifatullah**, lahirnya ***Root Users***, tumbuhnya **System Guardians**, pentingnya negarawan, paradigma **Wali Raja**, gagasan **Indonesia Baru**, visi **Gemah Ripah Loh Jinawi**, hingga akhirnya bermuara pada **Nusantara Adikuasa Kebahagiaan**. Seluruh gagasan tersebut bukan kumpulan konsep yang berdiri sendiri, melainkan mata rantai yang saling menguatkan dalam membangun sebuah bangsa yang berkeadaban.

Pada akhirnya, kebesaran Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa tinggi gedung-gedung yang dibangun, seberapa besar cadangan sumber daya alam yang dimiliki, ataupun seberapa besar kekuatan ekonomi yang berhasil dicapai. Kebesaran Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan menghadirkan kehidupan yang membuat setiap warga negara merasa aman, dihormati martabatnya, memperoleh keadilan, memiliki kesempatan berkembang, hidup

berdampingan dengan alam secara harmonis, serta mewariskan peradaban yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Ketika **Pancasila menjadi *kernel* bangsa**, **konstitusi menjadi *firmware* negara**, dan **Peradaban Nusantara menjadi *operating system* kehidupan berbangsa**, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang maju, tetapi akan tumbuh sebagai **Nusantara Adikuasa Kebahagiaan**, sebuah bangsa yang menunjukkan kepada dunia bahwa ukuran tertinggi keberhasilan negara bukanlah kekuasaan, melainkan kemampuan menghadirkan kebahagiaan yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya.

EPILOG
Mentari Terbit Pagi Ini

Bangsa-bangsa besar tidak pernah lahir karena keberuntungan semata. Kebangkitan selalu dimulai ketika sebuah bangsa berani melihat dirinya sendiri dengan jujur, mengakui kesalahan yang telah berlangsung lama, kemudian memiliki keberanian untuk memperbaikinya. Sejarah dunia menunjukkan bahwa tidak ada negara yang selamanya berada dalam kejayaan, sebagaimana tidak ada pula bangsa yang ditakdirkan hidup dalam keterpurukan untuk selama-lamanya. Setiap peradaban mengalami siklus kelahiran, pertumbuhan, kemunduran, dan kebangkitan. Indonesia pun tidak berada di luar hukum sejarah tersebut.

Selama perjalanan buku ini, berbagai persoalan ketatanegaraan telah dibahas bukan untuk menumbuhkan pesimisme, melainkan untuk menunjukkan bahwa akar persoalan dapat dikenali. Bangsa yang memahami sumber penyakit akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesembuhan. Sebaliknya, bangsa yang hanya sibuk mengobati gejala akan terus mengulang kesalahan yang sama dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai negara, konstitusi, kedaulatan rakyat, kepemimpinan, ekonomi, hingga peradaban bukanlah rangkaian kritik tanpa arah, melainkan upaya menyusun kembali fondasi Indonesia agar mampu berdiri lebih kokoh.

Negara bukanlah takdir yang tidak dapat diubah. Negara merupakan hasil kesepakatan manusia untuk mengatur kehidupan bersama. Bentuk kelembagaan, distribusi kewenangan, hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara, bahkan mekanisme pengambilan keputusan merupakan hasil dari pilihan-pilihan kekuasaan dan konstitusional. Karena merupakan hasil pilihan, seluruhnya dapat dievaluasi ketika tidak lagi mampu mewujudkan tujuan bernegara. Tidak ada alasan untuk mempertahankan sebuah sistem hanya karena telah berlangsung lama apabila sistem tersebut tidak lagi menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat.

Demikian pula dengan konstitusi. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi konstitusi bukanlah kitab suci yang berada di luar ruang dan waktu. Konstitusi disusun oleh manusia untuk melayani kehidupan manusia. Oleh sebab itu, konstitusi harus selalu mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi jati diri bangsa. Menghormati konstitusi tidak berarti menolak perubahan. Justru penghormatan tertinggi terhadap konstitusi diwujudkan melalui keberanian menyempurnakan berbagai ketentuan yang terbukti tidak lagi mampu mengantarkan bangsa menuju cita-cita kemerdekaan.

Kesadaran tersebut membawa optimisme bahwa sistem kenegaraan juga dapat diperbaiki. Tidak ada sistem yang sempurna sejak awal. Seluruh negara di dunia mengalami proses pembelajaran melalui berbagai

perubahan kelembagaan, penyempurnaan konstitusi, pembaruan hukum, dan penguatan budaya pemerintahan. Indonesia pun memiliki kesempatan yang sama. Perbaikan tidak harus dimulai dengan membongkar seluruh bangunan negara, melainkan dengan keberanian mengembalikan setiap unsur kepada fungsi yang seharusnya. Ketika arah diperbaiki, struktur disempurnakan, dan nilai-nilai dasar dihidupkan kembali, sistem akan mulai bergerak menuju keadaan yang lebih sehat.

Namun perubahan kelembagaan saja tidak pernah cukup. Bangsa selalu dibangun oleh manusia. Karena itu, harapan terbesar Indonesia sesungguhnya berada pada tumbuhnya kesadaran rakyat. Rakyat yang memahami hakikat negara tidak lagi sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi berkembang menjadi subjek yang menjaga kehidupan berbangsa. Kesadaran seperti itu melahirkan manusia-manusia yang tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diperjualbelikan suara dan pikirannya, serta tidak mudah menyerahkan masa depan bangsa kepada kepentingan-kepentingan sesaat. Kesadaran tersebut menjadi fondasi bagi lahirnya ***Root Users***, yaitu warga negara yang menjaga arah perjalanan bangsa dari dalam kehidupan masyarakat.

Perjalanan tersebut kemudian memerlukan manusia-manusia yang bersedia menjadi **System Guardians**, menjaga ilmu pengetahuan, budaya, spiritualitas, patriotisme, dan etika agar tetap menjadi penuntun pembangunan. Dari lingkungan seperti itu lahirlah negarawan yang memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai hak istimewa.

Kepemimpinan berkembang menuju paradigma **Wali Raja**, yaitu kepemimpinan yang menjaga keseimbangan antara negara, rakyat, dan peradaban. Ketika seluruh mata rantai tersebut saling menguatkan, Indonesia tidak hanya memiliki pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga memiliki masyarakat yang semakin dewasa.

Seluruh perjalanan tersebut memperoleh arah dari **Pancasila sebagai *kernel* bangsa**. Sebagai inti kehidupan nasional, Pancasila bukan sekadar simbol yang dihafalkan, melainkan sumber nilai yang menghidupkan seluruh sistem kehidupan berbangsa. Ketika *kernel* bekerja sebagaimana mestinya, seluruh komponen lain akan memperoleh arah yang benar. Ketuhanan menghadirkan integritas. Kemanusiaan menjaga martabat. Persatuan memperkuat kohesi bangsa. Kerakyatan menghadirkan kebijaksanaan. Keadilan Sosial menjadi tujuan bersama. Mengembalikan Pancasila kepada posisinya sebagai *kernel* bangsa berarti mengembalikan orientasi Indonesia kepada cita-cita yang melahirkan negara ini.

Nilai-nilai tersebut diterjemahkan melalui **konstitusi sebagai *firmware* negara**. *Firmware* yang sehat memungkinkan negara bekerja secara efektif, adil, dan konsisten dalam melayani rakyat. Selanjutnya, seluruh kehidupan nasional bergerak di dalam **Peradaban Nusantara sebagai *operating system* kehidupan berbangsa**, sebuah sistem nilai yang menghubungkan kemajuan dengan kemanusiaan, teknologi dengan etika, kekayaan dengan keadilan, serta pembangunan dengan keberlanjutan. Ketika ketiga fondasi tersebut kembali bekerja secara selaras,

Indonesia tidak hanya mempertahankan identitasnya, tetapi juga menemukan kembali arah perjalanannya.

Dengan demikian, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh pesimisme terhadap keadaan hari ini. Masa depan Indonesia ditentukan oleh keberanian untuk memulai perubahan hari ini. Setiap generasi selalu memperoleh kesempatan untuk meninggalkan warisan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Tugas tersebut tidak selalu mudah, tetapi sejarah membuktikan bahwa setiap kebangkitan besar selalu dimulai oleh sekelompok kecil manusia yang berani berpikir melampaui zamannya, berani mengabdi tanpa pamrih, dan berani menjaga harapan ketika sebagian besar orang memilih menyerah.

Mentari selalu terbit setiap pagi tanpa pernah meminta jaminan bahwa hari akan berjalan sempurna. Cahaya pertama tidak pernah langsung mengusir seluruh kegelapan, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. Demikian pula perjalanan bangsa ini. Indonesia tidak memerlukan keajaiban. Indonesia memerlukan arah yang benar, manusia yang benar, dan keberanian untuk melangkah bersama. Ketika langkah pertama telah diambil, harapan akan tumbuh. Ketika harapan tumbuh, perubahan mulai bergerak. Ketika perubahan bergerak, sejarah baru mulai ditulis.

Jika *root access* kembali kepada pemilik sahnya, bangsa ini bukan hanya bisa pulih bahkan bangsa ini bisa melampaui bayangannya sendiri.